• M. Anna Martini • Mujiono • Sri Margaretha
• Aji Sumakno • P. Gianto

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 2

untuk SMP/MTs Kelas VIII

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL 2

Untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis : M. Anna Martini
Mujiono
Sri Margaretha
Aji Sumakno F.
P. Gianto

Editor : Jeremias Jena
Dwi Klarasari
Dwianta Edi P

Ilustrasi, Tata Letak : Herman Sriwijaya, Agus Safitri

Perancang Kulit : Oric Nugroho Jati

Sumber Kulit : *Jakarta Kini-Agustus 1998*; *Indonesia Untaian Manikam di Katulistiwa*

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

300.7
ILM Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 2: SMP/MTs Kelas VIII / oleh M. Anna Martini...[et al]. -- Jakarta :
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
vi, 282 hlm. :
Bibliografi : hlm. 276
Indeks
ISBN 978-979-068-103-3 (No.Jil.Lengkap)
ISBN 978-979-068-107-1
1. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 I. Judul
II. Mujiono. III. Margaretha, Sri. IV. Sumakno, Aji
V. Gianto, P.

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI sampai SMP/MTs. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

Buku *Ilmu Pengetahuan Sosial 2 untuk SMP/MTs kelas VIII* ini disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi-materi yang dibahas dalam buku ini adalah (1) Permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk; (2) Proses kebangkitan nasional. (3) Penyimpangan sosial; (4) Kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat; (5) Usaha persiapan kemerdekaan; (6) Pranata dan penyimpangan sosial; (7) Kegiatan perekonomian Indonesia.

Materi IPS SMP sangat bervariasi dan menuntut keahlian dari setiap pengajar. Karena itu, pembelajaran IPS di tingkat SMP seharusnya dilaksanakan secara team (*team teaching*) yang melibatkan guru-guru yang ahli dan terampil dalam bidang ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi.

Buku ini memang tidak disusun secara tematik, dalam arti merancang sebuah tema yang menjadi jembatan penghubung berbagai kompetensi yang dituntut Standar Isi. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai sebuah kekurangan. Di sisi lain, buku ini pun lebih berkesempatan untuk membahas tiap kompetensi secara menyeluruh dan lebih dalam.

Kami mengusulkan beberapa langkah pengajaran sekaligus hendak mengusung kelebihan buku ini.

a. **Penyajian kasus tiap awal bab.** Dengan membahas kasus terlebih dahulu , siswa diharapkan mampu menghubungkan kenyataan dengan teori-teori di buku. Di sinilah *entry point* bagi pengajaran IPS, sekaligus yang menjadi maksud utama dari desain pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai pusat pembelajaran itu sendiri.
b. **Mendiskusikan dengan sederhana** teori-teori yang terdapat dalam buku. Carilah contoh-contoh mudah yang terdapat di sekeliling kehidupan siswa untuk mempermudah pengertian mereka.
c. **Tukar menukar pendapat** dengan siswa mengenai proses pembelajaran yang telah mereka lewati sangat penting. Siswa menjadi berani berpendapat dan bicara.
d. **Mengutamakan proses.** Buku ini tidak menuntut siswa untuk mengafal mati setiap materi. Justru dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan tugas yang menantang sekaligus merangsang daya pikir dan kreasi, pada akhir proses pembelajaran, siswa akan mengerti --bukan menghafal-- pelajaran yang tersaji.
e. **Pengetahuan umum terkini**. Berbagai pengetahuan umum yang mencerdaskan siswa kami selipkan di berbagai materi buku ini.
f. **Pengetahuan tanpa nilai bisa berbahaya**. Oleh sebab itu, kami selalu mengharapkan agar para guru dan siswa dapat berinteraksi mencari nilai yang terbaik. Siswa dituntun untuk melihat dunia dari kaca mata orang lain, hal ini diharapkan mampu memancing empati dan kerendahan hati siswa.
g. **Laksanakan evaluasi atau Uji Kompet ensi Dasar secara konsekuen**. Latihan pada bagian ini didesain sebegitu rupa sehingga siswa akan mengalami sendiri bagaimana IPS "dioperasikan" dalam kehidupan nyata.
h . **Jadikan Uji Standar Kompetensi sebagai indikator** untuk menentukan apakah para siswa sudah kompeten dalam mempelajari beberapa Kompetensi Dasar (KD).

Sebagai penulis dan guru, kami berharap buku ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan siswa dalam mempelajari bidang ilmu pengetahuan sosial secara utuh.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini kami nantikan. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah bersusah payah demi terbitnya buku ini.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

Daftar Isi

Bab 1 Masalah Sosial dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sumber: *ilustrasi bagian produksi*, 2007

PENDAHULUAN

Di manakah negara kita berada? Negara kita ternyata berada antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Lokasi fisik Indonesia pun berdampak pada banyak hal, misal iklim, cuaca, hingga jenis tanah, dan jenis binatang di nusantara ini.

Di Indonesia juga berdiam manusia. Manusia tersebut dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Di sinilah, penduduk Indonesia (atau kita) lahir, berkembang, dan tutup usia. Adalah penting untuk mengikuti perkembangan dan kondisi penduduk Indonesia agar bisa merencanakan upaya peningkatan taraf hidup kita.

Dengan memperhatikan kondisi dan masalah kependudukan di Indonesia, kita diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup. Hal ini bisa diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, kematian dan lain sebagainya.

Untuk menaikkan kualitas hidup itu, tidak hanya kondisi manusia yang harus diperhitungkan, tetapi juga lingkungan hidup. Dengan memiliki dan melestarikan lingkungan hidup yang ada, kualitas manusia juga dapat meningkat.

Peta Konsep
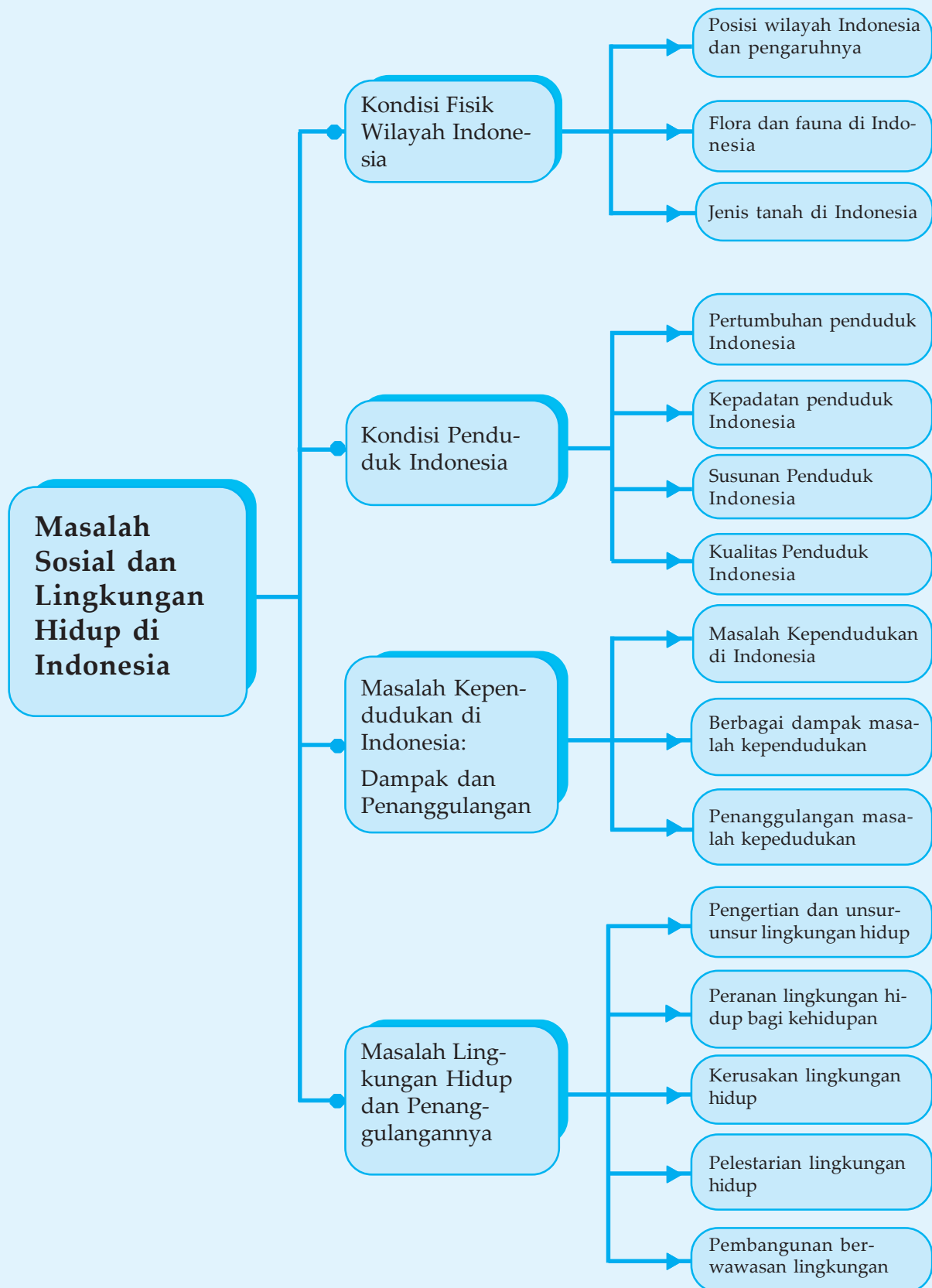
Masalah Sosial dan Lingkungan Hidup di Indonesia
Kondisi Fisik Wilayah Indonesia
Posisi wilayah Indonesia dan pengaruhnya
Flora dan fauna di Indonesia
Jenis tanah di Indonesia
Kondisi Penduduk Indonesia
Pertumbuhan penduduk Indonesia
Kepadatan penduduk Indonesia
Susunan Penduduk Indonesia
Kualitas Penduduk Indonesia
Masalah Kependudukan di Indonesia: Dampak dan Penanggulangan
Masalah Kependudukan di Indonesia
Berbagai dampak masalah kependudukan
Penanggulangan masalah kepedudukan
Masalah Lingkungan Hidup dan Penanggulangannya
Pengertian dan unsur-unsur lingkungan hidup
Peranan lingkungan hidup bagi kehidupan
Kerusakan lingkungan hidup
Pelestarian lingkungan hidup
Pembangunan berwawasan lingkungan

Adakah terlintas di benakmu berbagai hal berkaitan dengan unsur fisik negara kita? *Pertama*, tentang posisi wilayah dan pengaruh yang ditimbulkannya. Bagaimana posisi Indonesia? Mengapa hanya musim hujan dan kemarau yang datang silih berganti?

Kedua, tentang berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia. Meskipun beragam, tidak semua jenis flora dan fauna dapat ditemui merata di setiap daerah. Mengapa demikian?

Ketiga, tentang tanah di Indonesia. Jenis-jenis tanah seperti apa yang terdapat di Indonesia dan bagaimana persebarannya?

Ketiga unsur fisik tersebut akan dipelajari dalam subbab ini. Sebelumnya, bukalah wawasanmu dengan melakukan diskusi kelompok!

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Sebutkan posisi wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis!
2. Sebutkan jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia! Berikan pengelompokan!
3. Sebutkan beberapa jenis tanah yang terdapat di Indonesia?

Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas!

Negara kita sering disebut sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Tanah yang subur, flora dan fauna yang beragam, serta cuaca yang cerah sepanjang satu semester tiap tahun menjadi salah satu daya tarik negara ini.

Ternyata berbagai kelebihan tadi dipengaruhi oleh posisi wilayah Indonesia. Di mana sebenarnya posisi kita? Untuk mempermudah penentuan itu, para ilmuwan menandakan garis lingkaran imajiner dari bumi sebelah timur ke barat yang tidak saling berpotongan, disebut **garis lintang.** Dari kutub utara dan kutub selatan pun dibuat garis yang dikenal dengan nama **garis bujur.**

1.1.1 Posisi Wilayah Indonesia dan Pengaruhnya

Posisi suatu negara sangat ditentukan oleh letak astronomis dan letak geografis. Bagaimana kedua letak tersebut memberikan ciri khusus?

A. Letak astronomis Indonesia

Letak astronomis adalah letak tempat berkaitan dengan garis lintang dan bujur. Kedua garis tersebut dibuat oleh para ilmuwan dunia dengan menghitungkan keberadaan matahari dan bintang (secara astronomis).

Menurut perhitungan itu, wilayah Indonesia terletak di antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141°BT. Batas letak astronomis wilayah Indonesia berada pada daerah berikut.

- Pulau Papua (batas dengan Papua Nugini) adalah batas untuk Bujur Timur (141°BT).
- Pulau We adalah batas Bujur Barat (95°BB) dan batas untuk LintangUtara (6°LU).
- Pulau Roti (NTT) adalah batas untuk Lintang Selatan (11°LS).

Berbagai pengaruh yang ada oleh letak astronomis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pengaruh akibat letak lintang

Karena letak lintangnya, Indonesia mendapat pengaruh iklim tropis, sebagai berikut.

- Hanya memiliki dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
- Memiliki curah hujan dan kelembaban tinggi, akibatnya Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan segala potensinya.
- Pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun (temperatur rata-rata 26,3°C).
- Panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun.

b. Pengaruh akibat letak bujur

Karena wilayahnya menempati 95° BT -141° BT, Indonesia memiliki tiga daerah waktu. Bagaimana hal itu terjadi? Setiap selang 15° terdapat selang waktu satu jam, sebab setiap satu jam, bumi berputar sejauh 15° (360°/24). Jadi, Indonesia yang memiliki lebar bujur 46° terbagi menjadi tiga daerah waktu.

Berpedoman pada 0° yang ditetapkan di *Greenwich (Greenwich Mean Time*/GMT), Inggris, tiga daerah waktu Indonesia adalah sebagai berikut.

- Waktu Indonesia Barat (WIB) = GMT + 7 jam, meliputi Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat dan Tengah.
- Waktu Indonesia Tengah (WITA) = GMT + 8 jam, meliputi Kalimantan Timur dan Selatan, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara.
- Waktu Indonesia Timur (WIT) = GMT + 9 jam, meliputi Maluku dan Papua.

B. Letak geografis Indonesia

Letak geografis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari kenyataannya di muka bumi. Letak tersebut berkaitan dengan posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Kondisi geografis dipengaruhi letak astronomis. Perhatikan **gambar 1.1.1** berikut!

Gambar 1.1.1
Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua

Oleh pengaruh letak astronomis, secara geografis Indonesia berada pada posisi strategis. Indonesia terletak di antara dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) dan dua benua (Benua Asia dan Benua Australia).

Posisi strategis Indonesia memberikan berbagai pengaruh sebagai berikut.

- Indonesia dipengaruhi oleh angin muson sehingga musim berganti tiap enam bulan sekali.
- Indonesia berada pada pertemuan dua jalur pegunungan muda. Akibatnya memiliki banyak gunung api, rawan terhadap gempa bumi, dan kaya bahan tambang.
- Posisi di antara dua samudera menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional.
- Posisi di antara dua benua membuat Indonesia memiliki keanekaragaman flora fauna, serta keuntungan politis.

Secara keseluruhan Indonesia terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Namun dalam lingkup kecil, setiap pulau memiliki batas geografis berbeda. Perhatikan kembali **gambar 1.1.1**!

Sebagai contoh:

- Pulau Sumatera dan Jawa berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian barat laut dan selatan, namun tidak demikian dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- Pulau Papua berbatasan dengan Samudera Pasifik di bagian utara. Di bagian selatan Papua dan Nusa Tenggara berbatasan dengan Benua Australia, sedangkan pulau-pulau di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Benua Asia.

C. Perubahan musim Indonesia akibat letaknya

Bagaimana posisi memengaruhi terjadinya perubahan musim di Indonesia?

a. Indonesia di wilayah iklim tropis

Pembagian daerah iklim dunia berdasarkan penyinaran matahari adalah sebagai berikut.

- Iklim tropis ($23^1/_2$° LU – $23^1/_2$° LS), memiliki dua musim.
- Iklim subtropis ($23^1/_2$° – 35° LU/LS), dengan musim dingin samar-samar.
- Iklim sedang (35° – $66^1/_2$° LU/LS), memiliki empat musim: panas, gugur, dingin, dan semi.
- Iklim kutub ($66^1/_2$° - 90° LU/LS), mengalami dingin sepanjang tahun. Suhu ≤ 10°C.

Wilayah Indonesia berada pada daerah iklim tropis, karena berada pada daerah lintang antara $23^1/_2$° LU – $23^1/_2$° LS. Lihat **gambar 1.1.2** di bawah untuk mengetahui letak Indonesia berkaitan dengan iklimnya!
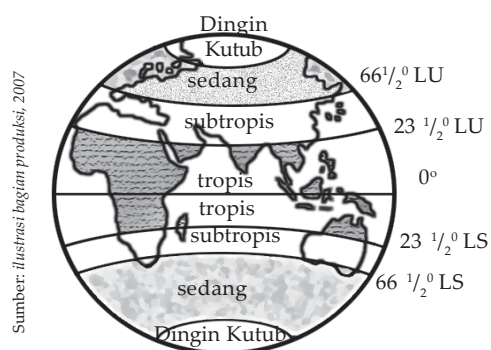
Gambar 1.1.2
Pembagian iklim menurut penyinaran Matahari

Dari **gambar 1.1.2** kamu dapat melihat beberapa negara lain yang termasuk dalam daerah iklim tropis. Namun, meskipun berada dalam satu wilayah iklim ternyata perubahan musim di Indonesia tidak tepat sama dengan negara-negara tropis lain. Hal itu dipengaruhi oleh letak geografis!

b. Ciri-ciri musim di Indonesia

Musim adalah periode dalam satu tahun dengan karakteristik iklim tertentu. Dalam kondisi normal, Indonesia mengalami musim hujan dan kemarau secara bergantian tiap enam bulan sekali.

1. *Musim hujan di Indonesia*

Musim hujan adalah periode saat suatu daerah mengalami banyak hujan. Pada musim hujan curah hujan rata-rata dalam sebulan dapat mencapai 150 mm atau lebih.

Sebagian besar wilayah Indonesia berpeluang mengalami musim hujan pada periode Oktober – April. Curah hujan semakin meningkat pada bulan November, lalu menurun mendekati bulan April. Namun, periode tersebut tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, sebagian daerah di Indonesia bagian barat mengalami musim hujan lebih cepat daripada bagian timur.

Berbagai aktivitas penduduk dan kejadian yang mewarnai musim hujan adalah sebagai berikut.

- Musim hujan merupakan periode kegiatan bercocok tanam. Pada awal musim hujan, para petani mulai menyemai benih, terutama jenis yang memerlukan cukup air dalam pertumbuhannya, seperti padi.
- Jumlah air sungai periodik meningkat, dan sering kali membawa dampak negatif seperti terjadinya banjir dan longsor di berbagai tempat.
- Aktivitas manusia di luar ruangan cenderung berkurang, terutama jika curah hujan tinggi dan berlangsung sepanjang hari.

2. *Musim kemarau di Indonesia*

Musim kemarau adalah suatu periode saat suatu daerah tidak menerima hujan. Kalaupun menerima hujan, jumlah curah hujan rata-rata rendah, yaitu kurang dari 150 mm per bulan.

Sebagian besar wilayah Indonesia berpeluang mengalami kemarau pada periode bulan April – Oktober. Berkurangnya curah hujan pada bulan April/Mei, pertanda dimulainya musim kemarau. Seperti halnya musim hujan, periode musim kemarau tidak bersifat mutlak. Apabila musim hujan berlangsung lebih lama, maka musim kemarau akan datang lebih lambat. Kadang kala musim kemarau dapat berlangsung berkepanjangan. Tidak semua daerah di Indonesia mengalami periode musim kemarau yang sama.

Sumber: *Majalah Tempo, 3-9 Des 2007*

Gambar 1.1.3
Saat musim kemarau sering terjadi kekeringan

Simaklah berbagai hal yang terjadi pada musim kemarau berikut ini!

- Pada musim kemarau, kegiatan pertanian di Indonesia masih dapat berlangsung. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang tidak memerlukan banyak air dalam pertumbuhannya, seperti ubi kayu, bawang, tembakau, cabai, dan lain-lain.
- Pada musim kemarau, banyak sungai, sumber air, serta sumur mengalami penurunan jumlah air atau cenderung kering. Akibatnya, terjadi kekurangan air di berbagai wilayah.
- Pada musim kemarau aktivitas di luar ruangan dapat berlangsung sepanjang hari. Namun berbagai gangguan harus dialami, terutama debu, dan panas. Pada musim kemarau sering kali terjadi kebakaran hutan.

3. *Masa pancaroba*

Masa pancaroba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah *mareng* (peralihan musim hujan ke musim kemarau) dan *labuh* (peralihan musim kemarau ke musim hujan). Pada umumnya pancaroba berlangsung pada bulan April atau Oktober.

Pada masa pancaroba, kondisi cuaca belum stabil. Suhu udara, arah angin, maupun curah hujan tidak teratur. Saat udara panas, secara tiba-tiba dapat terjadi hujan deras.

Ketidakstabilan cuaca pada masa pancaroba menyebabkan terjadinya penyebaran berbagai jenis penyakit, terutama gangguan pernafasan/flu.

4. *Penyimpangan terhadap pergantian musim*

Dalam keadaan normal, periode musim Indonesia adalah Oktober – April (musim hujan) dan April – Oktober (musim kemarau). Namun, kenyataannya pergantian musim tidak selalu berlangsung tepat sesuai periode itu. Kadang kala musim hujan datang lebih lambat di suatu tempat dan berlangsung lebih lama di tempat lain.

Terjadinya penyimpangan musim tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut.

- Pola pergerakan angin musim

Pola pergerakan angin musim di Indonesia memberikan curah hujan yang berbeda. Hujan turun bergeser dari bagian barat ke timur.

- ☑ Pantai barat Pulau Sumatera sampai dengan Bengkulu mendapat hujan terbanyak pada bulan November.
- ☑ Lampung – Bangka, mendapat hujan terbanyak pada bulan Desember.
- ☑ Jawa bagian utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, berpeluang mendapat curah hujan terbanyak periode Januari – Februari.

Curah hujan setiap bulan di wilayah pantai barat juga lebih banyak dibandingkan wilayah pantai timur.

- Perbedaan pola hujan di wilayah Indonesia

Letak lintang tiap wilayah memengaruhi pola angin dan pola hujan di wilayah tersebut.

- ☑ Daerah berpola ekuatorial, yaitu daerah ekuator (sebagian Kalimantan dan Sumatera), mendapat hujan **zenithal** dua kali dalam setahun. Hujan ini sering terjadi di daerah ekuator akibat pertemuan Angin Pasat Timur Laut dengan Angin Pasat Tenggara. Angin naik membentuk awan yang menjadi jenuh lalu menjadi hujan.
- ☑ Daerah berpola lokal, yaitu daerah yang dipengaruhi kondisi setempat. Misalnya terjadinya pemanasan lokal yang tidak seimbang terutama akibat adanya dataran tinggi dan pegunungan. Misalnya, wilayah Maluku, Papua, dan sebagian Sulawesi.

- Pengaruh angin siklon

Beberapa angin siklon bertiup di sekitar Indonesia, seperti di Samudera Hindia. Angin siklon yang terjadi di wilayah tropis itu menyebabkan terjadinya hujan lebat di berbagai wilayah Indonesia. Mengapa? Karena siklon memengaruhi pembentukan awan hujan. Hujan yang terus-menerus menyebabkan kemarau datang lebih lambat.

- Pengaruh ENSO

ENSO (*El-Nino Southern Oscillation)* atau dikenal sebagai *El-Nino* adalah kondisi *fluktuasi* lautan dan sistem atmosfer yang tidak teratur.

KILAS INFORMASI!

Nama ***El-Nino*** *ternyata berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak lelaki kecil. Anak lelaki kecil ini merujuk pada bayi Yesus. Pasalnya, angin ini biasa berembus pada bulan Desember, yakni menjelang Natal.*

Ketidakteraturan itu berhubungan dengan gerakan massa atmosfer di antara wilayah Indonesia (tekanan rendah) dan Pulau Paskah di Samudera Pasifik (tekanan tinggi).

El-Nino menyebabkan berbaliknya arus laut. Akibatnya wilayah Indonesia memasuki musim kemarau lebih awal atau sebaliknya periode kemarau berlangsung lebih panjang.

1.1.2 Morfologi Indonesia

Morfologi adalah ilmu tentang bentuk muka bumi, terkait dengan struktur luar batu-batuan dan perkembangan ciri topografi.

Lapisan kulit bumi yang sangat tipis (litosfer) disebut juga lempeng bumi. Lempeng itu selalu mengalami pergeseran dan pergerakan yang menimbulkan berbagai gejala tektonisme. Selain itu juga juga menimbulkan pengarug terbentuknya jalur pegunungan dan gunung api.

Wilayah Indonesia berada di daerah perbatasan dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Filipina. Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.

Coba perhatikan **gambar 1.1.4** di bawah ini!

Sumber: *Ilustrasi bagian produksi, 2007*

Gambar 1.1.4
Jalur pegunungan dunia yang sampai di Indonesia

Jalur Sirkum Pasifik sampai ke wilayah Indonesia, membentuk rangkaian Pegunungan Papua dan Halmahera.

Jalur Sirkum Mediterania sampai di Indonesia membentuk jalur Pegunungan Sunda. Jalur Pegunungan Sunda terbagi lagi menjadi dua jalur, yang dikenal sebagai busur luar dan busur dalam. Busur luar bersifat vulkanik sedangkan busur dalam bersifat nonvulkanik.

Busur luar yang bersifat nonvulkanik berada di tepi Kepulauan Indonesia, membentuk pulau-pulau kecil di sebelah barat Pulau Sumatera (Pulau

Simeuleu dan Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Sipora, Kepulauan Pagai dan Pulau Enggano), berlanjut ke selatan Pulau Jawa, Sumba, Sawu, Rote, Timor, Kepulauan Babar, Tanimbar, dan Kai, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Coba bukalah atlasmu dan ikuti jalur tersebut dengan mengecek keberadaan pulau-pulau tersebut pada peta.

Busur dalam yang bersifat vulkanik, membentuk jalur pegunungan dan gunung api. Pulau yang berada pada garis busur ini sebagian besar memiliki gunung api. Misalnya, Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, hingga Kepulauan Banda. Selain itu juga Pulau Sulawesi, Kepulauan Sangir Talaud, Tidore, Ternate, dan Papua. Coba buka kembali atlasmu dan temukan jalur tersebut!

Di Indonesia terdapat ratusan gunung api, yang sebagian besar berbentuk strato. Gunung api strato terjadi karena adanya timbunan-timbunan aliran lava atau erupsi eksplosif, diikuti dengan efusif (lelehan). Di kelas VII sudah kamu pelajari, bukan? Perhatikan **tabel 1.1.1** gunung api berikut!

Tabel 1.1.1
Gunung api yang ada di Indonesia

No.	Nama	Letak
1.	G. Marapi (2.891 m)	Sumatera Barat
2.	G. Talang (3.592 m)	Sumatera Barat
3.	G. Merapi (2.986 m)	Jawa Tengah dan DIY
4.	G. Mahameru (3.676 m)	Jawa Timur
5.	G. Agung (3.142 m)	Bali
6.	G. Egon (1.703 m)	Flores
7.	G. Lokon (3.592 m)	Sulawesi Utara
8.	G. Gamkonora (1.635 m)	Halmahera

Sumber: *wikipedia indonesia*

Coba bukalah atlasmu dan temukan lebih banyak gunung api yang ada di Indonesia!

Sekarang kamu sudah tahu, morfologi wilayah mengapa wilayah Indonesia banyak memiliki pegunungan dan gu-nung api. Berbagai gejala vulkanisme dan teknomisme rawan terjadi di wilayah Indonesia. Misalnya, letusan gunung api dengan gempa vulkanik yang mengawali atau menyertai. Pertemuan lempeng juga menjadikan wilayah Indonesia rawan gempa tektonik. Daerah rawan gempa tektonik, terutama berada pada jalur busur luar, meliputi:

- jalur pantai selatan Sumatera, pantai selatan Jawa, bali, Nusa Tenggara, hingga Timor.
- jalur Sulawesi utara, Maluku, hingga Papua.

Coba amati kembali **gambar 1.1.4**!

1.1.3 Jenis Tanah di Indonesia

Tanah *(soil)*, adalah lapisan teratas kulit bumi hasil akhir pelapukan batuan, tempat di mana manusia dan berbagai makhluk hidup lain berpijak. Ilmu tentang tanah adalah Pedologi.

A. Faktor yang memengaruhi pembentukan tanah

Batuan induk yang pecah oleh pengaruh cuaca, iklim, dan erosi kimia, lama-kelamaan akan menjadi butiran pasir. Setelah bercampur dengan berbagai bahan organik dan anorganik, akhirnya butiran tersebut akan membentuk tanah.

Berikut adalah berbagai faktor yang memengaruhi proses pembentukan tanah.

1. *Jenis batuan induk*

Batuan induk menentukan jenis mineral yang terkandung dalam tanah. Batuan induk mengalami proses pelapukan, pengikisan, dan pengangkutan serta pengendapan hingga menjadi jenis tanah tertentu.

2. *Relief dan topografi*

Relief dan topografi tempat memengaruhi aliran air yang melintasi batuan. Aliran air yang kuat memengaruhi erosi, genangan air mempercepat proses pembusukan, dan sebagainya.

3. *Iklim dan cuaca*

Berbagai unsur iklim dan cuaca terutama temperatur dan curah hujan memengaruhi tingkat pelapukan, proses pelarutan, dan sebagainya.
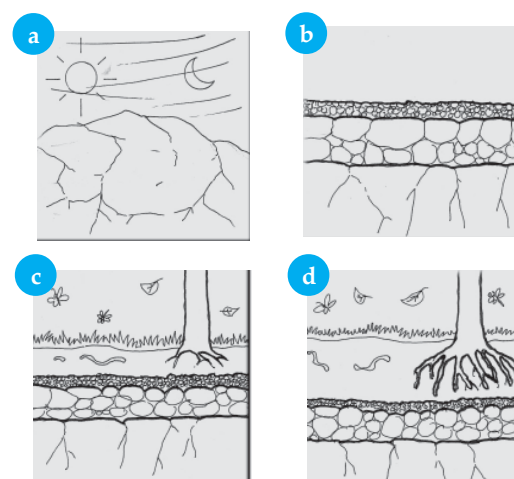
a. Batuan induk mengalami pengaruh iklim dan cuaca.
b. Batuan induk pecah dan mengalami pelapukan.
c. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme membantu pelapukan.
d. Semakin lama proses pelapukan, tanah yang terbentuk di bagian atas semakin tebal.

Gambar 1.1.5
Proses pembentukan tanah

4. *Aktivitas biologis*

Berbagai makhluk hidup (tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme) dan segala aktivitasnya memengaruhi proses pembentukan tanah.

5. *Jangka waktu*

Perbedaan lamanya waktu pembentukan tanah memengaruhi jenis tanah yang dihasilkan.

B. Karakteristik tanah

Faktor-faktor di atas berbeda pada setiap wilayah muka bumi. Akibatnya terbentuklah ratusan jenis tanah dengan ciri khusus. Misalnya:

- jenis tanah di daerah tropis, tua, dan dalam;
- jenis tanah di gurun, muda, dan dangkal;
- jenis tanah di daerah sedang, setengah tua, dan cocok untuk pertanian.

Sumber: *Ilustrasi bagian produksi, 2007 menurut Pertanyaan dan Jawaban Alam Semesta dan Bumi*
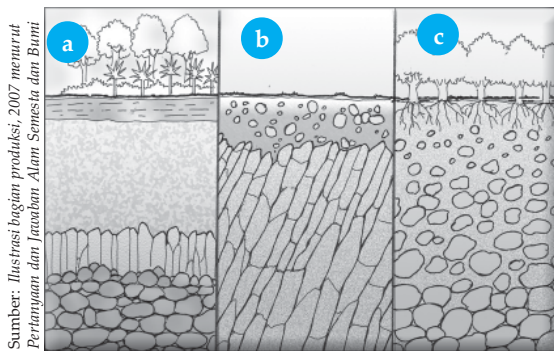
Gambar 1.1.6 *a) Tanah di daerah tropis b) Tanah di gurun c) Tanah di daerah sedang*

Banyak cara yang digunakan untuk mengelompokkan ratusan jenis tanah tersebut. Misalnya, pengelompokan berdasarkan:

- kandungan zat kimia;
- warna dan tekstur;
- jumlah materi organik yang terkandung dalam tanah, dan lain-lain.

Penelitian tanah mula-mula dilakukan oleh seorang bangsa Rusia. Itulah sebabnya banyak tanah dinamakan dengan bahasa Rusia.

C. Jenis dan ciri-ciri tanah di Indonesia

Dari ratusan jenis tanah di muka bumi, beberapa jenis yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Tanah vulkanis (andosol)

Tanah vulkanis atau tanah andosol *(tuff)*, berasal dari hasil pelapukan debu vulkanis dan material letusan gunung api lainnya.

Tanah ini banyak terdapat di daerah gunung api, terutama yang sudah pernah meletus. Jenis tanah ini sangat subur dan baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Ciri-ciri tanah vulkanis adalah berwarna kelabu hingga kuning dan peka terhadap erosi.

b. Tanah aluvial

Tanah aluvial berasal dari endapan lumpur sungai. Tanah ini banyak ditemukan di sepanjang lembah, pertemuan sungai dan laut, bantaran sungai (kanan kiri sungai), kaki gunung, dataran yang sering dilanda banjir (*flood plains*), serta muara sungai (delta).

Tanah aluvial sangat subur dan cocok untuk tanaman padi, palawija, tebu, tembakau, karet, kelapa, dan kopi. Ciri-ciri tanah aluvial: warna kelabu dan sifatnya peka terhadap erosi.

c. Tanah humus

Tanah humus adalah sisa-sisa hasil pelapukan tumbuh-tumbuhan yang telah diuraikan oleh organisme kecil dalam tanah. Humus memulihkan zat kimia yang berguna bagi tanah, sehingga tumbuhan dapat hidup.

Tanah humus sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian. Ciri-cirinya: berwarna kehitaman, subur mengandung bahan organik, dan mudah basah.

d. Tanah laterit

Tanah laterit adalah tanah yang terjadi karena adanya pelarutan garam-garaman di dalam batuan, sehingga tinggal oksidasi besi dan aluminium. Pelarutan oleh air hujan terjadi pada daerah bersuhu tinggi. Berbagai mineral yang telah larut dibawa air ke tempat lebih rendah.

Tanah laterit kurang subur, hanya tepat untuk tanaman palawija, hortikultura, dan karet. Tanah ini banyak mengandung zat besi dan aluminium.

e. Tanah kapur (*terraroza)*

Tanah kapur berasal dari pelapukan batuan kapur yang banyak terdapat di daerah pegunungan kapur. Karena kandungan bahannya, tanah ini sangat tepat untuk tanaman jati. Ciri-cirinya: warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur.
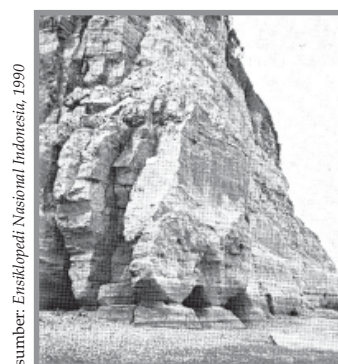
sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990*

Gambar 1.1.7
Gambaran tanah kapur

f. Tanah gambut (organosol)

Tanah gambut adalah tanah yang berasal dari bahan organik (tumbuh-tumbuhan) yang hidup di rawa dan mengalami proses pembusukan tidak sempurna. Ciri-ciri utama tanah ini: memiliki tingkat keasaman tinggi, dan tidak subur, tanpa pengolahan khusus tidak baik untuk lahan pertanian.

g. Tanah mergel

Tanah mergel adalah tanah yang terjadi dari campuran batuan kapur, tanah liat, dan pasir. Banyak terdapat di lereng pegunungan, dan dataran rendah. Tanah mergel termasuk tanah subur.

h. Tanah regosol

Tanah regosol adalah tanah berupa material-material kasar. Terbentuk dari pasir pantai atau material dari gunung api yang belum banyak mengalami pelapukan. Ciri-ciri utama tanah ini adalah berbutiran besar/kasar.

Sumber: *Britannica encyclopedia*, 2007

Gambar 1.1.8
Tanah regosol memiliki butiran kasar dan besar.

i. Tanah latosol

Tanah latosol adalah tanah berbatu-batu, yaitu tanah tua berupa batuan keras yang belum melapuk dengan sempurna. Biasanya terdapat di lereng pegunungan yang mengalami erosi. Tanah jenis ini berciri keras dan tidak subur.

j. Tanah podzolik

Tanah podzolik adalah tanah yang terdiri dari batuan yang banyak mengandung kuarsa. Tanah jenis ini dijumpai di pegunungan tinggi.

Dari berbagai jenis tanah yang terdapat di Indonesia, yang termasuk jenis tanah subur adalah tanah vulkanis, tanah aluvial, dan tanah humus. Tanah subur berwarna hitam hingga kelabu, dan memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut.

- memiliki struktur yang baik;
- banyak mengandung garam-garaman dan mineral yang berguna bagi tumbuhan; dan
- mengandung cukup air untuk melarutkan garam-garaman di dalamnya.

D. Persebaran dan pemanfaatan tanah di Indonesia

Bagaimana persebaran berbagai jenis tanah tersebut di wilayah Indonesia?

Secara keseluruhan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Namun faktor-faktor lain turut serta memberi pengaruh dalam proses pem-bentukan tanah. Akibatnya, di berbagai wilayah Indonesia ditemukan jenis tanah yang berbeda-beda. Beberapa jenis tanah tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sebagian jenis lain hanya dapat dijumpai di wilayah tertentu.

Setiap jenis tanah memiliki kandungan berbeda sehingga dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman yang berbeda pula. Oleh sebab itu, wajarlah jika di setiap wilayah Indonesia dijumpai jenis tanaman yang berbeda sesuai jenis dan kondisi tanahnya. Perhatikan **gambar 1.1.9** di bawah! Untuk lebih jelas perhatikan pula **tabel 1.1.2** pada halaman berikut!
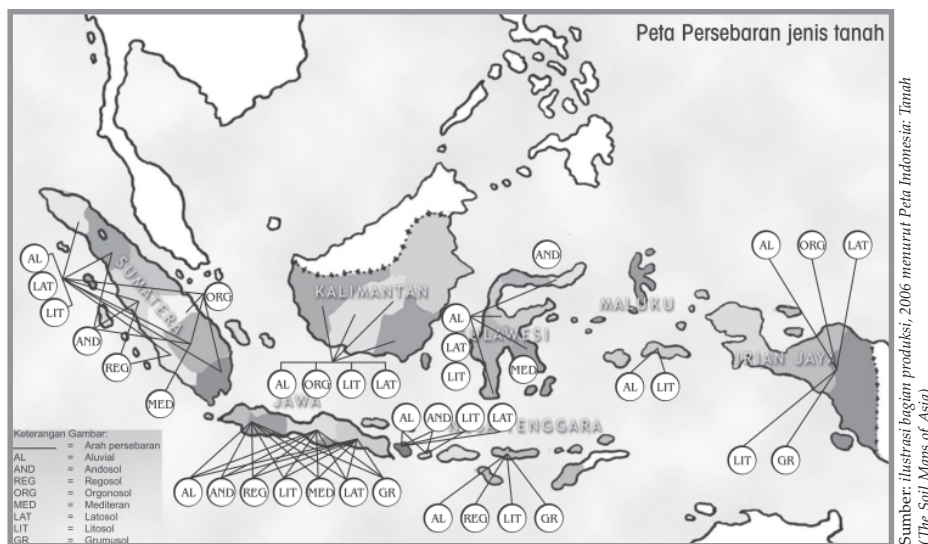
Sumber: *ilustrasi bagian produksi, 2006 menurut Peta Indonesia: Tanah (The Soil Maps of Asia)*

Gambar 1.1.9
Beberapa jenis tanah tersebar hampir merata di wilayah Indonesia

Tabel 1.1.2
Persebaran dan pemanfaatan berbagai jenis tanah di Indonesia

No.	Jenis Tanah	Daerah Persebaran	Pemanfaatan
1.	Tanah vulkanis (*andosol/tuff*)	Daerah gunung api: Sumatera Utara,Timur, dan Barat; Jawa, Bali; Lombok; Halmahera; NTB; dan Sulawesi Utara.	Sebagai lahan pertanian/perkebunan produktif dan hutan pinus/cemara.
2.	Tanah aluvial	Sumatera Utara, Timur, dan Barat; Jawa bagian utara; Halmahera; Kalimantan Barat dan Selatan; Sulawesi; dan Papua bagian selatan.	Sebagai lahan pertanian sawah dan palawija.
3.	Tanah humus	Lampung, Jawa Tengah bagian Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.	Sebagai lahan pertanian.
4.	Tanah laterit	Daerah berhutan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.	Sebagai lahan pertanian dan digali/ditambang (batuan bermineral).
5.	Tanah gambut *(organosol)*	Pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera-Seram, dan Papua.	Sebagai lahan pertanian.
6.	Tanah kapur *(terraroza)*	Daerah pegunungan kapur: Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera.	Sebagai lahan pertanian *(tegalan)* dan hutan jati.
7.	Tanah mergel	Lereng pegunungan/dataran rendah di seluruh Indonesia.	Sebagai lahan pertanian.
8.	Tanah regosol	Sumatera.	Sebagai lahan pertanian.
9.	Tanah latosol	Sumatera Utara.	Sebagai lahan pertanian.
10.	Tanah podzolik	Papua, wilayah pantai timur Sumatera, dan Kalimantan.	Sebagai lahan pertanian tanaman palawija.

sumber: *edukasi.net*

1.1.4 Flora dan Fauna di Indonesia

Flora dan fauna, diartikan sebagai dunia tumbuhan dan hewan, yaitu keseluruhan jenis tumbuhan dan hewan yang hidup pada suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu.

A. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna

Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah muka bumi adalah iklim, relief daratan, keadaan tanah, dan peranan makhluk hidup.

a. Iklim

Iklim memberikan pengaruh penting bagi persebaran flora. Unsur iklim tersebut meliputi suhu, kelembaban udara, curah hujan, serta angin. Pengaruh iklim bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal adanya perbedaan ketinggian tempat, sedangkan secara horizontal dipengaruhi letak lintang tempat.

b. Relief daratan

Relief daratan adalah keadaan tinggi rendahnya permukaan tanah dari permukaan laut. Perbedaan ketinggian mengakibatkan terjadinya variasi suhu udara. Variasi suhu memengaruhi variasi jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan di daerah tinggi dan dataran rendah berbeda satu sama lain sebab tiap tumbuhan memerlukan suhu tertentu untuk dapat hidup.

c. Keadaan tanah

Perbedaan jenis/tipe tanah (lempung, pasir, aluvial, dan lain-lain) serta jumlah kandungan zat mineral memengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup di atasnya. Misalnya: tanah berhumus di daerah tropis menjamin hidupnya berbagai jenis tumbuhan, sedangkan di daerah gurun/salju hanya tumbuhan tertentu yang dapat hidup.

d. Peranan makhluk hidup (biotik)

Makhluk hidup meliputi hewan dan manusia. Persebaran flora melalui hewan dapat terjadi melalui proses daur makanan secara tak langsung atau berpindah oleh jenis hewan tertentu. Peranan manusia antara lain melalui kegiatan migrasi, penelitian/pengembangbiakan, dan lain-lain.

B. Persebaran flora di Indonesia

Indonesia terletak pada daerah iklim tropis. Dalam skala luas, wilayah tropis adalah wilayah pertumbuhan hutan hujan tropis. Namun, tinggi

curah hujan wilayah Indonesia berbeda dari barat hingga ke timur. Hal itu memengaruhi jenis flora yang mungkin tumbuh.

Berbagai jenis flora di Indonesia dapat diwakili oleh persebaran beberapa jenis hutan berikut ini.

a. Hutan hujan tropis

Hutan hujan tropis terdapat di daerah-daerah bercurah hujan tinggi dengan temperatur udara yang juga tinggi sepanjang tahun. Hutan ini dikenal sebagai hutan heterogen karena ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. Berikut adalah berbagai ciri hutan hujan tropis.

- Pohon-pohonnya besar, tinggi, dan rapat.
- Berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun.
- Keadaan di dalam hutan gelap dan lembab karena sinar matahari tidak dapat menembus rimbunnya daun-daun pepohonan.
- Banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan berbagai jenis anggrek.

Di Indonesia, hutan jenis ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

b. Hutan musim

Hutan musim terdapat di wilayah yang memiliki perbedaan musim hujan dan kemarau secara jelas. Hutan musim umumnya adalah hutan homogen. Berikut adalah berbagai ciri hutan musim.

- Pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat.
- Umumnya terdiri dari satu jenis tumbuhan (homogen). Contoh: hutan jati, pinus, dan randu.
- Hutan menghijau pada musim hujan dan meranggas pada musim kemarau.
- Pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh karena sinar matahari dapat sampai ke dasar melalui sela-sela pepohonan.

Di Indonesia, hutan musim banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara.

c. Steppa (padang rumput)

Steppa adalah hutan padang rumput yang luas. Hutan ini terdapat di daerah bercurah hujan lebih kecil dibandingkan daerah sabana.

Di Indonesia hutan steppa terdapat bagian timur yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Sabana

Sabana adalah padang rumput diselingi pepohonan berupa tanaman keras dan menahun. Hutan sabana terdapat di daerah bercurah hujan rendah. Sabana sangat baik untuk pengembangan usaha peternakan (sapi, kambing, dan domba).

Di Indonesia sabana dapat ditemui di wilayah Nusa Tenggara.

sumber: *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi*
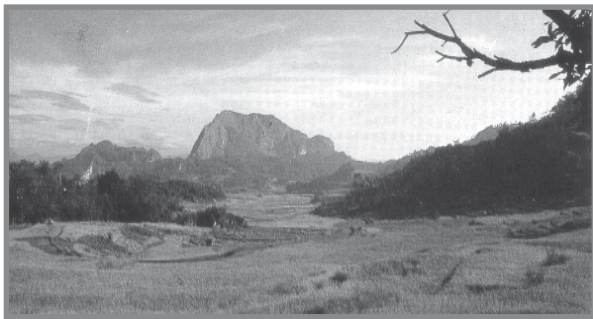
Gambar 1.1.10
Sabana di Enrekang Sulawesi

e. Hutan bakau (mangrove)

Hutan bakau *(mangrove)* tumbuh di daerah pantai berlumpur atau berarus lemah. Tumbuhan bakau memiliki akar nafas dan daun berlapis tebal yang berfungsi mengurangi penguapan.

Di Indonesia mangrove terdapat di pantai Papua, pantai Sumatera Timur, pantai Kalimantan Barat dan Selatan, serta di pantai utara Pulau Jawa.

sumber: *Indonesian Heritage*

Gambar 1.1.11
Hutan bakau di pantai Pulau Komodo

Selain diwakili oleh berbagai jenis hutan, persebaran flora di Indonesia juga dibagi menurut ketinggian tempat. Hal ini dilakukan oleh seorang ahli botani Jerman bernama **FR. Junghuhn**. Dia meneliti perbedaan jenis flora di Indonesia berdasarkan perbedaan ketinggian tempat dan membuat zonasi/batasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia seperti ditunjukkan oleh **tabel 1.1.3** berikut ini.

Tabel 1.1.3
Zona tumbuhan di Indonesia menurut FR. Junghuhn

No.	Ketinggian	Jenis tumbuhan
1.	0 – 700 m	kelapa, padi, jagung, tebu, cokelat, dan lain-lain.
2.	700 – 1.500 m	sayuran dan buah-buahan.
3.	1.500 – 2.500 m	teh, kina, sayuran, bunga-bungaan.
4.	2.500 – 4.000 m	pinus dan lumut.
5.	>4.000 m	lumut.

C. Persebaran fauna di Indonesia

Selain dipengaruhi faktor iklim dan persebaran flora, persebaran fauna berhubungan dengan sejarah geologis.

a. Sejarah geologis Indonesia

Secara geologis wilayah Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut.

- Wilayah Indonesia bagian barat (*Paparan Sunda)*, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
- Wilayah Indonesia bagian timur (*Paparan Sahul),* meliputi Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
- Wilayah Indonesia bagian tengah (*wilayah peralihan),* meliputi Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (Nusa Tenggara dan Maluku).

Menurut sejarah geologis, pada zaman es *Paparan Sunda* pernah menyatu dengan daratan Asia dan *Paparan Sahul* menyatu dengan Benua Australia. Wilayah Indonesia bagian tengah tidak termasuk ke dalam Benua Asia maupun Australia.

b. Pembagian wilayah Wallace dan Weber

Berkaitan dengan sejarah geologi, **Wallace** seorang ahli *zoologi* Jerman membagi wilayah persebaran fauna Indonesia dengan suatu garis yang kemudian terkenal sebagai *garis Wallace*. Garis itu membagi geografi kehewanan daerah orientalis dan Indo-Australis.

Garis *Wallace* menunjukkan laut sangat dalam antara Pulau Bali dan Lombok serta antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Garis *Wallace* ditarik mulai dari Samudera Hindia ke timur laut melalui Laut Timor, berbelok ke barat laut ke Laut Maluku, dan kembali ke arah timur laut ke Laut Filipina.

Lalu, seorang ahli *zoologi* Belanda-Jerman, **Max Weber** melengkapi pembagian geografi kehewanan tersebut. Weber membagi wilayah dalam garis *Wallace* menjadi dua bagian. Bagian barat merupakan daerah dengan jenis hewan berasal dari Benua Asia dan bagian timur adalah daerah dengan jenis hewan dari Benua Australia. Lihat **gambar 1.1.12**!

sumber: *Ilustrasi bagian produksi menurut Indonesian Heritage jilid 4, 2002*
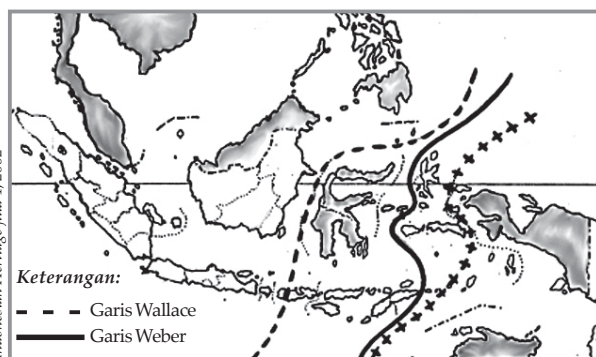
Gambar 1.1.12
Garis Wallace dan garis Weber

c. Tipe fauna di Indonesia

Berdasarkan pembagian garis *Wallace* dan *Weber* serta perbedaan keadaan wilayah geologis, maka fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga.

1. *Fauna tipe asiatis*

Jenis fauna ini menempati wilayah Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya). Hewan asiatis mempunyai persamaan dengan hewan yang hidup di Benua Asia.

Jenis fauna tipe asiatis adalah berbagai jenis hewan menyusui berbadan besar dan berbagai jenis kera. Contohnya gajah, orang utan/mawas, harimau, banteng, badak, dan siamang.
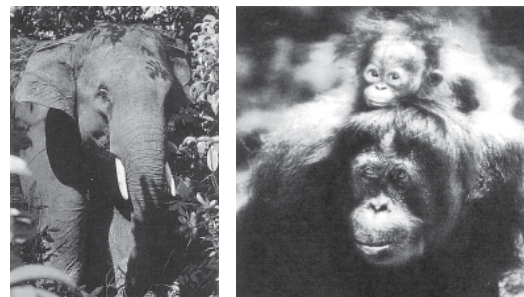
Sumber: *Indonesian Heritage*

Gambar 1.1.13
Gajah Sumatera dan Orang Utan Kalimantan

2. *Fauna tipe australis*

Fauna australis menempati wilayah Indonesia bagian timur (Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya).

Jenis fauna australis, antara lain berbagai jenis hewan menyusui berbadan kecil, hewan berkantong, dan burung berbulu indah. Contohnya kanguru, kuskus, dan cenderawasih.

3. *Fauna peralihan*

Fauna ini adalah tipe peralihan antara fauna asiatis dan australis. Fauna ini menempati wilayah antara bagian timur dan bagian barat (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya).

Di daerah fauna peralihan terdapat jenis hewan yang tidak termasuk tipe asiatis maupun tipe australis. Jadi, habitatnya hanya di wilayah tersebut (*hewan relik*). Contoh hewan peralihan adalah babi rusa, anoa, biawak, komodo, dan burung maleo.

sumber: *Indonesian Heritage jilid 4*

Gambar 1.1.14
Anoa yang ada di Sulawesi Selatan

RANGKUMAN

1. *Letak astronomis Indonesia:* 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BT, termasuk daerah tropis.
2. *Letak geografis Indonesia:* antara dua Samudera (Samudera Pasifik dan Hindia) dan antara dua benua (Benua Asia dan Australia).
3. *Periode musim wilayah Indonesia dalam keadaan normal:*
   - Musim hujan: periode Oktober – April.
   - Musim kemarau: periode April – Oktober.
   - Masa *pancaroba:* April/Oktober
4. *Faktor penyimpangan musim di Indonesia:*
   - Pola pergerakan *angin musim/muson* yang berlainan dari wilayah barat ke timur.
   - Pola hujan yang berbeda di tiap wilayah.
   - pengaruh angin siklon.
   - pengaruh *El-Nino.*
6. *Flora dan fauna*: tumbuhan dan hewan yang hidup pada suatu daerah secara alami.
7. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora: *iklim, keadaan tanah, relief tanah, dan biotik (mahluk hidup).*
8. Persebaran flora di Indonesia diwakili oleh persebaran berbagai jenis hutan, yaitu: hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, steppa, dan hutan bakau.
9. *Zona tumbuhan menurut F.R. Junghuhn*:
   - 0 – 700 m: kelapa, padi, dan jagung.
   - 700 – 1.500 m: sayuran dan buah-buahan
   - 1.500 – 2.500 m: teh, kina, sayuran, bunga-bungaan
   - 2.500 – 4.000 m: pinus, lumut
   - >4.000 m: lumut
11. *Garis Wallace:* menunjukkan laut sangat dalam antara Pulau Bali dan Lombok dan antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan. *Garis Wallace* membagi wilayah fauna Indonesia menjadi daerah *orientalis* dan *Indo-Australis*.
12. *Garis Weber:* membagi wilayah garis *Wallace* menjadi dua bagian. Bagian barat: daerah dengan jenis hewan asiatis dan bagian timur dengan jenis hewan dari Benua Australia.
10. *Tipe fauna Indonesia:*
    - *Fauna tipe asiatis*: fauna wilayah Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan). Contoh: berbagai hewan menyusui berbadan besar dan berbagai jenis kera.
    - *Fauna tipe australis*: fauna wilayah Indonesia bagian timur (Papua dan Maluku). *Contoh:* berbagai hewan menyusui berbadan kecil dan burung berbulu indah.
    - *Fauna peralihan*: fauna wilayah peralihan (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku). Contoh: anoa, komodo, dan burung Maleo .
13. *Tanah/soil*: hasil akhir proses pelapukan batuan pada lapisan kulit bumi terluar tempat manusia berpijak.
14. *Faktor-faktor yang memengaruhi proses pembentukan tanah:* jenis batuan induk; relief dan topografi; iklim dan cuaca; aktivitas biologis; dan jangka waktu.
15. *Klasifikasi tanah dilakukan menurut:* kandungan zat kimia; warna dan tekstur; jumlah materi organik di dalam tanah, dan lain-lain.
16. *Beberapa jenis tanah di Indonesia:*
    - *Tanah vulkanis (andosol/tuff)*: tanah hasil pelapukan debu vulkanis yang subur. Terdapat di lereng-lereng gunung api.
    - *Tanah aluvial*: tanah endapan lumpur sungai. Terdapat di Sumatera, Jawa, dan lain-lain.
    - *Tanah humus*: sisa-sisa hasil pelapukan tumbuhan mati yang telah diuraikan organisme kecil dalam tanah. Terdapat di Lampung, Kalimantan Selatan, dan lain-lain.
    - *Tanah laterit*: tanah yang telah mengalami pencucian air hujan hingga kehilangan kandungan mineral. Terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain.
    - *Tanah gambut* (*organosol*): tanah dari bahan organik (tumbuhan) di rawa dan mengalami pembusukan yang tidak sempurna. Terdapat di Pulau Kalimantan, Papua, dan lain-lain.
    - *Tanah kapur* (*terraroza*): tanah dari pelapukan batuan kapur. Terdapat di daerah pegunungan kapur (Jawa, Nusa Tenggara, dan lain-lain).
    - *Tanah mergel*: tanah campuran batuan kapur, tanah liat, dan pasir. Terdapat di lereng pegunungan dan dataran rendah.
    - *Tanah regosol:* tanah berupa material-material kasar. Terdapat di Sumatera.
    - *Tanah latosol:* tanah tua berupa batuan keras yang belum melapuk dengan sempurna. Terdapat di Sumatera Utara.
    - *Tanah podzolik*: tanah yang terdiri dari batuan berkandungan kuarsa. Terdapat di Papua, Kalimantan, dan lain-lain.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Posisi astronomis Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua.
2. Fauna tipe australis terdapat di Indonesia, dengan penyebaran di sebelah timur seperti di Papua.
3. Tanah vulkanis berasal dari endapan lumpur sungai.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Letak astronomis Indonesia adalah ... .
2. Pembagian wilayah waktu di Indonesia dipengaruhi oleh letak ... .
3. Dalam keadaan normal, pada periode bulan April – Oktober Indonesia berpeluang mengalami musim ... .
4. Perhatikan gambar di bawah ini!

Sumber: ilustrasi bagian produksi, 2007

Wilayah Indonesia termasuk wilayah iklim ... .

5. Di daerah bercurah hujan tinggi terdapat jenis hutan … .
6. Fauna dari Sulawesi termasuk tipe fauna ... .
7. Perhatikan gambar peta di bawah ini!

Sumber: ilustrasi bagian produksi, 2007

Garis putus-putus disebut garis ... .

8. Hewan menyusui berbadan besar adalah ciri jenis fauna tipe … .
9. Ilmu yang mempelajari proses pembentukan, karakteristik, dan kegunaan tanah adalah ... .
10. Jenis tanah yang banyak ditemui di bantaran sungai dan delta sungai adalah ... .

III. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Sebutkan pengaruh letak lintang dan bujur terhadap kondisi geografis Indonesia!
2. Sebutkan penyebab terjadinya perubahan musim di Indonesia!
3. Sebutkan periode musim hujan dan kemarau di Indonesia dalam keadaan normal!
4. Sebutkan ciri khas masa pancaroba!
5. Sebutkan dua faktor penyebab terjadinya penyimpangan musim di Indonesia!
6. Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora di Indonesia!
7. Jelaskan pembagian fauna Indonesia menurut sejarah geologisnya!
8. Sebutkan ciri-ciri fauna asiatis dan fauna australis serta berikan masing-masing tiga contoh!
9. Jelaskan proses terjadinya tanah!
10. Sebutkan 4 jenis tanahyang terdapat di Indonesia dan daerah persebarannya!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

Pemanasan Global

Pemanasan global bukan sekadar persoalan mencairnya es di kedua kutub bumi. Efek dari menghangatnya atmosfer dirasakan juga oleh petani di Karawang hingga warga Pegunungan Jayawijaya, Papua.

Singkatnya, pemanasan global terjadi, karena panas yang diperoleh bumi dari matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini antara lain dikarenakan banyaknya CO_2 yang terperangkap di atmosfer. Padahal, seharusnya permykaan bumi menyerap panas matahari, dan memantulkan kembali panasnya.

Panas yang terperangkap inilah yang membuat suhu bumi meningkat. Kenaikan ini pun mempertinggi permukaan air laut, sehingga kemungkinan terjadinya banjir pasang besar. Di Indonesia sendiri, banyak kejadian yang disebabkan oleh pemanasan global. Misalkan pemutihan terumbu karang di Kepulauan Seribu, musim hujan yang terlambat (mengakibatkan gagal panen di Subang dan Pati), musim hujan yang pendek (di Manggarai dan NTT), menyebarnyapenyakit malaria di kedalaman, hingga banjir pasang di Jakarta tahun 2007 lalu.

Sumber: Majalah Tempo, 3 - 9 Desember 2007

Menjawab Pertanyaan

a. Jelaskan yang dimaksud dengan pemanasan global!
b. Carilah tahu lebih banyak penyebab pemanasan global!
c. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pemanasan global?
d. Carilah tahu lebih banyak efek pemanasan global bagi penduduk di Indonesia!

1.2 Kondisi Penduduk Indonesia

Pernahkah terpikir olehmu berbagai kejadian berkaitan dengan penduduk di sekitarmu? Ada orang yang mengandung lalu melahirkan. Lahirnya seorang bayi tentu menambah jumlah penduduk di lingkunganmu. Di saat lain mungkin kamu mendengar berita tentang kematian. Meninggalnya seseorang membuat berkurangnya jumlah penduduk, bukan? Bagaimana pula pengaruh datang dan perginya seseorang? Akan bertambah atau berkurangkah jumlah penduduk di tempat tersebut?

Kondisi penduduk di lingkunganmu tidak jauh berbeda dengan kondisi penduduk negara kita dan berbagai negara lain. Kondisi kependudukan sangat dinamis yaitu selalu berubah setiap waktu.

Berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini, dan bagaimana perubahannya? Dapatkah kita menghitung jumlahnya dari waktu ke waktu?

Dalam **subbab 1.2** ini kamu akan belajar berbagai hal tentang dina-mika penduduk. Sebelumnya coba lakukan diskusi kelompok dengan menjawab beberapa pertanyaan!

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Ceritakan tentang terjadinya perubahan penduduk di lingkunganmu (kelahiran, kematian, dan perpindahan)!
2. Tahukah kamu hal-hal yang memengaruhi perubahan penduduk di suatu wilayah/negara?
3. Apa manfaat informasi jumlah penduduk dan perubahan bagi suatu wilayah/negara?

Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Perubahan dan perpindahan penduduk di berbagai tempat tidak dapat dielakkan. Perubahan selalu terjadi. Jika terjadi bencana, misalkan, jumlah penduduk bisa berkurang drastis. Sebaliknya, di suatu kota yang tengah berkembang, jumlah penduduk bisa meningkat karena banyaknya orang yang mencari rezeki di tempat itu. Bagaimanakah perubahan jumlah penduduk dan pengaruhnya pada lingkungan, kita baca bersama berikut ini!

1.2.1 Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah/daerah pada waktu tertentu.

Menurut UU di Indonesia, penduduk adalah semua orang yang pada saat diadakan perhitungan sensus penduduk sekurang-kurangnya telah enam bulan tinggal di wilayah Indonesia. Seorang pendatang yang telah 6 bulan berada di suatu wilayah dengan sendirinya termasuk penduduk wilayah tersebut. Berdasarkan kewarganegaraannya penduduk Indonesia dibedakan atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Pada umumnya jumlah penduduk suatu negara selalu mengalami peningkatan. Secara alami pertambahan penduduk terjadi jika jumlah kelahiran lebih banyak dari jumlah kematian atau jika jumlah pendatang lebih banyak dari jumlah warga yang pergi meninggalkan negara itu. Berkurangnya jumlah penduduk yang mencolok dapat ditemukan apabila terdapat kejadian tertentu seperti bencana alam, perang, atau wabah penyakit.

Pertambahan penduduk yang terjadi tiap tahun atau periode tertentu disebut pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan hasil interaksi antara faktor kelahiran *(fertilitas)*, kematian *(mortalitas)*, dan perpindahan *(migrasi)*.

A. Faktor-faktor dalam pertumbuhan penduduk

Berikut ini kamu akan belajar tiga faktor utama pertumbuhan penduduk seperti telah disebut sebelumnya, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

a. Kelahiran (Fertilitas/Natalitas)

Kelahiran adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk.

1. *Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)*

Angka Kelahiran Kasar *(Crude Birth Rate/CBR)*, adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi lahir hidup tiap 1.000 penduduk dalam satu tahun.

Angka kelahiran 20, artinya selama setahun dalam setiap 1.000 penduduk terdapat 20 bayi lahir hidup. Rumusnya:

$$CBR = \frac{\text{Jumlah kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$$

2. *Kriteria angka kelahiran*

Terdapat tiga kriteria angka kelahiran kasar, yaitu rendah (bila <20), sedang (bila antara 20 – 30), dan tinggi (bila >30). Perhatikan angka kelahiran kasar Indonesia dalam tiga kali periode sensus dan survei penduduk antarsensus tahun 2005 pada **tabel 1.2.1** di bawah ini!

Tabel 1.2.1
Angka kelahiran di Indonesia pada beberapa kali sensus

Tahun Sensus	Angka kelahiran
1980	34 (tinggi)
1990	27 (sedang)
2000	23 (sedang)
2005*)	19,5 (rendah)

*Sumber: BPS; *) Survei Penduduk antar Sensus 2005*

3. *Faktor pendorong dan penghambat angka kelahiran*

Pada tabel di 1.2.1 di atas kamu melihat bahwa angka kelahiran di Indonesia berubah dari tinggi, sedang, dan akhirnya rendah. Apakah faktor-faktor yang memengaruhinya?

Faktor pendorong peningkatan angka kelahiran (pro natalitas), di antaranya sebagai berikut.

- Banyaknya perkawinan pada usia muda, yang banyak terjadi di pedesaan. Orang tua khawatir anak gadisnya tidak mendapat jodoh, sehingga dinikahkan pada usia muda.
- Adanya berbagai anggapan yang masih dipegang oleh masyarakat, seperti:
  - ☑ anak menjadi penentu status sosial dan pembawa kehormatan keluarga;
  - ☑ anak sebagai penerus keturunan;
  - ☑ anak sebagai sumber tenaga kerja;
  - ☑ anak sebagai pembawa rejeki; dan
  - ☑ anak sebagai tumpuan di hari tua.

Beberapa faktor yang menghambat angka kelahiran (anti natalitas), adalah sebagai berikut.

- Keberhasilan program Keluarga Berencana.
- Dikeluarkannya UU Perkawinan. Di Indonesia UU Perkawinan menentukan batas usia minimal seseorang boleh menikah, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki.
- Munculnya anggapan mempunyai anak sangat merepotkan (terutama bagi wanita yang memilih bekerja/berkarir).

b. Kematian (Mortalitas)

Kematian adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat mengurangi jumlah penduduk.

1. *Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR)*

Angka Kematian Kasar *(Crude Death Rate/*CDR), adalah angka yang menunjukkan jumlah orang mati setiap 1.000 penduduk dalam setahun.

Angka kematian 10, artinya selama setahun dalam setiap 1.000 penduduk terdapat 10 orang mati. Rumus angka kematian kasar adalah:

$$CDR = \frac{\text{Jumlah kematian}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$$

2. *Kriteria angka kematian*

Terdapat tiga kriteria angka kematian kasar, yaitu rendah (<14), sedang (14–18), dan tinggi (>18).

Contoh soal:

Tahun 2005 penduduk Indonesia berjumlah 218.869.000 jiwa. Jumlah kematian di tahun tersebut mencapai 1.445.536 jiwa. Berapakah besarnya angka kematian kasar (CDR) tahun tersebut?

Penyelesaian:

$$CDR = \frac{1.445.536}{218.869.000} \times 1.000 = 6,6$$

Jadi, Angka Kematian Kasar CDR Indonesia tahun 1987 adalah 6,6 (termasuk kriteria rendah)..

3. *Faktor pendorong dan penghambat angka kematian*

Faktor pendorong peningkatan angka kematian (pro mortalitas), di antaranya sebagai berikut.

- Fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas, tenaga medis, dan obat-obatan) masih kurang.
- Makanan bergizi pada kelompok masyarakat tertentu masih belum tercukupi.
- Terjadi kecelakaan lalu lintas, peperangan, bencana alam, atau wabah penyakit.
- Terjadi bunuh diri dan pencemaran lingkungan yang mematikan.

Beberapa faktor penghambat angka kematian (anti mortalitas), adalah sebagai berikut.

- Fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dokter, dan apotek) sudah sangat memadai.
- Makanan bergizi untuk setiap lapisan masyarakat telah tercukupi.
- Lingkungan hidup bersih, teratur, dan sehat terhindar dari pencemaran.
- Adanya ajaran agama yang melarang umatnya saling membunuh atau pun bunuh diri.

c. Perpindahan (Migrasi)

Migrasi berarti perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Migrasi adalah bagian dari mobilitas penduduk.

1. *Mobilitas penduduk*

Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk melewati batas teritorial/geografis dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk waktu sementara atau untuk tujuan menetap. Mobilitas penduduk dibedakan atas mobilitas penduduk sirkuler dan mobilitas penduduk permanen.

Mobilitas penduduk sirkuler (*circular migration*) yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain tanpa bertujuan menetap (bersifat sementara). Jenis mobilitas penduduk sirkuler meliputi mobilitas ulang-alik dan musiman.

- Mobilitas ulang-alik *(nglaju/commuter)* adalah sirkulasi harian. Sifatnya rutin setiap hari dalam waktu sama atau kurang dari 24 jam. Tujuan orang *nglaju* bermacam-macam, misalnya bersekolah, bekerja, berwisata, dan sebagainya.

  Contoh: Nia tinggal di Bogor, tetapi bersekolah di Jakarta, sehingga tiap hari dia ulang-alik Bogor–Jakarta.
- Mobilitas musiman terjadi secara musiman dan bersifat sementara.

  Contoh: Pada musim *paceklik*, banyak petani pergi ke kota mencari nafkah tambahan. Mereka bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang, dan sebagainya. Pada musim panen atau musim tanam mereka kembali ke desa. Mereka pulang pergi secara musiman tanpa membawa keluarganya.

Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap.

Pelaku migrasi dinamakan migran. Misalnya, seseorang lahir di Jakarta, pindah dan bertempat tinggal di Semarang untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.

Menurut dimensi daerah, migrasi dibedakan atas migrasi internasional dan migrasi nasional.

Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Jenis-jenis migrasi internasional adalah:

- *Imigrasi*, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara masuk ke negara lain. Pelaku imigrasi disebut imigran. Misalnya, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia (*ekspatriat*).
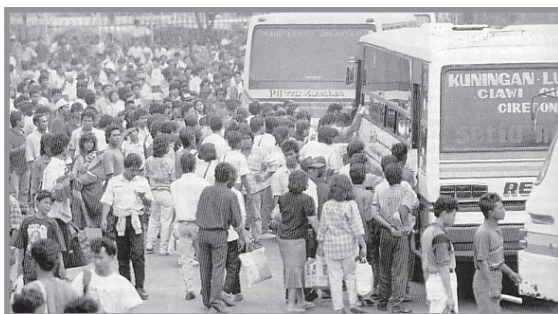
a.Terminal Kampung Rambutan di Jakarta

b. Kesibukan pemesanan tiket di Bandara

c. Keramaian arus mudik di stasiun

d. Pelabuhan yang selalu ramai

sumber: Majalah Tempo dan Harian Kompas

Gambar 1.2.1
Terjadinya mobilitas penduduk dapat dilihat di terminal, bandar udara, stasiun, atau pelabuhan.

- *Emigrasi,* yaitu perpindahan penduduk ke luar dari satu negara pergi ke negara lain. Pelaku emigrasi disebut emigran. Misalnya, orang Indonesia bekerja di negara lain (Malaysia, Singapura, dan lain-lain).
- *Remigrasi (repatriasi),* yaitu perpindahan penduduk kembali ke negara asalnya. Misalnya, para *ekspatriat* yang bekerja di Indonesia kembali ke negaranya atau para TKI di Malaysia kembali ke Indonesia.
- *Evakuasi Internasional,* adalah pemindahan penduduk dari daerah berbahaya melampaui batas wilayah negara. Contoh: penduduk di daerah perang diungsikan ke negara lain.

Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dan suatu daerah ke daerah lain dalam satu wilayah negara. Migrasi nasional melampaui batas administratif (provinsi, kabupaten, kecamatan). Jenis-jenis migrasi nasional adalah sebagai berikut.

- *Urbanisasi,* yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Motivasi utama orang berurbanisasi adalah meningkatkan taraf hidupnya.
- *Reurbanisasi (Ruralisasi),* yaitu perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Contoh: setelah pensiun seseorang kembali ke desa untuk menghabiskan masa tuanya.

Sumber: *harian kompas,* 2006

Gambar 1.2.2
Operasi yustisi di Jakarta diadakan setiap tahun. Orang yang tinggal di Jakarta tanpa KTP maupun tujuan jelas akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

- *Transmigrasi,* yaitu perpindahan penduduk dari daerah/pulau yang padat penduduknya ke daerah/pulau lain yang jarang penduduknya.

  Transmigrasi diatur oleh pemerintah. Kegiatan transmigrasi telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada mulanya transmigrasi bertujuan untuk penyebaran penduduk dan pengurangan penduduk di Pulau Jawa yang dianggap terlalu padat. Transmigrasi juga dimanfaatkan untuk memperoleh tenaga kerja murah untuk perkebunan di luar Pulau Jawa.

  Pada masa kemerdekaan tujuan transmigrasi berkembang lebih luas, antara lain:
  - ☑ peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - ☑ pembinaan kesatuan bangsa;
  - ☑ pertahanan dan keamanan nasional.

  Jenis transmigrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia, antara lain:
  - ☑ *Transmigrasi umum*, diatur, dilaksanakan, dan dibiayai pemerintah. Calon transmigran mendapat lahan pertanian, bimbingan/penyuluhan, serta bantuan awal berupa pangan, pendidikan, dan kesehatan.
  - ☑ *Transmigrasi spontan (swakarsa)*, terjadi karena prakarsa/keinginan para peserta transmigran sendiri. Motivasi peserta bermacam-macam, terutama adanya keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Bantuan pemerintah berupa penyediaan lahan pertanian untuk digarap serta tempat tinggal.
  - ☑ *Transmigrasi bentuk khusus*, dilaksanakan secara khusus dengan aturan dan alasan khusus. Contoh: transmigrasi *bedol desa*, di mana seluruh penduduk desa beserta aparatnya dipindahkan karena suatu hal, seperti seluruh wilayah desa terkena proyek waduk atau terkena bencana alam.

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990*

Gambar 1.2.3
Lahan transmigrasi di Bengkulu Selatan, Sumatera.

- *Evakuasi nasional*, yaitu pemindahan penduduk dari daerah berbahaya dalam wilayah negara. Misalnya penduduk di sekitar letusan gunung diungsikan ke desa-desa/kota-kota sekitarnya.

2. *Faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi*

Secara umum faktor utama yang memengaruhi terjadinya migrasi adalah faktor ekonomi, politik, serta faktor sosial, budaya, dan agama.

- Faktor ekonomi penyebab terjadinya migrasi paling mencolok adalah keinginan seseorang memperbaiki status ekonominya. Alasan tersebut didukung oleh beberapa kondisi seperti:
  - ☑ sempitnya lapangan kerja di daerah asal;
  - ☑ besarnya peluang mendapatkan kerja di daerah lain (banyaknya industri di kota);
  - ☑ kesempatan berkarier lebih berkembang.
- Faktor politik penyebab terjadinya migrasi (nasional maupun internasional), misalnya:
  - ☑ terjadinya peperangan atau konflik di daerah asal; dan
  - ☑ keadaan daerah baru relatif lebih aman.

- Faktor sosial, budaya, dan agama, yang mendorong seseorang melakukan migrasi, misalnya:
  - ☑ kurang dapat mengembangkan diri di daerah asal;
  - ☑ kurang cocok dengan budaya dan kepercayaan;
  - ☑ adanya bencana alam di daerah asal;
  - ☑ kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan di daerah asal;
  - ☑ ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang hanya ada di kota besar.

Secara khusus terdapat faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota yang menyebabkan terjadinya urbanisasi dan reurbanisasi.

Faktor pendorong urbanisasi dari desa, antara lain adalah:

- hilangnya lapangan kerja karena makin sempitnya lahan pertanian;
- rendahnya pendapatan di desa;
- kurangnya fasilitas di desa (pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan, dan lain-lain).

Faktor penarik dari kota sehingga terjadi urbanisasi, misalnya:

- timbulnya industri di kota yang menawarkan banyak lapangan kerja;
- lengkapnya sarana dan prasarana kota sehingga membuat hidup lebih mudah dan nyaman (listrik, komunikasi, transportasi)
- lengkapnya fasilitas kota (pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan, dan sebagainya)
- *iming-iming* dari orang lain (yang lebih dulu pergi ke kota) tentang enaknya hidup di kota.

Orang yang telah lama tinggal di kota melakukan reurbanisasi, didorong oleh beberapa alasan seperti:

- ingin mencari ketenangan hidup (telah pensiun atau karena sakit);
- sarana dan prasarana di desa semakin lengkap (listrik, transportasi, komunikasi);
- fasilitas di desa semakin lengkap (pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan, dan sebagainya);
- semakin mahalnya biaya hidup di kota.

3. *Angka mobilitas dan migrasi*

Mobilitas penduduk dapat diketahui dari angka mobilitas. Migrasi penduduk dapat dilihat dari angka migrasi masuk atau angka migrasi keluar.

- Angka mobilitas

  Angka mobilitas adalah rasio perbandingan antara penduduk yang pindah secara lokal terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$m = \frac{M}{P} \times k$$

Keterangan:

m = angka mobilitas
M = jumlah orang yang pindah
P = jumlah penduduk pada tengah tahun
k = konstanta = 1.000

- Angka migrasi masuk

  Angka migrasi masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun. Rumusnya sebagai berikut.

$$m_i = \frac{I}{P} \times k$$

Keterangan:

m_i = angka migrasi masuk
I = jumlah migrasi masuk
P = jumlah penduduk pada tengah tahun
k = konstanta = 1.000

- Angka migrasi keluar

  Angka migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun. Rumus untuk menghitung angka migrasi keluar adalah sebagai berikut.

$$m_o = \frac{O}{P} \times k$$

Keterangan:

m_o = angka migrasi keluar
I = jumlah migrasi keluar
P = jumlah penduduk pada tengah tahun
k = konstanta = 1.000

B. Perhitungan pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk di setiap wilayah dapat dihitung dengan bantuan beberapa rumus.

a. Pertumbuhan penduduk alami

Pertumbuhan penduduk alami adalah bertambahnya jumlah penduduk akibat faktor kelahiran dan kematian. Rumusnya sebagai berikut.

$$Pa = L - M$$

Keterangan:

Pa = pertumbuhan penduduk
L = jumlah kelahiran
M = jumlah kematian

Contoh soal:

Penduduk di desa Simarito berjumlah 10.000 jiwa. Angka kelahirannya tercatat 85 dan angka kematiannya 45. Berapa pertumbuhan penduduk alami desa tersebut?

Penyelesaian:

Pa = L - M

Pa = 85 - 45 = 40

Jadi, pertumbuhan penduduk alami desa Simarito adalah 40 jiwa.

Pertumbuhan penduduk alami tiap 1.000 penduduk dapat dinyatakan dengan persentase (%). Rumusnya sebagai berikut.

$$Pa = \frac{L - M}{1.000} \times 100\%$$

Keterangan:

Pa = pertumbuhan penduduk alami (%)
L = jumlah kelahiran/angka kelahiran per tahun
M = jumlah kematian/ angka kematian per tahun

Persentase (%) pertumbuhan penduduk alami dikelompokkan menjadi 3 kriteria sebagai berikut.

1. Pertumbuhan rendah, jika <1% per tahun.
2. Pertumbuhan sedang, jika besarnya antara 1-2% per tahun.
3. Pertumbuhan tinggi, jika >2% per tahun.

Contoh soal:

Angka kelahiran penduduk di daerah X adalah 24 dan angka kematiannya 19. Berapa persentase pertumbuhan penduduk alami daerah tersebut?

Penyelesaian:

$$Pa = \frac{L - M}{1.000} \times 100\%$$

$$Pa = \frac{24 - 19}{1.000} \times 100\%$$

$$Pa = \frac{5}{1.000} \times 100\% = 0,5\%$$

Jadi, persentase pertumbuhan penduduk alami daerah X adalah 0,5% (rendah).

b. Pertumbuhan penduduk migrasi

Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk akibat perbedaan jumlah *migrasi* (migrasi masuk) dan *emigrasi* (migrasi keluar). Rumus pertambahan penduduk migrasi adalah sebagai berikut.

$$Pm = (I - E)$$

Keterangan:

Pm = pertumbuhan penduduk migrasi
I = jumlah penduduk datang (imigrasi)
E = jumlah penduduk pergi (emigrasi)

c. Pertumbuhan penduduk total

Pertumbuhan penduduk total ditentukan oleh pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk migrasi. Rumusnya sebagai berikut.

$$Pt = (L - M) + (I - E)$$

Keterangan:

Pt = pertumbuhan penduduk total
L = jumlah kelahiran
M = jumlah kematian
I = jumlah penduduk datang (imigrasi)
E = jumlah penduduk pergi (emigrasi)

Contoh soal:

Awal tahun 2002 jumlah penduduk Kecamatan Jati Rasa 9.500 jiwa. Selama tahun itu tercatat jumlah kelahiran bayi 175 jiwa, jumlah kematian 85 jiwa, jumlah penduduk yang datang 350 jiwa dan penduduk yang pergi berjumlah 200 jiwa. Berapa pertumbuhan penduduk total kecamatan Jati Rasa?

Penyelesaian:

Pt = (L - M) + (I - E)

Pt = (175 - 85) + (350 - 200)

Pt = 90 + 150 = 240 jiwa

Jadi, pertumbuhan penduduk total kecamatan Jati Rasa adalah 240 jiwa.

1.2.2 Kepadatan Penduduk Indonesia

Jika angka kepadatan penduduk diketahui, maka akan diketahui pula beberapa hal berikut.

- Keberadaan pusat-pusat kebudayaan, dan wilayah-wilayah tempat terjadinya pemusatan dan persebaran penduduk.
- Perbandingan angka kepadatan antara satu daerah dengan daerah lain.
- Adanya gejala kelebihan atau kekurangan penduduk di suatu wilayah.

A. Jenis-jenis kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris.

a. Kepadatan penduduk aritmatik

Kepadatan penduduk aritmatik, yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah tempat tinggalnya. Rumus untuk Kepadatan Penduduk Agraris (KPA) adalah sebagai berikut.

$$KPAr = \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas wilayah (km}^2\text{)}}$$

Contoh soal

Perhatikan **tabel 1.2.2** di bawah ini, lalu hitunglah kepadatan penduduk aritmatik untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)!

Penyelesaian:

Berdasarkan **tabel 1.2.2**, kepadatan penduduk aritmatik untuk provinsi NAD adalah:

Tabel 1.2.2
Jumlah dan kepadatan penduduk aritmatik tiap-tiap provinsi di Indonesia tahun 2005

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Daerah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	4.031.589	51.937	78
2.	Sumatera Utara	12.450.911	73.587	169
3.	Sumatera Barat	4.566.126	42.899	106
4.	Riau	4.579.219	94.560	62
5.	Jambi	2.635.968	53.437	49
6.	Sumatera Selatan	6.782.339	93.083	73
7.	Bengkulu	1.549.273	19.789	78
8.	Lampung	7.116.177	35.384	201
9.	Kep. Bangka dan Belitung	1.043.456	16.171	65
10.	Kepulauan Riau	1.274.848	na	na
	Sumatera	**46.029.906**	**580.847**	**96**
11.	DKI Jakarta	8.860.381	664	13.344
12.	Jawa Barat	38.965.440	34.597	1.126
13.	Jawa Tengah	31.977.968	32.549	982
14.	DI Yogyakarta	3.343.651	3.186	1.049
15.	Jawa Timur	36.294.280	47.922	757
16.	Banten	9.028.816	8.651	1.044
	Jawa	**128.470.536**	**127.569**	**1.007**
17.	Bali	3.383.572	5.633	601
18.	Nusa Tenggara Barat	4.184.411	20.153	208
19.	Nusa Tenggara Timur	4.260.294	47.351	90
	Bali dan Nusa Tenggara	**11.828.277**	**73.137**	**162**
20.	Kalimantan Barat	4.052.345	146.807	28
21.	KalimantanTengah	1.914.900	153.564	12
22.	Kalimantan Selatan	3.281.993	43.546	75
23.	Kalimantan Timur	2.848.798	230.277	12
	Kalimantan	**12.098.036**	**574.194**	**21**
24.	Sulawesi Utara	2.128.780	15.273	139
25.	Sulawesi Tengah	2.294.841	63.678	36
26.	Sulawesi Selatan	7.509.704	62.365	136
27.	Sulawesi Tenggara	1.963.025	38.140	51
28.	Gorontalo	922.176	12.215	75
29.	Sulawesi Barat	969.429	na	na
	Sulawesi	**15.787.955**	**212.940**	**74**
30.	Maluku	1.251.539	46.975	27
31.	Maluku Utara	884.142	30.395	29
32.	Irian Jaya Barat	643.012	na	na
33.	Papua	1,875.388	365.466	7
	Maluku dan Papua	**4.654.081**	**443.336**	**11**
	Indonesia	**218.868.791**	**1.890.754**	**109**

Sumber: BPS: Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) Tahun 2005

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk NAD (jiwa)}}{\text{Luas wilayahNAD (km}^2\text{)}}$$

$$= \frac{4.031.589 \text{ jiwa}}{51.937 \text{ km}^2}$$

$$= 77,6 \cong 78 \text{ jiwa/km}^2$$

Jadi, kepadatan penduduk aritmatik provinsi NAD adalah 78 jiwa/km². (Coba kamu cek dengan **tabel 1.2.2**!)

b. Kepadatan penduduk agraris

Kepadatan penduduk agraris yaitu perbandingan antara jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas lahan pertanian (km²) wilayah tempat penduduk yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$\text{KPAg} = \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas lahan pertanian (km}^2\text{)}}$$

Perhatikan bahwa angka pembanding untuk kepadatan penduduk agraris hanyalah luas lahan pertanian. Oleh karena itu, kepadatan penduduk agraris akan lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk aritmatik.

B. Angka kepadatan penduduk Indonesia

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Bagaimana kepadatan penduduk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain?

Untuk mengetahuinya, coba perhatikanbaik-baik **tabel 1.2.3, tabel 1.2.4,** dan **tabel 1.2.5**berikut! Di manakah posisi Indonesia di antara negara-negara lain ditinjau kepadatan penduduknya?

Tabel 1.2.3
Sepuluh negara di dunia berpenduduk terpadat tahun 2007

No.	Negara	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Cina	1,323,030,000
2.	India	1,131,050,000
3.	Amerika Serikat	303,765,000
4.	Indonesia	231,627,000
5.	Brazil	186,525,335
6.	Pakistan	162,933,000
7.	Bangladesh	158,665,000
8.	Rusia	141,983,200
9.	Nigeria	148,093,000
10.	Jepang	127,790,000

sumber: *http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population: berdasarkan laporan estimasi resmi per negara dan estimasi PBB tahun 2007 dan 2008.*

Tabel 1.2.5
Sepulu negara di Asia berpenduduk terpadat tahun 2007

No.	Negara	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Cina	1,323,030,000
2.	India	1,131,050,000
3.	Indonesia	231,627,000
4.	Pakistan	162,933,000
5.	Bangladesh	158,665,000
6.	Jepang	127,790,000
7.	Filipina	88,706,300
8.	Vietnam	87,375,000
9.	Thailand	63,038,247
10.	Myanmar	48,798,000

sumber: *http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population: berdasarkan laporan estimasi resmi per negara dan estimasi PBB tahun 2007 dan 2008.*

Tabel 1.2.4
Jumlah penduduk negara di Asia Tenggara tahun 2005

No.	Negara	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Indonesia	219.898.000
2.	Filipina	84.241.000
3.	Vietnam	78.773.873
4.	Thailand	65.493.298
5.	Myanmar	56.003.000
6.	Malaysia	26.128.000
7.	Kamboja	13.661.000
8.	Laos	5.984.000
9.	Singapura	4.351.000
10.	Brunei	370.100

sumber: *Asean statistical pocket book 2006*

Dari tiga tabel di atas, diketahui bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di tingkat dunia, ketiga di tingkat asia, dan pertama di tingkat asia tenggara.

1.2.3 Susunan penduduk Indonesia

Susunan/komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk menurut karakteristik tertentu. Misalnya menurut usia dan jenis kelamin; menurut status sosial (usia, tingkat pendidikan, agama, suku bangsa); dan lain-lain.

A. Susunan penduduk menurut usia dan jenis kelamin

Penggolongan penduduk menurut usia dapat dikelompokkan menjadi:

- penduduk golongan usia muda (golongan belum produktif): umur 0 – 14 tahun;
- penduduk golongan usia dewasa (golongan produktif): umur 15 – 64 tahun; dan
- penduduk golongan usia tua (golongan tidak produktif): umur 65 tahun ke atas.

Penggolongan susunan penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. **Tabel 1.2.6** adalah contoh susunan penduduk wilayah provinsi NAD menurut usia dan jenis kelamin.

Tabel 1.2.6 Penduduk Provinsi NAD menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2005

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	9,983,140	9,608,600	19,591,740
5-9	11,370,615	10,739,089	22,109,704
10-14	11,238,221	10,614,026	21,852,247
15-19	10,370,890	9,958,783	20,329,673
20-24	9,754,543	10,150,607	19,905,150
25-29	9,271,546	9,821,617	19,093,163
30-34	8,709,370	9,054,955	17,764,325
35-39	8,344,025	8,428,967	16,772,992
40-44	7,401,933	7,347,511	14,749,444
45-49	6,418,712	6,190,218	12,608,930
50-54	5,266,079	4,851,176	10,117,255
55-59	3,813,793	3,563,361	7,377,154
60-64	2,800,974	2,918,499	5,719,473
65-69	1,990,762	2,192,385	4,183,147
70-74	1,470,205	1,570,199	3,040,404
75+	1,408,711	1,462,776	2,871,487
Total	**109,613,519**	**108,472,769**	**218,086,288**

Sumber: BPS: Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) Tahun 2005

a. Piramida penduduk

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin juga dapat ditampilkan dalam bentuk piramida, yang disebut piramida penduduk.

Piramida penduduk mempunyai bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan karakternya. Perhatikan **gambar 1.2.4** berikut!

Gambar 1.2.4
Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin
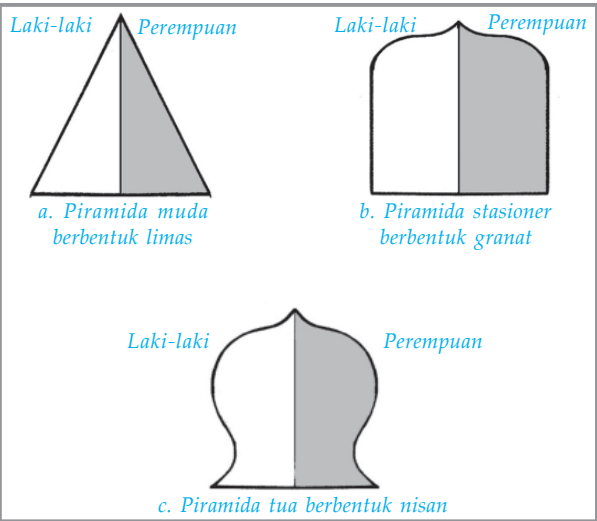
1. *Piramida penduduk muda*

Piramida penduduk muda berbentuk limas, menggambarkan susunan penduduk yang berkembang pesat. Komposisinya adalah jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan dengan penduduk dewasa. Hal itu memungkinkan terjadinya tingkat perkawinan dan kelahiran yang tinggi, sehingga jumlah penduduk bertambah dengan cepat.

Piramida penduduk muda dijumpai pada negara berkembang, seperti Indonesia, Filipina, dan India. Perhatikan **gambar 1.2.5**!
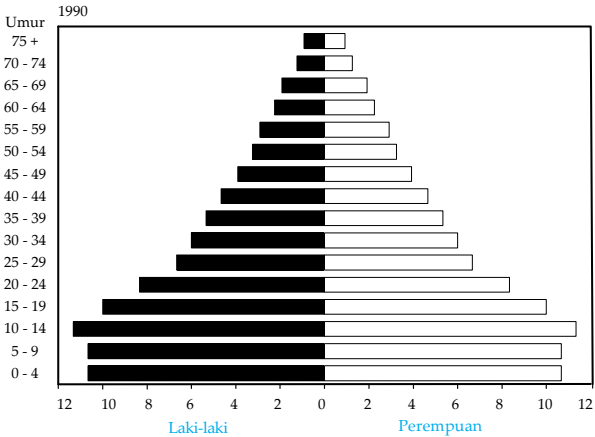
Gambar 1.2.5
Contoh piramida penduduk muda

2. *Piramida penduduk stasioner (stabil)*

Piramida penduduk stasioner berbentuk granat. Komposisi penduduk yang digambarkan cenderung statis, yaitu jumlah penduduk usia muda sama dengan penduduk usia dewasa. Jumlah kelahiran dan kematian pun relatif sama. Pertambahan penduduknya dari tahun ke tahun relatif kecil sekali (tetap).

Piramida penduduk stasioner terutama dimiliki negara-negara industri. Misalnya: Swedia dan Amerika Serikat. Perhatikan **gambar 1.2.6**!
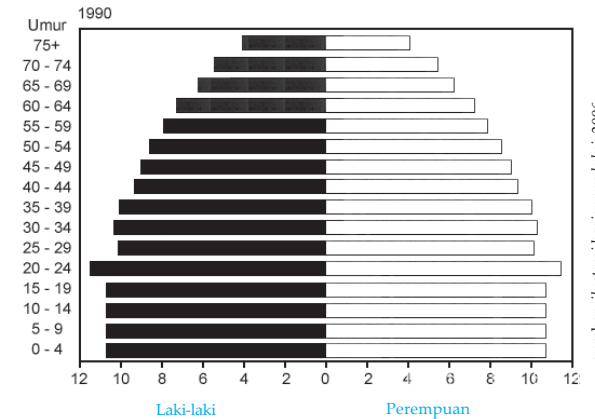
Gambar 1.2.6
Contoh piramida penduduk stasioner (stabil)

3. ***Piramida penduduk tua***

Piramida penduduk tua berbentuk seperti kepala batu nisan. Susunan penduduk yang digambarkan yaitu jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia dewasa. Tingkat kelahiran menurun dan tingkat kematian dapat ditekan.

Contoh negara pemilik piramida penduduk tua adalah Irlandia. Perhatikan **gambar 1.2.7**!
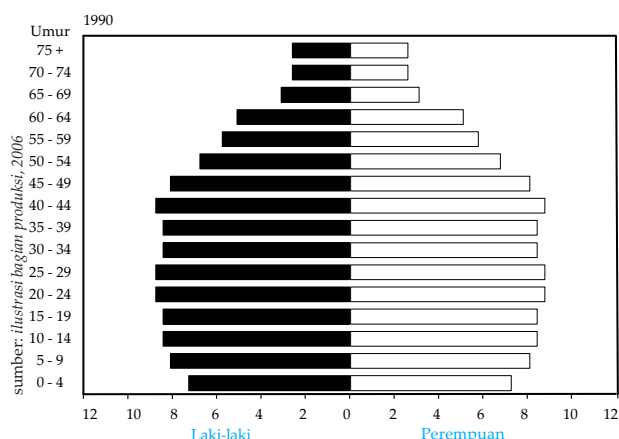
Gambar 1.2.7
Contoh piramida penduduk tua

b. Data-data kependudukan dari susunan penduduk menurut usia dan jenis kelamin

Berdasarkan susunan penduduk dapat diketahui berbagai hal terkait dengan kependudukan. Misalnya *sex ratio* dan angka beban ketergantungan.

1. ***Sex ratio***

Sex ratio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk wanita. Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{sex ratio} = \frac{\text{jumlah penduduk laki-laki}}{\text{jumlah penduduk wanita}} \times 100$$

Sex ratio suatu wilayah 84, artinya dari setiap 100 orang wanita di wilayah tersebut terdapat 84 orang laki-laki.

2. ***Angka Beban Ketergantungan***

Angka Beban Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan/*Dependency Ratio* (DR) adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif dan usia produktif.

- Usia tidak produktif adalah kelompok usia yang belum atau tidak mampu lagi bekerja, terdiri dari penduduk usia muda (0 – 14 tahun) dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas). Kelompok usia ini hidupnya ditanggung oleh orang lain, yaitu oleh kelompok usia produktif.
- Usia produktif adalah kelompok usia yang sudah dapat atau masih mampu bekerja untuk menanggung hidupnya (usia 15 – 64 tahun).

Gambar 1.2.8 *Kelompok penduduk usia tidak produktif mencakup orang lanjut usia dan anak-anak*

Rumus Rasio Ketergantungan/*Dependency Ratio* (DR) adalah sebagai berikut.

$$DR = \frac{\text{Jumlah usia tidak produktif}}{\text{Jumlah usia produktif}}$$

<u>*atau*</u> $$DR = \frac{C + O}{P} \times 100$$

Keterangan:
DR = rasio ketergantungan
C = jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)
O = jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas)
P = jumlah penduduk

Rasio Ketergantungan (DR) 50, berarti tiap 100 orang usia produktif harus menanggung beban 50 orang tidak produktif. Semakin kecil DR, semakin ringan beban ketergantungan suatu negara. Negara maju umumnya memiliki DR < 50.

Perhatikan **tabel 1.2.7** di *halaman 25* yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia untuk masing-masing kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2005!

<u>Contoh soal</u>

Berdasarkan **tabel 1.2.7** di *halaman 25*, hitunglah Angka Beban Ketergantungan (DR)!

Tabel 1.2.7
Penduduk Indonesia menurut umur dan jenis kelamin tahun 2005

Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 14	31.778.704	30.186.488	61.965.192
15 - 64	71.335.973	72.388.563	143.724.536
65 +	4.793.249	5.132.734	9.925.983
Jumlah	**107.274.528**	**106.100.759**	**213.375.287**

Sumber: Survei Penduduk antar Sensus 2005

Penyelesaian

DR dihitung dari besarnya DR laki-laki (DR_{Lk}), DR perempuan (DR_{Pr}), dan DR laki-laki ditambah perempuan (DR_{Lk+Pr}), sebagai berikut.

$$DR_{Lk} = \frac{C_{Lk} + O_{Lk}}{P_{Lk}} \times 100$$

$$= \frac{31.778.704 + 4.793.249}{71.335.973} \times 100 = 52$$

$$DR_{Pr} = \frac{C_{Pr} + O_{Pr}}{P_{Pr}} \times 100$$

$$= \frac{30.186.488 + 5.132.734}{72.388.563} \times 100 = 49$$

$$DR_{(Lk+Pr)} = \frac{C_{(Lk+Pr)} + O_{(Lk+Pr)}}{P_{(Lk+Pr)}} \times 100$$

$$= \frac{61.965.192 + 9.925.983}{143.724.536} \times 100 = 50$$

Jadi, Rasio Ketergantungan total (DR_{Lk+Pr}) adalah 50. Artinya, setiap 100 orang usia produktif menanggung sebanyak 50 orang yang belum atau tidak produktif.

3. *Angka Harapan Hidup*

Angka harapan hidup adalah angka yang menunjukan batasan usia rata-rata seseorang memiliki harapan hidup sejak lahir sampai meninggal dunia dalam suatu populasi pada periode tertentu bila tidak terjadi bencana alam, wabah penyakit, ataupun perang.

Usia harapan hidup dipengaruhi tingkat mortalitas kelompok usia tertentu dalam suatu populasi. Bayi dan lanjut usia memiliki tingkat mortalitas lebih tinggi. Usia harapan hidup juga dipengaruhi tingkat kesehatan (status gizi, kondisi sanitasi, dan pelayanan kesehatan). Makin tinggi tingkat kesehatan makin tinggi usia harapan hidup.

Secara umum tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup waktu lahir. Makin tinggi tingkat kematian bayi baru lahir berarti harapan hidup waktu lahir makin kecil. Kecilnya harapan hidup waktu lahir mungkin disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak sehatnya ibu, tidak sehatnya janin, dan lain-lain.

B. Susunan penduduk lain

Seperti disebutkan di awal, selain menurut usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya aspek sosial, ekonomi, dan geografis. Coba perhatikan baik-baik **tabel 1.2.8** dan **tabel 1.2.9**!

Tabel 1.2.8 di bawah berisi komposisi penduduk menurut umur dan daerah perkotaan/ pedesaan, sedangkan **tabel 1.2.8** *(halaman 26)* berisi komposisi penduduk menurut pekerjaan.

Tabel 1.2.8
Komposisi Penduduk Indonesia menurut Umur dan Daerah Perkotaan/Pedesaan

Umur	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah total
0 - 14	25.163.570	31.928.224	57.091.794
15 - 19	8.586.737	11.212.584	19.799.321
20 - 24	9.594.074	9.853.183	19.447.254
25 - 29	8.953.537	9.725.559	18.679.096
30 - 34	7.945.533	9.472.738	17.418.271
35 - 39	7.266.831	9.185.549	16.452.380
40 - 44	6.311.684	8.178.218	14.489.902
45 - 49	5.294.629	7.088.189	12.382818
50 - 54	4.154.253	5.786.811	10.941.063
55 - 59	2.830.595	4.431.584	7.262.179
60 - 64	2.193.103	3.418.724	5.611.827
65 - 69	1.565.522	2.546.643	4.112.165
70 - 74	1.101.672	1.888.255	2.989.927
75 +	1.043.329	1.780.562	2.823.891
Jumlah	**92.005.069**	**121.370.218**	**213.375.287**

Sumber: Survei Penduduk antar Sensus (Supas) tahun 2005

Tabel 1.2.9 Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2006.

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah	%
1. Pertanian	40.163.242	42,10
2. Pertambangan	923.591	0,97
3. Industri pengolahan	11.890.170	12,45
4. Listrik, gas dan air	228.018	0,24
5. bangunan	4.697.354	4,92
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	19.215.660	20,13
7. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	5.663.956	5,93
8. Keuangan asuransi, dan jasa perusahaan	1.346.044	1,41
9. Jasa kemasyarakatan	11.355.900	11,90
Jumlah	**95.456.935**	**100**

Sumber: *Statistical Pocket Book, BPS: 2007 menurut survei angkatan kerja Agustus(sakernas) 2006*

C. Kegunaan mengetahui susunan penduduk

Tahukah kamu, kegunaan mengetahui komposisi penduduk? Data susunan penduduk sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Sebagai contoh adalah beberapa hal berikut.

- Data susunan penduduk menurut usia dapat menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi). Data tersebut dapat membantu pemerintah/badan berwenang untuk mengatur berbagai hal terkait dengan perkiraan kebutuhan jumlah guru; jumlah sekolah; dan peralatan.
- Data susunan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat membantu perencanaan lapangan pekerjaan sesuai tingkat pendidikan.
- Data susunan penduduk menurut agama dapat menunjukkan jumlah penganut berbagai agama di suatu wilayah. Data tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya dana untuk mendirikan sarana prasarana ibadah.
- Data susunan penduduk menurut pekerjaan dapat menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di berbagai bidang. Data tersebut dapat membantu dalam perencanaan pembangunan ekonomi, penyediaan rumah sesuai golongan pendapatan, dan sebagainya.
- Data susunan penduduk menurut tempat tinggal menunjukkan jumlah penduduk di setiap wilayah. Data tersebut dapat membantu perencanaan berbagai kebutuhan hidup penduduk di tiap wilayah, seperti:
  - ☑ penyediaan perumahan;
  - ☑ penyediaan fasilitas penunjang (rumah sakit, pasar, sekolah, dan lain-lain);
  - ☑ penyediaan jalan dan sarana transportasi;
  - ☑ penyediaan air bersih dan listrik.
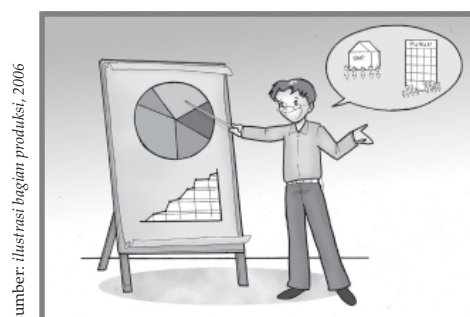
sumber: *ilustrasi bagian produksi, 2006*

***Gambar 1.2.9** Mengetahui komposisi penduduk membuat perencanaan pembangunan lebih terarah. Penyediaan lapangan kerja, pembangunan sekolah, rumah tinggal, dan lain-lain disesuaikan jumlah penduduk.*

1.2.4 Kualitas Penduduk Indonesia

Kualitas/mutu penduduk adalah keadaan penduduk dilihat atau diukur berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraannya.

Keberadaan sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Penduduk yang memiliki kualitas tinggi dapat dikatakan sebagai modal pembangunan bangsa. Penduduk berkualitas tinggi sangat berperan dalam peningkatan kemajuan suatu bangsa.

A. Tingkat pendidikan

Salah satu ukuran tingkat pendidikan penduduk suatu negara dinilai dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin tinggi pula kualitasnya. Menurut hasil pendataan, pada tahun 1990 tercatat hampir 50% angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan SD dan buta huruf. Lihat **tabel 1.2.10** berikut!

Tabel 1.2.10
Komposisi penduduk Indonesia menurut pendidikan (usia 10 tahun ke atas) tahun 2006

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	%
Tidak bersekolah	7,43
Tidak tamat SD	20,77
Tamat SD	31,67
Tamat SMP	17,56
Sempat bersekolah SMU	22,56
Total	100

Sumber: Data Statistik Indonesia, 2006

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kualitas penduduk di bidang lain, yaitu tingkat kesehatan dan pendapatan. Sebagai contoh, jenis pekerjaan seseorang dipengaruhi tingkat pendidikannya.

B. Tingkat kesehatan

Kualitas kesehatan terutama terkait dengan usia harapan hidup dan angka kematian bayi.

- Angka harapan hidup adalah angka yang menunjukkan batasan usia seseorang memiliki harapan hidup sejak lahir sampai meninggal dunia. *(Lihat kembali uraian halaman 25!)*
- Angka kematian bayi adalah jumlah bayi meninggal dunia sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 jumlah bayi yang lahir hidup.

Usia harapan hidup dan tingkat kematian bayi tergantung dari kualitas kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- kualitas kesehatan lingkungannya;
- tingkat gizi masyarakatnya;
- tingkat persebaran penyakit; dan sebagainya.

Untuk mendapatkan kualitas kesehatan yang baik, diperlukan berbagai sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas pendukung seperti:

- tenaga medis (dokter, perawat, dan bidan) yang seimbang dengan jumlah penduduk;
- rumah sakit dan peralatan kedokteran yang sesuai dengan jumlah penduduk; dan
- fasilitas-fasilitas kesehatan pendukung lain (Puskesmas, Klinik, Posyandu, dan BKIA).

C. Tingkat pendapatan

Pendapatan seseorang menentukan tingkat kesejahteraannya. Pendapatan tersebut dipengaruhi mata pencahariannya. Seorang direktur tentu berpendapatan lebih tinggi dibandingkan buruh. Jadi, tingkat kesejahteraan direktur pasti lebih tinggi.

Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat diukur dari pendapatan penduduknya, yang ditunjukkan oleh pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam satu tahun. Rumusnya sebagai berikut.

$$I_p = \frac{GNP}{P}$$

Keterangan :
Ip : *Income per capita* (pendapatan per kapita)
GNP : *Gross National Product* (produk nasional bruto)
P : *Population* (jumlah penduduk)

Contoh soal

Negara A berpenduduk 73 juta jiwa. Jika nilai produk nasional bruto (GNP) negara itu adalah 73 trilyun ($AS), hitung *pendapatan per kapitanya!*

Penyelesaian:

Pendapatan per kapita = I_p

$$I_p = \frac{GNP}{P}$$

$$= \frac{73.000.000.000}{73.000.000} = 10.000 \text{ (dolar AS)}$$

Jadi, besar pendapatan per kapita negara tersebut adalah 10.000 (dolar AS). Jadi, makin tinggi produk nasional bruto (GNP) negara dan makin kecil jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapita akan makin besar.

Lihatlah perbandingan pendapatan per kapita di **tabel 1.2.11** ini. Apakah pendapatan masyarakat di dunia sudah merata?

Tabel 1.2.11
Pendapatan per kapita di beberapa negara tahun 2006

Negara	Ranking di dunia	GDP per kapita (dolar AS)
Lima tertinggi		
Luksemburg	1	87.955
Norwegia	2	72.306
Monaco	3	67.000
Qatar	4	62.914
Islandia	5	54.858
Negara-negara lain		
Australia	13	36.553
Thailand	76	7.599
Indonesia	115	1.640
India	134	797
Madagaskar	170	299

Sumber: *International Monetary Fund, April 2007.*

RANGKUMAN

1. *Penduduk:* semua orang yang pada saat diadakan sensus penduduk sekurang-kurangnya telah enam bulan tinggal di wilayah Indonesia.
2. *Pertumbuhan penduduk*: pertambahan penduduk per tahun atau periode tertentu. *Faktor-faktor yang berpengaruh*: kelahiran/*fertilitas*, kematian/*mortalitas*, dan perpindahan/*migrasi*.
3. *Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR):* angka yang menunjukkan jumlah bayi lahir hidup tiap 1.000 penduduk dalam satu tahun.
4. *Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR):* angka yang menunjukkan jumlah orang mati setiap 1.000 penduduk dalam setahun.
5. *Mobilitas penduduk:* perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. *Jenisnya:*
   - *Mobilitas penduduk sirkuler:* ulang-alik dan mobilitas musiman.
   - *Mobilitas penduduk permanen:* migrasi internasional (emigrasi, imigrasi, dan remigrasi) dan migrasi nasional (transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi)
6. *Faktor-faktor penyebab migrasi:* ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan bencana.
7. *Transmigrasi:* perpindahan penduduk dari satu daerah/pulau yang padat penduduknya ke daerah/pulau lain yang jarang penduduknya.
8. *Beberapa tujuan transmigrasi:*
   - meratakan penyebaran penduduk;
   - meningkatkan kesejahteraan penduduk;
   - memperkokoh persatuan kesatuan dan meningkatkan ketahanan keamanan nasional.
9. *Urbanisasi:* perpindahan penduduk dari desa/kota kecil ke kota/kota besar. *Faktor penyebab:*
   - *faktor pendorong dari desa:* kurang lapangan kerja, sarana prasarana, dan fasilitas hidup;
   - *faktor penarik dari kota:* banyak lapangan kerja, sarana prasarana, dan fasilitas hidup lengkap.
10. *Ruralisasi:* perpindahan penduduk dari kota kembali ke desanya.
11. *Pertumbuhan penduduk alami:* bertambahnya jumlah penduduk akibat faktor kelahiran dan kematian.
12. *Pertumbuhan penduduk migrasi:* pertumbuhan penduduk akibat perbedaan *migrasi* dan *emigrasi*.
13. *Pertumbuhan penduduk total:* pertumbuhan penduduk yang ditentukan pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk migrasi.
14. *Kepadatan penduduk aritmatik:* perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah (km^2) tempat tinggal penduduk yang bersangkutan.
15. *Kepadatan penduduk agraris:* perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian (km^2) wilayah tempat penduduk yang bersangkutan.
16. *Piramida Penduduk*: gambaran susunan penduduk menurut usia dan jenis kelamin.
    - Piramida penduduk muda (bentuk limas).
    - Piramida penduduk stationer (bentuk granat).
    - Piramida penduduk tua (bentuk nisan).
17. *Rasio Ketergantungan/Dependency Ratio*: perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dan penduduk usia produktif.
18. *Angka Harapan Hidup*: batasan usia rata-rata seseorang memiliki harapan hidup sejak lahir sampai meninggal dalam suatu populasi pada periode tertentu (bila tidak ada bencana).
19. *Kualitas penduduk:* keadaan penduduk dilihat atau diukur berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan kesejahteraan.
20. *Kualitas pendidikan penduduk:* terkait dengan jumlah penduduk buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan status usia sekolah.
21. *Kualitas kesehatan penduduk:* terkait dengan tinggi rendahnya tingkat kesehatan, usia harapan hidup, serta angka kematian bayi.
22. Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat diukur dari pendapatan penduduknya, yang ditunjukkan oleh pendapatan per kapita.
23. *Pendapatan per kapita:* rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam satu tahun.

    Rumus: $I_p = \frac{GNP}{P}$

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah “B” jika pernyataan BENAR dan “S” jika pernyataan SALAH!

1. Posisi astronomis Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua.
2. Semakin kecil angka melek huruf semakin rendah pula tingkat kualitas pendidikan penduduk.
3. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan perpindahan.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Orang yang bertempat tinggal di suatu daerah sekurang-kurangnya selama enam bulan dengan sendirinya akan disebut ... .
2. Jumlah bayi rata-rata per 1.000 penduduk dalam satu tahun disebut ... .
3. Angka kematian ... , artinya selama setahun dalam 1.000 penduduk terdapat 10 orang mati.

4. Faktor pendorong peningkatan angka kelahiran disebut ... .
5. Faktor penghambat peningkatan angka kematian disebut .. .
6. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk tujuan menetap ataupun tidak, disebut ... .
7. Dian tinggal di Bogor, namun bekerja di Jakarta. Setiap hari Dian pulang balik Jakarta–Bogor. Mobilitas yang terjadi pada Dian disebut ... .
8. Masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain disebut ... .
9. Ribuan penduduk Indonesia pergi ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja (TKI). Perpindahan penduduk itu dinamakan ... .
10. Transmigrasi yang dilakukan penduduk atas kesadaran sendiri dikelompokkan dalam jenis transmigrasi ... .
11. Kembalinya penduduk yang telah berurbanisasi ke desanya dinamakan ... .
12. Angka yang menunjukkan jumlah migran masuk ke suatu daerah per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam satu tahun disebut ... .
13. Perkembangan penduduk akibat perbedaan antara jumlah penduduk yang datang dan pergi disebut ... .
14. Angka pertumbuhan penduduk <1% digolongkan kriteria ... .
15. Perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah tempat tinggal penduduk disebut ... .
16. Penggolongan penduduk menurut karakteristik tertentu dinamakan ... .
17. Grafik komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin disebut ... .
18. Jika suatu negara mempunyai penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk dewasa digambarkan dengan bentuk piramida ... .
19. Kondisi penduduk yang statis digambarkan oleh piramida penduduk ... .
20. Kondisi negara yang memiliki kondisi tingkat kelahiran menurun dan tingkat kematian dapat ditekan, digambarkan oleh piramida penduduk ... .

III. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan tiga faktor pertumbuhan penduduk!
2. Jelaskan artinya suatu wilayah memiliki Angka Kelahiran Kasar 50!
3. Sebutkan faktor pro natalitas!
4. Diketahui pada tahun 2007 suatu negara berpenduduk 200 juta jiwa dan terdapat sebanyak 2 juta penduduk yang meninggal. Hitunglah angka kematian kasar negara itu dan sebutkan termasuk kriteria mana!
5. Jelaskan arti migrasi internal dan eksternal!
6. Sebutkan (masing-masing 3) faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota sehingga terjadi urbanisasi!
7. Diketahui penduduk suatu wilayah 100.000 jiwa, angka kelahiran 100, dan angka kematian 40. Hitunglah persentase pertumbuhan penduduk alami wilayah itu dan sebutkan termasuk kriteria mana!
8. Jelaskan arti pertumbuhan penduduk total dan tuliskan rumus untuk menghitungnya!
9. Dari hasil sensus tahun 2000 diketahui jumlah penduduk Sulawesi Utara 2.012.098. Luas wilayah provinsi tersebut 15.273 km^2. Hitunglah kepadatan penduduk aritmatik!
10. Jelaskan jenis-jenis piramida penduduk!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

WARGA MISKIN BUTUH BINAAN

Jaringan Rakyat Miskin Kota Se-DKI Jakarta dan Tangerang, Banten, menegaskan, orang miskin lebih membutuhkan binaan potensi dan keahlian, bukan operasi yustisi.

Operasi yustisi, khususnya razia KTP, penangkapan pengamen, pengemis, dan penghuni kawasan kumuh, mulai marak sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kependudukan.

Jauh sebelumnya, aparat pemerintah dan keamanan sering menangkapi pengemis, gelandangan, atau masyarakat yang tergolong pemicu penyakit masyarakat setelah terbit Perda No 2/1988.

Orang-orang yang ditangkap selalu dimasukkan ke panti-panti sosial untuk jangka waktu yang tak ditentukan. Janji pemerintah untuk memberi binaan keterampilan sering kali melenceng. Orang-orang yang kemudian dikeluarkan tak dapat berbuat apa-apa selain kembali ke profesi semula. Anggaran untuk mengadakan operasi yustisi, pendirian panti, maupun pembiayaan personel aparat keamanan dipastikan mencapai miliaran rupiah.

"Namun, hasilnya tidak lebih baik. Masyarakat miskin tetap bertambah banyak. Jika saja pemerintah lebih bijak dan mengalokasikan untuk program riil pembinaan potensi dan keahlian masyarakat miskin kota, saya yakin hasilnya lebih optimal," kata Dedi, Ramanta, Koordinator Advokasi *Urban Poor Consortium*.

Disarikan dari: Harian KOMPAS - Senin, 25 Sep 2006

A. Menjawab Pertanyaan

1. Ceritakan pendapatmu mengenai artikel di atas!
2. Apakah langkah-langkah yang sudah ditempuh pemerintah dalam mengurangi tingkat ke-padatan penduduk di kota besar?
3. Menurutmu, apakah langkah yang ditempuh sudah tepat? Jelaskan!
4. Menurutmu, apakah hubungan langsung antara epadatan penduduk dengan kemiskinan?
5. Apakah usulmu untuk mengurangi adanya kemiskinan di kota-kota besar?

B. Portofolio

Buatlah sebuah penelitian kecil mengenai kualitas penduduk di lingkunganmu. Berikut adalah langkah yang harus ditempuh.

1. Bentuklah kelompok kecil (4-5 orang)!
2. Kunjungilah kantor kelurahan terdekat di wilayah tempat tinggal salah satu anggota kelompok!
3. Carilah data-data kependudukan berikut!
   a. Jumlah dan persentase penduduk ditinjau dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.
   b. Jumlah dan kapasitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Buatlah kesimpulan hasil survei dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut!
   a. Bagaimana kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk di wilayah kelurahan yang disurvei?
   b. Hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk di kelurahan tersebut?
5. Buatlah laporan singkat dan sajikan di depan kelas (*mintalah petunjuk dari guru*)!
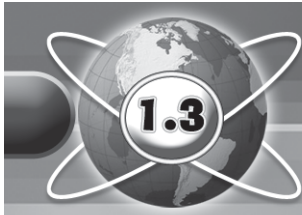
1.3 Masalah Kependudukan di Indonesia: Dampak dan Penanggulangan

Berapa banyak orang di lingkunganmu yang bersekolah, atau sudah lulus sekolah dan bekerja? Apa pekerjaan mereka dan bagaimana pendapatannya? Bagaimana kesehatannya?

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, adalah tiga hal yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur mutu/kualitas penduduk. Kualitas penduduk suatu negara menentukan kemajuan dan keberhasilan pembangunan.

Sebaliknya juga, kualitas penduduk yang semakin tinggi juga akan berpengaruh positif pada pembangunan dan kemajuan suatu negara. Sebelum memulai pelajaran ini, mari membuka lebih jauh wawasan kita dengan melakukan diskusi kelompok berikut ini.

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Ceritakan tingkat pendidikan penduduk di lingkunganmu masing-masing!
2. Apakah perbedaan tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pekerjaan dan kesejahteraannya?
3. Ceritakan tentang kegiatan ekonomi masyarakat di lingkunganmu masing-masing!

Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas!

Negara kita adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Apakah keuntungan dan kerugian yang menyertai hal ini? Berikut kita bahas bersama.

1.3.1 Masalah Kependudukan di Indonesia

Berbagai masalah kependudukan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah berkaitan dengan kuantitas/jumlah penduduk dan masalah berkaitan dengan kualitas penduduk.

A. Masalah berkaitan dengan kuantitas penduduk

a. Ledakan jumlah penduduk Indonesia

Ledakan penduduk *(population explosion)* dapat diartikan sebagai keadaan perkembangan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat. Ledakan penduduk terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah kematian, sementara jumlah kelahiran masih berada pada tingkat yang tinggi.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi tingginya angka kelahiran. *(Telah dipelajari dalam subbab 1.2)*. Tingginya angka kelahiran suatu negara tersebut disebabkan oleh:

- banyaknya perkawinan usia muda (akibat tradisi dan rendahnya tingkat pendidikan);
- tidak ada atau kurang berhasilnya program pembatasan kelahiran.

Perubahan populasi penduduk Indonesia diketahui dari hasil sensus. Sensus penduduk di Indonesia diatur oleh UU No. 6 Tahun 1960. Sensus dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali.

Sensus pertama di Indonesia dilakukan pada masa pemerintah Belanda tahun 1930. Jumlah penduduk saat itu tercatat 60,7 juta jiwa. Tahun 1940 dan 1950, sensus tidak diadakan karena terjadi Perang Dunia II dan banyak gangguan keamanan dalam negeri. Pelaksanaan sensus yang pertama setelah masa kemerdekaan adalah tahun 1961. Jumlah penduduk saat itu tercatat 97,1 juta jiwa.

Ledakan penduduk Indonesia mulai terlihat tahun 80-an. Jika pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 60,7 jiwa, tahun 1985

melonjak hampir tiga kali lipat, yaitu 164 juta jiwa. Tahun 2000 telah lebih dari 200 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2008 jumlah itu terus meningkat. Tahun 2005 mencapai 218.869.000 jiwa dan tahun 2008 mencapai 237.512.355 jiwa.

Tabel 1.3.1 di bawah memberi informasi hasil sensus di Indonesia tahun 1961-2000, hasil survei antar sensus, serta data lain. Amati perubahan jumlah penduduk yang terjadi! Rata-rata angka kelahiran kasar termasuk kriteria sedang – tinggi.

Tabel 1.3.1
Hasil sensus penduduk Indonesia 1961-2008

Tahun Sensus	Jumlah penduduk (juta jiwa)
1961	97,1
1971	119,2
1980	147,5
1990	179,4
1995	194,8
2000	206,3
2005*)	218,9
2008**)	237,5

*Sumber: BPS-2000; *)Survei Penduduk antar Sensus 2005; **)CIA The World Factbook 2008.*

b. Kepadatan penduduk yang tidak merata

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Amati kembali **tabel 1.2.3 – 1.2.5** *(dalam subbab 1.2)!* Selain tinggi, kepadatan penduduk itu tidak merata. Perhatikan kembali **tabel 1.2.2** *(dalam subbab 1.2)!*

Jika melihat **tabel 1.2.2** tersebut, kamu dapat dengan mudah membandingkan kepadatan penduduk antara satu provinsi dan provinsi lain di Indonesia. Sebagai contoh kepadatan penduduk provinsi DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi berpenduduk paling jarang adalah Papua, yaitu 6 jiwa per km^2.

Setiap wilayah dalam suatu negara memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Kota besar di negara mana pun cenderung memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan.

Penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah lain, terutama adalah faktor keadaan alam dan sosial ekonomi. Contohnya adalah sebagai berikut:

- lahan pertaniannya subur dan atau teknologi pertaniannya sangat mendukung;
- memiliki pusat pemerintahan;
- memiliki pusat kegiatan perekonomian (industri dan perdagangan);
- memiliki kelengkapan sarana serta prasarana transportasi dan komunikasi;
- fasilitasnya lebih memadai, seperti: fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, kesenian dan kebudayaan, rekreasi, dan sebagainya.

c. Migrasi penduduk

Dari berbagai jenis migrasi, urbanisasi merupakan jenis migrasi yang banyak menimbulkan masalah, baik bagi daerah tujuan maupun bagi daerah asal. Daerah tujuan urbanisasi utama pada umumnya adalah kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya.

Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah terkait dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Lebih lagi, hal ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan semacam permukiman kumuh, tingkat pengangguran yang tinggi, serta kenaikan angka kriminalitas di kota-kota besar.

B. Masalah berkaitan dengan kualitas penduduk

Secara keseluruhan, kualitas penduduk Indonesia dinilai masih rendah. Untuk mengetahui kualitas penduduk Indonesia, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta tingkat pendapatan penduduknya.

a. Tingkat pendidikan

Kualitas pendidikan penduduk terkait dengan jumlah penduduk buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan status usia sekolah. Suatu negara dikatakan memiliki penduduk dengan kualitas pendidikan tinggi apabila sebagian besar penduduk sudah bebas buta huruf, tingkat pendidikan rata-rata cukup tinggi, dan penduduk usia sekolah menempuh pendidikan.

Berdasarkan berbagai kriteria tersebut tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Perhatikan kembali **tabel 1.2.10** *(dalam subbab 1.2)!*

Dari **tabel 1.2.10** tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2006, lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 10 tahun tidak bersekolah, tidak tamat, atau belum menyelesaikan pendidikan dasar. Persentase penduduk yang pernah menjalani atau menyelesaikan SMU juga relatif masih kecil.

Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu masalah kualitas penduduk Indonesia. Beberapa penyebabnya, adalah sebagai berikut.

- Rendahnya pendapatan penduduk, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- Kurangnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.

Sebagai contoh jumlah sekolah tidak seimbang dengan jumlah penduduk usia sekolah. Selain itu, kelayakan ruang kelas pun sering kali jauh dari standar. Sebagai contoh, di beberapa daerah sering kali dikabarkan bahwa ruang kelas atau sekolah rubuh karena kondisinya jauh dari layak. Hal ini tentu memengaruhi proses belajar mengajar. Dampak lebih lanjut adalah kurangnya kemampuan siswa untuk menyerap ilmu.

sumber: *suara merdeka, 2006*

Gambar 1.3.1
Siswa siswi belajar dengan semangat di ruang terbuka.

Untuk mengetahui jumlah dan kondisi ruang kelas yang terdapat di Indonesia, perhatikanlah **tabel 1.3.2** berikut!

Tabel 1.3.2
Jumlah dan kondisi ruang kelas di Indonesia

Ruang Kelas Milik	Baik (buah)	Rusak Ringan (buah)	Rusak Berat (buah)	Jumlah ruang kelas
1. TK	59.210	25.433	8491	**93.134**
2. SD	436.375	301.370	255.421	**993.166**
3. SMP	164.217	28.830	9.847	**202.894**
4. SMA	84.138	7.130	2.572	**93.840**
5. SMK	52.004	3.697	963	**56.664**

Sumber: Departemen pendidikan nasional, 2006

b. Tingkat kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Terutama tingkat kesehatan penduduk di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2002-2003, angka kematian bayi di Indonesia 35 bayi per 1.000 bayi yang lahir hidup. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Indonesia mencapai usia rata-rata 66,2 tahun (Data dinas kesehatan: 2003).

Faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kesehatan penduduk Indonesia antara lain adalah sebagai berikut.

- Masih rendahnya tingkat kesehatan/sanitasi lingkungan.
- Masih sering berjangkitnya penyakit menular.
- Banyaknya gejala kurang gizi di masyarakat.
- Kurangnya pengetahuan penduduk tentang kesehatan.
- Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya).

Salah satu indikasi kesehatan adalah penolong persalinan. Bayi yang dilahirkan dengan bantuan dokter, bidan atau tenaga medis lain lebih aman dibandingkan dengan persalinan yang dilakukan oleh tenaga nonmedis.

Untuk mengetahui penggunaan tenaga penolong kelahiran di Indonesia, coba perhatikan **tabel 1.3.3** berikut ini!

***Tabel 1.3.3** Persentase balita berdasarkan penolong kelahiran pada tahun 2006*

Tenaga medis/fasilitas kesehatan	Jumlah (%)
Dokter	9,66
Bidan	56,47
Tenaga medis lainnya	0,57
Dukun	30,14
Keluarga	2,99
Lainnya	0,17

Sumber: Statistical Pocket Book of Indonesia, BPS: 2007

c. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan penduduk Indonesia tergolong kurang. Meskipun demikian, masih lebih tinggi dibandingkan penduduk di negara-negara miskin. Coba kamu perhatikan kembali **tabel 1.2.11** *(dalam subbab 1.2)!*

Dari **tabel 1.2.11** tersebut kamu dapat melihat pendapatan per kapita Indonesia masih jauh lebih rendah bila dibandingkan negara lain, terutama negara-negara maju.

Mata pencaharian terbesar penduduk Indonesia adalah pertanian. Pada tahun 1971, penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian mencapai 64,2%. Tahun 2006 jumlah tersebut berkurang menjadi 42,05 %. Berkurangnya mata pencaharian penduduk di sektor pertanian berjalan seiring dengan keberhasilan pembangunan dalam bidang industri di Indonesia. Industri-industri besar yang banyak menyerap tenaga kerja, antara lain: industri garmen, industri obat dan farmasi, industri makanan/minuman olahan, dan sebagainya.

sumber: Majalah Tempo, Oktober 2004

Gambar 1.3.2
Industri garmen adalah salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Untuk mengetahui besarnya tenaga kerja Indonesia untuk bidang pekerjaan lain, coba amati **tabel 1.3.4** di bawah!

Permasalahan Indonesia berkaitan dengan tingkat pendapatan adalah rendahnya pendapatan per kapita. Hal itu berarti tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia masih rendah. Jumlah masyarakat golongan ekonomi lemah masih jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat kelompok ekonomi tinggi. Jadi, tingkat pendapatan penduduk Indonesia belum merata.

Rendahnya tingkat pendapatan penduduk Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- Berkurangnya daya dukung sektor pertanian, sehingga mengurangi lapangan kerja.
- Lapangan kerja nonpertanian yang ada belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
- Sistem pengupahan pekerja masih rendah sehingga pendapatan terbatas.
- Tingkat pendidikan penduduk masih rendah.

1.3.2 Berbagai Dampak Masalah Kependudukan

A. Dampak buruk ledakan jumlah penduduk

Ledakan penduduk menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi.

Beberapa dampak buruk ledakan jumlah penduduk adalah sebagai berikut.

- Semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- Tidak mencukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lain.
- Tidak mencukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada. Akibatnya, terjadilah peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas sosial (banyak tuna wisma, pengemis, kriminalitas meningkat, dan lain-lain)

B. Dampak buruk kepadatan penduduk yang tidak merata

Tidak meratanya kepadatan penduduk di berbagai wilayah akan menimbulkan berbagai masalah, mencakup masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dampak buruk akan diterima, baik oleh daerah berkepadatan tinggi maupun rendah.

***Tabel 1.3.4** Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2006.*

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah	%
1. Pertanian	40.163.242	42,10
2. Pertambangan	923.591	0,97
3. Industri pengolahan	11.890.170	12,45
4. Listrik, gas dan air	228.018	0,24
5. bangunan	4.697.354	4,92
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	19.215.660	20,13
7. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	5.663.956	5,93
8. Keuangan asuransi, dan jasa perusahaan	1.346.044	1,41
9. Jasa kemasyarakatan	11.355.900	11,90
Jumlah	**95.456.935**	**100**

Sumber: *Statistical Pocket Book, BPS: 2007 menurut survei angkatan kerja Agustus(sakernas) 2006*

Wilayah berkepadatan tinggi, terutama adalah perkotaan dan daerah berkepadatan rendah biasanya adalah pedesaan. Perhatikan dampak buruk yang diterima kedua wilayah tersebut, melalui uraian berikut ini!

a. Dampak kepadatan penduduk yang tidak merata terhadap kehidupan sosial masyarakat

1. *Dampak bagi daerah berkepadatan penduduk tinggi (perkotaan)*

- Terjadi kelebihan tenaga kerja yang berakibat munculnya pengangguran dan meningkatnya kriminalitas.
- Terjadi masalah permukiman penduduk, yaitu munculnya permukiman kumuh.
- Menyempitnya lahan pertanian, karena telah dialihfungsikan sebagai perumahan.
- Tingkat pencemaran meningkat karena pengelolaan lingkungan yang kurang baik (permukiman terlalu padat, banyak permukiman kumuh/liar).

2. *Dampak bagi daerah berkepadatan penduduk rendah (pedesaan)*

- Terjadi kekurangan tenaga kerja penggarap lahan pertanian, sehingga produktivitas pertanian menurun/ berkurang.
- Pembangunan berjalan lebih lambat.
- Wilayah tertentu menjadi daerah mati, karena sebagian besar penduduknya pindah ke daerah lain (perkotaan).

sumber: *Majalah Tempo, September 2005*

***Gambar 1.3.3** Lingkungan pemukiman kumuh di bantaran sungai di kota-kota besar*

b. Dampak kepadatan penduduk yang tidak merata terhadap pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi terkait dengan peningkatan taraf hidup penduduk. Artinya pendapatan per kapita harus meningkat dan bebas dari kemiskinan menurun. Bagaimana kepadatan penduduk memberi dampak bagi pembangunan ekonomi?

1. *Dampak bagi daerah berkepadatan penduduk tinggi (perkotaan)*

Pembangunan ekonomi di wilayah berkepadatan tinggi, terutama perkotaan, dapat mengalami kendala. Hal itu terutama dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan cenderung tidak merata. Peningkatan pendapatan penduduk perkotaan tidak merata. Tingkat pendapatan untuk pengusaha dan pekerja tetap relatif mendukung peningkatan kesejahteranan. Namun mereka yang bekerja di sektor informal dan terlebih para pengangguran, crnderung terus terpuruk di bawah garis kemiskinan.

Masyarakat miskin di perkotaan meningkat terutama akibat bertambahnya pengangguran. Sebagai contoh, catatan BPS tahun 2005 menyebutkan jumlah penduduk yang bekerja tetap dalam 6 bulan hanya bertambah 1,2 juta orang (dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta), yang berarti menambah jumlah penganggur sebesar 600 ribu orang.

2. *Dampak bagi daerah berkepadatan penduduk rendah (pedesaan)*

Pembangunan ekonomi di wilayah berkepadatan rendah, terutama pedesaan dapat mengalami kendala terutama akibat kurang produktifnya wilayah itu. Penyebabnya adalah kurangnya tenaga penggarap lahan atau kurangnya kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk selain bertani.

Sebagai contoh, pada Maret 2008, BPS mencatat bahwa sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

c. Dampak kepadatan penduduk yang tidak merata terhadap pembangunan politik

Kehidupan politik ternyata juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Sebagai contoh, di Indonesia, penentuan wakil rakyat di DPR, didasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga menentukan layak tidaknya suatu daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

1. *Dampak bagi daerah berkepadatan penduduk tinggi (perkotaan)*

Wilayah dengan jumlah penduduk tinggi relatif lebih beruntung. Selain memenuhi syarat untuk melaksanakan pilkada, keterwakilan rakyat di DPR juga relatif besar. Namun, kepadatan yang tinggi juga rawan terhadap tingginya tingkat perbedaan pendapat dan aspirasi dalam politik.

2. *Dampak bagi daerah berkepadatan penduduk rendah (pedesaan)*

Wilayah dengan jumlah penduduk sedikit, cenderung kurang terwakili aspirasinya. Hal itu karena semakin sedikit jumlah penduduk maka semakin sedikit wakilnya. Kurang terwakilinya aspirasi, sering kali berdampak pada tingkat perkembangan wilayah itu.

Dengan demikian wilayah berkepadatan tinggi maupun rendah, memiliki potensi masalah berkaitan dengan kondisi politik suatu negara.

C. Dampak buruk terjadinya migrasi

Migrasi memengaruhi perubahan jumlah penduduk suatu wilayah. Selain itu, migrasi juga membawa dampak yang besar dalam kehidupan, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak positif yang menguntungkan di antaranya adalah hal-hal berikut.

- Terjadi transfer ilmu, teknologi, dan budaya, baik dari kota ke desa ataupun dari negara lain.
- Terjadi ikatan yang kuat antara dua daerah.
- Terjadi pemerataan taraf ekonomi.
- Ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah dan proses pembangunan berjalan lancar.

Sumber: *Harian kompas 25 April 2006*

Gambar 1.3.4
Razia gelandangan dan pengemis di Jakarta untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Meskipun migrasi membawa dampak positif, namun dampak negatif yang muncul sangat perlu diwaspadai.

Dampak negatif muncul terutama jika terjadi tingkat migrasi yang tidak seimbang (antara migrasi masuk dan migrasi keluar). Dampak negatif juga dapat muncul jika terjadi berbagai masalah kependudukan lain terkait dengan berlebihannya jumlah urban di suatu kota. Beberapa dampak negatif migrasi antara lain, sebagai berikut.

1. Pembangunan suatu daerah terhambat dan produktivitas menurun karena minimnya tenaga kerja produktif. *Misalnya:*
   - lahan pertanian terbengkalai karena tenaga produktifnya berurbanisasi;
   - orang beramai-ramai menjadi TKI, sementara yang tinggal di desa hanya tenaga-tenaga tidak produktif sehingga terjadinya kekurangan tenaga kerja di daerah tersebut.
2. Muncul masalah kepadatan penduduk di daerah tujuan migrasi dan berdampak pada masalah perumahan. Misalnya, muncul banyak permukiman kumuh.
3. Muncul masalah pengangguran yang berdampak pada meningkatnya kriminalitas. *Contoh:*
   - banyak orang datang ke kota tanpa bekal keterampilan sehingga tidak mendapatkan pekerjaan;
   - kota yang dituju sudah tidak memerlukan tenaga kerja tambahan.
4. Timbul berbagai masalah kependudukan. Misalnya, krisis hubungan antarnegara karena masalah keimigrasian (tenaga kerja, imigran gelap, dan sebagainya) atau masalah hubungan berbagai etnis di daerah urban.

D. Dampak rendahnya kualitas penduduk

Berbagai permasalahan kualitas penduduk Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Perhatikan ilustrasi berikut ini!

- Rendahnya tingkat pendidikan seseorang mengurangi kesempatannya untuk bekerja pada bidang berpenghasilan tinggi. Misalnya, seorang tenaga profesional disyaratkan memiliki tingkat pendidikan minimal D_1-S_1. Sebaliknya seseorang berpendidikan rendah umumnya hanya bisa diterima sebagai tenaga kasar bergaji rendah. Akibatnya, orang tersebut hanya mampu hidup dengan tingkat ekonomi rendah. Tingkat ekonomi yang rendah membuatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga, juga tidak mampu menyekolahkan anaknya.
- Rendahnya tingkat kesehatan seseorang membuatnya tidak produktif. Kurang produktifnya seseorang juga dapat menjadi penyebab menurunnya tingkat pendapatan.

Secara keseluruhan, rendahnya kualitas penduduk suatu negara menghambat pembangunan. Negara-negara maju didukung oleh masyarakat berpendidikan tinggi, memiliki kesehatan dan kesejahteraan yang baik, dan tingginya tingkat pendapatan. Sebaliknya negara berkembang dengan kualitas penduduk rendah akan mengalami hambatan dalam kegiatan pembangunan.

1.3.3 Penanggulangan Masalah Kependudukan

Agar masalah kependudukan tidak semakin parah, harus dilakukan berbagai penanggulangan, baik yang bersifat regional maupun nasional.

A. Upaya mengatasi ledakan jumlah penduduk

Permasalahan akibat ledakan jumlah penduduk terutama dialami oleh negara berkembang,

termasuk Indonesia. Hal itu terjadi karena negara berkembang ternyata memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan negara maju. Persentase pertumbuhan penduduknya lebih dari 2% dan termasuk kriteria tinggi.

Untuk mengurangi permasalahan akibat kelebihan jumlah penduduk tersebut, perlu dilakukan pengendalian. Apakah bentuk pengendaliannya?

Pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk berhubungan erat dengan *proses reproduksi* manusia. Maka, usaha pengendalian terutama ditujukan kepada mereka yang masih bisa memiliki anak. Di Indonesia berbagai usaha yang dapat ditempuh melalui dua program utama yaitu program Keluarga Berencana dan pendidikan kependudukan.

a. Program Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (PKB) berarti pengaturan kelahiran untuk mencapai sebuah keluarga ideal. Keluarga ideal terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak.

Saat ini Keluarga Berencana (KB) menjadi upaya untuk mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Tujuan utama penyelenggaraan Program Keluarga Berencana (PKB) adalah:

- mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran; dan
- meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan masyarakat.

Pada perkembangan terakhir, landasan pelaksanaan KB adalah sukarela dan rasa tanggung jawab. Oleh karenanya dilakukan dorongan perlahan dan penerangan hingga masyarakat mencapai tingkat kesadaran. Dorongan dan penerangan terutama bagi pasangan usia subur (usia 15-45 tahun). Dalam menggalakkan PKB dilakukan kampanye Gerakan Keluarga Berencana (GKB).

Gerakan Keluarga Berencana merupakan salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. Gerakan Keluarga Berencana juga diarahkan untuk mengendalikan *laju pertumbuhan penduduk* dengan cara penurunan angka kelahiran *(Ingatlah kembali uraian tentang upaya mengatasi ledakan penduduk pada subbab 1.2.1.A)*.

Penurunan angka kelahiran tersebut bertujuan untuk mengejar tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud suatu keluarga sejahtera.

Gerakan Keluarga Berencana (GKB) telah mampu mendorong masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Hal itu ditandai dengan munculnya KB Mandiri, Lingkaran Biru KB, serta Lingkaran Emas KB.

b. Pendidikan kependudukan

Pendidikan kependudukan ditempuh dengan membekali sejumlah ilmu kependudukan kepada masyarakat. Tujuan pembekalan ilmu kependudukan terutama agar terbentuk sikap baru tingkah laku reproduksi dalam masyarakat.

Tingkat pendidikan memengaruhi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, seseorang tentu semakin baik menyikapi kepentingan pengendalian kepadatan penduduk dalam suatu negara. Sikap baik tentu akan tercermin dalam perilaku yang baik pula, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap pengendalian jumlah penduduk. Bentuk dukungan tersebut misalnya mengatur kelahiran dan membatasi jumlah anak. Negara dengan jumlah penduduk terkendali tentu memiliki taraf hidup yang lebih tinggi.

Jadi, pengetahuan dinamika penduduk yang kamu pelajari dalam subbab ini berguna bagimu untuk lebih mengetahui berbagai permasalahan kependudukan dan cara mengatasinya. Kamu juga sudah dapat memikirkan apa yang dapat kamu sumbangkan sebagai warga negara terkait dengan masalah kependudukan tersebut.

c. Berbagai usaha lain

Di samping melaksanakan Gerakan Keluarga Berencana (GKB) dan pendidikan kependudukan di berbagai jenjang sekolah, pemerintah dan pihak-pihak tertentu juga menempuh berbagai usaha lain.

Berbagai usaha pendukung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan produksi pangan untuk mengatasi kekurangan bahan pangan (misalnya dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian);
- Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang jumlahnya sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah.
- Meningkatkan jumlah fasilitas sosial dan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik).
- Meningkatkan jumlah lapangan kerja sehingga sebanding dengan jumlah penduduk usia kerja.

C. Penanggulangan masalah migrasi dan kepadatan penduduk yang tidak merata

Kamu telah mengetahui berbagai dampak migrasi. Meskipun tidak sedikit dampak positif yang diberikan oleh kegiatan migrasi, berbagai permasalahan juga timbul dan menjadi sangat mengganggu bagi suatu daerah atau negara.

Berbagai hal perlu dilakukan untuk menangani permasalahan akibat migrasi penduduk.

a. Usaha pengurangan kegiatan urbanisasi

Salah satu kegiatan migrasi yang membawa banyak masalah adalah urbanisasi. Oleh karenanya, urbanisasi harus dikurangi dan dikendalikan.

Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah urbanisasi antara lain berikut ini.

1. ***Melakukan pemerataan pembangunan***

Untuk mengurangi urbanisasi perlu dilakukan peningkatan pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan meliputi penyediaan sarana prasarana serta berbagai fasilitas (kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain).

2. ***Meningkatkan produktivitas lahan pertanian***

Peningkatan produktivitas lahan pertanian terutama di pedesaan, antara lain dilakukan melalui *intensifikasi* pertanian.

3. ***Meningkatkan kualitas penduduk***

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui peningkatan keterampilan penduduk. Dengan keterampilannya diharapkan mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam atau potensi di lingkungannya dengan lebih maksimal. Contoh: memberi keterampilan pada para ibu dan remaja atau merintis industri rumah tangga.

sumber:Koran Kompas.

Gambar 1.3.5
Memberi keterampilan pada para ibu dan remaja sehingga tercipta lapangan kerja baru.

3. ***Penyebaran industrialisasi***

Pembangunan pusat industri di daerah-daerah untuk menyerap tenaga kerja setempat.

4. ***Mengimbau para urban***

Mengimbau para urban agar tidak memberikan *iming-iming* kehidupan kota (yang belum tentu enak) atau mengajak saudara, teman, dan sanak saudaranya untuk berurbanisasi.

b. Usaha mengatasi akibat urbanisasi di kota

Jika kota terlanjur penuh dengan kaum urban, hal-hal khusus perlu dilaksanakan untuk membuat kota menjadi lebih nyaman. Misalnya:

- Menertibkan permukiman kumuh (di pinggiran rel KA, bantaran sungai, taman-taman kota, dan sebagainya);
- Memukimkan kembali penduduk di daerah kumuh ke tempat yang layak. Misalnya dengan membangun perumahan rakyat yang murah atau rumah susun;
- Mengurangi kepadatan kota, misalnya dengan melaksanakan transmigrasi umum.

Berbagai usaha yang ditempuh untuk mengatasi masalah migrasi terkait erat dengan penanggulangan masalah akibat kepadatan penduduk tidak merata. Bagaimanapun, masalah migrasi dan kepadatan penduduk tidak merata merupakan dua masalah yang saling berkaitan satu sama lain.

D. Penanggulangan rendahnya kualitas penduduk

Kualitas penduduk Indonesia dapat berkembang baik, bila ditunjang dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia ditekankan pada terciptanya kualitas penduduk yang maju dan mandiri. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia, terutama tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya.

a. Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan

Beberapa upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan penduduk, antara lain:

- mencanangkan program wajib belajar 9 tahun sejak Mei 1994;
- mengadakan proyek belajar jarak jauh (Universitas Terbuka);
- memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi;
- mencanangkan program orang tua asuh;
- melakukan penyempurnaan kurikulum, pembaruan metode, serta media pengajaran;
- meningkatkan kualitas guru dengan mengadakan Latihan Kerja Guru (LKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); serta

- mengadakan program-program untuk meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat, misalnya: mendirikan perpustakaan di berbagai daerah, juga mengadakan perpustakaan keliling, koran masuk desa, dan lain-lain.

sumber: Majalah Tempo

Gambar 1.3.6 *Meningkatkan minat baca dengan penyediaan media massa*

b. Upaya mengatasi rendahnya tingkat kesehatan

Berbagai upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia, antara lain:

- mengadakan perbaikan gizi masyarakat;
- mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan;
- pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular;
- membangun sarana-sarana kesehatan seperti: Puskesmas, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), dan Rumah Sakit; dan
- meningkatkan peran serta masyarakat melaui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sejak 1983. Posyandu memberikan pelayanan kesehatan melalui ibu-ibu PKK tingkat RW/Kelurahan yang telah dibina oleh petugas kesehatan.

sumber:www.sheepindonesia.org

Gambar 1.3.7
Kegiatan Posyandu tiap bulan di lingkungan RW membantu memenuhi kebutuhan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan serta penambahan gizi anak.

c. Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendapatan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, antara lain sebagai berikut.

- Pengembangan pertanian dengan *diversifikasi* dan *industrialisasi pertanian* sehingga dapat meningkatkan hasil setiap pekerja.
- Membuka lapangan kerja baru dan memperluas lapangan kerja.

sumber: The American Encyclopedia

Gambar 1.3.8 *Peningkatan usaha pertanian dengan industrialisasi adalah target agar hasil pertanian meningkat dan tingkat pendapatan petani.*

- Penerapan sistem Upah Minimum Regional (UMR) bagi perusahaan yang mempunyai pekerja.
- Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
- Meningkatkan taraf pendidikan bagi penduduk.
- Merangsang kemauan berwiraswasta.

Berbagai upaya yang telah disebut di atas ternyata sangat membantu terjadinya peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Meskipun kualitas penduduk Indonesia belum setinggi di negara-negara maju, peningkatan tersebut sangat jelas terlihat.

Misalnya, dalam bidang pendidikan peningkatan kualitas terlihat dengan menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf dan semakin banyaknya jumlah penduduk yang tamat sekolah SD hingga SMA, juga Perguruan Tinggi. Bahkan pada masa sekarang tidak sedikit orang Indonesia yang melanjutkan ke pendidikan lanjut (S2) baik di dalam maupun luar negeri.

Kualitas kesehatan dan tingkat pendapatan penduduk Indonesia pun semakin meningkat dari waktu ke waktu. Misalnya:

- menurunnya tingkat kematian bayi dari tahun ke tahun;
- meningkatnya harapan hidup penduduk;
- menurunnya angka kemiskinan; dan lain-lain.

RANGKUMAN

1. *Ledakan jumlah penduduk:* secara alami dipengaruhi tingginya angka kelahiran yang disebabkan oleh:
   - banyak perkawinan usia muda (akibat tradisi dan tingkat pendidikan rendah);
   - tidak ada atau kurang berhasilnya program pembatasan kelahiran.
2. *Kepadatan penduduk tidak merata, terjadi karena wilayah tertentu memiliki berbagai kelebihan:*
   - lahan pertanian lebih subur dan atau teknologi pertanian sangat mendukung;
   - memiliki pusat pemerintahan;
   - memiliki pusat kegiatan perekonomian (industri dan perdagangan);
   - memiliki kelengkapan sarana serta prasarana transportasi dan komunikasi;
   - memiliki berbagai fasilitas sosial budaya yang lebih memadai.
3. *Migrasi penduduk yang banyak menimbulkan masalah terutama urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar):* karena adanya daya dorong dari desa dan daya tarik dari kota.
4. *Kualitas penduduk Indonesia* (tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan) *masih tergolong rendah.*
5. *Dampak ledakan jumlah penduduk:*
   - sumber-sumber kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) makin terbatas;
   - fasilitas sosial, kesehatan, dan berbagai fasilitas pendukung lain tidak mencukupi;
   - jumlah lapangan kerja tidak cukup bagi tenaga kerja yang ada.
6. *Dampak kepadatan penduduk yang tidak merata:* dialami baik oleh daerah berkepadatan tinggi (perkotaan) maupun daerah berkepadatan rendah (pedesaan). Dampaknya mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.
7. *Dampak migrasi (urbanisasi):*
   - *dampak positif:* ketersediaan tenaga kerja di kota, kelancaran proses pembangunan.
   - *dampak negatif:* meningkatnya pengangguran dan kriminalitas di kota, muncul permukiman kumuh di kota, terhambatnya pembangunan desa, menurunnya produktivitas desa.
8. *Dampak rendahnya kualitas penduduk suatu negara* (tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan) adalah terhambatnya kegiatan pembangunan.
9. *Penanggulan ledakan jumlah penduduk:*
   - menurunkan jumlah kelahiran dengan program khusus (misalnya GKB dan pendidikan kependudukan);
   - meningkatkan produksi pangan;
   - meningkatkan jumlah fasilitas sosial dan penyediaan lapangan kerja.
10. *Penanggulan kepadatan penduduk tidak merata:* terutama dengan mengatasi peningkatan urbanisasi.
11. *Penanggulangan masalah urbanisasi:*
    - pemerataan pembangunan;
    - peningkatan kualitas penduduk; dan
    - penyebaran industrialisasi
12. *Mengatasi akibat urbanisasi di kota:*
    - menertibkan pemukiman kumuh;
    - penyediaan perumahan rakyat;
    - pelaksanaan transmigrasi umum.
13. *Penanggulangan rendahnya tingkat pendidikan:*
    - mencanangkan program wajib belajar;
    - mengadakan proyek belajar jarak jauh;
    - memberikan beasiswa;
    - mencanangkan program orang tua asuh;
    - penyempurnaan kurikulum, pembaruan metode dan media pengajaran;
    - meningkatkan kualitas guru;
    - mengadakan program peningkatan minat baca dan belajar masyarakat.
14. *Penanggulangan rendahnya tingkat kesehatan:*
    - mengadakan perbaikan gizi masyarakat;
    - mengadakan penyuluhan kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan;
    - pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular;
    - membangun sarana-sarana kesehatan;
    - meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan.
15. *Penanggulangan rendahnya tingkat kesejahteraan:*
    - Pengembangan pertanian untuk meningkatkan hasil.
    - Memperluas lapangan kerja.
    - Penerapan sistem UMR.
    - Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
    - Meningkatkan taraf pendidikan;
    - Merangsang kemauan berwiraswasta.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Salah satu dampak negatif dari migrasi adalah adanya transfer ilmu, teknologi dan budaya.
2. Usaha mengatasi urbanisasi **di kota** adalah dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian di desa.
3. Salah satu dampak kepadatan tinggi adalah pengangguran.
4. Kepadatan penduduk yang tidak merata di berbagai wilayah membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk.
5. Kepadatan penduduk perkotaan yang berlebihan tidak berpengaruh pada pembangunan kota.

II. Lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Keadaan perkembangan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat disebut .. .
2. Jumlah penduduk suatu negara dan perubahannya diketahui dari hasil ... .
3. Sensus penduduk diadakan setiap ... tahun.
4. Badan yang berwenang mengadakan sensus penduduk di Indonesia adalah ... .
5. Tingginya angka kematian merupakan salah satu hal yang menandakan rendahnya tingkat ... suatu negara.
6. Gerakan Keluarga Berencana adalah salah satu program untuk mengatasi ... .
7. Pendirian perpustakaan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang ... .
8. Membuka lapangan kerja adalah bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat

1. Sebutkan masalah utama kependudukan di Indonesia!
2. Masalah-masalah apa yang dialami oleh daerah yang berkepadatan tinggi?
3. Mengapa di daerah pedesaan yang berkepadatan rendah pembangunan terhambat atau berjalan lebih lambat?
4. Sebutkan beberapa usaha untuk mengendalikan tingginya tingkat urbanisasi!
5. Sebutkan faktor yang menjadi ukuran kualitas penduduk suatu negara!
6. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Jelaskan!
7. Jelaskan dampak kepadatan penduduk yang tidak merata bagi pembangunan ekonomi!
8. Perhatikan peta di bawah!
   a. Jelaskan persebaran penduduk di Indonesia!
   b. Bagaimana gambaran penduduk di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain?
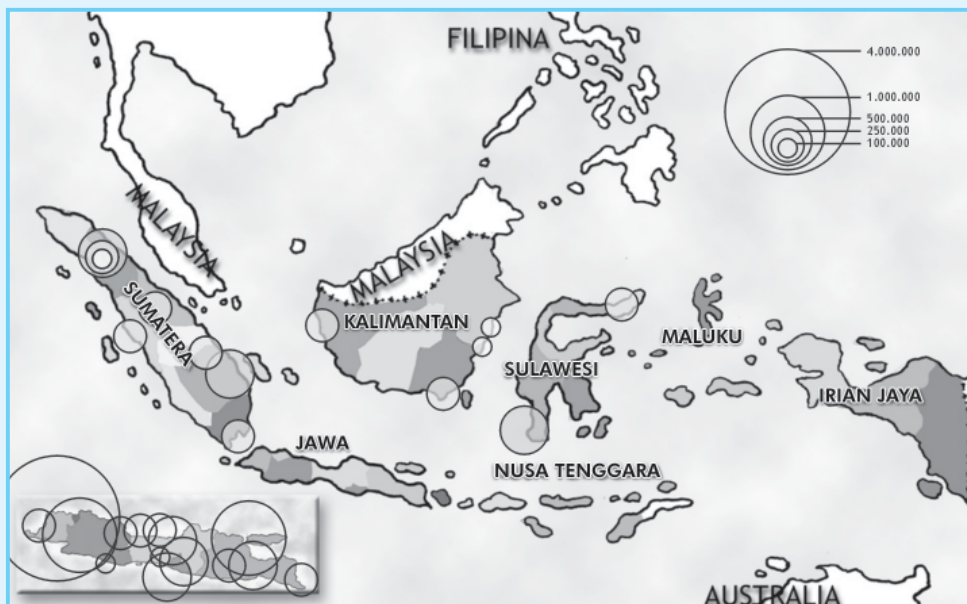
Sumber: *ilustrasi bagian produksi, 2007*

Gambar 1.3.9

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

30 JUTA PESERTA KB DILIBATKAN

Untuk meningkatkan jumlah peserta baru program Keluarga Berencana, ada baiknya 30 juta akseptor atau peserta KB dilibatkan untuk mempromosikan program KB. Sebab, jika hanya mengandalkan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, jumlahnya tidak memadai. "Akseptor KB perlu diajak dan dihargai partisipasinya," kata mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prof Dr Haryono Suyono (1983-1993) dalam pertemuan dengan tokoh agama, para pakar, dan praktisi KB di Jakarta, Selasa (8/1).

Kepala BKKBN saat ini, dr Sugiri Syarif MPA, menyatakan, ada tiga skenario proyeksi kependudukan Indonesia pada tahun 2015. Pertama, jika peserta KB meningkat 1 persen per tahun, penduduk Indonesia hanya akan menjadi 237,8 juta jiwa. Kedua, jika peserta KB tetap konstan, penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 255,5 juta jiwa. Ketiga, jika peserta KB menurun 0,5 persen per tahun, jumlah penduduk akan **membengkak** menjadi 264,4 juta jiwa. "Yang mengkhawatirkan, dalam lima tahun terakhir kesertaan masyarakat ber-KB hanya meningkat rata-rata 0,5 persen per tahun.

Untuk itu peserta program KB pada tahap awal, yang berusia rata-rata di atas 60 tahun harus dilibatkan. Jumlahnya mencapai 12 juta.

"Silver college"

Haryono menyodorkan ide pengembangan *silver college* untuk mempersiapkan senior/sesepuh dan aktivis sebagai pengabdi KB dan pembangunan yang bermutu melalui pelatihan nasional dan internasional. "*Silver college* ini khusus untuk sesepuh yang rambutnya sudah berubah menjadi perak," papar Haryono.

Untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan komitmen Tujuan Pembangunan Milenium 2015, peserta KB harus terus ditingkatkan dan mempermudah akses KB. "Berdayakan peserta Keluarga Berencana agar mampu berwirausaha, menjamin anak-anaknya agar bisa sekolah dan menjaga kesehatannya. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia akan meningkat," kata Haryono. Jadi, program Keluarga Berencana tidak hanya sebatas pembatasan angka kelahiran, namun juga terkait dengan kesejahteraan keluarga dan kualitas manusia Indonesia.

Disarikan dari : Kompas, 9 Januari 2008

A. Menjawab Pertanyaan

1. Ceritakan pendapatmu mengenai artikel di atas!
2. Jika peserta KB di Indonesia menurun 0,5 %, berapakah prakiraan penduduk Indonesia? Apakah hal itu akan memperbaiki/mengurangi kualitas penduduk Indonesia? Jelaskan!
3. Apa yang dimaksud dengan "*silver college*"?
4. Menurutmu, apa sajakah langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menaikkan kualitas penduduk Indonesia?
5. Berdasarkan komposisi penggolongan penduduk, termasuk dalam golongan apakah para anggota *silver college* pada umumnya? Jelaskan!

B. Portofolio

Buatlah sebuah penelitian kecil mengenai kualitas penduduk di lingkunganmu. Berikut adalah langkah yang harus ditempuh.

1. Bentuklah kelompok kecil (4-5 orang)!
2. Temuilah beberapa orang yang bersedia diwawancarai (± 10 orang) dengan pertanyaan sebagai berikut!
   a. Nama, tempat, dan tanggal lahir
   b. Status perkawinan (berkeluarga/belum)
   c. Asal daerah
   d. Tingkat pendidikan
   e. Jenis pekerjaan
   f. Alasan datang/tinggal di daerah sekarang
2. Tulis hasil wawancara dalam sebuah tabel!
3. Lakukan diskusi kelompok dan buat kesimpulan hasil wawancara dengan menjawab pertanyaan berikut!
   a. Apa alasan utama mereka bermigrasi?
   b. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak diminati?
   c. Apakah pekerjaan mereka saat ini sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka?
   d. Apakah faktor dari daerah asal yang mendorong mereka bermigrasi?
   e. Apakah faktor dari daerah tujuan yang menarik mereka bermigrasi?
4. Buatlah laporan dan sajikan di depan kelas *(mintalah petunjuk guru)!*

1.4 Masalah Lingkungan Hidup dan Penanggulangannya

Tahukah kamu bahwa sisa hutan di Indonesia pada tahun 2005 lalu adalah 85 juta hektar atau sekitar 43 % dari total daratan Indonesia? Hal ini berkurang drastis dari angka 162 juta hektar pada tahun 1950 dulu. Gelar sebagai Zamrud Khatulistiwa karena hutan hijau lebat pun dicabut sudah. (Tempo, 3-9 Desember 2007).

Namun sesungguhnya, siapa yang berada di balik penggundulan itu? Lebih lagi, apakah sesungguhnya dampak penggundulan hutan bagi kehidupan kita? Bukankah hutan yang digunduli itu dapat meningkatkan pertanian dan industri? Mengapa hal ini disebut kerusakan lingkungan? Sebelum memulai pelajaran ini, diskusikan sejenak soal 1-3 di samping.

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Apakah yang kamu ketahui tentang lingkungan hidup?
2. Dapatkah manusia hidup tanpa lingkungan hidup? Mengapa demikian?
3. Mungkinkah lingkungan hidup menjadi rusak? Apakah penyebabnya?

Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas!

Sejak zaman dahulu, manusia dapat bertahan hidup karena lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Karena itulah lingkungan penting bagi manusia. Walaupun demikian, apabila manusia terlalu memaksakan diri memberdayakan lingkungan tanpa merawatnya, lingkungan tersebut akan rusak. Tidak berhenti di sana, sebab ternyata ke-rusakan lingkungan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

1.4.1 Pengertian dan Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Sebelum belajar tentang berbagai masalah lingkungan, ikuti penjelasan tentang pengertian dan unsur-unsur lingkungan hidup berikut ini!

A. Pengertian lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah suatu daerah dengan segala sesuatu di dalamnya, yang saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut **UU RI No. 4 Tahun 1982**, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup binaan.

- Lingkungan hidup alamiah merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan komponen-komponen biotik maupun abiotik lain, tanpa adanya dominasi manusia.

  Interaksi yang terjadi dalam lingkungan alamiah membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contoh lingkungan hidup alamiah adalah hutan primer yang belum tersentuh manusia.
- Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup alamiah yang telah didominasi kehadiran manusia, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, ideologi, kependudukan, dan sebagainya.

  Contoh lingkungan hidup binaan adalah sebuah kota atau hutan primer yang telah mengalami *suksesi* karena adanya kegiatan manusia (penebangan, perladangan, dan lain-lain).

B. Unsur-unsur lingkungan hidup

Unsur-unsur yang membentuk lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: unsur abiotik, unsur biotik, dan unsur budaya.

a. Unsur abiotik (fisik)

Unsur abiotik atau fisik, yaitu unsur lingkungan berupa benda-benda mati pendukung lingkungan, meliputi: matahari, air, udara, dan tanah. Unsur abiotik sering disebut sebagai unsur nonhayati.

b. Unsur biotik

Unsur biotik, yaitu unsur lingkungan berupa makhluk hidup, seperti: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Unsur biotik sering disebut sebagai unsur hayati.

c. Unsur budaya

Budaya, yaitu unsur lingkungan yang berada di sekitar kehidupan manusia dalam lingkungan, seperti keadaan sistem nilai-nilai, cara hidup masyarakat, adat-istiadat, pendidikan, dan lain-lain. Budaya tercermin dalam pola dan gaya hidup tiap kelompok masyarakat dalam lingkungan tertentu. Seperti yang tampak pada gambar 1.4.1.

Sumber: *Indonesian Heritage*, 2002
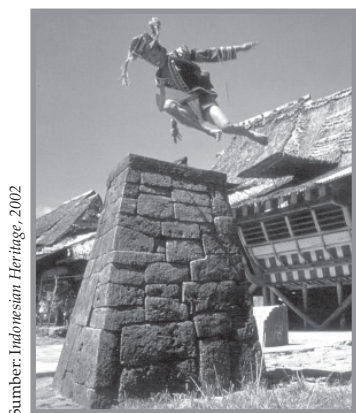
Gambar 1.4.1
Tradisi lompat batu di Nias.
Budaya adalah salah satu unsur lingkungan.

1.4.2 Peranan Lingkungan Hidup bagi Kehidupan

Lingkungan alam menyediakan kekayaan berupa udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Manusia dengan seluruh akal budinya memanfaatkan semua itu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, lingkungan memiliki peranan sangat penting bagi manusia. Tanpa lingkungan, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat melangsungkan hidupnya.

Manusia tidak dapat lepas dari lingkungannya. Secara umum peranan lingkungan bagi kehidupan, antara lain adalah sebagai berikut.

- Tempat makhluk hidup tinggal dan melakukan aktivitas.
- Penyedia sumber bahan mentah.
- Sumber kehidupan.

Berikut ini manfaat dan peranan setiap unsur lingkungan hidup secara lebih terperinci.

a. Peranan unsur-unsur abiotik

Peranan unsur-unsur abiotik adalah sebagai be-rikut.

- Matahari, memberikan energi bagi seluruh kehidupan di bumi.
- Tanah, merupakan tempat berpijak dan tinggal manusia dan makhluk hidup lain, tempat bercocok tanam, dan penyedia berbagai unsur tambang.
- Air, adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak mungkin ada kehidupan.

Sumber: *Harian Kompas Jateng 8 April 2008*

Gambar 1.4.2
Seorang penambang pasir di Semarang.
Selain tempat berpijak, tanah dapat diolah manusia.

b. Peranan unsur-unsur biotik

Peranan unsur-unsur biotik adalah sebagai berikut.

- Tumbuhan berhijau daun sebagai pembuat dan penyedia makanan.
- Hewan sebagai sumber makanan dan tenaga.
- Manusia sebagai pengolah alam.
- Mikroorganisme sebagai pengurai.

1.4.3 Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi lagi dengan baik.

Lingkungan dikatakan mengalami kerusakan jika terjadi ketidakseimbangan di dalamnya atau dalam ekosistem bersangkutan. Misalnya ling-

kungan hidup yang semula berada dalam keadaan stabil, kemudian mengalami tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

A. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan hidup, antara lain tanah kritis/tandus; hutan gundul; pencemaran udara, air, tanah, dan suara; kerusakan barang-barang tambang; dan kerusakan ekosistem.

Berbagai kerusakan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi kerusakan lahan pertanian, kerusakan hutan, dan pencemaran lingkungan.

a. Kerusakan lahan pertanian

Kerusakan lahan pertanian adalah berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada lahan pertanian. Contoh kerusakan lahan pertanian:

- lahan menjadi tandus karena penanaman jenis tanaman tertentu secara terus-menerus, atau pemupukan berlebihan;
- lahan pertanian mengandung bahan kimia berlebihan (pupuk, pestisida, dan lain-lain) yang dapat membahayakan jika terserap tumbuhan.

b. Kerusakan hutan

Bentuk-bentuk kerusakan hutan, misalnya:

- gundulnya hutan karena kegiatan penebangan terus-menerus;
- pembakaran hutan yang digunakan sebagai ladang dan permukiman;
- penggantian jenis tanaman hutan menjadi hutan produksi.

Sumber: *Majalah Tempo, Oktober 2007*

Gambar 1.4.3
Kebakaran hutan di Sampit. Menimbulkan kerusakan hutan yang merugikan masyarakat dan negara.

c. Pencemaran lingkungan

Pencemaran adalah gejala masuknya zat-zat atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga kualitasnya turun. Turunnya kualitas lingkungan tampak dari berkurangnya kegunaan lingkungan, hingga kemungkinan terjadinya kematian pada organisme yang hidup di dalamnya.

Pencemaran lingkungan meliputi pencemaran lingkungan air, tanah, udara, dan suara. Pencemaran memberikan dampak buruk, bagi manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme.

1. *Pencemaran air*

Pencemaran air terjadi karena adanya penambahan bahan yang merugikan/berbahaya ke dalam air dalam jumlah cukup besar, sehingga memengaruhi kegunaan atau kualitas air.

Air yang telah tercemari mungkin tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lain. Air yang telah tercemar berbahaya bagi kesehatan.

Beberapa bentuk pencemaran air, misalnya:

- bercampurnya limbah industri dan rumah tangga ke dalam perairan terbuka seperti danau, sungai, dan sebagainya;
- meresapnya zat-zat kimia beracun dari timbunan limbah industri ataupun rumah tangga ke dalam air tanah, sumur, dan saluran air;
- tercemarnya air danau dan sungai oleh pestisida;
- tercemarnya air tanah oleh limbah nuklir dengan bahaya radioaktifnya.

Sumber: *Kompas 25 November 2006*

Gambar 1.4.4 *Pencemaran sungai oleh sampah rumah tangga dan limbah industri.*

2. *Pencemaran laut*

Pencemaran laut yaitu penambahan zat beracun/berbahaya dengan sengaja ataupun tidak ke dalam lingkungan laut, samudera, dan muara. Misalnya:

- tercemarnya laut oleh limbah industri atau rumah tangga yang dibuang secara langsung atau melalui sungai-sungai;

- tercemarnya laut oleh tumpahan minyak dari kapal tanker yang bocor atau yang bertabrakan di tengah laut;
- tercemarnya laut oleh kebocoran pipa minyak mentah di dasar laut;
- tercemarnya laut oleh berbagai jenis logam berat ditandai dengan tercemarnya hewan laut yang dikonsumsi manusia.

sumber:*Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990*

Gambar 1.4.5 *Ribuan orang (tentara dan awam) dikerahkan untuk membersihkan tumpahan minyak mentah akibat kebocoran tanker Amoco Cadiz sejauh 200 km dari pantai di perairan Breton, Prancis.*

3. *Pencemaran tanah*

Pencemaran tanah terutama oleh dampak limbah industri dan rumah tangga atau penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian. Misalnya:

- meningkatnya kandungan zat kimia dari pestisida di dalam tanah;
- merembesnya zat kimia berbahaya dari timbunan limbah industri atau rumah tangga ke lapisan permukaan tanah; dan
- menurunnya kegunaan tanah karena kadar pestisida yang berlebihan.

4. *Pencemaran udara*

Pencemaran udara adalah masuknya zat pencemar ke dalam udara dalam jumlah banyak sehingga secara langsung atau tidak berpengaruh pada kesehatan, keamanan, dan kenyamanan manusia dan makhluk hidup lain.

Bentuk-bentuk pencemaran, antara lain:

- pencemaran oleh pembakaran dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan bermotor;
- pencemaran oleh proses industri dan pengolahan limbah domestik;
- pencemaran oleh penggunaan bahan-bahan dalam alat semprot *(aerosol)*; dan
- pencemaran oleh penyemprotan pestisida.

Berbagai bahaya pencemaran udara dapat digambarkan sebagai berikut.

- Pencemaran udara dapat langsung berdampak pada lingkungan sekitarnya. Namun dapat juga tertiup angin dan mencemari lingkungan lain, sehingga daerah yang tercemar semakin luas.
- Sebagian zat pencemar udara di atmosfer dapat turun kembali ke bumi bersama hujan, salju, atau angin. Contoh: terjadinya hujan asam.

  Hujan asam terjadi karena air di atmosfer yang berbentuk awan bercampur dan bereaksi dengan sulfur dioksida (SO_2) dan karbon dioksida (CO_2). Menurut penelitian, hujan asam telah menyebabkan kerusakan ribuan hektar hutan pinus di belahan bumi utara. Hujan asam juga menyebabkan perkaratan pada bangunan.
- Sebagian zat pencemar tetap tinggal di atmosfer, mengakibatkan kenaikan suhu bumi dan menyebabkan kerusakan lapisan ozon.
  - ☑ Zat pencemar (polutan) berupa belerang dioksida (SO_2) dan karbon dioksida (CO_2) yang berasal dari pabrik, mesin-mesin kendaraan bermotor, pesawat terbang, asap hasil kebakaran hutan dan segala *senyawa freon* membentuk lapisan di udara, menimbulkan efek rumah kaca.

sumber:*Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990*

Gambar 1.4.6 *Pencemaran udara oleh pembakaran sisa gas alam lazim melepaskan belerang dioksida (SO_2) dan karbon dioksida (CO_2) sebagai zat pencemar udara.*

  Efek rumah kaca yaitu peningkatan suhu bumi karena terjebaknya panas dalam la-pisan atmosfer oleh adanya lapisan zat-zat polutan seperti CO_2 yang menghalangi (ber-tindak seperti kaca) sehingga panas di bumi tidak mungkin terpancar ke stratosfer.
  - ☑ Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 15-30 km. Lapisan ozon adalah pelindung bumi, yang berguna membantu memantulkan sebagian panas dan menyaring *sinar ultraviolet* dari matahari. Jika lapisan ozon rusak, hal buruk yang dapat terjadi adalah:
    - Panas dan sinar ultraviolet matahari yang sampai ke bumi akan berlebihan. Kelebihan sinar ultraviolet menyebabkan kanker kulit, dan kematian organisme hidup.
    - Kelebihan panas matahari dapat mencairkan gletser di pegunungan tinggi dan lapisan es di kutub-kutub bumi. Mencairnya es menaikkan permukaan laut di bumi dan dapat menenggelamkan daratan, terutama dataran rendah.

Perhatikan **gambar 1.4.7** dan **1.4.8** berikut!

sumber: www.bdg.lapan.org.id
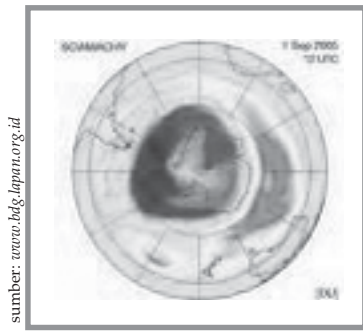
Gambar 1.4.7
Rekaman satelit di atas Antartika.
Noktah hitam di tengah menunjukkan lubang ozon.
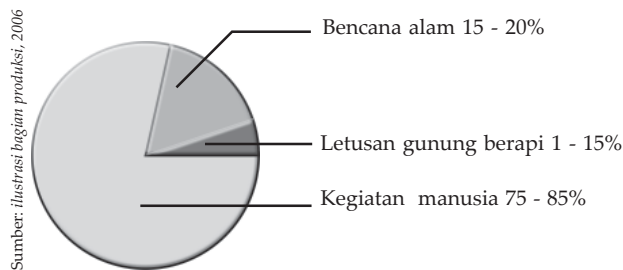
Gambar 1.4.8
Diagram persentase penyebab kerusakan ozon.

B. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup

Penyebab utama kerusakan lingkungan hidup yaitu faktor alam dan faktor manusia.

a. Proses alam

Proses alam adalah semua peristiwa yang terjadi secara alamiah. Berbagai proses alamiah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Misalnya, letusan gunung api, gempa bumi, banjir, pergantian iklim, dan sebagainya.

Di dalam lingkungan alamiah, interaksi antara unsur-unsur lingkungan, pertukaran energi, pergantian komunitas flora dan fauna merupakan respon terhadap perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh peristiwa alam tersebut.

Sumber: Harian Kompas, Desember 2004

Gambar 1.4.9
Tsunami yang melanda Banda Aceh Desember 2004, menghancurkan seluruh permukiman serta fasilitas sosial.

b. Kegiatan manusia

Guna mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup, manusia dengan kemampuannya didukung kemajuan teknologi mengolah dan memanfaatkan kekayaan yang disediakan oleh alam. Namun, sering kali interaksi antara manusia dengan lingkungannya menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem serta kerusakan lingkungan.

Dari zaman dahulu disadari atau tidak, berbagai kegiatan manusia turut serta memengaruhi stabilitas lingkungan. Berikut adalah berbagai kegiatan yang mengganggu kestabilan lingkungan.

1. ***Kegiatan perburuan***

   Kegiatan berburu (secara liar) dapat menyebabkan punahnya berbagai jenis binatang dan akhirnya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem.

2. ***Kegiatan perladangan***

   Untuk membuka area perladangan baru dalam perladangan berpindah dilakukan penebangan dan pembakaran hutan. Selain menambah jumlah lahan kritis, penebangan dan pembakaran hutan akan mengurangi luas hutan.

   Perhatikan ilustrasi pada **gambar 1.4.10** berikut!

Sumber: ilustrasi bagian produksi, 2006
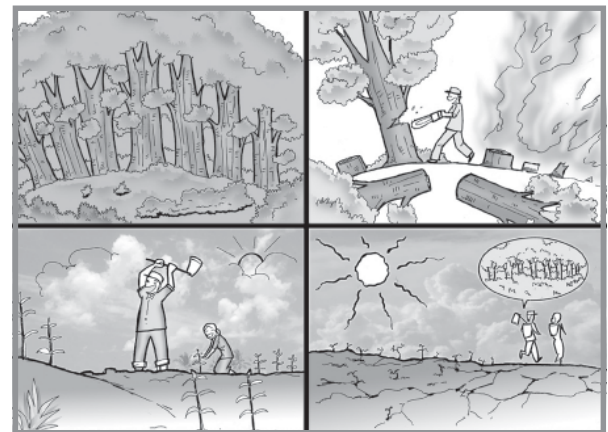
Gambar 1.4.10
Hutan lindung ditebang untuk diubah menjadi ladang lalu ditinggalkan jika sudah tidak subur lagi.

3. ***Kegiatan pertanian***

   Untuk meningkatkan produksi pertanian dilakukan pemupukan dan pemberantasan hama. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan tanah. Berbagai bentuk kemajuan teknologi di bidang pertanian, juga sering menimbulkan kerusakan lingkungan.

sumber: *Suara Pembaruan.*

Gambar 1.4.11
Penyemprotan pestisida berlebihan dapat merusak tanah pertanian.

4. ***Kegiatan penebangan hutan***

   Penebangan hutan secara liar mengakibatkan berkurangnya luas hutan dengan cepat. Penggundulan hutan membuat fungsi hutan hilang dan menambah jumlah lahan kritis.

5. ***Kegiatan penangkapan ikan***

   Penangkapan ikan dengan pukat harimau, racun, dan bahan peledak menyebabkan punahnya berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan rusaknya lingkungan.

6. ***Kegiatan pertambangan***

   Penggalian barang tambang yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Sumber: *Harian kompas 4 Agustus 2007*

Gambar 1.4.12
Sungai Akjwa di Papua, mengalami pencemaran (warna air menjadi abu-abu) akibat buangan limbah (tailing) pertambangan Freeport

7. ***Kegiatan industri***

   Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri sangat banyak membantu menyediakan berbagai kebutuhan manusia yang berkualitas baik. Namun, industri juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup karena limbah industri dan limbah hasil industri dapat mencemari lingkungan.

1.4.4 Pelestarian Lingkungan Hidup

Melestarikan lingkungan hidup berarti melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup berarti pula suatu bentuk upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya.

A. Pentingnya pelestarian lingkungan hidup

Lingkungan hidup mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan alam secara langsung atau tidak memberikan kehidupan dan penghidupan bagi manusia. Ada keterikatan sangat erat antara lingkungan alam dan manusia.

Dari pernyataan tersebut dapat diuraikan bahwa ada dua hal penting yang menjadi alasan pentingnya pelestarian lingkungan, yaitu:

- Pengambilan dan pemanfaatan kekayaan alam dengan memerhatikan kelestarian lingkungan akan memberikan dukungan maksimal bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kerusakan lingkungan akan mengakibatkan kerugian sangat besar bagi manusia atau makhluk hidup lain.

  Jadi, kerusakan lingkungan adalah kerugian bagi manusia juga.
- Manusia hidup dari generasi ke generasi. Lingkungan tempat tinggalnya saat ini, nantinya akan ditempati oleh generasi berikut. Seperti halnya manusia pada zaman ini, generasi berikut pun memerlukan lingkungan dengan seluruh kekayaannya, agar dapat hidup baik.

Jadi, generasi sekarang wajib memberikan warisan lingkungan yang baik bagi generasi berikut.

B. Bentuk pelestarian lingkungan hidup

Agar fungsi dan peranan lingkungan hidup dapat berkesinambungan, maka dalam mengeksploitasi dan memanfaatkan potensi alam harus tetap memerhatikan kelestariannya.

Berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk melestarikan lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelestarian lingkungan berupa **usaha perbaikan (kuratif)** dan **usaha pencegahan (preventif).**

a. **Usaha perbaikan (kuratif)**

Usaha perbaikan (kuratif) terutama dilakukan untuk mengatasi lingkungan yang terlanjur rusak. Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan lingkungan pada kondisi semula. Bentuk usaha perbaikan lingkungan, antara lain:

- kegiatan penanaman hutan kembali (reboisasi) terhadap hutan-hutan yang sudah terlanjur gundul;
- kegiatan perbaikan kondisi tanah, misalnya: tanah yang telah tercemar bahan pestisida dinetralkan dengan penanaman jenis pohon tertentu, penambahan unsur-unsur yang diperlukan tanah (unsur hara dan air);
- kegiatan rehabilitasi lahan kritis, misalnya pada tanah longsor. Kegiatan rehabilitasi bisa dilakukan dengan penanaman pohon-pohon berakar kuat.

b. **Usaha pencegahan (preventif)**

Usaha pencegahan (preventif) adalah usaha pelestarian lingkungan hidup sebelum lingkungan tersebut menjadi rusak.

Bentuk-bentuk usaha preventif terutama adalah memperlakukan alam lingkungan dengan cara-cara tertentu sebaik mungkin agar kerusakan dapat dihindari. Misalnya:

- pembatasan kegiatan eksploitasi sumber-sumber alam (seperti: pembatasan perburuan dan penebangan hutan);
- penghematan pamakaian sumber-sumber alam (minyak dan gas, bahan-bahan tambang);
- melakukan pengolahan tanah dengan baik, seperti *terasering* pada tanah miring, pemberian pupuk/pestisida dengan komposisi tepat, dan lain-lain);
- melakukan penghijauan;
- menghindarkan pencemaran tanah, air, dan udara (misalnya pengolahan limbah, penertiban pembuangan sampah, dan sebagainya).

Sumber: Indonesian Heritage, Jilid 3, 2002

Gambar 1.4.13
Pengolahan tanah miring dengan cara terasering untuk menjaga kondisi tanah.

1.4.5 Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Apakah setiap negara melakukan pembangunan? Ya! Setiap negara melakukan pembangunan. Bagaimana pembangunan suatu negara (termasuk Indonesia) terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan?

A. Pembangunan nasional

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari berbagai bidang pembangunan tersebut, tentu di dalamnya tercakup kegiatan pembangunan bersifat fisik, bukan? Misalnya, pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan atau hiburan, dan prasarana transportasi (jalan, jembatan, dan lain-lain).

Setiap negara melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apa tujuan dan sasaran pembangunan nasional?

Jika membaca kembali Pembukaan UUD 1945, kita dapat membuat daftar tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagai berikut.

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Keempat tujuan tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan memiliki kepentingan nasional dan internasional. Kepentingan nasional berhubungan dengan kesejahteraan bangsa dan negara, sedangkan kepentingan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam pembangunan terkandung tujuan untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (wilayah negara). Dapatkah kamu menghubungkannya dengan topik tentang lingkungan hidup yang telah kita bahas sebelumnya?

B. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan sebenarnya adalah terjemahan dari gagasan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*. Ide pembangunan berkelanjutan dicetuskan untuk mengantisipasi kondisi lingkungan hidup yang semakin buruk dari waktu ke waktu.

Dalam pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab sesuai daya dukung lingkungan.

Jadi, dalam menentukan strategi pembangunan, aspek lingkungan dijadikan pertimbangan utama. Konsep tersebut pada dasarnya mengandung aspek pelestarian daya dukung lingkungan hidup dan solidaritas antargenerasi. Bagaimana sejarah lahirnya pembangunan berkelanjutan?

a. Kesepakatan pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia

Kesepakatan tentang pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia, melalui proses panjang. Proses dimulai dengan isu-isu lingkungan pada tahun 1960-an, kesadaran lingkungan, berbagai perdebatan, hingga diselenggarakannya beberapa konferensi tingkat dunia, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Lingkungan pertama di Stockholm, Swedia (1972), dan KTT Lingkungan kedua di Nairobi, Kenya (1982). PBB juga membentuk Program Lingkungan Hidup PBB *(The United Nations Environment Programme*/UNEP*)* setelah KTT Stockholm.

Konsep pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* diamanatkan dalam KTT Bumi di *Rio de Janeiro, Brazil* tahun 1992. Pada KTT tersebut dihasilkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Atas prakarsa PBB, setiap negara kemudian membentuk suatu dewan untuk menindaklanjuti kesepakatan KTT Bumi tersebut. Dewan itu dinamakan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (DNPB) atau *National Council for Sustainable Development* (NCSD). Sebagai wadah koordinasi antarbadan-badan NCSD, oleh PBB dibentuk *United Nation Commision on Sustainable Development* (UNCSD).

Beberapa KTT terus diadakan untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Misalnya, KTT Bumi di *New York*, Amerika Serikat tahun 1997 dan KTT Penerapan Konsep-konsep Pembangunan Berkelanjutan di *Johannesburg*, Afrika Selatan tahun 2002.

KILAS INFORMASI!

Tanggal 3 Desember 2007 lalu, sejumlah negara dunia berkumpul di Bali untuk membahas tentang pemanasan global. Acara itu dinamakan ***UN Climate Change Conference*** *atau dalam bahasa Indonesia, "Konferensi Perubahan Iklim PBB".*

Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon acara tersebut antara lain membahas penurunan emisi gas rumah kaca 25-40 % pada tahun 2020 seperti yang diusulkan para ilmuwan.

Walau belum menemukan kata sepakat, pertemuan ini akan dilanjutkan lagi tahun 2009 mendatang.

Sumber: Kompas

Gambar 1.4.14
Lambang KTT mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002

b. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Di Indonesia isu dan kepedulian pengelolaan lingkungan hidup dimulai tahun 1972 dalam Seminar Nasional Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Bandung. Selanjutnya Indonesia mengirim utusan ke berbagai KTT Lingkungan. Pada Kabinet Pembangunan III telah ada Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Bagaimana halnya dengan *pembangunan berkelanjutan*?

Dalam **UURI No. 23 tahun 1997** tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kamu dapat menjumpai istilah "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup".

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup dan produktivitas lingkungan hidup. Selanjutnya istilah yang lebih sering digunakan adalah pembangunan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Indonesia juga telah menerima konsep KTT Bumi tentang *sustainable development*. Gagasan pembentukan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (DNPB) telah mulai dilakukan sejak tahun 1993 di lingkungan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KMNKLH).

Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (DNPB) bersifat independen berada di bawah presiden. Secara *ex officio* presiden adalah ketuanya.

Tugas Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (DNPB) adalah sebagai berikut.

- Merumuskan dan mensosialisasikan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah, termasuk upaya mengintegrasikan dimensi sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan.

- Membantu Presiden dalam upaya pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan strategis di bidang pembangunan berkelanjutan.
- Membantu Presiden dalam menindaklanjuti dan melaksanakan kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

C. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup mempunyai ciri-ciri berikut.

- Pembangunan memerhatikan kebutuhan masa depan (generasi yang akan datang). Kekayaan alam merupakan warisan para leluhur untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, alam harus dimanfaatkan dengan baik dan penuh perhitungan. Dengan demikian kelestarian lingkungan dapat dipertahankan dan akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
- Pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya.
- Pelaksanaan pembangunan selalu memerhatikan azas-azas pelestarian.
- Pelaksanaan pembangunan selain bertujuan untuk kesejahteraan sedapat mungkin juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

D. Bentuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup sangat nyata, misalnya: *ozon* yang berlubang, hutan yang makin menipis, berkurangnya lahan potensial, dan ribuan spesies terancam punah. Berbagai kerusakan itu merupakan hal-hal utama yang menjadi pertimbangan untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan. Setiap bentuk kegiatan harus mempertimbangkan berbagai kerusakan yang mungkin timbul.

Pengambilan keputusan pelaksanaan rencana kegiatan yang berdampak pada lingkungan perlu kajian yang cermat dan mendalam. Oleh karenanya pada tahun 1986, pemerintah Indonesia mengeluarkan **Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1986** tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan bersangkutan. AMDAL merupakan komponen studi kelayakan *(feasibility study)*. Berdasarkan kajian AMDAL, instansi pemerintah berwenang memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap rencana kegiatan tertentu.

Besar kecilnya dampak dipengaruhi jumlah manusia yang akan terkena, luas wilayah penyebaran, lama berlangsungnya, intensitas, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena, dan sebagainya.

Perhatikan dua contoh kasus berikut!

- Jika mendirikan sebuah pabrik, harus diketahui terlebih dahulu bentuk limbah yang akan dihasilkan. Juga harus diperhitungkan ke area mana limbah itu akan dibuang, serta apa dampaknya bagi lingkungan sekitar.
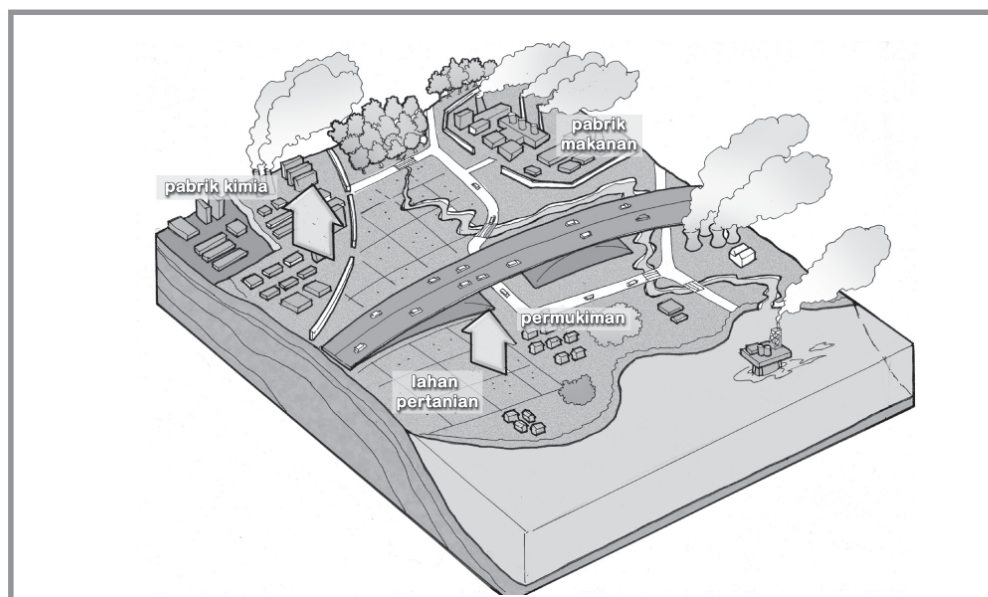
Gambar 1.4.15 *Apa bentuk limbah berbagai macam pabrik tersebut? Ke mana limbah itu akan dibuang dan bagaimana caranya? Akankah lingkungan sekitar menjadi tercemar, lalu bagaimana cara mengatasinya?*

- Jika membangun perumahan dengan cara menimbun rawa, perlu dilakukan analisis. Akankah berakibat banjir di kemudian hari karena hilangnya rawa sebagai penampung air, berapa sering dan seberapa luas wilayah yang akan terkena dampaknya.

Selain melalui kegiatan AMDAL, berbagai negara termasuk Indonesia juga melakukan berbagai usaha untuk menindaklanjuti pembangunan berwawasan lingkungan.

Berbagai usaha yang mengarah kepada bentuk pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan teknologi dengan limbah sesedikit mungkin. Misalnya:
   - penyediaan fasilitas pengolahan limbah di lingkungan industri;
   - kegiatan daur ulang *(recycle)*; dan
   - pengurangan bahan penambah *(additive)* yang menimbulkan limbah.

dok. http://www.e-dukasi.net/
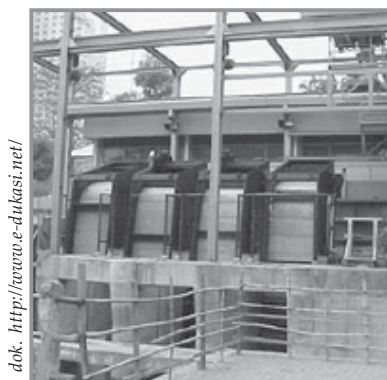
Gambar 1.4.16
Instalasi pengolahan limbah (IPAL) di pabrik, mengolah limbah pabrik sehingga bentuk buangan ke lingkungan (sungai danau, laut), sudah tidak mencemari.

Sumber: Majalah Pendopo -Pusdakota, 2007

Gambar 1.4.17
Pabrik daur ulang (recycle) untuk limbah kertas. Sampah kertas dipilah-pilah dan didaur lagi menjadi kertas yang lebih rendah mutunya.

2. Mencegah industrialisasi yang merusak lingkungan. Misalnya: di berbagai kota di dunia, pabrik-pabrik didirikan dalam suatu kawasan tersendiri yang jauh dari pemukiman. Tujuannya agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan tempat tinggal.
3. Menghindari penggunaan sumber daya alam secara boros dan berlebihan. Misalnya:
   - mencegah penebangan liar terutama terhadap hutan-hutan lindung;
   - pembatasan penambangan untuk jenis bahan tambang tertentu.
4. Memilih teknologi pengolahan sumber daya alam yang tepat dan dapat mengendalikan pencemaran. Misalnya:
   - melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengilangan minyak untuk memperkecil pencemaran, seperti: penetapan ketinggian cerobong, pengecekan kualitas pipa minyak, dan melakukan penghijauan di area kilang minyak;
   - melakukan kegiatan penambangan yang ramah lingkungan.
5. Mencari alternatif pemakaian bahan untuk mengurangi pencemaran. Misalnya:
   - mencari pengganti senyawa freon pada lemari pendingin dan penyejuk udara (AC) dengan jenis lain yang memiliki tingkat pencemaran lebih kecil;
   - mencari pengganti gas pendorong pada *aerosol*;
   - mengembangkan teknologi pembuatan plastik ramah lingkungan, di mana plastik dapat terurai oleh bakteri dan organisme *(terdegradasi)* ketika berinteraksi dengan cahaya.
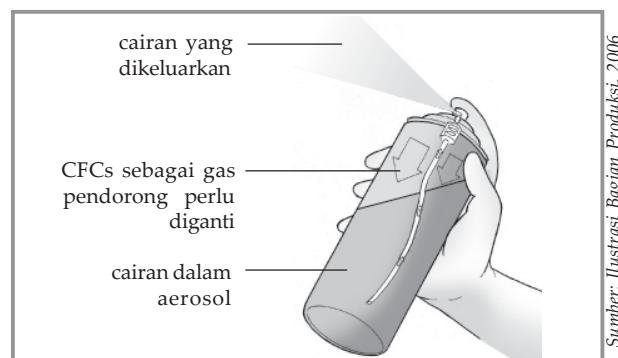
Sumber: Ilustrasi Bagian Produksi, 2006

Gambar 1.4.18 *Mengganti Klorofluorokarbon (CFCs) dalam aerosol akan mengurangi pencemaran atmosfer*

sumber: Koleksi bagian produksi

Gambar 1.4.19
Limbah plastik dapat dikurangi dengan teknologi pembuatan plastik yang dapat terdegradasi

6. Pengendalian produksi barang dan jasa dalam batas kewajaran dan serasi dengan sumber alam yang tersedia.
   - Pabrik kertas *(pulp)* melakukan penanaman hutan tanaman industi untuk memenuhi bahan baku kayu dalam proses pembuatan kertas. Hutan Tanaman Industri (HTI), dapat dibuat pada beberapa lokasi dan ditebang secara bergilir.

sumber:*Indonesian Heritage, Jilid 3, Tahun 2002*

Gambar 1.4.20
Pembenihan dan penanaman hutan industri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk pembuatan kertas milik PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau, Sumatera.

E. Usaha mencapai keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan

Sejak tahun 1960-an masalah lingkungan hidup telah diperbincangkan. Tahun 1992 telah disepakati suatu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain itu, setiap periode tertentu dilakukan KTT dari satu negara ke negara lain. Meskipun demikian hingga saat ini masalah lingkungan hidup belum dapat diselesaikan dengan baik dan kemerosotan lingkungan yang terjadi makin memprihatinkan.

Hal-hal yang membantu keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan di seluruh dunia, antara lain:

1. *Kesadaran penyelamatan lingkungan oleh semua pihak*

   Kegiatan penyelamatan lingkungan tidak dapat dilakukan seorang diri. Semua pihak secara perorangan atau bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Mereka adalah pengusaha, buruh, nelayan, petani, ahli lingkungan, ilmuwan, usahawan, budayawan, politikus, ekonom, pelajar, pemuda, pemuka masyarakat, pemuka agama, masyarakat adat, pemerintah, dan sebagainya.

2. *Kerja sama dari seluruh negara di dunia*

   Jika hanya beberapa negara yang peduli akan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, tentu tidak berguna. Mengapa? Karena, kerusakan di satu negara akan menimbulkan dampak bagi dunia secara menyeluruh.

3. *Pembentukan lembaga-lembaga peduli lingkungan*

   Terbentuknya lembaga/badan yang peduli lingkungan berguna untuk bertindak sebagai badan pengawas. Sebagai pengawas, berbagai lembaga tersebut akan memberikan masukan, kritik, dan saran agar setiap kegiatan senantiasa berwawasan lingkungan.

a. Kerja sama tingkat dunia

Kerja sama antarnegara di dunia untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan dilakukan dalam berbagai bentuk kesepakatan. Beberapa kesepakatan tersebut di antaranya adalah:

- kesepakatan melakukan reduksi emisi CO_2, *freon*, dan gas dalam *aerosol*. Reduksi emisi CO_2, *freon*, dan gas dalam *aerosol* berkait erat dengan antisipasi terhadap meningkatnya *lubang ozon* di atmosfer;
- kesepakatan untuk melakukan *embargo* terhadap negara-negara produsen yang hasil produksinya memberikan dampak kerusakan lingkungan;
- kesepakatan untuk tidak memakai produk industri yang tergolong merusak dan tidak memerhatikan kelestarian lingkungan dalam proses pembuatannya;
- dukungan pengelolaan berbagai sumber daya alam yang mengalami kondisi kritis dan nyaris punah, seperti: terumbu karang di dasar laut, hutan-hutan tropis, dan sebagainya.

b. Pembentukan lembaga peduli lingkungan

Berbagai badan atau lembaga swadaya yang mengkhususkan diri dalam menanggulangi masalah kerusakan lingkungan hidup dan mengupayakan dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Lembaga tersebut dapat kita temui, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Beberapa di antara nama lembaga itu dapat kamu kenal melalui pembahasan berikut.

1. Lembaga peduli lingkungan di Indonesia

Lembaga/organisasi peduli lingkungan nonpemerintah tingkat nasional (Indonesia), antara lain: adalah WALHI dan ICEL.

- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

  Wahana Lingkungan Hidup adalah organisasi lingkungan yang didirikan oleh lembaga-lembaga masyarakat Indonesia tahun 1980.

  Tujuan pendirian WALHI adalah untuk mengkonsolidasi usaha-usaha konservasi sumber alam, menimbulkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan gerakan lingkungan di Indonesia.

  WALHI tidak bekerja langsung di lapangan, tapi melalui beberapa organisasi jaringan kerjanya, seperti:
  - ☑ organisasi yang memerhatikan masalah polusi (SKREEP);
  - ☑ organisasi yang menangani masalah hutan tropis (SKEPHI);
  - ☑ organisasi yang menangani masalah pestisida (KRAPP);
  - ☑ organisasi jaringan riset aksi (JARI); dan sebagainya.
- *Indonesian Central for Environmental Law (ICEL)*

  Indonesian Central for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga yang memerhatikan hukum lingkungan.

b. Lembaga peduli lingkungan di dunia

Lembaga/organisasi peduli lingkungan nonpemerintah tingkat internasional, antara lain:

- *Greenpeace International*

  Greenpeace International adalah organisasi internasional yang menangani masalah lingkungan hidup. Organisasi ini didirikan di Kanada tahun 1969 oleh para *environmentalis* yang prihatin atas perusakan lingkungan hidup.

Sumber: *Harian kompas 19 Nov 2007*

Gambar 1.4.21
Kapal greenpeace rainbow warrior menghalangi kapal tanker MT Westana yang membawa minyak sawit di Riau. Menurut Greenpeace,perkebunan kelapa sawit merusak hutan gambut di Indonesia.

  Anggota *Greenpeace* menggunakan cara protes tanpa kekerasan untuk menyelamatkan lingkungan. Misalnya:
  - ☑ melakukan protes jika terdapat penebangan hutan melebihi batas wajar;
  - ☑ menegur dan meminta pertanggungjawaban terhadap kapal-kapal tanker yang mencemari laut dengan minyak atau limbah buangan.
- *World Wildlife Fund International* (WWF)

  World Wildlife Fund International (WWF) merupakan badan satwa liar dunia yang dibentuk tahun 1961.

  Kegiatan yang dilakukan WWF adalah menyalurkan dana dari usaha pengumpulan dana ke proyek-proyek penyelamatan satwa liar, penelaahan dan penelitian keberadaan spesies untuk kepentingan pelestarian. Misalnya:
  - ☑ Survei keberadaan terumbu karang di seluruh dunia dan membantu badan-badan terkait untuk mengusahakan perlindungan dan pengawasan (*monitoring*) terhadap penggunaan sumber daya tersebut.
- Beberapa lembaga peduli lingkungan tingkat internasional lain adalah *The Northern Alliance for Sustainability, Oxfam International,* dan *Friends of The Earth.*

Agar tercapai hasil maksimal, semua lembaga peduli lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional harus bekerja sama. Selain antarlembaga, kerja sama juga dilakukan dengan banyak pihak lain, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kerja sama sangatlah penting karena berbagai kegiatan dalam upaya melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan sering kali justru bertentangan dengan kegiatan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Oleh karenanya jika semua pihak bekerja sama dan saling berkomunikasi, tentu dapat dipilih jalan keluar terbaik untuk suatu masalah dalam lingkungan.

RANGKUMAN

1. *Lingkungan hidup* (UURI No. 4/1982): kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. *Ekosistem*: hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ilmu yang mempelajarinya disebut *ekologi*.
3. *Unsur-unsur lingkungan yaitu:*
   - unsur fisik/abiotik/*nonhayati*, berupa: benda-benda mati;
   - unsur biotik/*hayati*: makhluk hidup;
   - unsur budaya.
4. *Bentuk kerusakan lingkungan hidup:* kerusakan lahan pertanian; kerusakan hutan; dan pencemaran lingkungan (tanah, air, laut, udara).
5. *Penyebab kerusakan lingkungan hidup*:
   - *Proses alam*: banjir, badai topan, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kemarau panjang.
   - *Kegiatan manusia*: perburuan, perladangan berpindah, pertanian, penebangan hutan, penangkapan ikan, pertambangan, dan perindustrian.
6. *Melestarikan lingkungan hidup*: melestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut, yaitu suatu bentuk upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. *Pentingnya pelestarian lingkungan hidup:*
   - Mendapatkan dukungan maksimal dari lingkungan bagi kehidupan manusia karena kerusakan lingkungan merugikan manusia dan makhluk hidup lain.
   - Manusia hidup dari generasi ke generasi. Generasi berikut juga memerlukan lingkungan dengan seluruh kekayaannya, agar dapat hidup dengan baik.
8. *Usaha pelestarian lingkungan hidup:*
   - *Usaha perbaikan (kuratif)*: dilakukan untuk mengatasi lingkungan yang terlanjur rusak. Misal: reboisasi, perbaikan tanah, dan rehabilitasi lahan kritis.
   - *Usaha pencegahan (preventif)*: memperlakukan alam lingkungan dengan cara tertentu agar kerusakan dapat dihindari. *Bentuk:* pembatasan eksploitasi, penghematan, dan penghijauan.
9. Menurut UURI No. 23 tahun 1997, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*Sustainable Development)* adalah: upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup dan produktivitas lingkungan hidup.
10. *Sustainable development* diamanatkan pada KTT Bumi di *Rio de Janeiro* tahun 1992.
11. Untuk menindaklanjuti *sustainable development* setiap negara mendirikan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (DNPB). Koordinasi DNPB sedunia adalah *United Nation Commision on Sustainable Development* (UNCSD).
12. *Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan:*
    - Pembangunan memerhatikan kebutuhan masa depan.
    - Pembangunan tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam.
    - Pembangunan memerhatikan azas-azas pelestarian.
    - Pembangunan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
13. AMDAL *(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan):* kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraannya.
14. *Bentuk pembangunan berwawasan lingkungan:*
    - Pengembangan teknologi dengan limbah sesedikit mungkin.
    - Mencegah industrialisasi yang merusak lingkungan.
    - Menghindarkan penggunaan sumber daya alam secara boros dan berlebihan.
    - Memilih teknologi pengolahan sumber alam yang dapat mengendalikan pencemaran.
    - Mencari alternatif pemakaian bahan untuk mengurangi pencemaran.
    - Pengendalian produksi barang dan jasa dalam batas kewajaran dan serasi dengan sumber alam yang tersedia.
15. Lembaga/badan peduli lingkungan:
    - *tingkat nasional (Indonesia):* Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), *Indonesian Central for Environmental Law* (ICEL).
    - *tingkat internasional: Greenpeace International, World Wildlife Fund International (WWF), The Northern Alliance for Sustainability, Oxfam International, dan Friends of The Earth.*

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Salah satu contoh usaha preventif adalah melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak.
2. Fauna tipe australis terdapat di Indonesia, dengan penyebaran di sebelah timur seperti di Papua.
3. Tanah vulkanis berasal dari endapan lumpur sungai.

II. Salin di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Suatu daerah dengan segala sesuatu di dalamnya dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya disebut ... .
2. Tatanan utuh antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ... .
3. Tiga unsur lingkungan hidup adalah ..., ..., dan ... .
4. Benda-benda mati di dalam lingkungan hidup dikelompokkan dalam unsur ... .
5. Mikroorganisme di dalam lingkungan termasuk kelompok unsur ... .
6. Komponen biotik penghasil makanan dalam lingkungan hidup adalah ... .
7. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan untuk mengatasi lingkungan yang sudah terlanjur rusak disebut usaha ... .
8. Usaha penanaman hutan kembali disebut... .
9. Pemakaian pestisida berlebihan dapat menyebabkan pencemaran ... .
10. Kerusakan *lapisan ozon* termasuk akibat dari pencemaran ... .
11. Dua faktor penyebab kerusakan lingkungan adalah *proses alam* dan ... .
12. KTT Lingkungan I yang membahas isu kerusakan lingkungan dunia diadakan tahun 1999 di negara ... .
13. KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 mencetuskan konsep ... .
14. *National Council for Sustainable Development* (NCSD) di Indonesia dinamakan ... .
15. Wadah koordinasi antarbadan-badan NCSD, dibentuk oleh ... .
16. Salah satu ciri pembangunan berkelanjutan adalah memerhatikan kepentingan ... .
17. KTT mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang membahas rencana implementasi pembangunan berkelanjutan tahun 2002 diadakan di ... .
18. ... adalah lembaga peduli lingkungan tingkat dunia yang membantu menyalurkan dana bagi proyek penyelamatan satwa liar.
19. AMDAL merupakan kependekan dari ... .
20. AMDAL dikeluarkan sebagai Peraturan Pemerintah RI No. ... tahun ... .

III. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Apakah yang dimaksud lingkungan hidup menurut UURI No. 4 Tahun 1982?
2. Jelaskan peranan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia!
3. Uraikan dengan singkat arti kerusakan lingkungan hidup!
4. Berikan contoh untuk setiap jenis pencemaran lingkungan hidup!
5. Mengapa manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup?
6. Sebutkan akibat kerusakan lapisan ozon di atmosfer!
7. Apakah yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan?
8. Apakah arti penting KTT Bumi di *Rio de Janeiro, Brazil* tahun 1992?
9. Sebutkan tiga contoh bentuk pembangunan berwawasan lingkungan!
10. Mengapa manusia harus menyelamatkan lingkungannya?
11. Sebutkan tiga ciri pembangunan berwawasan lingkungan!
12. Sebutkan empat lembaga peduli lingkungan tingkat internasional!
13. Apakah yang kamu ketahui tentang WALHI?
14. Mengapa lembaga peduli lingkungan harus berkerja sama dengan semua pihak?
15. Sebutkan dua bentuk kerja sama antara lembaga peduli lingkungan dan pihak-pihak lain!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

Jakarta, Kota Pantai Tanpa Pantai

Dari 32 km panjang pantai Jakarta, tidak ada sejengkal pun pantai yang berfungsi sebagai ruang publik sehingga bisa dimanfaatkan secara nyaman, leluasa, dan cuma-cuma. Bahkan untuk sekadar melihat debur ombak dan menyaksikan pemandangan laut. Hanya ada pantai Ancol dan untuk memasuki kawasannya tidaklah gratis.

Dengan dalih tidak adanya lahan yang cukup untuk kegiatan industri, perdagangan, dan permukiman, sejak tahun 1990-an berkembang gagasan untuk melakukan reklamasi (penimbunan) pantai utara Jakarta. Bukan hanya gagasan karena kemudian dibentuk Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan tersebut menyusun rencana reklamasi.

Reklamasi pantai Jakarta Utara mencakup areal sepanjang 32 km panjang pantai, dan 1,5 km lebar ke arah laut. Di atasnya lalu dibangun apar-temen, perumahan, hotel, pusat bisnis, industri, dan perdagangan.

Reklamasi memberikan manfaat bagi perkembangan Jakarta. Namun, berbagai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi tidak dapat dihindari. Akibat reklamasi telah tergusur puluhan ribu nelayan. Pengambilan pasir untuk pengurukan telah memacu tenggelamnya beberapa pulau di gugusan Kepulauan Seribu. Dampak lain adalah berubah-nya arus laut di pantai yang menyebabkan abrasi dan pengikisan di pantai wilayah lain. Muara sungai juga akan menjadi semakin panjang dan landai sehingga air sungai sulit masuk ke laut. Kegiatan reklamasi pun turut mengubah sistem tata air di wilayah pesisir lama. *(Disarikan dari Kompas).*

A. Menjawab Pertanyaan

1. Apakah *reklamasi pantai* tersebut sudah berwawasan lingkungan?
2. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan apa yang timbul akibat kegiatan *reklamasi pantai*?
3. Mengapa hutan mangrove di daerah pantai perlu diselamatkan?
4. Menurutmu, bagaimana seharusnya pembangunan di daerah pantai dilakukan?

B. Portofolio

Buatlah sebuah kliping tentang dampak nyata berbagai kegiatan pembangunan bagi lingkungan. Sumber dapat kamu dapatkan dari berbagai media cetak maupun media elektronik (termasuk internet). Kliping tersebut harus mampu mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Pilihlah salah satu komponen lingkungan hidup yang spesifik (misal: hutan, laut, udara dsb.) untuk kamu bahas.
2. Ceritakan bagaimana keadaan lingkungan hidup tersebut ketika masih belum tersentuh industri dan pembangunan.
3. Dampak pembangunan bagi lingkungan hidup tersebut.
4. Cara mengatasi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang sudah terjadi!

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak pada ... .
   a. 6° LU - 11° LS dan 59° BT - 141° BT
   b. 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 114° BT
   c. 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT
   d. 6° LU - 11° LS dan 59° BT - 111° BT
2. Salah satu pengaruh letak astronomis di Indonesia adalah ... .
   a. lalu lintas perdagangan lancar
   b. terdiri dari banyak kepulauan
   c. beriklim tropis
   d. vegetasi sejenis
3. Kalau di Jakarta pukul 08.00 WIB, maka pada saat yang sama di Maumere adalah pukul ... .
   a. 07.00 c. 10.00
   b. 09.00 d. 11.00
4. Suhu udara di Indonesia cukup tinggi, karena terletak pada wilayah antara ... .
   a. 6° LU - 11° LS
   b. Benua Asia dan Benua Australia
   c. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik
   d. alur angin muson tenggara dan barat
5. Ilmuwan yang membagi jenis-jenis tumbuhan Indonesia sesuai tinggi rendahnya suatu daerah adalah ... .
   a. Fr. Junghuhn
   b. Wallacea
   c. Robert Malthus
   d. Galileo
6. Hutan heterogen yang terdapat di daerah bercurah hujan tinggi disebut ... .
   a. hutan musim
   b. hutan hujan tropis
   c. hutan sabana
   d. hutan homogen
7. Di bawah ini yang termasuk fauna asiatis di Indonesia adalah... .
   a. gajah, harimau, badak
   b. gajah, banteng, komodo
   c. harimau, badak, anoa
   d. banteng, komodo, kasuari
8. Tanah yang berasal dari pelapukan debu vulkanis dan material letusan gunung api dinamakan tanah ... .
   a. aluvial c. andosol
   b. humus d. gambut
9. Wilayah laut yang dilalui oleh Garis Wallace adalah laut antara ... dan laut antara ... .
   a. Pulau Bali dan Lombok, Pulau Sulawesi dan Kalimantan
   b. Pulau Jawa dan Sumatera, Kepulauan Riaiu dan Pulau Kalimantan
   c. Pulau Bali dan Lombok, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku
   d. Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, Pulau Timor dan Kepulauan Tanimbar
10. Negara berpenduduk terbanyak adalah ... .
    a. India
    b. Cina
    c. Rusia
    d. Amerika Serikat
11. Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pada kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan penduduk ... .
    a. alami
    b. sosial
    c. per dekade
    d. total
12. Piramida penduduk berbentuk nisan menggambarkan keadaan penduduk pada masa mendatang akan ... .
    a. bertambah
    b. tetap
    c. berkurang
    d. stasioner
13. Kelompok usia produktif adalah ... .
    a. 0-14 tahun
    b. 5-19 tahun
    c. 15-64 tahun
    d. 65 tahun ke atas
14. Cara mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata adalah dengan ... .
    a. melaksanakan urbanisasi
    b. melaksanakan transmigrasi
    c. melaksanakan keluarga berencana
    d. menyediakan perumahan murah
15. Negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah... .
    a. Indonesia
    b. Myanmar
    c. Philipina
    d. Singapura

16. Negara ASEAN yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah ... .
    a. Indonesia
    b. Brunei
    c. Singapura
    d. Philipina
17. Angka kematian bayi adalah ... .
    a. angka yang menunjukkan batasan usia seseorang memiliki harapan hidup sejak lahir sampai meninggal dunia
    b. jumlah bayi meninggal dunia sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 bayi yang lahir hidup
    c. kualitas dan tingkat gizi bayi
    d. jumlah tenaga medis yang membantu proses persalinan per 1000 bayi
18. Keadaan perkembangan penduduk yang berlangsung sangat cepat disebut... .
    a. jumlah penduduk
    b. keadaan penduduk
    c. dinamika penduduk
    d. ledakan penduduk
19. Salah satu faktor rendahnya tingkat pendapatan penduduk Indonesia adalah... .
    a. tingginya kualitas SDM
    b. tingkat pendidikan yang tinggi
    c. banyaknya lapangan kerja
    d. sistem pengupahan kerja masih terbatas
20. Dampak kepadatan penduduk yang tidak merata di daerah pedesaan adalah ... .
    a. banyaknya permukiman kumuh
    b. produktivitas pertanian rendah
    c. pembangunan desa semakin cepat
    d. timbulnya pengangguran di perkotaan
21. Salah satu dampak kepadatan penduduk yang tidak merata bagi kehidupan politik adalah ... .
    a. wilayah berkepadatan rendah memiliki wakil rakyat yang sangat kuat
    b. wilayah berkepadatan tinggi tidak memiliki kesempatan memilih wakilnya
    c. wilayah berkepadatan tinggi mempunyai peluang memiliki wakil lebih banyak dibandingkan wilayah berkepadatan rendah
    d. kehidupan politik di kedua wilayah selalu aman
22. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, serta berbagai komponen biotik dan abiotik tanpa dominasi manusia disebut ... .
    a. lingkungan hidup
    b. lingkungan hidup alamiah
    c. lingkungan hidup binaan
    d. lingkungan hidup manusia
23. Di bawah ini yang dapat menyebabkan kerusakan hutan adalah ... .
    a. pembabatan hutan untuk industri
    b. konservasi hutan lindung
    c. reboisasi
    d. pelestarian hutan gambut
24. Pencemaran udara dapat dicegah antara lain dengan ... .
    a. menggunakan BBM sebanyak-banyaknya
    b. menggunakan pestisida
    c. memilih naik sepeda dibandingkan kendaraan bermotor
    d. membuang sampah ke sungai
25. Efek rumah kaca terjadi antara lain karena ... .
    a. suhu bumi yang meningkat
    b. adanya lapisan polutan pada atmosfer
    c. banyaknya penggunaan kaca rumah
    d. banyaknya lahan gambut di dunia
26. Usaha preventif untuk melestarikan lingkungan hidup adalah ... .
    a. reboisasi
    b. rehabilitasi lahan kritis
    c. melakukan penghijauan
    d. membuang sampah pada tempatnya
27. Di bawah ini kegiatan yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan adalah ... .
    a. tidak adanya instalasi pengolahan limbah
    b. tidak mendaur ulang sampah plastik
    c. diberlakukannya AMDAL bagi perusahaan
    d. Penambahan bahan penambah limbah
28. Lembaga tingkat nasional yang mengurus persoalan lingkungan hidup adalah ... .
    a. *Greenpeace*
    b. WALHI
    c. WWF
    d. Oxfam
29. Salah satu upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah ... .
    a. sekolah gratis hingga perguruan tinggi
    b. program wajib belajar 9 tahun
    c. menertibkan permukiman kumuh
    d. menggusur berbagai sekolahan
30. Dampak positif terjadinya migrasi adalah ... .
    a. adanya transfer ilmu teknologi, dan budaya
    b. adanya kesenjangan tingkat perekonomian
    c. timbul permukiman-permukiman kumuh
    d. produktivitas pertanian di daerah pedesaan semakin meningkat

II. Jawablah dengan singkat!

1. Sebutkan arti garis Wallace dan garis Weber!
2. Sebutkan ciri-ciri hewan asiatis, dan berilah contoh!
3. Ceritakan terjadinya angin muson tenggara!
4. Apakah dampak positif dari letak geografis Indonesia?
5. Mengapa Jakarta, Medan, dan Surabaya menjadi kota yang menarik banyak pendatang dari berbagai wilayah lain di Indonesia?
6. Apakah tsunami 2004 lalu berdampak pada kepadatan penduduk di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)? Mengapa?
7. Apakah yang dimaksud dengan *commuter*?
8. Sebutkan tiga faktor pertumbuhan penduduk!
9. Jelaskan yang kamu ketahui tentang pembangunan berwawasan lingkungan!
10. Apakah yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup? Berilah empat contoh kerusakan yang terjadi di Indonesia!
11. Jelaskan akibat kerusakan lapisan ozon?
12. Berilah setidaknya lima contoh kejadian yang terjadi di Indonesia karena pemanas-an global!
13. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya urbanisasi? Jelaskan pendapatmu!
14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pi-ramida penduduk stationer!
15. Sebutkan apa yang dimaksud dengan step-pa dan berilah contoh!

Bab 2

Proses Kebangkitan Nasional
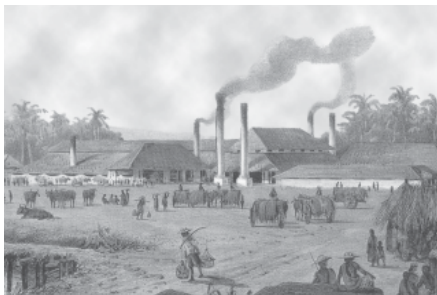
PENDAHULUAN

Kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa, yakni bangsa Indonesia tidak terjadi dengan serta-merta. Sebelumnya, bangsa kita di berbagai daerah harus mengecap pahitnya penjajahan dengan sistem yang tidak menguntungkan rakyat. Hal ini tentu memicu berbagai rakyat di berbagai daerah untuk melawan penjajahan.

Perlawanan pun tidak berhasil sekali tepuk, apalagi perlawanan dahulu sangat bersifat kedaerahan. Inilah yang melahirkan perasaan kesatuan dan persaudaraan yang kuat antara berbagai suku dan bangsa di Nusantara. Kesadaran kebangsaan tersebut ditandai dengan Sumpah Pemuda .

Sejak momen itulah, kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia terbentuk. Perlawanan terhadap Belanda menjadi semakin kompak, hingga akhirnya Indonesia berhasil memerdekakan diri dari penjajahan pada tahun 1945.

Peta Konsep

Proses Kebangkitan Nasional
Perkembangan Kolonialisme dan Pengaruhnya di Berbagai Daerah
Berbagai kebijakan pemerintah kolonial
Perlawanan rakyat di berbagai daerah
Persebaran agama di Indonesia pada masa kolonial
Terbentuknya Kesadaran Nasional, dan Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia
Pengaruh kekuasaan kolonial terhadap munculnya nasionalisme Indonesia
Tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia
Perkembangan organisasi pergerakan nasional
Peran organisasi nasional dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia
Penggunaan istilah Indonesia sebagai Identitas Nasional

2.1 Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat, serta Pengaruhnya di Berbagai Daerah

sumber: *Maj Tempo, 12-18 Des 2005*
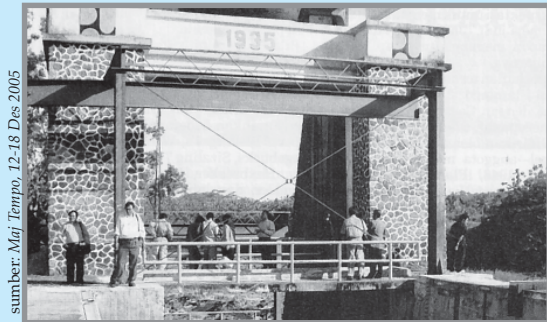
Perhatikan gambar di atas ini. Ini adalah sebuah pintu air untuk irigasi. Di bagian atas dinding tertulis angka tahun 1935. Angka tahun itu menunjukkan bahwa saluran air ini dibangun pada masa Indonesia masih dijajah Belanda. Saluran irigasi ini sangat diperlukan untuk mengairi tanah-tanah pertanian dan perkebunan. Pengairan adalah salah satu bagian dari Politik Etis yang diterapkan penjajah Belanda di Indonesia.

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Sebelum pelajaran ini, pernahkah kamu mendengar tentang Politik Etis?
2. Siapakah tokoh yang mengusulkan Politik Etis?
3. Selain pengairan, apa yang dibuat penjajah Belanda dalam Politik Etis?
4. Bagi bangsa Indonesia, pembangunan saluran irigasi semacam ini merupakan suatu keuntungan atau suatu hal yang merugikan?
5. Menurut kamu, kolonialisme dan imperialisme Barat mengembangkan Indonesia ke arah yang baik atau tidak?

Di kelas VII kita sudah melihat bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia menjadi awal kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mereka datang dan membangun koloni di Indonesia. Apa saja kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia? Apa pengaruh kebijakan-kebijakan itu terhadap kehidupan ekonomi rakyat di berbagai daerah? Apa reaksi rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonial? Bagaimana pengaruh perkembangan agama-agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan agama-agama asli pada masa kolonial?

2.1.1 Berbagai Kebijakan Pemerintah Kolonial

Selama berkuasa di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda pasca VOC terhadap Indonesia antara lain melaksanakan sistem sewa tanah, melaksanakan sistem tanam paksa, membuka Indonesia bagi penanaman modal swasta, melaksanakan politik etis.

A. Sistem sewa tanah (1816-1830)

Selama periode 1816 – 1830, sistem sewa tanah yang diprakarsai oleh **Raffles** tetap dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem sewa tanah dilaksanakan pada masa para Komisaris Jenderal dan **Gubernur Jenderal Van der Capellen**.

Proses pelaksanaan sistem sewa tanah ini berpatokan pada tiga asas, sebagai berikut.

- Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan. Rakyat diberi kebebasan penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apa pun.
- Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Mereka dijadikan bagian integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negara-negara Barat.

- Berdasarkan anggapan bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa *(tenant)* tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini, para petani diwajibkan membayar sewa tanah *(landrent)* atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah.

Sistem sewa tanah yang dilaksanakan pemerintah kolonial ini menimbulkan beberapa akibat seperti berikut ini.

- Pengaruh para bupati pribumi makin berkurang, bahkan hampir dihilangkan.
- Pelaksanaan pemungutan sewa tanah berupa beras yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Pemerintah bebas menentukan jumlahnya. Kebijakan ini mengakibatkan tindakan-tindakan sewenang-wenang yang sering merugikan rakyat.
- Kebebasan menanam dan menjual bagi para petani sering merugikan petani karena kekurangpahaman petani dalam hal distribusi. Kelemahan ini sering dimanfaatkan dan para petani sering dibohongi oleh para pembeli atau oleh atasan mereka.

Sistem sewa tanah baru dihapus pada tahun 1830 karena dianggap gagal. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat **Johannes van den Bosch** sebagai gubernur jenderal. Tugas utamanya adalah untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah atau sistem sewa berlangsung. Van den Bosch mengusulkan Sistem Tanam Paksa.

B. Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

a. Pengertian tanam paksa atau *cultuurstelsel*

Mulai tahun 1830, pemerintah Belanda menerapkan Sistem Tanam Paksa *(cultuurstelsel)*. Dengan sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman-tanaman tertentu yang sangat laku di pasaran Eropa. Tanam-tanaman yang wajib ditanam antara lain cengkeh, kopi, lada, dan tembakau. Ciri utama Sistem Tanam Paksa yang diperkenalkan oleh Van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka.

b. Alasan pengadaan Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda antara lain, karena alasan-alasan berikut.

- Kas negara yang kosong akibat besarnya dana yang dipakai untuk membiayai Perang Diponegoro dan pemberontakan di Belgia.
- Memburuknya keadaan di tanah jajahan.
- Utang VOC yang harus ditanggung oleh pemerintah Belanda.
- Pemasukan uang sewa tanah atau cara-cara lain tidak banyak memberikan hasil.

c. Tujuan tanam paksa

Sistem Tanam Paksa ini dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk memasukkan uang ke kas negara. Tujuannya agar utang dapat dibayar dan keperluan pemerintah Belanda termasuk biaya perang dapat dicukupi. Cara yang ditempuh adalah memaksa penduduk menanami sebagian tanahnya dengan tanaman-tanaman yang laku di Eropa.

d. Gagasan dan pelaksanaan tanam paksa

Gagasan Sistem Tanam Paksa diajukan oleh Gubernur Jenderal **Johannes van den Bosch**. Sistem tanam paksa merupakan gabungan dari sistem VOC di Parahyangan dengan sistem pajak tanah.

Menurut peraturan yang dibuat pemerintah Belanda, Sistem Tanam Paksa dilakukan sebagai berikut.

- Penduduk desa diwajibkan menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang ditetapkan pemerintah Belanda.
- Hasil tanaman dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
- Tanah yang disediakan untuk penanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
- Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi (± 60 hari).
- Yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah.
- Kegagalan panen kalau bukan karena kesalahan petani menjadi tanggung jawab pemerintah.
- Penanaman dan penggarapannya di bawah pengawasan langsung penduduk pribumi.
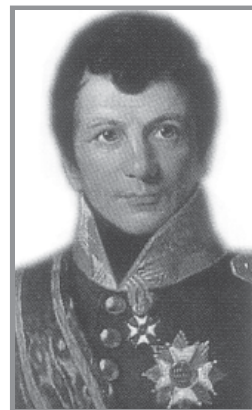
Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1992.*

Gambar 2.1.1
Johannes van den Bosch, pencetus gagasan Tanam Paksa.

Sistem Tanam Paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, karena:

- daerahnya sudah terbuka;
- struktur pemerintah feodal memudahkan pelaksanaannya;
- tanahnya subur;
- tenaga kerjanya cukup.

Melihat aturan tersebut, sebenarnya prinsip Sistem Tanam Paksa tidak terlalu memberatkan. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak sekali penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itulah yang memberatkan rakyat. Contoh penyimpangan dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa ini, adalah sebagai berikut.

- Tanah yang digunakan untuk tanam paksa dalam praktiknya melebihi seperlima, malahan ada yang sampai setengahnya.
- Tanah yang ditanami tanaman yang ditentukan pemerintah ternyata masih dikenai pajak.
- Tanah yang dipilih pada umumnya subur, sedangkan yang tidak subur untuk keperluan rakyat.
- Lamanya bekerja melebihi waktu yang ditentukan, sehingga waktu kerja yang diperlukan rakyat untuk mencukupi keperluan keluarga semakin berkurang.
- Panen yang gagal, walaupun bukan karena kesalahan rakyat, pada praktiknya menjadi tanggungan rakyat.
- Adanya sistem *cultuurprocenten* (hadiah) kepada pegawai pemerintah, bupati, dan kepala desa yang berhasil mencapai atau melampaui target produksi yang dibebankan kepada tiap-tiap desa. Hal ini sangat membebani rakyat.

e. Akibat Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa ternyata menimbulkan masalah. Berikut ini adalah beberapa akibat diterapkannya sistem tanam paksa.

- Rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, dan kematian.
- Tanah-tanah pertanian rusak karena dipergunakan untuk menanam tanaman yang berbeda dengan kebiasaan.
- Tanah pertanian terlantar akibat kurangnya waktu untuk mengerjakan tanah.
- Adanya perubahan dalam pelapisan sosial masyarakat di Jawa.
- Ekonomi "uang" mulai meresapi penduduk di wilayah-wilayah pedesaan.
- Munculnya pekerja upahan.
- Munculnya sistem penyewaan tanah kepada pengusaha Barat.

f. Kritik terhadap sistem Tanam Paksa

Perubahan peta politik terjadi di negeri Belanda di pertengahan abad ke-20. Partai liberal memenangi pemilihan umum, sehingga ide-ide liberalisme yang dipengaruhi gerakan liberalisme Perancis ikut mewarnai pentas politik di Belanda. Ajaran liberalisme di bidang ekonomi menegaskan bahwa kegiatan perekonomian harus dijalankan tanpa adanya campur tangan negara. Sementara kebijakan tanam paksa di Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Gubernur Jenderal **J.B. van den Bosch**. Karena itu, pandangan politik kaum liberali yang sedang berkuasa langsung bersinggungan dengan praktik tanam paksa di Hindia Belanda. Kaum liberal menghendaki agar sistem Tanam Paksa dihapus. Beberapa tokoh kaum liberal yang menghendaki penghapusan sistem tanam paksa antara lain **Fransen van der Putte, de Waal,** dan **Thorbecke**.

Selain golongan liberal, pada masa ini juga muncul kaum humanis yang ikut mendesak penghapusan sistem tanam paksa. Kaum humanis berpendapat bahwa sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan pemerintah Belanda di Indonesia harus dihapus karena tidak manusiawi dan menimbulkan banyak penderitaan. Beberapa tokoh humanis yang memperjuangkan penghapusan sistem tanam paksa adalah **Baron van Hoevel** dan **Eduard Douwes Dekker**.
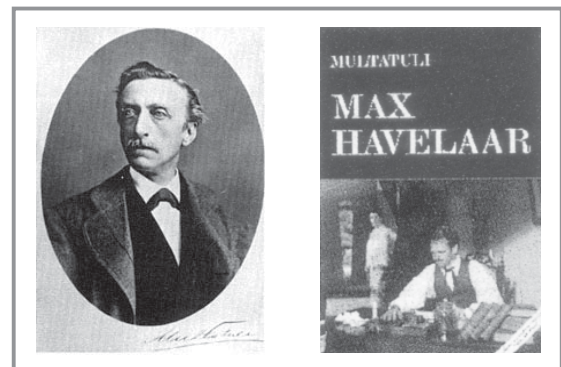
Sumber: *Indonesian Heritage, jilid 3,2002*

Gambar 2.1.2
Eduard Douwes Dekker, tokoh humanis Belanda yang membela rakyat Indonesia berkenaan dengan dilakukannya tanam paksa (kiri) dan buku Max Havelaar, karangan Eduard Douwes Dekker menceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa.

Melalui pidato-pidatonya, Baron van Hoevel membela rakyat Indonesia di depan DPR Nederland. Sementara Eduard Douwes Dekker, bekas Residen di Lebak-Rangkasbitung, Serang, dan Banten berpendapat bahwa sistem tanam paksa harus dihapus karena menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Douwes Dekker melihat sendiri penderitaan rakyat karena dibebani berbagai pajak dan kerja paksa. Karena dianggap membela rakyat, ia diberhentikan dari jabatannya. Setelah kembali ke

negeri Belanda, Douwes Dekker menulis buku yang berjudul *Max Havelaar*. Ia memakai nama samaran **Moeltatoeli** (*saya telah banyak menderita*). Buku ini menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia karena *Cultuurstelsel*, khususnya pemaksaan menanam kopi yang hanya menguntungkan pihak Belanda, sehingga sistem tersebut harus segera diakhiri. Setelah rakyat Belanda membaca buku ini, mereka merasa ditipu oleh pemerintah. Banyak rakyat Belanda yang mengecam politik Tanam Paksa.

Berkat perjuangan kaum liberal dan golongan humanis, sedikit demi sedikit *Cultuurstelsel* dihapuskan. Tahun 1870 dapat dianggap sebagai batas akhir *Cultuurstelsel*. Dengan berakhirnya *Cultuurstelsel*, dilaksanakanlah politik kolonial liberal.

C. Penanaman modal swasta dan asing

Masuknya paham liberal ke negeri Belanda memengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pengaruh golongan liberal dalam pemerintahan Belanda di Indonesia adalah dihapuskannya Tanam Paksa. Dalam kebijakannya atas tanah jajahan, golongan liberal berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan ekonomi. Tugas itu harus diserahkan pada pihak swasta. Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870 dan 1900 pada umumnya disebut sistem liberalisme. Oleh karena itu, setelah dihapuskannya Sistem Tanam Paksa, kaum pengusaha swasta leluasa mengatur tanah jajahan Belanda agar dapat menghasilkan keuntungan baginya dan bagi negerinya.

a. Penanaman modal swasta di Indonesia

Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan dua undang-undang yang penting. Yang pertama adalah Undang-Undang Agraria. Yang kedua adalah Undang-Undang Gula.

Undang-Undang Agraria mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah. Isi Undang-Undang Agraria antara lain, sebagai berikut.

- Memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sumber: Indonesian Heritage Jilid 3, 2002.
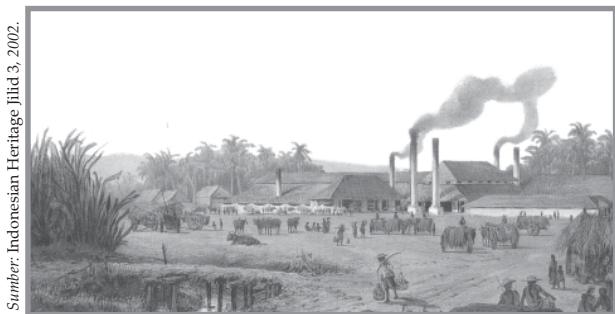
Gambar 2.1.3
Lukisan sebuah pabrik gula sedang beroperasi. Dengan adanya Undang- Undang Gula, pihak swasta mendapat kemudahan untuk membuka pabrik gula di Indonesia.

- Pihak swasta dapat menyewa tanah milik orang Indonesia selama 75 tahun.
- Membuka lapangan kerja bagi warga negara yang tidak memiliki tanah.

Undang-Undang Gula mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Isi Undang-Undang Gula antara lain, sebagai berikut.

- Secara berangsur-angsur pemerintah akan menghilangkan monopoli tanaman tebu.
- Pengusaha swasta dapat mengusahakan tanaman tebu di Jawa.

Undang-Undang Agraria 1870 tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan kesejahteraan penduduk jajahan. Menurut pemerintah kolonial Belanda, apabila penduduk jajahan makmur, perekonomian negara yang menjajah akan mengalami peningkatan. Bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, Belanda melaksanakan *Politik Pintu Terbuka*. Yang dimaksud Politik Pintu Terbuka adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memberi kesempatan bagi penanam modal swasta dan asing di Indonesia.

Selama periode 1870-1900, Indonesia terbuka bagi penanam modal asing. Pada masa itu, modal swasta dari Belanda, Inggris, Amerika, dan Belgia telah ditanamkan untuk membuka perkebunan-perkebunan, seperti kopi, teh, tebu, dan kina di Jawa dan Sumatera Timur.

b. Dampak dilaksanakannya penanaman modal swasta dan asing bagi kehidupan rakyat Indonesia

Dengan diterapkannya sistem liberal perdagangan di Indonesia, maka telah terjadi banyak kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Pada satu sisi, golongan pengusaha swasta dan pemerintah Belanda memperoleh banyak keuntungan. Namun, pada sisi yang lain merugikan penduduk Indonesia pada umumnya, karena menyebabkan kemunduran tingkat kesejahteraan hidup.

Merosotnya kemakmuran penduduk Indonesia pada abad ke-19 disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut.

- Pertambahan jumlah penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan jumlah produksi pertanian. Yang terjadi, jumlah produksi pertanian malah menurun.
- Penyimpangan pola tanam paksa dan kerja rodi menyebabkan jatuhnya banyak korban di kalangan penduduk. Seperti terjadinya kelaparan di Demak pada tahun 1848 dan di Grobogan pada tahun 1849.
- Pulau Jawa terlalu dibebani dengan sistem penanaman hasil bumi untuk menopang pembiayaan pemerintah.

- Adanya sistem pajak yang memberatkan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan penghematan biaya.
- Adanya *Poenale Sanctie*, yaitu ancaman bagi pekerja kontrak dari Jawa di luar Jawa yang melanggar ketentuan.

D. Politik Etis

Politik kolonial liberal yang kurang memerhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia banyak dikritik. Kritikan terutama berkaitan dengan kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kritik yang terpenting berasal dari **C. Theodore van Deventer**. Pada tahun 1899 ban Deventer menulis sebuah karangan berjudul *Een Eereschuld* atau *Debt of Honour* (Utang Budi) yang diterbitkan di majalah de Gids. Dalam tulisan ini van Deventer antara lain mengeritik pemerintah Belanda dengan mengatakan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyelamatkan bangsa Belanda dari kesulitan keuangan. Bukan hanya utang yang terbayar, tetapi bangsa Belanda dapat membangun ekonominya dengan baik. Karena itu, Belanda berutang budi kepada rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang maju dan bermoral, Belanda harus membayar utang itu kepada rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan *Trias*, yakni irigasi (pengairan), emigrasi (transmigrasi), dan edukasi (pendidikan).

Kritik van Deventer ini menimbulkan efek yang baik. Pemerintah Belanda menanggapi kritik itu dengan mengemukakan gagasan pembaruan politik di Indonesia melalui kebijakan baru bernama *Politik Etis*. Tanggapan itu tercermin dalam pidato Ratu yang berjudul *Ethische Richting* (Haluan Etika). Pidato itu dikemukakan oleh **Ratu Wilhelmina** pada tahun 1901. Akan tetapi, ternyata pelaksanaan politik baru ini tidak terlepas dari kepentingan kolonial Belanda. Oleh sebab itu, Politik Etis sering mendapat ejekan sebagai *politik sarung tangan sutera*. Dinamakan "politik sarung tangan sutera" karena meskipun sutera itu halus, tetapi kalau digunakan untuk mencekik akan mengakibatkan penderitaan. Artinya, Politik Etis itu meskipun kelihatan baik, tetapi kalau digunakan untuk menindas rakyat juga tetap akan mengakibatkan penderitaan.

Politik etis juga sering disebut ***politik paternalistik***, yaitu politik pemerintah yang ingin mengurus kepentingan anak negeri tanpa mengikutsertakan anak negeri. Kaum moralis liberal menanggapinya dengan menyebut politik etis sebagai kewajiban bangsa yang maju terhadap bangsa yang terbelakang. Dengan perkataan lain, politik etis merupakan pelaksanaan *Mission Saccree* atau *The white man's burden.* Jadi, politik etis itu sebenarnya adalah tugas orang Eropa atau kulit putih untuk memajukan peradaban bangsa kulit berwarna. Politik tersebut hanyalah suatu dalih bagi penjajah untuk membenarkan penjajahan mereka.
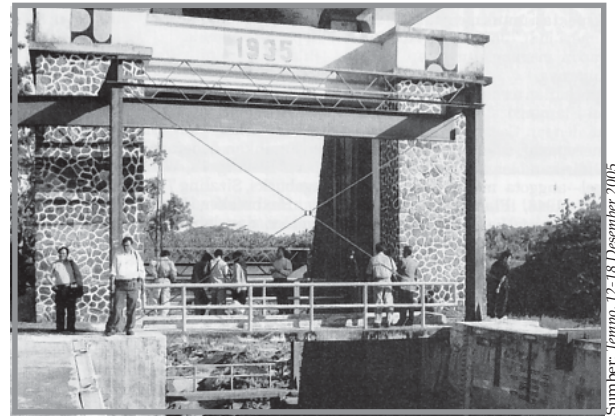
Sumber: *Tempo, 12-18 Desember 2005*

Gambar 2.1.4
Para petugas dari Dinas Pekerjaan Umum sedang melakukan pemeliharaan sebuah pintu air untuk irigasi. Saluran air ini adalah salah satu peninggalan penjajah Belanda. Pembangunan saluran irigasi lebih digunakan untuk mengairi tanah-tanah perkebunan-perkebunan milik Belanda.

Dengan politik etis (sering disebut juga politik balas budi), rakyat Indonesia seperti mendapat perlakuan yang lebih baik. Akan tetapi, tujuan politik etis sama saja dengan kebijakan-kebijakan politik Belanda yang sebelumnya, yaitu eksploitasi kekayaan Indonesia bagi penjajah. Meskipun melaksanakan tiga usulan van Deventer, politik Belanda tetap bersifat kolonialistis-imperialistis. Hal itu dapat dilihat dari tindakan-tindakan pemerintah Belanda, misalnya sebagai berikut.

- Pembangunan saluran irigasi lebih digunakan untuk mengairi perkebunan tebu dan tembakau milik pengusaha Belanda.
- Pengajaran yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan, mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang bisa membaca. Upah mereka lebih rendah daripada tenaga kulit putih.
- Transmigrasi ke luar Jawa (khususnya ke Sumatera) lebih dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha luar Jawa memperoleh tenaga kerja yang murah.

Politik etis ini ternyata tidak berhasil. Ada berbagai faktor yang menyebabkan politik ini tidak berhasil, antara lain sebagai berikut.

- Di kalangan pemerintahan dan masyarakat Belanda, terdapat golongan yang menentang. Mereka tetap menganggap bangsa Belanda itu lebih tinggi. Mereka khawatir bahwa kemajuan

rakyat Indonesia akan membahayakan kelangsungan ikatan Indonesia-Nederland.

- Di bidang ekonomi, pemerintah tidak memberi perlindungan kepada pengusaha pribumi secara sungguh-sungguh.
- Di bidang politik, Belanda membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting. Di bidang pendidikan, perkembangan pendidikan tidak didasarkan atas kebutuhan rakyat Indonesia.

2.1.2 Perlawanan Rakyat di Berbagai Daerah

Sistem monopoli perdagangan yang diterapkan bangsa Eropa di Indonesia ternyata merugikan pihak Indonesia. Oleh karena itu, kedatangan mereka tidak disambut dengan persahabatan, tetapi dengan perlawanan. Perlawanan rakyat terhadap berkuasanya bangsa Barat dilakukan baik pada masa awal kedatangan bangsa Barat (sebelum tahun 1800) maupun sesudah tahun 1800.

A. Perlawanan sebelum tahun 1800

Perlawanan rakyat sebelum tahun 1800 antara lain perlawanan rakyat Maluku dan Aceh melawan bangsa Portugis dan Spanyol, perlawanan rakyat Banten, Mataram, Gowa-Tallo, Banjar, dan Maluku melawan VOC.

a. Perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol

1. Kerajaan-kerajaan di Maluku

Setelah merebut Malaka pada tahun 1511, Portugis melanjutkan pelayarannya ke Maluku. Baru pada tahun 1513, Portugis berhasil menguasai Ternate dan Tidore. Pada waktu itu Ternate dan Tidore sedang bermusuhan. Kedua kerajaan tersebut saling bersaing agar dapat menguasai kawasan Maluku. Untuk memperoleh kekuatan baru sehingga dapat mengalahkan lawan, maka Ternate bersekutu dan menerima dengan baik kedatangan Portugis. Bahkan orang-orang Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Ternate. Dengan bantuan Portugis, akhirnya Tidore dapat dikalahkan. Kemenangan Ternate ini membuka jalan bagi Portugis untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan di daerah tersebut.

Pada tahun 1521, datanglah kapal Spanyol. Armada ini adalah sebagian dari armada Magelhaen dalam pelayarannya dari Filipina ke Spanyol. Kedatangan kapal Spanyol tersebut dianggap sebagai musuh dan saingan oleh Portugis. Pada tahun 1524, Spanyol datang lagi ke Maluku. Kedatangan Spanyol diterima dengan baik oleh kerajaan Tidore.

Pada waktu itulah di Maluku berkembang persaingan tajam antara Ternate yang bersekutu dengan Portugis dan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Akhirnya, pecahlah perang antara Ternate dan Tidore. Pada tahun 1529, Portugis bersama Ternate menyerang Tidore. Dalam peperangan ini, pasukan Portugis dan Ternate mengalahkan pasukan Tidore yang didukung Spanyol.

Pada tahun 1534, diadakan perjanjian antara Spanyol dan Portugis untuk membagi daerah operasi. Perjanjian ini dikenal dengan nama *Perjanjian Tordesillas*. Sejak itu, kapal-kapal Spanyol tidak lagi berlayar di perairan Maluku. Dengan demikian, orang-orang Portugis bebas mengembangkan kekuasaan dan memonopoli perdagangan di Maluku. Di samping itu, sikap kasar dan motif penyebaran agama dari orang Portugis menimbulkan rasa tidak senang di kalangan orang-orang Maluku.

Ternate yang semula bersekutu dengan Portugis akhirnya memusuhi Portugis. Dalam suatu pertempuran, orang-orang Ternate berhasil membakar benteng Portugis. Perlawanan terhadap Portugis juga datang dari orang-orang Tidore.

Puncak peperangan terjadi setelah diketahui bahwa **Sultan Hairun** dibunuh oleh Portugis. Sultan Hairun dibunuh dalam suatu jamuan makan yang diadakan Portugis pada tahun 1570. Akibat dari peristiwa tersebut, maka di bawah pimpinan **Baabullah** (putra Sultan Hairun), rakyat Maluku menuntut balas dengan menyerang Portugis. Rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis dari perairan Maluku Utara setelah berperang selama lima tahun (1570-1575). Kemenangan Baabullah tersebut membawa arti penting bagi masyarakat Maluku. Secara perlahan-lahan sistem monopoli perdagangan dihilangkan. Orang-orang Portugis terpaksa pindah ke pulau lain di Ambon sampai tahun 1605. Lama kelamaan, bangsa Portugis terdesak oleh Belanda. Akhirnya, orang-orang Portugis meninggalkan Maluku. Mereka menetap di Pulau Timor bagian Timur (Timor Timur).

2. Kerajaan Aceh

Sebagai kerajaan pantai, Aceh pada akhir abad ke-16 mampu mempertahankan diri terhadap desakan orang-orang Barat. Di samping itu, sejak dahulu Aceh sudah melakukan hubungan niaga dengan Arab dan India. Ketika Portugis menguasai Malaka, mereka mencoba menghambat pelayaran orang Aceh ke Laut Merah. Bahkan Portugis mengirim armadanya untuk menangkap pelaut-pelaut Aceh. Orang-orang Portugis juga pernah mencoba mengadakan blokade terhadap Aceh untuk mencegah hubungan Aceh dengan negara lain. Namun, Aceh mampu mengadakan perlawanan dan menembus blokade itu. Dengan demikian, Portugis tidak mampu membendung kegiatan perdagangan rempah-rempah Aceh ke Laut Merah.

Pada masa pemerintahan **Alauddin R'ayat Syah**, Aceh menghadapi kesulitan karena harus menghadapi persaingan dengan kerajaan Johor. Di samping itu, Aceh tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Baru setelah **Sultan Iskandar Muda** memerintah (1607-1636), kemampuan angkatan perang meningkat. Sultan Iskandar Muda mampu mengembalikan daerah-daerah yang pernah lepas dari pengaruh Aceh.

Kemampuan dan semangat juang Sultan Iskandar Muda tersebut didukung oleh cita-cita yang luhur, yaitu untuk mengusir Portugis dari Aceh, memperluas kerajaan Aceh, dan menyebarkan agama Islam. Di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, kerajaan Aceh berhasil memperluas daerahnya ke Sumatera dan Semenanjung Melayu. Selain itu, Aceh juga dapat menguasai daerah Sumatera Barat yang menghasilkan lada dan emas. Bahan perdagangan ini amat berharga sehingga banyak dicuri oleh pedagang dari Gujarat, Cina, Belanda, dan Inggris.

b. Perlawanan terhadap VOC Belanda

VOC mempraktikkan monopoli dalam berdagang di Indonesia. VOC beranggapan bahwa untuk melaksanakan monopoli perdagangan diperlukan kekuatan politik. Oleh karena itu, VOC berupaya memperoleh kekuasaan dengan menyerang serta merebut kedaulatan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Akibatnya, timbullah reaksi dari raja-raja di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang memberontak melawan VOC antara lain adalah kerajaan Banten, kerajaan Mataram, kerajaan Gowa-Tallo (Makasar), kerajaan Banjar, dan masyarakat Maluku.

1. *Kerajaan Banten*

Setelah Portugis dapat menguasai Malaka, para pedagang mengalihkan jalur niaganya ke Selat Sunda. Para pedagang tersebut kemudian mendirikan kantor-kantor dagang di Banten. Dengan demikian, Banten berkembang menjadi bandar internasional.

VOC yang pada waktu itu memusatkan kegiatannya di Batavia melihat kemajuan Banten sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Oleh sebab itu, VOC berusaha memblokade daerah perdagangan Banten dengan menguasai wilayah Selat Sunda. Akibat tindakan VOC tersebut, terjadilah kontak senjata antara VOC dan pasukan kerajaan Banten.

Perlawanan Banten terus berlanjut sampai Sultan Ageng Tirtayasa memegang tampuk pemerintahan di Kerajaan Banten. Di bawah pemerintahan ***Sultan Ageng Tirtayasa***, Kerajaan Banten mengalami kemajuan sangat pesat karena dapat mematahkan serangan VOC dan merusak perkebunan VOC. Kemajuan Banten tersebut terhambat setelah terjadi perpecahan di kalangan istana Banten. Terjadi perselisihan antara **Sultan Ageng Tirtayasa** dan **Sultan Haji** (putra mahkota). Sultan Haji sudah berhasil dipengaruhi oleh VOC.

Untuk menyingkirkan ayahnya, Sultan Haji meminta bantuan VOC. Dengan bantuan VOC, pada tahun 1683, Sultan Haji dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC Belanda menuntut imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada Sultan Haji.

Pada tahun 1684, Sultan Haji menandatangani suatu perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian itu menyatakan bahwa Banten menjadi daerah taklukkan VOC. Ia harus mengakui monopoli VOC, memberikan hak kepada VOC sebagai satu-satunya pihak yang menangani perdagangan, dan bersedia mengusir semua orang Eropa kecuali Belanda. Sultan Haji juga harus membayar biaya perang ketika menundukkan Sultan Ageng Tirtayasa dan mengizinkan VOC membangun benteng di Banten. Dengan adanya perjanjian tersebut, Banten secara praktis dikuasai VOC atau menjadi boneka VOC. Perlawanan-perlawanan rakyat Banten kemudian tidak mampu menandingi kekuatan VOC. Pada tahun 1752, muncul perlawanan rakyat Banten di bawah pimpinan **Kyai Tapa** dan **Ratu Bagus Buang**.

2. *Kerajaan Mataram*

Sultan Agung berkuasa di Mataram pada tahun 1613-1645. Ia bergelar **Sultan Agung Hanyokrokusumo**. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan menundukkan bupati-bupati pesisir. Ia adalah seorang muslim yang taat dan berusaha memperluas daerah pengaruh Islam. Masa pemerintahannya merupakan masa kejayaan kerajaan Mataram Islam.

Di bawah kepemimpinannya, Sultan Agung berusaha mempersatukan wilayah Pulau Jawa menjadi satu kesatuan di bawah kekuasaan Mataram. Dalam mencapai cita-cita mempersatukan seluruh Pulau Jawa, Sultan Agung mendapat hambatan dari VOC di Batavia. VOC tidak mengakui kekuasaan Mataram atas Banten. Dengan demikian, Banten harus ditundukkan juga. Akan tetapi, antara Mataram dan Banten ada Batavia yang menjadi tempat bercokolnya Belanda. Sultan Agung tahu bahwa Belanda tidak suka melihat kekuasaan Mataram makin luas. Oleh sebab itu, Belanda yang menguasai Batavia harus diusir dari Pulau Jawa.

Pada tanggal 22 Agustus 1628, tentara Mataram berangkat ke Batavia melalui jalan darat dan laut. Tentara Mataram dipimpin oleh **Tumenggung Bahurekso**. Serangan ini dibantu oleh pasukan Pasundan yang dipimpin oleh **Dipati Ukur**. Tentara Mataram menyerbu benteng Holandia di Batavia pada tanggal 21 September 1628. Dalam serangan

itu, Bahurekso gugur dalam pertempuran. Tidak berapa lama datang pasukan bantuan dari Mataram dipimpin oleh **Tumenggung Sura Agul Agul**, **Kyai Dipati Maduredjo**, dan **Kyai Dipati Uposonto**. Mereka bergerak menyerang kota, tetapi mendapat tembakan gencar dari meriam-meriam kapal VOC.

Karena mengalami kesulitan, akhirnya pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung. Akibatnya, tentara Belanda kekurangan air dan timbul wabah penyakit di Batavia. Akan tetapi, keadaan pasukan Mataram juga sudah sangat lemah. Mereka kehabisan persediaan makanan. Di samping itu, pasukan Mataram banyak juga yang menjadi korban penyakit, seperti malaria. Oleh sebab itu, tentara Mataram terpaksa mundur dari Batavia.

Pada tahun 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan perangnya untuk kembali menyerang Belanda di Batavia. Sultan Agung menambah jumlah tentara, mengadakan persiapan lebih matang, dan mendirikan lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia. Serangan ini cukup merepotkan tentara Belanda. Walaupun lumbung-lumbung beras Mataram di Tegal dan Cirebon dibakar VOC, tetapi tentara Mataram pantang mundur. **Dipati Puger** berhasil menghancurkan benteng Holandia. Setelah itu pasukan Mataram mengepung benteng Bommel. Akan tetapi, benteng tersebut tidak berhasil direbut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, **Jan Pieterzoon Coen** meninggal karena sakit kolera. Serangan Mataram yang kedua ini pun kurang berhasil dan tentara Mataram terpaksa kembali dalam keadaan lemah karena kelaparan.

Sekalipun usaha untuk menghancurkan VOC di Batavia dua kali gagal, namun sikap Sultan Agung tidak pernah kenal kompromi terhadap VOC. Bahkan serangan terhadap VOC terus dilakukan di sepanjang Pesisir Utara Jawa Barat. Sultan Agung menempatkan pasukan Mataram di daerah Karawang dan Sumedang. Selain itu, Sultan Agung juga mendirikan lumbung-lumbung beras sambil berharap serangan terhadap VOC di Batavia dilancarkan lagi. Akan tetapi, cita-cita Sultan Agung tidak sempat terlaksana karena pada tahun 1645 Sultan Agung wafat. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar **Amangkurat I** (1645-1677). Amangkurat I ini berkompromi dengan VOC.

Sejak saat itulah pengaruh VOC mulai dirasakan di Mataram sehingga timbul pemberontakan-pemberontakan terhadap kekuasaan Raja Amangkurat I. Pemberontakan tersebut di antaranya dilakukan oleh **Trunojoyo** yang dibantu oleh **Pangeran Kajoran** pada tahun 1674. Trunojoyo berhasil menyerbu ibukota Mataram. Akibatnya, Sunan Amangkurat I terpaksa melarikan diri dan meninggal dalam perjalanan.

Sunan Amangkurat I digantikan Sunan **Amangkurat II**. Sunan Amangkurat II naik tahta kerajaan Mataram tahun 1677 berkat dukungan Belanda. Sebagai imbalannya, Mataram memberikan daerah Bandar Semarang, dan seluruh Priangan Barat, Cimanuk, Karawang, serta seluruh Pantai Utara Jawa kepada VOC. Dengan demikian, Mataram tidak dapat lagi mengembangkan usaha maritimnya.

Dengan bantuan VOC, di bawah pimpinan **Anthoni Hurd**, dibantu **Arupalaka** serta **Kapitan Jonker**, Trunojoyo dapat ditangkap. Ia diserahkan kepada Amangkurat II untuk dihukum mati pada tahun 1680.

Perlawanan terhadap kekuasaan VOC di Pulau Jawa dilanjutkan oleh **Untung Suropati**. Perlawanan Untung Suropati berlangsung dari tahun 1686 sampai tahun 1706. Untung Suropati bersekutu dengan Sunan Amangkurat II. Sunan Amangkurat II berbalik melawan VOC karena keberatan dengan perjanjian yang dilakukannya dengan VOC.

Untuk memadamkan perlawanan Untung Suropati, VOC mengutus **Kapten Tack** ke Kerajaan Mataram. Kapten Tack dan seluruh anak buahnya terbunuh. Atas jasanya mengalahkan pasukan Kapten Tack, Untung Suropati diangkat sebagai bupati di Pasuruan. Pada tahun 1706, VOC dapat mengalahkan Untung Suropati di Kartasura.

3. *Kerajaan Gowa – Tallo (Makasar)*

Kerajaan Gowa – Tallo merupakan pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian Timur. Kerajaan Gowa dengan Bandar Sombaopu merupakan pelabuhan penting yang menghubungkan Maluku dengan Malaka. Bandar Sombaopu adalah pelabuhan transit.

Oleh karena itu, VOC memandang perlu untuk menguasai pelabuhan Gowa. VOC berusaha membuka hubungan dengan raja dan meminta izin berdagang sekaligus membujuk raja untuk melarang orang asing selain VOC berdagang di Gowa. Itu berarti VOC ingin menanamkan monopoli perdagangan. Akibatnya, timbullah bentrokan-bentrokan bersenjata antara Makasar dan VOC.

Pada tahun 1616, terjadi insiden awal antara Gowa dan Belanda. Sekelompok pembesar Gowa diundang dalam suatu jamuan di kapal VOC. Akan tetapi akhirnya mereka dilucuti senjatanya. Sebagai tindakan balasan, kapal VOC lain yang sedang mendarat di Ambon diserang dan awak kapalnya dibunuh.

Puncak perlawanan terjadi pada masa pemerintahan **Sultan Hasanuddin** yang berkuasa pada tahun 1653-1669. Pada waktu itu, Belanda mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan **Arupalaka.** Arupalaka adalah bangsawan Soppeng-Bone yang pada tahun 1660 memberontak terhadap Gowa. Bone yang ditaklukkan Gowa pada tahun 1644 ternyata mendapat bantuan dari Belanda.

Pada tahun 1667, pertempuran meletus di dua tempat, yaitu di Buton dan Makasar. Dalam perang ini, Belanda mendapat bantuan dari pasukan Arupalaka. Pertempuran itu mengakibatkan banyak korban jatuh. Bahkan **C. Speelman** (pimpinan pasukan Belanda) hampir saja tewas. Akhirnya, Makasar harus mengakui keunggulan Belanda. Sultan Hasanuddin harus menandatangani **Perjanjian Bongaya** pada tanggal 18 November 1667.

Isi Perjanjian Bongaya, antara lain adalah sebagai berikut.

- VOC memegang monopoli dagang di seluruh Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Arupalaka dikukuhkan menjadi Raja Bone.
- Makasar harus menyerahkan benteng-bentengnya kepada VOC.
- Makasar harus membebaskan seluruh daerah bawahannya, misalnya Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone.
- Makasar harus membayar kerugian akibat perang.

Pasca Perjanjian Bongaya, banyak rakyat Makasar pergi meninggalkan Gowa untuk mengembara dan memberikan bantuan kepada rakyat di daerah lain yang sedang melawan Belanda. Mereka itu, antara lain **Karaeng Montemarano**, dan **Karaeng Galesung** yang ikut membantu Trunojoyo dari Madura melawan Belanda di Jawa Timur.

4. *Kerajaan Banjar*

Pada abad ke-16, orang Portugis mendatangi bandar Banjar untuk membeli kapur barus, berlian, dan batu-batuan berharga lainnya. Pada tahun 1606, Belanda rupanya tertarik datang ke Banjar. Mereka mencari rempah-rempah terutama ladanya. Belanda menghendaki agar hasil lada hanya dijual kepada Belanda dengan perjanjian kontrak. Akan tetapi, permintaan itu ditolak. Oleh sebab itu, terjadilah perselisihan antara Raja Banjar dan orang-orang Belanda yang mengakibatkan tewasnya **Gilles Michelszoon**.

Pada tahun 1610, kapal-kapal Belanda datang lagi ke Banjar. Bandar Banjar ditembaki dari kapal-kapal Belanda sehingga banyak penduduk tewas. Setelah peristiwa itu, semakin banyak orang Belanda datang ke Pelabuhan Banjar untuk berdagang.

Pada tahun 1626, Belanda datang lagi untuk mencari lada. Kedatangan Belanda ini mendapat saingan dari Inggris dan Denmark. Dengan demikian, ruang gerak Belanda menjadi terbatas. Oleh karena itu, untuk meluaskan geraknya, Belanda harus menyingkirkan pedagang Inggris dan Denmark. Pada tahun 1635, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada dari Raja Banjar.

Dengan monopoli perdagangan tersebut, VOC makin berkuasa dan seringkali ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan Kerajaan Banjar. Reaksi rakyat Banjar timbul setelah kebebasan mereka dalam perdagangan terancam oleh VOC. Salah satu tokoh penentang VOC adalah **Sultan Mohammad Aliuddin Aminullah**. Meskipun masyarakat Banjar berjuang mati-matian menentang kekuasaan VOC, namun tidak membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan. Ketidakberhasilan serangan Banjar terhadap VOC, antara lain disebabkan tidak adanya organisasi yang matang dan persenjataan yang masih sederhana. Dengan demikian, kekuasaan VOC di Banjar semakin merajalela dan leluasa. VOC tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga memengaruhi secara langsung pemerintahan Banjar.

5. *Rakyat Maluku*

Usaha Belanda untuk meluaskan kekuasaannya tidak terbatas hanya di Indonesia bagian barat, tetapi juga di Indonesia bagian timur. Pada tahun 1600, Belanda berhasil mengadakan suatu perjanjian perdagangan dengan penguasa Ambon. Perjanjian ini merupakan permulaan ditegakkannya monopoli Belanda di Maluku. Belanda semakin kuat setelah pada tahun 1605 berhasil merebut benteng Portugis di Ambon.

Kehadiran orang-orang Belanda di Maluku yang ingin melakukan monopoli perdagangan menimbulkan reaksi dari rakyat Maluku. Perlawanan terhadap Belanda timbul di mana-mana. Pada tahun 1635, **Kakiali** dan **Telukabesi** memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku meluas dari Ambon sampai Ternate.

Perlawanan rakyat Ambon di bawah pimpinan Kakiali dapat dipadamkan. Kakiali sendiri tewas dalam suatu pertempuran. Selanjutnya, perlawanan dilakukan orang-orang Hitu yang dipimpin oleh Telukabesi. Pada tahun 1646, mereka dapat ditundukkan oleh Belanda. Banyak pemimpin Hitu ditangkap kemudian dibuang ke Batavia.

Pada tahun 1649, VOC melaksanakan P**elayaran Hongi**, yaitu armada ***kora-kora*** yang dipersenjatai. Armada kora-kora yang dipersenjatai
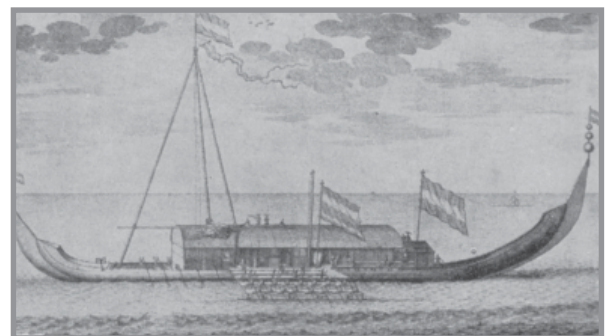
Sumber: Lukisan Sedjarah, 1956

Gambar 2.1.5
Pelayaran Hongi di Maluku. Armada ini berlayar sepanjang pantai dari pulau ke pulau untuk mengontrol perkebunan rempah-rempah.

tersebut berlayar sepanjang pantai dari pulau ke pulau untuk menebang pohon rempah-rempah yang berlebihan. Pelayaran Hongi dipandang sebagai malapetaka bagi rakyat Maluku.

Pada tahun 1650, **Saidi** memimpin rakyat Maluku menentang VOC. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Saidi dapat dipadamkan oleh Belanda setelah berlangsung selama enam tahun. Tahun 1656, Saidi tertangkap dan dihukum mati. Akhirnya, VOC dapat menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menanamkan kekuasaannya di Maluku.

B. Perlawanan sesudah tahun 1800

Perlawanan rakyat sesudah tahun 1800 antara lain perlawanan rakyat Maluku, perlawanan kaum paderi di Sumatera Barat, perlawanan Diponegoro di Jawa, perlawanan rakyat di Bali, perlawanan rakyat Banja, perlawanan rakyat Aceh, dan perlawanan Sisingamangaraja.

a. Perang Maluku (1817)

Rakyat Maluku sangat menderita sewaktu VOC berkuasa. Akan tetapi, pada masa penjajahan Inggris terjadi perubahan yang menggembirakan rakyat Maluku. Perubahan itu antara lain, Inggris mau membeli rempah-rempah dengan harga yang wajar. Inggris memenuhi kebutuhan rakyat Maluku. Inggris memberi kesempatan bagi para pemuda untuk mengikuti dinas angkatan perang Kerajaan Inggris. Penjajahan Inggris memberi suasana baru dan harapan yang lebih baik bagi rakyat Maluku.

Pada tahun 1814, diadakan *Traktat London I*. Traktat ini memaksa Inggris supaya mengembalikan jajahan Indonesia kepada Belanda. Oleh sebab itu, pada tahun 1817, Belanda mendarat di Maluku untuk menanamkan kembali kekuasaannya. Rakyat Maluku masih teringat kekejaman Belanda sehingga memberikan perlawanan. Kekejaman pada masa lampau, seperti monopoli dagang, pelayaran hongi, dan wajib militer merupakan tindakan yang sangat menyakitkan.

Di bawah pimpinan **Thomas Mattulessy** (**Kapitan Pattimura**), **Raja Abubu**, **Anthoni Rebok**, **Phillip Latumahina**, **Said Printah**, **Paulus Tiahahu**, dan **Christina Martha Tiahahu**, rakyat Maluku mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan dimulai dengan menyerang pos Porto. Serangan dilanjutkan ke *Benteng Duurstede* di Saparua yang menyebabkan **Residen van den Berg** beserta keluarga dan pengawalnya terbunuh. Rakyat di Hitu juga mengadakan perlawanan dipimpin oleh **Ulupaha** bersama rakyat Seram dan pulau-pulau yang lain.

Belanda berusaha untuk merebut kembali Benteng Duurstede, namun gagal bahkan menyebabkan **Mayor Beetjes** tewas dalam pertempuran.
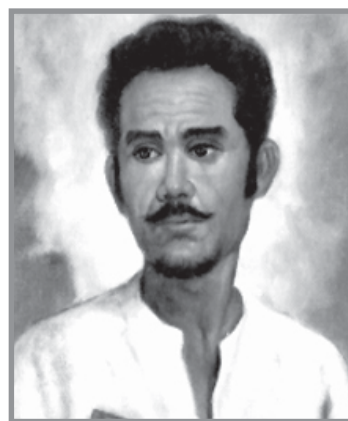
Sumber: Atlas Indonesia

Gambar 2.1.6
Thomas Mattulessy atau Kapitan Pattimura. Ia memimpin perlawanan rakyat melawan Belanda di Maluku.

Usaha Belanda untuk menguasai kembali Maluku dilakukan dengan politik *devide et impera*. Belanda memperalat beberapa raja dan tokoh masyarakat sehingga Benteng Duurstede dapat direbut kembali. Pattimura, Anthoni Rebok, Philip Latumahina, dan Said Printah tertangkap. Mereka dijatuhi hukuman gantung di *Benteng Victoria* (Ambon). Sedangkan, Ulupaha setelah tertangkap, dijatuhi hukuman tembak.

b. Perang Paderi (1821-1837)

Di Sumatera Barat terdapat beberapa haji yang baru saja kembali dari menunaikan ibadah haji di Mekkah. Para haji tersebut antara lain **Haji Miskin**, **Haji Sumanik**, dan **Haji Piabang**. Mereka menganut aliran Wahabi. Masyarakat Sumatera Barat sudah lama memeluk agama Islam, tetapi masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti kebiasaan menyabung ayam, berjudi, minum-minuman keras yang memabukkan dan memegang adat matrilineal. Para haji yang mendapat ajaran wahabi tersebut berusaha melancarkan gerakan untuk mengikis perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka inilah yang disebut kaum Paderi. Gerakan kaum Paderi berusaha untuk membersihkan agama Islam dari tradisi, adat kolot, dan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Gerakan kaum Paderi ini meresahkan kaum tua-tua atau golongan pemangku adat yang tetap berusaha mempertahankan tradisi lama. Di samping itu, mereka menolak gerakan kaum Paderi dalam usaha memurnikan agama Islam. Golongan pemangku adat disebut *kaum hitam*, karena selalu menggunakan jubah hitam. Kaum Paderi disebut *kaum putih*, karena selalu mengenakan jubah putih. Pertentangan antara dua golongan ini menyebabkan terjadinya perang terbuka. Karena golongan

pemangku adat menderita kekalahan, mereka minta bantuan kepada Belanda. Belanda tidak sekadar membantu kaum adat. Belanda ingin menguasai Minangkabau.

Pada tahun 1825, perang Paderi dihentikan karena Belanda sedang memusatkan perhatiannya dalam menghadapi Perang Diponegoro. Sesudah perang Diponegoro selesai, perang Paderi tahap kedua dilanjutkan. Kaum pemangku adat akhirnya menyadari kesalahannya. Mereka kemudian bergabung dengan kaum Paderi untuk menghadapi Belanda. Penggabungan kedua kekuatan ini menyulitkan Belanda dalam menghadapi dan menumpasnya. Belanda akhirnya menerapkan Sistem Benteng (*Benteng Stelsel*).

Untuk menghalangi kaum Paderi, Belanda membangun benteng, antara lain *Benteng Fort de Kock* di Bukittinggi dan *Benteng Fort van der Capellen* di Batusangkar. Dengan siasat ini, perlawanan kaum Paderi dapat dipatahkan.

Pada tanggal 30 Oktober 1832, **Tuanku nan Alahan** menyerah. Pada tanggal 25 Oktober 1837, **Tuanku Imam Bonjol** dapat ditangkap. Ia dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon. Tahun 1841 Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Manado sampai tutup usia. Pasukan Paderi menyingkir ke wilayah Tapanuli untuk meneruskan perlawanan. Salah satu pemimpinnya adalah **Tuanku Tambusi**. Pada tanggal 28 Desember 1838, Tuanku Tambusi dapat dikalahkan Belanda. Dengan demikian, berakhirlah perang Paderi.
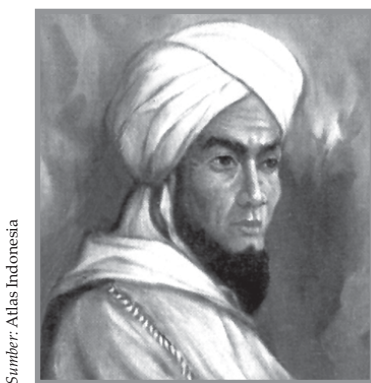
Sumber: Atlas Indonesia

Gambar 2.1.7
Tuanku Imam Bonjol. Ia adalah salah seorang pemimpin perang Paderi di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol meninggal di pengasingan di Manado.

c. Perang Diponegoro (1825-1830)

Perang Diponegoro merupakan perang besar yang dihadapi Belanda di Jawa. Peristiwa perang Diponegoro tidak terlepas dari situasi politik Keraton Yogyakarta pada masa itu. **Pangeran Diponegoro**, yang nama kecilnya **Raden Mas Ontowiryo** adalah putera pertama **Hamengku Buwono III**. Ia lahir dari seorang selir.

Pasca pemerintahan Hamengku Buwono I, situasi politik Keraton Yogyakarta tidak stabil. Ketidakstabilan itu terjadi karena **Hamengku Buwono II** (Sultan Sepuh) dianggap tidak dapat mengendalikan pemerintahan. Akhirnya Sultan Hamengkubuwono II diasingkan.

Pengganti Hamengku Buwono II adalah **Hamengku Buwono III** (Sultan Raja). Setelah Hamengku Buwono III wafat (1814), kekuasaan dipegang oleh Pangeran Jarot. Ia adalah putra Hamengku Buwono III yang lahir dari permaisuri. Ia bergelar **Hamengku Buwono IV**.

Hamengku Buwono IV bergaya hidup mewah dan suka memasukkan hal-hal yang baru ke lingkungan keraton. Ia wafat secara tiba-tiba, sehingga diangkatlah putranya yang masih kecil, yakni **Sultan Menol** (**Hamengku Buwono V**) sebagai penggantinya. Sementara itu, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai wali sultan. Karena kecewa, Pangeran Diponegoro mundur dari dewan perwalian. Ia tidak mau turut campur lagi dalam urusan istana. Pangeran Diponegoro meninggalkan kemewahan keraton dan tinggal di Tegalrejo.
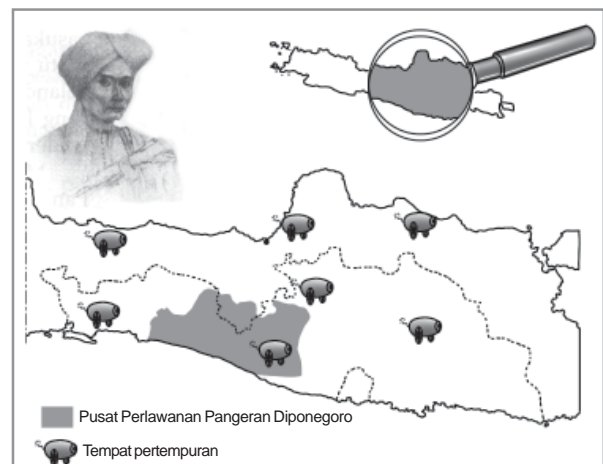
Sumber: I Wayan Badrika, 2004.

Gambar 2.1.8
Peta Perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri berlangsung selama tahun 1825-1830 dan mengeruk ekonomi pemerintah Belanda.

Perang Diponegoro merupakan perang terbesar di Pulau Jawa. Secara umum penyebab perang Diponegoro adalah sebagai berikut.

- Pengurangan daerah Mataram. Pengurangan ini sudah terjadi sejak Daendels dan Raffles sehingga daerah *apanage* menjadi kecil. *Apanage* adalah daerah yang diberikan kepada keluarga raja, tanpa jasa kerja.
- Adanya bermacam-macam pajak dari Belanda, apalagi pajak tersebut diborongkan kepada orang-orang Tionghoa. Pajak tersebut antara lain pajak tanah, rumah, jembatan, pintu, dan sebagainya.

- Adanya aturan van der Capellen yang melarang menyewa tanah dan penduduknya untuk perkebunan kepada swasta. Maksudnya agar tidak menyaingi perkebunan milik pemerintah. Yang sudah terlanjur menyewakan tanahnya diminta mengembalikannya kepada pemerintah.
- Kemiskinan rakyat dan adanya perlakuan tidak adil dari penjajah.
- Campur tangan pemerintah Belanda dalam urusan intern keraton.

Secara khusus, penyebab Diponegoro mengobarkan perang terhadap Belanda adalah sebagai berikut.

- Pengangkatan khotib dilakukan oleh **Patih Danurejo**, padahal itu merupakan hak raja (wali raja). Tindakan patih ini dibenarkan oleh Belanda, maka Pangeran Diponegoro meninggalkan istana dan pergi ke Tegalrejo.
- Belanda mau membuat jalan melalui tanah makam keluarga Diponegoro. Sebagai protes terhadap tindakan tersebut, patok-patok sebagai tanda rencana pembuatan jalan dicabuti oleh Diponegoro. Belanda kemudian menyuruh Mangkubumi untuk membujuk Diponegoro, tetapi gagal. Akhirnya, pada tanggal 20 Juli 1825 pecah Perang Diponegoro.

Dalam perang besar ini, Pangeran Diponegoro mendapat bantuan dari banyak pihak, antara lain **Pangeran Mangkubumi** (paman Pangeran Diponegoro), **Sentot Alibasyah Mustafa Prawirodirjo**, (putera bupati Maospati, Madiun), **Kyai Mojo** (seorang ulama), **Pangeran Ngabehi Jaya Kusuma**, dan rakyat yang memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro.

Pangeran Diponegoro dengan mudah dapat menghimpun kekuatan rakyat. Ia melancarkan siasat perang gerilya dan menghindari perang terbuka karena persenjataannya jauh tidak seimbang dibandingkan dengan persenjataan Belanda. Benteng gerilya Pangeran Diponegoro terdapat di Gua Selarong, Dekso, lereng Gunung Merapi, dan daerah Bagelen.

Kesulitan dalam menghadapi perlawanan Diponegoro menyebabkan Belanda melaksanakan **Sistem Benteng (Benteng Stelsel)**. Belanda mendirikan benteng di daerah yang telah berhasil dikuasai dengan suatu penjagaan. Tujuan dari sistem benteng ini adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro.

Sebagai usaha untuk menghentikan perlawanan Diponegoro, Belanda melaksanakan *politik devide et impera*. Belanda mengangkat kembali Hamengku Buwono II menjadi raja. Belanda juga memanfaatkan Sunan Surakarta dan Mangkunegara yang telah berpihak pada Belanda. Akhirnya, pada tahun 1827 beberapa pangeran menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1828, **Kyai Mojo** ditangkap dan diasingkan ke Manado. Ia meninggal di sana pada tahun 1848. Pada tahun 1829, **Pangeran Mangkubumi** menenyerah kepada Belanda. **Sentot Prawirodirjo** tertangkap, kemudian dibawa ke Batavia. Pada Tahun 1830, ia dimanfaatkan Belanda untuk melawan kaum Paderi di Sumatera Barat. Akan tetapi, Sentot Prawirodirjo justru berpihak pada kaum Paderi. Oleh karena itu, ia ditangkap dan dibuang ke Bengkulu sampai wafat pada tahun 1855.

Sumber: Repro Lukisan Sedjarah. 1956

Sumber: Repro Ensiklopedi Nasional Indonesia

Gambar 2.1.9
Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan rakyat melawan Belanda di Yogyakarta (kiri) dan Jenderal de Kock yang menangkap Diponegoro (kanan).

Dalam keadaan yang sangat sulit ini, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal **Hendrick Marcus de Kock** di Magelang, Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mendapat jaminan jika perundingan gagal, ia diizinkan kembali ke pasukannya. Akan tetapi, ternyata hal tersebut merupakan tipu daya. Ketika perundingan itu mengalami kegagalan, Pangeran Diponegoro ditangkap. Ia diasingkan ke Manado (1830). Pada tahun 1839, ia dipindahkan ke Makassar. Ia wafat di Makassar pada 8 Januari 1855. Dengan demikian, perlawanan Diponegoro dapat dipatahkan.

d. Perang Jagaraga

Di Bali terdapat banyak kerajaan, seperti Klungkung, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Mengwi, Tabanan, Badung, Buleleng, dan Bangli yang menganut agama Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut memberlakukan adat *Hak Tawan Karang*. **Hak Tawan Karang** adalah adat yang berlaku di Bali untuk menawan setiap kapal asing yang kandas di perairannya. Kapal dan harta bendanya dirampas, sedangkan anak buah kapalnya dijadikan budak karena dianggap sebagai miliknya.

Pada tahun 1844, kapal Belanda kandas di perairan Buleleng. Belanda menuntut kepada Raja Buleleng untuk mengembalikan kapal dan segala isinya kepada Belanda. Tuntutan itu ditolak oleh raja Buleleng dan patihnya (**Gusti Ktut Jelantik**). Oleh karena itu, pada tahun 1846 Belanda mengirimkan pasukannya untuk menyerang Buleleng. Untuk menghadapi pihak Belanda, Buleleng diban-
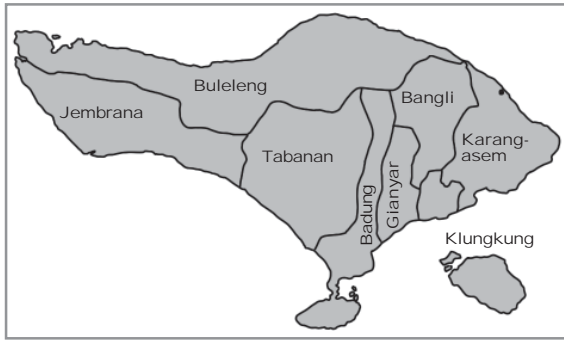
Sumber: I Wayan Badrika, 2004.

Gambar 2.1.10
Peta perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali melawan kekuasaan Belanda. Karena belum bersatu, kerajaan-kerajaan tersebut dengan mudah dikalahkan Belanda.

tu Kerajaan Karangasem. Akan tetapi, kedua kerajaan itu kemudian dipaksa menandatangani suatu perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah pengakuan Kerajaan Buleleng dan Karangasem terhadap kekuasaan Belanda di Batavia. Belanda berhak memonopoli dagang dan *Hak Tawan Karang* dihapuskan. Dengan perjanjian ini, Belanda mengira bahwa kedua kerajaan tersebut telah dikuasai sehingga tentara Belanda ditarik ke Batavia.

Raja-raja Bali tak pernah tunduk kepada Belanda. Lalu dihimpunlah kekuatan dari Kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Klungkung untuk menghadapi Belanda. Benteng Jagaraga dijadikan pertahanan utama pasukan Bali. *Hak Tawan Karang* tetap dilaksanakan. Kabar ini juga sampai pada Belanda. Pada tahun 1848, Belanda mengirim pasukannya ke Bali untuk menghancurkannya. Akan tetapi, Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Gusti Ktut Jelantik sehingga Belanda kembali ke Batavia dengan banyak korban.

sumber: *Repro Ensiklopedi Nasional Indonesia*

Gambar 2.1.11
Raja Buleleng beserta segenap rakyatnya melakukan perang puputan (perang habis-habisan) melawan Belanda di Bali.

Belanda kembali mengirim pasukannya ke Bali dengan kekuatan yang lebih besar lagi pada tahun 1849. Kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Klungkung bertahan di benteng Jagaraga. Meskipun demikian, akhirnya benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Tentara Belanda bergerak ke selatan menuju Kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem mengadakan Perang Puputan. **Perang Puputan** adalah perlawanan sampai mati oleh seluruh keluarga kerajaan dan pengikutnya. Klungkung bertahan di benteng Kasumba dan mengadakan perlawanan gerilya. Perang gerilya ini mengakibatkan **Jenderal Michels** tewas. Dengan bala bantuan yang didatangkan ke Bali, Belanda akhirnya mampu menguasai Bali. Kerajaan-kerajaan itu dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian, walaupun masih ada perlawanan rakyat dari Tabanan, Badung, dan Klungkung.

e. Perang Banjar (1859-1905)

Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 - 1905. Perang Banjar timbul karena Belanda terlalu jauh ikut campur tangan di kerajaan Banjar setelah membantu **Pangeran Nata** naik takhta. Belanda menguasai bidang perkebunan dan pertambangan batu bara. Ketika Sultan Adam mengangkat **Pangeran Hidayattullah** sebagai penggantinya, Belanda tidak setuju dan mengangkat **Pangeran Tamjid Ulah** sebagai pengganti **Sultan Adam**. Sultan Adam wafat pada tahun 1857. Belanda kemudian mengangkat **Pangeran Tamjid Ulah** sebagai Sultan dan Pangeran Hidayattullah sebagai Mangkubumi. Sultan Tamjid Ulah berusaha mengkhianati Pangeran Hidayatullah dengan membuat kekacauan di tambang batu bara. Hal ini diketahui oleh Belanda, maka Sultan Tamjid Ulah diturunkan dari takhta Kerajaan Banjar. Di samping itu, Pangeran Prabu Anom (putera Sultan Adam) yang anti Belanda ditangkap dan dibuang ke Jawa. Akhirnya, kesultanan Banjar dihapus dan langsung berada di bawah kekuasaan Belanda.

Pada tahun 1859, Pangeran Antasari menggerakkan rakyat Banjar melawan Belanda. Perlawanan bertambah hebat setelah Pangeran Hidayatullah bergabung dengan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah tertangkap pada tahun 1861. Pangeran Antasari tetap mengadakan perlawanan. Bahkan oleh rakyat ia diangkat sebagai pemimpin tertinggi dengan gelar **Amirudi Kha-lifatul Mukminin**. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat. Perlawanan rakyat Banjar tidak pernah reda dan berlangsung lama sampai tahun 1905.

f. Perang Aceh (1873-1904)

Sampai tahun 1870, Aceh merupakan kerajaan yang merdeka dan mempunyai letak yang strategis, baik secara ekonomi maupun militer. Setelah Terus-

an Suez dibuka pada tahun 1869, peran Aceh menjadi semakin penting. Pada tahun 1871, diadakan *Traktat London III* sehingga Inggris melepaskan tuntutannya terhadap Aceh. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris. Dengan perjanjian itu, Belanda mempunyai hak untuk menguasai Aceh.

Pada tahun 1873, Belanda mulai melaksanakan aksi militer dengan menyerang dan menduduki istana sultan serta membakar Masjid Raya Aceh, Baitur Rahim. Tindakan Belanda ini menimbulkan kemarahan rakyat dan ulama Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan yang menewaskan **Jenderal Kohler**. Perlawanan rakyat Aceh disemangati oleh perang agama dalam mengusir orang Belanda yang dianggapnya kafir sehingga perang tersebut dikenal sebagai *perang jihad*. Sistem gerilya digunakan rakyat Aceh dalam menghadapi Belanda.

Sementara itu, Belanda menggunakan siasat *konsentrasi stelsel*. **Konsentrasi stelsel** adalah pemusatan kekuatan dalam satu benteng. Siasat ini sangat lemah karena bersifat pasif. Artinya, kalau tidak diserang musuh berarti keadaan dianggap aman. Apabila terjadi serangan, Belanda menderita banyak kerugian karena serangan dilaksanakan pada saat Belanda dalam keadaan lengah.

Korban yang semakin meningkat dan keuangan yang semakin kosong, mendorong Belanda melaksanakan siasat lain. Seorang ahli hukum Islam dan ahli bahasa-bahasa Timur dikirim ke Aceh untuk menyelidiki adat-istiadat dan kekuatan rakyat Aceh. Tokoh itu adalah **Dr. Snouck Hurgronje**. Ia mempunyai nama samaran **Abdul Gafar**. Hasil penyelidikannya dirumuskan dalam bukunya yang berjudul *De Acehers* yang berisi cara untuk dapat mengalahkan rakyat Aceh. Dalam buku tersebut, Belanda dianjurkan melakukan hal-hal berikut.

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1992.

Gambar 2.1.12
Dr. Snouck Hurgronje mengusulkan cara-cara efektif untuk mengalahkan perjuangan rakyat Aceh.

Sumber: *Lukisan Sedjarah*, 1956, hlm. 88

Gambar 2.1.13
Pasukan Belanda dipimpin Van Heutsz menduduki Batee Ilie (1901)

- Menyingkirkan semua golongan ulama.
- Menggempur kaum ulama.
- Mendirikan pangkalan-pangkalan tetap di Aceh.
- Mengadakan gerakan pasifikasi, yaitu dengan mempertinggi kesejahteraan rakyat untuk menarik simpati rakyat Aceh.

Siasat yang dikemukakan Dr. Snouck Hurgronje ini didukung oleh **Jenderal van Heutz.** Ia menyatakan bahwa penyelesaian perang Aceh dilakukan melalui operasi militer. Untuk itu, Jenderal van Heutz membentuk pasukan gerak cepat. Sebelum siasat Dr. Snouck Hurgronje dan van Heutz dilaksanakan, Belanda melaksanakan anjuran **Jenderal Deykerhoff**, yaitu politik adu domba. Artinya, orang Aceh harus dilawan oleh orang Aceh sendiri. Belanda mendekati alim ulama dan para hulubalang dengan janji gaji besar dan pangkat tinggi. Seorang pejuang Aceh, yakni Teuku Umar menerima tawaran ini. Akan tetapi, setelah mendapat kepercayaan dari Belanda berupa uang dan persenjataan yang cukup, **Teuku Umar** menghilang. Ia menyingkir ke pedalaman untuk melanjutkan perlawanan lagi.

Belanda yang merasa tertipu oleh Teuku Umar, kemudian melaksanakan anjuran dari **Dr. Snouck Hurgronje** dan **van Heutz**. Van Heutz segera membentuk pasukan gerak cepat yang diberi nama *pasukan marchose*. Pasukan ini adalah *pasukan gerak cepat yang diperlengkapi klewang dan senapan*. Pasukan Aceh diserang terus-menerus. Mulai dari Aceh Tengah ke Aceh Selatan. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di dekat Meulaboh pada tahun 1899.

Dengan gugurnya Teuku Umar, perlawanan Aceh semakin kendor. Banyak tokoh Aceh menyerah. Pada tahun 1903, **Sultan Mohammad Daudsyah** menyerah, dan wafat dalam pengasingan di Batavia. Di tahun yang sama, **Panglima Polim** menyerah. Diikuti **Cut Nyak Dien** yang tertangkap dan diasingkan ke Sumedang pada tahun 1905. **Cut Meutia**

Gambar 2.1.14
Para pahlawan dari Aceh: Teuku Cik Di Tiro (kiri), Cut Nya Dien (tengah), dan Teuku Umar (kanan).

gugur tahun 1910. Terakir, **Teuku Cik di Tiro** menyerah tahun 1912.

Aceh akhirnya mengalami kekalahan. Aceh dipaksa untuk menandatangani *Korte Verklaring* atau Plakat Pendek. Isi plakat tersebut sebagai berikut.

- Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh.
- Aceh berjanji tidak mengadakan hubungan dengan negara lain.
- Aceh akan menaati peraturan *gubernemen* (Belanda).

Karena jasanya, van Heutz diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia lalu digantikan oleh **van Daalen**. Van Daalen terkenal kejam dan kurang bijaksana sehingga menimbulkan pemberontakan lagi.

Perang Aceh oleh Belanda dinyatakan sudah selesai pada tahun 1904. Namun, perlawanan rakyat tetap berlangsung terutama berpusat di Pegunungan Gayo yang sukar didatangi oleh Belanda. Pemimpin perlawanan tersebut, antara lain **Cut Meutia**. Karenanya, pada tahun 1917, "Barisan Macan" di bawah pimpinan **Christoffel** melakukan pengejaran sampai ke Gayo. Namun, rakyat Aceh tidak benar-benar tunduk kepada Belanda.

g. Perlawanan Sisingamangaraja XII (1878-1907)

Sisingamangaraja XII naik takhta kerajaan pada tahun 1870. Sejak masa pemerintahan ayahnya, yaitu **Sisingamangaraja XI**, pada tahun 1860, **Dr. Nomensen** (seorang misionaris Belanda) telah berhasil menyebarkan agama Kristen Protestan di daerah Tapanuli. Pada mulanya Sisingamangaraja XII tetap toleran terhadap agama Kristen yang berkembang di daerahnya. Beliau sendiri menganut kepercayaan yang disebut *Parmalim*. Dalam perkembangannya, Belanda berusaha menguasai tanah Batak dengan alasan melindungi kepentingan para misionaris.
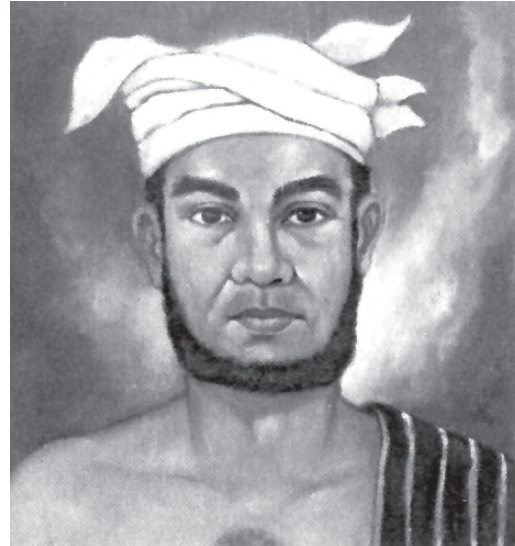
Gambar 2.1.15
Sisingamangaraja XII. Motif perlawanan yang semula menentang penyebaran agama Kristen di Tapanuli, berkembang menjadi perlawanan terhadap Belanda.

Melihat sikap Belanda yang ingin merebut kekuasaan tersebut, Sisingamangaraja merasa terancam kekuasaannya. Rencana perang melawan Belanda pun disusun. Sisingamangaraja bekerja sama dengan para pejuang Minangkabau dan Aceh yang menyingkir ke daerah Batak.

Tahun 1877, pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu, pusat pertahanan Belanda. Sementara pusat pertahanan Sisingamangaraja berada di Bakkara. Perjuangan melawan Belanda berkobar terus dengan perang gerilya selama 24 tahun. Belanda mengerahkan pasukan *Marchosse* yang ditarik dari Aceh. **Jenderal van Daalen** memimpin pasukan ini.

Pasukan Belanda yang dipimpin **Kapten Christoffel** berhasil mengepung Sisingamangaraja di daerah Pakpak. Sisingamangaraja bersama dua putranya, yaitu **Patuan Nagari** dan **Patuan Anggi** gugur sehingga seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda.

RANGKUMAN

1. Bangsa-bangsa Barat yang semula datang untuk mencari rempah-rempah lama kelamaan membangun koloni di Indonesia. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda pasca VOC terhadap Indonesia antara lain: melaksanakan sistem sewa tanah, melaksanakan sistem tanam paksa, membuka Indonesia bagi penanaman modal swasta, melaksanakan politik etis.

   Sistem sewa tanah dipraktikkan pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Sistem ini dimaksud sebagai usaha untuk memicu rakyat dalam menanam tanaman yang laku di pasar tanpa adanya unsur paksaan dari pemerintah.

   Sistem tanam paksa merupakan bentuk paling kejam dari campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam mengeruk kekayaan Indonesia. Sistem yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal van den Bosch ini terbukti efektif menutupi defisit ekonomi Belanda, tetapi pada saat bersamaan menciptakan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia.

   Sementara politik etis merupakan tanggapan Belanda (atas desakan kaum liberal) untuk melaksanakan politik balas budi karena telah mengeruk harta dan kekayaan rakyat Indonesia selama pelaksanaan sistem tanam paksa.

2. Masyarakat dan bangsa Indonesia lama kelamaan menyadari kecurangan dan tindakan ketidakadilan bangsa penjajah Belanda. Mereka kemudian angkat senjata dan melancarkan perang. Bahkan sejak awal kedatangan bangsa Belanda, beberapa daerah di Indonesia langsung mengadakan perlawanan karena keinginan Belanda dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah.

   Perlawanan terhadap Belanda dapat dikategorikan dalam dua fase, yakni perlawanan sebelum tahun 1800 dan sesudahnya. Perlawanan sebelum tahun 1800 ditandai dengan perlawanan yang sifatnya kedaerahan dan sendiri-sendiri. Pada fase ini Belanda dengan mudah mengalahkan semua perlawanan di Nusantara.

   Perlawanan rakyat sebelum tahun 1800 antara lain perlawanan rakyat Maluku dan Aceh melawan bangsa Portugis dan Spanyol, perlawanan rakyat Banten, Mataram, Gowa-Tallo, Banjar, dan Maluku melawan VOC.

3. Perlawanan rakyat sesudah tahun 1800 antara lain: perlawanan rakyat Maluku (1817) yang dipimpin oleh Pattimura, perlawanan kaum paderi di Sumatera Barat (1821-1837) yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat di Bali yang dipimpin Gusti Ktut Jelantik, perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, dan Panglima Polim, dan perlawanan Sisingamangaraja XII.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Politik Etis mewajibkan masyarakat pribumi untuk menanam cengkeh, lada, kopi, dan tembakau.
2. Perang Paderi dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.
3. Agama Hindu di Kerajaan Blambangan menyingkir ke Bali, dan digantikan oleh agama Islam. Hal ini disebabkan Belanda pada kejadian itu berpihak pada agama Islam.
4. Salah satu sebab kemenangan Belanda di Aceh adalah karena pembentukan pasukan Marchosse oleh van Heutz.
5. Sistem sewa tanah di Indonesia diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Thomas Raffles.
6. Sistem Tanam Paksa diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen.
7. Sistem Tanam Paksa tidak memberatkan rakyat karena keuntungan akan kembali kepada rakyat sendiri.
8. Sistem Tanam Paksa umumnya dilaksanakan di Pulau Jawa.

9. Kaum liberal dan golongan humanis sangat anti terhadap kebijakan sistem Tanam Paksa di Indonesia.
10. Kritik terhadap kebijakan Tanam Paksa pertama kali dilontarkan oleh C. Theodore van Deventer.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Sistem sewa tanah di Indonesia diberlakukan terakhir kali pada masa pemerintahan gubernur jenderal ... .
2. Penganjur sistem tanam paksa *(cultuurstelsel)* adalah ... .
3. Sistem tanam paksa diberlakukan dari tahun ... sampai tahun ... .
4. Eduard Douwes Dekker menulis sebuah buku yang menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Judul buku itu adalah ... .
5. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda di Indonesia mengeluarkan dua undang-undang, yaitu ... .
6. Theodore van Deventer mengusulkan tiga hal yang harus dilakukan pemerintah Belanda yaitu ..., ..., dan ... .
7. Sultan Ageng Tirtayasa digantikan oleh ... .
8. Pada saat Sultan Agung menyerang Batavia, yang menjadi gubernur jenderal adalah ... .
9. Thomas Matulessy adalah pemimpin perlawanan rakyat ... melawan Belanda.
10. Perang Paderi meletus tahun ... sampai ... .
11. Kerajaan Gowa - Tallo bangkit melawan kekuasaan VOC di bawah pimpinan ... .
12. Pelayaran kora-kora adalah ... .
13. Sebab utama meletusnya Perang Padri adalah ... .
14. Kesulitan menghadapi pasukan Diponegoro memaksa Belanda melaksanakan sitem perang ... .
15. Perang Puputan adalah ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga asas pelaksanaan sistem sewa tanah!
2. Mengapa sistem tanam paksa diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia?
3. Sebutkan penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa!
4. Apa akibat diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia?
5. Apakah politik etis yang dilaksanakan pemerintah Belanda di Indonesia membuat bangsa Indonesia terbebas dari kesengsaraan? Jelaskan!
6. Apa yang menyebabkan pecahnya perang Diponegoro?
7. Jelaskan tentang keberadaan masyarakat Katolik di Sumatera pada abad ke-7!
8. Apa yang dianjurkan Snouck Hurgronje untuk dapat menaklukkan Aceh?
9. Apa yang dimaksud dengan siasat konsentrasi stelsel yang dipakai Belanda untuk menak-lukkan Aceh?
10. Jelaskanlah dampak dilaksanakannya penanaman modal swasta bagi kehidupan rakyat Indonesia!

IV. Refleksi

Buatlah esai (diketik maupun ditulis tangan) mengenai salah satu tokoh pejuang daerah yang melawan Belanda! Kliping tersebut ha-rus mampu mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Nama, data diri, dan kisah hidup sang pejuang.
2. Bentuk dan sejarah perjuangan pejuang tersebut melawan Belanda.
3. Alasan mengapa kamu memilih tokoh tersebut untuk dibahas tuntas.
4. Hikmah atau pelajaran yang kamu petik dari perjuangan/pejuang tersebut yang bisa kamu jadikan acuan hidup sehari-hari.

Terbentuknya Kesadaran Nasional, Identitas Indonesia, dan Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia

2.2

Sumber: *Ensiklopedi Pelajar.*

Perhatikan gambar bangunan di atas ini. Ini adalah gambar sebuah bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Gambar ini berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu terbentuknya kesadaran nasional dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia.Bangunan ini terletak di jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta. Gedung apakah ini? Ini adalah Gedung Sumpah Pemuda. Di gedung inilah para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 mengucapkan sumpah pemuda. Sebelum membahas lebih jauh cobalah kamu ingat pelajaran yang lalu dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Sebelum Sumpah Pemuda, bagaimana reaksi rakyat di daerah-daerah dalam menghadapi bangsa penjajah?
2. Berhasilkah rakyat di daerah-daerah melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing?
3. Mengapa perlawanan rakyat di berbagai daerah menemui kegagalan?
4. Sudah adakah kesadaran di kalangan rakyat di nusantara sebagai satu bangsa sebelum Sumpah Pemuda?

Pada **Subbab 2.1** kita sudah mempelajari sejarah terbentuknya kolonialisme di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial banyak merugikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia di berbagai daerah melawan kaum penjajah. Perlawanan rakyat itu mudah dipatahkan karena kerajaan-kerajaan yang ada berjuang sendiri-sendiri dan mudah diadu domba.

Pada **Subbab 2.2** ini, kita akan mempelajari proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas nasional, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Pertama-tama, kita akan mempelajari pengaruh perluasan kekuasaan kolonial, perkembangan pendidikan terhadap munculnya nasionalisme Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari peranan golongan terpelajar, profesional, dan pers dalam menumbuhkan kesadaran nasional Indonesia.

Selanjutnya, kita akan mempelajari perkembangan pergerakan nasional dari yang bersifat kedaerahan, etnik, keagamaan sampai terbentuknya nasionalisme kebangsaan Indonesia. Pada bagian keempat, kita akan mempelajari sejauh mana Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1928, dan Kongres Perempuan Pertama berperan dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Kemudian kita akan menelusuri sejak kapan istilah "Indonesia" digunakan sebagai identitas nasional.

2.2.1 Pengaruh kekuasaan kolonial terhadap munculnya nasionalisme Indonesia

Menurut para ahli sejarah nasional Indonesia, ada dua faktor yang memengaruhi muncul dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah perluasan kekuasaan kolonial. Yang kedua adalah perkembangan pendidikan di Indonesia. Bagaimana perluasan kekuasaan kolonial dan perkembangan pendidikan dapat memengaruhi munculnya nasionalisme?

A. Perluasan kekuasaan kolonial

Setelah bangsa-bangsa Barat datang ke Nusantara, keadaan menjadi berubah. Bangsa Barat pada

awalnya ingin mencari rempah-rempah. Akhirnya mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga menaklukkan dan menguasai daerah-daerah di Nusantara. Daerah-daerah tersebut menjadi tanah koloni bangsa-bangsa Barat. Nusantara menjadi tanah jajahan bangsa-bangsa Barat. Bangsa Belanda mengungguli bangsa Barat lainnya. Akibat dari perluasan kolonialisme dan imperial-isme di Nusantara, terjadi perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Yang terjadi di Nusantara kemudian adalah eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda. Wilayah jajahan Belanda di Nusantara itu kemudian disebut daerah Hindia Belanda.

Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Dengan VOC-nya Belanda melakukan monopoli dagang. Kemudian, pemerintah Belanda melakukan Sistem Tanam Paksa untuk mengisi kas negara yang kosong. Politik Tanam Paksa digantikan dengan Politik Kolonial Liberal. Karena dianggap gagal, Politik Kolonial Liberal diganti dengan Politik Etis.

1. Monopoli dagang

Terbukanya jalur perdagangan ke Indonesia mengakibatkan munculnya persaingan di antara pedagang Eropa. Pihak yang berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia akan mendapat keuntungan besar.

Untuk memenangkan persaingan dagang, pada tahun 1602, Belanda membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). VOC dengan cepat berkembang dan menguasai monopoli perdagangan di berbagai kawasan Nusantara. VOC berhasil mengambil keuntungan yang besar dari perdagangan. Secara ekonomis, VOC menjadi kongsi dagang yang kuat dan disegani.

Kejayaan VOC berangsur-angsur mundur karena salah urus. Kemunduran itu terjadi menjelang abad ke-19. Pemerintah Kerajaan Belanda mengambil keputusan untuk membubarkan VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Kemudian Indonesia dikuasai pemerintah Belanda.

2. Tanam Paksa

Kekosongan kas Belanda mendorong pemerintah Belanda menyetujui pemikiran yang disampaikan oleh Johanes Van den Bosch. Usulan Van den Bosch adalah pelaksanaan *cultuurstelsel* atau sistem Tanam Paksa. Kembalinya Indonesia ke tangan pemerintah Belanda memberi keuntungan dan sangat memungkinkan dilaksanakannya sistem Tanam Paksa tersebut. Sistem Tanam Paksa merupakan upaya pemerintah Belanda untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan mereka. Ciri utama dari Sistem Tanam Paksa adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang (hasil pertanian).

Praktik Tanam Paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengalami penderitaan, antara lain kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Para petani tidak sempat mengurus tanahnya sendiri sehingga tidak menghasilkan panenan.

Bagi pemerintah Belanda, sistem Tanam Paksa tersebut mendatangkan keuntungan yang besar sehingga kas negara terisi dan hutang mereka terlunasi. Di samping itu, pemerintah Belanda dapat memperbaiki perekonomiannya, membangun sarana transportasi (jalan kereta api), dan mendirikan pabrik-pabrik.

Di samping sisi negatif, sistem Tanam Paksa juga memiliki segi positif. Segi positifnya, antara lain rakyat mengenal irigasi, mengenal jenis tanaman baru, dan mengenal penggunaan pupuk.

3. Politik kolonial liberal

Pelaksanaan Tanam Paksa akhirnya digantikan Politik Kolonial Liberal atau Politik Pintu Terbuka pada tahun 1870. Sejak itu bermunculan perusahaan-perusahaan swasta, khususnya perusahaan perkebunan Belanda. Para investor swasta Belanda bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan upah buruh dan membayar sewa tanah serendah-rendahnya. Pada umumnya investor tersebut bergerak dalam bidang perkebunan. Pemerasan berupa pungutan pajak, kerja wajib, dan penyerahan wajib menyebabkan rakyat Indonesia menderita. Politik Liberal ternyata tidak dapat menyejahterakan rakyat bumiputra. Sebaliknya kerusuhan dan perlawanan rakyat terjadi di mana-mana.

Pada masa berlangsungnya Politik Kolonial Liberal ini, prinsip pemisahan negara dan swasta dipegang teguh. Urusan politik dipegang oleh pemerintah. Sementara itu, ekonomi diurusi oleh pihak swasta.

Sumber: *Indonesian Heritage Jilid 3*, 2002.
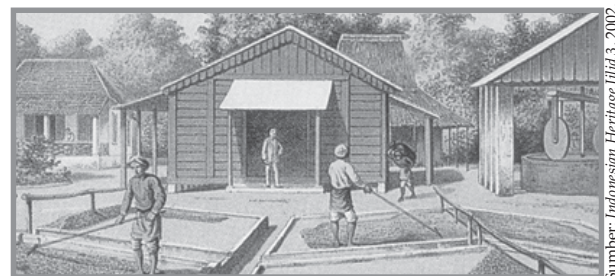
Gambar 2.2.1
Para buruh perkebunan sedang menjemur kopi di sebuah pabrik kopi. Selama periode 1870-1900, pengusaha swasta Belanda dan sejumlah negara Eropa menanamkan modalnya untuk membuka perkebunan-perkebunan di Indonesia.

4. Politik etis

Politik Kolonial Liberal yang kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia, banyak dikritik. Kritikan terutama berkaitan dengan kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kritik yang terpenting berasal dari **C. Theodor van Deventer**. Ia mengemukakan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Dengan demikian, Belanda berutang budi kepada rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang maju dan bermoral, bangsa Belanda harus membayar utang itu kepada rakyat Indonesia. Belanda harus mampu meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia (bumiputra). Theodore van Deventer mengusulkan tiga hal *(trias)* yang harus dilakukan pemerintah Belanda, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi (pendidikan).

Pemerintah Belanda menanggapi kritik itu dengan mengemukakan gagasan pembaruan politik di Indonesia. Politik ini dikenal sebagai Politik etis.

Dengan politik etis (sering disebut juga politik balas budi), rakyat Indonesia seperti mendapat perlakuan yang lebih baik. Akan tetapi, tujuan politik etis sama saja dengan kebijakan-kebijakan politik Belanda yang sebelumnya, yaitu eksploitasi kekayaan Indonesia bagi penjajah. Meskipun melaksanakan tiga usulan van Deventer, politik Belanda tetap bersifat kolonialistis-imperialistis.

Politik etis itu tidak berhasil. Ada berbagai faktor yang menyebabkan politik ini tidak berhasil. Di kalangan pemerintahan dan masyarakat Belanda, terdapat golongan yang menentang. Mereka tetap menganggap bangsa Belanda itu lebih tinggi. Mereka khawatir bahwa kemajuan rakyat Indonesia akan membahayakan kelangsungan ikatan Indonesia-Nederland.

Di bidang ekonomi, pemerintah tidak memberi perlindungan kepada pengusaha pribumi secara sungguh-sungguh. Di bidang politik, Belanda membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting. Di bidang pendidikan, perkembangan pendidikan tidak didasarkan atas kebutuhan rakyat Indonesia.

B. Perkembangan pendidikan di Indonesia

Walaupun pada sisi lain pelaksanaan politik etis membuat rakyat Indonesia menderita, namun ada sisi positif bagi bangsa Indonesia. Sisi positifnya ialah bahwa bangsa Indonesia menjadi semakin mengenal berbagai ide barat, seperti liberalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan kebebasan sipil pada umumnya. Di samping itu, sistem pendidikan juga berkembang di Indonesia.

Menjelang akhir abad ke-19, sekolah yang biasa disebut modern masih sangat terbatas. Demi kemajuan anak-anak mereka, keluarga-keluarga terkemuka sering harus menyewa guru privat. Sementara itu, di beberapa kalangan orang Belanda, makin terasa betapa perlunya memperkembangkan pendidikan gaya barat. Pendidikan itu perlu untuk kepentingan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial.

1. Sekolah dasar dan menengah

Sekolah yang mula-mula diperkenalkan adalah *Sekolah Kelas Dua* dan *Sekolah Kelas Satu*. Sekolah Kelas Dua mendidik calon-calon pegawai rendahan. Sekolah Kelas Satu diadakan untuk anak-anak dari golongan masyarakat atas. Selain itu, ada pula sekolah rendah yang disediakan bagi anak-anak Eropa.

Sejak awal abad ke-20, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem sekolah desa atau *Volksschool*. Pendirian sekolah ini tergantung pada kemampuan masyarakat setempat, subsidi, dan bimbingan pemerintah. Sekolah desa *(Volksschool)* ini diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Yang diajarkan di sekolah desa hanyalah sekadar kepandaian membaca, menulis, dan berhitung. Setelah lulus dari sekolah desa ini, murid-murid yang terpilih dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sambungan atau *Vervolgschool*. Sekolah sambungan lamanya dua tahun. Lama-kelamaan, sekolah desa ini menggantikan kedudukan Sekolah Kelas Dua sebagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi anak pribumi.

Untuk keperluan anak-anak kelas masyarakat atas pemerintah kolonial mendirikan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Dalam sekolah ini, bahasa Belanda dipakai sebagai bahasa pengantar. Lama sekolah di HIS adalah 7 tahun. Murid yang pintar dan cukup mampu dapat melanjutkan sekolah ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). MULO adalah sekolah lanjutan pertama. Setelah lulus dari MULO, para murid bisa melanjutkan ke AMS (*Algemenee Middelbare School*). AMS adalah sekolah lanjutan

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2002*

Gambar 2.2.2
Para siswa STOVIA sedang melakukan praktikum.

umum. Kalau pandai dan bernasib baik, setelah lulus dari AMS mereka bisa melanjutkan ke sekolah tinggi. Akan tetapi, pada masa itu untuk melanjutkan ke sekolah tinggi, orang harus pergi ke Eropa.

Selain MULO dan AMS ada pula sekolah HBS (*Hoogere Burgerschool*). HBS adalah gabungan sekolah lanjutan pertama dan atas untuk anak-anak Eropa. Masa belajar di HBS adalah lima tahun.

Ada juga sekolah-sekolah kejuruan. Beberapa sekolah kejuruan yang ada pada waktu itu adalah STOVIA (Sekolah dokter Hindia), sekolah teknik, dan sekolah guru (*Kweekschool* dan *Hogere Kweekschool*).

Ada juga sekolah untuk calon pegawai. Nama sekolah itu adalah OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandische Ambtenaren*). Lama belajar di OSVIA adalah 7 tahun. Setelah selesai belajar di OSVIA orang bisa masuk ke dalam birokrasi pemerintah, misalnya menjadi pamong praja.

Murid sekolah bumiputra, dari sekolah desa dan sekolah sambungan dapat juga melanjutkan belajarnya. Beberapa murid terpilih dari sekolah sambungan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi masuk sekolah normal, sekolah guru (untuk menjadi guru sekolah desa), atau sekolah tukang. Pada tahun 1924, murid-murid ini diberi kemungkinan untuk menyeberang ke lingkungan sekolah "Belanda". Untuk keperluan ini, didirikan sekolah *Schakel*. Di sekolah *Schakel* ini, murid belajar bahasa Belanda. Mereka juga mulai harus menyesuaikan diri dengan suasana yang serba tertib.

Selain sekolah-sekolah yang diadakan pemerintah, ada juga sekolah-sekolah swasta dan sekolah agama. Sekolah agama yang ada mulai memperbarui sistem dan metode pengajarannya. Sekolah swasta jenis ini berkembang pesat di beberapa daerah. Sekolah swasta yang tidak bersubsidi, baik Islam maupun sekuler, bersikap nasionalis dan antikolonial.

STOVIA di Jakarta dan *Kweekschool* di Bukittinggi mempunyai tempat yang unik dalam sejarah kebangsaan. Di STOVIA mulai bersemi semangat nasionalisme. Sebagai satu-satunya sekolah dokter untuk pribumi, maka STOVIA adalah sekolah pertama yang mengumpulkan murid-murid dari seluruh penjuru tanah air. *Kweekschool* di Bukittinggi tidak hanya mendidik calon guru, tetapi juga mendidik calon pegawai. *Kweekschool* di Bukittinggi berperan dalam memperkembangkan bahasa Melayu.

Pertanyaannya sekarang ialah "Bagaimana dengan sekolah tinggi? Adakah sekolah tinggi di Indonesia pada masa penjajahan?"

2. Sekolah tinggi

"Sekolah tinggi bagi pribumi? Mana mungkin. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memasuki dunia ilmu dan keterampilan yang demikian pelik." Begitulah kira-kira ocehan beberapa orang Belanda konservatif ketika timbul gagasan dari beberapa golongan swasta untuk mendirikan sekolah tinggi. Meskipun ada kritikan itu, beberapa sekolah tinggi secara bertahap mulai didirikan.

Berikut ini adalah daftar sekolah tinggi yang ada pada masa penjajahan Belanda.

- Sekolah teknik di Bandung *(Technische Hogeschool).*
- Sekolah hakim *(Rechtschool).*
- Sekolah hakim tinggi *(Rechtkundige Hogeschool).*
- Sekolah dokter Jawa *(STOVIA).*
- Sekolah tinggi kedokteran *(Geneeskundige Hogeschool).*
- Akademi pemerintahan *(Bestuursakademie).*

Di samping kesempatan untuk belajar di dalam negeri, sebenarnya para pelajar Indonesia mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, khususnya di Belanda. Karena yang bisa dibiayai oleh pemerintah sedikit jumlahnya, maka hanya yang betul-betul mampu yang sanggup mengirim anaknya belajar di Eropa.

Di samping mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi, pemuda-pemuda Indonesia ada juga yang masuk akademi-akademi bebas ataupun mengikuti pelajaran privat. Ada di antara mereka yang berpindah-pindah, hanya sekadar mencari pedoman bagi pembulatan program yang ingin mereka terapkan di tanah air. Inilah yang dilakukan oleh tokoh pendidik Ki Hajar Dewantara di akhir tahun 1910-an.

Selain belajar di Eropa, banyak juga pelajar Indonesia yang belajar di Mesir. Mereka belajar di Al Azhar, Universitas Darul-Ulum, dan Universitas Fuad. Al-Azhar adalah pusat pengetahuan Islam tertua di dunia. Darul-Ulum adalah universitas modern yang pertama di Mesir. Di lembaga-lembaga itu, kaum terpelajar Indonesia ditempa. Seperti mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, mahasiswa Indonesia di Kairo terlibat dalam pergerakan kebangsaan. Mereka mulai terpengaruh oleh cita-cita nasionalisme yang disebarkan di Mesir pada waktu itu. Mereka, baik sebagai tokoh politik pergerakan maupun sebagai pendidik, berhasil memperluas pengaruh di kalangan rakyat. Jalan yang terpenting bagi penyebaran pengaruh ini ialah jaringan sekolah yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan mereka. Sekolah agama yang menekankan pendidikan agama atau sekolah umum tetapi bernafaskan agama memberikan pilihan baru dalam dunia pendidikan.

3. Sekolah swasta tak bersubsidi

Sekolah, dalam pengertian yang umum, sebenarnya tidak begitu asing dalam tradisi di tanah air kita. Pesantren, madrasah, dan berbagai jenis

Sumber: google.com/searchresults/taman siswa

Gambar 2.2.3
Para pengurus Taman Siswa pada kongres tahun 1930. Taman Siswa adalah salah satu sekolah swasta tak bersubsidi yang oleh pemerintah Belanda disebut sekolah liar. Dari sekolah macam inilah muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional.

sekolah agama sudah lama dikenal. Tradisi sekolah ini tetap berlanjut sekalipun telah ada pilihan-pilihan lain.

Pesantren dan madrasah merupakan jenis sekolah yang coraknya bertolak belakang dengan sekolah yang diperkenalkan pemerintah, baik dari sudut isi pengajaran maupun cara pendidikan. Sejak 1920-an, setapak demi setapak telah mulai adanya perubahan pengajaran pada beberapa pesantren dan madrasah yang umumnya digerakkan oleh kaum reformis Islam. Sekolah agama yang didirikan oleh golongan ini mulai memakai sistem baru dan memperkenalkan berbagai jenis pengajaran umum. Kedua macam sekolah agama ini di beberapa daerah merupakan sekolah swasta yang paling penting.

Sekolah umum swasta pada dasarnya bisa dibedakan antara yang mengikuti corak serta sifat sekolah pemerintah dan bersubsidi dengan sekolah yang mencari sifat lain. Taman Siswa adalah contoh yang paling jelas dalam usaha untuk memberi dasar ideologis bagi sekolah. Demikian juga sekolah umum yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan agama. Misalnya sekolah yang didirikan Muhammadiyah mengikutsertakan pengajaran dan pendidikan agama untuk anak didik mereka. Selain itu, ada pula sekolah swasta yang tidak saja mencari dasar ideologis, tetapi juga memperkenalkan corak pendidikan baru.

Pemerintah Belanda menamakan sekolah swasta tak bersubsidi itu sebagai *wilde schoolen* (sekolah liar). Disebut liar karena sekolah swasta itu sering bercorak anti kolonial dan karena sering mengalami pasang surut. Hal itu tidak saja terjadi pada sekolah yang berdiri sendiri, tetapi juga pada sekolah milik organisasi besar seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Dalam banyak hal, terutama yang menyangkut keuangan, tersedianya guru-guru, dan jumlah murid, sekolah sangat tergantung pada keadaan setempat. Kalau organisasi atau orang yang mendirikan sekolah itu masih aktif dan mendapat kepercayaan masyarakat, sekolah bisa diharapkan maju. Akan tetapi, apabila penguasa setempat atau polisi bertindak, semangat pendiri mulai luntur, keadaan ekonomi mulai merosot, dan sebagainya sekolah-sekolah tersebut terpaksa harus gulung tikar.

Hal terpenting yang perlu juga dicatat ialah bahwa sekolah swasta umumnya murah. Siapa pun juga bisa memasukinya tanpa memperhitungkan kedudukan ataupun kekayaan. Hal seperti itu tidak terjadi pada sekolah pemerintah. Sekolah swasta memberikan kemungkinan lain dalam sistem dan corak pendidikan. Murid-murid keluaran sekolah swasta kebanyakan berada di luar sistem kolonial. Sekolah-sekolah swasta yang didirikan dan diselenggarakan oleh pribumi mendidik calon-calon nasionalis.

Coba kamu perhatikan kehadiran dan peran sekolah-sekolah Taman Siswa dan Muhammadiyah pada zaman pergerakan kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mampu membentuk karakter bangsa dan menanamkan kesadaran akan nasionalisme bangsa Indonesia. Bagaimana dengan peran sekolah-sekolah sekarang? Apakah di sekolah tempat kamu belajar kamu juga sangat merasakan bahwa semangat cinta tanah air sungguh-sungguh ditanamkan? Coba diskusikan hal ini dengan teman-temanmu!

2.2.2 Tumbuhnya Kesadaran Nasional Indonesia

Kesadaran nasional sebagai satu bangsa sangat penting artinya dalam perjuangan melawan penjajah. Kesadaran nasional Indonesia tidak muncul begitu saja. Golongan terpelajar, kaum profesional, dan pers berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran nasional Indonesia.

A. Peranan golongan terpelajar

Di atas, kita sudah mempelajari perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi bangsa Indonesia, semakin banyak pula kaum terpelajar di Indonesia. Munculnya golongan terpelajar di Indonesia menumbuhkan kesadaran kaum cendekiawan muda akan keterbelakangan bangsanya. Mereka membentuk suatu kekuatan sosial baru guna memperbaiki nasib bangsanya. Mereka tidak hanya menuntut kesejahteraan, tetapi juga kemerdekaan nasional. Gerakan mereka itu disebut pergerakan nasional.

Akibat dari pendidikan kolonial ialah bangkitnya keinginan yang kuat pada para cendekiawan untuk membebaskan bangsanya dari cengkeraman

Sumber: *ilustrasi bagian produksi, 2007*

Gambar 2.2.4
Mohammad Syafei, Ki Hajar Dewantara, dan E.F.E Douwes Dekker adalah tokoh-tokoh pendiri sekolah swasta untuk mendidik rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme.

penjajah. Mereka mendirikan sekolah-sekolah swasta dan menciptakan kader-kader pemimpin guna mengimbangi dominasi pemerintah Belanda. Putra-putri bangsa yang berjasa besar dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia yang kemudian melahirkan para pejuang yang tangguh dan nasionalis, antara lain Ki Hajar Dewantara, Mohammad Syafei, dan E.F.E. Douwes Dekker. **Ki Hajar Dewantara** mendirikan Perguruan Taman Siswa (1920). Taman Siswa didirikan untuk mendidik rakyat Indonesia agar menjadi manusia yang berwawasan kebangsaan (nasionalisme). **Mohammad Syafei** mendirikan Perguruan Kayutanam (1926) untuk mendidik anak-anak Indonesia agar terampil dalam bekerja dan dijiwai semangat nasionalisme. Sedangkan **E.F.E. Douwes Dekker** mendirikan Sekolah Kasatrian untuk mendidik rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang mempunyai rasa percaya diri.

Dunia pendidikan mampu membuka mata dan hati rakyat Indonesia untuk melaksanakan tugas luhur, yaitu mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Perbedaan kewajiban dan hak antara penjajah dan terjajah harus dihapuskan. Rasialisme harus dihilangkan. Semua itu akan tercapai jika seluruh kekuatan nasional disatupadukan.

Keinginan bersama untuk membentuk suatu bangsa itulah yang disebut nasionalisme. Kehidupan bersama sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, ingin dicapai tanpa memandang perbedaan budaya, suku, dan agama. Para pemuda yang pernah mengenyam pendidikan menyadari bahwa masyarakat bumiputra telah dijadikan objek pemerasan oleh Belanda dan dijadikan pasar bagi industrinya sehingga penderitaan mereka tidak pernah putus. Persatuan dan kesatuan bangsa harus digalang untuk menghadapi kekuatan kolonial. Harga diri bangsa yang terus dirampas kaum kolonialis harus dikembalikan. Oleh karena itu, wajar kalau nasionalisme tumbuh sebagai kekuatan antikolonialisme. Kolonialisme menjadi tantangan bagi rakyat bumiputra yang secara kolektif menyatukan diri guna menghapus penjajahan dan menciptakan kemerdekaan. Kesadaran bersama inilah yang menciptakan nasionalisme Indonesia, yang akan diwujudkan melalui organisasi dan cara perjuangan modern.

B. Peranan pers

Pers, entah itu berupa surat kabar atau majalah, mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi. Menyadari pentingnya peranan pers, para pendiri organisasi pergerakan nasional menerbitkan majalah atau surat kabar yang digunakan sebagai sarana menyebarluaskan semangat nasionalisme dan perjuangan bangsa, serta sikap persatuan dan kesatuan bangsa.

Organisasi pergerakan nasional itu berharap, agar dengan membaca surat kabar atau majalah dapat tumbuh rasa nasionalisme dan mempunyai sikap anti terhadap penindasan dalam diri masyarakat Indonesia. Dengan demikian, muncullah dukungan masyarakat terhadap organisasi pergerakan nasional tersebut.

Salah satu surat kabar terkenal di Jawa adalah *Darmo Kondo*. Surat kabar ini dibeli oleh Boedi Oetomo sekitar tahun 1910 dari penerbit Cina. Sebelum dibeli Boedi Oetomo cabang Surakarta, surat kabar *Darmo Kondo* diterbitkan oleh **Tan Tjoe Kwan**. Melalui *Darmo Kondo* ini, Boedi Oetomo menyebarluaskan cita-citanya kepada masyarakat.

Pada tanggal 26 Januari 1913, surat kabar *Oetoesan Hindia* lahir di bawah pimpinan H.O.S Tjokromaninoto. Surat kabar milik SI (Sarekat Islam) ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan nasional, politik, ekonomi, dan perburuhan yang dipimpin oleh Central Sarikat Islam. Banyak tokoh pergerakan menulis di surat kabar ini, antara lain H.O S. Tjokroaminoto, Abdul Muis, H. Agus Salim, dan Alimin Prawirohardjo. Surat kabar milik SI lainnya adalah *Sinar Djawa* (Semarang), *Pantjaran Warta* (Betawi) dan *Saroetomo* (Surakarta).

Para pendiri Indische Partij menerbitkan majalah *Het Tijdschrift* dan surat kabar harian *De Express*. Baik dalam *Het Tijdschrift* dan *De Express* terdapat tulisan-tulisan **Douwes Dekker**. Meskipun majalah dan surat kabar itu terbit dalam bahasa Belanda,

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1985*

Gambar 2.2.5
Surat kabar zaman pergerakan berperan besar dalam menyebarluaskan semangat nasionalisme dan perjuangan bangsa, serta sikap persatuan dan kesatuan bangsa.

namun isinya, terutama berhubungan dengan masa depan Hindia Belanda. Pokok-pokok pikiran yang diungkapkan dalam tulisan-tulisan itu ternyata kemudian merupakan landasan kesatuan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah *Indonesia Merdeka*. Majalah ini terbit dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Corak *Indonesia Merdeka* dengan karangan-karangannya merupakan aksi untuk mencapai tujuan PI, terutama untuk memperkuat cita-cita kesatuan Bangsa Indonesia. Majalah *Indonesia Merdeka* inilah yang menggunakan kata Indonesia dalam kata pengantar nomor pertama terbitannya. *Indonesia Merdeka* membawakan suara nasionalisme Indonesia.

Beberapa surat kabar yang berperan membawa suara organisasi pergerakan nasional antara lain: *De Locomotief* (Boedi Oetomo), *Bataviaasch Nieuwsblad* (Boedi Oetomo), *Jong Indie* (Boedi Oetomo), *Darmo Kondo* (Boedi Oetomo), *Oetoesan Hindia* (Sarikat Islam), *Sinar Djawa* (Sarikat Islam), *Pantjaran Warta* (Sarikat Islam), *Saroetomo* (Sarikat Islam), *De Express* (Indische Partij), *Kaoem Moeda* (Indische Partij), *Tjahaja Timoer* (Indische Partij), *De Indier* (Indische Partij), dan *Indonesia Merdeka* (Perhimpunan Indonesia).

Perkembangan pers berbahasa daerah atau Melayu menimbulkan pemikiran di kalangan pemerintah Belanda untuk menetralkan pengaruh pers bumiputra. Mengapa demikian? Karena pers bumiputra menduduki tempat yang lebih penting daripada pers Eropa. Hal itu terjadi terutama setelah berdirinya Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Bagaimana cara menetralkan pers bumiputra? Untuk menetralkan pers bumiputra itu, pemerintah mendirikan surat kabar berbahasa Melayu dan memberikan bantuan kepada penerbit surat kabar yang dinilai lemah dalam pemberitaannya.

Surat kabar dan majalah yang terbit pada masa itu masih sederhana. Namun demikian, surat kabar dan majalah itu mampu menyebarkan gagasan dan semangat kebangsaan kepada masyarakat Indonesia.

Coba perhatikan peran kaum terpelajar. Mereka memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi karena pendidikan membuka mata mereka, bahwa apa yang dilakukan penjajah Belanda selama ini adalah salah. Bagaimana dengan kamu? Apakah dengan pendidikan kamu semakin menyadari kesalahan dan kekurangan tertentu yang terjadi di negara kita? Menurut kamu, apakah kesadaran nasional dewasa ini masih ada dalam diri kaum muda dan kaum terpelajar? Apa contoh konkretnya? Coba diskusikan dengan teman-temanmu!

2.2.3 Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional

Kita sudah melihat tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan kaum pelajar. Kesadaran sebagai satu bangsa inilah salah satu hal yang memberi ciri perjuangan rakyat setelah tahun 1900 melawan penjajahan. Kesadaran sebagai satu bangsa itu diwujudkan ke dalam beberapa bentuk organisasi pergerakan nasional. Bagaimanakah perkembangan pergerakan nasional dari yang bersifat etnik, kedaerahan, keagamaan, sampai terbentuknya nasionalisme kebangsaan Indonesia?

A. Ciri perjuangan bangsa Indonesia

Ciri perjuangan rakyat Indonesia sebelum tahun 1900 berbeda dengan ciri perjuangan rakyat Indonesia setelah tahun 1900. Di mana letak perbedaannya?

1. Sebelum tahun 1900

Sebelum tahun 1900, bangsa Indonesia telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengusir penjajah yang bercokol di bumi Nusantara dengan berbagai bentuk. Akan tetapi, perjuangan tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bahkan sering mengalami kegagalan.

Mengapa sering mengalami kegagalan? Perjuangan tersebut sering mengalami kegagalan karena beberapa sebab seperti berikut ini.

- Perjuangan masih bersifat perlawanan lokal dan kedaerahan.
- Selalu berpindah tempat atau mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau oleh kekuasaan penjajah.
- Perjuangan bergantung pada kekuatan seorang pemimpin yang karismatis, yang dianggap oleh pengikutnya mempunyai kesaktian.
- Belum terorganisasi secara modern.
- Kebanyakan menggunakan senjata tradisional, seperti pedang, tombak, dan panah.

2. Sesudah tahun 1900

Sesudah tahun 1900, sifat perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan. Ciri perjuangan rakyat sesudah tahun 1900, antara lain sebagai berikut.

- Perlawanan bersifat nasional (meliputi seluruh Indonesia).
- Perlawanan menggunakan senjata dan taktik yang modern (para tokoh pejuang mulai berdiplomasi).

- Perlawanan diorganisasi secara lebih teratur. Dengan demikian, kehilangan seorang pemimpin tidak mematikan pergerakan dan perlawanan.

Jadi, begitulah perkembangan sifat perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia. Kita sudah melihat bersama bahwa perlawanan pada awalnya masih bersifat kedaerahan dan tergantung pada seorang pemimpin. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan waktu, sifat perlawanan dan perjuangan berubah. Perjuangan menjadi lebih bersifat nasional dan tidak lagi menggantungkan diri pada seorang pemimpin. Pergerakan dan perlawanan lebih berwarna nasional.

B. Faktor pendukung lahirnya pergerakan Nasional

Pergerakan nasional lahir dan berkembang karena adanya beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung itu bisa berupa faktor intern maupun faktor ekstern.

1. Faktor intern

Faktor-faktor intern yang mendorong lahirnya pergerakan nasional antara lain sebagai berikut.

- Keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan karena pahitnya penderitaan yang dialami rakyat.
- Munculnya kelompok cendekiawan yang mempelopori dan mendirikan organisasi pergerakan.
- Kesatuan Indonesia di bawah *Pax Nederlandica* memberi jalan ke arah kesatuan bangsa.
- Adanya Undang-Undang Desentralisasi 1903, yang diantaranya mengatur pembentukan kota praja. Hal itu memperkenalkan tata cara demokrasi modern kepada rakyat Indonesia.
- Pergerakan kebangsaan di Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan yang tidak menguntungkan bagi perjuangan kemerdekaan. Semangat kedaerahan itu membuat bangsa Indonesia terpecah-belah dan mudah diadu domba.

2. Faktor ekstern

Faktor-faktor ekstern yang mendorong lahirnya pergerakan nasional antara lain sebagai berikut.

- Kemenangan Jepang dalam perang Jepang-Rusia tahun 1904-1905. Kemenangan Jepang itu membangkitkan semangat bangsa Indonesia karena ternyata bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa barat.
- Ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat modern.
- Pengaruh pergerakan nasional negara lain. Contohnya adalah Revolusi Cina yang dipelopori **Dr. Sun Yat Sen**; Pergerakan India yang dipimpin oleh ***Mahatma Gandhi***; dan Pergerakan Turki Muda yang dipimpin **Mustafa Kemal Pasha** (*Kemal Attaturk*).

Faktor-faktor tersebut menimbulkan kesadaran serta perasaan senasib sependeritaan; membangkitkan hasrat serta semangat untuk bersatu guna bangkit menentang kolonialisme dan berusaha mengusir penjajahan dari muka bumi Nusantara.

C. Organisasi perintis pergerakan nasional

Hasrat dan semangat untuk bersatu untuk menentang kolonialisme akhirnya melahirkan gerakan kebangsaan untuk mencapai Indonesia merdeka. Muncullah pelopor-pelopor dan perintis pergerakan dari kalangan pelajar yang mempunyai wawasan nasional, antara lain: Boedi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Gerakan Pemuda.

1. Boedi Oetomo

Pendiri Boedi Oetomo adalah para mahasiswa STOVIA *(School tot Opleideing van Inlansche Aartsen)*. STOVIA adalah sekolah untuk mendidik calon dokter pribumi. STOVIA ada di kota Jakarta. Salah satu pendiri Boedi Oetomo adalah **Soetomo**. Organisasi tersebut secara resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Semboyan Boedi Oetomo adalah "meningkatkan martabat rakyat".

Inspirasi pendirian Boedi Oetomo datang dari **Dokter Wahidin Sudirohusodo**. Wahidin adalah seorang pensiunan dokter Jawa. Ia mendirikan Yayasan Beasiswa atau Dana Pelajar *(studiefonds)*. Yayasan ini didirikan untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dan ingin meneruskan studinya ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, tetapi tidak mempunyai biaya.

Tujuan Boedi Oetomo, yaitu:

- Mencapai kemajuan nusa dan bangsa dengan jalan memajukan pengajaran dan kebudayaan.

Sumber: *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 6/ 1990*

Gambar 2.2.5
Soetomo dan Wahidin Sudiro Husodo, dua orang tokoh pendiri Boedi Oetomo.

- Mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.

Pada mulanya keanggotaan Boedi Oetomo terbatas hanya golongan elite Jawa. Pada umumnya mereka adalah kaum intelektual dan pegawai, khususnya pegawai *pangreh praja* dan bangsawan. Keanggotaannya dibatasi karena takut mendapat saingan dari golongan rakyat jelata. Boedi Oetomo baru terbuka menerima keanggotaan dari seluruh Indonesia setelah kongresnya pada bulan Desember 1930.

Boedi Oetomo bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda sebab para pemuka dan pendukungnya kebanyakan orang yang erat dengan masyarakat Belanda. Bahkan, banyak anggotanya adalah pegawai pemerintah. Pada tahun 1914, ketika pecah Perang Dunia I di Eropa, Boedi Oetomo membentuk Komite Pertahanan India. Tujuan komite itu adalah mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Oleh karena itu, diperlukan wajib militer. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada tahun 1918, wakil-wakil Boedi Oetomo duduk dalam dewan itu.

Pada tahun 1932, Boedi Oetomo mempunyai orientasi untuk mencapai Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Boedi Oetomo mempunyai rencana untuk bergabung dengan perhimpunan perjuangan kemerdekaan yang lain.

Lahirnya Boedi Oetomo mempunyai makna penting bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Boedi Oetomo merupakan organisasi modern pertama yang memiliki hal-hal sebagai berikut.

- Mempunyai pemimpin, dasar, dan tujuan organisasi yang jelas, serta keanggotaannya diatur secara modern.
- Perjuangannya terarah menuju kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.
- Mencita-citakan kemerdekaan Indonesia dan cita-cita ini diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang lahir berikutnya.

Dengan kata lain, Boedi Oetomo memberi arah perubahan politik menuju penyemaian semangat nasional yang pertama. Oleh karena itu, hari lahir Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Tokoh-tokoh Boedi Oetomo yang berperan besar antara lain: Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Tjipto Mangunkusumo, Radjiman Wedyodiningrat, R.A. Tirtokusumo, Surjodiputro, Pangeran Noto Dirodjo, dan R. Gunawan Mangunkusumo.

2. Sarekat Islam

Sarekat Islam (SI) semula bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Sarekat Dagang Islam didirikan oleh **Haji Samanhudi** dan **R.M. Tirtosudirjo** di Solo pada tahun 1911. Faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Sarekat Dagang Islam adalah sebagai berikut.

- Sarekat Dagang Islam dapat menjadi "wadah" perjuangan para pedagang Islam dalam menghadapi gelombang perdagangan Cina perantauan yang semakin ekspansif dan monopolis. Kegairahan berdagang orang Cina perantauan sangat dipengaruhi oleh Revolusi Cina, 10 Oktober 1911. Revolusi itu menggugah harga diri dan kesadaran emosional, kemudian membangun ikatan-ikatan eksklusif yang bercorak nasionalistis Cina. Semua itu sangat memengaruhi kinerja pedagang Cina di Indonesia, khususnya Solo.
- Sarekat Dagang Islam menjadi wadah perjuangan menghadapi semua bentuk penghinaan terhadap penduduk pribumi.

Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, atas usul dan saran dari **H.O.S. Tjokroaminoto**, Sarekat Dagang Islam diubah namanya menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama itu sesuai tuntutan kebutuhan saat itu. Menurut H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini harus terbuka bagi semua masyarakat dari berbagai latar belakang profesi (mata pencarian). Semua masyarakat pada lapisan bawah yang sudah sejak berabad-abad lamanya tidak tersentuh perubahan, harus mendapat perhatian Sarekat Islam.
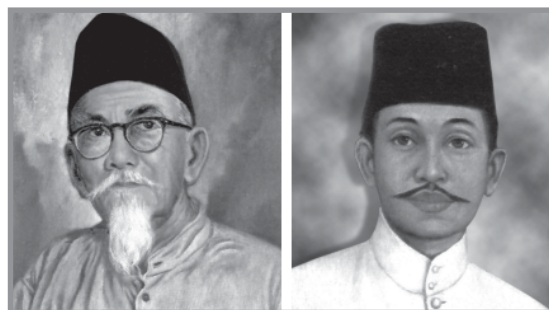
Sumber: Atlas dan Lukisan Sejarah.1985

Gambar 2.2.6
K.H. Agus Salim dan H.O.S Tjokroaminoto tokoh pemimpin Sarekat Islam

Menurut Anggaran Dasarnya, tujuan pendirian Sarekat Islam adalah sebagai berikut.

- Mengembangkan jiwa dagang.
- Membantu anggota yang menderita dan kesulitan.
- Memajukan pengajaran.
- Menaikkan derajat penduduk asli.
- Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam.

Pada tanggal 26 Januari 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres di Surabaya. Hasil keputusan yang diambil dalam kongres tersebut antara lain sebagai berikut.

- H.O.S. Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua.
- Surabaya ditetapkan sebagai pusat kegiatan.
- Sarekat Islam terbuka bagi bangsa Indonesia, dengan Islam sebagai dasar persatuan.
- Membatasi masuknya pegawai negeri dalam keanggotaan Sarekat Islam.

Setelah kongres di Surabaya, Sarekat Islam mengalami beberapa perkembangan, antara lain sebagai berikut.

- Tahun 1915, Sarekat Islam ikut dalam aksi *Komite Indie Weerbar* dan mendesak berdirinya Dewan Rakyat *(Volksraad).*
- Tahun 1917, Sarekat Islam pecah menjadi dua. Penyebabnya adalah masuknya paham sosialisme-marxisme yang dibawa oleh **Semaun**, **Alimin**, dan **Darsono**. Ketiga tokoh tersebut adalah anggota ISDV (*Indische Social Democratische Vereniging*) cabang Semarang. Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam merah dan Sarekat Islam putih. Sarekat Islam merah menganut paham sosialis kiri. Pemimpinnya adalah Semaun, Alimin, Darsono, dan Muso. Sarekat Islam putih berpegang pada ajaran Islam. Pemimpinnya adalah K.H. Agus Salim dan H.O.S. Tjokroaminoto.
- Pada tahun 1918, Sarekat Islam menempatkan H.O.S Tjokroaminoto sebagai anggota Dewan Rakyat *(Volksraad).*
- Tahun 1920 merupakan puncak perkembangan Sarekat Islam. Pengaruh Sarekat Islam sangat dirasakan oleh masyarakat. Sifat dan corak Sarekat Islam sebagai organisasi perjuangan sangat tampak. Sarekat Islam bersifat demokratis, sosialis, dan ekonomis.
- Tahun 1923, dalam kongres di Madiun, Sarekat Islam mengganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Partai Sarekat Islam bersifat nonkooperatif terhadap Belanda.
- Tahun 1927, dalam kongres diputuskan bahwa Partai Sarekat Islam bertujuan mencapai Indonesia merdeka berasaskan Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, Partai Sarekat Islam mengubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Nama PSI diubah menjadi PSII karena sifat perjuangan partai yang sangat nasionalis.

Tokoh-tokoh Sarekat Islam antara lain: Haji Samanhudi, R.M. Tirtosudirjo, H.O.S. Tjokroaminoto, K.H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso, dan Abdul Muis.

3. Indische Partij

Indische Partij (IP) didirikan oleh tiga serangkai, yaitu **E.F.E. Douwes Dekker** (Danudirdja Setiabudi), **R.M. Suwardi Suryaningrat**, dan **Dokter Cipto**

Sumber: *Lukisan Sedjarah, 1956*

Gambar 2.2.7
Tiga Serangkai pendiri Indische Partij: Dr. Cipto Mangunkusumo. E.F.E Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat.

Mangunkusumo. *Indische Partij* didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung.

Indische Partij adalah organisasi campuran. Anggotanya terdiri dari orang-orang indo (campuran Belanda dan Indonesia) dan orang-orang bumiputra. Organisasi ini merupakan organisasi yang mendukung gagasan revolusioner nasional. Jika orang-orang indo dan bumiputra bersatu, pasti akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menghadapi pemerintah Belanda. Pada waktu itu, orang-orang indo mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka dibedakan dari orang Belanda asli.

Tujuan *Indische Partij* adalah menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional, serta mempersiapkan diri bagi kehidupan rakyat yang merdeka. Dasar keanggotaannya terbuka untuk semua orang. Sedangkan asas perjuangannya adalah nasionalisme dan kooperatif. *Indische Partij* menyatakan dengan tegas dan mengakui bahwa Hindia adalah tanah airnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia sudah ada di dalam *Indische Partij*, yaitu menginginkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Belanda bersikap tegas. Permohonan *Indische Partij* untuk mendapat izin sebagai badan hukum ditolak. Organisasi itu dinyatakan terlarang sejak awal Maret 1912.

Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda bermaksud merayakan seratus tahun pembebasan Belanda dari pendudukan Perancis. Dokter Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat membentuk suatu organisasi dengan nama Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda atau Komite Bumiputra. Para pemimpin *Indische Partij* menulis beberapa kritik di harian *De Expres*, antara lain tulisan Suwardi yang berjudul *"Sekiranya aku seorang Belanda"*. Kemudian, Cipto menulis karangan berjudul *"Kekuatan atau Ketakutan"*.

Douwes Dekker juga menulis karangan yang berjudul *"Pahlawan kita Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat"*. Dalam tulisannya itu, Douwes Dekker memuji keberanian mereka dalam memperjuangkan nasib bangsa. Tulisan-tulisan tersebut mengecam ketidakadilan yang diterapkan Belanda di Indonesia.

Karena tulisan-tulisan tersebut menyinggung perasaan Belanda, Tiga Serangkai pemimpin *Indische Partij* ditangkap. Mereka di buang ke luar Jawa. Alasan penangkapan adalah membahayakan keamanan dan ketertiban. Namun, atas permintaan mereka sendiri, mereka memilih negeri Belanda sebagai tempat pembuangan. Ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia pada tahun 1918. Sepulangnya dari negeri Belanda, mereka mendirikan *Insulinde*. Akan tetapi, organisasi ini tidak berkembang dan kurang mendapat simpati dari kalangan bumiputra.

4. Gerakan Pemuda

Sejak awal tahun 1920-an sering diadakan pertemuan antarorganisasi pemuda. Tujuan pertemuan itu adalah untuk menyatukan langkah menuju sasaran yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Alat untuk mencapai Indonesia merdeka adalah persatuan antarsesama pemuda pelajar. Akan tetapi, untuk menyatukan organisasi tersebut tidaklah mudah. Faktor penghalang untuk menyatukan organisasi tersebut, antara lain adalah perbedaan latar belakang berdirinya organisasi, sifat, dan ideologi dari masing-masing organisasi.

Faktor penghalang tersebut akhirnya dapat dikesampingkan. Mereka menyadari adanya hubungan dan keterikatan yang sangat erat satu sama lain sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Selama bertahun-tahun, mereka berdebat tentang bentuk persatuan yang diinginkan. Ada dua alasan bentuk persatuan yang diperdebatkan, yaitu:

- bentuk federasi, penggabungan yang longgar (hanya ada satu keterikatan);
- bentuk fusi, peleburan (semua perkumpulan meleburkan diri menjadi satu).

Pada tanggal 7 Maret 1915, **R. Satiman Wiryosandjoyo**, **Kadarman**, dan **Sunardi** mencapai kesepakatan untuk mendirikan perkumpulan pemuda Jawa dan Madura. Perkumpulan itu diberi nama Trikoro Dharmo. Trikoro Dharmo berarti tiga tujuan mulia. Ketiga tujuan mulia itu adalah Sakti, Budhi, dan Bhakti.

Azas perkumpulan Trikoro Dharmo, yaitu:

a. Menumbuhkan pertalian antara murid-murid bumiputra pada sekolah menengah dan kursus perguruan kejuruan dan sekolah Vak.
b. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya.
c. Membangkitkan dan mempertajam perasaan bagi segala bahasa dan budaya Indonesia.

Hadirnya Trikoro Dharmo yang sangat Jawasentris menimbulkan rasa tidak senang dari pemuda Sunda dan Madura. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Juni 1918 diubah namanya menjadi Jong Java. Selain Jong Java muncul juga organisasi serupa, misalnya Jong Ambon, Jong Celebes (Sulawesi), Jong Sumateranen Bond, dan lain-lain.

Pada dasarnya perkumpulan pemuda tersebut mempunyai cita-cita yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Dalam perkembangan selanjutnya, dirasa perlu untuk membentuk satu wadah yang mampu mempersatukan para pemuda dari berbagai latar belakang asal, budaya, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menyelenggarakan suatu pertemuan bersama (kongres) guna merealisasikan cita-cita tersebut.

a. Kongres Pemuda Indonesia I

Pada tanggal 15 Desember 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Arum, dan lain-lain mengadakan suatu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersepakat membentuk sebuah panitia untuk mempersiapkan "Kerapatan Besar Pemuda". Mereka berusaha menggugah semangat kerja sama di antara berbagai organisasi di Indonesia, agar dapat mewujudkan dasar pokok lahirnya persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Rapat tersebut menghasilkan susunan panitia kongres. Kepanitiaan kongres terdiri dari:

Ketua : **M. Tabrani** (Jong Java)
Wakil ketua : **Sunarto** (Jong Java)
Sekretaris : **Jamalludin Adinegoro** (Jong Sumatra Bond)
Bendahara : **Suwarso** (Jong Java)

Panitia bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pertemuan. Contohnya adalah menghubungi tokoh-tokoh pemuda, menyiapkan tempat dan acara pertemuan, dan lain sebagainya.

Setelah semua persiapan selesai, Kerapatan Besar yang diadakan di Jakarta dibuka. Pertemuan itu kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia I.

Kongres Pemuda Indonesia I diadakan pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres dibuka oleh M. Tabrani yang menjabat sebagai Ketua Jong Indonesia Kongres Komite. Dalam pidatonya, ditegaskan bahwa "Kita semua, orang Jawa, Sumatra, Ambon, Minahasa, dan lain-lain dijadikan makhluk yang harus saling mengulurkan tangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia".

Dalam kongres tersebut, tokoh-tokoh pemuda mengambil kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Beberapa pidato yang menonjol adalah:

- Pidato **Sunarto** yang berjudul "*Indonesia Bersatu*".
- **Bahder Johan** berpidato tentang "*Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia*".
- **Mohammad Yamin** berpidato tentang "*Kemungkinan-kemungkinan untuk Bahasa-bahasa dan Kesusastraan Indonesia di Kemudian Hari*".
- **Paul Pinontoan** berpidato tentang "*Kewajiban Agama dalam Pergerakan Kebangsaan*".

Pidato-pidato tersebut pada umumnya memberikan wawasan mengenai persatuan kebangsaan dan pentingnya mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda.

Kongres Pemuda I ini berhasil membentuk suatu wadah yang disebut Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Tujuan PPPI adalah menggabungkan semua perkumpulan pemuda dalam satu badan perhimpunan massa pemuda Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita tersebut ternyata masih ada beberapa hambatan. Misalnya, organisasi yang ikut dalam kongres merasa belum waktunya untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam satu wadah tunggal. Di samping itu, ada kesalahpahaman antarmereka, serta rasa kedaerahan yang juga masih kuat.

b. *Kongres Pemuda Indonesia II*

Pada tanggal 20 Februari 1927, *Algemeene Studie Club* Bandung mendirikan sebuah organisasi yang bersifat nasional. Organisasi itu dinamakan Jong Indonesia dan kelak berganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Tujuan Jong Indonesia adalah menanamkan dan mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia dengan dasar nasionalisme menuju Indonesia Raya.

Keanggotaan organisasi tersebut terdiri dari pemuda yang berumur 15 tahun dan pelajar AMS, RHS, dan STOVIA. Adapun tujuan organisasi ini adalah memperluas dan memperkuat ide kesatuan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, mereka mendirikan organisasi-organisasi, seperti organisasi kepanduan dan menerbitkan majalah dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Organisasi ini mengadakan kongres pada tanggal 28 Desember 1927. Keputusan penting yang dihasilkan dalam kongres ini adalah sebagai berikut.

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990*

Gambar 2.2.8
Para peserta kongres pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 26-28 Oktober 1928.

- Nama organisasi yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia, yaitu Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia.
- Bahasa Melayu (Indonesia) ditetapkan sebagai bahasa pengantar.
- Mendukung gagasan PPPI untuk membentuk wadah *fusi* (penyatuan dan peleburan semua perkumpulan pemuda ke dalam satu perkumpulan).

Pemuda Indonesia dan PPPI adalah dua organisasi yang sangat aktif untuk mencapai cita-cita persatuan di kalangan pemuda. Pemuda Indonesia (PI) pernah menghadiri "Liga Anti Penindasan dan Penjajahan" yang dilaksanakan di Brussel, 10-15 Februari 1927.

Sesuai dengan maklumat pengurus kerapatan pemuda Indonesia dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, disusunlah panitia Kongres Pemuda Indonesia II. Berikut ini susunan panitia Kongres Pemuda Indonesia II.

Ketua : **Suganda Joyopuspito** (PPPI)
Wakil Ketua : **Joko Marsaid** (Jong Java)
Sekretaris : **Mohammad Yamin** (JSB)
Bendahara : **Amir Syarifudin** (Jong Batak)

Maksud dan tujuan diadakannya kongres pemuda II, adalah sebagai berikut.

- Menyatukan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia.
- Membicarakan beberapa masalah mengenai pergerakan pemuda Indonesia.
- Memperkuat perasaan kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia.

Sebelum Kongres Pemuda Indonesia II mencapai kesimpulan, diadakan pertemuan-pertemuan atau sidang. Dalam sidang pertama, Suganda menyampaikan pidatonya tentang Persatuan dan Kebangsaan Indonesia.

Kongres Pemuda Indonesia II itu dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 di gedung *Oast Java Bioskop* (gedung tersebut sudah dibongkar) dan di gedung *Indonesische Club Gebouw* (Wisma Indonesia) di Jl. Kramat Raya 106, Jakarta.

Kongres Pemuda Indonesia II menghasilkan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda, yaitu:

Pertama : Kami putera dan puteri Indonesia

mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua : Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Keputusan sidang itu disiarkan melalui surat kabar Pemuda Sumatra pada akhir Oktober 1928.

Kongres juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya para pemuda untuk menggemakan sumpah tersebut di setiap kesempatan, agar jiwa persatuan dan kesatuan semakin mengakar di hati masyarakat Indonesia. Pada saat kongres, lagu kebangsaan Indonesia (Indonesia Raya) dan bendera pusaka (Merah Putih) diperkenalkan kepada peserta kongres. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh **W.R. Supratman**.

Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi serta memahami arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

D. Masa dan organisasi pergerakan nasional lainnya

Di mana pun juga setiap pergerakan ada yang bersifat radikal dan ada pula yang bersifat moderat. Demikian pula halnya organisasi pergerakan nasional Indonesia pada zaman penjajahan. Ada organisasi pergerakan yang bersifat *radikal* (keras dan tidak mau bekerja sama) dan yang bersifat *moderat* (lunak dan mau bekerja sama). Organisasi pergerakan mana saja yang termasuk *radikal* dan mana yang termasuk *moderat*?

1. Masa radikal

Setelah Perang Dunia I berakhir, partai dan organisasi pergerakan nasional mulai bersikap radikal. Pada masa ini, partai-partai dan organisasi pergerakan bersikap nonkooperatif. Artinya, mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda.

Organisasi-organisasi pergerakan pada masa itu menjadi bersifat radikal karena:

- Dalam Perang Dunia I, Belanda memang bersikap netral. Namun demikian, situasi perang mempersulit hubungan antara negeri Belanda dengan Indonesia. Situasi itu menjadi salah satu sebab pergerakan yang ada menjadi radikal.
- Masuk dan berkembangnya aliran sosialisme ke Indonesia lewat ISDV (*Indische Sociaal Demokratische Vereeniging*). ISDV adalah organisasi buruh yang bersifat marxistis.

Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berkembang pada masa radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI).

a. Perhimpunan Indonesia

Pada tahun 1908, para pelajar Indonesia yang belajar di negeri Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bersifat sosial. Organisasi tersebut dinamakan *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia). Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang pribumi dan non pribumi bukan Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya, Perhimpunan Hindia yang semula berupa organisasi yang bersifat sosial berubah menjadi organisasi yang bersifat politik. Perubahan itu terjadi ketika mantan pemimpin Indische Partij masuk menjadi anggota Perhimpunan Hindia pada tahun 1913. Nama Perhimpunan Hindia pun mengalami perubahan pada tahun 1922 menjadi **Perhimpunan Indonesia**.

Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah yang diberi nama *Hindia Putera* dan majalah *Indonesia Merdeka*. Melalui majalah tersebut, mereka yang tergabung dalam PI menyebarluaskan cita-cita, tujuan, serta kegiatan-kegiatannya. Dengan demikian, keberadaan PI dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Sumber: *Lukisan Sedjarah*, 1956

Gambar 2.2.9
Para pemimpin Perhimpunan Indonesia. Dari kiri ke kanan: G. Mangunkusumo, Mohammad Hatta, I. Kusuma Sumantri, R. Sastromuljono, dan R.M. Sartono.

Kegiatan Perhimpunan Indonesia meliputi:

- Melakukan propaganda ke tanah air untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Cita-cita tersebut disebarluaskan melalui majalah *Indonesia Merdeka*. Propaganda tersebut ditujukan kepada perkumpulan pelajar yang ada di berbagai kota, seperti Solo, Surabaya, dan Bandung. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh para alumni yang baru kembali dari Belanda.
- Melakukan propaganda kepada bangsa lain dengan tujuan untuk menarik simpati dan dukungan moral. Caranya antara lain:

- Mengirimkan utusan untuk menghadiri kongres Liga Demokrasi Untuk Perdamaian yang berlangsung di Paris pada tahun 1926. Mohammad Hatta sebagai utusan Perhimpunan Indonesia dalam kongres tersebut mengatakan bahwa tujuan dari PI adalah mencapai Indonesia merdeka.
- Ikut menjadi anggota Liga Anti Imperialisme dan Kolonialisme yang bermarkas di Brussel.

Pada kongres Liga Demokrasi tersebut, juga hadir tokoh-tokoh pergerakan nasional dari negara lain, salah satunya adalah ***Nehru***. Dalam kesempatan yang baik itu, Nehru dan Mohammad Hatta saling bertemu dan bertukar pikiran. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang cinta akan perdamaian dan kemerdekaan, Indonesia berhasil menggolkan resolusi dalam kongres tersebut. Isi resolusi itu ialah bahwa pergerakan kemerdekaan adalah suatu tuntutan hidup bagi bangsa Indonesia dan juga merupakan suatu hal yang penting bagi perikemanusiaan.

Dalam kongres tersebut, Mohammad Hatta juga bertemu dengan Semaun dari ISDV. Mereka sepakat mengadakan kerja sama untuk mencapai Indonesia merdeka. Hal ini membuat pemerintah Belanda di Indonesia curiga karena komunis baru saja mengadakan pemberontakan. Oleh sebab itu, pada tahun 1927, Belanda mengadakan penangkapan terhadap tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia, seperti Mohammad Hatta, Natsir Datuk Pamoentjak, Abdoel Madjid Djojodiningrat, dan Ali Sastroamidjojo. Pada tahun 1927, mereka diadili di Den Haag, Belanda. Karena tidak terbukti bersalah, akhirnya mereka dibebaskan.

Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, antara lain R.N. Noto Suroto, Sutan Kasayangan, Ahmad Subardjo, Mohammad Hatta, Natsir Pamoentjak, Abdoelmadjid Djojoadiningrat, Ali Satroamidjoyo, A. Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, R. Sastromuljono, R.M. Sartono.

b. Partai Komunis Indonesia

Paham marxisme masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh **H.J.F.M. Sneevliet**. H.J.F.M. Sneevliet adalah salah satu pemimpin buruh di negeri Belanda dan sekaligus menjadi anggota *Sociaal Democratische Arbeidterspartij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Di Indonesia, ia mula-mula bekerja sebagai anggota staf redaksi surat kabar *Soerabajaasch Handelsbald*. Pada tahun 1913, Sneevliet pindah ke Semarang. Bagi Sneevliet, tinggal di Semarang adalah sesuatu yang menguntungkan karena Semarang adalah pusat *Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP). VSTP adalah serikat buruh yang tertua di kawasan nusantara. Sebagai pemimpin sosialis yang berpengalaman, ia berhasil membawa VSTP ke arah yang lebih radikal.

Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990*

Gambar 2.2.10
ISDV memengaruhi anggota Sarekat Islam muntuk menjadi anggota ISDV. Anggota ISDV dalam Sarekat Islam menimbulkan perpecahan di dalam Sarekat Islam.

Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet dan tokoh-tokoh sosialis lainnya (**J.A Brandsteder**, **H.W. Dekker**, dan **P. Bergsma**) mendirikan *Indische Sociaal-Democtratische Vereniging* (ISDV). Sneevliet dan kawan-kawan merasa bahwa ISDV tidak berkembang karena tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ISDV memengaruhi anggota Sarekat Islam untuk menjadi anggota ISDV. ISDV berhasil melakukan infiltrasi (penyusupan) ke dalam Sarekat Islam. Sneevliet dan kawan-kawan berhasil menjadikan pemimpin muda Sarekat Islam menjadi pemimpin ISDV. Semaun dan Darsono adalah tokoh-tokoh Sarekat Islam yang kemudian menjadi pemimpin ISDV.

Tahun 1919 merupakan masa sulit bagi para anggota golongan Eropa di dalam ISDV. Karena tindakan keras pemerintah kolonial, banyak anggota ISDV dipenjarakan dan diusir dari Hindia Belanda. Karena kehilangan pimpinan serta kegagalan-kegagalan gerakan mereka, peranan golongan Eropa di dalam ISDV menjadi berkurang. Muncullah aktivis-aktivis bangsa Indonesia di ISDV.

Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Pada bulan Desember diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekuatan utama PKI terletak pada anggota-anggotanya, yaitu dari kalangan buruh.

Disamping itu, PKI juga berpropaganda dengan slogan-slogan yang menarik untuk semua lapisan masyarakat. Slogan-slogan PKI tersebut, seperti *"lebih banyak kekayaan untuk yang kaya, tiada pajak untuk si miskin, lebih banyak mesjid untuk ulama/santri"*.

Meskipun demikian, PKI tidak memperoleh kesempatan untuk mengorganisasikan secara bebas cita-cita perjuangannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh dukungan massa, PKI harus bersifat keras karena sikap yang lemah kurang menarik massa.

Walaupun PKI belum merasa kuat, pada tahun 1926, PKI mengadakan pemberontakan. Pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh Belanda. Para pemberontak komunis tersebut dibuang ke Digul, di antaranya adalah Ali Arkhaam dan Sarjono. Sementara itu, Muso dan Alimin melarikan diri ke luar negeri. Karena pemberontakan itu, PKI kemudian dilarang oleh pemerintah Belanda.

Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesi (PKI), antara lain Semaun, Alimin, Darsono, Muso, Ali Arkhaam, dan Sugono.

c. *Partai Nasional Indonesia (PNI)*

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Pendirian Partai Nasional Indonesia disponsori oleh *Algemeene Studie Club*. Rapat pembentukan partai ini dihadiri oleh **Soekarno**, **Cipto Mangunkusumo**, **Soejadi**, **Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo**, **Mr. Budiarto**, dan **Mr. Sunario**. Menurut Soekarno, ideologi yang melandasi gerakan nasional adalah nasionalisme, islamisme, dan marxisme. Ketiga ideologi tersebut (yang kemudian dikenal dengan Nasakom) merupakan alat pemersatu bangsa.

Tokoh-tokoh pendiri PNI, antara lain: Ir. Soekarno (Ketua), dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budiarto, Mr. Sunario, dan Sartono.

Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Caranya ialah dengan memperbaiki ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang telah dirusak oleh pihak kolonial Belanda dengan kekuatan sendiri. Tindakan yang dilakukan, antara lain mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank-bank nasional, perkumpulan koperasi, dan lain-lain. Itulah sebabnya PNI tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah. PNI mengambil sikap nonkooperatif terhadap pemerintah Belanda. Ditekankan juga bahwa untuk mencapai kemerdekaan perlu ada persatuan bangsa.

Dok.Lukisan Sedjarah. 1956

Gambar 2.2.11
Soekarno dan kawan-kawan dari PNI beserta pembela di pengadilan kolonial di Bandung. Mereka diadili karena dituduh pemerintah Belanda akan mengadakan pemberontakan.

PNI berhasil menjadi partai yang populer di kalangan masyarakat bawah. Untuk menggalang kekuatan nasional diperlukan suatu federasi partai politik. Federasi partai politik terwujud pada tahun 1927, dengan terbentuknya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Indonesia (PPPKI). Anggota PPPKI terdiri dari PNI, PSII, Boedi Oetomo, Pasundan, Serikat Sumatra, Serikat Betawi, *Indonesische Studieclub* dan *Algeemene Studieclub*. Namun, federasi ini mengalami perpecahan pada tahun 1929.

Ketegasan sikap dan kegiatan PNI mengakibatkan pemerintah Belanda menganggap partai ini berbahaya. Oleh karena itu, gerak-gerik PNI selalu diawasi. Pemimpin-pemimpinnya seringkali mendapat peringatan keras dari pihak Belanda, agar tidak melakukan kegiatan yang merongrong kewibawaan Belanda.

Ternyata, para pemimpin PNI tidak mengindahkan peringatan-peringatan pemerintah Belanda. Pada tahun 1929, pemerintah Belanda menangkap sejumlah pemimpin PNI, antara lain Soekarno, Maskoen, Soepriadinata, dan Gatot Mangkupraja. Pada tahun 1930, mereka dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri Bandung. Dalam proses peradilan, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan berjudul "*Indonesia Menggugat*".

Pada tahun 1931, berdasarkan Kongres Luar Biasa di Jakarta, PNI dibubarkan. Sebagai gantinya didirikan partai baru, yaitu Partindo yang dipimpin oleh **Sartono**. Di samping itu, juga muncul partai baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Kedua partai ini dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda. Bahkan, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Digul, kemudian dibuang ke Bangka. Soekarno masuk menjadi anggota Partindo pada tahun 1932. Akan tetapi, dua tahun kemudian ia ditangkap dan diasingkan ke Ende (Flores). Dari Flores, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu.

Dengan penangkapan tokoh-tokoh tersebut, terbukti bahwa sikap pemerintah Belanda terhadap organisasi bumiputra semakin bertambah keras. Dengan demikian, kegiatan politik sulit dilakukan. Belanda selalu menangkap para pemimpin yang dianggap membahayakan. Akhirnya, kedua partai itu dibubarkan.

2. Masa moderat

Sejak tahun 1930, partai-partai di Indonesia mulai mengubah taktik perjuangannya. Partai-partai tersebut mulai bersikap moderat dan kooperatif. Partai-partai dan organisasi pergerakan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda

untuk mencapai tujuan perjuangan. Mengapa partai-partai dan organisasi pergerakan bersikap moderat dan kooperatif terhadap pemerintah Belanda?

Menjelang akhir tahun 1930-an di tanah air terjadi krisis dalam pergerakan nasional. Faktor penyebab krisis pergerakan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Pengaruh krisis ekonomi 1929/1930 yang mengakibatkan pemerintah bertindak keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- Pembatasan hak berkumpul dan berserikat.
- Banyak pemuka-pemuka pergerakan nasional diasingkan sebagai akibat kerasnya pemerintah kolonial.
- Tanpa melalui proses pengadilan, gubernur jenderal dapat menyatakan suatu pergerakan atau kegiatannya bertentangan dengan keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, organisasi-organisasi pergerakan dan partai-partai yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus menyesuaikan diri dengan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, partai-partai yang ada terpaksa mengurangi sikap kerasnya terhadap pemerintah. Perbedaannya dengan partai-partai radikal sebelum tahun 1930-an terletak pada cara mencapai tujuan. Partai-partai moderat lebih menggunakan cara kerja sama dengan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan. Kedua kelompok ini sama tujuannya, yaitu Indonesia merdeka.

Partai-partai dan organisasi-organisasi yang berkembang pada masa moderat adalah Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

a. *Partai Indonesia Raya (Parindra)*

Parindra merupakan gabungan *(fusi)* dari Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Boedi Oetomo, Serikat Madura, dan *Indonesische Studieclub*. Kesepakatan di antara partai-partai dan perkumpulan untuk bergabung terjadi pada tahun 1935 di Solo. Tahun tersebut dianggap sebagai hari kelahiran Parindra. Untuk mendukung lancarnya kegiatan Parindra, Surabaya ditetapkan sebagai pusat kegiatannya. Beberapa waktu kemudian, ikut pula bergabung Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat Ambon, Kaum Betawi, dan Kaum Banten.

Tokoh-tokoh Parindra, antara lain Sutomo, Wuryaningrat, dan Mohammad Husni Thamrin. Parindra dipimpin oleh Sutomo, kemudian dilanjutkan oleh Wuryaningrat.

Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya melalui upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan kebangsaan (nasionalisme). Sikap Parindra terhadap pemerintah Belanda tergantung pada situasi dan kondisi.

Usaha-usaha Parindra untuk mewujudkan tujuannya, adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, mendirikan Rukun Tani Indonesia, Rukun Pelayaran Indonesia, dan mendirikan Bank Nasional di Surabaya.
- Menganjurkan *swadesi* (salah satu ajaran Gandhi), yaitu menganjurkan untuk memakai barang produksi sendiri.
- Mendirikan organisasi kepramukaan "Surya Wirawan".

b. *Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)*

Gerindo didirikan di Jakarta pada tahun 1937. Pendirinya adalah ***A.K. Gani***, ***Mohammad Yamin***, ***Amir Syarifudin***, ***Sanusi Pane***, dan ***Sipakuntar***. Dasar partai Gerindo mirip Partindo. Tujuan Gerindo adalah mencapai kemerdekaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

c. *Gabungan Politik Indonesia (Gapi)*

Gapi yang merupakan suatu federasi berbagai organisasi politik didirikan pada bulan Mei 1939. Faktor pendorong didirikannya Gapi adalah penolakan Petisi Sutarjo pada tahun 1938 oleh pemerintah kolonial Belanda. Alasannya adalah bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri. Penolakan ini juga dipandang oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai keputusan yang sangat menyakitkan karena tidak melalui suatu persidangan Dewan Rakyat *(Volksraad)*. Oleh karena itu, muncul ide dari ***Mohammad Husni Thamrin*** untuk membentuk suatu konsentrasi perjuangan, yaitu Gapi. Anggota Gapi terdiri dari Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Perhimpunan Katolik Indonesia serta Partai Islam.

Tujuan perjuangan Gapi adalah:

- Persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, ekonomi, dan sosial.
- Pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum serta wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen bertanggung jawab kepada rakyat.
- Pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan negara.

Semboyan perjuangan Gapi adalah "Indonesia Berparlemen". Gapi menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kongresnya, tang-gal 23-25 Desember 1939, Gapi memutuskan:

- membentuk kongres rakyat;
- menetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan Indonesia;
- mengefektifkan penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh rakyat.

Tokoh-tokoh Gapi, antara lain adalah Mohammad Husni Thamrin, Abikusno Tjokrosujoso, dan Mr. Amir Syarifudin.

2.2.4 Peran organisasi nasional dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia

Pada bagian ini, kita akan mempelajari hubungan manifesto politik Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1928, dan Kongres Perempuan pertama dengan terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia.

A. Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia

Kita sudah mempelajari bahwa pergerakan politik Indonesia tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 1908, para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda mendirikan *Indische Vereeniging*. Pada tahun 1922, *Indische Vereeniging* diubah namanya menjadi *Indonesische Vereeniging*. Kemudian pada tahun 1925 *Indonesische Vereeniging* diubah menjadi Perhimpunan Indonesia.

Nama Indonesia diperkenalkan dan digunakan menggantikan nama India. Nama India diganti karena nama itu sudah ada yang memakainya. Selain itu, nama India tidak memperlihatkan identitas kebangsaan yang jelas dan tegas. Nama Indonesia memberikan ciri yang khas. Identitas kebangsaan tercermin dalam nama Indonesia itu. Nama Indonesia yang semula hanya dikenal dalam ilmu antropologi diangkat menjadi nama negara dan bangsa.

Perhimpunan Indonesia juga memberikan corak baru bagi perkembangan pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1923, PI mengeluarkan suatu pernyataan politik (manifesto politik). Manifesto politik itu dimuat dalam majalah *Hindia Poetra*. Bunyi manifesto politik itu demikian.

> "Masa depan rakyat Indonesia secara efektif dan semata-mata terletak di dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, karena hanya bentuk pemerintahan yang seperti itu saja yang dapat diterima oleh rakyat. Setiap orang Indonesia harus berjuang untuk ini sesuai kekuatan dan usahanya sendiri, tanpa bantuan dari luar *(self-help, not mendicancy)*. Setiap pemecah belahan keku-atan bangsa Indonesia dalam bentuk apa pun haruslah ditentang, karena hanya dengan persatuan yang erat di antara bangsa Indonesia saja dapat menuju ke arah tercapainya tujuan bersama."

Tujuan perkumpulan juga dipertegas, yaitu Indonesia merdeka. Asas politik perjuangannya adalah berdikari atau *selfhelp* dan *not mendicancy* (tidak meminta-minta). Oleh karena itu, terhadap pemerintah kolonial Belanda PI bersikap antipati dan non-kooperasi (tidak bekerja sama). Para tokoh Perhimpunan Indonesia yakin bahwa kemerdekaan penuh bagi rakyat, bangsa, dan tanah air Indonesia akan dapat dicapai dengan aksi bersama secara serentak oleh seluruh rakyat Indonesia.

Aktivitas PI di luar negeri membawa pengaruh yang kuat bagi perjuangan bangsa Indonesia di tanah air. Informasi-informasi mengenai "Indonesia Merdeka" terus disampaikan ke tanah air. Informasi tersebut kemudian disebarkan secara rahasia oleh anggota yang pulang ke tanah air.

PII mempunyai pengaruh yang besar terhadap pergerakan perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Demikianlah, Perhimpunan Indonesia secara langsung mengilhami lahirnya Partai Nasional Indonesia, Jong Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.

B. Kongres Pemuda 1928

Didorong oleh semangat kesatuan dan persatuan bangsa, organisasi-organisasi pemuda mengadakan Kongres Pemuda Pertama di Jakarta pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926. Para utusan dari daerah setuju untuk mengembangkan persatuan pemuda-pemuda Indonesia sebagai suatu bangsa. Rasa persatuan itu harus mengatasi kepentingan golongan, bahasa, maupun agama.

Pada tanggal 26 - 28 Oktober 1928, organisasi-organisasi pemuda mengadakan kongres yang kedua di Jakarta. Para utusan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mempertegas rasa persatuan kebangsaan mereka. Mereka mengucapkan sumpah atau ikrar pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda itu sebagai berikut.

Kami Putera dan Puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kami Putera dan Puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami Putera dan Puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

dok. Ilustrasi bagian produksi, 2007

Gambar 2.2.12
Lagu Indonesia Raya yang diterbitkan di Majalah "Sinpo" pada tanggal 27 Oktober 1928.

Di samping kesepakatan tersebut, para pemuda juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan ***W.R. Supratman*** sebagai lagu kebangsaan. Bendera merah putih juga diterima sebagai bendera kebangsaan. Kongres juga menyerukan agar kesepakatan di atas diterima sebagai asas wajib oleh setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan memahami arti penting persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

C. Kongres Perempuan Pertama

Peranan wanita dalam pergerakan nasional sesungguhnya sudah mulai dirintis oleh ***R.A. Kartini*** (1879 - 1904). R.A. Kartini adalah puteri seorang Bupati Jepara. Ia mengalami pengalaman hidup yang tidak terlalu menyenangkan. Sifat ketergantungan dan tunduk kepada kaum lelaki merupakan salah satu hal yang ingin diperbaiki oleh R.A. Kartini. Menurut R.A. Kartini, semua itu terjadi karena kurangnya pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia. Oleh karena itu, R.A. Kartini mencoba mengomunikasikan ide dan pemikirannya tentang dunia wanita lewat surat-surat yang ditujukan kepada ***J.H. Abendanon*** (1911). Surat-surat R.A. Kartini tersebut dikumpulkan oleh J.H. Abendanon. Kumpulan surat-surat Kartini itu diberi judul *Door Duisternis tot Licht* (*Habis Gelap Terbitlah Terang*).

Inti dari perjuangan R.A. Kartini adalah terjadinya **emansipasi,** yakni upaya mencapai persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Hal itu terutama menyangkut hak-hak sosial lainnya di masyarakat.

Berkat perjuangan dan kepeloporan R.A. Kartini, semangat kaum wanita Indonesia mulai dibangkitkan. Munculnya berbagai bentuk perkumpulan perempuan dan sekolah khusus perempuan memperlihatkan bahwa kaum wanita tidak mau ketinggalan dalam proses kemajuan bangsa.

Perkumpulan wanita yang lahir sebagai perwujudan cita-cita perjuangan kaum wanita, antara lain: Wanita Hadi (di Jepara), Wanita Susila (di Pemalang), Budi Wanita (di Solo), Puteri Mardika (di Jakarta), Pawijatan Wanita (di Magelang), Perkumpulan Kartini Fonds (di Semarang), Wanita Rukun Santoso (di Malang), Maju Kemuliaan (di Bandung), Ina Tuni (di Ambon), Sarikat Kaum Ibu Sumatera (di Bukit Tinggi), Kerajinan Ama Setia (di Kota Gadang), Pencinta Ibu Kepada Anak Temurunnya (di Minahasa).

Selain ini, juga muncul sekolah-sekolah khusus untuk kaum wanita. Contoh sekolah-sekolah khusus wanita adalah sebagai berikut.

- Sekolah yang didirikan ***Raden Dewi Sartika*** di Bandung (1884-1947) bernama Sekolah Istri yang kemudian berubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri.
- Gerakan Pendidikan Wanita Putri Mardika di Jakarta.
- Sekolah Kepandaian Putri yang didirikan oleh organisasi PIKAT yang dipimpin ***Maria Walanda Maramis*** di Minahasa. PIKAT (Percintaan ibu kepada anak temurunnya) adalah organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan kaum wanita, terutama di Sulawesi Utara.

Pada awalnya, gerakan-gerakan wanita lebih didominasi oleh golongan elite. Keadaan ini baru berubah sesudah tahun 1920. Pada saat itu, gerakan-gerakan wanita mulai merambah dan melibatkan golongan (lapisan) bawah.

Panggilan persatuan kebangsaan mendorong perhimpunan-perhimpunan wanita untuk mengadakan kongres persatuan wanita Indonesia yang pertama pada tanggal 22 - 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Tanggal 22 Desember itu diperingati oleh wanita Indonesia sebagai Hari Ibu. Sebagai perwujudan hasil kongres, dibentuklah Perikatan Perempuan Indonesia. Nama ini dalam kongres di Jakarta pada tahun 1929 diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Tujuan penggantian nama adalah supaya sifatnya sebagai federasi perkumpulan-perkumpulan wanita lebih tampak.

Pergerakan wanita yang bercorak politik berdiri pada tahun 1931 di Bandung, yaitu Isteri Sedar. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Salah satu pemimpinnya adalah **Suwarni Jayaseputra**.

Kemudian pada tahun 1932 berdiri pula Isteri Indonesia. Tujuan organisasi adalah mencapai Indonesia Raya. Pemimpinnya adalah **Maria Ulfah** dan **Ny. Sunaryo Mangunpuspito**.

D. Terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia

Tentunya kita bertanya-tanya, "Apa peran manifesto politik 1923, Kongres Pemuda 1928, dan Kongres Perempuan I dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia?"

Kita sudah mempelajari bahwa pada mulanya, organisasi Perhimpunan Indonesia adalah organisasi sosial. Akan tetapi, semenjak berakhirnya Perang Dunia I, perasaan anti kolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin-pemimpin *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) makin menonjol. Perasaan anti kolonialisme dan imperialisme semakin berkembang dengan adanya seruan **Presiden Woodrow Wilson** dari Amerika Serikat setelah Perang Dunia I. Kesadaran para pemimpin Perhimpunan Indonesia tentang hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri

dan merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat. Semenjak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia aktif berjuang bahkan memelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Jadi, dengan manifesto politik 1923 itu, Perhimpunan Indonesia menunjukkan identitas Indonesia sebagai suatu bangsa.

Kita juga sudah mempelajari bahwa Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan ikrar dari para pemuda. Ikrar itu terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1928 itu bertujuan untuk mempersatukan semua perkumpulan pemuda Indonesia dalam satu badan gabungan. Sumpah Pemuda berisi tiga sendi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Dalam kongres itu, juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Jadi, Kongres Pemuda 1928 itu menunjukkan identitas pergerakan pemuda yang ada di seluruh Nusantara sebagai satu pergerakan kebangsaan.

Kita sudah mempelajari bahwa pada tanggal 22 Desember 1928 kaum perempuan mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Perempuan-perempuan Indonesia ini telah mengikuti jejak pergerakan nasional. Kongres Perempuan I itu melahirkan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Hari itu dilihat sebagai hari lahirnya kesadaran yang mendalam perempuan Indonesia akan nasib, kewajiban, kedudukan, dan keanggotaannya dalam masyarakat. PPII menerbitkan majalah dengan nama *Istri* yang terbit sebagai majalah mingguan. Bahasa yang digunakan dalam majalah *Istri* adalah bahasa Indonesia. Majalah *Istri* melarang penggunaan bahasa Belanda dalam karangan-karangan yang akan dimuat. Ini suatu bukti bahwa majalah *Istri* melaksanakan salah satu keputusan Sumpah Pemuda. Jadi, bisa dikatakan bahwa Kongres Perempuan I berperan dalam membentuk identitas kebangsaan kaum wanita dengan menyatukan organisasi-organisasi wanita di seluruh Indonesia.

2.2.5 Penggunaan Istilah Indonesia sebagai Identitas Nasional

Sejalan dengan perkembangan Bahasa Indonesia, satu aspek yang penting ialah perjuangan pemakaian istilah "Indonesia" untuk menunjukkan identitas bangsa. Pernahkah kamu bertanya, "Kapan istilah Indonesia digunakan sebagai identitas nasional? Mari kita mencoba melacak penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional.

Sejak awal pergerakan nasional terasa keperluan memakai suatu kata untuk menunjukkan tujuan pokok pergerakan. Perkumpulan-perkumpulan yang bercorak kedaerahan pada mulanya tidak merasa perlu untuk mencari kata pemersatu itu. Akan tetapi ketika perkumpulan itu mengatasi batas-batas kedaerahan, maka muncul masalah untuk mencari nama organisasinya.

Perhimpunan Indonesialah yang mengemukakan kata "Indonesia" di dalam pengertian politik ketatanegaraan. Kita tahu bahwa Perhimpunan Indonesia pada waktu berdirinya bernama *Indische Vereeniging*. *Indische Vereeniging* adalah perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang berdiri tanggal 15 November 1908. Pada tahun 1922 berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging*. Kemudian, pada tahun 1924 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalahnya yang semula bernama *Hindia Poetra* berubah menjadi *Indonesia Merdeka*.

Peristiwa pergantian nama itu dan perjuangan untuk mengganti nama *Nederlandsch-Indie* menjadi Indonesia dicatat oleh **J.Th. Petrus Blumberger** (1931). Ia adalah penyusun pertama *Sejarah Pergerakan Nasional*. Ia mencatat bahwa sekitar tahun 1925 banyak organisasi yang berorientasi nasional memakai nama Indonesia. Organisasi-organisasi itu memakai nama Indonesia sebagai identitas bangsa. Sejak itu, kata Indonesia dipakai secara meluas untuk nama surat kabar, organisasi-organisasi, judul-judul karangan, dan sebagainya.

Natsir Datuk Pamuntjak, sebagai wakil PI di dalam kongres Liga Anti Penindasan dan Kolonialisme di Brussel (10-15 Februari 1927) berpidato dengan judul *"Indonesia en de Vrijheidstrijd"* (Indonesia dan Perjuangan Kemerdekaan). Ia menjelaskan nama Indonesia yang dipakai kepada peserta kongres sebagai berikut.

> "Indonesia adalah nama kepulauan Hindia, terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan banyak pulau kecil lainnya dengan jumlah penduduk sebanyak 50 juta."

Di dalam majalah Indonesia Merdeka terdapat artikel (tanpa nama pengarang) yang berjudul *Lets over de naam Indonesia* (Sedikit tentang nama Indonesia). Dalam artikel itu diuraikan asal-usul pemakaian kata Indonesia sejak dipakai **J.R. Logan** dalam arti geografis (1805), **A. Bastian** dalam arti etnologis, dan kemudian diusulkan dalam arti politik ketatanegaraan oleh kaum nasionalis. Dikatakan bahwa

> *"Indonesia sama artinya dengan Nederlandsch-Indie, sebagai pengertian ketatanegaraan bagai negara Indonesia yang akan datang. Indonesia tidak hanya berarti telah tercapainya tujuan, tetapi kesatuan, kekuasaan untuk mewujudkan diri sendiri."*

Kemudian atas prakarsa PPPI diadakan kongres II Pemuda Indonesia. Para pemuda Indonesia menyatakan kebulatan tekad mereka sebagai satu

kesatuan bangsa Indonesia dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Masa krisis pergerakan nasional tahun 1930 tidak mengurangi usaha-usaha pemakaian kata Indonesia dalam arti politik-ketatanegaraan. Di dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat), Fraksi Nasional di bawah pimpinan Moh. Husni Thamrin mengumumkan akan menggunakan bahwa Indonesia dalam sidang-sidang. Aksi Fraksi Nasional ini berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta pada tanggal 1 Juni 1938.

Dari usul penggunaan Bahasa Indonesia, anggota yang berasal dari Indonesia di dalam *Volksraad* meningkatkan aksinya berupa mengajukan mosi yang berkaitan dengan hal ketatanegaraan. Yang terkenal adalah mosi Wiwoho, mosi Sutardjo, dan mosi Thamrin. Intinya di dalam ketiga mosi itu tercantum perlunya perubahan ketatanegaraan dan adanya kewarganegaraan Hindia. Pada tahun 1940, Moh. Husni Thamrin mengusulkan agar kata *Nederlandsch Indie* dan *Inlander* dihapuskan dari semua undang-undang, peraturan-peraturan, dan diganti dengan *Indonesië*, *Indonesiër*, dan *Indonesisch*.

Baru setelah meletusnya Revolusi Agustus 1945, istilah Indonesia secara resmi mendapat arti politik kenegaraan, baik secara nasional maupun internasional.

RANGKUMAN

1. Perluasan kekuasaan kolonial dan perkembangan pendidikan memengaruhi muncul dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia.
2. Golongan terpelajar, kaum profesional, dan pers berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran nasional Indonesia.
3. Munculnya orang-orang terpelajar dan golongan profesional di Indonesia menumbuhkan kesadaran kaum cendekiawan muda akan keterbelakangan bangsanya. Mereka membentuk kekuatan sosial baru guna memperbaiki nasib bangsanya. Mereka tidak hanya menuntut kesejahteraan, tetapi juga kemerdekaan nasional. Gerakan mereka itu disebut pergerakan nasional.
4. Pers, entah itu berupa surat kabar atau majalah, mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi. Menyadari pentingnya peranan pers, para pendiri organisasi pergerakan nasional menerbitkan majalah atau surat kabar yang digunakan sebagai sarana menyebarluaskan semangat nasionalisme dan perjuangan bangsa, serta sikap persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Pelopor dan perintis pergerakan dari kalangan pelajar yang mempunyai wawasan nasional, antara lain: Boedi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), dan Gerakan Pemuda.
6. Ada tiga organisasi yang bersifat radikal, yaitu: Perhimpunan Indonesia (1908), PKI (1914), dan PNI (1927). Organisasi-organisasi ini bersikap tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.
7. Organisasi pergerakan nasional yang bersifat moderat, antara lain: Parindra (1935), Gerindo (1937), dan Gapi (1939). Mereka bersikap mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mencapai kemerdekaan.
8. Manifesto politik Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1928 dan Kongres Perempuan I menegaskan terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Kongres Sumpah Pemuda dibuat dan dipimpin oleh para Jong Java.
2. Dalam pergerakan, PNI dapat dikategorikan sebagai organisasi yang radikal.
3. Gerakan nasional adalah gerakan yang bersifat kedaerahan, dan belum mengenal konsep Indonesia.

II. Salin di buku tugasmu dan lengkapilah dengan jawaban yang tepat!

1. Sekolah yang mula-mula diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah ... dan ... .
2. Sejak awal abad ke-20, diperkenalkan sistem sekolah desa atau ... .
3. Pendiri perguruan Taman Siswa pada tahun 1920 adalah ... .
4. Tiga serangkai pendiri *Indische Partij* adalah ..., ..., dan ... .

5. Dua orang tokoh pendiri Boedi Oetomo adalah ... .
6. Pada waktu didirikan, Sarekat Islam (SI) semula bernama ... .
7. Kongres Pemuda I ini berhasil membentuk wadah bagi kaum muda yang disebut ... .
8. Kongres Perempuan I dilaksanakan pada ... di ... .
9. Pergerakan wanita bercorak politik yang berdiri pada tahun 1931 di Bandung, adalah ... .
10. Pada tahun 1922, *Indische Vereeniging* berganti nama menjadi ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana perluasan kekuasaan kolonial dan perkembangan pendidikan memengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia?
2. Sebutkan faktor intern maupun faktor ekstern yang mendukung lahirnya pergerakan nasional di Indonesia.
3. Apa tujuan didirikannya Boedi Oetomo?
4. Apa saja yang melatarbelakangi pendirian Sarekat Dagang Islam?
5. Berilah penjelasan mengenai *Indische Partij*!
6. Jelaskan mengenai manifesto politik Perhimpunan Indonesia!
7. Apa saja faktor penyebab krisis pergerakan nasional pada akhir tahun 1930-an?
8. Apa tujuan perjuangan Gapi yang digagas oleh Mohammad Husni Thamrin?
9. Apa peran manifesto politik PI, Kongres Pemuda 1928, dan Kongres Perempuan I dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia?"
10. Jelaskan bagaimana sejarahnya istilah "Indonesia" digunakan sebagai identitas nasional!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik cuplikan surat Kartini berikut ini.

"Malulah aku terhadap keangkaraanku. Aku renungi dan pikirkan keadaanku sendiri, dan di luar sana banyak derita dan kemelaratan yang melingkungi kami.

Seketika itu juga seakan udara menggetar oleh ratap tangis, erang, dan rintih orang-orang di sekelilingku. Dan lebih keras daripada erang dan rintih itu mendesing dan menderu di kupingku: Kerja! Kerja! Kerja! Perjuangkan kebebasanmu! Baru kemudian kalau kau telah bebaskan dirimu sendiri dengan kerja, dapatlah kau menolong yang lain! Kerja! Kerja! Aku dengar itu begitu jelas, tampak tertulis di depan mataku... "

*(Petikan surat Kartini pada Ny Abedanon (8 April 1902) .dalam "**Panggil Aku Kartini saja,** Pramoedya Ananta Toer: 1997)*

A. Menjawab Pertanyaan

1. Menurutmu apa yang tengah dibicarakan oleh Kartini?
2. Perasaan apakah menurutmu, yang tengah ia rasakan saat menuliskan surat tersebut?
3. Apakah menurutmu, yang kira-kira diinginkan Kartini dalam surat itu?
4. Salah satu perjuangan Kartini adalah perjuangan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki. Apakah menurutmu perjuangan Kartini sudah berhasil pada zaman ini? Jelaskan!

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Dalam melaksanakan politik etis, Belanda didasari pemikiran dari karangan 'Debt of Honour' yang ditulis oleh ... .
   a. Ratu Wilhelmina
   b. Daendels
   c. Theodore van Deventer
   d. Raffles
2. Penulis buku Max Havelaar adalah Moeltatoeli. Moeltatoeli adalah nama samaran dari ... .
   a. Baron van Hoevel
   b. Eduard Douwes Dekker
   c. Johannes van den Bosch
   d. Jenderal de Waal
3. Sistem yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang sangat laku di pasaran Eropa disebut sistem ... .
   a. *Cultuurstelsel*
   b. Politik Etis
   c. *Cultuurprocenten*
   d. Politik Paternalistik
4. Pada tahun 1534, Spanyol dan Portugis membuat perjanjian untuk membagi daerah operasi. Perjanjian itu disebut ... .
   a. Perjanjian Baabullah
   b. Perjanjian Tordesillas
   c. Perjanjian Suez
   d. Perjanjian Menina
5. Kerajaan Gowa-Tallo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan ... .
   a. Arupalaka
   b. Sultan Haji
   c. Sultan Hairun
   d. Sultan Hasanuddin
6. Benteng Fort de Kock dibangun Belanda di ... .
   a. Batusangkar
   b. Bukittinggi
   c. Padang
   d. Aceh
7. Sistem peperangan Belanda dalam menguasai Maluku adalah .. .
   a. perang gerilya
   b. perang puputan
   c. *devide et impera*
   d. sistem benteng
8. Pemimpin Perang Jagaraga adalah... .
   a. Gusti Ketut Jelantik
   b. Pangeran Natad
   c. I Gusti Ngurah Rai
   d. I Gusti Gede
9. Pada tahun 1825, Perang Paderi dihentikan secara sepihak oleh Belanda karena ... .
   a. Belanda kalah total
   b. Belanda tengah menyusun kekuatan
   c. Belanda berkonsentrasi pada perang di Makasar
   d. Belanda berkonentrasi pada Perang Diponegoro
10. Dalam menghadapi perlawanan kaum Paderi, Belanda menerapkan ... .
    a. sistem benteng
    b. perang gerilya
    c. perang terbuka
    d. perang puputan
11. Yang dimaksud dengan *Hak Tawan Karang* adalah ... .
    a. upacara adat di Bali sebelum melakukan pelayaran
    b. upacara adat di Bali sebelum berperang
    c. adat yang berlaku di Bali untuk menawan kapal asing yang kandas di perairannya
    d. hak untuk menangkap semua kapal asing yang mencuri ikan
12. Seorang ahli sejarah yang memberitahukan tentang adanya gereja Katoik di Sumatera Utara pada abad ke-7 adalah ... .
    a. Abuh Salih
    b. Abu Bakkar
    c. Kiyahi Berahim
    d. Pieterszoon Coen
13. Misionaris yang paling berjasa bagi persebaran agama Katolik di Flores dan Timor pada tahun 1550-1560 adalah ... .
    a. Pastor Antonia Taveira
    b. Pastor Simon Vaz
    c. Pater Amaro OSA
    d. Fransiskus Xaverius
14. Persebaran ajaran Protestan di Indonesia dilakukan oleh... .
    a. misionaris
    b. zending
    c. dakwah
    d. katekis
15. Akibat jatuhnya Malaka bagi proses persebaran agama Islam adalah ... .
    a. Malaka menjadi pusat agama Kristen
    b. para saudagar Islam mengalami kerugian besar
    c. pusat penyebaran agama Islam berpindah ke Aceh dan Jawa hingga Maluku
    d. Ternate jatuh ke tangan Portugis tahun 1522

16. Nasionalisme adalah salah satu paham yang mengutamakan ... .
    a. kepentingan golongan
    b. kepentingan pribadi
    c. kepentingan bangsa
    d. kepentingan suku
17. Organisasi yang didirikan oleh tiga serangkai adalah ... .
    a. Sarekat Islam
    b. Perhimpunan Indonesia
    c. Sarekat Dagang
    d. *Indische Partij*
18. Inspirasi berdirinya Boedi Oetomo datang dari ... .
    a. Dr Wahidin Sudiro Husodo
    b. RM. Suwardi
    c. Sutomo
    d. Haji Samanhudi
19. Partai Nasional Indonesia didirikan pada ... .
    a. 7 Mei 1827
    b. 4 Juli 1927
    c. 26 Oktober 1928
    d. 28 Oktober 1928
20. Kongres Pemuda Indonesia I diadakan di kota... .
    a. Jakarta
    b. Yogyakarta
    c. Bandung
    d. Surabaya
21. Tujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia tampak jelas pada... .
    a. Boedi Oetomo
    b. Muhammadiyah
    c. Trikoro Dharmo
    d. Sumpah Pemuda
22. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum pertama kali pada saat ... .
    a. Proklamasi 17 Agustus 1945
    b. Kongres Pemuda II tahun 1928
    c. Kongres Pemuda I tahun 1926
    d. Dekrit Presiden
23. Organisasi yang tumbuh pada masa moderat yaitu ... .
    a. PKI
    b. Parindra
    c. PI
    d. Sarekat Islam
24. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh para pelajar Indonesia yang berada di ... .
    a. Jerman
    b. Inggris
    c. Belanda
    d. Rusia
25. J.H Abendanon bersurat-suratan dengan perempuan Indonesia. Surat-surat itu lalu dikumpulkan menjadi buku yang terkenal dengan judul "Door Duisternis tot Licht". Perempuan yang dimaksud adalah ... .
    a. Raden Dewi Sartika
    b. R.A. Kartini
    c. Maria Ulfah
    d. Maria Walanda Maramis

II. Jawablah dengan singkat!

1. Sebutkan sisi negatif dan positif dari sistem tanam paksa!
2. Sebutkan dan jelaskan secara umum bentuk-bentuk penderitaan rakyat Indonesia masa kolonialisme!
3. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang dianjurkan Dr Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Acehers* kepada Belanda!
4. Jelaskan secara singkat sejarah agama-agama (Hindu, Islam dan Katolik) di Blambangan!
5. Berikanlah penjelasan tentang Dr. Nomenson
6. Sebelum tahun 1900, bangsa Indonesia telah berjuang sekuat tenaga untuk mengusir kolonial Belanda yang menjajah nusantara. Perjuangan tersebut tidak membawa hasil memuaskan. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri, mengapa perjuangan tersebut gagal!
7. Apakah Sumpah Pemuda itu?
8. Apa yang bisa kamu pelajari dari Sumpah Pemuda berkaitan dengan keadaan Indonesia saat ini? Jelaskan pendapatmu!
9. Jelaskan faktor eksternal yang mendukung lahirnya pergerakan nasional!
10. Apakah peran Kongres Perempuan I dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia!

Sumber: Kompas, 20 Mei 2006
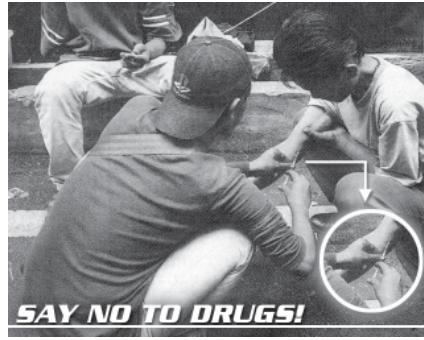
Sumber: www.bnn.org.id

Sumber: tempo 19 sept 04

Sumber: tempo 10-16 okt 05

PENDAHULUAN

Di dalam setiap masyarakat terdapat nilai dan norma. Nilai-nilai tersebut tidak berlaku universal, alias berbeda di tiap masyarakat di dunia. Anggota masyarakat yang tidak menaati suatu nilai dalam masyarakat bersangkutan disebut melakukan penyimpangan sosial. Penyimpangan ini dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya karena terjadi pelabelan, konflik maupun karena mengasosiasikan diri dengan sesuatu yang tidak benar.

Karena umumnya merusak, penyimpangan sosial harus dicegah. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mekanisme kontrol oleh diri sendiri misal menahan diri. Mekanisme kontrol juga dapat diberikan oleh masyarakat, misalkan dengan memberikan penyuluhan, atau pembelajaran di sekolah.

Masyarakat juga memberikan reaksi terhadap sikap yang menyimpang Sikap ini bisa positif, misalnya dengan bersimpati atau membantu orang untuk kembali menaati nilai-nilai yang dianut. Juga bisa dengan sifat negatif, dengan memberi sanksi sosial seperti mengucilkan si penyimpang dari masyarakat.

Peta Konsep

Penyimpangan Sosial

- Penyimpangan Sosial dan Penyakit Sosial
  - Pengertian penyimpangan sosial
  - Berbagai Teori penyimpangan sosial
  - Beberapa contoh perilaku menyimpang
- Upaya-upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial
  - Mekanisme kontrol sosial internal
  - Mekanisme kontrol sosial eksternal
  - Sikap terhadap pelaku penyimpangan sosial
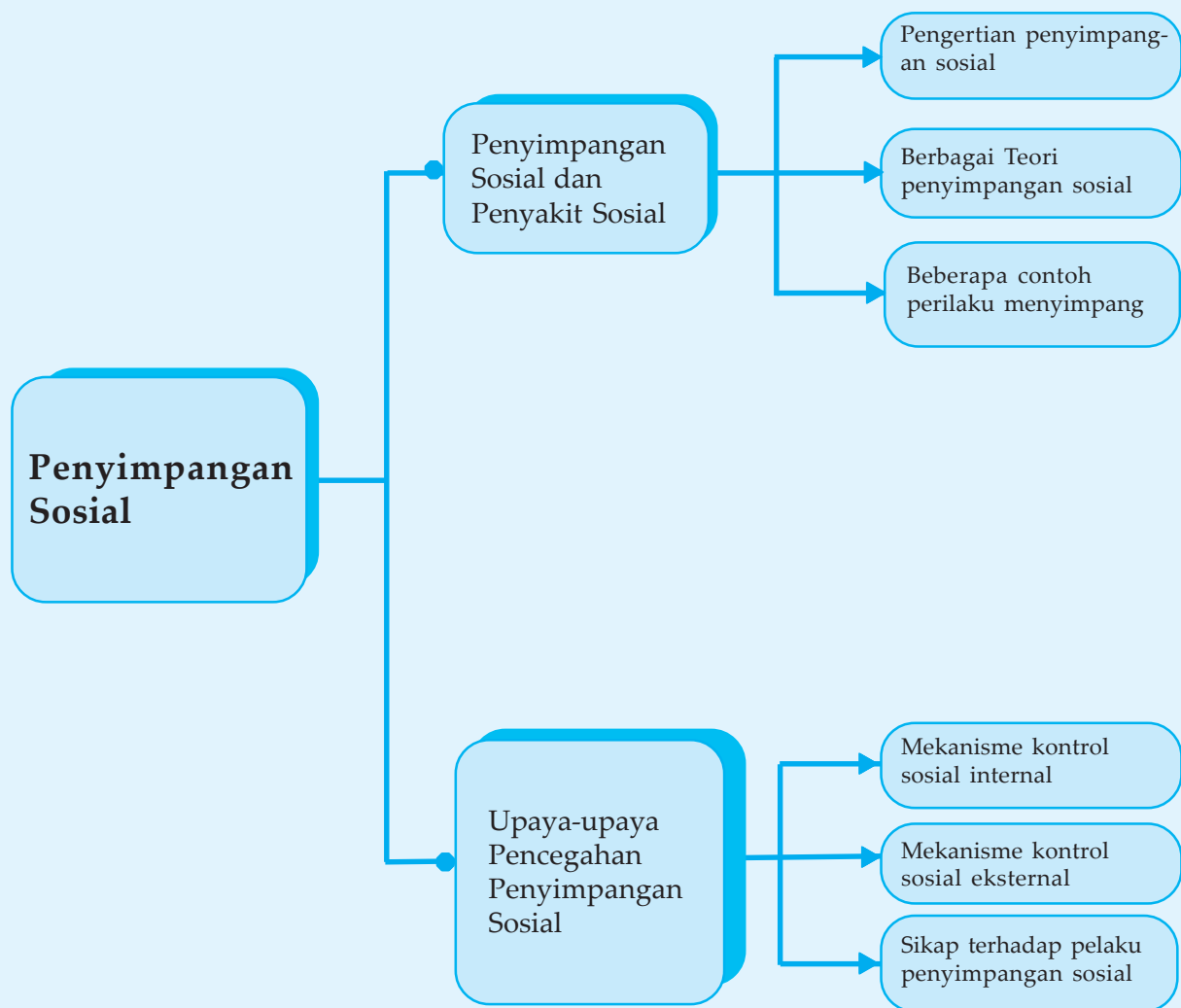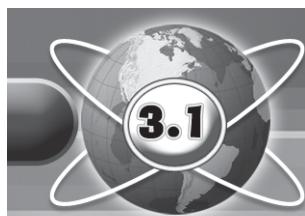
3.1 Penyimpangan Sosial dan Penyakit Sosial

Bila Setia Tak Lagi Cukup

Setyawati, bukan nama sebenarnya, adalah salah salah satu perempuan HIV positif di Jakarta. Ia mendapatkan virus itu dari suaminya.

Perempuan berjilbab ini hanya tahu bahwa mendiang suaminya (meninggal setahun silam) adalah lelaki baik budi. Setyawati tidak pernah tahu bahwa almarhum suaminya sering berpesta putaw dengan jarum suntik secara bergantian. Tidak mustahil pula mendiang suaminya berhubungan seks dengan teman-temannya sesama pecandu.

Selepas kematian suaminya, dokter menganjurkan Setyawati untuk menjalani tes. Mimpi buruk pun datang, ia mengidap HIV/AIDS.

Kini Setyawati didampingi oleh Baby Jim Aditya, 42 tahun, seorang aktivis pencegahan HIV/AIDS yang tinggal di Jakarta. Bertahun-tahun Baby menyaksikan perempuan-perempuan yang dilanda frustrasi dahsyat.

Seperti Setyawati, perempuan-perempuan itu pun putus asa begitu mengetahui mereka terinfeksi HIV justru dari orang yang begitu mereka cintai, yakni suami sendiri. "Tentu mereka kaget setengah mati, tidak menyangka akan tertular HIV. *Wong* mereka itu ibu rumah tangga baik-baik dan sama sekali tidak berperilaku berisiko tinggi," kata Baby. Para perempuan itu tidak tahu bahwa di luar pagar rumah, suami mereka adalah pelanggan PSK atau juga pecandu narkoba dengan jarum suntik.

Kini pun Setyawati hanya bisa menggugat nasibnya, "Apa salah saya? Bukankah saya istri yang berbakti?"

(**Sumber:** *Tempo*, 12 Desember 2004)

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Siapakah tokoh yang diceritakan Baby dalam kisah ini?
2. Apa yang dialami Setyawati?
3. Darimana Setyawati tertular HIV/AIDS?
4. Bagaimana suami Setyawati?
5. Adakah perilaku menyimpang dalam kisah ini?
6. Siapa yang mengalami perilaku menyimpang dalam kisah ini?
7. Perilaku menyimpang seperti apa yang disebutkan di dalam kisah ini?

Sering kali media massa memberitakan tentang berbagai macam peristiwa yang oleh masyarakat dianggap sebagai aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau "menyimpang". Misalnya, pemerkosaan, penodongan, perampokan, pelacuran, pelecehan seksual, perzinahan, korupsi, suap-menyuap, kolusi, perkelahian pelajar, homoseksual, lesbian, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar norma dan nilai yang dianut.

Sebenarnya, setiap individu, disadari atau tidak, pernah melakukan tindakan menyimpang. Ada yang melakukan peyimpangan dalam skala besar, ada juga yang melakukan penyimpangan dalam skala kecil. Ada orang yang melakukan penyimpangan secara terbuka, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Dalam batas tertentu pelaku penyimpangan adalah orang yang melakukan kegiatan (menyimpang) secara terbuka sementara orang lain melakukannya secara tersembunyi.

Dalam bab ini kita akan membahas tentang pengertian penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, bagaimana perilaku menyimpang terbentuk, dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Tema besar yang akan kita pelajari adalah tentang "Penyimpangan Sosial". Pada **subbab 3.1** ini kita akan membahas pengertian penyimpangan sosial, penyebab penyimpangan sosial, dan bermacam-macam penyakit sosial sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

3.1.1 Pengertian Penyimpangan Sosial

Kisah di atas dapat menjadi ilustrasi yang baik untuk memahami materi ini. Jika masing-masing pihak yang terdapat dalam kisah di atas menaati seluruh nilai dan norma yang ada (termasuk norma kesetiaan), maka akan tercipta keadaan sosial yang harmonis dan damai. Dalam kisah di atas, kita melihat bahwa suami Setyawati tidak mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Suami Setyawati ternyata menyeleweng. Ia juga pecandu narkoba (putaw). Dengan kata lain, perilaku suami Setyawati menyimpang dari nilai dan norma yang dianut masyarakat pada umumnya. Tindakan tersebut memicu terjadinya ketidakharmonisan dan kekacauan sosial.

Kalau diperhatikan, di sini ada dua gagasan yang dikemukakan. **Yang pertama** adalah keadaan

Sumber:*Majalah Tempo*, 10 - 16 Okt 2005

Gambar 3.1.1

Menyeberang jalan di tempat penyeberangan jalan adalah salah satu perilaku yang mengikuti norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

harmonis, aman, dan damai. Dalam keadaan seperti ini seluruh warga masyarakat menerima dan menaati nilai dan norma yang berlaku. Di sini sebetulnya kita sedang mendeskripsikan keadaan di mana warga masyarakat menyesuaikan (*conform*) diri mereka dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Warga masyarakat yang menyesuaikan dirinya dan menerima nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat dia hidup disebut sebagai orang yang memiliki konformitas terhadap nilai dan norma.

Dalam kisah di atas, Setyawati mewakili kelompok masyarakat yang dapat hidup sesuai dengan nilai dan norma masyarakat pada umumnya. Ia setia, tidak menyeleweng. Ia isteri yang berbakti. Di sini Setyawati dan masyarakat lainnya selalu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku. Artinya, mereka selalu mentaati nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Karena itu, konformitas dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma yang sedang berlaku dalam masyarakat.

Yang kedua, dalam kehidupan sosial tidak semua orang menjadi "anak yang baik" dalam seluruh hidupnya. Hampir mustahil mengharapkan semua orang untuk menjadi orang yang taat hukum *(observant of the law)* tanpa ada cela atau pelanggaran sedikit pun. Manusia bukan malaikat. Jadi, selalu saja ada kesempatan dan kemungkinan melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau mereka yang *mematuhi* nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat disebut sebagai orang yang memiliki konformitas terhadap nilai dan norma, maka mereka yang *melanggar* nilai dan norma dalam masyarakat kita sebut sebagai orang yang memiliki perilaku menyimpang *(deviant)* terhadap nilai dan norma sosial.

Dalam kisah di atas, orang yang memiliki perilaku menyimpang adalah suami Setyawati. Ia sudah melanggar nilai kesetiaan dalam berumah

Sumber:*Majalah Tempo*, 19 Sept 2004

Gambar 3.1.2

Berboncengan sepeda motor lima orang adalah salah satu contoh perilaku orang yang mengabaikan nilai-nilai keselamatan dan aturan berlalu lintas.

tangga. Ia menjadi pecandu narkoba dan mungkin juga berganti-ganti pasangan.

Dari pengertian sederhana ini, coba kamu lakukan aktivitas pengamatan sederhana. Di sekolahmu pasti ada peraturan. Coba sebutkan satu contoh peraturan sekolahmu! Bagaimana peraturan sekolahmu mengatur jam masuk dan jam pulang sekolah? Berpatokan pada jam masuk sekolah, coba besok pagi kamu perhatikan siapa saja yang masuk sekolah tidak tepat waktu. Catat nama teman kamu itu. Perhatikan terus sampai beberapa hari. Berapa orang yang melanggar peraturan sekolah lebih dari satu kali? Apa sanksi atau hukuman yang diberikan sekolah kepada mereka? Apakah tindakan mereka itu dapat dibenarkan? Apa kerugian yang ditimbulkan jika ada teman kamu yang melanggar peraturan sekolah?

Ini memang belum bisa dikategorikan sebagai contoh penyimpangan sosial. Tetapi contoh ini bisa menjadi gambaran bagaimana orang yang tidak menyesuaikan diri dan tidak taat pada peraturan akan merugikan banyak pihak, termasuk kamu. Tolong diingat, bahwa kalau kita tidak taat pada hal-hal yang kecil, maka kita akan tidak taat juga pada hal-hal yang besar. Karena itu, mulailah sekarang belajar untuk mentaati peraturan yang ada, baik di rumah, di sekolah, atau pun di masyarakat. Ketidaktaatan pada peraturan yang terus bertambah perlahan-lahan akan membuat orang memiliki perilaku yang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat. Saat itulah orang tersebut berperilaku menyimpang.

Dengan demikian, kamu sekarang sudah mengenal dua konsep penting dalam perilaku sosial sebagai warga masyarakat, yakni perilaku konformitas dan perilaku menyimpang. Kedua perilaku ini menampakkan diri dalam interaksi sosial atau dalam hubungan atau interaksi dengan orang lain.

Inilah sebabnya *konformitas* kemudian didefinisikan sebagai *"bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau harapan masyarakat pada umumnya."* Sementara itu, perilaku menyimpang (disebut juga penyimpangan sosial) didefinisikan sebagai *"perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi."*

Dari definisi itu, apakah kamu sudah cukup mengerti? Kembali ke contoh kasus Setyawati dan suaminya di atas. Sebagai anggota masyarakat, Setyawati dan suaminya diharapkan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Ketika suami Setyawati berperilaku menyimpang, tindakannya itu sendiri (mengkonsumsi narkoba dan seks bebas) adalah bentuk konkret dari sebuah interaksi sosial. Melalui interaksi sosial itulah perilaku suami Setyawati dinilai. Dan penilaian masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang ada. Berpatokan pada nilai dan norma yang ada itulah suami Setyawati dinilai sebagai melanggar nilai dan norma. Karena sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka perilaku suami Setyawati itu dikategorikan sebagai perilaku menyimpang.

Coba sekali lagi kamu lakukan pengamatan sederhana. Perhatikan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalmu atau di sekitar lingkungan sekolah kamu. Atau, kamu juga bisa menyimaknya melalui media televisi, koran, majalah, internet, dan sebagainya. Coba menyebut satu contoh penyimpangan sosial berdasarkan definisi yang sudah diuraiakan di atas! Informasi yang kamu dapatkan itu coba kamu bagikan dan diskusikan dengan teman-temanmu. Perhatikan juga contoh kasus yang teman-temanmu sampaikan. Apakah ada kesamaan dalam "penemuan" kamu dan teman-temanmu? Apa yang bisa kalian simpulkan setelah memelajari berbagai kasus penyimpangan sosial tersebut? Mintalah gurumu untuk ikut menanggapi hal ini!

3.1.2 Berbagai Teori Penyimpangan Sosial

Mengapa dan bagaimana perilaku menyimpang terjadi? Dalam sosiologi dikenal beberapa teori yang mencoba menjelaskan terjadinya penyimpangan. Beberapa di antaranya adalah teori asosiasi yang salah, teori pelabelan, teori anomie, dan teori konflik. Teori-teori ini dapat dijelaskan secara sederhana berikut ini.

A. Teori asosiasi yang salah

Asosiasi secara sederhana diartikan sebagai *tautan dalam pikiran pada orang atau suatu barang atau benda tertentu*. Ini berhubungan dengan kerja panca indra manusia. Misalnya, kamu melihat seorang pelanggar lalu lintas yang ditangkap polisi. Polisi tidak menghukum orang itu karena dia membayar sejumlah uang. Panca indramu merekam hal ini dalam ingatan kamu. Di sinilah pikiran kamu ditautkan atau dihubungkan atau dilekatkan pada kejadian itu. Setiap kali ada kejadian yang berhubungan dengan pelanggaran lalulintas, ingatan kamu dibawa kembali ke kejadian yang pernah kamu lihat tersebut (***Perhatikan gambar 3.1.3***)!
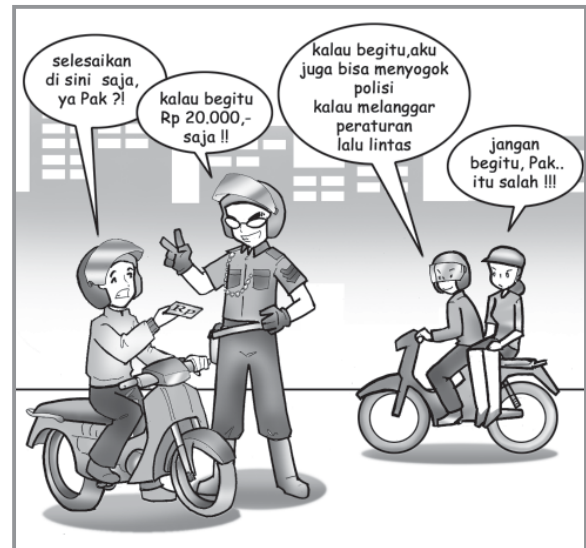
Gambar 3.1.3
Menyogok polisi ketika ditilang. Mengasosiasikan perilaku dengan perilaku yang salah dari orang lain termasuk penyimpangan sosial. Perilaku semacam ini sebaiknya dihindari karena melanggar nilai dan norma masyarakat.

Berkaitan dengan teori asosiasi yang salah dapat diuraikan seperti berikut ini. Misalnya suatu saat kamu melanggar lalu lintas, polisi menangkapmu dan kamu pun dibebaskan karena menyogok polisi dengan sejumlah uang. Di sini secara tidak sadar kamu telah mengasosiasikan perilakumu dengan perilaku orang yang kamu lihat dulu. Di sini sebenarnya kamu tahu bahwa para pelanggar aturan, termasuk aturan lalu lintas harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam waktu yang sama kamu juga mencoba tidak menaati peraturan tersebut karena mengetahui bahwa orang lain juga tidak taat. Inilah yang disebut sebagai teori asosiasi yang salah.

Seharusnya setiap warga masyarakat bersikap taat dan konsisten dalam mempraktikkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, hal yang ideal ini tidak dapat terwujud seratus persen dalam kehidupan sehari-hari. Ada saja orang yang dengan sadar melanggar nilai dan norma dan alasannya karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Kalau kamu perhatikan keadaan sekeliling kamu, sering kali terjadi bahwa kamu ditertawakan teman-temanmu ketika kamu berpe-

rilaku baik. Mungkin ada orang yang mengatakan kamu sok suci. Sikap teman-temanmu ini berbahaya. Manusia memang tidak pernah bisa bebas seratus persen dari kesalahan. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Yang penting adalah bahwa kesa-lahan yang dilakukan harus diikuti oleh kesediaan menerima sanksi sesuai dengan besar kecilnya kesalahan tersebut. Sikap yang salah adalah membenarkan tindakan atau perilaku sosial yang salah dengan alasan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama.

Banyak sekali contoh bisa kamu kemukakan di sini. Bagaimana dengan teman-temanmu yang malas belajar, yang menyontek di waktu ujian, yang menggunakan dan atau mengedarkan narkoba, yang suka berbuat asusila, dan sebagainya? Apakah kamu mau mengasosiasikan dirimu dengan perilaku-perilaku teman-teman yang melanggar nilai dan norma itu sebagai alat untuk membenarkan perilakumu sendiri? Atau kamu sebaliknya mengasosiasikan dirimu dengan perilaku atau perbuatan teman-teman yang sesuai atau sejalan dengan nilai norma yang ada? Orang bijak mengatakan bahwa kualitas dirimu antara lain ditentukan oleh dengan siapa kamu bersahabat. Selalu ada manfaatnya jika kamu pandai dan bijaksana dalam menentukan sahabat-sahabatmu.

B. Teori pelabelan

Teori ini diperkenalkan oleh **Edwin M. Lemert**. Menurut Lemert, seseorang berperilaku menyimpang karena proses *labelling*. Yang dimaksud dengan pelabelan *(labelling)* adalah tindakan memberi julukan, cap yang dilakukan masyarakat kepada seseorang.

Misalnya, kamu memberi label atau cap kepada seorang teman yang suka membantu kamu sebagai "teman yang baik". Kamu memberi label kepada adik kamu yang rajin dan patuh pada orang tua sebagai "adik yang rajin". Ini semua adalah label yang baik.

Ada juga label yang buruk. Kamu memberi cap atau label kepada gurumu yang suka marah dan disiplin sebagai "guru *killer*". Kamu juga memberi label "pembangkang" kepada temanmu yang nakal dan sering melanggar peraturan sekolah. Atau orang lain memberi label "pembohong" kepada kamu. Yang jelas, ada banyak sekali label atau cap yang kita terima atau yang kita berikan kepada orang lain. Ada label yang baik dan ada label yang jelek.

Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Apakah sebaiknya kamu tidak memberi cap atau label kepada orang yang memiliki perilaku sosial yang menyimpang? Sekali lagi, pelabelan adalah hal yang biasa dalam masyarakat. Yang harus dilakukan bukan menghentikan pelabelan, tetapi meningkatkan proses sosialisasi nilai dan norma yang ada dan meyakinkan orang bahwa menaati nilai dan norma yang ada akan membawa keuntungan dan kebahagiaan hidup. Selain itu, perlu juga membatasi peluang atau kesempatan bagi orang untuk mengasosiasikan perilaku-perilaku sosialnya dengan perilaku-perilaku sosial yang bertentangan dengan nilai norma yang ada. Caranya adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin kelompok sosial yang memiliki tingkat konformitas yang tinggi pada nilai dan norma.

Sumber: Majalah Tempo, 2002

Gambar 3.1.4
Waria adalah pria yang berperilaku sebagai wanita. Perilaku mereka dapat disebabkan pelabelan yang mereka terima pada waktu mereka masih kecil.

Perhatikan bahwa ada label yang sifatnya positif dan ada label yang sifatnya negatif. Ingat bahwa pelabelan ternyata memengaruhi perkembangan psikologis dan kepatuhan orang pada nilai dan norma yang ada. Pelabelan positif kepada seseorang akan memperteguh keyakinan orang itu bahwa perilaku sosialnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Peneguhan ini akan meningkatkan keyakinan dirinya untuk terus patuh pada nilai dan norma tersebut. Sebaliknya, pelabelan negatif dapat memiliki dampak negatif. Artinya, pelabelan negatif dapat semakin menjauhkan orang dari sikap patuh dan taat pada nilai dan norma masyarakat.

C. Teori anomie

Anomie adalah istilah sosiologi untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sosial di mana nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut saling bertentangan satu sama lain. Karena pertentangan antara nilai-nilai tersebut menyebabkan nilai-nilai tersebut menjadi lemah atau bahkan menghilang.

Dari pengertian semacam ini kamu dapat membayangkan seperti apa keadaan suatu masyarakat jika tidak ada nilai dan norma. Absen atau tidak adanya nilai dan norma dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan permusuhan di dalam masyarakat itu sendiri. Keadaan perang dapat menjadi contoh yang jelas mengenai keadaan di mana nilai dan norma saling bertentangan.

Teori anomie berpendapat bahwa orang berperilaku menyimpang karena keadaan atau kondisi sosial yang menyebabkannya. Teori ini percaya bahwa dalam kondisi masyarakat yang kacau (anomie) anggota masyarakat pasti berperilaku menyimpang.

Misalnya, masyarakat kita menetapkan "kekayaan dan popularitas" sebagai nilai yang harus dikejar dan diwujudkan oleh setiap anggotanya. Ini adalah *tujuan* yang mau dicapai oleh masyarakat tersebut. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan berbagai macam *sarana*, antara lain rajin menuntut ilmu, mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian, bekerja keras, hidup sederhana, rajin menabung, dan sebagainya.

Pasti ada banyak orang yang dapat mencapai tujuan itu dengan bekerja keras dan hidup sederhana. Meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat mampu mencapai tujuan tersebut dengan cara seperti itu. Pasti ada yang mencapai tujuan tersebut dengan sarana-sarana yang berbeda. Bisa jadi cara untuk menjadi kaya dan terkenal bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada pula yang sama sekali tidak mencapai tujuan tersebut meskipun dia sudah bekerja keras dan berhemat.

Itulah kehidupan sosial manusia. Ada orang yang kaya dan sukses hidupnya dengan memanfaatkan sarana-sarana yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Ada juga orang yang berusaha mencapai mencapai kemakmuran secara materi dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Misalnya tindakan-tindakan korupsi, pencurian, pencucian uang, dan sebagainya. Tindakan-tindakan ini tidak harus melalui pendidikan yang tinggi atau kerja yang rajin.

Selain itu, ada juga orang yang setuju dengan cita-cita masyarakat tersebut dan memanfaatkan sarana-sarana yang ada, tetapi dia tidak berhasil mewujudkan cita-cita tersebut. Misalnya orang tersebut sudah mencapai pendidikan tinggi, bekerja sesuai dengan keahliannya, dan bekerja rajin tetapi tidak mencapai kemakmuran secara finansial karena uang penghasilannya dipakai untuk berfoya-foya.

Dapat dipastikan bahwa perilaku konformitas tidak menimbulkan masalah yang cukup berarti. Masalah sosial muncul ketika ada orang yang kaya dan sukses hidupnya tetapi dengan memanfaatkan cara-cara yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial ini akan merusak tatanan nilai dan norma yang sudah ada jika tidak diberi sanksi sosial. Masyarakat akan mengalami kebingungan dan akan terjadi konflik atau pertentangan nilai dan norma. Untuk menghindari semakin banyak orang mengikuti perilaku sosial yang salah lebih baik menghentikan perilaku-perilaku yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai dan norma sosial.

D. Teori konflik

Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya konflik antarkelas dalam suatu masyarakat. Mereka yang menganut teori ini berpendapat bahwa masyarakat tersusun berdasarkan kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial itu memiliki kepentingan yang berbeda. Kelas pemilik modal atau mereka yang kaya secara finansial memengaruhi pemerintah sedemikian rupa sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah sejalan dengan kepentingan mereka. Sementara masyarakat kelas bawah seperti orang miskin dan para buruh adalah kelompok sosial yang selalu diabaikan kepentingannya.

Teori ini juga berpendapat bahwa kalaupun ada dua orang yang melakukan tindakan sosial yang menyimpang, misalnya mencuri uang, biasanya yang berasal dari kelas kaya akan dihukum lebih ringan dibandingkan dengan yang berasal dari kelas orang miskin dan para buruh. Dalam konteks ini kita mengerti dengan baik mengapa sering kali orang mengemukakan kritik dengan mengatakan bahwa "maling sandal jepit dijebloskan ke dalam penjara, sementara maling uang negara dibiarkan berkeliaran ke mana-mana."

Memang masyarakat kita tidak tersusun berdasarkan kelas-kelas sebagaimana dipahami teori ini. Namun demikian, perumusan peraturan atau undang-undang tertentu yang tidak mengakomodasi kepentingan kaum miskin akan sangat potensial memicu perilaku menyimpang di kalangan masyarakat miskin dan marginal itu sendiri. Karena itu, norma-norma yang dipilih untuk dijadikan aturan atau undang-undang negara juga harus merupakan norma-norma yang kurang lebih diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Kisah demonstrasi yang dilakukan para buruh dapat dijelaskan dari sudut pandang teori konflik ini. Pemilik modal sering kali diuntungkan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang membuat mereka bertindak sewenang-wenang dan merugi-

Sumber: Harian Kompas, 4 Agustus 2007

Gambar 3.1.5
Demo para buruh sepatu di Jakarta. Demonstrasi para buruh dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan, dan dibiarkan terjadi oleh pemerintah.

kan kepentingan para buruh. Dalam konteks ini, demonstrasi para buruh dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan baik oleh pemilik perusahaan maupun oleh para pembuat undang-undang. Tindakan represif pihak keamanan dapat ditafsirkan sebagai bentuk konkret dari dukungan aparat keamanan atas ketidakadilan tersebut.

Kamu telah mempelajari macam-macam teori yang mencoba menjelaskan fakta penyimpangan sosial. Yang utama adalah kenyataan bahwa selalu terdapat orang atau kelompok sosial yang tidak mematuhi nilai dan norma yang sudah ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat.

3.1.3 Beberapa Contoh Perilaku Menyimpang

Di tengah masyarakat ada banyak perilaku menyimpang yang dapat kita jumpai. Berikut ini akan kita bahas beberapa bentuk perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat. Contoh-contoh perilaku menyimpang ini masih bisa ditambah. Bisakah kamu menyebutkan contoh perilaku-perilaku menyimpang? Contoh penyimpangan sosial tersebut misalnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, tawuran pelajar, perilaku seksual di luar nikah, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya, serta pornografi.

A. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

Narkotika memang bisa digunakan dalam dunia kedokteran untuk membantu proses pengobatan. Ketika narkotika dipakai di luar konteks ini disebut sebagai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini biasa disebut dengan narkoba yang diartikan sebagai narkotika dan obat-obat terlarang.

Mengapa orang yang menyalahgunakan narkotika disebut sebagai berperilaku menyimpang? Karena perilaku ini melanggar norma-norma masyarakat dan menyebabkan kerusakan dalam masyarakat itu sendiri. Para pengguna narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sering kali juga terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, kenakalan remaja, bahkan pembunuhan. Mereka yang memakai narkoba biasanya kehilangan kesadaran dan akal sehat yang membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang barangkali mereka juga tidak ingin lakukan.

Bahan-bahan yang tergolong narkotika antara lain sebagai berikut.

- Opium mentah, yakni getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari buah tanaman *papaver sumnuferum 1*.
- Opium masak, terdiri dari candu, *jicing*, dan *jicingko*. Candu adalah hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu proses pengolahan. Jicing adalah sisa-sisa candu setelah diisap. Jicingko adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

Sumber: www.Hermansaksono.com

Gambar 3.1.6
Dua anak tengah menghirup lem aibon, agar mabuk. Mengonsumsi narkoba adalah suatu perilaku menyimpang.

- Tanaman koka, termasuk buah dan bijinya.
- Daun koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk.
- Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari pengolahan daun koka.
- Kokain, hasil pengolahan kokain mentah.
- Heroin.
- Morfin.

B. Tawuran pelajar

Tawuran pelajar sering kali terjadi di kota-kota besar. Tawuran pelajar biasanya terjadi antara satu sekolah melawan sekolah lainnya. Musuh yang dihadapi pun biasanya merupakan musuh lama. Akibat yang ditimbulkannya sangat besar karena tawuran pelajar melibatkan banyak sekali siswa. Sering terjadi bahwa ada siswa yang sampai tewas, cacat, dan luka.

Sering kali kalau ditanya mengapa seseorang mau terlibat dalam tawuran pelajar, jawabannya adalah diajak teman atau sekadar solider dengan teman, atau mau membuktikan bahwa sekolahnya lebih unggul, dan sebagainya. Menurut kamu, apakah semua alasan ini dapat diterima dan dibenarkan? Semua alasan ini semu atau dibuat-buat. Kalau ada masalah hubungan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, itu bukan urusan siswa untuk menyelesaikannya. Kepala sekolah dari kedua belah pihak yang akan menyelesaikannya. Energi siswa dapat disalurkan ke hal-hal lainnya yang lebih membangun dan positif.

Sumber: *Dokumen Penerbit, 2006.*

Gambar 3.1.7
Tawuran pelajar yang sering terjadi di masyarakat menjadi salah satu contoh perilaku menyimpang.

C. Perilaku seksual di luar nikah

Hubungan seksual dibenarkan oleh norma agama dan masyarakat sejauh orang yang melakukan itu adalah suami istri. Hubungan seks di luar konteks itu dianggap sebagai perilaku menyimpang.

Tidak bisa dipungkiri, anak-anak remaja sekarang banyak yang sudah terjerumus dalam perilaku menyimpang ini. Kamu barangkali mengenal teman-temanmu yang sudah terjerumus ke dalam perilaku menyimpang ini. Nah, menurut pendapatmu mengapa anak-anak remaja dan masyarakat pada umumnya bisa jatuh ke dalam perilaku menyimpang seperti ini? Ada banyak sekali faktor penyebabnya. Orang bisa berperilaku menyimpang dengan melakukan hubungan seks di luar nikah karena pengaruh film, buku, dan majalah porno, atau pengaruh teman.

Bagaimana kamu menyikapi hal ini? Di sini tampak jelas bahwa memilih teman bukanlah sebuah perkara mudah. Selain itu, nilai-nilai dan norma yang sudah ditanamkan sejak dini di keluarga harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Sebaiknya kita tidak mengorbankan nilai dan norma ini kepada godaan untuk menonton film porno atau membaca buku dan majalah-majalah porno.

Hubungan seks di luar nikah dalam masyarakat dewasa ini dapat dilihat dalam praktik pelacuran, homoseksualitas, lesbianisme, kumpul kebo dan pelecehan seksual. Praktik pelacuran dengan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat mana pun. Homoseksualitas adalah praktik hubungan seksualitas antara sesama jenis. Kalau sesama jenis itu adalah laki-laki, maka disebut sebagai homoseks. Kalau sesama jenis itu perempuan disebut sebagai lesbian. Yang dimaksud dengan kumpul kebo adalah hidup bersama dan melakukan hubungan seks layaknya sebagai suami istri, tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang sah entah atas nama agama atau negara (sipil). Sementara pelecehan seks dimengerti sebagai perilaku tidak senonoh terhadap lawan jenis, misalnya mencolek atau mencubit pantat lawan jenis, dan sebagainya.

D. Pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya

Kamu tentu sering atau pernah membaca berita mengenai pembunuhan dan tindak-tindak kekerasan lainnya. Sering terjadi bahwa tindakan kekerasan dan pembunuhan ini dilakukan oleh para remaja seusia kamu. Mengapa orang mau melakukan tindakan pembunuhan dan tindakan-tindakan kriminal lainnya seperti penganiayaan, pencurian, penodongan, dan sebagainya?

Harus ditegaskan bahwa tindakan pembunuhan dilakukan dalam emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Karena itu, akibat yang ditimbulkan pun sangat mengerikan. Orang terpaksa kehilangan nyawa karena ketidakmampuan orang lain dalam mengendalikan emosi dan kemarahannya. Ini adalah kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Merencanakan pembunuhan terhadap

orang lain melalui teror dan bom bunuh diri karena orang lain berbeda pandangan agama atau ideologi termasuk pembunuhan yang tidak berperikemanusiaan. Ini adalah perilaku menyimpang.

E. Pornografi

Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis untuk membangkitkan hawa nafsu. Penggambaran tingkah laku secara erotis ini dapat melalui lukisan, tulisan, atau tayangan film. Pornografi mendorong seseorang berperilaku menyimpang, misalnya melakukan masturbasi. Pornografi juga mendorong orang untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan.

Media massa yang bebas membuat pornografi menjadi bahaya yang serius dihadapi. Hanya orang yang memiliki nilai-nilai dan norma yang sudah diinternalisasi yang bisa mempertahankan diri untuk tidak jatuh ke dalam godaan tersebut.

Coba sekarang kamu lakukan kegiatan penelitian sederhana. Kamu sudah memelajari dan memahami lima contoh perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat. Coba mengecek, membaca, atau menonton berita dari media massa mengenai perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Masih-masing kamu harus mengecek di dua media massa berbeda selama satu minggu berturut-turut. Setelah itu, buatlah laporan sederhana yang isinya adalah (1) perilaku menyimpang apa saja yang diberitakan media massa? (2) perilaku menyimpang mana yang paling sering kamu jumpai? (3) Berapa kali perilaku menyimpang itu muncul atau diberitakan oleh media massa? (4) Menurut pemberitaan media massa tersebut, apa yang menjadi sebab terjadinya perilaku menyimpang? (5) Menurut kamu, jalan keluar atau langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah ini?

RANGKUMAN

1. Ada dua konsep penting dalam perilaku sosial, yaitu:
   a. Perilaku konformitas
   b. Perilaku menyimpang
2. *Perilaku konformitas* adalah bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau harapan masyarakat pada umumnya.
3. *Perilaku menyimpang* adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.
4. Perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang dianut masyarakat pada umumnya dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dan kekacauan sosial.
5. Dalam kehidupan sosial tidak semua orang menjadi "anak yang baik" dalam seluruh hidupnya. Hampir mustahil mengharapkan semua orang untuk menjadi pentaat hukum *(observant of the law)* tanpa ada cela pelanggaran sedikit pun. Manusia bukan malaikat. Jadi, selalu saja ada kesempatan dan kemungkinan melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
6. Ada bermacam-macam teori yang menjelaskan penyimpangan sosial, antara lain:
   a. Teori asosiasi yang salah
   b. Teori pelabelan *(labelling)*
   c. Teori anomie
   d. Teori konflik
7. Teori asosiasi yang salah menyatakan bahwa penyimpangan sosial terjadi karena orang menganggap benar tindakan atau perilaku sosial yang salah dengan alasan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama.
8. Teori pelabelan diperkenalkan oleh Edwin M. Lemert. Menurut Lemert, seseorang berperilaku menyimpang karena proses labelling. Yang dimaksud dengan pelabelan *(labelling)* adalah tindakan memberi julukan, cap yang dilakukan masyarakat kepada seseorang.
9. Teori anomie berpendapat bahwa orang berperilaku menyimpang karena nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat saling bertentangan satu sama lain. Teori ini percaya bahwa dalam kondisi masyarakat yang kacau *(anomie)* anggota masyarakat pasti berperilaku menyimpang.
10. Teori konflik berpendapat bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya konflik antarkelas dalam suatu masyarakat.
11. Contoh perilaku menyimpang dalam masyarakat misalnya:
    - penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,
    - tawuran pelajar,
    - perilaku seksual di luar nikah,
    - pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya,
    - pornografi.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Teori anomie menyatakan bahwa penyimpangan sosial dapat terjadi jika kita dapat me-nautkan diri dengan tindakan orang lain yang salah.
2. Memakai narkoba karena ingin dicap 'keren' adalah salah satu contoh penyimpangan karena *labelling.*
3. Ketika Adi kecil ia sering dipukul oleh gurunya. Sekarang Adi sudah besar, jika kesal ia suka memukul anaknya. Hal ini bisa disebut penyimpangan sosial akibat asosiasi.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Warga masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dan menerima nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat dia hidup disebut sebagai orang yang memiliki ... terhadap nilai dan norma.
2. Perilaku orang yang menyimpang dari nilai dan norma yang dianut masyarakat pada umumnya dapat memicu terjadinya ... dan ... sosial.
3. Orang yang *melanggar* nilai dan norma dalam masyarakat kita sebut sebagai orang yang memiliki ... terhadap nilai dan norma sosial.
4. Bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok atau harapan masyarakat pada umumnya adalah definisi dari ... .
5. Yang dimaksud dengan *deviant* adalah ... .
6. "Asosiasi" secara sederhana diartikan sebagai ... .
7. Teori pelabelan *(labelling)* diperkenalkan oleh ... .
8. Istilah sosiologi untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sosial di mana nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat saling bertentangan satu sama lain adalah ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan sikap konformitas terhadap nilai dan norma?
2. Sebutkan contoh sikap konformitas terhadap nilai dan norma!
3. Apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang?
4. Sebutkan satu contoh yang dapat dipakai untuk menjelaskan teori asosiasi yang salah!
5. Apa yang dimaksud dengan pelabelan *(labelling)*? Berikan contoh!
6. Mengapa orang yang menyalahgunaan narkotika disebut sebagai berperilaku menyimpang?
8. Sebutkan dua contoh keadaan anomie di Indonesia atau di masyarakat! Jelaskan!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

Kekerasan Dipicu Ketidakadilan

Aksi kekerasan yang kerap terjadi akhir-akhir ini dalam kasus penggusuran, unjuk rasa, maupun pentas musik dan pertandingan olahraga, antara lain, dipicu oleh ketakadilan yang terjadi di masyarakat. Kekerasan berpotensi akan selalu ter-jadi selama persepsi masyarakat terhadap ketidak-adilan tidak berubah.

Demikian benang merah perbincangan dengan psikolog sosial dari Universitas Indonesia Bagus Takwin, sosiolog dari Universitas Indonesia Dr Imam B Prasodjo, sosiolog dari Universitas Negeri Padang Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, dan psikolog dari Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Prayitno, MSc. Ed, yang dihubungi secara terpisah.

Bagus Takwin berpandangan, masyarakat Indonesia pada dasarnya bukan masyarakat yang pemarah. Kalaupun muncul kekerasan, hal itu lebih disebabkan oleh penimbunan kekesalan dan reaksi terpendam yang berkepanjangan. "Akibatnya, persoalan sepele ditanggapi dengan amarah," ujar Bagus.

Menurut Bagus, dalam masyarakat nyaris tidak ada lembaga yang dapat diandalkan dan dipercaya untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. "Kalaupun ada lembaga formal, di mata publik sendiri masih berupa simbol yang kosong," ujar Bagus. Masyarakat yang merasakan ketidakadilan, baik subyektif maupun kolektif, kemudian merasa perlu bertindak sendiri.

"Lantas dengan cara apa? Yang lebih sering terjadi adalah penyelesaian dengan kekerasan," ujarnya. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman masyarakat selama ini, yakni secara umum persoalan yang dibawa ke lembaga formal cenderung tidak selesai sehingga keinginan yang tidak terpenuhi itu menjadi tertahan dan memunculkan frustrasi yang dapat meledak sewaktu-waktu. Selain itu, pengalaman bagaimana kekerasan diguna-kan oleh oknum-oknum tertentu dalam penyelesai-an masalah dijadikan "model" atau contoh oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai perso-alan ketidakadilan.

Beberapa contoh

Dalam kasus penyerangan anggota TNI terhadap anggota Polri di Maluku Tengah, misalnya,

akar persoalannya, antara lain, karena faktor ekonomi yang didukung tatanan struktural. "Tentara produk yang dilatih *combatant* atau berperang. Ia diajari kekerasan. Mau tak mau, tentara akan mengedepankan cara kekerasan untuk melaksanakan kepentingannya. Ini masalah struktural," ujar sosiolog Imam Prasojo.

Di sisi lain, polisi yang perannya sebagai mediator dan peredam di daerah konflik tidak begitu menonjol. "Jadi, muncullah sebuah kontradiksi dalam sebuah sistem," imbuhnya.

Dalam kasus kerusuhan antarsuporter sepak bola, faktornya antara lain karena ketidakadilan dan kebobrokan yang telanjang di depan masyarakat, tetapi tidak ada upaya serius mengatasinya.

Di sisi lain, secara kultural, masyarakat tidak dididik untuk berlapang dada menerima kekalahan dan mengakui keunggulan lawan. "Jika kalah justru meluapkan emosinya dengan tindak kekerasan." ujar Imam **(Sumber: Disarikan dari Harian KOMPAS, Jumat, 15 Februari 2008)**.

A. Menjawab Pertanyaan

1. Ceritakanlah ulang artikel di atas dengan bahasa yang sederhana dan singkat!
2. *"Tentara produk yang dilatih* combatant *atau berperang. Ia diajari kekerasan. Mau tak mau, tentara akan mengedepankan cara kekerasan untuk melaksanakan kepentingannya."*

   Dapat dikategorikan pada teori apakah contoh penyimpangan di atas?
3. Teori penyimpangan sosial apa sajakah yang kamu temui dalam bacaan di atas? Jelaskan!
4. Apakah solusi yang ditawarkan artikel tersebut untuk mengatasi penyimpangan sosial yang ada di Indonesia?

B. Portofolio

Buatlah sebuah kliping mengenai penyimpangan sosial (setidaknya tiga kasus) yang tengah terjadi di sekitar kita. Sumber dapat kamu dapatkan dari berbagai media cetak maupun media elektronik (termasuk internet). Kliping tersebut harus mampu mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Jenis penyimpangan yang terjadi beserta tempat, tanggal, dan pelaku penyimpangan.
2. Pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar.
3. Menggunakan teori yang sudah kamu pelajari, jelaskan pendapatmu mengapa penyimpangan tersebut bisa terjadi.
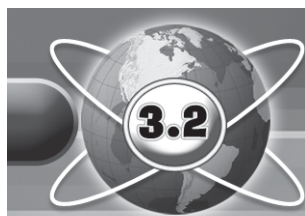
3.2 Upaya-upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial

FIKRI TERLIBAT PENGGUNAAN NARKOBA

Masyarakat semakin khawatir dengan semakin meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja. Hampir setiap hari media massa menurunkan laporannya mengenai keterlibatan siswa SLTP tertentu dalam pencurian dengan kekerasan, penodongan, pelecehan seksual, tawuran antarsekolah, narkoba, dan sebagainya. Umumnya para orang tua berharap agar anak-anak mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal apapun juga.

Ibu Fikri hanya bisa pasrah pada keadaan anaknya semata wayang. Setelah ditinggal ayahnya karena kawin lagi, Fikri anaknya semata wayang terlibat penggunaan narkoba. Setelah ditahan di kantor polisi, Fikri sekarang harus tinggal di rumah rehabilitasi. Dunia terasa gelap bagi Ibu Fikri. Sering ia termenung dalam doa dan berkata, "Ya Allah, apa salah dan dosa saya? Mengapa anakku menjadi seperti ini?"

Ya, Ibu Fikri mungkin saja tidak bersalah. Di rumah, Fikri diajari nilai-nilai yang baik. Fikri juga dibiasakan sejak dini untuk hidup menurut norma-norma tertentu yang dijunjung tinggi agama dan masyarakat. Tapi, pergaulan Fikri dengan teman-temanlah yang membuat Fikri terjerumus ke dalam lembah hitam penggunaan narkoba. Awalnya adalah coba-coba dan takut tidak dianggap sebagai anak gaul. Akhirnya semuanya jadi seperti sekarang ini. Tidak banyak yang bisa diperbuat selain menunggu proses pemulihan dan proses hukum yang harus dijalani Fikri. Sementara sang ibu terus berharap semoga Fikri kembali ke jalan yang benar dan tidak ada lagi anak-anak muda lain yang melakukan kesalahan yang sama.

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Apa yang terjadi dengan Fikri? Bagaimana tanggapan atau reaksi Ibu Fikri terhadap tindakan anaknya tersebut?
2. Menurut kamu, apakah Fikri adalah seorang anak yang baik sebelum terjerumus ke dalam pemakaian narkoba? Apa dasar pemikiran kamu?
3. Mengapa Fikri dapat terjerumus ke dalam tindakan kriminal? Menurut kamu, apakah Fikri dapat menolak tawaran teman-temannya?
4. Faktor apa yang paling memengaruhi terjerumusnya Fikri ke dalam tindakan kriminal? Menurut pendapatmu, apakah faktor tersebut sekarang sangat kuat dalam masyarakat? Bagaimana kamu mengetahui atau mendeteksinya?
5. Apa kiat kamu untuk menghindari terjerumusnya ke dalam tindakan kriminal kalau saja kamu ada pada posisi Fikri? Apakah kamu mempunyai usul-usul konkret bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar?

Di atas sudah kamu ketahui bahwa orang jatuh ke dalam perilaku menyimpang karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam kisah di atas di sebutkan bahwa Fikri terjerumus menggunakan narkoba karena pengaruh pergaulan. Pertanyaannya adalah apakah mungkin perilaku menyimpang seperti itu dapat dicegah? Bagaimana mencegahnya?

Ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, mengenal adanya pengendalian sosial. Ada juga yang menyebutnya sebagai pengontrolan atau kontrol sosial. Yang dimaksud tentu saja adalah upaya sadar yang dilakukan warga masyarakat atau seluruh kelompok sosial yang ada (termasuk seluruh agen sosialisasi) dalam mengontrol perilaku sosial warga masyarakatnya supaya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Ini artinya penyimpangan sosial dapat dikendalikan atau dikontrol. Tentu kita semua sepakat, bahwa lebih baik tidak melakukan penyimpangan sosial. Tetapi jika perilaku menyimpang terjadi, dibutuhkan usaha atau upaya tertentu untuk mengatasinya. Upaya pengendalian atau penyelesaian masalah ini dilakukan dengan maksud agar nilai dan norma tetap berlaku di masyarakat. Selain itu, perilaku menyimpang juga dikendalikan dengan tujuan agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang yang tidak ditindak atau tidak diberi sanksi hanya akan menciptakan kebingungan dan kekacauan dalam masyarakat.

Upaya kontrol atau pengendalian sosial ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mekanisme kontrol sosial internal dan mekanisme kontrol sosial eksternal.

3.2.1 Mekanisme Kontrol Sosial Internal

Yang dimaksud dengan kontrol sosial internal adalah kontrol sosial di dalam diri seorang individu. Yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana seorang individu mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri supaya tidak jatuh ke dalam perilaku-perilaku menyimpang.

Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Yang pertama adalah menjalankan proses internalisasi nilai dan norma secara baik dalam proses sosialisasi. Kamu sudah mempelajari berbagai macam agen atau pelaku dalam proses sosialisasi nilai dan norma. Yang penting sekarang adalah bagaimana nilai dan norma yang disosialisasikan itu dapat benar-benar diinternalisasikan oleh seorang individu. Proses internalisasi di sini dimaksud sebagai proses menjadikan nilai dan norma yang diajarkan sebagai nilai dan norma milik sendiri. Nilai dan norma tersebut menjadi bagian yang menentukan kualitas hidup sebagai individu.

Coba sekarang kamu menyebut satu contoh proses internasilasi nilai dan norma apa yang sekarang sedang kamu lakukan! Diskusikan hal ini dengan teman sebangku. Yang terpenting untuk diingat adalah bahwa internasilasi nilai dan norma itu sama artinya dengan proses membatinkan nilai dan norma. Artinya, kita belajar nilai dan norma tertentu, kita renungkan dan simpan dalam hati, setelah itu kita biarkan diri kita dibimbing dan diarahkan oleh nilai dan norma tersebut.

Ada keyakinan yang teguh dalam masyarakat bahwa nilai dan norma yang terinternalisasi dengan baik mampu mencegah seorang individu untuk berperilaku menyimpang. Internalisasi nilai dan norma memupuk kekuatan *suara hati* yang kemudian menjadi patokan tingkah laku. Pada akhirnya orang tidak mau berperilaku menyimpang bukan karena takut dilihat orang atau karena takut dihukum atau dipenjara, tetapi karena tahu bahwa perbuatan atau perilaku menyimpang itu adalah salah.

Seseorang memang tetap mempunyai kemungkinan berperilaku menyimpang atau melanggar norma-norma tertentu. Tetapi, dengan norma yang sudah terinternalisasi ini seseorang akan merasa bahwa tindakan atau perilaku menyimpangnya telah merendahkan harga dirinya *(self-respect)* sendiri sebagai manusia. Inilah mekanisme kontrol sosial dari dalam diri sendiri.

Satu contoh dapat dikemukakan di sini. Ari dikenal sebagai seorang siswa SMP yang rajin, taat beragama, dan patuh pada orang tua, dan guru.

Sumber: *http://flickr.com/photos/hello_daisy/224231630*

Gambar 3.2.1
Seorang siswi mencontek. Suara hati anak ini tidak cukup kuat mengontrol perilakunya sehingga ia mencontek pekerjaan temannya.

Suatu hari seorang temannya mengajak Ari untuk menonton film porno di rumah teman itu. Pada saat ini pasti suara hati Ari terus berbisik di dalam diri Ari supaya tidak mengikuti ajakan teman tersebut. Semakin temannya mengajak, semakin suara hati itu menjadi lebih kencang bersuara. Suara hati itu mengatakan, "Ari, jangan kamu nonton film tersebut." Tetapi pada saat yang bersamaan muncul godaan dalam dirinya, "Nonton saja, tidak apa-apa, *koq*. Orang lain juga menonton, dan tidak ada apa-apa!"

Ini merupakan saat yang paling menegangkan untuk mengambil keputusan. Jika Ari sudah menjadikan nilai dan norma yang diajarkan atau disosialisasikan kepadanya sebagai nilai dan norma pribadi (telah diinternalisasi), maka ada kemungkinan dia mengikuti suara hatinya dan tidak mengikuti ajakan teman tersebut. Nilai dan norma yang sudah dibatinkan dan menjadi patokan hidup akan membimbing Ari untuk tidak berperilaku menyimpang. Tetapi, jika suara hati Ari tidak kuat, dia bisa saja mengikuti ajakan temannya itu.

Nah, mengapa suara hati menjadi tidak kuat? Karena, proses sosialisasi nilai dan norma belum mencapai tahap internalisasi nilai dan norma. Dengan kata lain, nilai dan norma yang dahulu diajarkan kepada Ari belum diterima sebagai nilai dan normanya sendiri.

Betapapun besarnya godaan, kalau nilai dan norma sosial terinternalisasi dan menjadi bagian dari hidup seseorang niscaya orang itu tidak akan mudah berperilaku menyimpang. Inilah orang yang memiliki perilaku sosial yang sejati atau otentik.

Secara ringkas dapat disebutkan beberapa cara mengontrol atau mengendalikan diri sendiri supaya tidak jatuh ke dalam perilaku-perilaku menyimpang, antara lain sebagai berikut.

- Memperdalam pengetahuan agama.
- Mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri.

- Mengembangkan bakat dan melibatkan diri dalam kegiatan positif.
- Memiliki batas yang tegas dalam bergaul dengan teman.
- Berani menolak ajakan teman untuk melakukan perilaku menyimpang. Jangan takut dicap *"tidak gaul, banci, nggak macho, nggak modern, kuno, dan sebagainya"*.
- Kalau mempunyai masalah berbicaralah dengan orang tua, guru, atau carilah bantuan ahli.
- Membaca buku-buku atau menonton acara-acara yang positif dan membuka wawasan yang baik.
- Tidak mencoba-coba untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Ini beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kamu melakukan perilaku menyimpang. Tentu saja masih ada banyak cara lagi. Kamu dapat menambahkannya sendiri.

3.2.2 Mekanisme Kontrol Sosial Eksternal

Upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang dapat dilakukan dari luar diri orang itu sendiri. Dalam sosiologi upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan dari luar diri seseorang disebut kontrol sosial dari luar *(eksternal)*. Untuk membantu pemahaman, bacalah kutipan tentang pencegahan HIV/AIDS berikut ini.

"... Indonesia memiliki rantai penularan yang lengkap: seks, perilaku yang abai, dan pecandu narkoba dengan jarum suntik yang sembrono. Saat ini diperkirakan 90-130 ribu orang yang mengidap HIV di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun menyatakan Indonesia, bersama Nepal, Cina, dan Vietnam, sebagai negara dengan pertumbuhan kasus HIV/AIDS tercepat di dunia. Bukan mustahil, jutaan kasus HIV positif bakal muncul di wilayah yang padat populasi ini beberapa tahun mendatang.

Lalu, tak adakah yang bisa kita perbuat demi meredam laju HIV? 'Tentu saja ada,' kata Prof. dr. Zubairi Djoerban, Ketua Harian Kelompok Studi Khusus HIV/AIDS Universitas Indonesia. 'Peredaran putaw dan heroin harus segera dipotong dengan serius,' kata Zubairi. ... langkah ini mutlak menuntut kerja keras yang melibatkan semua pihak: kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lapisan masyarakat.

Program mereduksi atau mengurangi bahaya juga tidak bisa dilupakan.

Langkah lain yang juga harus digeber adalah merangkul remaja. Selama ini, pendekatan kaku para pendidik dan orang tua justru membuat para remaja mencari jalan keluar. Remaja pun terdorong pergi ke jalanan, terlibat narkoba, terjerumus seks bebas, dan akhirnya menuai HIV.

Beberapa organisasi sudah mulai melirik remaja sebagai target rangkulan program. Yayasan Permata Hati Kita (Yakita) dan Jakarta Sentral Rotary Club, misalnya, menjalin kerja sama dengan berbagai sekolah di Jabotabek.

Seperti dilaporkan Philippa Davie dari Tempo, di sekolah-sekolah ini pendidikan seks, penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta ancaman AIDS bukan cuma menjadi menu diskusi sekali setahun. 'Kami menyatukannya dalam kurikulum. Guru dari berbagai bidang bisa mengangkat subyek ini dalam pelajaran sehari-hari,' kata Ellie Ruslim, Kepala Konselor di SMU Bina Nusantara, salah satu sekolah yang bergandeng tangan dengan Yakita dan Rotary Club. Agar lebih seru dan funky, murid-murid diminta membuat pertunjukan drama, esai, dan poster mengenai HIV.

Tentu saja, bersandar pada aktivitas sekolah saja masih jauh dari cukup. 'Para orang tua sebaiknya membina komunikasi yang bersahabat dengan anak-anak,' kata Baby Jim Aditya. Komunikasi yang bukan cuma meliputi percakapan normatif semisal 'apa kabar?' atau 'apa cita-citamu, nak?' 'Anak-anak sebenarnya berharap punya orang tua yang terbuka, yang enak diajak ngobrol tentang keperawanan, seksualitas, juga tentang putaw,' kata Baby. Jika wilayah ini dijauhkan dari obrolan ruang keluarga, anak-anak akan mencari informasi dari dunia luar, dari teman, VCD, atau majalah porno yang justru berisiko.

Mudah-mudahan, Baby melanjutkan, peran aktif guru dan orang tua bisa menumbuhkan generasi yang kuat. Generasi yang paham bagaimana membentengi diri dari ancaman HIV/AIDS."

Sumber: *Tempo, 12 Desember 2004, hlm. 72.*

Pada kutipan di atas, dibahas mengenai masalah semakin cepatnya penularan virus HIV/AIDS di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah semakin maraknya perilaku menyimpang di kalangan masyarakat. Perilaku menyimpang itu antara lain penyalahgunaan narkoba dan perilaku seks bebas.

Kutipan tadi menyebutkan bahwa cara yang dipakai untuk meredam laju perkembangan HIV/AIDS antara lain sebagai berikut.

- Memotong peredaran narkoba dengan melibatkan semua pihak: kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lapisan masyarakat.
- Menjalankan program mereduksi bahaya.
- Merangkul para remaja dengan mengubah cara pendekatan pendidik dan orang tua terhadap anak-anak.
- Melakukan penyuluhan-penyuluhan.
- Para orang tua dianjurkan untuk membina komunikasi yang bersahabat dengan anak-anak.

Sumber:Majalah Tempo, 16-12 Desember 2004

Gambar 3.2.2
Baby Jim Aditya aktif melakukan penyuluhan HIV/AIDS di berbagai kalangan.Penyuluhan adalah salah satu cara mencegah perilaku menyimpang.

Dari sini kita bisa melihat bahwa kontrol sosial dari luar ini bisa dilakukan baik secara informal maupun secara formal. *Secara informal* maksudnya kontrol sosial diberikan oleh orang-orang yang hidup bersama dalam keseharian, yaitu keluarga. Sementara *secara formal* diberikan oleh negara atau masyarakat.

A. Mekanisme kontrol sosial informal

Mekanisme kontrol sosial informal adalah tugas dari kelompok sosial primer. Yang dimaksud dengan kelompok sosial primer adalah kelompok sosial utama atau kelompok sosial tempat kita hidup setiap hari. Termasuk dalam kelompok ini adalah keluarga dan orang terdekat kita.

Apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang? Yang dapat dilakukan keluarga antara lain sebagai berikut.

- Menanamkan keimanan yang kuat dan mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh keluarga.
- Menanamkan pendidikan budi pekerti yang baik sejak anak masih kecil.
- Membangun komunikasi yang bersahabat antara semua penghuni rumah.
- Menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama seluruh keluarga setiap hari sekadar melepaskan kerinduan satu sama lain.
- Saling mengingatkan kalau ada yang berbuat salah.
- Orang tua memberi contoh berperilaku yang baik, menjadi teladan, dan orang istimewa bagi anak-anak.
- Memberikan perhatian yang cukup kepada semua anak dan tidak pilih kasih.
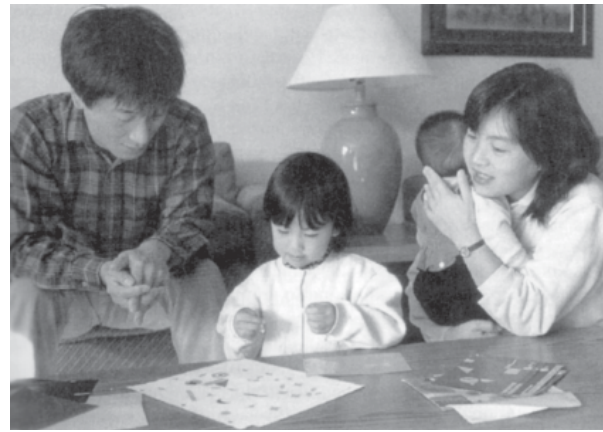
Gambar 3.2.3
Pendampingan, pengajaran, dan pembiasaan nilai dan norma yang dilakukan orangtua kepada anak-anaknya di rumah akan memudahkan orangtua mengendalikan dan mengontrol perilaku anak-anak mereka.

B. Mekanisme kontrol sosial formal

Untuk mengontrol atau mengendalikan penyimpangan sosial sering kontrol sosial yang dilakukan oleh kelompok sosial primer tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan upaya kontrol sosial yang dilakukan secara formal oleh lembaga-lembaga sosial tertentu yang memang ditugaskan untuk menjalankan peran kontrol sosial.

Setiap masyarakat menciptakan organisasi dan posisi-posisi yang diisi oleh orang-orang yang tugasnya menjalankan kontrol sosial. Posisi-posisi dan organisasi sosial ini meliputi polisi, hakim, jaksa, pembela, petugas penjara (sipir), legislator, guru, agamawan, dokter, psikiater, dan sebagainya.

Upaya pencegahan penyimpangan sosial di masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Merencanakan dan melaksanakan program-program sosial yang melibatkan para remaja, orang tua, organisasi wanita/pemuda/agama/profesi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat/lingkungan. Misalnya merencanakan dan melaksanakan program kali bersih.
- Membantu usaha-usaha penegakan hukum. Misalnya melakukan siskamling atau melaporkan kepada pihak yang berwajib bila di lingkungannya terjadi tindak kejahatan.
- Mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Misalnya, kerja sama antara SMU Bina Nusantara dengan Yakita dan Rotary Club melakukan penyuluhan tentang pendidikan seks, bahaya narkoba, serta ancaman AIDS.
- Melakukan tindakan penegakan hukum bagi para pelaku penyimpangan sosial. Misalnya, penegak hukum menangkap, mengadili, dan menghukum orang yang melakukan korupsi.

Mari kita perhatikan contoh kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum berikut ini.

Benci Penyakitnya, Sayangi Orangnya

Kisah Sulasih bermula di Dolly, Surabaya. Pada tahun 1991, Sulasih bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Apa daya, baru enam bulan beroperasi, dia diketahui positif HIV. Status infeksi itu didapatkan setelah semua penghuni lokalisasi diwajibkan menjalani tes darah.

Sudah pasti berat sekali status sebagai HIV positif, apalagi pada 1991. Seorang camat setempat berinisiatif "menyembunyikan" Sulasih agar dia tidak menjadi sasaran kemarahan massa yang waktu itu masih menganggap HIV/AIDS sebagai laknat Tuhan. Dua tahun Sulasih bersembunyi hingga akhirnya dia memutuskan kembali dan bertani di kampungnya, Dampit, Malang, Jawa Timur.

Sedihnya, ketika kembali Sulasih justru diusir oleh warga kampungnya sendiri. Warga geger setelah mendapatkan informasi tentang AIDS yang didramatisasi dari seorang bidan. "Hati saya hancur saat diusir oleh warga kampung saya sendiri," katanya saat itu. Belakangan, setelah diberi penyuluhan, warga mengizinkan dan menerima Sulasih kembali pulang.

Ada satu berkah yang dialami Sulasih ketika dia merana tersingkir dari kampung. Pada tahun 1993, datanglah sang Arjuna. Sugik, salah satu lelaki pelanggannya semasa di Dolly, datang melamar dan siap mendampingi Sulasih sampai titik akhir. Mereka pun resmi bersanding. Keduanya dikaruniai dua anak.

Bersama Sugik, Sulasih mendapatkan dorongan moral yang kuat. "Saya bersyukur diberi suami yang bisa memotivasi saya. Hingga saat ini, saya masih diberi kekuatan untuk bertahan hidup," kata Sulasih. Sulasih kini tidak lagi takut dipublikasikan media. Ia malah bergabung dengan berbagai LSM untuk mengikis berbagai pemahaman keliru tentang HIV/AIDS. Sulasih ingin masyarakat membenci dan menjauhkan diri dari risiko HIV/AIDS. "Penyakitnya harus dibenci, tapi orangnya harus disayangi," katanya. (***Sumber:*** *Tempo, 12 Desember 2004, hlm. 75)*

- Suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilaporkan kepada polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi pertama-tama menyelidiki perilaku penyimpangan sosial tersebut. Jika ditemukan bukti-bukti yang mencukupi mengenai adanya pelanggaran norma hukum tertentu, polisi segera melimpahkan suatu perkara kepada pihak kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut di pengadilan.
- Dalam proses pengadilan tersebut seorang terdakwa dapat didampingi oleh seorang pengacara. Jika kemudian diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri bahwa orang itu memang bersalah maka orang tersebut dapat dibawa ke penjara.
- Di lembaga pemasyarakatan inilah sipir kemudian menjalankan peran kontrol sosial untuk memastikan bahwa tahanan menaati seluruh nilai dan norma yang berlaku dalam penjara tersebut. Narapidana akan disosialisasi kembali dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi kembali semacam inilah seorang tahanan disiapkan diri untuk dapat kembali ke masyarakat dan hidup "normal" seperti sedia kala.

Dapatkah kamu menjelaskan mengapa guru bisa memainkan peran kontrol sosial secara formal? Bagaimana dengan legislator dan agamawan? Coba berikan beberapa contoh.

3.2.3 Sikap Terhadap Pelaku Penyimpangan Sosial

Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap para pelaku penyimpangan sosial? Ada dua sikap yang ditunjukkan orang terhadap pelaku penyimpangan sosial, yaitu sikap yang negatif dan sikap yang positif. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan kisah Sulasih berikut ini.

A. Sikap negatif

Pada umumnya, sikap pertama yang ditunjukkan masyarakat adalah sikap negatif. Dalam kisah Sulasih di atas, sikap negatif yang muncul adalah: "disembunyikan" oleh seorang camat, dianggap sebagai orang berdosa yang mendapat hukuman dari Tuhan (HIV/AIDS dianggap sebagai laknat Tuhan), dan diusir dari kampung halamannya.

Ada banyak sikap negatif yang ditunjukkan masyakarat terhadap orang dengan perilaku menyimpang. Sikap negatif itu antara lain:

- tidak peduli sama sekali terhadap orang yang mempunyai perilaku menyimpang;
- tidak mau bergaul dengan orang yang mempunyai perilaku menyimpang;
- marah terhadap orang yang mempunyai perilaku menyimpang;
- main hakim sendiri terhadap orang yang perilakunya menyimpang;
- mengusir orang yang perilakunya menyimpang dari lingkungan masyarakat;

- menghukum orang yang perilakunya menyimpang.

Ini hanya beberapa contoh saja. Kamu dapat menambahkan sendiri sikap negatif apa yang ditunjukkan orang terhadap orang lain yang berperilaku menyimpang.

Setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan atau penyimpangan pasti merasa bahwa dia dijauhi dan dibenci masyarakat. Selama perasaan ini masih ada dalam hati akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan resosialisasi. Dengan demikian, mereka juga akan mengalami kesulitan untuk kembali lagi ke dalam masyarakat. Perhatikan apa yang dikatakan Sulasih ketika dia diusir dari desanya. “Hati saya hancur saat diusir oleh warga kampung saya sendiri.” Dengan diperlakukan secara negatif, belum tentu dia dapat berubah menjadi normal sesuai harapan masyarakat.

Dalam subbab 3.1 atas kamu juga sudah melakukan sebuah penelitian sederhana. Kamu diminta mengamati mengamati berapa banyak siswa yang terlambat masuk sekolah dalam beberapa hari. Coba perhatikan sekali lagi hasil penemuanmu itu! Apa reaksi guru piket dalam menghadapi siswa yang terlambat? Apa reaksi kamu sendiri? Ingat, kita boleh bersikap negatif terhadap perilaku-perilaku yang melanggar nilai dan norma, termasuk perilaku menyimpang. Meskipun demikian, kita tidak boleh memusuhi pelaku. Sebagai manusia, kita harus menghargai mereka. Yang kita benci dan tolak adalah sikap, tindakan, atau perilaku, bukan orang.

Kita hidup dalam sebuah negara hukum. Karena itu, sikap kita terhadap warga negara yang memiliki perilaku menyimpang pun harus sesuai dengan tuntutan hukum. Kita tidak boleh mengambil tindakan yang melebihi kewenangan hukum. Kalau kita bertindak keras dan anarkis terhadap mereka yang berperilaku menyimpang, kita bisa dituntut secara hukum. Sekali lagi, dalam menyikapi warga negara yang berperilaku menyimpang, kita sebaiknya mempercayakan penyelesaiannya secara hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara kita.

B. Sikap positif

Selain sikap negatif, ada juga sikap positif yang ditunjukkan terhadap orang yang mempunyai perilaku menyimpang. Dalam kisah Sulasih di atas, sikap positif ditampilkan oleh Sugik yang mau menerima Sulasih sebagai isterinya. Bersama Sugik, Sulasih mendapatkan dorongan moral yang kuat. Ia merasa bersyukur diberi suami yang bisa memotivasi. Ia merasa diberi kekuatan untuk bertahan hidup. Sulasih juga tidak lagi takut dipublikasikan media. Ia malah bergabung dengan berbagai LSM untuk mengikis berbagai pemahaman keliru tentang HIV/AIDS.

Sikap positif terhadap orang yang berperilaku menyimpang itu adalah sikap *simpati*. Kata simpati berasal dari kata Yunani, *sympatheia*, yang berarti “mempunyai perasaan yang sama”. Simpati mengandung arti kemampuan untuk ambil bagian dengan perasaan orang lain yang sedang menderita. Perasaan itu dilandasi oleh kemampuan untuk menaruh perhatian atas diri orang lain.

Sikap yang ditunjukkan Sugik terhadap Sulasih adalah sikap simpati. Sugik menempatkan dirinya pada pihak Sulasih. Ia mau menerima Sulasih yang ditolak orang di sekitarnya. Sugik ikut merasakan betapa beratnya hidup sebagai penderita HIV/AIDS.

Tidak bisa dipungkiri bahwa rasa simpati dan sayang kepada mereka yang berperilaku menyimpang dapat menimbulkan pengaruh psikologis yang luar biasa dalam diri mereka. Tentu saja rasa simpati tidak akan menggantikan tuntutan hukum terhadap perilaku menyimpang yang jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Begitu mereka merasa bahwa mereka diterima apa adanya, dicintai, didampingi, diperhatikan, dan diampuni, maka mereka akan memberi makna yang berbeda pada hidupnya. Rasa simpati dan sayang masyarakat kepada mereka yang melakukan perilaku menyimpang akan menyadarkan mereka bahwa perilaku menyimpang ternyata sangat merugikan diri mereka sendiri dan masyarakat luas.

Dalam hal orang yang melakukan kejahatan, misalnya, harus selalu diingat bahwa rasa simpati tidak pernah bisa menggantikan proses peradilan dan hukuman atau sanksi yang harus diterimanya. Cinta kasih tidak bisa menggantikan tempat keadilan. Proses peradilan dan hukuman harus tetap dilaksanakan sebagai jalan untuk proses resosialisasi. Rasa simpati dan sayang kepada mereka yang berperilaku menyimpang adalah ungkapan manusiawi kita terhadap mereka yang berperilaku menyimpang. Rasa simpati kita ungkapkan dengan memberi perhatian kepada mereka selama dalam tahanan dan bersedia mengampuni seluruh perbuatan mereka dan menerima mereka sebagai sesama saudara ketika mereka telah bebas dari proses peradilan dan hukuman. Dengan rasa simpati kita menunjukkan kepada mereka yang berperilaku menyimpang bahwa kita mencintai dia sebagai manusia, dan bahwa yang kita benci bukanlah dirinya tetapi perbuatan-perbuatannya.

RANGKUMAN

1. Dalam ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, mengenal adanya pengendalian sosial atau kontrol sosial. Yang dimaksud pengendalian sosial adalah upaya sadar yang dilakukan warga masyarakat atau seluruh kelompok sosial yang ada dalam mengontrol perilaku sosial warga masyarakatnya supaya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Upaya kontrol sosial atau pengendalian sosial ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mekanisme kontrol sosial internal dan mekanisme kontrol sosial eksternal.
3. Kontrol sosial internal adalah kontrol sosial di dalam diri seorang individu. Yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana seorang individu mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri supaya tidak jatuh ke dalam perilaku-perilaku menyimpang.
4. Upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang dapat dilakukan dari luar diri orang itu sendiri. Dalam sosiologi disebut kontrol sosial dari luar *(eksternal)*.
5. Kontrol sosial eksternal (dari luar) bisa dilakukan baik secara informal maupun secara formal. *Secara informal* maksudnya kontrol sosial diberikan oleh orang-orang yang hidup bersama dalam keseharian, yaitu keluarga. Sementara *secara formal* diberikan oleh negara atau masyarakat.
6. Ada dua sikap yang ditunjukkan orang terhadap pelaku penyimpangan sosial, yaitu sikap yang negatif dan sikap yang positif.
7. Sikap negatif itu antara lain: tidak peduli, tidak mau bergaul dengan orang yang mempunyai perilaku menyimpang, main hakim sendiri, marah, mengusir orang yang perilakunya menyimpang dari lingkungan masyarakat, menghukum orang yang perilakunya menyimpang, dan lain-lain.
8. Sikap positif diwujudkan dengan menunjukkan rasa simpati dan sayang kepada mereka yang melakukan perilaku menyimpang.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Mengenakan baju yang sopan karena enggan digosipi oleh masyarakat menunjukkan mekanisme kontrol eksternal.
2. Menjauhi seseorang yang terkena penyakit HIV/AIDS disebut tindakan simpatik.
3. Memperdalam dan mempraktikkan ajaran agama dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang.
4. Lembaga penegak hukum menjalankan peran mekanisme kontrol informal.
5. Orang yang berperilaku menyimpang harus dianiaya dan diusir dari masyarakat.

II. Salin di buku tugasmu dan lengkapilah dengan jawaban yang tepat!

1. Kontrol sosial atau pengendalian sosial adalah ... .
2. Upaya kontrol atau pengendalian sosial dapat dilakukan dengan dua cara, yakni ... dan ... .
3. Yang dimaksud dengan kontrol sosial internal adalah ... .
4. Proses menjadikan nilai dan norma yang diajarkan sebagai nilai dan norma milik sendiri disebut proses ... .
5. Internalisasi nilai dan norma memupuk kekuatan ... yang kemudian menjadi patokan tingkah laku.
6. Kontrol sosial yang dari luar diri orang itu sendiri dalam sosiologi disebut kontrol sosial ... .
7. Ada dua sikap yang ditunjukkan orang terhadap pelaku penyimpangan sosial, yaitu ... dan ... .
8. Suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilaporkan kepada ... sebagai penjaga ketentraman masyarakat.
9. Jika ditemukan bukti-bukti yang mencukupi mengenai adanya pelanggaran norma hukum tertentu, polisi segera melimpahkan suatu perkara kepada pihak ... untuk kemudian diproses lebih lanjut di pengadilan.
10. Dalam proses pengadilan tersebut seorang terdakwa dapat didampingi oleh ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana kontrol sosial internal dapat dilakukan?
2. Benarkah mengembangkan bakat dan melibatkan diri dalam kegiatan positif dapat mencegah kita berperilaku menyimpang? Jelaskan jawabanmu!
3. Sebutkan 8 cara mengontrol atau mengendalikan diri sendiri supaya tidak jatuh ke dalam perilaku menyimpang!
4. Apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang?
5. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyimpangan sosial di masyarakat?
6. Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap para pelaku penyimpangan sosial?
7. Jelaskan mengenai sikap positif yang dapat kita tunjukkan kepada pelaku penyimpangan sosial!

IV. Studi Kasus

Baca dan perhatikan contoh-contoh kasus di bawah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

Sumber: Kompas Yogyakarta, 19 Agustus 2006

Di kampung Rotowijayan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta, warga kampung tersebut menyepakati untuk menjadikan kampung mereka kampung bebas rokok setiap hari, dari pukul 06.00 -12.00 dan 16.00 sampai 18.00.

Meski tidak ada sanksi sosial, mereka yang berani merokok harus bersiap diri dipelototi, atau ditegur sebagai bentuk sanksi moral.

(Disarikan dari " Bebas Asap Rokok di RW 10 Rotowijayan". *Kompas Yogyakarta, 19 Agustus 2006*)

Pertanyaan

1. Menurut gambar di atas, apakah merokok merupakan penyimpangan sosial, jika:
   a. dilakukan di Kampung Rotowijayan pada jam bebas rokok? Jelaskan!
   b. dilakukan di luar Kampung Rotowijayan? Jelaskan!
2. Disebut mekanisme apakah upaya mencegah seseorang untuk merokok di Kampung Rotowijayan? Mengapa?
3. Sebutkan dua contoh kasus yang mirip dengan contoh kasus Kampung Rotowijayan! Jelaskan kemiripannya!

Sumber: Kompas 14 Maret 2008

Korban perdagangan manusia (*trafficking*) yang dijerumuskan ke dunia pelacur, diselamatkan dan diberi keterampilan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan.

Beberapa keterampilan seperti membordir, menyalon, dan menggunakan komputer diajarkan di sana. Kini, mereka pun dapat mengubur masa lalu yang kelam, dan memulai hidup baru.

(Disarikan dari: "Bangkit Setelah Menjadi Korban", *Kompas, 14 Maret 2008*)

Pertanyaan

1. Apakah yang kamu ketahui tentang perdagangan manusia? Jelaskan!
2. Apakah para korban perdagangan manusia di samping merupakan pelaku penyimpangan sosial? Jelakan pendapatmu!
3. Apa pendapatmu mengenai gambar dan artikel tersebut?
4. Apakah reaksi LSM PKPA termasuk reaksi yang positif? Mengapa? Jelaskan!

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pelanggaran nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat disebut ... .
   a. pelanggaran hukum
   b. tindakan kriminal
   c. penyimpangan sosial
   d. sampah masyarakat
2. Di bawah ini yang merupakan tindakan konformitas adalah ... .
   a. siswa yang belajar mencontek
   b. polisi yang menangkap dan memukuli penjahat
   c. pejabat negara yang korupsi
   d. pekerja yang datang tepat waktu
3. Ikut-ikutan mencontek karena seorang teman mencontek di sekolah, dan dapat nilai bagus merupakan contoh penyimpangan yang sesuai teori ... .
   a. pelabelan
   b. konflik
   c. asosiasi yang salah
   d. anomie
4. Di kampung Rochim, memiliki rumah bata adalah salah satu tanda kesuksesan. Untuk bisa memenuhi harapan warga kampungnya, Rochim terpaksa berbuat jahat di kota. Hal ini adalah contoh penyimpangan sosial yang sesuai teori ... .
   a. anomie
   b. konflik
   c. pelabelan
   d. konformitas
5. Ilmuwan yang memperkenalkan teori pelabelan ialah ... .
   a. Lemert
   b. Setyawati
   c. Durkheim
   d. Bourdieu
6. Sikap Ani yang tidak suka bergaul, melainkan lebih senang menyendiri dan membaca buku membuatnya tidak disukai. Teman-temannya bergosip tentang Ani. Gosip di antara kawan-kawan Ani merupakan bentuk ... .
   a. pujian
   b. pengendalian sosial
   c. rasa sayang
   d. kurang kerjaan
7. Di bawah ini yang merupakan contoh penyimpangan sosial yang sesuai dengan teori konflik adalah ... .
   a. Ale menyuap jaksa agar bebas dari penjara
   b. Rona merokok, karena merokok dianggap 'keren'
   c. Unjuk rasa buruh menuntut perbaikan upah
   d. Guru yang menjadi galak karena dianggap sebagai guru galak
8. Di televisi, semua perempuan yang bertubuh langsing dan berkulit putih dianggap cantik. Agar dianggap cantik, Cinta terkena anorexia (penyimpangan pola makan agar menjadi kurus). Hal ini adalah penyimpangan sosial yang terjadi karena ... .
   a. konflik
   b. pelabelan
   c. anomie
   d. asosiasi yang salah
9. Di bawah ini yang termasuk narkotika adalah ... .
   a. rokok tembakau
   b. aspirin
   c. opium
   d. kopi
10. Di bawah ini yang termasuk kontrol sosial internal adalah ... .
    a. merasa berdosa jika tidak beribadah
    b. dihukum jika terlambat sampai sekolah
    c. ditilang jika melanggar peraturan lalu lintas
    d. dijauhi teman-teman jika tidak ikut membolos
11. Seorang pencuri yang dimasukkan penjara oleh polisi adalah mekanisme kontrol sosial... .
    a. eksternal yang bersifat informal
    b. internal yang bersifat formal
    c. eksternal yang bersifat formal
    d. internal yangbersifat informal
12. Kelompok sosial primer yang akan membantu seseorang keluar dari ketergantungan obat adalah ... .
    a. media
    b. keluarga dan teman
    c. diri sendiri
    d. negara
13. Di bawah ini yang merupakan mekanisme kontrol sosial informal adalah ... .
    a. Susi menasehati adiknya yang suka mengintip
    b. TKI yang ditangkap dan dideportasi ke negeri asal
    c. maling yang tertangkap dan dibawa ke kantor polisi
    d. pendidikan seks dan penyuluhan oleh guru

14. Masyarakat yang main hakim sendiri dan memukuli maling adalah sikap ... terhadap penyimpangan sosial.
    a. positif
    b. reaktif
    c. negatif
    d. menyimpang
15. Simpati berasal dari kata "sympatheia" yang berarti ... .
    a. memiliki perasaan yang berbeda
    b. tidak memahami perasaan orang
    c. memiliki perasaan yang sama
    d. tidak memiliki perasaan yang sama
16. Lia hamil di luar nikah. Di bawah ini yang menunjukkan sikap simpati kepada Lia adalah ... .
    a. memaksanya untuk aborsi
    b. membantunya melewati tahap kehamilan
    c. mengeluarkannya dari sekolah
    d. mencari dan memukuli pacar Lia
17. Poster dan penyuluhan antinarkoba adalah ... .
    a. mekanisme kontrol sosial formal
    b. mekanisme kontrol pribadi
    c. mekanisme kontrol sosial informal
    d. mekanisme kontrol pribadi informal
18. Untuk mencegah terlibat dalam narkoba, kontrol sosial internal yang bisa kita lakukan adalah ... .
    a. mengikuti omongan teman
    b. menuruti ajakan pembicara seminar antinarkoba
    c. tidak ingin mencoba narkotika karena hal itu merugikan diri sendiri
    d. takut dimarahi guru
19. Contoh upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sosial di lingkungan RT adalah ... .
    a. adanya siskamling
    b. rajin ikut dharmawisata RT
    c. adanya petugas P3K
    d. tidak membolos sekolah
20. Penyimpangan sosial yang juga melanggar norma hukum adalah ... .
    a. tidak mendengarkan nasehat orang tua
    b. berbohong pada teman
    c. mencuri barang di supermarket
    d. senang mencuri dengar pembicaraan orang lain

II. Jawablah dengan singkat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan sosial!
2. Ceritakan penyimpangan sosial yang pernah kamu lakukan! Jelaskan akibatnya bagi dirimu sendiri!
3. Seorang ayah uang amal untuk membiayai anaknya yang tengah sakit parah. Apakah hal ini termasuk penyimpangan sosial? Termasuk dalam teori manakah kasus tadi? Jelaskan!
4. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial yang terjadi karena *labelling?* Berilah empat contohnya yang terjadi di masyarakat!
5. Mengapa menggunakan narkoba termasuk dalam penyimpangan sosial?
6. Berilah dua contoh penyimpangan sosial yang terjadi akibat konflik antarkelas di dalam masyarakat sekitarmu! Jelaskan!
7. Apakah suara hati bisa diasah? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri!
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme kontrol sosial informal?
9. Seorang waria, sebut saja Bam, lebih senang menggunakan baju perempuan daripada baju laki-laki. Ia pun bersikap sangat kewanitaan. Berilah contoh:
    a. mekanisme kontrol sosial formal yang kemungkinan ia terima!
    b. sikap positif yang kemungkinan ia terima dari masyarakat!
10. Menurutmu, mengapa sebagian masyarakat masih bersikap negatif kepada para penderita HIV/AIDS? Jelaskan!

Bab 4 Kegiatan Pelaku Ekonomi di Masyarakat

Sumber: kompas Jawa Tengah, 8 April 2008
Sumber: Maj Tempo, 28 Jan- 3 Feb 2008
Sumber: kompas Jawa Tengah, 7 April 2008
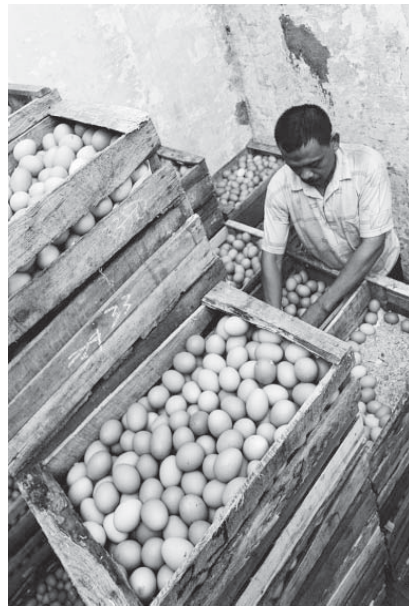
PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi jika tersedia berbagai sumber daya. Jika sumber daya tersebut terbatas, sedangkan yang membutuhkan banyak, sumber daya itu dapat dikatakan langka, dan menjadi salah satu faktor yang menjadikan barang tersebut memiliki nilai ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang harus melakukan tindakan ekonomi. Mereka yang melakukan tindakan ekonomi, dinamakan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada bermacam-macam, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan lain sebagainya.

Tempat bertransaksi antar pelaku ekonomi dinamakan pasar. Pasar memiliki banyak fungsi, yakni sebagai pembentuk harga, distribusi, dan promosi. Dilihat dari jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi 4, yakni pasar komoditi, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar modal. Pasar juga dapat dikelompokan menurut waktu kegiatan, luas wilayah, struktur, serta fisiknya.

Peta Konsep

Kegiatan Pelaku Ekonomi di Masyarakat
Hubungan Sumber Daya dan Kebutuhan Manusia
Sumber Daya Penghasil Barang dan Jasa
Kelangkaan Alat Pemenuhan Kebutuhan
Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebutuhan
Pengelompokan Kebutuhan Manusia
Pengelompokan Alat Pemuas Kebutuhan
Klasifikasi Pelaku-pelaku Ekonomi
Rumah Tangga Konsumen
Rumah Tangga Produksi
Pemerintah
Siklus ekonomi
Siklus Ekonomi pada Perekonomian Tertutup
Siklus Ekonomi pada Perekonomian Terbuka
Pelaku ekonomi berdasarkan badan usaha
BUMN
BUMS
Koperasi
Bentuk-bentuk Pasar
Pengertian Pasar
Fungsi dan Peranan Pasar
Jenis-jenis Pasar
Hubungan Pasar dan Distribusi
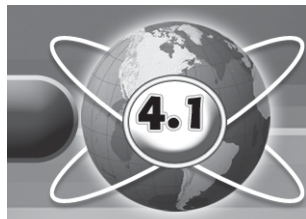
4.1 Hubungan Sumber Daya dengan Kebutuhan Manusia

Krisis Listrik Hingga 2009

Sabtu, 31 Mei 2008 | 00:25 WIB

Jakarta, Kompas - Sistem kelistrikan Jawa-Bali akan terus mengalami krisis sampai pertengahan tahun 2009. Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas pembangkit PLN tidak bertambah secara signifikan. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik di atas 6 persen, cadangan daya pun terus tergerus.

Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rudiantara mengemukakan hal itu dalam penjelasan pers bersama PT PLN dan PT Pertamina, Jumat (30/5) di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

Rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik pada kuartal I-2008 mencapai 6,8 persen, sementara target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2008 hanya 1,9 persen. Dengan menggunakan patokan pertumbuhan itu pula, pemerintah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN sebanyak 9,1 juta kiloliter. Sementara itu, realisasi pemakaian BBM sampai April 2008 sudah mencapai 3,651 juta kiloliter atau 42,24 persen dari kuota.

Cadangan daya tergerus menjadi 25 persen dari batas yang seharusnya 40 persen. Rudiantara menjanjikan kondisi kelistrikan mulai membaik setelah beberapa proyek 10.000 megawatt (MW) mulai masuk pada pertengahan 2009.

Sejak Senin lalu, sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami defisit 800-900 MW, yang mengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Defisit disebabkan aneka hal, antara lain penurunan daya di sejumlah pembangkit PLN dan swasta, kenaikan beban pemakaian listrik di Jawa-Bali, serta ketidaklancaran pasokan BBM ke pembangkit PLN. ... .

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan artikel di atas!

1. Apa inti persoalan dari artikel di atas?
2. Apa yang menyebabkan masalah tersebut?
3. Apa akibat pemadaman listrik bagi rumah tangga dan bagi pengusaha?
5. Kemukakan pendapatmu tentang tindakan apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut?

Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas!

Seperti telah kita ketahui kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan tidak terbatas jumlahnya. Manusia selalu mempunyai kebutuhan baru ketika suatu kebutuhan telah terpenuhi. Ini merupakan ciri yang melekat pada kebutuhan. Untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan manusia dibutuhkan adanya alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa.

Lalu dari mana barang dan jasa itu dihasilkan? Secara ringkas dapat dikatakan bahwa barang dan jasa tersebut dihasilkan dari sumber daya-sumber daya. Namun sumber daya untuk menghasilkan barang kebutuhan manusia tersebut terbatas persediaannya jika dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Contohnya kelangkaan listrik pada artikel diatas.

Dalam ilmu ekonomi, keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan barang kebutuhan itu disebut kelangkaan (*scarcity*). Sekarang kita akan mempelajari hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia.

4.1.1 Sumber Daya Penghasil Barang dan Jasa

Menurut ilmu ekonomi sumber daya yang terbatas dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak uraian di bawah ini!

A. Sumber daya alam

Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam baik yang berupa benda mati (abiotik) atau makhluk hidup (biotik) yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh sumber daya alam: tanah, air, laut, barang tambang, matahari dan udara.

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga, seperti berikut ini.

a. Kekayaan alam yang dapat diperbarui. Hal ini meliputi: perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan.
b. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui.

Misalnya: barang-barang tambang dan mineral. Artinya, suatu saat barang-barang tambang itu akan habis bila sudah digali manusia sekian puluh atau sekian ratus tahun.

c. Kekayaan alam yang tidak akan habis. Merupakan sumber tenaga (energi), seperti panas matahari, panas bumi, air, dan angin yang tidak akan habis.

Dok. Ilustrasi Bagian produksi, 2007

Gambar 4.1.1
Macam-macam sumber daya alam yang dapat menghasilkan barang dan jasa.

Kegiatan ekonomi yang pokok adalah menggali sumber daya alam untuk kemudian diproses dan dimanfaatkan. Namun demikian, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan sumber daya alam yang terbatas harus tetap diusahakan. Untuk itu, manusia harus melestarikan sumber daya alam agar jangan cepat punah. Kepunahan sumber daya alam merupakan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia.

B. Sumber daya manusia

Sumber daya alam yang tersedia akan menjadi sia-sia jika tidak diolah dan dimanfaatkan secara tepat. Oleh karena itu manusia harus mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara tepat pula. Untuk dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang andal.

Apa sajakah yang termasuk unsur-unsur sumber daya manusia yang andal itu? Sumber daya manusia yang andal mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- Kecerdasan.
- Kesehatan jasmani dan rohani.
- Kepribadian yang mantap dan mandiri.
- Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- Keimanan dan ketakwaan.

Di Indonesia sumber daya manusia yang merupakan sumber tenaga kerja begitu banyak. Akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan karena banyak di antara mereka yang tidak memiliki keterampilan, keahlian khusus, kurang berkualitas, dan sebagainya. Dengan demikian karena terbatasnya tenaga kerja yang ideal di Indonesia maka pengolahan sumber daya alam juga terbatas. Demikian pula dalam menghasilkan barang dan jasa.

Sumber: www.blst.co.id

Gambar 4.1.2
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam rangka penyediaan alat pemuas kebutuhan. Sumber daya manusia (tenaga kerja) menyediakan usaha-usaha fisik dan mental dalam rangka pembuatan barang dan jasa. Jumlah dan tingkat kemampuan tenaga kerja merupakan penentu kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi. Apabila sumber daya manusia yang berkualitas jumlahnya terbatas, barang atau jasa yang dihasilkan juga terbatas.

Walaupun jumlahnya sangat kecil, sebagian tenaga kerja dapat menentukan keberhasilan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Orang seperti itu disebut sebagai wirausaha.

C. Sumber daya modal

Di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang beranggapan bahwa yang disebut dengan modal ialah uang. Ilmu ekonomi tidak memandang modal hanya berupa uang. Kalau demikian apakah pengertian modal dalam ilmu ekonomi?

Modal adalah segala benda atau alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil produksi atau yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses produksi.

Apakah fungsi modal dalam suatu proses produksi? Dengan bantuan modal, proses produksi dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi dan tingkat keuntungan suatu perusahaan. Misalnya, dalam usaha

pertanian, hasil produksi petani akan meningkat jika menggunakan traktor, pupuk, dan insektisida. Traktor digunakan untuk mengolah tanah, pupuk digunakan untuk menyuburkan tanah, dan insektisida digunakan untuk membasmi hama.
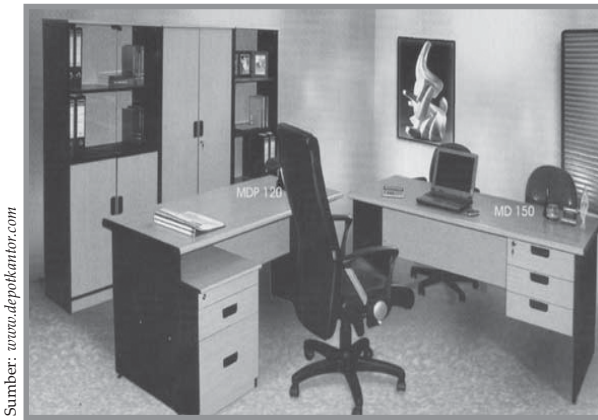
Sumber: www.depotkantor.com

Gambar 4.1.3
Kantor dan peralatannya adalah sumber daya modal

Alat-alat atau benda di atas dalam ilmu ekonomi disebut sebagai modal. Selain itu, modal dapat juga diartikan sebagai suatu benda atau alat hasil kerja manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contoh: komputer digunakan untuk mengolah data dalam sebuah kantor statistik (Biro Pusat Statistik), kalkulator digunakan untuk menghitung, pulpen digunakan untuk menulis, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal ialah setiap alat yang dapat digunakan untuk membantu menghasilkan barang maupun jasa atau setiap hasil kerja manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar modal yang digunakan suatu negara, semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan. Sebaliknya semakin sedikit atau terbatas modal yang tersedia, semakin terbatas pula barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

4.1.2 Kelangkaan Alat Pemenuhan Kebutuhan

Untuk bisa hidup layak manusia harus memenuhi beragam kebutuhannya. Ada bermacam-macam kebutuhan hidup, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Sayangnya, kebutuhan memiliki sifat selalu bertambah bahkan tak terbatas. Apabila kebutuhan yang satu telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain yang baru. Kebutuhan tersebut ada yang berupa barang maupun jasa, dan untuk memperolehnya manusia harus melakukan kegiatan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Menggali atau mengolah sumber-sumber alam yang tersedia seperti berburu, bertani, menambang, dan mencari ikan (nelayan).
- Memproduksi barang dengan bantuan alat-alat produksi yang ada (fabrikan, produsen).
- Melakukan jasa-jasa tertentu sesuai dengan keahlian, misalnya jasa mengobati, jasa mengajar, jasa membela perkara, jasa menyopir (sopir taksi, bus, mikrolet), dan sebagainya.

Namun harus disadari bahwa sumber-sumber alam yang tersedia terbatas sifatnya, demikian pula alat-alat pemuas yang dihasilkan orang. Dengan melihat kenyatan bahwa kebutuhan manusia itu banyak, beraneka ragam, dan bahkan tak terbatas, timbul permasalahan utama ekonomi yaitu: dapatkah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipenuhi semuanya?

National Geographic vol. 184 Nov 93

Gambar 4.1.4
Salah satu contoh kegiatan ekonomi yang menggali sumber-sumber alam yang tersedia.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya (alat-alat pemenuhan kebutuhan itu), manusia harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Manusia harus melakukan tindakan alternatif yaitu mengadakan pemilihan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Dengan kata lain manusia harus menentukan skala prioritas. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan agar seseorang merasa terpuaskan, mendorong setiap orang untuk melakukan berbagai macam tindakan ekonomi.

Tindakan ekonomi ialah segala kegiatan yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kita makan supaya tidak lapar, kita membeli baju supaya dapat berpakaian dengan pantas, dan sebagainya.

Seiring kegiatan orang untuk memenuhi kebutuhannya, sering muncul peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya saja:

- adanya kenaikan/penurunan harga barang;
- para buruh melakukan mogok kerja;
- timbulnya pengangguran, dan sebagainya.

Setiap peristiwa/kejadian yang timbul karena orang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut peristiwa ekonomi.

Di dalam setiap peristiwa ekonomi, terdapat berbagai macam alat atau sarana yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mesin-mesin produksi di pabrik, toko tempat menjual barang-barang, mobil untuk mengangkut barang dan penumpang, dan sebagainya. Setiap usaha yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan alat atau sarana tertentu disebut kegiatan ekonomi.
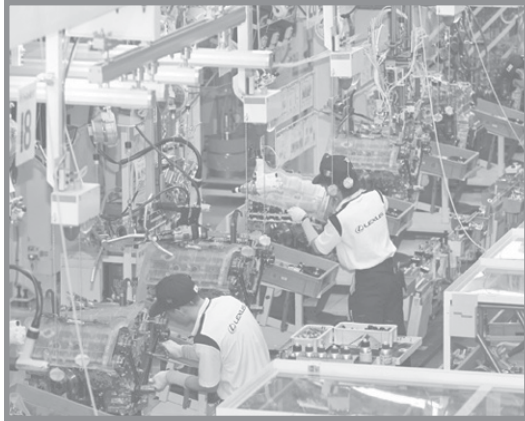
Sumber: www.qualitysystem.wordpress.com.

Gambar 4.1.5
Mesin-mesin seperti ini adalah alat yang membantu kegiatan ekonomi.

4.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebutuhan

Kebutuhan adalah suatu keinginan untuk memiliki dan menikmati barang dan jasa, yang pemuasannya bersifat jasmani dan rohani. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kebutuhan itu antara lain sebagai berikut.

a. Pendidikan

Perbedaan tingkat pendidikan membedakan kebutuhan seseorang. Misalnya, mahasiswa memiliki kebutuhan yang berbeda dengan siswa sekolah dasar. Tidak hanya pendidikan yang **sedang** dijalani, namun juga pendidikan yang **sudah** dijalani. Misal: kamu memeliki kebutuhan yang berbeda dengan adikmu yang masih TK dan kakakmu yang sudah kuliah.

b. Penghasilan

Penghasilan direktur yang besar tentunya berbeda dengan penghasilan karyawan biasa. Perbedaan penghasilan ini menimbulkan perbedaan kebutuhan. Misalnya dengan penghasilannya yang besar seorang direktur merasa membutuhkan rumah kedua atau villa agar ia dan keluarga dapat beristirahat. Sedangkan dengan penghasilan karyawan biasa yang kecil, seseorang merasa hanya membutuhkan rumah sederhana agar dirinya dan keluarganya dapat berteduh.

c. Lingkungan

Misalnya, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Masyarakat di daerah pegunungan cenderung memakai pakaian tebal dan menyantap makanan yang hangat dan berkadar lemak tinggi. Sedangkan masyarakat di daerah pantai kurang membutuhkan pakaian tebal dan cenderung menyukai makanan yang segar dan minuman dingin.

d. Waktu/musim

Waktu atau musim juga memengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan di musim kemarau akan berbeda dengan kebutuhan di musim penghujan. Misalnya, di musim penghujan banyak pedagang yang menjual payung dan jas hujan karena pada musim ini banyak orang yang memerlukan kedua barang tersebut. Akan tetapi tidak demikian yang terjadi di musim kemarau.

e. Agama

Masing-masing umat bergama juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, umat Islam membutuhkan perlengkapan sholat dalam menjalankan ibadah. Umat Kristiani membutuhkan pohon Natal menjelang perayaan Natal.

f. Status sosial

Pejabat pemerintahan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan karyawan. Selebritis misalkan, memiliki kebutuhan untuk selalu tampil mewah dengan barang-barang bermerek ketimbang karyawan biasa.

4.1.4 Pengelompokan Kebutuhan Manusia

Kebutuhan manusia dapat digolongkan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek.

A. Menurut tingkat kepentingannya

Menurut tingkat kepentingannya kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- Kebutuhan primer (kebutuhan pokok). Kebutuhan primer bersifat mutlak harus dipenuhi. Jika salah satu kebutuhan ini tidak

terpenuhi maka kehidupan seseorang dikatakan tidak layak. Contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah, buku tulis bagi pelajar, dan jala bagi nelayan.

- Kebutuhan sekunder. Kebutuhan kedua atau kebutuhan yang akan dipenuhi sesudah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder menuntut agar dipenuhi karena manusia ingin hidup bahagia, merasa layak diterima dalam masyarakat, dihormati, dan sukses. Contoh kebutuhan sekunder adalah komputer, televisi, radio, kipas angin, dan sebagainya.
- Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah. Pemenuhan kebutuhan ini bukan karena manfaatnya, tetapi karena ambisi orang untuk meningkatkan prestisenya di mata masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini biasanya didukung oleh tingkat penghasilan yang tinggi. Misalnya, mobil mewah, parabola, peralatan golf, dan lain sebagainya.

B. Menurut waktu pemenuhannya

Menurut waktu pemenuhannya kebutuhan dikelompokkan menjadi:

- Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak boleh ditunda-tunda. Contoh: obat ketika sakit, payung ketika turun hujan, makanan ketika lapar, dan lain sebagainya.
- Kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan sekarang tetapi digunakan untuk masa yang akan datang. Contoh: pendidikan, asuransi, tabungan, dan lain-lain.

C. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, kebutuhan dikelompokkan menjadi kebutuhan rohani dan jasmani.

- Kebutuhan rohani. Kebutuhan ini mencakup penyegaran intelektual (pengetahuan), kejiwaan, dan moral (perilaku). Contoh: kasih sayang, rekreasi, berdoa, hiburan, dan lain-lain.
- Kebutuhan jasmani, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan dan penampilan fisik manusia. Contoh: kebersihan lingkungan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain.

D. Menurut subjeknya

Menurut subjeknya kebutuhan dibedakan menjadi dua, yakni:

- Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi secara perorangan atau individu. Kebutuhan ini berhubungan dengan selera dan pilihan. Contohnya sikat gigi, pakaian, buku, tas, sepatu, makanan, minuman, dan lain-lain.
- Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan kepentingan bersama dalam masyarakat. Jadi kebutuhan tersebut dipenuhi bersama-sama. Contoh: kelas, lapangan sepak bola, jalan raya, angkutan umum, tempat hiburan, dan lain-lain.

Sumber: *Majalah Tempo, Oktober 2007*

Gambar 4.1.6
Taman Menteng di Jakarta. Taman adalah ruang terbuka hijau yang bisa diakses semua orang tanpa dipungut bayaran. Adanya taman di kota sangat penting baik untuk memperbaiki lingkungan hijau kota sekaligus sebagai sarana rekreasi warga.

4.1.5 Pengelompokan Alat Pemuas Kebutuhan

Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan tersebut dapat berupa barang atau jasa. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud (berupa benda) sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan tidak berwujud (berupa pelayanan).

Alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan kelangkaan, tujuan penggunaan, dan fungsi pemakaian.

A. Menurut kelangkaannya

Menurut kelangkaannya alat kebutuhan dibedakan menjadi tiga.

- Benda bebas (non ekonomis), yaitu benda yang jumlahnya tidak terbatas sehingga untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan/biaya. Contoh: udara, sinar matahari, air hujan, dan sebagainya.
- Benda ekonomi, yaitu benda-benda yang jumlahnya terbatas atau sudah diolah/ditangani manusia sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan/biaya. Contoh: pakaian, kendaraan, alat tulis, dan lain-lain.
- Benda *ilith*, yaitu benda yang berguna bila jumlahnya mencukupi, tapi berbahaya bila jumlahnya berlebihan. Contoh: air pada waktu banjir, api pada waktu kebakaran.

B. Menurut tujuan penggunaan

Menurut tujuan penggunaannya, alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi dua.

- Benda produksi, adalah benda atau alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan benda lain, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Benda ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan karena benda ini akan digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contoh: traktor, mesin jahit, dan lain sebagainya.
- Benda konsumsi/siap pakai, adalah benda yang langsung kita gunakan untuk memuaskan kebutuhan. Contoh: buku, seragam bagi anggota TNI, jasa perias pengantin, dan lainnya.

Adabenda yang bisa menjadi barang konsumsi dan produksi. Komputer jika digunakan untuk main *game* termasuk benda produksi, jika digunakan untuk membuat buku termasuk benda produksi.

C. Menurut hubungannya dengan barang lain

Menurut hubungannya dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- Benda substitusi, adalah benda-benda yang bersifat saling menggantikan dalam penggunaannya. Contoh: beras dengan jagung, komputer dengan mesin tik, minyak tanah dengan gas.
- Benda komplementer, adalah benda yang bersifat saling melengkapi. Apabila tidak digunakan bersama-sama, barang-barang tersebut tidak berguna atau kurang berguna. Contoh: buku dengan pensil, kopi dengan gula, jarum dengan benang, dan gas dengan kompor gas.

RANGKUMAN

1. Kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas. Keterbatasan sumber daya tersebut dinamakan kelangkaan.
2. Karena sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia jumlahnya terbatas maka manusia perlu melakukan tindakan alternatif dengan membuat skala prioritas.
3. Sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.
4. Perbedaan kebutuhan antarmanusia dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan, waktu/musim, agama, status sosial, dan penghasilan.
5. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi:
   - berdasarkan tingkat kepentingan:
     - ☑ kebutuhan primer;
     - ☑ kebutuhan sekunder;
     - ☑ kebutuhan tersier.
   - berdasarkan waktu pemenuhan:
     - ☑ kebutuhan masa kini;
     - ☑ kebutuhan masa datang.
   - berdasarkan sifat:
     - ☑ kebutuhan jasmani;
     - ☑ kebutuhan rohani.
6. Alat pemuas kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi:
   - berdasarkan kelangkaan:
     - ☑ benda bebas
     - ☑ benda ekonomi
     - ☑ benda *ilith*
   - berdasarkan tujuan penggunaan:
     - ☑ benda produksi
     - ☑ benda konsumsi
   - berdasarkan fungsi dalam pemakaian:
     - ☑ benda substitusi
     - ☑ benda komplementer

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Kerjakan tugas berikut dalam sebuah kelompok!

1. Coba kalian daftar kebutuhan-kebutuhan dari seorang petani, presiden, karyawan, guru, pemulung, pengamen, penduduk di pantai, penduduk di pegunungan, dan kebutuhan kalian sendiri. Bandingkan kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang. Buat kesimpulan tentang apa yang menyebabkan perbedaan kebutuhan di antara mereka!
2. Saat ini pemerintah sedang menggalakan konversi BBM, yakni mengganti minyak tanah dengan gas. Pemerintah berusaha mendorong masyarakat agar menggunakan gas. Upaya pemerintah untuk mendorong

masyarakat menggunakan gas adalah dengan membagikan kompor gas dan tabung gas gratis kepada masyarakat. Apakah upaya pemerintah tersebut dapat mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar minyak? Berdasarkan hubungannya dengan benda lain gas dan minyak tanah termasuk benda ... .

II. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Motor bagi tukang ojek merupakan benda produksi.
2. Kamera *digital* bagi siswa SMP adalah benda kebutuhan tertier.
3. Beras merupakan benda *ilith*, karena berbahaya jika persediaannya sedikit.

III. Salinlah di buku tugasmu kemudian lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi disebut ... .
2. Alat pemenuhan kebutuhan manusia dapat berupa ... dan ... .
3. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya, dapat dikatakan ... .
4. Yang merupakan masalah pokok ekonomi adalah ... .
5. Menurut pengertian ekonomi, barang adalah ... .
6. Bensin dengan motor merupakan jenis barang ... .
7. Untuk membantu keuangan keluarganya, Ibu Intan membeli mixer dan oven untuk membuat kue yang dijual di toko Pak Dimas. Berdasarkan tujuan penggunaannya mixer dan oven digolongkan sebagai barang ... .
8. Air yang sudah ditawarkan dan pasir di toko material tergolong benda ... .
9. Benda yang berguna bila jumlahnya mencukupi tetapi berbahaya/merugikan bila jumlahnya berlebihan disebut ... .
10. Kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya disebut ... .

IV. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan dan jelaskan tiga kelompok sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa!
2. Mengapa sumber daya alam Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia?
3. Mengapa sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia dikatakan terbatas?
4. Sebutkan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia!
5. Apakah yang dimaksud dengan benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilith?
6. Setiap daerah di negara kita, memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Sebutkan beberapa daerah di Indonesia dan sumber daya alam yang dihasikannya!
7. Jelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam di setiap daerah di Indonesia!

V. Studi Kasus

Perhatikan gambar di bawah ini dan jawab pertanyaannya!

1.

Sumber gambar: *www.blst.co.id*

Alat tulis

a. Alat tulis termasuk bagi seorang pelajar termasuk kebutuhan ... .
b. Alat tulis bagi seorang nelayan dan petani termasuk kebutuhan ... .
c. Apakah kesipulan yang dapat kamu abil dari hasil jawabanmu di atas?

2.

Sumber: *kompas, 4 Oktober 2007*

Mengantre minyak tanah.

a. Sebutkan benda subsitusi bagi minyak tanah jika hendak digunakan untuk memasak!
b. Sebutkan benda komplementer dari minyak tanah!
c. Bisa dikategorikan menjadi benda apakah di atas, jika melihat kelangkaannya? Jelaskan pendapatmu!
c. Apakah tujuan penggunaan barang tersebut bagi seorang penjual ayam goreng? Jelaskan pendapatmu!

4.2 Pelaku-pelaku Ekonomi

Perilaku Konsumen Industri Telekomunikasi

Mengganti nomor dan hand phone (HP) sudah menjadi hal biasa. Alasannya bisa bermacam-macam. Untuk HP, pergantian dilakukan karena alasan hilang atau sekadar ingin mengganti model baru agar bisa dikatakan canggih. Sedangkan pergantian nomor, bisa karena ingin sekadar menelpon lebih hemat. Mengingat, di beberapa outlet penjualan harga nomor perdana lebih murah dibandingkan harga isi ulang untuk nilai pulsa yang sama.

Perilaku konsumen di industri telekomunikasi ini memang menarik untuk dipahami. Karena industri ini memiliki nilai pasar yang sangat besar. Pemain yang terlibat di industri ini pun terbilang banyak. Mulai dari operator telekomunikasi, perusahaan penyedia HP, sampai dengan outlet yang jumlahnya sangat banyak. Untuk itu, mengetahui bagaimana sebenarnya perilaku konsumen dalam industri ini sangat penting.

Misalnya dengan mengetahui alasan sebenarnya konsumen mengganti HP. Atau berapa rata-rata konsumen mengalokasikan dananya untuk pembelian pulsa. Dan juga, banyak hal lainnya yang diperlukan untuk membuat strategi yang lebih ampuh agar dapat memenangi pertarungan yang semakin ketat.

Sumber: *Yoki Kuncoro, 30 April 2008 . Dalam: www.kolumnis.com*

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Fenomena apa yang digambarkan pada artikel di atas?
2. Apakah perilaku konsumen pada artikel di atas dapat dikatakan rasional?
3. Bagaimana dengan perilaku kalian sebagai salah seorang konsumen industri telekomunikasi?
4. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan para pengusaha operator seluler yang bersaing menurunkan tarif percakapan dan SMS?

Seperti telah dibahas dalam subbab sebelumnya bahwa manusia akan selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan alat atau sarana tertentu. Ada tiga macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kita kenal dengan istilah pelaku ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi kita mengenal empat pelaku ekonomi, yaitu:

1. Rumah Tangga Konsumen (RTK)
2. Rumah Tangga Produsen (RTP)
3. Pemerintah
4. Masyarakat luar negeri

Keempat pelaku ekonomi tersebut saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi.

4.2.1 Rumah Tangga Konsumen (RTK)

Selaku pelaku ekonomi RTK mempunyai peran ganda, yakni sebagai konsumen dan pemilik utama faktor produksi. Sebagai seorang konsumen RTK mengonsumsi barang/jasa yang diproduksi oleh produsen. Sedangkan selaku pemilik faktor produksi RTK menyediakan faktor-faktor produksi yang dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Misalnya menyediakan tenaga kerja, modal, lahan/alam, dan kewirausahaan.

Kegiatan utama yang dilakukan pelaku ekonomi RTK adalah melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan-kebutuhan hidup itu antara lain sebagai berikut.

- Kebutuhan barang-barang konsumsi.
- Kebutuhan pendidikan.
- Kebutuhan untuk menabung dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut RTK memerlukan suatu pengorbanan. Yang dimaksud dengan pengorbanan ialah sejumlah uang. Pengorbanan itu dapat dilakukan jika manusia mempunyai penghasilan/penerimaan. Sumber penghasilan RTK bisa bersifat tetap, misalnya gaji atau bunga tabungan bank; dan bersifat tidak tetap, misalnya komisi dari menjadi perantara jual beli mobil.

Telah disebutkan di atas bahwa untuk memenuhi kebutuhannya konsumen membutuhkan pendapatan. Pendapatan konsumen berasal dari produsen karena meyerahkan faktor-faktor produksi. Berikut ini beberapa sumber pendapatan RTK.

- Upah/gaji sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi tenaga kerja.

- Pendapatan bunga sebagai balas jasa atas penyerahan modal.
- Pendapatan sewa sebagai balas jasa atas penyerahan tanah (menyewakan tanah)
- Keuntungan atas penyerahan faktor produksi kewirausahaan.

Sumber: *Majalah Tempo, 2002*

Gambar 4.2.1
Salah satu penerimaan RTK adalah dari bunga tabungan ataupun deposito di bank

4.2.2 Rumah Tangga Produsen (RTP)

Rumah Tangga Produsen (RTP) atau produsen disebut juga perusahaan. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian baik di negara berkembang maupun di negara maju. Perusahaan besar dan kecil dapat dijumpai di berbagai tempat yang menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen.

Seseorang atau sekelompok orang yang mengembangkan perusahaan disebut pengusaha. Dengan kata lain, pengusaha ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyatukan atau mengombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang efisien guna mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Seorang pengusaha harus memiliki sifat-sifat berikut ini.

- Memiliki pengetahuan yang luas.
- Mempunyai jiwa inovatif, artinya harus dapat menemukan dan memperkenalkan gagasan, metode, dan hal-hal baru kepada para bawahannya.
- Terbuka dalam menerima kritik dan saran.
- Mempunyai jiwa kepemimpinan.
- Dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Para pengelola perusahaan memproduksi barang dan jasa bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi untuk dijual kepada mereka yang membutuhkan (RTK). Dari hasil penjualan barang dan jasa itu mereka memperoleh keuntungan. Tidak jarang mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan motif mengejar keuntungan (*profit-oriented*). Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin cepat pula perusahaan dapat berkembang. Disamping itu perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan pajak dan pungutan-pungutan wajib lainnya yang dibayarkan kepada pemerintah.

Untuk berproduksi perusahaan harus mengeluarkan sejumlah dana (biaya) agar faktor-faktor produksinya dapat dikelola secara optimal. Dana atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bermacam-macam, antara lain sebagai berikut.

- Biaya untuk pembelian aset perusahaan, misalnya lahan, mesin-mesin, kendaraan, pembuatan pabrik, kantor, dan lain lain.
- Biaya operasional misalnya untuk membeli bahan mentah, upah tenaga kerja, pembelian bahan bakar kendaraan, pengepakan, pengiriman barang, dan lain-lain.
- Biaya inventaris, misalnya biaya perawatan mesin-mesin, pemeliharaan bangunan, asuransi kendaraan, dan lain-lain.
- Biaya umum misalnya untuk pembayaran telepon, listrik, pelatihan, dan lain-lain.

Berdasarkan lapangan atau bidang usahanya, perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi lima golongan berikut.

- Perusahaan pertambangan, yaitu perusahaan yang kegiatannya menggali sumber-sumber alam yang terpendam di dalam bumi.
- Perusahaan pertanian, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah tanah dengan bantuan kesuburan tanah atau disebut juga dengan kegiatan budidaya (penanaman dan pemeliharaan). Misalnya, pertanian padi, sayur-sayuran, perkebunan, peternakan, dan lain-lain.
- Perusahaan industri, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya, pabrik sepatu, pabrik ban, pabrik tekstil, dan lain-lain.
- Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan tukar menukar atau jual beli barang. Misalnya, pertokoan, swalayan, pedagang kopi, perusahaan ekspor impor, dan lain-lain.

- Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan. Misalnya, konsultan hukum, dokter, salon, dan lembaga keuangan.

Kelima golongan perusahaan itu ada yang merupakan badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Selain itu, ada juga yang disebut dengan koperasi. Semuanya merupakan pelaku ekonomi yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara.

Sumber:warta ekonomi no 15 tahun 28 juli 06

Gambar 4.2.2
Pertokoan adalah salah satu contoh rumah tangga produsen.

4.2.3 Pemerintah

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi mengandung pengertian lembaga keuangan nonswasta/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain departemen-departemen pemerintahan, badan pemerintah yang mengatur penanaman modal, Bank Sentral, Parlemen, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi bertugas untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran orang banyak. Pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusahakan kegiatan yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dana atau pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah dapat merealisasikan rencana-rencana pembangunan. Adapun tujuan pemerintah mengeluarkan dana tersebut ialah sebagai berikut.

1. ***Pengeluaran yang bersifat investasi***

   Pengeluaran ini ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Misalnya jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan lapangan terbang.

2. ***Pengeluaran yang menunjang kualitas pendidikan***

   Pengeluaran ini misalnya pengeluaran untuk mendirikan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, badan-badan penelitian.

sumber: Kompas, 19 Jan 2006

Gambar 4.2.3
Perpustakaan dan bangunan sekolah merupakan pengeluaran yang menunjuang pendidikan, dan selanjutnya menunjang kualitas sumber daya manusia.
Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo tengah menengok SD Amaro di Sulawesi Selatan.

3. ***Pengeluaran yang bersifat melindungi dan mengamankan***

   Pengeluaran ini misalnya pengeluaran untuk membiayai TNI dan polisi, pengeluaran kesehatan (penyediaan obat-obatan dan sarana kesehatan di rumah sakit milik pemerintah).

4. ***Pengeluaran yang bersifat menguntungkan***

   Pengeluaran ini ditujukan untuk memperbaiki sarana perdagangan (kegiatan ekspor dan impor).

5. ***Pengeluaran untuk memperlancar kegiatan perekonomian***

   Pengeluaran ini ditujukan untuk pengadaan jasa angkutan darat (bus dan kereta api), telkom, pos, dan lain-lain.

Untuk membiayai usaha yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat itu, pemerintah memerlukan penerimaan. Penerimaan tersebut berasal dari masyarakat.

Penerimaan/pendapatan terbesar pemerintah berasal dari sektor pajak. Pajak yang dibayarkan tersebut berasal dari berbagai segi. Ada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak atas barang-barang, dan lain-lain. Untuk melengkapi pengetahuan kalian mengenai jenis-jenis pajak yang ada, cobalah kalian tanyakan kepada orang tua kalian, pajak apa saja yang harus mereka bayar?

Penerimaan/pendapatan pemerintah yang bukan berasal dari sektor pajak ialah berasal dari pungutan-pungutan wajib seperti royalti yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam, perolehan keuntungan finansial dari perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN), penerimaan yang berasal dari minyak bumi dan gas, dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah/negara dapat kita lihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4.2.4 Kegiatan (Siklus Ekonomi)

A. Siklus ekonomi pada perekonomian tertutup

Setelah membahas satu per satu mengenai para pelaku ekonomi (RTK, RTP, dan Pemerintah) kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat ialah suatu sistem interaksi yang melibatkan arus uang dan tingkat daya produksi antara konsumen, produsen, dan pemerintah. Keterkaitan itu melibatkan sumber-sumber keuangan, sumber-sumber riil (tenaga kerja dan modal), serta barang dan jasa yang mengalir dalam suatu pola melingkar (siklus).

Dalam sebuah perekonomian produsen, konsumen, dan pemerintah berinteraksi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Produsen menghasilkan barang dan jasa. Konsumen mengonsumsi barang dan jasa. Pemerintah berperan sebagai pengendali perekonomian.

Konsumen sebagai RTK membutuhkan barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen (RTP). Kebutuhan tersebut menimbulkan arus barang dan jasa dari RTP ke RTK dan arus uang dari RTK ke RTP. Arus uang dari RTK ke RTP disebut sebagai arus pembelanjaan konsumen.

Produsen memerlukan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang kegiatan produksinya. Faktor-faktor produksi tersebut hanya dimiliki oleh RTK. Akibatnya RTK sebagai pemilik faktor-faktor produksi mendapatkan sejumlah balas jasa dari RTP. Arus uang/pendapatan dari RTP ke RTK disebut sebagai pendapatan/penghasilan masyarakat.

Pemerintah ikut mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi dengan mengadakan transaksi baik dengan RTK maupun RTP. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai tujuan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah melakukan berbagai macam pengeluaran. Pengeluaran itu antara lain membutuhkan tenaga kerja dari RTK dan membutuhkan barang/jasa dari RTP. Pengeluaran pemerintah itu merupakan arus uang dari pemerintah ke RTP dan RTK. Penerimaan pemerintah berupa arus uang. Arus uang ke pemerintah dari RTP dan RTK sebagian besar berupa pajak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan uang untuk RTP dan RTK berupa premi dan subsidi, guna menunjang dan membantu RTP dan RTK.

Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan **4.2.1** berikut!
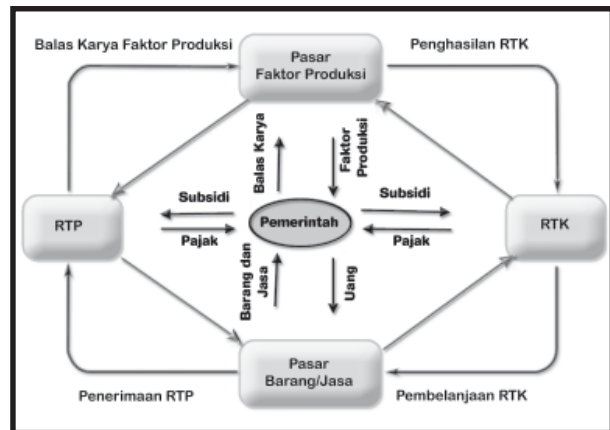
Dok. *Ilustrasi bagian produksi 2008*

Keterangan:

1. Tiga pihak dalam arus melingkar ekonomi: RTP, RTK, dan Pemerintah.
2. Arus faktor produksi dari RTK ke RTP diimbangi oleh arus uang sebagai balas karya dari RTP ke RTK. Bagi konsumen uang ini merupakan penghasilan. Sedangkan bagi produsen merupakan biaya produksi.
3. Arus uang dari RTK ke RTP sebagai arus pembelanjaan diimbangi oleh arus barang dan jasa dari RTP ke RTK. Hal ini menyebabkan terbentuknya harga melalui penawaran dan permintaan akan barang dan jasa di pasar.
4. Arus faktor produksi dari RTK ke pemerintah diimbangi oleh arus uang sebagai balas karya.
5. Arus uang dari pemerintah ke RTP sebagai pembelanjaan diimbangi oleh arus barang dan jasa dari RTP ke pemerintah. Transaksi ini diadakan melalui pasar barang dan jasa.
6. Pemerintah memberikan subsidi pada RTP dan RTK. Sebaliknya RTP dan RTK membayar pajak pada pemerintah.

B. Siklus ekonomi pada perekonomian terbuka

Hampir semua negara berinteraksi dengan masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi di Indonesia juga berinteraksi dengan masyarakat luar negeri. Hal ini terjadi karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu kebutuhan faktor produksi tidak sepenuhnya tersedia di dalam negeri.

Pada dasarnya interaksi dengan masyarakat luar negeri adalah interaksi dalam pasar barang

dan pasar faktor produksi. Produsen dapat mencari faktor produksi dari luar negeri atau menjual barang dan jasa ke luar negeri. Konsumen dapat membeli barang dan jasa dari luar negeri atau menyerahkan faktor produksi pada produsen di luar negeri.

Dok. Ilustrasi bagian produksi 2007

Gambar 4.2.5
Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antarnegara adalah ekspor.

Sumber: Harian Kompas, 6 April 2006

Gambar 4.2.4
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekjen Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik PBB (UNESCAP) Kim Haksu (kanan) saat pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri UNESCAP, April 2006 lalu. Hal ini adalah bentuk dari kerja sama internasional di bidang ekonomi.

Interaksi di pasar barang dan jasa misalnya memberikan pelayanan jasa penerbangan internasional, menjual ukiran, menjual batik, membeli minyak mentah, membeli alat elekronik, dan lain sebagainya. Sedangkan interaksi di pasar faktor produksi, misalnya pengiriman tenaga ahli untuk bekerja di luar negeri, penanaman modal di luar negeri, penjualan rotan, dan lain sebagainya.

Interaksi masyarakat Indonesia dengan negara lain terwujud dalam perdagangan internasional. Indonesia melakukan perdagangan dengan hampir seluruh negara di dunia.

Dalam perdagangan internasional tercakup dua kegiatan yaitu ekspor dan impor. Ada beberapa manfaat dari kegiatan ekspor impor di antaranya, sebagai berikut.

- Tercukupinya kebutuhan akan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, atau sudah dapat memproduksi tetapi hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.
- Menambah pendapatan negara dari bea yang dibayarkan oleh eksportir maupun importir.
- Menambah devisa negara, khususnya untuk perdagangan ekspor.

Secara umum manfaat dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

- Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa.
- Dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah.
- Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri.
- Memperluas lapangan kerja.
- Merupakan sumber penerimaan bagi negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional memiliki banyak dampak bagi sebuah negara. Dampak positif adanya perdagangan internasional adalah:

1. Masyarakat suatu negara mudah mendapatkan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri.
2. Produsen dalam negeri akan mudah mendapatkan faktor-faktor produksi yang tidak tersedia di dalam negeri.

Adapun dampak negatif adanya perdagangan internasional adalah:

1. Produsen dalam negeri harus menghadapi persaingan dengan produsen luar negeri. Jika kalah bersaing, produk di dalam negeri akan dikuasai produsen asing.
2. Pemilik faktor produksi di dalam negeri akan bersaing dengan pemilik faktor produksi di luar negeri. Jika negara tersebut lemah maka akan kalah bersaing dengan pihak asing.

   Coba kamu perhatikan kondisi di negara kita! Perusahaan-perusahaan besar biasanya mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Hal itu bukan berarti tidak ada ahli di dalam negeri, namun kualitas dari tenaga ahli dari luar negeri lebih tinggi. Ini menunjukan bahwa kita kalah bersaing dengan pihak luar negeri.

Pernahkah kamu memikirkan, apa yang akan terjadi seandainya tidak ada perdagangan internasiona? Ada beberapa dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perdagangan internasional.

Dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perdangangan internasional adalah:

1. Masyarakat dalam negeri hanya dapat mengonsumsi produk dari produsen dalam negeri. Kemungkinan besar konsumen tidak

puas karena tidak semua kebutuhannya dapat dipenuhi.

2. Produsen tidak bisa mendapatkan faktor produksi yang belum tersedia di dalam negeri. Jika hal itu terjadi, produsen tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi.
3. Produsen akan kesulitan menjual hasil produksi, jika tidak habis dikonsumsi di dalam negeri. Pada akhirnya produsen hanya memproduksi sedikit sehingga sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kita mebutuhkan kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Dengan kata lain kita harus melaksanakan perekonomian terbuka. Berikut ini akan diuraikan bagaimana siklus ekonomi pada perekonomian terbuka. Untuk lebih memudahkan dalam memahaminya perhatikan **bagan 4.2.2**!

Dok. Ilustrasi bagian produksi 2008
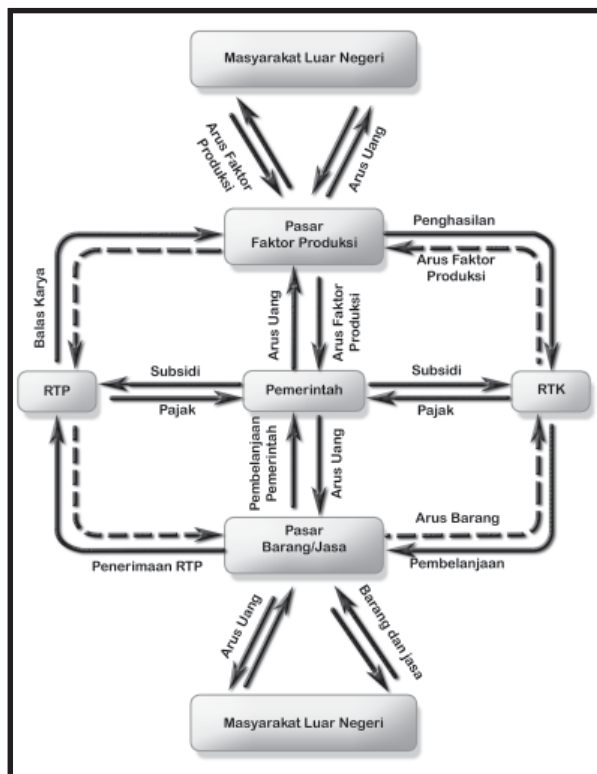
Keterangan:

1. Empat pihak dalam siklus ekonomi: RTP, RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri.
2. Arus faktor produksi dari RTK ke RTP diimbangi oleh arus uang sebagai balas karya dari RTP ke RTK. Bagi konsumen uang ini merupakan penghasilan. Sedangkan bagi produsen merupakan biaya produksi.
3. Arus uang dari RTK ke RTP sebagai arus pembelanjaan diimbangi oleh arus barang dan jasa dari RTP ke RTK.
4. Arus faktor produksi dari RTK ke pemerintah diimbangi oleh arus uang sebagai balas karya.
5. Arus uang dari pemerintah ke RTP sebagai pembelanjaan diimbangi oleh arus barang dan jasa dari RTP ke pemerintah. Transaksi ini diadakan melalui pasar barang dan jasa.
6. Pemerintah memberikan subsidi pada RTP dan RTK. Sebaliknya RTP dan RTK membayar pajak pada pemerintah.
7. Arus faktor produksi dari masyarakat luar negeri ke RTP diimbangi oleh arus uang sebagai balas karya dari RTP ke masyarakat luar negeri.
8. Arus uang dari masyarakat luar negeri ke RTP sebagai arus pembelanjaan diimbangi oleh arus barang dan jasa dari RTP ke masyarakat luar negeri.

4.2.5 Pelaku Ekonomi Badan Usaha

Saat ini kita akan membahas lebih mendetail tentang pelaku ekonomi badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Pelaku ekonomi badan usaha dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Untuk lebih jelasnya marilah kita pelajari satu persatu.

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi.

Ciri-ciri Perjan

1) Tidak mencari laba, usahanya untuk melayani kepentingan umum.
2) Merupakan bagian dari suatu departemen.
3) Modalnya sepenuhnya milik pemerintah.
4) Pemimpin dan karyawannya termasuk PNS.
5) Memperoleh fasilitas negara

Sekarang sudah tidak ada BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan. Dulu PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) dan Perjan Pegadaian berben-

tuk Perjan. Saat ini PJKA diubah menjadi PT dan Perjan pegadaiaan diubah menjadi Perum Pegadaian.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-ciri Perum

1) Melayani kepentingan umum dan mencari laba.
2) Modal sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.
3) Pemimpin dan karyawan berstatus pegawai perum atau PNS
4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan negara.
5) Perum membuat laporan keuangan dan disampaikan kepada pemerintah.

Contoh Perum adalah Perum Pegadaian, Perum Damri, dan Perum Perumnas.

c. Perusahaan Perseroan

Perusahaan Perseroan atau Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan Persero pertama, mencari keuntungan dan kedua, memberi pelayanan kepada umum.

Ciri-ciri Perusahaan Persero

1) Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Modal minimal 51% dimiliki pemerintah.
2) Tujuan utamanya mencari keuntungan namun harus tetap memperhatikan unsur pelayanan pada masyarakat.
3) Biasanya berbentuk perseroan terbatas.
4) Tidak mendapatkan fasilitas negara secara khusus..
5) Karyawan berstatus pegawai swasta.
6) Tidak memperoleh fasilitas negara

Saat ini BUMN di Indonesia sebagian besar berbentuk persero. Contoh Persero adalah PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT. KAI, dan PT. PLN.

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta dan dikelola oleh pihak swasta. Berikut ini beberapa jenis BUMS yang ada di Indonesia.

a. Badan usaha perseorangan

Badan usaha perseorangan merupakan badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang.

Ciri-ciri badan usaha perseorangan

1) Dimiliki oleh perorangan.
2) Pemilik mengelola sendiri perusahaannya secara langsung.
3) Kegiatan usaha ditentukan berdasarkan keputusan pemilik.
4) Keuntungan diperoleh pemilik.
5) Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan.

b. Firma

Firma merupakan badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih (persekutuan).

Ciri-ciri firma

1) Dimiliki oleh 2 orang atau lebih.
2) Pemilik mengelola bersama-sama perusahaannya.
3) Kegiatan usaha ditentukan berdasarkan keputusan bersama (pemilik).
4) Keuntungan dibagi kepada pemilik berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan.
5) Pemilik bertanggung jawab secara penuh terhadap perusahaan, termasuk dalam melunasi segala utang perusahaan jika perusahaan gulung tikar dan harta perusahaan tidak cukup untuk melunasi semua utang.

c. Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer (CV) merupakan badan usaha yang dimilik oleh dua orang atau lebih. Dalam CV ada yang disebut sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap perusahaan.

Ciri-ciri persekutuan komanditer (CV)

1) Dimiliki oleh 2 orang atau lebih.
2) Ada yang disebut sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan pemilik yang turut menjalankan usaha; sedangkan sekutu pasif adalah pemilik yang hanya menanamkan modalnya saja. Ada kalanya sekutu aktif tidak ikut menanamkan modal, namun hanya memberikan keahlian *(skill)* yang ia miliki.
3) Segala kegiatan usaha ditentukan berdasarkan keputusan sekutu aktif atau pengelola.
4) Segala keuntungan dibagi kepada pemilik berdasarkan kontribusi terhadap perusahaan, baik berupa modal maupun keahlian.
5) Sekutu aktif bertanggung jawab secara penuh terhadap perusahaan. Jadi, ketika perusahaan gulung tikar dan masih ada utang yang ditanggung perusahaan, ia harus melunasinya dengan harta pribadi.

6) Tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada modal yang telah ia tanamkan ke dalam perusahaan.

d. Perseroan Terbatas

Perseroan adalah perusahaan yang semua modalnya berbentuk saham.

Ciri-ciri perseroan terbatas

1) Pemilik adalah para pemegang saham. Saham biasanya dijual pada bursa saham.
2) Modal diperoleh dari penjualan saham. Saham biasanya dijual lewat bursa saham.
3) Dipimpin dan dikelola oleh direksi yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Jadi, partisipasi pemilik terhadap pengelolaan badan usaha terbatas.
4) Pemilik mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan dalam bentuk saham.
5) Pemilik bertanggung jawab terhadap perusahaan hanya sebatas modal yang telah ditanamkan.

3. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan pelaku ekonomi yang berperan besar dalam perekonomian negara. Koperasi di Indonesia menurut UU no 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat dan juga sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai *soko guru*-nya.
- Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi berusaha menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia yang memang beraneka ragam jenisnya. Menurut sifat usahanya koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. *Koperasi Konsumsi*

Usaha koperasi ini ditujukan untuk menyediakan keperluan hidup sehari-hari bagi anggotanya. Tujuannya adalah sebagai berikut.

- ☑ Memperoleh barang-barang yang murah karena koperasi dapat membeli barang secara langsung dari produsen atau agen dalam jumlah besar.
- ☑ Mutu barang terjamin.
- ☑ Timbangan (ukuran) dapat dipercaya.
- ☑ Keuntungan yang diperoleh pada akhir tahun dibagi kepada para anggota sesuai dengan jumlah pembelian mereka.

Koperasi sekolah merupakan contoh koperasi konsumsi. Koperasi sekolah berusaha menyediakan barang-barang kebutuhan para siswa seperti alat tulis, makanan ringan, seragam, buku cetak, dan lain sebagainya.

2. *Koperasi Produksi*

Usaha koperasi ini ditujukan untuk menghasilkan barang atau produk secara bersama-sama. Pada umumnya koperasi jenis ini didirikan oleh produsen-produsen kecil. Misalnya, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perkebunan, dan lain-lain. Mereka bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dengan tujuan:

- ☑ mempertahankan harga barang produksi mereka agar tidak merosot;
- ☑ menghilangkan persaingan antarsesama anggota produsen;
- ☑ bekerja sama meningkatkan mutu dan jumlah barang-barang yang diproduksi.

3. *Koperasi Kredit*

Koperasi kredit disebut juga dengan koperasi simpan-pinjam. Usaha koperasi ini adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan.

Sumber: Maj. Tempo 28 Feb-3 Maret 08

Gambar 4.2.6
Koperasi Simpan Pinjam di Kutai, Kalimantan Timur.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut.

- ☑ Membantu keperluan kredit para anggota yang membutuhkan dengan syarat ringan.
- ☑ Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga terbentuk modal sendiri.
- ☑ Mendidik anggota untuk hidup hemat, dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk disimpan di koperasi.

4. ***Koperasi Jasa***

Koperasi ini memusatkan kegiatannya untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Contoh koperasi jasa adalah sebagai berikut.

- ☑ Koperasi jasa angkutan barang dan penumpang. Tujuannya memudahkan sarana jasa transportasi dengan tarif yang relatif murah.
- ☑ Koperasi jasa listrik. Pada umumnya bergerak di daerah-daerah yang belum terjangkau aliran listrik. Caranya dengan membeli mesin pembangkit tenaga listrik secara kolektif kemudian menyalurkan penerangan ke rumah-rumah para anggota dengan biaya yang relatif murah.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri berasal dari:

- simpanan pokok para anggota,
- simpanan wajib,
- simpanan sukarela dari para anggota
- dana cadangan yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha
- hibah, yaitu berupa bantuan yang didapat dari individu atau kelompok secara suka rela

Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain, dan sumber lain yang sah. Selain itu koperasi juga dapat menambah modal dari modal penyertaan pihak lain. Modal penyertaan itu bisa bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.

RANGKUMAN

1. Pelaku kegiatan ekonomi ada empat, yaitu:
   a. Rumah Tangga Konsumen (RTK);
   b. Rumah Tangga Produsen (RTP);
   c. Pemerintah;
   d. Masyarakat Luar Negeri.
2. Hubungan antara RTK, RTP, dan pemerintah adalah sebagai berikut: pemerintah membantu produsen, salah satunya ialah dengan menciptakan iklim yang baik dan kondusif dalam memperlancar kegiatan usahanya. Produsen dan konsumen membantu pemerintah dengan cara membiayai kegiatan di sektor pemerintah melalui aktivitas pembayaran pajak dan pungutan-pungutan wajib. Konsumen membantu produsen dengan cara menyediakan faktor-faktor produksi sehingga produsen dapat menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup konsumen.
3. RTK adalah pemilik faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Karena rumah tangga konsumen telah menyerahkan faktor produksi kepada perusahaan, maka:
   a. pemilik faktor alam menerima balas jasa berupa sewa tanah;
   b. pemilik faktor tenaga kerja menerima upah/gaji;
   c. pemilik faktor modal menerima bunga modal;
   d. pengusaha menerima laba usaha.
4. Perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari hasil penjualannya.
5. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah badan/lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi di dalam suatu negara.
6. Transaksi antara RTK dan RTP menyebabkan timbulnya arus barang dan jasa dari RTP ke RTK dan arus uang dari RTK ke RTP.
7. Arus faktor produksi mengalir dari RTK ke RTP. Sebaliknya, balas jasa mengalir dari RTP ke RTK sebagai pendapatan bagi RTK yang digunakan kembali untuk membeli berbagai macam kebutuhan konsumsi dan sebagian sisanya ditabung.
8. Pemerintah memberikan jasa, baik kepada RTK maupun kepada RTP. Untuk itu, pemerintah akan menerima pembayaran pajak dari RTK dan RTP.
9. Pajak merupakan sumber utama dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. RTK menyediakan tenaga kerja sebagai faktor produksi bagi RTP.
2. Dokter, salon, dan lembaga keuangan merupakan bagian dari perusahaan dagang.
3. Manfaat perdagangan internasional adalah untuk mematikan produksi dalam negeri.

II. Salin di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Yang dimaksud dengan pelaku ekonomi ialah ... .
2. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen merupakan balas jasa yang berasal dari ... .
3. Faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dimiliki oleh ... .
4. Pembelanjaan masyarakat yang menggunakan penghasilan bagi RTP merupakan ... .
5. Pada dasarnya kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi kegiatan ..., ..., dan ... .
6. Faktor produksi yang diberikan oleh Rumah Tangga Konsumen adalah ... .
7. Pemerintah akan menerima pembayaran dari RTK dan RTP atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah. Pembayaran dari RTK dan RTP tersebut berupa ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi?
2. Apa yang dimaksud dengan RTK sebagai penyedia faktor produksi?
3. Jelaskan peran RTP sebagai salah satu pelaku ekonomi!
4. Buatlah bagan hubungan antara pemerintah, RTP, dan RTK! Berilah keterangannya dengan kata-katamu sendiri!

IV. Unjuk Kerja

Kerjakan tugas ini dalam kelompok berisi enam orang.

1. Bagi kelompok menjadi dua kelompok kecil, lalu bagilah tugas:

   a. satu kelompok pergi ke pasar tradisional

   b. satu kelompok pergi ke mal
2. Amati kegiatan di dua pasar tersebut, dan sebutkan pelaku-pelaku ekonomi yang terdapat di kedua tempat tersebut. Jelaskan tugas-tugas mereka!
3. Bandingkan hasil yang kamu peroleh dari kedua pasar. Apakah terdapat perbedaan dan persamaan ciri-ciri? Sebutkan!
4. Tuliskan dalam kertas folio dan presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas!

4.3 Bentuk-bentuk Pasar

sumber: *ilustrasi bagian produksi, 2007*

Lihatlah gambar di atas! Gambar itu melukiskan kesibukan di sebuah pasar. Apakah yang ada dalam benakmu ketika kamu mendengar kata pasar? Kamu tentu membayangkan suatu tempat kumuh dan sumpek yang ramai penuh dengan hiruk-pikuk orang-orang. Para penjual yang sibuk menawarkan barang dagangannya, sementara para konsumen atau pembeli sibuk melihat dan mencari barang-barang yang akan dibelinya.

Pada subbab ini kita akan mempelajari pasar dan seluk beluknya. Akan tetapi sebelumnya cobalah diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan temanmu.

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pasar?
2. Apa yang menjadi syarat-syarat suatu tempat dikatakan pasar?
3. Bagaimana hubungan pasar dengan kegiatan distribusi?
4. Apakah peranan dan fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi?
5. Apa sajakah jenis-jenis pasar?

Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas!

Pada bab sub bab sebelumnya kalian sudah membahas tentang hubungan sumber daya dengan kebutuhan dan pelaku ekonomi. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang pasar.

Pada dasarnya semua sub bab ini memiliki keterkaitan. Manusia memiliki banyak kebutuhan karena itu dibutuhkan sumber daya untuk menghasikannya. Seseorang tidak dapat menghasilkan sendiri barang yang ia butuhkan oleh karena itu ia harus berinteraksi dengan pelaku ekonomi lain terutama produsen. Produsen tidak mungkin langsung menjual barang yang dihasilkan langsung pada konsumen. Konsumen tersebar dimana mana. Oleh karena itu maka dibutuhkan pasar sebagai sarana yang menghubungkan konsumen dengan produsen.

Pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan produsen dan konsumen, ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, dan antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen.

Pasar dapat ditemukan di setiap kota. Misalnya di Jakarta, kamu dapat menemukan Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, dan sebagainya. Di Yogyakarta, kamu dapat menemukan Pasar Beringharjo, Pasar Sentul, dan Pasar Demangan. Di Semarang kamu dapat menemukan Pasar Johar, di Tangerang kamu dapat menemukan Pasar Kemis, di Sulawesi Tenggara kamu dapat menemukan Pasar Wajo, dan lain-lain. Kamu semua tentunya pernah pergi ke pasar. Akan tetapi, ternyata ada banyak hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang pasar. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari tentang pasar.

4.3.1 Pengertian Pasar

Pasar merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Pasar secara sempit bisa diartikan sebagai tempat barang atau jasa diperjualbelikan. Pasar dalam pengertian tersebut disebut juga pasar dalam pengertian sehari-hari. Sedangkan pasar dalam arti luas, adalah proses di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan atau menetapkan harga di pasar. Pasar dalam arti sempit hanya menitikberatkan segi tempat. Sedangkan pasar dalam arti luas tidak hanya melihat tempatnya saja, tetapi juga melihat prosesnya, yaitu proses terjadinya jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan kesepakatan harga dan jumlah barang secara bersama-sama.

Menurut para ahli ekonomi pengertian pasar adalah suatu organisasi di mana pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari kedua pengertian di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenai syarat-syarat terbentuknya pasar. Syarat-syarat terbentuknya suatu pasar adalah sebagai berikut.

- Mempunyai tempat.
- Ada barang yang hendak diperjualbelikan.
- Adanya kegiatan interaksi antara pembeli dengan penjual.

4.3.2 Fungsi dan Peranan Pasar

A. Fungsi pasar

Ada tiga fungi pasar, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi.

a. Fungsi distribusi

Keberadaan pasar membawa kemudahan bagi produsen dalam rangka memperoleh barang-barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Selain itu, pasar merupakan tempat produsen menyalurkan barang-barang hasil produksinya. Pasar dikatakan berfungsi dengan baik, apabila proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan lancar.

b. Fungsi pembentukan harga

Di dalam pasar persaingan sempurna, harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya harga ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan yang dilakukan oleh pembeli dan penawaran yang dilakukan oleh penjual. Jadi, dalam hal ini pasar berfungsi sebagai alat dalam menentukan harga suatu barang atau jasa.

Sumber: *Maj Tempo 14 februari 2008*

Gambar 4.3.1

Keadaan di pasar tradisional. Tawar menawar harga tengah terjadi. Setelah terjadi kesepakatan harga, barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli.

c. Fungsi promosi

Pasar juga dapat berfungsi sebagai ajang atau sarana mempromosikan atau memperkenalkan nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian konsumen dapat mengetahui keberadaan barang tersebut. Misalnya meliputi jenis barang, kualitas barang, dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh barang tersebut sehingga konsumen menjadi tertarik atau termotivasi untuk melakukan pembelian atas barang-barang tersebut.

B. Peranan pasar

Selain fungsi, pasar juga memiliki peranan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peranan-peranan pasar tersebut adalah sebagai berikut.

a. Memungkinkan terjadinya perpindahan faktor produksi dari produsen ke konsumen

Kegiatan produksi ialah setiap usaha manusia untuk membuat suatu barang atau membuat pelayanan tertentu sehingga menjadi berguna atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan antara kegiatan produksi dengan pasar terletak pada kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam pasar. Misalnya, seorang kuli pasar menawarkan jasa untuk mengangkut barang-barang. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa telah terjadi perpindahan faktor produksi (tenaga kerja) dari kuli pasar tersebut kepada orang-orang yang menggunakan jasa kuli tersebut.
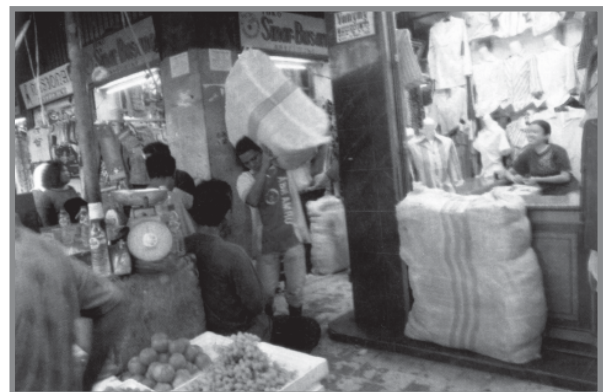
Sumber: *Maj Tempo, 18-24 Juli 2005*

Gambar 4.3.2

Seorang kuli membawakan barang di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

b. Memperlancar proses konsumsi bagi masyarakat

Konsumsi ialah kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang atau jasa atau mengurangi kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Pasar mempunyai peranan yang sangat besar bagi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Di dalam pasar, konsumen dapat membeli barang-barang kebutuhan hidup.

c. Memperlancar proses distribusi dari penjual ke pembeli

Kegiatan distribusi ialah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat besar dalam kegiatan distribusi. Dengan adanya pasar maka barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat disalurkan kepada konsumen.

4.3.3 Jenis-jenis Pasar

Pasar dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu macam-macam pasar ditinjau dari jenis barang yang diperjualbelikan, waktu berlangsungnya pasar, luas wilayah pasar, struktur pasar, dan dari fisiknya.

A. Pasar ditinjau dari jenis barang yang diperjualbelikan

Ditinjau dari jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi empat, yaitu:

a. Pasar komoditi

Pada pasar komoditi, barang-barang yang diperjualbelikan ada di tempat secara fisik (nyata) pada saat terjadinya transaksi. Contoh: pasar elektronik Glodok Jakarta, pasar pakaian jadi di Tanah Abang Jakarta, dan lain-lain.

b. Pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja menawarkan jasa tenaga kerja dengan sejumlah upah tertentu. Contoh: pasar tenaga kerja di Tarutung, Sumatera Utara.

c. Pasar uang

Pasar uang merupakan tempat diperdagangkannya dana-dana (kredit) dengan jangka waktu antara satu hingga dua belas bulan (dana jangka pendek).

d. Pasar modal

Pasar modal merupakan tempat diperdagangkannya dana-dana (kredit) dengan jangka waktu lebih dari satu tahun (dana jangka panjang). Atau sarana terorganisasi yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka panjang. Permintaan akan dana jangka panjang datang dari perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah untuk memulai atau memperluas usaha. Penawaran dana jangka panjang datang dari masyarakat melalui tabungan yang berada di bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Misalnya, saham-saham milik perusahaan-perusahaan yang telah *go-public*, misalnya saham PT Indosat, saham BCA, saham PT Indofood, saham PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan lain-lain.

Gambar 4.3.3
Saham milik sebuah bank swasta dijual untuk umum, melalui pasar modal.

B. Pasar ditinjau dari waktu kegiatannya

Ditinjau dari waktu kegiatannya, pasar dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Pasar harian

Pasar harian yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung setiap hari. Pasar jenis ini dapat kita temukan hampir di semua kota. Misalnya pasar harian ialah Pasar Senen, Pasar Minggu, Pasar Tanah Abang, dan pasar tradisional lainnya.

b. Pasar mingguan

Pasar mingguan ialah pasar yang hanya berlangsung sekali dalam seminggu. Pasar jenis ini biasanya terdapat di daerah pedesaan, di mana penjual dan pembeli berkumpul hanya sekali dalam seminggu. Jadi, masyarakat sudah harus menyediakan keperluan hidupnya untuk seminggu. Misalnya pasar di desa-desa yang hanya diselenggarakan tiap hari Jumat, pasar di desa-desa yang diselenggarakan hari Rabu, dan lain-lain.

c. Pasar bulanan

Pasar bulanan ialah pasar yang menyelenggarakan kegiatan sekali dalam sebulan. Pasar semacam ini umumnya kita jumpai di daerah-daerah perkebunan di wilayah transmigrasi. Biasanya penyelenggaraan pasar ini bertepatan dengan penerimaan gaji bagi kaum buruh.

d. Pasar tahunan

Pasar tahunan ialah pasar yang hanya berlangsung sekali dalam setahun. Pasar ini biasanya diselenggarakan untuk menyambut *event-event* tertentu. Misalnya, Pekan Raya Jakarta (PRJ).

C. Pasar ditinjau dari luas wilayah atau daerah pemasaran

Ditinjau dari luasnya wilayah pemasaran, pasar ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Pasar lokal

Pasar lokal ialah pasar tempat diperdagangkannya barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Contoh: Pasar Cakung, Pasar Depok, Pasar Ciputat, dan pasar-pasar lainnya yang ada di daerahmu masing-masing.

b. Pasar nasional

Pasar nasional ialah pasar tempat diperdagangkannya barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam wilayah suatu negara. Misalnya Pasar Tanah Abang di Jakarta merupakan tempat berbelanja para pembeli yang berasal dari berbagai pelosok tanah air.

Sumber: Majalah Tempo, 2004

Gambar 4.3.4
Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menjadi pusat tekstil di Indonesia.

c. Pasar internasional (pasar dunia)

Pasar internasional ialah, pasar tempat diperdagangkannya komoditas tertentu dari berbagai negara di dunia. Pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan tersebut berasal dari berbagai negara di dunia. Misalnya, bursa tembakau di Bremen dan bursa teh di London.

D. Pasar ditinjau dari strukturnya

Ditinjau dari strukturnya, pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.

a. Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna sering disebut pasar persaingan murni *(pure competition).*

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut.

- Barang-barang yang diperdagangkan bersifat homogen.
- Jumlah penjual atau produsen sangat banyak.
- Penjual mempunyai kebebasan dalam mendirikan atau membubarkan usahanya.
- Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui keadaan pasar dengan cukup baik.
- Mobilitas sumber-sumber ekonomi cukup lancar.

Kelebihan bentuk pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut.

- Memaksimumkan efisiensi.
- Adanya kebebasan bertindak dan memilih.

Selain kelebihan, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan. Kelemahan pasar persaingan sempurna antara lain sebagai berikut.

- Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi

  Di pasar persaingan sempurna teknologi yang digunakan oleh produsen berskala kecil biasanya masih sederhana. Untuk mengembangkan teknologi dalam proses produksi diperlukan riset dengan biaya yang besar. Biaya yang mahal merupakan hambatan bagi para produsen berskala kecil untuk mengembangkan teknologinya. Dengan demikian inovasi mengalami hambatan, karena inovasi memerlukan teknologi modern.
- Kebebasan konsumen dibatasi

  Hal ini disebabkan oleh homogenitas produk yang diproduksi oleh produsen sehingga tidak banyak alternatif barang/jasa yang disediakan produsen yang dapat dipilih konsumen.
- Efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu memeratakan distribusi pendapatan

  Sistem distribusi pendapatan tertentu menimbulkan pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dapat menentukan bagaimana bentuk penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam kenyataannya, pasar persaingan sempurna itu dapat dikatakan hampir tidak ada. Kalaupun ada, sebenarnya hampir mendekati ciri-cirinya. Di dalam pasar persaingan sempurna, pemerintah tidak berhak campur tangan. Namun, pada kenyataannya pemerintah selalu ikut campur tangan untuk melindungi kepentingan konsumen maupun kepentingan produsen. Misalnya untuk melindungi kepentingan konsumen, pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi bagi produk-produk yang dijual di pasaran. Untuk melindungi kepentingan produsen, pemerintah menetapkan harga eceran terendah. Harga eceran terendah bertujuan untuk meningkatkan penghasilan produsen.

b. Pasar persaingan tidak sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna ialah pasar tempat penjual dan pembeli mengadakan interaksi, di mana mereka dapat memengaruhi harga barang dan jasa yang akan diperjualbelikan.

Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut.

1. *Monopoli*

Monopoli ialah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menghasilkan barang.

Di Indonesia, pasar monopoli terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang vital, sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Tujuan monopoli di Indonesia ialah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Pertamina, PLN, PT KAI, Telkom, dan PDAM. Ciri-ciri pasar monopoli adalah:

- hanya ada satu penjual atau produsen yang memproduksi suatu jenis barang tertentu;
- produsen atau penjual bertindak sebagai penentu harga atau *price maker;*
- produsen atau penjual yang baru tidak mampu bersaing di pasar tersebut;
- tidak ada barang substitusi sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk barang tersebut.

Monopoli bisa timbul karena adanya beberapa hal, yaitu:

- Faktor alam

  Keadaan alam dapat menimbulkan monopoli bagi suatu daerah. Misalnya, kesuburan tanah dan iklim yang cocok dengan jenis tanaman tertentu menyebabkan suatu daerah memonopoli hasil produksi pertanian tertentu, seperti tembakau di daerah Kedu, Deli; bawang merah di Brebes, dan lain-lain.
- Peraturan pemerintah

  Misalnya, hak paten untuk melindungi suatu penemuan baru agar perusahaan pemilik tidak dirugikan oleh pihak lain yang menghasilkan produk tiruan dengan harga yang jauh lebih murah. Hak paten memiliki batas waktu dan dapat diwariskan. Bagi penciptanya, diperbolehkan untuk memberi ijin atau lisensi kepada pihak lain untuk mencipta dan menjual produk yang sama.
- Monopoli alamiah

  Kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mengakibatkan perusahaan mampu menekan pengeluaran, sehingga perusahaan dapat lebih efisien dan berkembang karena laba yang diperoleh semakin besar. Apabila perusahaan mampu memperluas produksi dan memasarkannya dengan harga yang terjangkau konsumen dengan kualitas yang memuaskan, hasil produksinya akan mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil produksinya akan menguasai pasar dan perusahaan mampu menentukan harga di pasar. Perusahaan yang baru timbul biasanya sulit bersaing dengan perusahaan yang telah berkembang dan memegang monopoli tersebut.

Adanya monopoli dalam perekonomian akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya sebagai berikut.

- Terbatasnya volume produksi, karena dengan monopoli suatu perusahaan akan berkuasa menentukan besar kecilnya produksi yang dihasilkan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.
- Terjadi ketidakadilan antara perusahaan yang memegang monopoli dengan perusahaan yang tidak memegang monopoli.
- Timbulnya eksploitasi dari pemegang monopoli terhadap dua pihak berikut.
  - ☑ Pemilik faktor produksi, yaitu dengan membayar mereka dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.
  - ☑ Konsumen, yaitu ditetapkannya harga oleh pemegang monopoli atas harga pasar untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ada beberapa cara pencegahan yang umum dipraktikkan untuk mengatasi efek negatif yang ditimbulkan oleh monopoli, yaitu:

- penarikan pajak;
- pengendalian harga;
- pemilikan pemerintah untuk barang-barang vital atau yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- regulasi dengan membuat undang-undang anti monopoli;
- pendirian perusahaan oleh pemerintah.

2. *Oligopoli*

Oligopoli ialah pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menguasai pasar.

Berikut ini ciri-ciri pasar oligopoli.

- Terdapat beberapa produsen. Mereka dapat menguasai sebagian besar penawaran barang di pasar.
- Barang-barang yang dihasilkan adalah barang-barang yang mempunyai corak yang berbeda-beda.
- Barang yang beredar di pasaran saling bersaing.
- Kemampuan untuk menentukan harga tidak stabil.
- Pasar oligopoli sulit ditembus oleh perusahaan baru.

Contoh pasar oligopoli adalah pasar operator seluler, semen, mobil, dan lain sebagainya.

3. *Persaingan Monopolistik*

Pasar persaingan monopolistik ialah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menjual produk sejenis, namun dengan corak dan kualitas yang berbeda-beda. Pasar jenis ini mempunyai ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli.

Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah sebagai berikut.

- Jumlah penjual banyak.
- Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang sejenis dengan corak dan kualitas yang berbeda.
- Adanya kemudahan bagi para penjual baru ke dalam pasar.
- Adanya persaingan dalam usaha mempromosikan barang.

Contoh pasar persaingan monopolistik adalah pasar buku dan pasar pakaian.

4. *Monopsoni*

Di dalam pasar monopsoni terdapat banyak penjual atau produsen yang menawarkan hasil produksinya, tetapi hanya ada satu pembeli tunggal yang menguasai pasar, sehingga harga ditentukan oleh pembeli tunggal tersebut.

Pada pasar monopsoni, jika terjadi peningkatan produksi maka akan meningkatkan penawaran, yang akhirnya akan menurunkan harga. Pada harga barang rendah, produsen tidak banyak mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Demikian juga pada waktu harga barang tinggi atau naik, produsen tidak dapat menjual barang yang lebih banyak, karena permintaan akan barang tergantung pada pembeli tunggal.

5. *Dwipsoni*

Dwipsoni ialah pasar dimana hanya terdapat dua konsumen atau pembeli.

6. *Oligopsoni*

Oligopsoni ialah pasar dimana hanya terdapat beberapa pembeli.

E. Pasar ditinjau dari fisiknya

Pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar abstrak dan pasar konkret.

a. Pasar abstrak

Pasar abstrak ialah pasar yang menjual barang-barang yang tidak berwujud dan tidak ada di tempat terjadinya transaksi. Para pembeli dapat melihat barang-barang yang diperdagangkan melalui barang-barang contoh atau juga lewat media-media yang lainnya. Namun, sama seperti pasar pada umumnya, transaksi jual beli itu menjadi sah jika sudah terjadi peralihan hak. Peralihan hak yang dimaksud ialah peralihan barang-barang dari tangan penjual ke tangan pembeli dan peralihan uang dari tangan pembeli ke tangan penjual.

Salah satu bentuk pasar abstrak adalah bursa. Bursa ialah tempat diperjualbelikanya saham dan surat-surat berharga. Pasar abstrak terdiri dari pasar uang, pasar modal, pasar tenaga kerja, pasar komoditi, dan pasar valuta asing.

1. *Pasar uang*

Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ialah uang tunai yang berbentuk kertas dan logam. Uang giral ialah uang yang berbentuk surat-surat berharga seperti sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *call* cek, promes atau aksep, wesel dagang, dan lain-lain.

Sedangkan pasar uang ialah pasar tempat diperjual-belikannya uang giral atau dana-dana dan surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun atau dana yang bersifat jangka pendek.

Fungsi pasar uang ialah sebagai tempat dan alat untuk mengetahui situasi pinjaman jangka pendek. Pasar uang dapat mengurangi atau menghilangkan dana yang bersifat menganggur (dana yang belum digunakan oleh pemiliknya). Dalam menjalankan kegiatannya, ada pihak yang kekurangan dana jangka pendek dan ada pula pihak yang kelebihan dana jangka pendek. Kedua pihak tersebut dipertemukan dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan dana dapat memperoleh dana yang dibutuhkannya.

Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi baik apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

- Cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus memiliki bentuk tertentu. Di Indonesia instrumen pasar uang antara lain berupa sertifikat deposito dan *call money*.
- Adanya lembaga-lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar. Di Indonesia fungsi ini antara lain dijalankan oleh *Ficorinvest* yang sering disebut *security house*.
- Prasarana komunikasi yang memadai.
- Informasi keuangan dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaaan perusahaan.

2. Pasar modal

Pasar modal atau bursa saham ialah sarana terorganisasi yang mempertemukan permintaan dengan penawaran dana jangka panjang. Permintaan dana jangka panjang datang dari perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah untuk memperluas usaha. Penawaran dana jangka panjang berasal dari perusahaan-perusahaan.

Sumber: Majalah Tempo 28 Januari-3 Februari 2008

Gambar 4.3.5
Pasar modal Amerika Serikat. Tampak di layar bahwa harga-harga saham dunia sedang turun.

Pasar modal memperjualbelikan saham dan obligasi. Saham adalah bukti keikutsertaan menjadi pemilik perusahaan (emiten). Sedangkan obligasi ialah surat piutang jangka panjang kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Atas bukti kepemilikan itu, pemegang saham akan memperoleh dividen, sedangkan pemegang obligasi akan memperoleh bunga. Pasar modal atau bursa saham yang ada di negara kita ialah Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Transaksi jual beli di pasar modal tidak dilakukan dengan cara bertatap muka tetapi harus dihubungkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang menjadi perantara itu adalah makelar, komisioner, dan pedagang efek.

3. Pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja ialah tempat terjadinya kegiatan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pihak yang melakukan kegiatan penawaran tenaga kerja ialah para pekerja atau orang-orang yang ingin mempunyai pekerjaan. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan permintaan tenaga kerja ialah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerja. Perhatikan **gambar 4.3.6**!

4. Pasar komoditi

Pasar komoditi ialah tempat diperjualbelikannya barang-barang dagangan yang laku di pasaran dunia atau merupakan sarana perniagaan yang disediakan sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan transaksi perdagangan antara pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatan dalam barang komoditi.

Sumber: www.yahoo.com
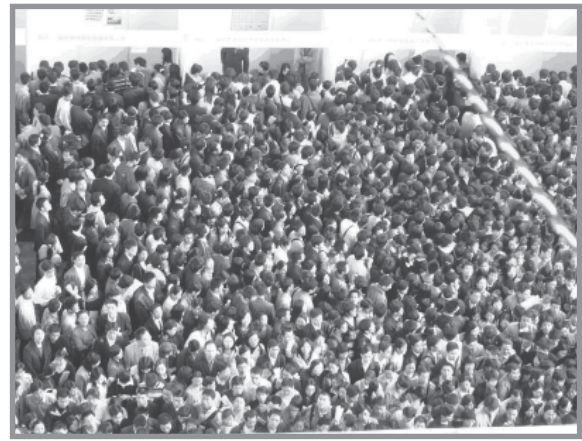
Gambar 4.3.6
Bursa kerja di Cina tahun 2007..Tenaga kerja yangmelimpah, yang tidak diimbangi permintaan tenaga kerja yang tinggi dapat menyebabkan pengangguran.

Adapun fungsi pasar komoditi adalah sebagai berikut.

- Tempat tersedianya informasi tentang harga dan kualitas barang-barang komoditi yang diperjualbelikan.
- Tempat untuk mengadakan transaksi.
- Tempat dan alat untuk mengukur tingkat perdagangan.

Sama seperti pasar abstrak pada umumnya kegiatan pasar komoditi ialah mengadakan transaksi. Transaksi yang terjadi di pasar komoditi merupakan transaksi yang bersifat spekulatif. Transaksi ini ditandai dengan tidak adanya penyerahan barang, karena tujuannya bukan menyelesaikan persetujuan dagang dengan serah terima barang.

Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar komoditi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Barang yang diperjualbelikan ialah barang yang laku di pasaran dunia.
- Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang mudah diganti, dengan tidak mengubah kualitas. Di samping itu, persediaan barang cukup dan pengadaannya dilakukan secara berkala.
- Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang ditetapkan untuk diperdagangkan di bursa sesuai dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

5. Pasar valuta asing (valas)

Valuta asing ialah mata uang suatu negara yang digunakan oleh negara importir untuk mengambil barang. Valuta asing diperlukan untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Dengan demikian pasar valuta asing *(exchange market)* ialah pasar tempat diperdagangkannya surat-surat berharga jangka pendek.

Valuta asing sebagai alat pembayaran internasional harus mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagai berikut.

- mata uang tersebut harus kuat;
- nilai mata uang relatif stabil;
- jumlah mata uang tersebut banyak.

Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi pokok dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, antara lain sebagai berikut.

- Mempermudah penukaran valas.
- Mempermudah pemindahan dana dari satu negara ke negara lain.
- Mempermudah pelaksanaan perjanjian/kontrak jual beli dengan kredit.
- Tempat untuk memperoleh informasi ten-tang keadaan valas atau dengan kata lain sebagai tempat untuk mengetahui kurs-kurs valas.

Berdasarkan lima contoh pasar abstrak di atas, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri pasar abstrak. Ciri-ciri pasar abstrak adalah sebagai berikut.

- Barang-barang yang diperjualbelikan tidak tersedia di tempat.
- Barang-barang yang diperjualbelikan ialah barang-barang produksi.
- Tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis.
- Penyerahan barang dilakukan pada waktu atau kesempatan lain.

b. Pasar konkret

Pasar konkret ialah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang nyata atau berwujud dan sudah tersedia pada saat transaksi dilakukan. Pada pasar ini, konsumen dapat melihat dan memilih langsung barang atau jasa yang diinginkan. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, konsumen dapat membelinya dengan menyerahkan sejumlah uang atas barang tersebut.

Contoh pasar konkret ialah pasar tradisional dan supermarket.

Ciri-ciri pasar konkret adalah sebagai berikut.

- Barang yang diperjualbelikan tersedia di tempat transaksi.
- Barang yang diperjualbelikan merupakan barang konsumsi.
- Kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan jual beli.

4.3.4 Hubungan Pasar dengan Distribusi

Jika kalian pernah melihat aktivitas pasar di malam atau dini hari, kalian pasti melihat banyak mobil yang membawa aneka sayur-mayur, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya. Mereka datang dari berbagai daerah pertanian untuk menjual hasil-hasil pertaniannya di pasar. Kegiatan mereka itu disebut sebagai kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen.

Para penjual yang membeli hasil-hasil pertanian dari mobil-mobil pengangkut itu kemudian menjual lagi hasil-hasil pertanian yang telah dibelinya kepada para pembeli yang berdatangan.

Berdasarkan dua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pasar tidak hanya sekedar tempat melakukan jual beli barang atau jasa. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting di dalam melakukan kegiatan distribusi barang dan jasa. Kegiatan distribusi yang dilakukan itu ialah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.

Barang dan jasa yang telah diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan menjadi tidak berguna apabila tidak disalurkan kepada konsumen. Demikian juga kelangsungan kegiatan produksi barang atau jasa akan terhenti apabila barang atau jasa yang dihasilkan tidak terjual. Mengapa? Karena barang-barang yang tidak terjual itu akan menumpuk yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi para produsen atau penjual. Jika produsen atau penjual merugi, maka kegiatan produksi atau kegiatan jual beli akan terhenti. Dengan demikian, pasar merupakan sarana utama di dalam melakukan kegiatan distribusi barang dan jasa.

RANGKUMAN

1. Pasar ialah suatu kondisi (tempat, waktu) yang memungkinkan terjadinya suatu interaksi jual-beli secara langsung maupun tidak langsung antara permintaan dan penawaran dari pihak-pihak yang saling membutuhkan barang atau jasa tertentu.
2. Syarat-syarat terbentuknya suatu pasar adalah sebagai berikut.
   a. Mempunyai tempat.
   b. Ada barang yang diperjualbelikan.
   c. Adanya kegiatan interaksi antara pembeli dengan penjual.
3. Jenis-jenis pasar dapat dilihat dari lima aspek berikut.
   a. Ditinjau dari jenis barang yang diperjualbelikan: pasar komoditi, pasar tenaga kerja; pasar uang; pasar modal.
   b. Ditinjau dari waktu kegiatannya:
   pasar harian; pasar mingguan; pasar bulanan;pasar tahunan.
   c. Ditinjau dari luas wilayah atau daerah pemasaran: pasar lokal;pasar nasional; pasar internasional (pasar dunia).
   d. Ditinjau dari strukturnya:
   pasar persaingan sempurna; pasar persaingan tidak sempurna.
   e. Ditinjau dari fisiknya:
   pasar abstrak; pasar konkret.
4. Fungsi pasar memiliki fungsi distribusi, pembentukan harga, dan fungsi promosi.
5. Peranan pasar antara lain sebagai berikut.
   - Memungkinkan terjadinya perpindahan faktor produksi dari produsen ke konsumen.
   - Memperlancar proses konsumsi bagi masyarakat.
   - Memperlancar proses distribusi dari penjual ke pembeli.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen penghasil barang.
2. Pertamina, PT KAI, dan PLN adalah jenis pasar monopoli di Indonesia.

II. Salinlah dalam buku tugasmu kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini!

1. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen disebut ... .
2. Pasar tembakau di Bremen, Jerman atau pasar karet di New York, Amerika Serikat, termasuk pasar ... .
3. Pasar yang memperjualbelikan dana-dana jangka panjang disebut ... .
4. Pasar kredit termasuk ke dalam jenis pasar ... .
5. Pasar yang setiap saat memperjualbelikan barang konsumsi maupun alat-alat produksi disebut pasar ... .
6. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya terbuka untuk umum disebut perusahaan ... .

III. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan syarat-syarat terbentuknya suatu pasar!
2. Jelaskan perbedaan pasar abstrak dengan pasar konkret berdasarkan ciri-cirinya!
3. Jelaskan kaitan antara distribusi dengan pasar!
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar persaingan tidak sempurna!
5. Sebutkan nama pasar yang ada di daerahmu dan sebutkan termasuk jenis pasar mana?

IV. Studi Kasus

Pilihlah salah satu tema di bawah ini lalu tulislah esai sebanyak dua halaman folio.

a. Persaingan kereta api dengan pesawat terbang di Indonesia.
b. Persaingan pasar tradisional dengan pasar modern.
c. Naiknya harga BBM dan imbasnya pada rakyat.

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Usaha yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya disebut ... .
   a. tindakan ekonomi
   b. peristiwa ekonomi
   c. kegiatan ekonomi
   d. pelaku ekonomi
2. Di bawah ini yang termasuk barang ekonomi adalah ... .
   a. air sumur
   b. oksigen di udara bebas
   c. tabung oksigen untuk pasien rumah sakit
   d. sinar matahari
3. Di bawah ini yang merupakan barang primer adalah ... .
   a. baju bermerek
   b. mobil
   c. pangan
   d. televisi
4. Dilihat menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan akan obat bagi orang sakit termasuk kebutuhan ... .
   a. rohani
   b. jasmani
   c. sekarang
   d. yang akan datang
5. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam tidak terbatas adalah ... .
   a. minyak bumi
   b. udara
   c. air bersih
   d. batu bara
6. Benda atau alat yang dapat digunakanuntuk meningkatkan hasil produksi, atau dapat membantu proses produksi disebut ... .
   a. tindakan ekonomi
   b. modal
   c. jasa
   d. barang konsumsi
7. Kebutuhan akan jaket tebal menghadapi musim dingin tidak dibutuhkan oleh orang Indonesia. Faktor yang memengaruhi kebutuhan tersebut adalah... .
   a. lingkungan
   b. agama
   c. status sosial
   d. penghasilan
8. Konsultan hukum, salon atau lembaga keuangan adalah contoh rumah tangga produksi perusahaan ... .
   a. dagang
   b. industri
   c. jasa
   d. pertanian
9. Dinda dan Lea yang sedang menonton konser musik di Gedung Kesenian Cak Durasim, Surabaya tengah melakukan kegiatan ... .
   a. produksi
   b. konsumsi
   c. kreasi
   d. distribusi
10. Pasar yang di dalamnya hanya terhadap satu penjual disebut pasar ... .
    a. monopsoni
    b. oligopsoni
    c. olgipoli
    d. monopoli
11. Seorang nelayan yang tengah menjaring ikan di laut sedang melakukan kegiatan ... .
    a. produksi
    b. distribusi
    c. konsumsi
    d. produsen
12. Pengertian pasar secara sederhana adalah ... .
    a. tempat penjual menaruh barang dagangannya
    b. tempat penjual memperoleh penghasilan
    c. tempat barang atau jasa diperdagangkan
    d. tempat melakukan kontak pembelian sesama pembeli
13. Pasar yang memperjualbelikan barang yang tidak berwujud dan tidak ada di tempat terjadinya transaksi disebut pasar ... .
    a. abstrak
    b. konkret
    c. persaingan sempurna
    d. persaingan tidak sempurna
14. Pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual, disebut pasar ... .
    a. oligopoli
    b. monopolistik
    c. duopoli
    d. abstrak
15. Pasar lokal, pasar nasional, dan pasar dunia adalah penggolongan pasar ditinjau dari sudut... .
    a. luasnya pasar
    b. fisiknya pasar
    c. waktu berlangsungnya pasar
    d. organisasi pasar
16. Tepung terigu bagi pabrik roti merupakan ... .
    a. barang konsumsi
    b. barang pengganti

c. barang produksi
d. barang mewah

17. Barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut barang ... .
    a. konsumsi
    b. komplementer
    c. jasa
    d. ekonomis
18. Produk yang dihasilkan oleh seorang pengajar adalah berupa ... .
    a. uang
    b. nafkah
    c. jasa
    d. jaminan
19. Contoh benda substitusi untuk nasi di bawah ini adalah... .
    a. nasi goreng
    b. singkong
    c. lauk pauk
    d. beras
20. Koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota, disebut koperasi ... .
    a. konsumsi
    b. produksi
    c. kredit
    d. jasa
21. Tujuan koperasi kredit adalah ... .
    a. membantu keperluan kredit para anggota agar dapat berbelanja di koperasi
    b. mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga terbentuk modal sendiri
    c. mengimbau para anggota agar tidak hidup bermewah-mewah
    d. mengimbau para anggota untuk bepergian akhir tahun dengan uang tabungan
22. Pekan Raya Jakarta (PRJ) diadakan setiap satu tahun sekali. Berdasarkan waktu kegiatan, PRJ termasuk dalam pasar ... .
    a. mingguan
    b. bulanan
    c. tahunan
    d. harian

II. Jawablah dengan singkat!

1. Dalam kehidupan sehari-hari kita, sejauh manakah manfaat pasar bagi pihak konsumen? Jelakan!
2. Apa yang dimaksud dengan barang ekonomis? Jelaskan dan beri contoh!
3. Apakah monopoli akan merugikan masyarakat konsumen? Jelaskan!
4. Apakah di Indonesia ada pasar monopoli? Sebutkan dan jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan pasar sempurna!
6. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Mengapa manusia melakukan kegiatan produksi?
7. Apakah yang dimaksud dengan:
   a. primer
   b. sekunder
   c. tertier
8. Bilamana benda bebas bisa menjadi benda ekonomi? Mengapa? Berilah contoh!
9. Apa yang dimaksud dengan pasar komoditi?
10. Bagaimanakah menurutmu keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini? Jelaskan!

Bab 5

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Sumber: Sejarah Nasional Indonesia VI, 1992

Dok. Ilustrasi Bagian Produksi, 2007

Sumber: Risalah Sidang BPUPKI, 1995

Dok. 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1985

INTISARI BAB

Saat itu tahun 1945. Jepang berada dalam ambang kekalahan di Perang Pasifik. Jepang pun mengumumkan pembentukan badan untuk menyelidki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dinamakan BPUPKI. Seusai pelantikan BPUPKI, langsung diadakan Sidang I BPUPKI. Pada saat itulah Pancasila berhasil dirumuskan. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya, badan itu pun dibubarkan, dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Seluruh rakyat antusias menginginkan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Hanya saja, berbagai pendapat mengenai cara yang ditempuh muncul. Akhirnya diputuskanlah bahwa teks proklamasi akan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya pukul 10.00 WIB, Soekarno dan didampingi oleh Hatta membacakan teks proklamasi dengan suara lantang. Berbagai peristiwa pun mengiringi kemerdekaan Indonesia tersebut.

Peta Konsep

Proses Kebangkitan Nasional
Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pembentukan BPUPKI
Penyusunan dasar dan konstitusi negara
Pembentukan PPKI
Berbagai Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya NKRI
Berbagai peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan
Sikap rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan
Pembentukan kelengkapan negara dan pemerintahan

5.1 Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Sumber: *Sejarah Nasional Inodnesia VI, 1992*

Ini adalah gambar anggota Seinendan. Seinendan dibentuk Jepang untuk melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Propaganda Jepang sangat menarik. Sebagian bangsa Indonesia tertarik propaganda Jepang tersebut. Jauh sebelum invasi, Radio Tokyo telah menerangkan maksud kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Mereka datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Untuk itu perlu bantuan rakyat setempat agar maksud tersebut bisa tercapai. Mereka diharuskan kesediaannya memberikan bantuan berupa hasil-hasil alam maupun tenaga. Setelah Belanda terusir dari Indonesia, Jepang bertekad untuk memajukan bangsa Indonesia sehingga setaraf dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Bagus bukan apa yang dijanjikan Jepang kepada Indonesia? Menurut kamu, ini untuk kebaikan Jepang atau Indonesia? Jelaskan!
2. Setujukah kamu kalau dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian atau hadiah dari Jepang? Jelaskan!

Kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak karena pada tahun 1944 Pulau Saipan yang sangat strategis jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat. Saipan adalah pulau kedua terbesar setelah Guam di Kepulauan Mariana, bagian barat Samudera Pasifik. Luas Pulau Saipan 122 kilometer persegi. Wilayahnya merupakan daerah perbukitan yang bersifat vulkanis. Pada tahun 1565 - 1899, Saipan berada di bawah pengawasan Spanyol. Kemudian, tahun 1899 - 1914 Pulau Saipan beralih ke tangan Jerman. Pada tahun 1920, pulau ini dan pulau-pulau di Kepulauan Mariana lainnya berada di bawah mandat Jepang. Sementara itu, Pulau Guam pada tahun 1920 sudah merupakan negara persatuan.

Setelah direbut Amerika Serikat, Pulau Saipan dijadikan sebagai pangkalan udara militer yang memegang peranan penting selama akhir Perang Dunia II. Jepang juga bisa dipukul mundur tentara Sekutu dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Jatuhnya Pulau Saipan ke tangan pasukan Amerika Serikat membuat garis pertahanan Jepang di Pasifik semakin terancam. Hal ini terbukti dengan serangan bertubi-tubi terhadap kedudukan Jepang di Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan, pasukan sekutu telah menguasai Balikpapan sehingga Jepang kehilangan salah satu sumber minyak yang berguna untuk mesin perangnya.
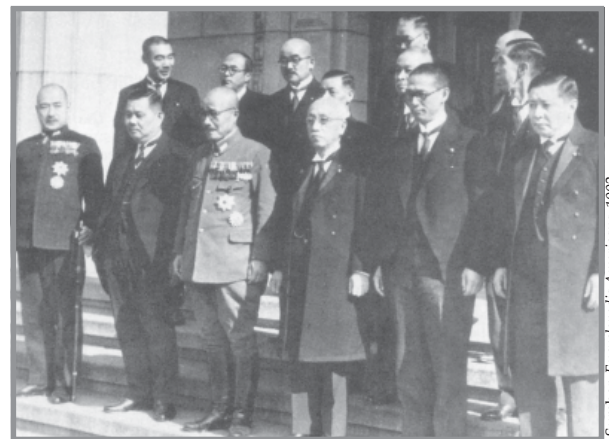
Sumber: *Encyclopedia Americana, 1993*

Gambar 5.1.1
Perdana Menteri Hideki Tojo, berpakaian jenderal, ketiga dari kiri depan. Perdana Menteri Tojo meletakkan jabatan sebagai perdana menteri pada tanggal 17 Juli 1944.

Kondisi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Moral prajurit merosot, ekonomi dalam negeri melesu. Keadaan yang tidak menguntungkan ini memaksa **Jenderal Hideki Tojo** meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri. Pengunduran dirinya itu terjadi pada tanggal 17 Juli 1944. Kedudukannya diganti oleh **Jenderal Kuniaki Koiso**.

Perdana Menteri Koiso bermaksud memulihkan kewibawaan Jepang di mata sesama orang Asia. Ia mempunyai harapan bahwa situasi perang

kembali dapat dikendalikan. Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji Perdana Menteri Koiso itu disampaikan di dalam sidang istimewa ***Teikoku Gikai*** (parlemen Jepang). Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka pada setiap kantor diperkenankan mengibarkan bendera merah putih, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Dengan janji Koiso ini, Jepang mengharapkan agar tentara Sekutu tidak disambut penduduk sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu negara mereka yang akan merdeka.

5.1.1 Pembentukan BPUPKI

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Koiso menepati janjinya. Pada tanggal 1 Maret 1945, **Jenderal Kumakici Harada** (pemimpin pemerintah militer Jepang di Jawa) mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian diberi nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepangnya disebut *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Keputusan pemerintah pendudukan Jepang itu diambil karena posisi Jepang sedang kritis.

Maksud dan tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pengurus BPUPKI terdiri dari seorang ketua *(Kaicoo)*, dua orang ketua muda *(Fuku Kaicoo)*, dan enam puluh orang anggota *(Iin)*. Yang menarik dari badan ini adalah bahwa selain orang-orang bumiputra, termasuk pula dalam anggota BPUPKI adalah orang-orang peranakan Cina, Arab, dan Indo. Selain mereka itu, terdapat juga tujuh orang Jepang sebagai pengurus istimewa. Para pengurus istimewa ini akan menghadiri setiap sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara.

Sumber: Ensiklopedi Indonesia V, 1990

Gambar 5.1.2
R.P Suroso (kiri) dan Radjiman Wediodiningrat (kanan. Dua orang tokoh pemimpin BPUPKI.

Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun *Tenno Haika* (kaisar Jepang), BPUPKI secara resmi dibentuk. **Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat** terpilih sebagai ketuanya. Yang diangkat sebagai ketua muda adalah **Icibangase** (Residen Cirebon) dan **R.P. Suroso** (Residen Kedu). R.P. Suroso sekaligus diangkat menjadi kepala sekretariat BPUPKI. Ia dibantu oleh **Toyohiko Masuda** dan **Mr. A.G. Pringgodigdo**.

5.1.2 Penyusunan dasar dan konstitusi negara

Upacara pelantikan BPUPKI dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1945. Peresmian dilangsungkan di gedung *Cuo Sangi In* (Dewan Penasehat Pemerintah Militer) di jalan Pejambon, Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri). **Jenderal Itagaki** (Panglima tentara wilayah ketujuh yang bermarkas di Singapura) dan **Letnan Jenderal Yaiciro Nagano** (Panglima baru Tentara Keenambelas di Jawa) menghadiri sidang tersebut. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru oleh **Mr. A.G. Priggodigdo**. Kemudian, bendera Merah Putih menyusul dikibarkan oleh **Toyohiko Masuda**. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 - 17 Juli 1945.

A. Sidang pertama BPUPKI

BPUPKI menyelenggarakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Pokok pembicaraan yang utama adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia merdeka. Ketua

Dok. Ilustrasi Bagian Produksi, 2007

Gambar 5.1.3
Pembukaan sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 di Jakarta. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI meminta pandangan mengenai dasar negara. Ada tiga tokoh mengusulkan dasar negara itu. Mereka adalah **Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Supomo,** dan **Soekarno.**

Pada tanggal 29 Mei 1945, **Mr. Mohammad Yamin** mengusulkan lima asas dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Peri Kebangsaan
2) Peri Kemanusiaan
3) Peri Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Rakyat

Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, **Supomo** mengusulkan lima asas dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Persatuan
2) Kekeluargaan
3) Keseimbangan Lahir dan Batin
4) Musyawarah
5) Keadilan Rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, **Soekarno** mengucapkan pidato di hadapan sidang BPUPKI. Soekarno mengusulkan lima asas sebagai dasar negara. Kelima asas itu diberi nama "Pancasila". Kelima asas yang diusulkan Soekarno itu adalah:

1) Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
2) Perikemanusiaan atau Internasionalisme
3) Mufakat atau Demokrasi
4) Kesejahteraan Sosial
5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan berakhirnya sidang pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, selesai pula sidang pertama BPUPKI. Selama persidangan berlangsung, anggotanya hanya mendengarkan pemandangan umum dari para pembicara yang mengetengahkan usulan rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Jadi belum ada suatu rumusan kesimpulan. Setelah persidangan pertama selesai, diadakanlah masa reses selama satu bulan.

Sebelum memasuki reses, BPUPKI telah membentuk suatu panitia kecil berjumlah delapan orang di bawah pimpinan Soekarno. Anggotanya antara lain, **Mohammad Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Mohammad Yamin,** dan **A.A. Maramis.** Mereka bertugas menampung saran-saran dan usul dari anggota BPUPKI.

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil itu mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Dalam pertemuan itu, suara-suara dan usul-usul lisan dari anggota BPUPKI dikumpulkan. Dalam pertemuan itu juga diputuskan untuk membentuk panitia kecil lain yang beranggotakan

Dok. *Ilustrasi Bagian Produksi, 2007*

Gambar 5.1.4
Mr. Mohammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tiga orang tokoh yang mengajukan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI.

sembilan orang. Panitia kecil ini diketuai Soekarno. Anggota panitia kecil itu ialah Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Achmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakar, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Panitia sembilan ini menghasilkan rumusan yang mereka sebut Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Rancangan ini berisi asas dan tujuan pendirian negara Indonesia merdeka. Rumusan itu kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta *(Jakarta Charter).* Rumusan panitia sembilan ini menjadi bahan untuk dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI selanjutnya.

Isi dari "Piagam Jakarta" yang dirumuskan panitia sembilan adalah:

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3) Persatuan Indonesia;
4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Sidang kedua BPUPKI

Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Pada pembukaan sidang kedua, Dr. Radjiman Wediodiningrat memberitahukan penambahan anggota sebanyak enam orang. Pembicaraan dalam sidang tersebut antara lain membahas tentang bentuk negara Indonesia; apakah mau berbentuk republik atau kerajaan. Yang menginginkan bentuk republik ada 55 suara; yang memilih kerajaan ada 6 suara; 2 suara memilih bentuk lain; dan 1 suara blanko. Jumlah seluruhnya 64 suara.

Dalam sidang yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas pembentukan tiga panitia, yaitu:

- Panitia pembahas rencana Undang-Undang Dasar.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno. Anggota Perancang Undang-Undang Dasar itu ialah: A.A. Maramis, Oto Iskandardinata, Poeroebojo, Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Supomo, Mr. Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasyim, Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. Sartono, Mr. Wongsonegoro, Wuryaningrat, Mr. R.P. Singgih, Tan Eng Hoat, P.A. Husein Djajadiningrat, dan Sukiman. Panitia ini didampingi seorang anggota istimewa dari Jepang, **Myano**.

- Panitia untuk menyelidiki soal-soal keuangan dan ekonomi.

  Panitia ini diketuai oleh Mohammad Hatta. Seorang anggota istimewa yang mendampingi panitia ini adalah **Tokonami Kakka**.

- Panitia untuk membela tanah air.

  Panitia ini diketuai oleh **Abikusno Tjokrosuyoso**. Anggota panitia ada 23 orang, didampingi dua anggota istimewa, yaitu **Tanaka Kakka** dan **Matuura**.

Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 1945 membicarakan luas dan batas wilayah negara. Ada tiga usulan soal luas dan batas wilayah negara, yaitu:

- wilayah Hindia Belanda dulu;
- wilayah Hindia Belanda dulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang Kalimantan Utara), Irian Timur, Timor Portugis (sekarang negara Timor Leste);
- wilayah Hindia Belanda dulu ditambah dengan Malaya, tetapi tanpa Irian Barat.

Dari 66 suara yang masuk, 19 suara memilih butir pertama; 39 suara memilih butir kedua; 6 suara memilih butir ketiga; 1 suara memilih lain-lain daerah; dan 1 suara blanko.

Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi *preambule* (pembukaan) yang diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian, panitia tersebut membentuk suatu "Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Anggota panitia kecil itu antara lain: Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman.

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang untuk menerima laporan panitia kecil. Panitia kecil menguraikan dasar rancangan Undang-Undang Dasar. Butir-butir yang penting di antaranya ialah:

- kedaulatan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam lima tahun dalam membentuk undang-undang;
- Presiden harus semufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- untuk tugas sehari-hari, presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Ia dibantu oleh wakil presiden serta menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya.

Hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah "Panitia Penghalus Bahasa" yang terdiri dari **Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim,** dan **Supomo**. Panitia ini bertugas pula untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah dibahas itu.

Persidangan BPUPKI kedua dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam sidang pleno BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD. Ada tiga hasil kerja panitia, yaitu:

1) Pernyataan Indonesia merdeka,
2) Pembukaan Undang-Undang Dasar,
3) Batang tubuh UUD.

Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali (terutama di antara alinea pertama dan alinea kedua). Sedangkan konsep pembukaan Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dan terakhir Piagam Jakarta. Kedua konsep itu diterima oleh sidang setelah berlangsung diskusi kurang lebih satu jam lamanya.

Ketua BPUPKI dalam kata akhirnya pada tanggal 16 Juli 1945 mengatakan: "Naskah Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya." Selanjutnya, dalam sidang pleno BPUPKI, pada tanggal 17 Juli 1945, dibicarakan usul-usul panitia ekonomi dan panitia pembelaan tanah air. Dengan diterimanya hasil-hasil dari panitia tersebut, maka selesailah sudah tugas BPUPKI. Semua rancangan atau hasil-hasil kerja BPUPKI kemudian diserahkan kepada panglima tertinggi tentara di Jawa *(Saiko Shikikan)*. Menurut hierarki, panglima tertinggi di Jawa berada di bawah panglima militer tertinggi untuk daerah selatan *(Saiko Shikikan Nanpo Gun)* yang bermarkas di Saigon, Vietnam Selatan.

5.1.3 Pembentukan PPKI

Setelah selesai menjalankan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuklah suatu badan yang dinamakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Junbi Inkai*. Pengumuman pembentukan PPKI dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia.

Dok. Ensiklopedi Indonesia, Jilid 6, 1990

Gambar 5.1.5
Jenderal Terauchi, Panglima Tentara Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara. Ia mengundang Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat ke Dalat berkenaan dengan pembentukan PPKI.

Untuk pembentukan PPKI itu, **Jenderal Terauchi** memanggil tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu **Soekarno**, **Mohammad Hatta**, dan **Radjiman Wediodiningrat**. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat berangkat ke markas besar Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan) untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Dalam pertemuan di Dalat itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa:

- Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
- Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
- Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai.
- Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Anggota PPKI yang dibentuk terdiri dari 21 orang. Anggota PPKI ini berasal dari berbagai suku, yaitu: 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari masyarakat Tionghoa.

Namun, tanpa sepengetahuan penguasa Jepang, anggota PPKI ditambah enam orang lagi sehingga menjadi 27 orang. Enam anggota tambahan tadi adalah **Wiranatakusumah**, **Ki Hadjar Dewantara**, **Mr. Kasman Singodimedjo**, **Sayuti Melik**, **Iwa Kusumasumantri**, dan **Ahmad Subardjo**.

Yang ditunjuk sebagai ketua PPKI adalah Ir. Soekarno. Sedangkan Mohammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Dengan penambahan tersebut, nyatalah bahwa bangsa Indonesia semakin berani dan bertekad menyatakan kemerdekaannya sebagai urusan bangsanya sendiri.

Pemerintah Jepang mengambil keputusan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga pemimpin Indonesia itu kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

RANGKUMAN

1. Karena kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri pada tanggal 17 Juli 1944. Ia diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso.
2. Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.
3. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian diberi nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*.
4. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI secara resmi dibentuk. Ketuanya adalah K.R.T Radjiman Wediodiningrat.
5. BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 - 17 Juli 1945.
6. BPUPKI berhasil membuat rancangan dasar negara dan Undang-Undang Dasar negara Indonesia merdeka.
7. Sebagai ganti BPUPKI, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas PPKI adalah melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia.
8. Pengumuman pembentukan PPKI dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Pancasila pertama dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI.
2. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat bertemu dengan Jenderal Terauchi di Vietnam Selatan.
3. Pada sidang pertama BPUPKI, Mr. Mohammad Yamin mengusulkan lima asas dan dasar negara Republik Indonesia, yakni: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusaiaan, peri Ketuhanan, peri Kenegaraan, dan Sosialisme.
4. Ki Hadjar Dewantara adalah salah satu dari enam anggota tambahan yang disertakan dalam keanggotaan PPKI.

II. Salinlah di buku tugasmu kemudian lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Pada tahun 1565 - 1899, Saipan berada di bawah pengawasan negara ... .
2. Perdana menteri Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah ... .
3. Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal ... .
4. Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut ... .
5. BPUPKI secara resmi dibentuk pada tanggal ..., bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang.
6. Upacara pelantikan BPUPKI dilangsungkan pada tanggal ... .
7. Ketua BPUPKI yang diangkat adalah ... .
8. BPUPKI mengadakan dua kali sidang, yaitu tanggal ... dan tanggal ... .
9. Ada tiga tokoh yang memberikan pendapat mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang pertama BPUPKI. Mereka adalah ... .
10. Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, dibentuklah lembaga baru yang disebut PPKI. Pengumuman pembentukan PPKI dilaksanakan pada tanggal ... .
11. Tokoh yang terpilih sebagai ketua PPKI adalah ... .
12. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wediodiningrat diundang ke markas besar Jenderal Terauchi. Markas Jenderal Terauchi terdapat di kota ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Untuk apakah pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia?
2. Apa maksud dan tujuan BPUPKI dibentuk?
3. Jelaskan mengenai keanggotaan BPUPKI!
4. Jelaskanlah pendapat dan pandangan Mohamad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan "Piagam Jakarta"!
6. Rapat BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 membicarakan luas dan batas wilayah negara. Sebutkan tiga usulan dalam sidang BPUPKI soal luas dan batas wilayah negara Indonesia!
7. Apa tugas PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945?
8. Apa yang dikatakan Jenderal Terauchi kepada pemimpin PPKI dalam pertemuan di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945?
9. Mengapa pemerintah Jepang mengambil keputusan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia?
10. Siapa sajakah keenam anggota tambahan PPKI?

IV. Refleksi

Bacalah baik-baik artikel berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya.

50 TAHUN INDONESIA - JEPANG

Hubungan Indonesia-Jepang yang sudah berlangsung selama 50 tahun berjalan pasang surut dan penuh tantangan. Namun, tantangan yang dihadapi tersebut justru mempererat persahabatan kedua negara.

Demikian dikemukakan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal seusai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ny Ani Yudhoyono menerima dan menjamu santap siang Pangeran Akishino dan Putri Kiko di Istana Merdeka, Jakarta, Januari 2008.

”Jepang adalah salah satu mitra yang sangat penting bagi Indonesia di kawasan atau di dunia internasional,” ujarnya.

Dalam perjalanan hubungan persahabatan ke depan, Indonesia dan Jepang yang telah menjalin kemitraan strategis akan memperkuat kerja sama dan kemitraan di bidang ekonomi dan perdamaian.

Tiga pilar hubungan yang akan makin ditekankan dalam hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang, seperti diharapkan Presiden, adalah di bidang budaya, pendidikan, dan persahabatan antarpemerintah.

Sesaat sebelum jamuan makan siang, Akishino membacakan pesan Kaisar Akihito yang dibawanya untuk pemerintah dan rakyat Indonesia mengenai 50 tahun persahabatan Indonesia dan Jepang.

Dalam pesannya, Kaisar Akihito menyatakan kegembiraannya karena hubungan Indonesia dan Jepang berjalan baik. ”Kaisar Akihito berharap yang terbaik dalam hubungan Indonesia dan Jepang ke depan,” ujar Dino. Menurut Dino, Presiden menerima pesan itu dan sangat menghargai Akishino sebagai utusan Akihito. Bagi Presiden, diutusnya putra kedua Akihito adalah tanda penghargaan Jepang atas 50 tahun hubungannya dengan Indonesia.

Sumber: Koran Kompas, 20 Januari 2008.

A. Menjawab pertanyaan

1. Bagaimanakah menurutmu hubungan Indonesia dengan Jepang baik di masa lalu maupun masa kini?
2. Apa yang bisa kamu pelajari dari hubungan tersebut?
3. Bagaimanakah sikap yang ditunjukkan Indonesia kepada Jepang dalam artikel di atas?
4. Bagaimana sikap yang ditunjukkan Jepang pada Indonesia dalam artikel di atas?
5. Menurut pendapatmu, apakah yang lebih menguntungkan, perang atau kerja sama? Jelaskan!

Berbagai Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya NKRI

Sumber: *Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka, 1985*

Di Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 diselenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan rapat, sekalipun bala tentara Jepang melakukan penjagaan keras. Sebelumnya, pimpinan tentara Jepang telah melarang penyelenggaraan rapat tersebut.

"Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Tekad Tetap Merdeka", demikian bunyi spanduk yang mereka bawa. Pada dasarnya seluruh rakyat menyambut gembira Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka tidak takut ancaman senjata tentara Jepang. Begitulah semangat rakyat sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan. Bagaimana dengan kita sekarang?

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Apakah di sekolahmu masih diadakan upacara bendera?
2. Pada kesempatan apa sekolahmu mengadakan upacara bendera?
3. Apakah kamu mengikutinya dengan penuh semangat seperti rakyat yang berkumpul di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945?
4. Apa arti kemerdekaan bagi kamu sekarang ini?

Sejarah mencatat bahwa ada berbagai peristiwa menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Apa saja peristiwa yang terjadi setelah dan sesudah proklamasi kemerdekaan? Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas berbagai peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, sikap rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan, dan pembentukan kelengkapan negara dan pemerintahan.

5.2.1 Berbagai Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan

Ada peristiwa apa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan yang masuk dalam catatan sejarah antara lain adanya perbedaan pendapat di antara kelompok pejuang, peristiwa Rengasdengklok, dan perumusan teks proklamasi.

A Perbedaan pendapat di antara kelompok pejuang

Dengan adanya janji kemerdekaan itu, suasana perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan semakin memuncak. Perjuangan itu digerakkan, baik oleh golongan tua, maupun golongan muda.

Sumber: *Oxford Ensiklopedi Pelajar 9, hal239*

Gambar 5.2.1
Gedung Menteng 31, gedung ini merupakan salah satu pusat perjuangan golongan muda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kedua-duanya sependapat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia harus segera diproklamasikan. Hanya saja, cara mengemukakan pendapat itu dan cara melaksanakannya terjadi perbedaan di antara mereka. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan hubungan antara golongan tua dan golongan muda.

Golongan tua terwakili dalam wadah PPKI. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah. Proklamasi kemerdekaan bisa dilakukan dengan jalan bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Sumber: Repro *Ensiklopedi Indonesia, 1990*

Gambar 5.2.2
Sutan Sjahrir (kiri) dan Chaerul Saleh. Mereka adalah tokoh pergerakan dari kalangan kaum muda. Mereka ikut mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan RI tanpa bergantung pada Jepang.

Golongan muda terwakili dalam berbagai perkumpulan, di antaranya:

- Kelompok Asrama Menteng 31 di bawah pimpinan Chaerul Saleh dan Sukarni.
- Kelompok Asrama Indonesia Merdeka di bawah pimpinan Mr. Soebardjo.
- Kelompok Asrama Mahasiswa Kedokteran (*Ika Dai Gakku*) yang pro Sutan Sjahrir. Sjahrir adalah seorang tokoh yang menolak bekerja sama dengan Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah dengan jaringan di seluruh Jawa.

Sutan Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak segera diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta tanpa menunggu janji Jepang. Keberanian Sjahrir ini timbul karena ia sendiri mendengar langsung berita kekalahan tentara Jepang dari radio yang tidak disegel oleh pemerintah Jepang. Desakan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945 dalam suatu pertemuan dengan Mohammad Hatta tak lama setelah Hatta kembali dari Dalat. Namun, Soekarno dan Hatta masih mencari kebenaran berita tentang *kapitulasi* (pernyataan menyerah/kalah perang) secara resmi. Soekarno dan Hatta tetap mau membicarakan pelaksanaan proklamasi pada rapat PPKI.

Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda yang menganggap PPKI adalah lembaga buatan pemerintah Jepang. Golongan muda tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan dengan cara yang telah dijanjikan oleh Jenderal Terauchi dalam pertemuan di Dalat. Golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari pemerintah Jepang.

Menanggapi sikap golongan muda yang radikal itu, Soekarno - Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang toh sudah kalah. Kini bangsa Indonesia menghadapi Sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Mereka ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat Panitia Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian, mereka tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan pemerintah Jepang yang menetapkan waktu berkumpulnya para anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengadakan sidang PPKI pertama.

Menghadapi sikap golongan tua yang seperti itu, golongan muda menjadi tidak sabar lagi. Mereka mengadakan perundingan di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi (sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 jam 20.00 WIB. Rapat ini dihadiri oleh **Chaerul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana,** dan **Armansyah.**

Keputusan rapat menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda. Beberapa keputusan rapat itu antara lain, sebagai berikut.

- Menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain.
- Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan.
- Sebaliknya, diharapkan segera diadakan perundingan dengan Soekarno - Hatta agar mereka segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.00 WIB di kediaman Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Wikana menuntut agar proklamasi dinyatakan oleh Soekarno pada keesokan harinya. Suasana menjadi tegang karena Wikana menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Soekarno marah.

Suasana tegang itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya, seperti Mohammad Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo, dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Golongan muda tetap mendesak agar pada tanggal 16 Agustus 1945 proklamasi dinyatakan. Sedangkan golongan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.

B. Peristiwa Rengasdengklok

Karena berbeda pendapat dengan Soekarno dan Hatta, golongan pemuda kemudian menculik

Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Tindakan itu diambil berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Jl. Cikini 71, Jakarta. Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi, rapat dihadiri juga oleh **Sukarni, Jusuf Kunto,** dan **dr. Muwardi** dari Barisan Pelopor, serta **Shodanco Singgih** dari Peta.

Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu "menyingkirkan Soekarno dan Hatta ke luar kota". Tujuannya ialah untuk menjauhkan Sukarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Shodanco Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Jawa zaman Jepang (Jam 4.00 WIB), Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok.

Sesampainya di Rengasdengklok, rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta langsung menuju ke markas kompi **Cudanco Subeno.** Di sana berlangsung pembicaraan antara Soekarno, Sukarni, dan Singgih, sementara Hatta sedang keluar ruangan. Sukarni atas nama golongan pemuda mendesak kembali agar Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pembicaraan di antara mereka tidak membawa hasil.

Dalam pembicaraan dengan Singgih, akhirnya Soekarno menyetujui desakan golongan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan pemerintah Jepang. Kesediaan Soekarno itu segera disebarluaskan oleh Singgih sekembalinya ke Jakarta, di Menteng 31.

Sumber: Repro *Ensiklopedi Indonesia, jilid 5, 1990*

Gambar 5.2.3
Tugu proklamasi di Rengasdengklok. Rengasdengklok menjadi kota yang bersejarah karena dipergunakan sebagai tempat perundingan antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan Hatta.

Dok. *Ilustrasi bagian Produksi, 2007*

Gambar 5.2.4
Ahmad Soebardjo. Ia ikut menjemput Soekarno dan Hatta di Rengasdengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ahmad Soebardjo dan Wikana mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. **Laksamana Maeda** bersedia menjamin keselamatan selama mereka berada di rumahnya. Oleh karena itu, Jusuf Kunto hari itu juga membawa Mr. Ahmad Soebardjo bersama Sudiro ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan tiba sekitar pukul 17.30 WIB.

Di Rengasdengklok antara golongan pemuda dan golongan tua tidak terjadi perundingan. Ahmad Soebardjo telah memberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya, selambat-lambatnya jam 12.00 WIB. Dengan jaminan tersebut, komandan kompi Peta *Cudanco* Subeno melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta.

C. Perumusan teks proklamasi

Sesampainya di Jakarta, pada jam 23.00 WIB, rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah proklamasi disusun. Sebelumnya Soekarno dan Hatta telah menemui Somubuco, **Mayor Jenderal Nisyimura** untuk menjajagi sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Nisyimura berjanji

Sumber: Repro *Ensiklopedi Indonesia, 1990*

Gambar 5.2.5
Laksamana Maeda. Ia merelakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

untuk tidak menghalang-halangi proklamasi kemerdekaan, asal tidak ada pernyataan yang anti Jepang.

Para pemuka Indonesia yang hadir dalam peristiwa perumusan teks proklamasi berkumpul dalam dua ruangan, yaitu ruang makan dan serambi depan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan. Yang merumuskan teks proklamasi adalah **Soekarno**, **Hatta**, dan **Mr. Ahmad Soebardjo**. Perumusan naskah proklamasi disaksikan oleh **Sukarni**, **Mbah Diro**, dan **B.M. Diah**. Pada saat itu, Soekarno memegang pena dan menulis teks proklamasi yang terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama yang berbunyi *"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia"* merupakan kalimat yang dikutip oleh Ahmad Soebardjo dari Piagam Jakarta. Kemudian, Hatta menyempurnakan teks proklamasi dengan kalimat kedua yang berbunyi *"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."*

Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua kalimat berikut.

- Kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.
- Kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan.

D. Pengesahan teks proklamasi

Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibaca di hadapan pemuka-pemuka yang sebagian besar adalah anggota PPKI. Di sinilah teks proklamasi dimusyawarahkan. Pada waktu itu, timbul persoalan tentang siapa yang akan menandatangani. Chaerul Saleh tidak setuju bila teks itu ditandatangani oleh anggota-anggota PPKI. Menurut Chaerul Saleh, PPKI adalah lembaga bentukan Jepang yang anggota-anggotanya diangkat oleh Jepang. Sebagai jalan keluar, Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi sebaiknya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu disetujui oleh semua yang hadir.

Kemudian, teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Beberapa kata dari versi terakhir itu diubah rumusannya. Kata-kata yang diubah, antara lain:

- kata *"tempoh"* diubah menjadi *"tempo"*;
- *"wakil-wakil bangsa Indonesia"* diubah menjadi *"atas nama bangsa Indonesia"*;
- tulisan *"Djakarta, 17-08-'05"* diganti menjadi *"Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun'05"*.

Versi terakhir yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang dikenal sebagai naskah autentik.

E. Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00 (waktu Tokyo) atau pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi 56).

Soekarno dengan suara lantang dan mantap membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan. Sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Soekarno menyampaikan kata pendahuluannya sebagai berikut.

> "Saudara-saudara sekalian! Saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
>
> Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan

Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17-8-'05
wakil² bangsa Indonesia.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta.

Sumber: Risalah Sidang BPUPKI, 1995

Gambar 5.2.6
Sebelah kiri adalah rumusan teks proklamasi dalam bentuk tulisan tangan sebelum dilakukan beberapa perubahan redaksi. Sebelah kanan adalah teks proklamasi yang sudah diketik Sayuti Melik dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sumber: Risalah Sidang BPUPKI, 1995

Gambar 5.2.7
Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 WIB di Jl. Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seiasekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara!
Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

Demikianlah saudara-saudara,
Kita telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."

Setelah pembacaan teks proklamasi, upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Merah Putih dilakukan **S. Suhud** dan **Cudanco Latif**, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Merah Putih dijahit oleh **Ibu Fatmawati Soekarno**.
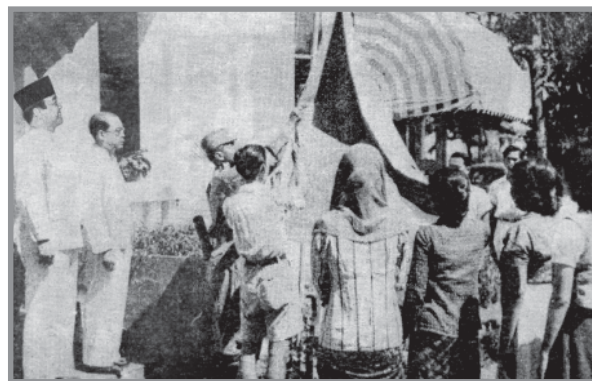
Sumber: Risalah Sidang BPUPKI, 1995

Gambar 5.2.8
Upacara pengibaran bendera Merah Putih diiringi Lagu Indonesia Raya. Bendera yang dikibarkan ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno.

F. Penyebarluasan berita kemerdekaan Indonesia

Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang penting. Hal itu sangat disadari sejak teks proklamasi kemerdekaan selesai dirumuskan. Yang berperan menyebarluaskan berita kemerdekaan itu adalah para pemuda dan pegawai kantor berita *Domei.*

a. Peran peserta sidang PPKI

Selain melalui siaran radio dan selebaran, berita proklamasi dibawa oleh para utusan yang menghadiri sidang PPKI. Para utusan yang berasal dari berbagai daerah ini juga menghadiri peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

b. Peran para pemuda

Selesai perumusan teks proklamasi, Soekarno berpesan kepada para pemuda untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke berbagai tempat. Untuk melaksanakan tugas itu, para pemuda membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok agar berita proklamasi bisa lebih cepat sampai pada masyarakat. Ada kelompok yang bertugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi dalam bentuk tulisan. Ada pula yang menyebarkannya dari mulut ke mulut secara beranting.

Salah satu kelompok pemuda yang terkemuka adalah kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (Sekarang Jl. Dr. Sahardjo). Dini hari tanggal 17 Agustus 1945, kelompok tersebut mengadakan rapat rahasia di Kepu (Kemayoran). Kemudian mereka pindah ke *Defensielijn van den Bosch* (sekarang Jalan Bungur Besar) untuk mengatur cara penyiaran proklamasi.

Para pemuda memanfaatkan semua media komunikasi yang ada untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Media komunikasi yang banyak digunakan adalah pamflet dan

SOEARA ASIA

PROKLAMASI
INDONESIA MERDEKA

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 bl. VIII 2605
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta.

Makloemat

Makloemat kepada seloeroeh rakjat Indonesia

TJAHAJA

REPOEBLIK INDONESIA

Oendang-oendang Dasar.

Pemboekaan.

MAKLOEMAT.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, 1985

Gambar 5.2.9
Surat-surat kabar pada waktu proklamasi kemerdekaan ikut serta menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan. Di antaranya "Soeara Asia" yang terbit di Surabaya dan "Tjahaya" yang terbit di Bandung.

surat kabar. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat khalayak ramai. Pada tanggal 20 Agustus 1945, secara serempak surat kabar di seluruh Jawa memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan.

Selain menggunakan media komunikasi, penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dari banyaknya masyarakat yang datang ke lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan (meskipun ternyata tidak dilakukan di tempat itu).

c. Peran pegawai kantor berita Domei

Menjelang sore hari, tanggal 17 Agustus 1945, wartawan kantor berita *Domei* yang bernama Syahruddin menyampaikan foto kopi teks proklamasi kepada **Waidan B. Palenewen** (kepala bagian radio). Segera ia memerintahkan **F. Wuz** (seorang markonis/petugas telekomunikasi) untuk menyiarkan berita proklamasi sebanyak tiga kali berturut-turut. *Domei* adalah kantor berita resmi pemerintah Jepang sampai akhir Perang Dunia II. Kantor berita Domei didirikan pada tanggal 1 Juni 1936 dengan melakukan fusi di antara dua kantor telegraf.

Walaupun berlaku sensor yang ketat, tetapi melalui Domei pengumuman mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebarluaskan ke berbagai daerah dan ke luar negeri. Berita itu disiarkan oleh staf Indonesia melalui jaringan telepon dan telegraf tanpa lebih dahulu meminta persetujuan petugas sensor.

Penyiaran baru dapat dilaksanakan sebanyak dua kali saat tentara Jepang memerintahkan agar penyiaran dihentikan. Namun, Waidan B. Pelenewen tetap memerintahkan markonis untuk terus menyiarkan. Bahkan penyiaran terus diulangi setiap 30 menit sampai saat siaran berakhir pada pukul 16.00.

Untuk menghalangi penyebarluasan berita proklamasi, pimpinan bala tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita proklamasi sebagai suatu kekeliruan. Tindakan selanjutnya adalah menyegel kantor berita Domei pada tanggal 20 Agustus 1945. Para pegawainya dilarang masuk.

Tindakan Jepang itu tidak menyurutkan tekad para pegawai kantor berita Domei untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Dengan bantuan sejumlah teknisi radio, mereka berupaya membuat pemancar baru. Peralatan pemancar yang dibutuhkan diambil bagian demi bagian dari kantor berita *Domei*. Sebagian dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen, sebagian lagi ke Menteng 31. Akhirnya, berdirilah pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK 1. Dari pemancar itulah, berita proklamasi terus-menerus disiarkan.

Usaha para pemuda dalam penyiaran berita ini tidak terbatas lewat radio saja, melainkan juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita Proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia. Demikianlah berita proklamasi tersiar ke seluruh pelosok tanah air.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, 1985

Gambar 5.2.10
Gedung kantor berita Antara di Jl. Antara, Jakarta. Dari gedung ini, berita proklamasi kemerdekaan disiarkan ke seluruh dunia. Pada jaman Jepang, Antara diganti namanya menjadi Yashima dan menjadi bagian dari kantor berita Jepang, Domei.

5.2.2 Sikap Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mendapat tanggapan yang meriah dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi merupakan wujud niat dan tekad rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Rakyat di berbagai daerah di seluruh Indonesia mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sikap rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan kelihatan dalam tindakan-tindakannya, antara lain berikut.

- Adanya maklumat pemerintah (31 Agustus 1945).
- Adanya rapat raksasa di lapangan IKADA.
- Adanya pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
- Berbagai peristiwa heroik di berbagai daerah melawan Jepang dan Sekutu.

A. Maklumat pemerintah (31Agustus 1945)

Pekik Indonesia merdeka telah berkumandang sejak tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56. Rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan itu dengan suka cita dan rela berkorban, baik harta maupun jiwa demi tegaknya proklamasi kemerdekaan. Maklumat Pemerintah 31 Agustus 1945 menetapkan pekik kemerdekaan sebagai salam nasional dan berlaku mulai 1 September 1945. Caranya dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke muka dan bersamaan dengan itu memekikkan 'Merdeka'.

Pekik *'Merdeka'* menggema di mana-mana. Selain itu semboyan *'Sekali Merdeka Tetap Merdeka'*, *'Merdeka atau Mati'*, menjadi ucapan umum para pemuda atau pejuang. Tujuannya untuk menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan, jika perlu dengan nyawa taruhannya. Isi maklumat tersebut sebagai berikut.

> "Sejak 1 September 1945, kita memekikkan pekik 'Merdeka'. Dengungkan terus pekik itu, sebagai dengungan jiwa yang merdeka.
>
> Jiwa yang merdeka yang berjuang dan bekerja."
> BERJUANG DAN MERDEKA
> Buktikan itu.
>
> Soekarno
> Presiden

Secara spontan masyarakat bergembira menyambut kemerdekaan, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Kegembiraan ini terlihat misalnya dalam rapat akbar di lapangan Ikada yang berlangsung pada tanggal 19 September 1945.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, 1985

Gambar 5.2.11
Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan menyatakan bahwa Negara Ngayogyokarto Hadiningrat adalah bagian dari Republik Indonesia.

B. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Pada tanggal 5 September 1945, **Sri Sultan Hamengku Buwono IX** dari Yogyakarta menyatakan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Selengkapnya pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX berbunyi:

> "Kami, HAMENGKU BUWONO IX, Sultan Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, menyatakan:
> 1. Bahwa negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
> 2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyokarto Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
> 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyokarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
> 4. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyokarto Hadiningrat mengindahkan amanat ini."
>
> Ngayogyokarto Hadiningrat, 28 Puasa, Ehe, 1876 (5 September 1945).
>
> HAMENGKU BUWONO IX

C. Rapat raksasa di IKADA

Para pemuda yang dipelopori oleh *Komite van Aksi Menteng 31* merencanakan untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tujuannya adalah agar para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan massa rakyat.

Rencana itu dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- persiapan pengerahan massa;
- menyampaikan rencana itu kepada presiden.

Para pemuda dari berbagai kelompok melancarkan aksi corat-coret melukiskan semboyan kemerdekaan, misalnya *Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Merdeka atau Mati.* Para pemuda inilah yang menjadi pelopor Rapat Raksasa di Ikada. Para pemuda tersebut antara lain datang dari Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Cibinong.

Karena semangat kemerdekaan yang membara di dalam hati rakyat, mereka tidak menghiraukan teriknya matahari dan penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang siap siaga dengan tank-tank berlapis baja. Pasukan Jepang memeriksa semua orang yang masuk ke lapangan, tempat digunakan rapat raksasa tersebut.

Pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta datang, mereka meneriakkan yel-yel *'Hidup Bung Karno dan Bung Hatta, Merdeka, Merdeka'*. Lapangan Ikada telah dipenuhi manusia pada waktu Soekarno dan Moh. Hatta serta para menteri tiba. Soekarno berpidato singkat. Inti dari pidato Soekarno tersebut ada tiga hal:

- meminta dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia;
- menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin;
- memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang.

Semua yang hadir meninggalkan Lapangan Ikada dengan tertib. Mereka semua mematuhi pemerintah dengan tulus. Rapat raksasa yang berlangsung 19 September 1945 ini merupakan perwujudan awal kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Walaupun rapat raksasa tersebut hanya berlangsung beberapa menit saja, namun telah berhasil mempertemukan pemerintah dan rakyat, yang baru sebulan merdeka.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, 1985

Gambar 5.2.12
Presiden Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Para pemuda menjadi pelopor dilaksanakannya rapat raksasa di lapangan Ikada.

Pada bulan September 1945, beberapa karisidenan di Jawa menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa segala tindakan yang menentang Pemerintah RI akan diambil tindakan keras.

D. Berbagai peristiwa di daerah pasca proklamasi kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, di berbagai daerah rakyat berusaha melucuti tentara Jepang. Mereka menempuhnya baik dengan cara kekerasan maupun perundingan. Beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan, dilarang memasuki kantor-kantor mereka.
- Para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan gedung-gedung vital.

Berbagai insiden terjadi mengiringi tindakan para pemuda, antara lain di Surabaya, di Yogyakarta, di Bandung, di Semarang, di Sulawesi, di Bali, di Sumbawa, di Kalimantan, di Gorontalo, di Biak, di Banda Aceh, di Sumatera Selatan. Supaya kita mendapat gambaran lebih jelas, mari kita ikuti uraiannya berikut ini.

a. Di Surabaya

Di Surabaya selama bulan September terjadi beberapa peristiwa, antara lain:

- Perebutan senjata di gudang mesiu Don Bosco dan perebutan Markas Pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung, dan markas-markas tentara Jepang serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota.
- Pada tanggal 19 September terjadi "Insiden Bendera" di Hotel Yamato, Surabaya. Hal ini terjadi karena orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan mengibarkan bendera mereka dan menurunkan bendera Merah Putih.

  Tindakan orang Belanda menimbulkan amarah rakyat. Rakyat Surabaya kemudian menyerbu hotel Yamato. Mereka menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih.
- Pada tanggal 1 Oktober 1945, Markas *Kempetai* yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintah Jepang diserbu oleh rakyat.

b. Di Yogyakarta

Di Yogyakarta, terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dengan Jepang, antara lain:

- Pada tanggal 26 September 1945. Semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang menga-

dakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang untuk menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia.

- Pada tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan telah berada di tangan pemerintah RI.
- Pada tanggal 7 Oktober malam, para pemuda BKR bersama dengan pemuda Polisi Istimewa bergabung menuju ke Kota Baru. Mereka menyerbu tangsi *Otsuka Butai* (sekarang gedung SMA di sebelah Sentral Telepon). Pada hari itu juga *Otsuka Butai* menyerah. Dalam penyerbuan itu, 18 orang pemuda gugur.

c. Di Bandung

Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (*Artillerie Constructie Winkel*, sekarang Pindad). Pertempuran berlangsung sampai kedatangan pasukan Sekutu di kota Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945.

d. Di Semarang

Pada tanggal 14 Oktober 1945, tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda-pemuda Indonesia ke Semarang untuk dipindahkan ke penjara Bulu. Sebelum mereka sampai ke penjara Bulu, sebagian tawanan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada batalion Kido. Para pemuda marah, mereka mulai merebut dan menduduki kantor pemerintah. Mereka juga menangkap orang-orang Jepang yang ditemui.

Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang dari tangsi Jatingaleh menyerbu kota Semarang. Sejak saat itu dimulailah pertempuran yang berlangsung selama 5 hari. Oleh karena itu, kita mengenal sebutan Pertempuran Lima Hari.

e. Di Makassar

Para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung penting, seperti studio radio dan tangsi polisi. Yang tergabung dalam kelompok pemuda tersebut antara lain pemuda Barisan Berani Mati *(Boei Taishin)*, bekas *Keigun Heiho*, dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober, mereka berhasil menduduki gedung-gedung vital milik Jepang. Karena peristiwa itu, pasukan Australia yang ada di kota Makassar melucuti para pemuda.

f. Di Gorontalo

Pada tanggal 13 September 1945, terjadi perebutan senjata di markas-markas Jepang. Kedaulatan RI berhasil ditegakkan. Para pemimpin RI menolak setiap ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.

g. Di Kalimantan

Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akan tetapi, tentara Australia yang sudah ada di Kalimantan mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, antara lain berdemonstrasi, mengibarkan Bendera Merah Putih, memakai lencana merah putih, dan menyelenggarakan rapat-rapat. Meskipun ada larangan tersebut, para pemuda tetap melaksanakan kegiatan politik.

h. Di Sumbawa

Pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari pihak Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di Sape dan Raba juga terjadi insiden antara para pemuda dengan tentara Jepang.

i. Di Bali

Para pemuda telah membentuk beberapa organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir bulan Agustus. Mereka berusaha untuk menegakkan kedaulatan RI melalui perundingan. Akan tetapi, usaha tersebut mendapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Akan tetapi, mereka gagal.

j. Di Banda Aceh

Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Pada tanggal 12 Oktober 1945, *Shucokan* Jepang memanggil para pemimpin pemuda. Ia menyatakan bahwa sekalipun Jepang telah kalah, tetapi keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Oleh karena itu, para pemuda diminta agar kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa ijin dihentikan. Perkumpulan yang sudah terlanjur ada diminta untuk dibubarkan. Para pemimpin pemuda menolak permintaan itu.

Sejak saat itu, para pemuda merebut dan mengambilalih kantor-kantor pemerintah. Bendera Merah Putih dikibarkan di kantor-kantor tersebut. Para pemuda juga melucuti senjata tentara Jepang. Bentrokan-bentrokan dengan pasukan Jepang terjadi di Ulee Lheue, Langsa, Lho'Nga dan tempat-tempat lain di Aceh.

k. Di Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945. Pada waktu itu, **dr. A.K. Gani** (residen Sumatera Selatan) bersama seluruh pegawai *Gunseibu* mengerek Bendera Merah Putih dalam suatu upacara. Setelah upacara itu, para pegawai negeri kembali ke kantor masing-

masing dan mereka juga menaikkan bendera merah putih di kantor mereka masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden karena orang-orang Jepang sudah menghindar waktu terjadi demonstrasi.

5.2.3 Pembentukan Kelengkapan Negara dan Pemerintahan

A. Penyusunan Badan Pemerintahan dan Negara

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945) PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sidang berlangsung di Pejambon, Jakarta (sekarang gedung Departemen Kehakiman). Pada hari pertama sidang itu dihasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu: mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara dan memilih presiden dan wakil presiden.

a. Pengesahan Undang-Undang Dasar

Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, pembukaan beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibahas dalam BPUPKI disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan adalah konsep yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang dikenal dengan sebutan "Piagam Jakarta".

Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Mohammad Hatta rumusan sila pertama dari dasar negara yang tercantum dalam dasar negara itu diubah. Sila pertama yang semula berbunyi: *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"* diubah menjadi *"Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Rumusan itu diajukan Mohammad Hatta setelah berkonsultasi dengan empat pemuka Islam, yaitu: **Ki Bagus Hadikusumo**, **K.H. Wachid Hasjim**, **Mr. Kasman Singodimedjo**, dan **Mr. Teuku Moh. Hasan**.

Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan mengenai rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan oleh BPUPKI berhasil dibahas dalam waktu kurang dari 2 jam. Disepakati bahwa Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan pengesahan UUD 1945 tersebut, Indonesia memiliki landasan hidup bernegara.

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Agenda pemilihan presiden dan wakil presiden oleh **Otto Iskandardinata** diusulkan agar dilakukan secara aklamasi. Calon yang diajukan menjadi presiden dan wakil presiden adalah Soekarno dan Hatta. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Soekarno dan Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden itu, Indonesia memiliki lembaga pemerintahan sendiri.

B. Penyusunan Kelengkapan Pemerintah Indonesia

Sebelum rapat PPKI pertama ditutup, Presiden menunjuk 9 orang anggota panitia kecil. Mereka bertugas untuk menyusun rancangan pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Panitia kecil ini terdiri atas **Otto Iskandardinata, Subardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amin, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi,** dan **Ketut Pudja.**

a. Penetapan pembagian wilayah

Dalam rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, hasil kerja panitia kecil yang dipimpin Otto Iskandardinata dibahas. Sidang memutuskan:

- Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur.
- Adanya Komite Nasional (daerah).

Berikut ini adalah pembagian wilayah Republik Indonesia beserta gubernurnya.

1. Sumatera : Mr.Teuku Mohammad Hassan
2. Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Panji Suroso
4. Jawa Timur : R.A. Suryo
5. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja
6. Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangie
8. Kalimantan : Pangeran Mohammad Noor

b. Pembentukan departemen dan kementerian

Sebelum rapat pleno pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Sukarno juga menunjuk Mr. Akhmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimejo untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan bentuk departemen.

Hasil kerja panitia kecil tersebut, kemudian dibicarakan dalam rapat pleno. Sidang memutuskan untuk menetapkan 12 kementerian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Kementerian yang ditetapkan itu antara lain:

1. Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Menteri Luar Negeri : Mr. Achmad Subarjo
3. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
4. Menteri Kehakiman : Supomo
5. Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Cokroadisuryo
6. Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
7. Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo
8. Menteri Pengajaran : Ki Hadjar Dewantara
9. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin
10. Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
12. Menteri Perhubungan a.i : Abikusno Cokrosuyoso
13. Menteri Negara : Wachid Hasyim
14. Menteri Negara : Dr. M. Amir
15. Menteri Negara : Mr. R.M. Sartono
16. Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

c. Pembentukan KNIP, Kepartaian, BKR/TKR/TNI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang tanggal 23 Agustus 1945 mengambil keputusan untuk membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.

1. *Pembentukan Komite Nasional*

Di seluruh wilayah Indonesia dibentuk Komite Nasional. Pusat Komite Nasional ada di Jakarta. Komite Nasional dibentuk untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan tata kenegaraan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional Indonesia (KNI) yang beranggotakan 400 orang diresmikan dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Kesenian yang terletak di Pasarbaru, Jakarta.

Susunan pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah sebagai berikut.

Ketua : Mr. Kasman Singodimejo

Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo

Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary

Wakil Ketua III: Adam Malik

Menurut Maklumat No. X, sebelum MPR dan DPR terbentuk, kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Pusat. Tugas Komite Nasional Pusat ini dalam praktiknya dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang bernama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Ketua BPKNIP adalah **Sutan Sjahrir**.

2. *Pembentukan organisasi ketentaraan*

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang. BKR adalah organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan rakyat. Pembentukan BKR mendapat sambutan dari masyarakat luas. Kebijaksanaan pemerintah menunda pembentukan tentara nasional menyebabkan situasi menjadi rawan. Di mana-mana terjadi pertempuran antara pemuda pejuang kemerdekaan melawan Jepang dan Sekutu yang diboncengi oleh NICA.

Melihat situasi tersebut, maka pemerintah memanggil Mayor KNIL **Oerip Soemohardjo** dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menyusun tentara nasional. Untuk mewujudkan pembentukan tentara nasional, pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 Oktober 1945. Maklumat itu menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut *Tentara Keamanan Rakyat* (TKR). Maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Bunyi maklumat itu sebagai berikut.

> Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat.
>
> Jakarta, 5 Oktober 1945
> Presiden Republik Indonesia
> Soekarno

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tersebut, **Oerip Soemohardjo** ditunjuk untuk membentuk markas tertinggi TKR di Yogyakarta. Ia diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR. Pemerintah menunjuk **Supriyadi** sebagai Panglima TKR.

Karena Supriyadi tidak pernah menduduki jabatannya, Markas Tertinggi TKR mengadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Peristiwa itu terjadi pada bulan November 1945. **Kolonel Sudirman** terpilih sebagai Panglima TKR. Kolonel Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945, dengan pangkat Jenderal. Oerip Soemohardjo tetap menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

RANGKUMAN

1. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
   - Golongan muda menghendaki proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari pemerintah Jepang.
   - Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah. Proklamasi kemerdekaan bisa dilakukan dengan jalan bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada rapat PPKI.
2. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Tujuannya ialah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang.
3. Dalam pembicaraan dengan Singgih, akhirnya Soekarno menyetujui desakan golongan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan pemerintah Jepang.
4. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, pada jam 23.00 WIB, rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.
6. Mulai tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Hasil-hasil dari sidang PPKI itu antara lain:
   - Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara dan memilih presiden dan wakil presiden.
   - Menetapkan pembagian wilayah.
   - Membentuk departemen dan kementerian.
   - Membentuk Komite Nasional, kepartaian, dan Badan Keamanan Rakyat.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Pada naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tertulis "hari 17 boelan 8 tahoen 05".
2. Bendera Merah Putih dijahit oleh ibu Fatmawati Soekarno.
3. Rapat raksasa Ikada diadakan untuk membela kepentingan Jepang.
4. Pada zaman Jepang,kantor berita Antara berada di bawah kantor berita Domei.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapilah dengan jawaban yang tepat!

1. Peran Komite van Aksi dalam upaya mendukung proklamasi kemerdekaan adalah ... .
2. PPKI dibentuk pada tanggal ... .
3. Sebelum proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh para pemuda dibawa ke luar kota Jakarta, yaitu ke ... .
4. Tiga orang tokoh pejuang yang menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta adalah ..., ..., dan ... .
5. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah ... .
6. Isi dari "Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945" adalah ... .
7. Berita proklamasi kemerdekaan disebarkan ke luar negeri melalui kantor berita ... .
8. Insiden bendera di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 terjadi di kota ... .
9. Menteri keamanan rakyat pada kabinet pertama pemerintah RI adalah ... .
10. Kabinet pertama pemerintah Republik Indonesia terdiri dari ... kementerian.

II. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Apa tujuan golongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok?
2. Masalah apa yang membuat hubungan golongan muda dan golongan tua menjadi tegang sebelum proklamasi kemerdekaan?
3. Mengapa golongan muda tidak mau membahas rencana proklamasi dilaksanakan dalam rapat PPKI?
4. Jelaskan proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda!
5. Apa inti dari rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945?
6. Bagaimana peran para pemuda dan pegawai kantor berita Domei dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia?
7. Sebutkan 3 hal pokok dari pidato Soekarno dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945!
8. Jelaskan dengan singkat jalannya rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945! Apa hasilnya?
9. Jelaskan mengenai keputusan rapat PPKI mengenai pembagian wilayah RI!
10. Siapakah Oerip Soemohardjo itu?

IV. Refleksi

A. Diskusi Kelompok

Dalam kelompok berisi empat orang diskusikan mengenai kemerdekaan, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Apakah kemerdekaan itu?
2. Ceritakan dengan singkat upaya-upaya apa yang ditempuh bangsa Indonesia hingga mampu merdeka!
3. Apakah kemerdekaan hanya bisa diraih dengan peperangan saja? Jelaskan!
4. Misalkan saat ini Indonesia belum merdeka, upaya apa yang akan kamu sumbangkan untuk dapat meraih kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu!

B. Menulis Esai

Tulislah esai reflektif tentang salah satu tokoh yang terdapat dalam subbab ini. Pilihlah tokoh yang paling kamu sukai, lalu ceritakan ulang mengenai dirinya dalam bentuk karangan.

Silakan gunakan informasi mengenai tokoh tersebut di berbagai buku, ensiklopedi, majalah, atau internet. Gunakan berbagai informasi tersebut untuk memperkaya tulisanmu!

Karena ini karangan yang sifatnya reflektif, tolong kemukakan pemikiranmu sendiri mengenai tokoh yang kamu pilih tersebut. Ceritakan pendapat dan perasaanmu mengenai dia, dan mengapa kamu memilih tokoh tersebut di antara semua tokoh lain yang terdapat dalam subbab ini.

Dalam menilai tulisanmu, gurumu akan menggunakan indikator berikut.

Rubrik Penilaian

Indikator	Nilai Kualitatif	Nilai Kuantitatif	Deskripsi Alasan
1. Pengetahuan tentang tokoh. 2. Kekuatan detail pada cerita. 3. Originalitas (keaslian tulisan). 4. Kemampuan mencari sumber-sumber dalam menulis refleksi. 5. Kesungguhan pendapat pribadi mengenai topik. 6. Kemampuan berbahasa Indonesia.			

Keterangan

Nilai Kualitatif	Nilai Kuantitatif	
1. Memuaskan	4	> 80
2. Baik	3	68–79
3. Cukup	2	56–67
4. Kurang	1	<55

UJI STANDAR KOMPETENSI

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini!

1. Perdana Menteri Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah ... .
   a. Jenderal H. Tojo
   b. Jenderal K. Koiso
   c. Jenderal K. Harada
   d. Marsekal Terauchi
2. BPUPKI dibentuk atas persetujuan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal ... .
   a. 1 Maret 1945
   b. 7 Maret 1945
   c. 7 Maret 1944
   d. 1 Maret 1944
3. Pancasila lahir dalam situasi ... .
   a. Sidang PPKI mengenai kemerdekaan Indonesia
   b. Sidang panitia sembilan mengenai dasar negara
   c. Sidang I BPUPKI mengenai dasar negara
   d. Sidang panitia perancang UUD negara
4. Tokoh yang mengemukakan dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ... .
   a. Mr. Moh Yamin
   b. Drs. Moh. Hatta
   c. Mr. Supomo
   d. Ir. Soekarno
5. Panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara itu disebut ....
   a. Piagam Jakarta
   b. Pancasila
   c. UUD Negara
   d. Konstitusi RIS
6. Tokoh yang terpilih sebagai ketua PPKI adalah ... .
   a. Dr. Radjiman W
   b. Drs. Moh. Hatta
   c. Ir. Soekarno
   d. Mr. Moh. Yamin
7. Bom Atom dijatuhkan pertama kali tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat di kota ... .
   a. Nagasaki
   b. Hisroshima
   c. Tokyo
   d. Nagata
8. Marsekal Terauchi memanggil tiga tokoh Indonesia ke Dalat, Saigon untuk ... .
   a. menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu
   b. menyampaikan agar Indonesia segera membentuk PPKI
   c. menyampaikan keputusan Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia
   d. menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia
9. Pemerintah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal ... .
   a. 7 Agustus 1945
   b. 10 Agusutus 1945
   c. 14 Agustus 1945
   d. 16 Agustus 1945
10. Perjuangan melawan Jepang yang tidak jauh berbeda dengan perlawanan sebelum pergerakan nasional adalah ... .
    a. gerakan bawah tanah Syahrir dan Amir Syarifuddin
    b. kaderisasi politik Putera
    c. pemberontakan PETA di Blitar
    d. perlawanan ilegal Wikana dkk
11. Anggota BPUPKI ada ... .
    a. 60 orang
    b. 61 orang
    c. 50 orang
    d. 55 orang
12. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada ... .
    a. 29 Mei - 1 Juli
    b. 29 Mei - 1 Juni
    c. 28 Mei - 1 Juni
    d. 28 Mei - Juli
13. Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, dibentuklah lembaga baru yang disebut PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal ... .
    a. 5 Agustus 1945 b. 6 Agustus 1945
    c. 7 Agustus 1945 d. 8 Agustus 1945
14. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat diundang ke markas besar Jenderal Terauci. Markas Jenderal Terauci itu ada di kota ... .
    a. Dallas b. Tokyo
    c. Hokaido d. Dalat
15. Dalam proses penentuan proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta sempat diculik ke Rengasdengklok. Peristiwa penculikan itu

terjadi pada tanggal ... .
a. 14 Agustus 1945
b. 12 Agustus 1945
c. 15 Agustus 1945
d. 16 Agustus 1945

16. Keputusan penting yang dihasilkan tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ... .
a. pengesahan UUD'45
b. terpilihnya presiden dan wakil presiden
c. pembentukan komite nasional
d. pembentukan badan perwakilan

17. Naskah Proklamasi Kemerdekaan disusun di ... .
a. Rengasdengklok
b. rumah milik Laksamana Maeda
c. rumah milik Ir Soekarno
d. Pegangsaan Timur no. 56

18. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di ... .
a. Linggajati c. Tuntang
b. Tuntang d. Bogor

19. Pernyataan kebulatan tekad rakyat Indnesia untuk membela proklamasi adalah ... .
a. pertempuran lima hari Semarang
b. pertempuran 10 November 1945 di Surabaya
c. rapat raksasa di Gambir
d. Bandung Lautan Api

20. Para pemuda mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena ... .
a. tidak sabar ingin merdeka
b. kaum muda memandang kaum tua terlalu lambat memproklamasikan kemerdekaan
c. berita kekalahan Jepang diketahui oleh kaum muda
d. menganggap bahwa situasinya tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan

21. Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan menjadi menteri ... .
a. kesehatan
b. pengajaran
c. penerangan
d. sosial

22. Tentara Keamanan Rakyat dibentuk pada tanggal ... .
a. 1 Juni 1945 c. 1 Juli 1945
b. 5 September 1945 d. 5 Oktober 1645

23 Dalam rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Indonesia dibagi dalam ... provinsi.
a. 6 c. 8
b. 7 d. 9

24. Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk tanggal 6 Oktober 1945 di ... .
a. Banda Aceh c. Bandung
b. Surabaya d. Bali

25. Peristiwa "Pertempuran Lima Hari" terjadi di kota... .
a. Sidoarjo c. Surabaya
b. Bandung d. Semarang

II. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimanakah pendapatmu mengenai peran Ir. Soekarno dalam BPUPKI?
2. Jelaskan tugas utama dari BPUPKI!
3. Sebutkan rumusan Pancasila menurut Soekarno!
4. Apa yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945?
5. Untuk apakah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia?
6. Dalam menentukan waktu dan cara proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Bagaimana pendapat kamu berkenaan dengan perbedaan pandangan golongan muda dan golongan tua tersebut!
7. Mengapa golongan muda tidak mau membahas rencana proklamasi dilaksanakan dalam rapat PPKI? Jelaskan!
8. Jelaskan tentang peristiwa Rengasdengklok dalam proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia!
9. Jelaskan proses perumusan teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945!
10. Jelaskan tentang tujuan PPKI dibentuk!
11. Bagaimana sikap Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia?
12. Apakah tujuan rakyat di sekitar Jakarta untuk berkumpul di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945?

Bab 6 Pranata dan Penyimpangan Sosial

Sumber: *Kompas, 15 Desember 2005*

Sumber: *Tempo 27 Des 2004 - 2Jan2005*

Sumber: *Buku Sosiologi SMP KBK, 2004*

Sumber: *Kompas,11 April 2006*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut ada yang bersifat asosiatif (yang lebih mengarah pada kerja sama dan persatuan) dan disosiatif (yang mengarah kepada merenggangnya hubungan sosial antarpihak).

Untuk menjaga agar hubungan masyarakat tertib, ada aturan main yang harus diikuti. Aturan itu, yakni pranata sosial. Terdapat berbagai jenis pranata, misalnya pranata keluarga, pranata agama, politik, dan pendidikan.

Sikap-sikap yang melanggar aturan main tersebut bisa dikatakan sebagai penyimpangan sosial. Pengendalian sosial diperlukan untuk mencegah dan mengatasi penyimpangan. Pengendali sosial antara lain dapat melalui agama, pendidikan, gosip, teguran, dan sanksi, sedangkan lembaga yang berfungsi dalam pengendalian sosial adalah polisi, pengadilan, adat, dan tokoh masyarakat.

Peta Konsep

Pranata dan Penyimpangan Sosial
Hubungan Sosial
Pengertian hubungan sosial
Bentuk-bentuk hubungan sosial
Pranata Sosial
Pengertian pranata sosial
Terbentuk dan berubah-nya pranata sosial
Fungsi pranata sosial
Ciri-ciri pranata sosial
Tipe-tipe pranata sosial
Macam-macam Pranata Sosial
Upaya Pengendalian Penyimpangan Sosial
Cakupan pengendalian sosial
Sifat pengendalian sosial
Cara pengendalian sosial
Jenis-jenis pengendalian sosial
Lembaga-lembaga yang berfungsi dalam pengendalian sosial
Akibat tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial

6.1 Hubungan Sosial

Setelah Digantung Delapan Bulan

Salah satu sudut ruang Gedung Yudhagama di Jalan Pulo Lentut, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat siang lalu tampak kumuh. Puluhan komputer berjejer penuh debu. Aneka buku dan dokumen bertumpuk tak keruan, sebagian di antaranya berceceran di lantai. Nyala lampu yang temaram dan ruang tanpa AC sungguh membuat suasana tak nyaman.

Tapi semua itu tak mengurangi antusiasme sejumlah awak harian *Berita Buana* dalam berdiskusi, menyusun langkah memperjuangkan nasib mereka. Sempat ada usul untuk berunjuk rasa ke kantor Grup Bakrie di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga melakukan mogok makan. Tujuannya satu, yakni menarik perhatian pemodal koran itu. Mereka sudah tak sabar menunggu sang investor membereskan berbagai masalah yang dihadapi koran yang sudah berhenti terbit ini.

Berbeda dengan yang lain, Dadang Sugandi, 40 tahun, wartawan yang biasa meliput berita seputar kriminal dan perkotaan mengusulkan agar mereka sebaiknya menggelar istigasah. Setelah saling berdebat, ide itulah yang dianggap terbaik. Jumat pekan ini, istigasah akan dilaksanakan di kantor *Berita Buana*. Sudah delapan bulan Dadang bersama sekitar 90 orang awak redaksi dan nonredaksi *Berita Buana* tak menerima gaji dan berbagai tunjangan lain.

Negosiasi dengan pihak manajemen, kata Ating Supriyatna dari bagian sumber daya manusia, sudah beberapa kali dicoba, tapi buntu. Mereka juga sudah mencoba melibatkan Departemen Tenaga Kerja. Upaya ini pun gagal. Akhirnya, setelah delapan bulan nasibnya digantung, mereka menempuh jalur hukum. Pada 25 Maret lalu para karyawan melaporkan PT Berita Media Buana ke Polres Jakarta Timur.

Akhir Mei lalu, diwakili Pengacara Junimart Girsang, karyawan *Berita Buana* menggugat Nirwan sebagai Komisaris Utama PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), yang menjadi pemegang saham PT Berita Media Buana, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karyawan koran sore ini menuntut ganti rugi lebih dari Rp 91 miliar. Sidang pertama akan digelar Rabu pekan depan. Karyawan belum lama ini juga mengadukan nasib mereka ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (***Sumber:*** *Tempo, 27 Juni 2004)*

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Kisah apa yang diceritakan dalam kutipan ini?
2. Bagaimana hubungan karyawan *Berita Buana* dengan perusahaan?
3. Apa yang dilakukan karyawan Berita Buana untuk menyelesaikan masalahnya?
4. Menurut pendapatmu, sudah tepatkah langkah yang diambil para karyawan *Berita Buana*?

Dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari hubungan dengan manusia lain. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri. Untuk mencukupi serta memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan seorang manusia selalu membutuhkan manusia lain. Dengan adanya saling ketergantungan itu terbentuklah hubungan-hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Mari kita ikuti uraiannya berikut ini.

6.1.1 Pengertian Hubungan Sosial

Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan, antara seseorang dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. **Soerjono Soekanto** dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* menuliskan bahwa **hubungan sosial** merupakan hubungan timbal balik antara organisasi-organisasi hidup yang sama spesiesnya. Hubungan-hubungan sosial itu terjadi dalam proses yang dinamis. Dalam sosiologi, hubungan-hubungan sosial yang dinamis itu disebut interaksi sosial. Muncul, bertahan, dan berubahnya kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial sangat dipengaruhi olah hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Apa dan bagaimanakah bentuk-bentuk hubungan sosial yang ada dalam masyarakat?

6.1.2 Bentuk-bentuk Hubungan Sosial

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial ini mengikuti kerangka pembahasan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang sudah pernah kita pelajari di kelas VII. Secara garis besar, bentuk-bentuk hubungan sosial itu dibagi dua, yaitu bentuk-bentuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif dan bentuk-bentuk hubungan sosial yang bersifat disosiatif.

A. Hubungan sosial yang bersifat asosiatif

Apakah kamu masih ingat definisi interaksi sosial? Apa saja syarat terbentuknya interaksi sosial? Hal yang terpenting dalam setiap interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Nah, interaksi sosial menyebakan terjalin atau terbangunnya hubungan sosial. Artinya, dua atau lebih orang yang melakukan interaksi sosial, pada saat yang bersamaan akan membentuk pula hubunan sosial. Ada hubungan sosial yang sifatnya kerja sama dan persatuan. Ada pulahubungan sosial yang sifatnya pertentangan, tidak ada kerja sama, dan tidak ada kesatuan.

Hubungan sosial yang bersifat asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang terbentuk dari proses interaksi yang mengarah pada bentuk kerja sama dan persatuan. Hubungan-hubungan sosial yang bersifat asosiatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerja sama *(cooperation)* dan akomodasi *(acommodation)*.

a. Kerjasama

Bentuk dan pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Sejak masih kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan kita sudah dikenalkan kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap kerja sama. Dengan demikian, ketika sudah dewasa, kita akan mempunyai bermacam-macam gambaran bentuk-bentuk kerja sama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian, harus ada kesadaran bahwa tujuan bersama tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semuanya.

Sumber: *Kompas, 15 Desember 2005*

Gambar 6.1.1
Ibu-ibu petani di Nusa Tenggara Barat bersama-sama memindahkan bibit padi untuk di tanam di sawah. Ini salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat.

Jadi, yang dimaksud dengan kerja sama di sini adalah suatu bentuk kerja sama antara orang perorangan atau kelompok manusia, untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.

Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di dalam masyarakat Indonesia dikenal bentuk kerja sama tradisional yang dikenal dengan nama "gotong royong". Berkaitan dengan gotong royong ini, sejak kecil ke dalam jiwa seseorang telah ditanamkan suatu pola perikelakuan agar dia selalu hidup rukun, terutama dengan keluarga. Lebih luas lagi, seorang anak diajar hidup rukun dengan orang lain di sekitarnya. Ajaran itu didasarkan pada suatu pandangan hidup bahwa seseorang tidak mungkin hidup sendiri tanpa kerja sama dengan orang lain. Pandangan hidup itu kemudian diwujudkan dalam bentuk gotong royong.

Coba lakukan sebuah kegiatan yang menunjukkan adanya kerja sama. Misalnya, gurumu memberi kamu tugas kelompok. Untuk melaksanakan tugas kelompok itu, apa langkah yang akan kamu tempuh? Kamu pasti mengumpulkan teman-teman dan membicarakan tugas tersebut. Ketika kamu berkumpul dan berdiskusi, kamu melakukan interaksi sosial dan membangun hubungan sosial. Hubungan sosial yang kamu bangun tersebut bersifat asosiatif, karena mengarah kepada kerja sama. Kerja sama yang kamu bangun memiliki satu tujuan, yakni bersama-sama mengerjakan tugas yang diberikan guru. Begitu tujuan tercapai, kerja sama bisa bubar sambil menunggu ada kerja sama lagi.

Berdasarkan pelaksanaan kerja sama, ada empat bentuk kerja sama, yaitu:

1. ***Bargaining (tawar-menawar)***
   Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya adalah kegiatan jual beli di pasar.

2. ***Kooptasi (cooptation)***
   Kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.

   Misalnya, Pak Gunawan diangkat sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta. Pak Gunawan dikenal sebagai orang baik, jujur, terbuka, apa adanya, dan suka membantu. Ketika masuk menjadi karyawan perusahaan

tersebut, Pak Gunawan menyadari bahwa di perusahaan itu sering terjadi tindakan penipuan. Meskipun demikian, Pak Gunawan tidak berani melaporkan hal itu kepada pihak berwenang. Alasannya, Pak Gunawan takut kehilangan pekerjaan. Karena itu, Pak Gunawan memutuskan untuk diam saja, yang penting bisa bekerja dan menerima upah setiap bulan. Di sini dapat dikatakan bahwa nilai hidup dan sikap Pak Gunawan sebelum bekerja di perusahaan swasta tersebut terkooptasi ke dalam praktik kerja perusahaan yang tidak baik.

3. ***Koalisi (coalition)***

   Koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Contohnya, Partai PDI Perjuangan bersama dengan Partai Golkar, PPP, dan PAN bekerja sama mencalonkan Fauzi Bowo sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

4. ***Joint venture***

   Joint venture adalah bentuk kerja sama perusahaan-perusahaan dalam mengusahakan proyek-proyek tertentu dengan perjanjian keuntungan menurut proporsi-proporsi yang tertentu. Maksudnya, keuntungan menurut sumbangan masing-masing perusahaan. Jadi, perusahaan yang pengeluarannya lebih besar sewajarnya menerima keuntungan yagn lebih besar pula.

   Contoh, pengusaha film Indonesia bekerja sama dengan pengusaha film Hongkong membuat sebuah film dengan perjanjian hasilnya dibagi antara kedua belah pihak.

b. Akomodasi

Istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk suatu keadaan dan untuk menunjuk suatu proses. Apa yang dimaksud dengan akomodasi sebagai suatu keadaan? Kita kembali ke contoh diskusi kelompok. Ketika diskusi kelompok sedang terjadi, sering muncul perbedaan pendapat. Kadang-kadang perbedaan pendapat bisa memicu terjadinya debat yang seru. Dalam perdebatan itu kemudian kamu mencapai suatu keputusan tertentu. Keputusan yang kamu ambil itu bisa diterima semua orang dalam kelompok diskusi tersebut. Alasannya, berbagai kepentingan sudah diwakili oleh keputusan bersama tersebut. Ini adalah keadaan keseimbangan dalam interaksi sosial. Inilah wujud dari akomodasi sebagai sebuah keadaan.

Dengan demikian, akomodasi disebut merujuk atau mendeskripsikan suatu keadaan jika suatu keadaan jika hubungan sosial dalam interaksi sosial menghasilkan keadaan keseimbangan. Dan bahwa keadaan keseimbangan yang dicapai ini tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Akomodasi sebagai suatu proses berarti usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan. Misalnya, polisi berusaha untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah kerusuhan antara warga desa A dan desa B.

Akomodasi sebagai sebuah proses dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu: koersi *(coercion)*, kompromi, arbitrasi *(arbitration)*, mediasi *(mediation)*, konsiliasi *(consilitation)*, toleransi *(toleration)*, *stalemate*, ajudikasi *(ajudication)*, dan asimilasi *(asimilation)*.

1. ***Koersi (coercion)***

Koersi *(Coercion)* adalah suatu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan. Salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah sekali bila dibandingkan dengan pihak lawan. Contoh *koersi* adalah perbudakan. Dalam perbudakan, interaksi sosialnya didasarkan pada penguasaan majikan atas budak-budaknya. Artinya, pihak yang lemah "terpaksa" setuju dan mengakomodasi kepentingan pihak yang kuat hanya karena posisinya yang lemah.

Coba kamu sebut beberapa contoh lain dari koersi. Kalau kamu belum paham, coba mencaritahu informasi mengenai koersi. Misalnya, dengan membaca berita mengenai tindakan-tindakan koersif tertentu. Setelah mengerti, coba kamu menganalisis keadaan di sekitarmu. Apakah kamu bisa menemukan contoh tindakan koersif di sekitarmu?

Sumber: associated press, 2007

Gambar 6.1.2
Junta Militer Myanmar mengharapkan kerja sama dari para biksu dan masyarakatnya dengan melakukan tindakan koersif. Masyarakat yang demonstrasi dan tidak setuju akan diganjar kekerasan.

2. ***Kompromi (compromise)***

Kompromi *(compromise)* adalah suatu bentuk akomodasi, di mana masing-masing pihak yang terlibat perselisihan mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contoh kompromi adalah traktat antara beberapa negara.

3. Arbitrasi (arbitration)

Arbitrasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik sosial dengan menghadirkan orang atau kelompok ketiga sebagai perantara. Pihak ketiga itu bisa berupa orang atau lembaga yang disepakati bersama. Syaratnya, pihak ketiga itu harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedua pihak yang bertikai. Contoh: pihak perusahaan pabrik tekstil "Sandang" dan serikat pekerja pabrik tekstil "Sandang" menunjuk Departeman Tenaga Kerja sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah perburuhan di pabrik tekstil "Sandang".

4 Mediasi (mediation)

Mediasi hampir serupa dengan arbitrasi. Pada mediasi, pihak ketiga diundang sebagai penengah perselisihan. Pihak ketiga ini harus netral. Tugas pihak ketiga adalah untuk mengusahakan penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga adalah sebagai penasihat. Dia tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan. Contoh: Pak RT bertindak sebagai penengah dalam perselisihan sebuah keluarga antara keluarga Susanto dan keluarga Sarwono.

5. Konsiliasi (conciliation)

Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan bersama. Contoh konsiliasi: dibentuknya sebuah panitia yang terdiri dari wakil-wakil perusahaan, wakil-wakil buruh, wakil-wakil Departemen Tenaga Kerja, yang secara khusus bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan jam kerja, upah, penentuan hari-hari libur, dan sebagainya.

Gambar 6.1.3
Palang Merah Internasional bernegosiasi dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyandera Fery Santoro, juru kamera RCTI. Ini adalah contoh mediasi dengan Palang Merah Internasional sebagai pihak netral.

6. Toleransi (toleration)

Toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang bentuknya formal. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan. Hal ini disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan. Contoh: toleransi antarumat beragama di Indonesia.

7. Stalemate

Stalemate adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan menghentikan pertentangan pada suatu titik tertentu karena mempunyai kekuatan yang seimbang. Dalam situasi ini, kedua pihak yang bertentangan tidak mungkin lagi maju atau mundur. Contoh: Rusia dan Amerika Serikat berkaitan dengan masalah nuklir.

8. Ajudikasi (Adjudication)

Adjudication adalah suatu bentuk penyelesaian perkara di pengadilan. Contoh: masalah sengketa tanah antara warga Meruya Selatan dengan PT Portanigra coba diselesaikan di pengadilan.

B. Hubungan sosial yang bersifat disosiatif

Hubungan sosial yang bersifat disosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antara dua pihak atau lebih. Ada tiga bentuk hubungan sosial yang bersifat disosiatif, yaitu persaingan *(competition)*, kontravensi *(contravention)*, dan pertentangan *(conflict)*.

a. Persaingan *(competition)*

Persaingan atau kompetisi dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan sosial di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian publik, atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ada dua tipe persaingan, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan tidak pribadi.

Dalam persaingan yang bersifat pribadi, orang perorangan secara langsung bersaing. Misalnya, orang bersaing untuk menjadi ketua kelas dalam pemilihan ketua kelas.

Dalam persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang langsung bersaing adalah kelompok-kelompok manusia. Misalnya, perusahaan penghasil *Pepsodent* dan perusahaan penghasil *Ciptadent* bersaing dengan untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah tertentu.

Dari dua tipe persaingan yang disebut tadi, kita dapat mengenal adanya empat bentuk persaingan.

Sumber: *Tempo*, 2 Mei 2004

Gambar 6.1.4
Ajang pencarian bintang AFI.
Para pesertanya bersaing secara pribadi untuk menjadi yang terbaik.

Keempat bentuk persaingan itu adalah sebagai berikut.

- Persaingan di bidang ekonomi.
- Persaingan di bidang kebudayaan.
- Persaingan untuk mencapai kedudukan dan peran tertentu.
- Persaingan ras.

b. Kontravensi *(contravention)*

Kontravensi pada dasarnya adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi adalah suatu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contoh atau bentuk nyata dari kontravensi antara lain: penolakan, memfitnah, menyebarkan desas-desus, menghasut, provokasi, menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, dan lain-lain.

c. Pertentangan *(conflict)*

Pertentangan atau konflik adalah suatu bentuk hubungan sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

Penyebab atau akar munculnya pertentangan antara lain adalah:

- perbedaan antara orang perorangan;
- perbedaan kebudayaan;
- bentrokan antara kepentingan-kepentingan;
- perubahan-perubahan sosial.

Ada beberapa bentuk khusus pertentangan, antara lain sebagai berikut.

- Pertentangan pribadi, misalnya rasa tidak suka antara dua orang dapat berubah menjadi kebencian, bahkan perkelahian.
- Pertentangan rasial, misalnya pertentangan antara orang-orang negro dengan orang-orang kulit putih di Amerika Serikat.
- Pertentangan antara kelas-kelas sosial, misalnya perbedaan kepentingan antara majikan dengan buruh.
- Pertentangan politik yang menyangkut baik antara golongan-golongan dalam masyarakat, maupun pertentangan antara negara-negara yang berdaulat. Misalnya, pertentangan yang terjadi antara Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan DPR berkaitan dengan interpelasi DPR.
- Pertentangan yang bersifat internasional, karena perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian menyangkut kedaulatan negara-negara yang saling bertentangan. Misalnya, konflik Indonesia dengan Malaysia karena masalah kepulauan Ambalat.

Akibat-akibat atau hasil dari bentuk-bentuk pertentangan tersebut antara lain adalah:

- bertambahnya rasa solidaritas dalam kelompok;
- goyah dan retaknya persatuan kelompok apabila terjadi pertentangan di dalam kelompok;
- berubahnya kepribadian individu-individu yang terlibat dalam pertentangan;
- hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia;
- akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak.

Sumber: *buku Sosiologi untuk SMP KBK 2004.*

Gambar 6.1.5
Polisi berkulit hitam ini tentu mengalami konflik peran. Sebagai polisi dia harus menegakkan hukum. Konflik peran terjadi ketika dia harus menegakkan hukum di antara warga kulit putih yang jelas membenci warga kulit hitam. Perhatikan tulisan di tembok yang menyatakan bahwa "no nigger allowed" (Orang Negro dilarang masuk!). Ini adalah contoh pertentangan rasial di Amerika Serikat.

RANGKUMAN

1. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan, antara seseorang dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok.
2. Muncul, bertahan, dan berubahnya kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial sangat dipengaruhi olah hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
3. Bentuk-bentuk hubungan sosial itu dibagi dua, yaitu bentuk-bentuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif dan bentuk-bentuk hubungan sosial yang bersifat disosiatif.
4. Hubungan sosial yang bersifat asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang terbentuk dari proses interaksi yang mengarah pada bentuk kerja sama dan persatuan.
5. Hubungan-hubungan sosial yang bersifat asosiatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerja sama *(cooperation)* dan akomodasi *(acommodation)*.
6. Yang dimaksud kerja sama adalah suatu bentuk kerja sama antara orang perorangan atau kelompok manusia, untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
7. Berdasarkan pelaksanaannya, ada empat bentuk kerja sama, yaitu: *bargaining*, kooptasi *(cooptation)*, koalisi *(coalition)*, dan *joint venture*.
8. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk suatu keadaan dan untuk menunjuk suatu proses.
9. Sebagai suatu proses, akomodasi berarti usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangandemi mencapai kestabilan.
10. Akomodasi sebagai sebuah proses dapat dibagi ke dalam 8 bentuk, yaitu: koersi *(coercion)*, komprومi *(compromise)*, arbitrasi *(arbitration)*, mediasi *(mediation)*, konsiliasi *(consilitation)*, toleransi *(toleration)*, *stalemate*, dan ajudikasi *(ajudication)*.
11. Hubungan sosial yang bersifat disosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antara dua pihak atau lebih.
12. Ada tiga bentuk hubungan sosial yang bersifat disosiatif, yaitu persaingan *(competition)*, kontravensi *(contravention)*, dan pertentangan *(conflict)*.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Salinlah dan lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Dalam sosiologi, hubungan-hubungan sosial yang dinamis itu disebut ... .
2. Bentuk hubungan sosial yang terbentuk dari proses interaksi yang mengarah pada bentuk kerja sama dan persatuan adalah bentuk hubungan yang bersifat ... .
3. Bentuk hubungan antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama adalah ... .
4. Salah satu contoh kerja sama adalah ... .
5 Kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama adalah ... .
6. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk suatu keadaan dan menunjuk ... .
7. Suatu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan adalah ... .
8. Suatu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan menghadirkan orang ketiga sebagai perantara disebut ... .
9. Bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang bentuknya formal disebut ... .
10. Suatu sikap mental tersembunyi terhadap orang tertentu atau kebudayaan tertentu yang sifatnya disosiatif disebut ... .

II. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan hubungan sosial menurut Soerjono Soekanto!
2. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial!
3. Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk kerja sama berdasarkan pelaksanaannya!
4. Jelaskan pengertian arbitrasi!
5. Apa yang dimaksud dengan pertentangan atau konflik?

III. Menjodohkan

Bacalah baik-baik soal-soal di bawah ini kemudian carikan jawabannya di kotak yang tersedia di bawah!

Contoh Hubungan Sosial	Jenis Hubungan Sosial
1. Agar bisa mengalahkan temannya dalam pelajaran Bahasa Inggris, Tina mengikuti les bahasa Inggris.	a. *Bargaining*
2. Setelah tawar menawar, ia berhasil mendapatkan harga lebih murah.	b. Koersi
3. Ibu guru menengahi kedua murid yang sedang bertengkar itu.	c. Toleransi
4. Buruh menginginkan kenaikan upah 20 %, tetapi pengusaha menginginkan kenaikan 5 %. Keduanya bersepakat untuk menaikkan upah 10%.	d. Mediasi
5. Polisi menembak kaki penjahat tersebut yang berusaha kabur itu.	e. Persaingan
6. Keluarga korban kecelakaan menuntut maskapai penerbangan tersebut ke pengadilan, dengan tuntutan tidak menghiraukan keselamatan penumpang.	f. Kontravensi
7. Ia menyebarkan kepada semua orang bahwa Adi adalah seorang pencuri.	g. Ajudikasi
8. Meski sedang berpuasa, Ali tidak keberatan melihat kawan-kawannya makan di hadapannya.	h. Kompromi

IV. Studi Kasus Kelompok

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini, diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kelompok berisi tiga orang!

KASAK KUSUT FILM INDONESIA

Beberapa pekerja film menggugat Lembaga Sensor Film (LSF) ke Mahkamah Konstitusi. Kinerja dan komposisi anggota LSF dianggap tidak relevan dengan kondisi riil industri perfilman.

Menurut Mira Lesmana, salah seorang anggota Masyarakat Film Indonesia(LFI), LSF tampak kewalahan harus menghadapi banyaknya produk yang disensor. Ia khawatir ada bagian film atau iklan yang tiba-tiba luput dari sensor padahal bagian tersebut harusnya dihilangkan. Apalagi jum-lah anggota LSF hanya 42 orang. Buktinya masih banyak adegan kekerasan anak-anak yang lolos di sinetron televisi.

LSF yang diketuai oleh Titie Said, seorang novelis, dengan Drs Soetjipto sebagai wakil menolak jika dikatakan lembaga tersebut kewalahan mengatasi film yang masuk. Proses penyensoran bisa digenjot sehari enam sesi. "Mau malam, ayo. Cukup kok anggotanya. Kami bisa melakukan tiga sesi siang, tiga malam. Capek tidak apa-apa," ungkap Titie.

Saat ini nasib LSF berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Mira Lesmana, Riri Reza dan kawan-kawan tengah menyiapkan platform pengganti. Menurut keduanya, satu yang paling penting, yakni lembaga klasifikasi. Lembaga itu berisikan orang-orang dunia perfilman yang dipilih melalui *fit and proper test*.

Meski merasa sudah melakukan klasifikasi, Titie setuju bahwa LSF harus mengalami perubahan struktur dengan aturan-aturan baru. Perubahan pada UU Perfilman, misalnya dibuat ketika stasiun televisi masih satu, yakni TVRI.

Dedy Mizwar yang bertindak sebagai Ketua Badan Pertimbangan Film Nasional mencoba menjembatani kedua lembaga tersebut. Ia sepakat tentang perubahan UU Perfilman. Ia juga tidak anti pada kemungkinan lembaga klasifikasi.

Tapi menurut Dedy Mizwar, semua pelaku industri film harus duduk bersama. Saling curiga harus ditiadakan. *(Disarikan dari artikel "Sensor, Oh Sensor" Majalah Tempo, 7-13 April 2008)*

A. Menjawab pertanyaan

1. Menunjukkan hubungan apakah perkumpulan yang dibuat oleh para pekerja film di Indonesia?
2. Bagaimanakah sifat hubungan antara LSF dan MFI ? Jelaskan!
3. Jenis hubungan apa yang kamu temui sesudah MFI mengadukan LSF ke Mahkamah Konstitusional? Jelaskan!
4. Apakah proses *bargaining* yang dilakukan oleh Riri Reza dan Mira Lesmana? Jelaskan!
5. Disebut sebagai apakah tindakan Dedy Mizwar untuk menengahi kedua kelompok tersebut?
6. Jenis hubungan sosial apakah yang disarankan Dedy Mizwar kepada LSF dan MFI?

B. Portofolio

Buatlah sebuah karangan tentang hubungan-hubungan sosial yang pernah kamu alami sendiri. Sebutkan setidaknya enam peristiwa, sertai dengan penjelasan termasuk dalam jenis hubungan sosial apa keenam peristiwa tersebut! Ceritakan pula tentang perasaanmu saat mengalami keenam peristiwa tersebut!
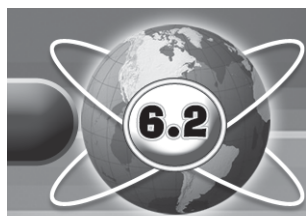
6.2 Pranata Sosial

Keluarga Ahmad

Pada pagi hari keluarga Ahmad melakukan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Ahmad membantu ayah mencuci pakaian. Keluarga Ahmad berbagi tugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga di pagi hari. Ibu menyiapkan hidangan untuk sarapan sekaligus hidangan untuk makan siang. Ayah mencuci pakaian dibantu Ahmad. Fajar membersihkan rumah mungil mereka, menyapu, dan mengepel lantai. Ayah dan ibu Ahmad memang sengaja tidak mempekerjakan pembantu rumah tangga. Mereka bertekad untuk mendidik Ahmad dan Fajar menjadi pribadi yang mandiri. Ahmad dan Fajar tidak memprotes keputusan itu karena mereka selalu diberi pengertian, diajak musyawarah, dan lebih-lebih diberi teladan oleh orang tua mereka.

Dengan pembagian tugas, pekerjaan rumah tangga cepat selesai. Keluarga bisa sarapan bersama, Ahmad serta Fajar tidak terlambat berangkat sekolah, demikian juga ayah dan ibu tidak terlambat berangkat kerja. Pukul 06.30 biasanya keluarga Ahmad telah siap sarapan pagi bersama.

"Ahmad berangkat sekolah, Yah! Ahmad berangkat sekolah, Bu!" pamit Ahmad sambil mencium tangan ayah dan ibunya setiap berangkat ke sekolah. Tiap hari Ahmad bersepeda ke sekolahnya. Ahmad lebih senang bersepeda karena jalan-jalan di kota kecilnya belum begitu ramai dengan kendaraan bermotor. Ahmad tidak sendirian bersepeda ke sekolah, teman-temannya dari SMP Negeri 5 seperti Andre, Dadang, Ipam, Naga, Nyoman, Maya, Inez, Putri, dan Nike juga bersepeda. Ahmad belum pernah mengalami kecelakaan di jalan karena ia selalu hati-hati. Ia selalu ingat pesan ibunya untuk tidak tergesa-gesa bersepeda, berjalan di sebelah kiri, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Ahmad tidak pernah terlambat masuk sekolah. Ia bersepeda sekitar sepuluh menit dari rumahnya. Padahal hampir semua temannya pernah harus melapor guru piket dan menunggu di luar kelas sampai pelajaran pertama selesai gara-gara terlambat datang di sekolah. Bahkan beberapa temannya pernah diberi sanksi karena telah beberapa kali terlambat datang ke sekolah. Selain itu, orang tua mereka juga dipanggil ke sekolah. "Beruntunglah aku punya orang tua yang selalu mengarahkan aku sehingga aku tidak pernah terlambat," batin Ahmad setiap kali ada temannya yang terpaksa menunggu di luar kelas atau dihukum karena terlambat.

Memang keluarga Ahmad dikenal sebagai keluarga muslim yang taat beribadah. Selain salat subuh, keluarga Ahmad juga melakukan salat magrib dan isya' berjamaah. Ayah, ibu, Fajar, dan Ahmad sendiri dikenal warga sebagai pribadi yang ramah, santun, dan berbudi pekerti luhur. Tidak heran keluarga Ahmad menjadi panutan keluarga-keluarga di kampungnya.

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Kebiasaan apa saja yang dilakukan keluarga Ahmad di pagi hari?
2. Bagaimana pandangan tetangga-tetangga sekitar tentang keluarga Ahmad? Mengapa keluarga Ahmad dijadikan panutan?
3. Mengapa orang tua Ahmad tidak mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga? Apakah Ahmad dan Fajar keberatan dengan keputusan orang tua mereka? Mengapa?
4. Dapatkah kamu menyebutkan salah satu aturan yang diterapkan di sekolah Ahmad? Apa sanksi terhadap pelanggaran aturan itu?
5. Menurutmu apa saja fungsi sebuah keluarga bagimu?

Pernahkah kamu mendengar peribahasa "di mana kaki berpijak, langit dijunjung"? Makna peribahasa tersebut adalah kita harus mentaati hukum, peraturan, adat-istiadat, ataupun norma-norma masyarakat di mana kita berada. Pasti kamu setuju dengan anjuran peribahasa tersebut! Mengapa? Karena hanya dengan mematuhi norma-norma yang dijunjung tinggi di tempat di mana kita berada, kita bisa diterima oleh anggota masyarakat yang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, niscaya kita akan kena sanksi sosial.

Kapan dan di mana pun kita berada pasti berhadapan dengan "peraturan." Tiap kelompok sosial mempunyai "peraturan" yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya. Dengan mentaati "peraturan" kelompok sosialnya, tiap individu yang menjadi anggota suatu kelompok sosial tersebut memiliki pola tingkah laku yang sama.

Kalau kamu membaca secara cermat cerita di atas, kamu pasti dapat menjelaskan "peraturan" kelompok sosial apa saja yang dijalankan oleh Ahmad. Aturan main apa saja yang dipatuhi Ahmad?

1. Ahmad menjalankan "peraturan" keluarganya. Bersama seluruh anggota keluarga Ahmad menjalankan tugas di pagi hari yang telah ditentukan keluarganya. Meskipun tidak tertulis, dari cerita tersebut kita bisa mengatakan salah satu "peraturan" dalam keluarga Ahmad berbunyi *"setiap anggota menjalankan tugas yang telah ditentukan bersama."*

   Coba bandingkan dengan "peraturan" yang ada di rumahmu sendiri. Pasti masing-masing kamu memilikinya. Apa "peraturan" yang harus kamu lakukan ketika bangun pagi atau sebelum tidur? Coba beritahu teman-temanmu peraturan atau ketentuan tersebut!
2. Ahmad menjalankan "peraturan" agama yang dianutnya. Pasti kamu langsung bisa menebak bahwa keluarga Ahmad adalah keluarga muslim. Sebagai seorang muslim Ahmad menjalankan tata cara yang telah digariskan oleh agamanya. Yang terlihat dalam cerita di atas adalah tata cara bagaimana berdoa/salat. Salah satunya sebelum salat, seseorang harus menyucikan diri atau wudhu terlebih dahulu.
3. Ahmad mematuhi "peraturan" berlalu lintas. Sebagai pengguna jalan raya, Ahmad mematuhi "aturan main" berlalu lintas. Misalnya, ia bersepeda di lajur sebelah kiri. Supaya tidak mengalami kecelakaan, Ahmad juga mematuhi nasihat ibunya untuk berhati-hati di jalan.
4. Ahmad mematuhi "peraturan" di sekolahnya. Tiap sekolah tentu memiliki aturan, misalnya tentang waktu atau jam belajar. Biasanya sudah ditentukan jam berapa proses belajar dimulai. Para siswa diharuskan tidak terlambat sampai ke sekolah. Setiap sekolah punya cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah siswa yang terlambat datang. Di sekolah Ah-mad misalnya, siswa yang terlambat diharus-kan melapor ke guru piket dan menunggu sampai pelajaran pertama selesai. Bila bebera-pa kali telat diberi peringatan dan orang tua siswa dipanggil ke sekolah.

Dari cerita singkat dan pembahasan di atas kita bisa mengatakan bahwa ada banyak kelompok sosial dengan "peraturan" sendiri-sendiri. Seorang individu bisa menjadi anggota dari beberapa kelompok sosial dan harus mematuhi "peraturan" kelompok-kelompok sosial tersebut. Dalam cerita di atas, Ahmad adalah anggota dari kelompok sosial keluarga, masyarakat, agama, dan sekolah. Tampak Ahmad harus mematuhi "peraturan" keluarga, agama, lalu lintas, dan sekolah. Tentu kamu juga menjadi anggota dari beberapa kelompok sosial, bukan? Apa saja kelompok sosial itu dan apa saja "peraturan" yang ada?

Gambar 6.2.1
Keluarga Ahmad melakukan salat berjamaah sesuai dengan anjuran dalam agama Islam.

Ada kalanya peraturan kelompok sosial yang satu selaras dengan peraturan kelompok sosial lainnya. Misalnya, dalam keluarga Ahmad ditentukan bahwa anggota keluarga melakukan salat subuh berjamaah. Apa yang ditentukan keluarga Ahmad tersebut selaras dengan anjuran agama Islam untuk salat berjamaah. Namun, ada kalanya ada gesekan atau pertentangan antara aturan main kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain.

"Peraturan" suatu kelompok sosial selalu berkembang menjawab kebutuhan kelompoknya. Ketika sebuah keluarga hanya terdiri dari suami dan istri dan belum ada anak-anak, maka "peraturan" keluarga tersebut sebatas mengatur kebutuhan suami dan istri. Namun ketika sudah ada anak-anak, peraturan berkembang. Keluarga tersebut mulai membuat "peraturan" yang memasukkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka. Peran suami yang semula hanya sebagai pasangan seorang istri bertambah menjadi seorang ayah dari anak-anaknya. Demikian juga istri, ia sekaligus berperan sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya. "Peraturan" baru yang mengatur hubungan sosial antara suami (ayah), istri (ibu), dan anak akan membantu pemenuhan kebutuhan masing-masing anggota keluarga itu.

Biasanya "peraturan" yang dinilai baik oleh anggota kelompok dipertahankan. "Peraturan" yang dinilai kurang memuaskan diubah, disempurnakan, atau bahkan dibuang. "Peraturan-peraturan" yang ada menjadi patokan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari kebiasaan itu muncul pola perilaku yang terlembaga. Maksudnya, ada pola perilaku yang ditetapkan secara resmi dan berlaku umum. Yang bertugas menetapkan pola perilaku supaya berlaku umum adalah masyarakat sendiri, yakni kelompok sosial.

"Peraturan-peraturan," yang dianggap baik oleh anggota kelompok sosialnya tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Lama-kelamaan

"peraturan-peraturan" begitu menyatu dengan kelompok sosial yang memilikinya. Dapat diumpamakan bahwa "peraturan atau ketentuan" menjadi roh atau jiwa dan lembaga menjadi bentuk fisik suatu kelompok sosial.

Apa yang telah kita bahas sampai saat ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah pranata sosial. Ada banyak pranata sosial yang harus kita patuhi dalam hidup ini. Dalam bahasan lebih lanjut kita akan mengulas secara umum apa itu pranata sosial, kemudian akan dibahas juga bentuk-bentuk dan fungsi pranata sosial yang mendasar.

6.2.1 Pengertian Pranata Sosial

Coba carilah dalam kamus Bahasa Indonesia arti kata *lembaga, institusi,* dan *pranata!* Dalam kamus sering ketiga kata tersebut saling menjadi padanan atau makna dari kata yang lain. Meskipun begitu, dalam pembicaraan sehari-hari muncul kesan spontan bahwa kata *lembaga* dan *institusi* berarti organisasi atau asosiasi. Misalnya kita mengenal ada lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, institusi sosial, dan sebagainya. Sementara *pranata* lebih mengarah ke seperangkat aturan atau norma. Misalnya pranata agama, pranata adat, dan sebagainya. Benarkah kesan itu?

Ketiga kata di atas, lembaga, institusi, dan pranata, sebenarnya ingin menerjemahkan kata *social institution.* **Selo Soemardjan** dan **Soelaeman Soemardi** menerjemahkan *social institution* dengan kata "lembaga kemasyarakatan." Sementara **Koentjaraningrat, Mely G. Tan,** dan **Harsja W. Bachtiar** menerjemahkan kata *social institution* dengan istilah "pranata" (Lihat Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm. 55). Jelaslah sekarang, dalam pengertian sosiologi kata *pranata, institusi*, dan *lembaga sosial* dapat disejajarkan. Ketiga kata ini (dalam pembahasan selanjutnya akan disebut *pranata sosial*) berbeda artinya dengan organisasi atau asosiasi. Perbedaan kedua hal ini akan kita bahas setelah kita membahas mak-na pranata sosial.

Apa sebenarnya pengertian pranata atau institusi sosial itu? Sejumlah ahli mencoba memberikan definisi pranata sosial, di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut **Robert MacIver** dan **C.H. Page** pranata sosial adalah *prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.*

   Cerita di atas dapat dipakai untuk memahami definisi ini. Dalam keluarga Ahmad terdapat tata cara yang diciptakan secara sengaja untuk mengatur hubungan antaranggota keluarga. Dalam praktiknya, tata cara ini akan menjadi panduan bertingkah laku. Demikian pula dengan tata cara yang diciptakan untuk mengatur ketertiban lalu lintas, ketertiban di sekolah, di masyarakat, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi harus diingat, bahwa tata cara atau aturan dibuat secara sengaja untuk mengatur hubungan antaranggota suatu kelompok sosial.

2. Menurut **Leopold Von Wiese** dan **Becker** pranata sosial adalah *jaringan proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya.*

   Sebagai mahkluk sosial, manusia harus hidup berdampingan dan bersama dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama itu sangat diperlukan peraturan. Nah, peraturan inilah yang mengatur bagaimana kepentingan masing-masing individu tidak saling bertentangan. Peraturan juga akan menjamin kelanggengan atau keberlangsungan hidup bersama. Berdasarkan definisi ini, hubungan atau interaksi sosial dalam sebuah kelompok sosial diatur oleh peraturan. Nah, peraturan yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan kelompok sosialnya atau kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lainnya menunjukkan adanya *jaringan proses hubungan*.

3. Menurut **Bruce J. Cohen,** pranata sosial adalah *sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.*

   Di sini Cohen menekankan salah satu aspek yang juga penting dari pranata sosial, yakni sifat permanen. Ini mau menegaskan bahwa pranata sosial diadakan atau diciptakan manusia untuk waktu yang relatif lama. Masyarakat

Sumber: *Kompas, 11 April 2006*

Gambar 6.2.2
Pengendara motor tidak mengikuti aturan main lalu lintas, dan berhenti di zebra cross.

atau suatu kelompok sosial akan menjadi terganggu dan cenderung tidak stabil kalau pranata sosial berubah terlalu cepat.

4. Menurut **Koentjaraningrat,** pranata sosial adalah *suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat*.

   Di sini tampak yang lebih ditonjolkan adalah pranata ekonomi. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan itu bersifat terbatas. Karena itu, perlu ada pranata sosial yang mengatur dan mengelola sumber daya alam tersebut. Inilah pranata ekonomi. Pranata ini yang nantinya akan mengatur aktivitas dan hubungan antarmanusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

   Misalnya, Perusahaan Air Minum (PAM) adalah sebuah pranata ekonomi. Tugas utama dari PAM adalah mengolah air (sumber daya alam) menjadi air yang bersih, sehat, dan layak digunakan. PAM kemudian menjual air tersebut kepada masyarakat.

5. Menurut **Soerjono Soekanto** pranata sosial adalah *himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu pokok di dalam kehidupan masyarakat*. Di sini Soerjono Soekanto berusaha merangkum seluruh pranata sosial yang ada dalam satu definisi saja.

Dari beberapa definisi di atas, kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang pranata sosial, antara lain sebagai berikut.

- Pranata sosial berisikan seperangkat norma yang yang saling berkaitan, saling bergantung, dan saling memengaruhi. Seperti yang ditunjukkan dalam cerita di atas. Pranata sosial keluarga mengajarkan nilai dan norma tertentu kepada Ahmad yang ternyata juga sejalan dengan apa yang akan diajarkan pranata pendidikan, politik, dan sebagainya.
- Pranata sosial dibentuk, dipertahankan, dan diubah untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Di sini pranata sosial dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.
- Pranata sosial membentuk pola-pola perilaku sosial yang permanen, tersusun rapi, dan teratur.

Dari apa yang telah diungkapkan di atas menjadi jelas pranata sosial berbeda dengan organisasi atau asosiasi. Meskipun berbeda, kedua hal ini memiliki hubungan yang sangat erat. Pranata menunjuk sistem norma yang ada. Organisasi merupakan wujud konkret dari norma-norma tersebut. Perhatikan contoh supaya lebih jelas!

Pranata sosial	Organisasi/Asosiasi
Agama	Gereja, Masjid
Pendidikan	SD, SMP, SMA
Politik	Partai, Parlemen
Perekonomian	Perusahaan, PT
Kesehatan	Rumah sakit

Berdasarkan penjelasan dan contoh yang telah kamu pelajari di atas, sekarang cobalah cari organisasi atau asosiasi dari pranata peradilan dan olah raga!

6.2.2 Terbentuk dan berubahnya Pranata Sosial

Bagaimana pranata sosial terbentuk? Bagaimana pranata sosial berubah?

A. Proses terbentuknya pranata sosial

Pranata sosial dibentuk, disempurnakan, dan dipertahankan oleh manusia. Proses pembentukan pranata sosial berawal dari sejumlah nilai yang dicita-citakan oleh suatu kelompok manusia atau masyarakat. Dari nilai-nilai bersama kelompok sosial tersebut kemudian terbentuk norma. Bertambah luasnya kebutuhan dan semakin kompleksnya hubungan sosial dalam kelompok tersebut menyebabkan bertambahnya norma-norma yang ada. Dari sana terbentuklah seperangkat sistem norma yang kita sebut **pranata sosial**. Proses pembentukan pranata sosial dari sejumlah norma yang ada ini disebut dengan **pelembagaan** atau **institusionalisasi.** Proses pelembagaan berlangsung dalam waktu yang lama melalui internalisasi dalam kebiasaan masyarakat.

Proses terjadinya suatu pranata sosial dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu *secara tidak terencana* dan *terjadi dengan sengaja*.

a. Terjadi secara tidak terencana

Pranata sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam perkembangan tersebut muncul pranata sosial secara bertahap dalam kehidupan manusia.

Contoh: Ketika kebutuhan masyarakat masih sederhana dan perdagangan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, perdagangan cukup dilakukan dengan barter (tukar-menukar barang). Setelah kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan perdagangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka dibutuhkan alat tukar yang lebih fleksibel. Maka diciptakan uang sebagai alat tukar. Kemudian berkembang ada banyak surat dan barang berharga yang digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan. Untuk lebih memudahkan transaksi, dewasa ini, orang sering menggunakan kartu kredit. Munculnya alat-alat tukar-menukar yang baru itu tentu saja membutuhkan seperangkat aturan tersendiri misalnya berapa nilai alat tukar (uang), siapa yang harus membuat, bagaimana perbandingan nilai mata uang kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, dan sebagainya.

Sumber: *Kompas, 1 April 2006.*

Gambar 6.2.3
Pasar adalah salah satu pranata sosial yang mengatur pertukaran barang dan jasa pemuas kebutuhan manusia. Pasar semakin lama semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan manusia.

b. Terjadi dengan sengaja (direncanakan)

Pranata sosial juga bisa lahir dari suatu perencanaan matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang demi suatu tujuan. Perhatikan dua contoh berikut ini.

- Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah membuat ketentuan tanam paksa untuk mendatangkan pemasukan bagi kas negaranya.
- Untuk mengatasi praktik korupsi yang meraja lela Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkaitan dengan itu dibuat aturan-aturan bagaimana pengangkatan anggota KPK, masalah apa saja yang menjadi wewenang KPK, bagaimana prosedur yang harus dijalani, dan sebagainya.

B. Perubahan pranata sosial

Pranata sosial tidak berhenti atau statis. Pranata sosial bergerak dinamis seiring dengan kebutuhan masyarakat. Jika suatu pranata sosial tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, biasanya pranata tersebut diubah. Perubahan pranata sosial terjadi dalam interaksi di antara warga masyarakat.

Ada pranata sosial yang dapat diubah dengan mudah. Namun, ada juga yang sulit atau bahkan tidak bisa diubah. Pranata-pranata yang memiliki nilai kemanusiaan universal biasanya tidak bisa diubah. Perubahan terhadap pranata sosial semacam ini akan menimbulkan kekacauan. Misalnya, larangan untuk membunuh, larangan untuk melakukan hubungan *incest*, dan anjuran untuk menghormati martabat orang lain, merupakan bentuk-bentuk yang tidak mungkin diubah. Bandingkan misalnya dengan semboyan *"mangan ora mangan asal kumpul"* (baik makan maupun tidak makan asal berkumpul) dan *"banyak anak banyak rezeki."* Meskipun butuh waktu yang cukup lama, semboyan-semboyan yang demikian bisa berubah. Semakin majunya pendidikan turut menunjang perubahan pandangan tersebut. Ada juga aturan-aturan yang bersifat sementara. Misalnya, beberapa aturan pada Liga Sepak Bola Indonesia tahun 2004 sudah berbeda dengan Liga Sepak Bola Indonesia tahun 2005.

Pranata sosial yang dianggap baik oleh masyarakatnya terus dipertahankan meskipun terjadi pergantian generasi dalam masyarakat itu. Mengapa demikian? Ada dua alasan pokok mengapa pranata sosial terus bertahan, yaitu:

a. Proses internalisasi pranata sosial

Setiap individu menginternalisasi pranata sosial masyarakatnya sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai atau norma-norma dalam diri atau batin seseorang. Internalisasi dapat disebut juga proses pembatinan.

Dalam diri setiap orang ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga nilai-nilai dan norma-norma tersebut mendarah daging dalam dirinya. Norma-norma yang diinternalisasi diterima sebagai hal yang benar, baik, dan luhur sehingga patut dipertahankan keberadaannya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pranata sosial cenderung dipertahankan.

Tiap generasi menanamkan pranata sosial masyarakatnya kepada generasi berikutnya. Demikianlah, orang tuamu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dulu mereka terima dari kakek dan nenekmu. Seperti kamu sekarang sering dinasihati untuk hormat pada orang tua dan guru, orang tuamu juga mendapat nasihat yang sama dari kakek dan nenekmu. Mengapa mereka melakukan demikian? Karena mereka meyakini hal itu benar, baik, dan luhur.

b. Kontrol sosial

Pernahkah kamu ditegur, diperingatkan, dan dihukum karena melanggar peraturan? Atau sebaliknya, pernahkah kamu dipuji oleh guru atau orang tuamu karena mengerjakan PR? Apa yang pernah kamu alami itu adalah bagian dari kontrol sosial. Kontrol sosial adalah mekanisme dalam kehidupan bermasyarakat yang dijalankan untuk menjamin agar individu tetap mematuhi norma-norma yang berlaku. Kontrol sosial dilakukan dengan memberikan sanksi positif bagi mereka yang mematuhi norma-norma sosial dan sanksi negatif bagi mereka yang melanggar. Sanksi positif bisa berupa pujian, hadiah, penghargaan, dan pengakuan. Sedangkan sanksi negatif bisa berupa celaan, teguran, peringatan, hukuman, dan pengucilan. Dengan kontrol sosial anggota masyarakat dapat diarahkan untuk taat kepada norma-norma. Ketaatan pada norma-norma sosial yang diakui bersama menjamin bertahannya suatu pranata sosial.

Sumber: *intisari, 2006*

Gambar 6.2.3
Anak-anak dan guru yang terlambat masuk ke sekolah wajib lapor kepada guru piket. Ini contoh sebuah kontrol sosial. Dengan kontrol sosial, anggota masyarakat dapat diarahkan untuk taat kepada norma-norma yang ada.

6.2.3 Fungsi pranata sosial

Kira-kira apa yang terjadi jika semua peraturan yang ada di keluarga dan di sekolahmu dihapuskan? Pasti akan timbul kekacauan di keluarga dan di sekolahmu, bukan? Entah kamu sadari atau tidak, peraturan-peraturan tersebut sangat penting untuk menjaga agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Sekarang coba pikirkan apa fungsi peraturan-peraturan di keluarga dan sekolahmu.

Di atas sudah dibahas bahwa salah satu unsur pranata sosial adalah seperangkat sistem norma. Kamu pasti juga tahu bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok sosial dalam masyarakat. Norma atau aturan tersebut dipakai sebagai panduan dan pengendali tingkah laku. Berbagai ketentuan inilah yang menjamin kelangsungan hidup suatu masyarakat berjalan dengan baik. *Secara ringkas dapat dikatakan* pranata sosial *berfungsi untuk menjaga suatu masyarakat atau kelompok sosial agar dapat berjalan secara tertib.*

Para ahli melihat lebih terperinci apa saja fungsi pranata sosial. Maka, dapat dibedakan beberapa fungsi pranata sosial.

A. Berdasarkan disadari tidaknya fungsi suatu pranata sosial

Berdasarkan disadari atau tidak disadarinya fungsi suatu pranata sosial oleh suatu kelompok sosial atau masyarakat, fungsi pranata sosial dibedakan menjadi:

- Fungsi manifes, yaitu fungsi pranata sosial yang disadari dan menjadi harapan masyarakat secara keseluruhan.
- Fungsi laten, yaitu fungsi pranata sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama keseluruhan masyarakat. Fungsi laten tidak tampak secara nyata dan tidak diharapkan oleh masyarakat, namun betul-betul ada.

B. Berdasarkan positif/tidaknya kontribusi pranata sosial bagi masyarakat

Berdasarkan positif atau tidaknya kontribusi atau sumbangan pranata sosial bagi kelangsungan hidup masyarakat, pranata sosial dibedakan menjadi:

- Pranata sosial fungsional, yaitu pranata sosial yang ikut mendukung kelangsungan hidup masyarakat.
- Pranata sosial disfungsional, yaitu pranata sosial yang merugikan kelangsungan hidup masyarakat.

Dari macam-macam fungsi pranata sosial di atas ada empat kemungkinan kombinasi pranata sosial, yaitu:

- ***Fungsional manifes* (*nyata*)**

  Fungsi pranata sosial disadari dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.
  Contoh:
  - Pranata keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi yang berlaku dalam masyarakat.

- Pranata politik berfungsi sebagai sarana mengatur kehidupan bernegara supaya tercipta kehidupan yang tertib.

◆ ***Fungsional laten (terselubung)***

Fungsi pranata sosial tidak disadari namun mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Contoh:

- Pranata keluarga berfungsi sebagai tempat mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di dunia kerja dan dunia pendidikan.

◆ ***Disfungsional manifes (nyata)***

Fungsi pranata sosial disadari namun tidak mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Contoh:

- Perkawinan dalam pranata keluarga dijadikan sarana menutup rasa malu dari anggapan tidak menikah berarti tidak laku.

◆ ***Disfungsional laten (terselubung)***

Fungsi pranata sosial tidak disadari dan tidak mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Contoh:

- Pranata politik digunakan sebagai sarana memperoleh kekuasaan dan kekayaan.

6.2.4 Ciri-ciri pranata sosial

Ada ciri-ciri yang selalu terdapat dalam setiap pranata sosial. Ciri-ciri yang selalu ada adalah: memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi, usianya lebih panjang daripada usia orang yang membuatnya, memiliki kelengkapan, dan memiliki ideologi.

A. Setiap pranata sosial memiliki simbol sendiri

Setiap pranata sosial memiliki simbol. Simbol tersebut menandai kekhasan suatu pranata sosial dan memberikan indentitas kepada anggota-anggotanya. Simbol-simbol pranata sosial menggambarkan tujuan dan fungsi pranata sosial yang bersangkutan.

Perhatikan contoh simbol-simbol pranata sosial berikut ini.

◆ Simbol-simbol pranata keluarga antara lain cincin kawin dan pancangan janur yang menandakan adanya pembentukan keluarga baru.

◆ Simbol-simbol pranata politik misalnya bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Sumber: Indonesian Heritage, 2002

Gambar 6.2.4
Burung garuda Pancasila, lambang negara Republik Indonesia.

◆ Simbol bisa berupa patung atau gambar, wanita memegang timbangan dan pedang dengan mata tertutup di lembaga peradilan. Wanita yang digambarkan tersebut adalah Dewi Keadilan, yang siap mengadili (memegang pedang), dengan pertimbangan yang adil (memegang timbangan), tanpa pandang bulu (mata tertutup). Dengan lambang itu, lembaga peradilan ingin menjadi hakim yang memberikan putusan dengan pertimbangan yang adil tanpa pandang bulu. Lembaga peradilan seharusnya memberikan keadilan baik kepada yang kaya maupun yang miskin, baik kepada yang berkuasa maupun yang tidak berdaya.

B. Pranata sosial memiliki tata tertib dan tradisi

Peraturan-peraturan yang harus kamu taati di keluarga dan di sekolahmu tentu berbeda bukan. Itu menandakan bahwa tata tertib yang berlaku di sekolah berbeda dengan tata tertib yang berlaku di keluarga. Di sekolah kamu diperlakukan sebagai siswa sementara di rumah kamu diperlakukan sebagai anak. Meskipun kadang ada kesamaan, peran seorang anak dan seorang siswa berbeda bukan?

Tiap pranata sosial memiliki tata tertib dan tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Tata tertib dan tradisi tersebut menjadi panutan bagi para anggota pranata yang bersangkutan. Di rumah, ayah (suami), ibu (istri), dan anak-anak mengikuti pranata keluarga. Di sekolah, kepala sekolah, para guru, karyawan, dan para siswa harus taat pada pranata pendidikan. Dalam kehidupan bernegara semua warga, baik pejabat maupun warga biasa harus taat pada pranata politik yang ada.

C. Usia pranata sosial lebih panjang daripada usia orang-orang yang membuatnya

Pada umumnya usia pranata sosial lebih lama dibandingkan usia anggota pranata sosial tersebut. Berbagai aturan yang terdapat dalam pranata sosial biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Kakek dan nenek kita mungkin juga harus mentaati berbagai aturan pranata keluarga yang kita taati sekarang.

D. Pranata sosial memiliki kelengkapan

Tiap berangkat sekolah kamu pasi membawa buku dan alat-alat tulis. Buku dan alat-alat tulis merupakan perlengkapan dalam pranata pendidikan. Tiap pranata sosial memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pranata sosial tersebut. Pistol dan senjata api merupakan kelengkapan pranata keamanan. Truk dan alat-alat angkut lainnya merupakan kelengkapan pranata perdagangan.

E. Pranata sosial memiliki ideologi

Ideologi adalah sistem gagasan mendasar yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu kelompok sosial. Ideologi digunakan untuk menafsirkan berbagai hal yang sudah, sedang, dan yang akan datang dalam kehidupan. Contoh ideologi pranata pendidikan adalah meluaskan wawasan dan kemandirian peserta didik. Banyaknya lulusan sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran dapat ditafsirkan sebagai kegagalan pranata pendidikan.

6.2.5 Tipe-tipe pranata sosial

Ada banyak tipe pranata sosial dalam masyarakat. Mari kita perhatikan 2 klasifikasi pranata sosial menurut **John Lewis Gillin** dan **John Philip Gillin** dan **Koentjaraningrat** berikut ini!

A. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin

John Lewis Gillin dan John Philip Gillin membuat klasifikasi tipe-tipe pranata sosial dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa sudut pandangnya antara lain dari sudut perkembangannya, dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, dari sudut sistem penerimaan masyarakat, dari sudut penyebarannya, dan dari sudut fungsinya.

1. Dari sudut perkembangannya

Dari sudut perkembangannya, pranata sosial dibedakan menjadi:

- *Institusi yang sifatnya alamiah (crescive institution)*, yaitu pranata yang tumbuh dari adat-istiadat masyarakat secara tidak disengaja. Contoh: pranata perkawinan, pranata hak-hak milik, dan pranata agama. Di sini kata *crescive* dimengerti sebagai sesuatu yang berkembang secara alamiah dan bertahap, seperti perkembangan tumbuhan, yakni dari biji, bertunas, dan berkembang menjadi sebatang pohon, dan sebagainya.
- *Institusi yang dibentuk (enacted institutions)*, merupakan pranata yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Meskipun sengaja dibuat, pranata-pranata ini berakar pada kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian diatur dan disalurkan dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara. Contoh: lembaga utang-piutang, perdagangan, dan pendidikan.

Sumber: *Dokumen Penerbit, 2006.*

Gambar 6.2.5
Pegadaian merupakan salah satu lembaga utang-piutang. Lembaga ini dibentuk secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat. Lembaga ini sebenarnya berakar dari kebiasaan meminjam uang dalam masyarakat dengan jaminan tertentu.

2. Dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat

Dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, pranata sosial dibedakan menjadi:

- *Institusi utama (basic institutions)*, yaitu pranata sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh: pranata keluarga, pendidikan, dan negara.
- *Institusi tambahan (subsidiary institutions)*, yaitu pranata sosial yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Contoh: pranata rekreasi, asuransi, dan koperasi.

3. Dari penerimaan masyarakat

Dari penerimaan masyarakat, pranata sosial dibedakan menjadi:

- *Institusi-institusi yang sah diakui masyarakat (approved/sanctioned institutions)*, yaitu pranata-pranata sosial yang diterima oleh masyarakat. Contoh: sekolah, perusahaan dagang, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan lain-lain.
- *Institusi-institusi yang tidak diakui masyarakat (unsanctioned institutions)*, yaitu bentuk-bentuk pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contohnya, sindikat pengedar narkotika, sindikat pencurian, sindikat perdagangan manusia, sindikat pelacuran, sindikat perjudian, dan lain-lain.

4. Dari sudut penyebarannya

Dari sudut penyebarannya, pranata sosial dibedakan menjadi:

- *Institusi-institusi umum (general institutions)*, yaitu pranata-pranata yang menyebar di seluruh masyarakat dunia. Contoh: pranata agama.
- *Institusi-institusi terbatas (restricted institutions*, yaitu pranata-pranata yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contoh: pranata agama Islam, pranata agama Kaharingan, Kristen, Hindu, dan Buddha.

5. Dari sudut fungsinya

Dari sudut fungsinya, pranata sosial dibedakan menjadi:

- *Institusi-institusi yang sifatnya operatif (operative institutions)*, yaitu pranata yang menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh pranata pertanian berguna untuk mencapai tujuan masyarakat agraris. Di sini kata *operative* (kata sifat) berasal dari kata kerja *to operate* yang artinya mengerjakan atau *menjalankan sesuatu*. Jadi, jenis institusi yang dikaitkan dengan kata ini tentu institusi yang mengerjakan atau menjalankan sesuatu demi mencapai tujuan dari mereka yang membentuk institusi tersebut.
- *Institusi-institusi regulatif (regulative institutions)*, yaitu pranata yang bertujuan mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga itu sendiri. Contoh: pranata hukum, kejaksaan, peradilan, dan kepolisian. Kata *regulative* adalah kata sifat dari kata kerja *to regulate*, artinya mengatur atau mengelola.

B. Menurut Koentjaraningrat

Koentjaraningrat membedakan 8 macam pranata sosial, yaitu:

- Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan *(kinship)*. Contoh: pelamaran, perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak.
- Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup (*economic institutions*). Contoh: pertanian, peternakan, perburuhan, dan industri.
- Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan (*educational institutions*). Contoh: Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi.

Sumber: *Majalah Tempo 30 agustus- 5 sept 04*

Gambar 6.2.5
Sekolah Terbuka merupakan salah satu contoh pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

- Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. Contoh: metode ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, eksperimen, dan observasi.
- Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani/batin dalam menyatakan keindahan dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni lukis, seni drama, dan seni tari.
- Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: masjid, gereja, doa, selamatan, dan upacara.
- Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompok atau bernegara. Contoh: pemerintahan demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, dan kejaksaan.
- Pranata yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani. Contoh: pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan kedokteran.

6.2.6 Macam-macam Pranata Sosial

Apa yang telah kita bahas sejauh ini masih berkaitan pranata sosial secara umum. Kita akan membahas lebih lanjut beberapa bentuk pranata sosial

yang pokok, yaitu pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik. Apa fungsi pranata-pranata tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut!

A. Pranata keluarga

Keluarga merupakan salah satu pranata sosial yang amat penting. Sebagai satuan sosial terkecil, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi terciptanya kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. Dalam keluargalah setiap individu dipersiapkan untuk menjalani perannya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hubungan sosial bisa terjadi berkat jasa sebuah keluarga.

Keluarga dapat dilihat sebagai satu kesatuan kekerabatan sekaligus satu satuan tempat tinggal. Oleh karena itu, keluarga memiliki ciri-ciri adanya kerja sama ekonomi, berfungsi untuk proses regenerasi, dan menolong serta melindungi yang lemah seperti anak-anak serta orang yang sudah jompo.

a. Proses terbentuknya keluarga

Pada umunya, awal terbentuknya keluarga melalui sebuah proses perkawinan. Dari proses perkawinan ini dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti.

Perkawinan menjadi hal yang amat penting dalam semua masyarakat, baik bagi mereka yang menjalani perkawinan, keluarga, maupun masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tampak bahwa perkawinan memiliki nilai yang tinggi dan sakral. Biasanya setiap perkawinan diselenggarakan dengan upacara tertentu, baik upacara adat maupun agama guna mengekalkan hubungan suami istri dan keturunannya.

b. Macam-macam keluarga

Dari berbagai kajian sosiologis dikenal beberapa tipe keluarga. Tipe-tipe keluarga ini didasarkan pada ikatan mana yang dipentingkan, kedudukan seseorang dalam keluarga, dan siapa saja yang menjadi anggota keluarga.

1. *Berdasarkan ikatan mana yang dipentingkan*

Berdasarkan ikatan mana yang dipentingkan dikenal *keluarga konsanguinal* dan *keluarga konjungal*.

- Keluarga konsanguinal menekankan pada pentingnya ikatan darah, seperti hubungan antara seseorang dengan orang tuanya. Ikatan seseorang dengan orang tuanya dianggap lebih penting daripada ikatan suami istri. Dalam keluarga Jepang dan Cina tradisional misalnya, seorang anak laki-laki akan memihak orang tuanya ketika orang tuanya berselisih dengan istrinya.
- Keluarga konjungal lebih menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (hubungan suami istri). Ikatan dengan suami atau istri dianggap lebih penting daripada ikatan dengan orang tua.

2. *Berdasarkan kedudukan seorang dalam keluarga*

Berdasarkan kedudukan seorang dalam keluarga dikenal *keluarga orientasi* dan *keluarga prokreasi*.

- Keluarga orientasi ialah keluarga yang di dalamnya seseorang dilahirkan. Misalnya, keluargamu sekarang ini di mana kamu sekarang adalah seorang anak.
- Keluarga prokreasi adalah keluarga yang dibentuk seseorang dengan jalan menikah dan mempunyai keturunan. Kelak kamu akan membentuk keluarga baru dan akan memiliki anak-anak dari perkawinanmu.

3. *Dilihat dari siapa saja yang menjadi anggota keluarga*

Dilihat dari siapa saja yang menjadi anggota keluarga, dikenal *keluarga batih (nuclear family)* dan *keluarga luas (extended family).*

- Keluarga batih *(nuclear family)* merupakan satuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- Keluarga luas *(extended family)* terdiri atas beberapa keluarga batih. Contoh keluarga luas adalah *joint family*. *Joint family* terdiri atas beberapa orang laki-laki kakak beradik beserta anak-anak mereka dan saudara kandung perempuan mereka yang belum menikah. Laki-laki tertua dalam keluarga itu menjadi kepala keluarga ketika ayah mereka sudah meninggal. Bentuk keluarga demikian ini dijumpai di India dan Pakistan.

4. *Berdasarkan asal suami atau istri*

Berdasarkan asal suami atau istri dikenal perkawinan *endogami* dan perkawinan *eksogami*.

- Endogami adalah sistem perkawinan yang mewajibkan orang mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri (kelompok ras, agama, suku bangsa, kasta atau kelas sosial). Contoh: Laki-laki dari Suku Jawa menikah dengan perempuan dari Suku Jawa.
- Eksogami adalah sistem perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya (kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman). Contoh: Seorang laki-laki dari desa A harus menikah dengan se-
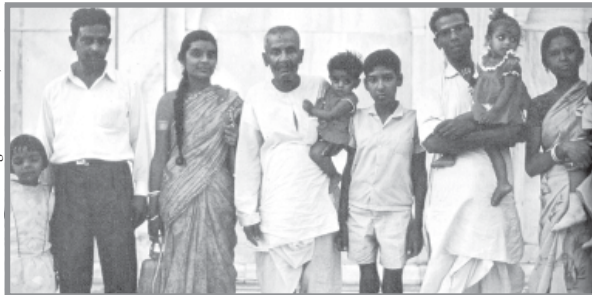
Gambar 6.2.6
Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak (atas). Keluarga luas terdiri dari kakek, nenek, anak-anak bersama ayah dan ibu, serta para cucu (bawah).

orang perempuan dari desa B karena ada larangan mengambil istri dari desa yang sama.

Selain perkawinan eksogami dan endogami, berdasarkan asal usul suami istri masih dikenal istilah *homogami* dan *heterogami*.

- Homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari keluarga yang memiliki kelas sosial yang sama tinggi. Misalnya perkawinan antara sesama anak bangsawan.
- Sedangkan heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Misalnya, pernikahan seorang anak konglomerat yang berasal dari kelas atas dengan anak seorang pedagang kecil dari kelas bawah.

5. *Berdasarkan hubungan kekerabatan*

Menurut hubungan kekerabatan dikenal istilah perkawinan *eleutherogami*, *cross cousin marriage*, dan *parallel cousin marriage*.

- *Eleutherogami* adalah perkawinan antara pria dan wanita dari keluarga atau klan mana saja. Sistem inilah yang dewasa ini dianut kebanyakan masyarakat, terutama masyarakat di kota-kota.
- *Cross cousin marriage* (perkawinan sepupu silang) yaitu perkawinan seseorang dengan anak saudara laki-laki ibu (paman dari pihak ibu) atau dengan anak saudara perempuan ayah (bibi dari pihak ayah).
- *Parallel cousin marriage* (Perkawinan sepupu sejajar), yaitu perkawinan seseorang dengan anak suadara laki-laki ayah atau dengan anak saudara perempuan ibu.

6. *Berdasarkan jumlah suami atau istri*

Berdasarkan jumlah istri atau suami secara umum dikenal perkawinan *monogami* dan *poligami*.

- Monogami adalah perkawinan antara satu pria dan satu wanita.
- Poligami adalah perkawinan antara seseorang dengan lebih dari satu suami atau istri Perkawinan poligami bisa dibedakan menjadi dua, yaitu *poligini* dan *poliandri*.
  - ☑ Poligini adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. Poligini dibagi dua, yaitu *poligini sororal* dan *poligini nonsororal*.
    - Poligini sororal adalah perkawinan seorang pria dengan beberapa wanita yang bersaudara kandung.
    - Poligini nonsororal adalah perkawinan seorang pria dengan beberapa wanita yang bukan saudara kandung.
  - ☑ Poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa pria pada waktu yang sama. Perkawinan poliandri dijumpai di antara orang-orang Eskimo, Markesas di Oceania, Toda di India Selatan, dan di antara beberapa suku di Afrika Timur. Poliandri dibagi dua, yaitu *poliandri fraternal* dan *poliandri nonfraternal*.
    - Poliandri fraternal adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa pria yang bersaudara kandung.
    - Poliandri nonfraternal adalah antara seorang wanita dengan beberapa pria yang bukan saudara kandung.

Selain bentuk perkawinan monogami dan poligami, meskipun sangat jarang, juga dikenal perkawinan kelompok *(group married). Perkawinan kelompok adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih.*

c. Berbagai aturan dalam perkawinan

Keluarga merupakan pranata sosial yang sangat kompleks. Mungkin kamu belum menyadari banyak hal dalam adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakatmu berkaitan dengan pranata keluarga. Pranata keluarga misalnya mencakup berbagai kebiasaan atau aturan dalam hal perkawinan dan keturunan.

Tiap masyarakat memiliki aturan atau kebiasaan mengenai perkawinan. Aturan atau kebiasaan itu misalnya tentang aturan asal suami atau istri, banyaknya orang yang boleh dinikahi dalam wak-

tu yang sama, kebiasaan di mana menetap setelah perkawinan, dan aturan mengenai penentuan garis keturunan.

1. *Aturan tentang asal suami istri*

Salah satu aturan atau kebiasaan perkawinan yang terdapat di hampir semua masyarakat adalah mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Salah satu yang sangat terkenal adalah *incest taboo.* Yang dimaksud *Incest taboo* adalah larangan hubungan perkawinan dengan anggota keluarga yang sangat dekat. Misalnya perkawinan antara anak perempuan dengan ayahnya, anak laki-laki dengan ibunya, dan antara saudara kandung.

Dalam masyarakat ada aturan yang menetapkan dari mana istri atau suami harus diambil. Berkaitan dengan ini, dikenal beberapa bentuk perkawinan berikut ini.

- Perkawinan *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*.
- Perkawinan antarsepupu (*cross cousin marriage* dan *parallel cousin marriage*).

2. *Aturan mengenai jumlah istri atau suami*

Berdasarkan berapa jumlah istri atau suami secara umum dikenal perkawinan *monogami* dan *poligami*. Selain bentuk perkawinan bentuk perkawinan monogami dan poligami, meskipun sangat jarang, juga dikenal perkawinan kelompok (*group married*).

Perkawinan monogami paling banyak dianjurkan dan paling banyak dijumpai. Banyak masyarakat atau agama yang menganjurkan perkawinan monogami. Masyarakat Indonesia, menuruti tradisi masyarakat setempat, aturan agama, dan Undang-Undang Perkawinan dalam menjalani perkawinan. Kebanyakan masyarakat Indonesia menganjurkan perkawinan monogami.

Pada zaman dahulu para kepala suku dan para raja berpoligini tak terbatas. Sekarang kebiasaan tersebut mulai hilang. Negara Indonesia mengatur poligini dengan Undang-undang perkawinan. Dalam aturan agama Islam dikenal poligini terbatas. Seorang Muslim diperbolehkan memiliki paling banyak empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligini dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang berat. Jika syarat-syarat tersebut diabaikan maka poligini sebetulnya diharamkan. Jadi, pada prinsipnya dalam Islam perkawinan adalah monogami. Agama Kristen tidak mengizinkan poligami. Dalam agama Kristen hanya dibolehkan perkawinan monogami.

Sumber: *Indonesian Heritage, 2002*

Gambar 6.2.7
Pernikahan adat Bali. Masyarakat Indonesia menuruti tradisi, aturan agama, dan Undang-Undang Perkawinan dalam menjalani perkawinan.

3. *Aturan pola menetap sesudah perkawinan*

Ada bemacam-macam kebiasaan di mana pasangan suami istri yang baru menikah harus menetap. Kebiasaan-kebiasaan di mana pasangan suami istri baru menetap membentuk pola-pola menetap, antara lain: patrilokal, matrilokal, neolokal, avunkulokal, natalokal, dan komonklokal.

- Patrilokal (*virilokal*). Dalam pola ini pasangan suami istri yang menetap di sekitar kediaman kerabat suami.
- Matrilokal (*uxorilokal*). Menurut pola ini pasangan suami istri yang menetap di sekitar kediaman kerabat istri.
- Neolokal. Dalam pola ini pasangan suami istri menetap di daerah baru, di luar lingkungan kediaman keluarga suami maupun istri.
- Avunkulokal. Menurut pola ini pasangan suami istri menetap di kediaman saudara laki-laki ibu (paman) dari pihak suami.
- Natalokal. Menurut pola ini suami dan istri tidak tidak tinggal bersama melainkan tetap tinggal di tempat kelahiran masing-masing dan hanya bertemu untuk waktu yang pendek.
- Komonlokal. Menurut pola ini pasangan suami istri bertempat tinggal dalam kelompok yang terdiri dari orang tua kedua belah pihak.

4. *Aturan tentang garis keturunan atau kekerabatan*

Ada banyak kebiasaan atau pola perilaku yang dikembangkan dari sitem kekerabatan itu. Salah satunya sebutan-sebutan untuk saudara atau kerabat.

Secara umum dibedakan dua bentuk sistem kekerabatan, yaitu *bilateral* dan *unilateral* (unilineal).

- Sistem kekerabatan bilateral

  Sistem bilateral menghitung garis keturunan atau kekerabatan baik melalui pihak laki-laki (ayah) maupun pihak perempuan (ibu) sama kuat. Maka sistem ini sering juga disebut sistem *parental* (*parent* = orang tua). Sistem kekerabatan *bilateral* dipakai di banyak suku di Indonesia, misalnya Jawa, Sunda, Bali, Aceh, dan sebagai-

nya. Orang-orang Jawa dan Sunda misalnya, menghitung kekerabatan tujuh generasi ke atas dan ke bawah, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

- Sistem kekerabatan unilateral (unilineal)

  Sistem kekerabatan unilateral menarik garis keturunan atau kekerabatan dari satu salah satu pihak, yaitu dari pihak ayah saja atau dari pihak ibu saja. Sistem kekerabatan unilateral dibedakan menjadi dua, yaitu:

  ☑ Patrilineal, yaitu penarikan garis kekerabatan atau keturunan melalui pihak laki-laki (ayah). Sistem kekerabatan ini paling banyak dijumpai di dunia. Di Indonesia suku-suku yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal antara lain Suku Batak, Nias, Maluku, Timor, Flores, dan Gayo.

  ☑ Matrilineal, yaitu penarikan garis keturunan atau kekerabatan dari pihak perempuan (ibu) saja. Pola matrilineal antara lain dijumpai di Suku Minangkabau di Sumatera Barat dan Bajawa serta Ngada di Flores.

d. Fungsi keluarga

Apa saja yang telah kamu dapatkan dari keluargamu? Bila kamu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal itu, tentu banyak hal yang dapat kamu sebutkan. Mungkin kamu akan menyebut perawatan, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, perhatian, orang tua yang baik, kakak adik yang baik, dan makanan sebagai hal-hal yang kamu dapatkan dari keluarga. Mungkin juga kamu bisa menyebut lebih banyak hal lagi. Pendeknya, keluarga sangat penting bagi anggota-anggotanya.

Kalau kita melihat lebih luas, ternyata keluarga tidak hanya penting bagi anggota keluarga. Keluarga merupakan pranata yang amat penting dalam kehidupan sosial. Keluarga sangat berguna bagi masyarakat. Keluarga bisa menjalankan berbagai fungsi yang dibutuhkan masyarakatnya. Keluarga bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga kontrol, lembaga ekonomi, dan lembaga-lembaga lain meskipun tidak formal. Semua itu dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan sosial.

Paul B. Horton dan **Chester L. Hunt** menyebutkan beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi pengaturan seks, reproduksi, sosialisasi, afeksi, definisi status, perlindungan, dan ekonomi. Mari kita bahas satu per satu fungsi keluarga tersebut.

1. *Pengaturan seks*

Tiap orang mempunyai dorongan seksual. Namun, semua masyarakat mempunyai aturan bagaimana penyaluran dorongan seksual itu dilakukan. Tidak ada masyarakat yang memperbolehkan hubungan seks sebebas-bebasnya antara siapa saja dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat hanya membenarkan penyaluran dorongan seksual antara sepasang pria dan wanita yang sudah menikah. Keluarga berfungsi untuk mengatur penyaluran dorongan seks.

2. *Reproduksi*

Dari keluarga lahir anak-anak, individu-invidu baru. Dengan demikian keluarga menjalankan fungsi reproduksi. Reproduksi akan menjamin kelangsungan suatu kelompok sosial.

Gambar 6.2.8
Keluarga memberikan pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak-anak. Seorang anak yang tidak menerima cinta kasih dalam keluarga dapat mengalami penyimpangan perilaku, menderita gangguan kesehatan.

3. *Sosialisasi*

Keluarga merupakan tempat terjadinya proses sosialisai yang pertama bagi setiap individu. Keluargalah yang pertama-tama mengarahkan seseorang bertindak sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Lewat sosialisasi yang terjadi dalam keluarga individu dapat menjalankan peran yang diharapkan darinya. Keluarga sekaligus juga menjadi lembaga pengontrol perilaku sosial. Tiap keluarga memberikan pengawasan terhadap perilaku anggotanya.

4. *Afeksi*

Keluarga memberikan pemenuhan kebutuhan afeksi anak-anak. Keluarga memberikan cinta kasih kepada seorang anak. Betapa pentingnya fungsi afeksi keluarga tampak dari hasil studi yang memperlihatkan bahwa seorang anak yang tidak menerima cinta kasih dalam keluarga dapat berkembang menjadi penyimpang, menderita gangguan kesehatan, dan meninggal.

5. *Pemberian status*

Keluarga memberikan status pada seorang anak. Dengan dilahirkan dalam keluarga tertentu seorang anak memperoleh status yang terkait de-

ngan jenis kelamin, urutan kelahiran, dan hubungan kekerabatan. Selain itu seorang anak juga dimasukkan dalam status sosial orang tuanya.

Selain itu, dengan membentuk keluarga sepasang pria dan wanita mendapat status sosialnya tersendiri. Mereka mendapat status baru sebagai suami atau istri kemudian sebagai orang tua. Mereka juga diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa yang harus bertanggung atas keluarga, anak-anak, dan masyarakatnya.

6. *Perlindungan*

Tentu kamu masih ingat bagaimana orang tua mengurusmu ketika masih kecil, bukan? Itu merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan keluarga. Keluarga memberikan perlindungan baik fisik maupun psikis pada anggotanya, terutama anggota yang lemah. Anak-anak dan orang yang telah lanjut usianya atau jompo adalah anggota keluarga yang lemah. Dalam ketidakberdayaan itu mereka bisa merasa aman karena diurus oleh keluarga.

7. *Ekonomi*

Dari mana kamu mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari? Sebagian besar dari kamu tentu masih sangat tergantung secara ekonomis terhadap orang tua bukan? Memang keluarga, terutama orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anggotanya. Tugas mencari nafkah pada keluarga tradisional dibebankan di pundak seorang suami. Dalam keluarga modern tugas mencari nafkah biasanya dijalani bersama baik suami maupun istri.

Keluarga juga menjadi unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjalani fungsi ekonomi. Keluarga dalam batas-batas tertentu telah melakukan semua kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

e. Peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian

Keluargamu sangat berperan bagi pembentukan kepribadianmu. Tentu kamu bisa menemukan kesamaan-kesamaan sifat di antara anggota keluargamu bukan. Kesamaan sifat di antara anggota keluargamu itu bukan kebetulan. Ini memperlihatkan bahwa keluarga sangat berperan bahwa keluarga sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang.

Apa itu kepribadian? Sebenarnya kepribadian adalah konsep yang abstrak. Namun bukan berarti kita tidak bisa memberikan definisi terhadapnya. Kepribadian adalah cara khas seseorang berpikir, merasa, dan berkelakuan.

Bagaimana kepribadian seseorang terbentuk? Pertanyaan ini menjadi perhatian banyak ahli antropologi dan ahli psikologi. **John Locke** pada tahun 1690 sudah mengemukakan teori yang disebut dengan teori *tabula rasa.* Menurut teori tabula rasa, manusia yang baru lahir itu masih bersih seperti batu tulis atau kertas yang masih kosong dan akan menjadi seperti apa ia kelak ditentukan oleh pengalaman hidupnya. Jadi, menurut teori ini semua individu memiliki potensi kepribadian yang sama. Kepribadian yang berbeda-beda setelah ia dewasa terbentuk dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda menurut kebudayaannya masing-masing. Kebanyakan ahli dewasa ini tidak sepenuhnya menerima teori tabula rasa dari **John Locke** ini. Diakui memang pengalaman-pengalaman turut membentuk kepribadian. Namun juga telah ditemukan bahwa setiap orang mewarisi sifat genetik dari orang tua masing-masing. Namun juga telah diketahui bahwa warisan genetik ini baru potensi yang bersifat longgar. Pengalaman hidup, khususnya pada usia dini sangat menentukan pembentukan kepribadian seseorang.

Sumber: Indonesian Heritage jilid 9, 2002

Gambar 6.2.9
Keluarga sangat berperan dalam proses penerusan kebudayaan suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menjadi jelas bagimu sekarang mengapa keluarga sangat berperan dalam pembentukan kepribadian bukan? Pertama, anak-anak mendapat warisan sifat *genital* (yang berhubungan dengan gen, termasuk sifat-sifat) dari orang tuanya. Kedua, bahwa kebanyakan orang melewatkan waktu kecilnya dalam lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa pengalaman hidup pada usia dini sangat berpengaruh bagi kepribadian seseorang.

Bagaimana keluarga berperan dalam pembentukan kepribadian? Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian berkaitan dengan apa yang dalam sosiologi disebut dengan istilah proses *enkulturasi* dan *sosialisasi*. Apa sebenarnya enkulturasi dan sosialisasi itu?

Enkulturasi adalah proses penerusan kebudayaan suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keluarga sangat berperan dalam proses ini. Keluargalah yang mengenalkan indi-

vidu pada kebudayaan masyarakatnya. Kamu bisa berbahasa daerah kamu masing-masing karena kamu diajari oleh anggota keluarga kamu bukan? Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan. Kamu masih diajari banyak hal lainnya sehingga bisa menguasai kebudayaan masyarakatmu. Kepribadian seseorang banyak dipengaruhi oleh dalam kebudayaan apa ia dibesarkan. Maka jelas bahwa keluarga mengenalkan kamu pada kebudayaan yang akhirnya turut membentuk kepribadianmu.

Sementara sosialisasi adalah proses memelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lain yang diperlukan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara efektif. Keluarga sangat berperan dalam proses sosialisasi. Dalam sosiologi dikenal *sosialisasi primer* dan *sosialisasi sekunder*. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil. Sosialisasi primer biasanya terjadi ketika anak berumur 0 sampai 4 tahun. Sementara sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi yang terjadi setelah sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder misalnya terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan sebagainya.

Keluarga amat berperan dalam proses sosialisasi primer. Dalam keadaan normal, sosialisasi primer terjadi dalam keluarga. Anak-anak menghabiskan masa-masa awal kehidupannya bersama keluarga. Di dalam keluarga mereka mempelajari pola perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakatnya. Sosialisasi primer yang terjadi dalam keluarga tersebut sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak-anak diperkenalkan dan diajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai masyarakatnya. Hal-hal tersebut sangat berperan dalam membentuk kepribadian seseorang.

Lebih konkret lagi, keluarga membentuk kepribadian para anggotanya lewat kebiasaan dan peraturan-peraturan yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Kamu tentu pernah mendengar banyak orang yang mensyukuri pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tuanya setelah mereka menjadi orang sukses bukan? Tingkah laku tertentu yang diterapkan dalam kehidupan keluarga, bahkan mungkin dipaksakan, lambat laun akan membentuk kebiasaan dan akhirnya menyatu dalam kepribadian seseorang. Contoh, seseorang yang sejak kecil dibiasakan hidup hemat dan suka menabung akan terbiasa dengan pola hidup hemat dan akhirnya hemat merupakan menjadi salah satu kepribadiannya.

Mungkin kamu sekarang belum merasakan apa manfaat berbagai aturan yang diterapkan orang tuamu. Sekarang, cobalah melihat apa saja aturan yang diterapkan dalam keluargamu! Dapatkah kamu memperkirakan sikap atau pribadi seperti apa yang ingin dibentuk melalui penerapan aturan-aturan tersebut? Kerjakanlah tugas di bawah untuk semakin memperjelas fungsi aturan-aturan dalam keluarga dalam pembentukan kepribadian.

B. Pranata agama

Cerita mengenai kehidupan Ahmad dan keluarganya di awal bab ini menunjukkan bahwa Ahmad dan keluarganya adalah penganut agama Islam yang taat. Bagi keluarga Ahmad, agama Islam telah mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan.

Agama merupakan salah satu pranata sosial penting yang mengatur kehidupan manusia. Sebagai pranata, agama menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan dalam hati setiap pemeluknya. Ajaran agama memang sangat memengaruhi sikap dan prilaku penganutnya. Agama selalu mengajarkan kebaikan dan cinta kasih kepada sesama, karena agama bersumber pada Tuhan Yang Maha Baik.

a. Pengertian agama

Apa itu agama? Dalam ilmu sosiologi, agama memiliki pengertian yang lebih luas dari lima agama resmi di Indonesia. Untuk menghindari kerancuan istilah sering digunakan kata *religi* sebagai ganti kata agama sebagaimana dimaksud dalam sosiologi. Perintis sosiologi **Emile Durkheim** mendefinisikan agama sebagai *suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci*. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat.

b. Unsur-unsur pranata agama

Menurut **Donald Light**, **Suzane Keller**, dan **Craig Calhoun** agama memiliki lima unsur dasar, yakni kepercayaan, simbol, praktik keagamaan, umat, dan pengalaman keagamaan. Kelima unsur utama atau dasar ini dapat diuraikan berikut.

1. *Kepercayaan*

Tiap agama mempunyai kepercayaan. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah suatu prinsip yang dianggap benar dan tanpa ada keraguan lagi. Misalnya, kepercayaan pada satu Tuhan pada agama monoteis, yang dalam Islam dan Kekristenan disebut dengan nama Allah dan dalam agama Yahudi disebut dengan nama Yahwe. Demikian juga dengan kepercayaan pada adanya inkarnasi dalam agama Hindu, dan kepercayaan pada roh nenek moyang pada agama Shinto. Tanpa kepercayaan-kepercayaan semacam ini agama akan tidak memiliki makna sama sekali.

2. *Simbol*

Tiap agama memiliki simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol itu tampak dalam cara atau model

Dok. Maj. Tempo, 2000

Gambar 6.2.10
Para tokoh agama mengenakan simbol-simbol keagamaan. Gus Dur duduk di antara biksu agama Buddha yang mengenakan jubah warna kuning atau oranye.

pakaian, bentuk-bentuk aksesoris yang dipakai, bentuk rumah ibadat, dan sebagainya. Misalnya, seorang biksu memakai pakaian khusus berwarna kuning atau oranye dan biarawan Katolik biasanya memakai jubah putih.

Simbol dalam agama memiliki fungsi menandakan identitas atau pengalaman hidup beragama tertentu. Misalnya, bulan sabit sebagai simbol umat Islam, salib sebagai simbol umat Kristen, dan sebagainya. Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi meneguhkan iman umat masing-masing agama.

3. *Praktik keagamaan*

Dalam tiap agama kita jumpai berbagai praktik keagamaan seperti berdoa, puasa, pantang makan daging hewan tertentu, memberi derma atau sedekah, dan sebagainya. Praktik keagamaan tidak hanya mencakup hubungan seseorang dengan Sang Pencipta (hubungan vertikal) tetapi juga menyangkut hubungan dengan sesama (hubungan horisontal).

4. *Umat*

Umat adalah kumpulan penganut agama tertentu. Tiap agama memiliki umat. Ada banyak organisasi keagamaan yang menampung umat beragama dalam rangka menunaikan praktik keagamaan mereka. Misalnya saja Majelis Taklim, Remaja Masjid, Paroki, Jemaat Gereja tertentu, kelompok pengajian, persekutuan doa, dan lain-lain.

5. *Pengalaman keagamaan*

Tiap agama mengenal berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami penganut agama secara pribadi. Pada agama Islam misalnya, dikenal panggilan untuk menunaikan ibadah Haji; dalam agama Katolik dikenal panggilan untuk menjadi biarawan atau biarawati, demikian juga dalam agama Buddha dikenal panggilan untuk menjadi biku atau bikuni. Selain itu, tiap penganut agama biasanya memiliki pengalaman religius pribadi.

c. Fungsi pranata agama

Lalu apa fungsi pranata agama? Agama memiliki fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes agama berkaitan dengan doktrin, ritual, dan aturan perilaku di dalam agama. Sementara fungsi laten (terselubung) agama antara lain tampak dalam pandangan **Emile Durkheim** yang mengatakan bahwa agama memiliki fungsi menggerakkan dan membantu kita untuk hidup. Dalam lingkup sosial yang lebih luas, agama memperkuat perasaan dan ide kolektif. Melalui upacara agama yang dilakukan secara bersama-sama maka persatuan dan kebersamaan umat dipupuk dan dibina.

Secara rinci, fungsi pranata agama dapat disebutkan sebagai berikut.

- Memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Misalnya umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, dan umat Katolik.
- Mempersatukan sesama pemeluk agama sebagai satu saudara.
- Kaidah-kaidah agama mengarahkan pemeluknya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
- Setiap agama memiliki tata cara ritual yang harus dijalani para penganutnya. Ritual keagamaan ini terutama mengatur hubungan vertikal antara penganut agama yang bersangkutan dengan Tuhan.
- Agama juga mengatur hubungan antara sesama manusia.
- Agama mengarahkan setiap pemeluknya untuk menghormati sesama manusia, menghormati martabatnya, dan memperlakukan sesama secara manusiawi. Umat dibimbing untuk menghindarkan diri dari perilaku menyimpang seperti membunuh, memperkosa, berzina, mencuri, memfitnah, dan berjudi serta mengarahkan pada perilaku yang terpuji seperti menghormati sesama manusia, menolong yang lemah, membela yang benar, mengampuni yang bersalah, dan lain-lain.
- Agama memberikan tuntunan para penganutnya bagaimana mereka memperlakukan alam semesta. Umumnya agama mengakui bahwa alam semesta adalah sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya, sebagai umat-Nya, manusia diserahi amanah untuk menjaga kelestarian alam semesta. Amanah untuk menjaga kelestarian alam ini didukung dengan dorongan norma-norma agama agar para pemeluknya bersikap hemat, tidak serakah, dan solider. Sikap-sikap ini bila dijalankan dengan baik bisa menjamin kelestarian alam.

- Memberikan kesegaran jiwa dan ketenangan.

Harus diakui juga agama memiliki disfungsi. Artinya, agama dapat dijalankan oleh manusia tidak sesuai dengan tujuannya yang mulia. Mengapa demikian? Pengalaman kita menunjukkan bahwa pertentangan atau konflik dalam masyarakat seringkali juga bersumber pada faktor agama. Misalnya, konflik antara kaum Katolik dan Kaum Protestan di Irlandia Utara, antara kaum Sikh dan kaum Hindu di negara bagian Punjab, antara kaum Muslim dan Hindu di Ayodhya, antara kaum Kristen dan kaum Muslim di Nagorno-Karabach, dan antara kaum Shiah dan Sunni di Irak dan Pakistan. Di negara kita, isu agama menjadi salah satu penyulut konflik di beberapa tempat seperti di Ambon dan Poso.

Sekarang cobalah melihat apa saja aturan, kebiasaan, atau norma yang ada dalam ajaran agamamu yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam. Buatlah daftar aturan-aturan agamamu yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dan mengatur hubungan dengan alam.

C. Pranata ekonomi

a. Pengertian pranata ekonomi

Tiap masyarakat memiliki pranata ekonomi. Pranata ekonomi, betapa pun sederhananya, sudah dibutuhkan ketika manusia membentuk kelompok sosial. Dalam masyarakat prasejarah sudah dikenal pembagian kerja. Ketika masyarakat lebih maju, pembagian tugas lebih kompleks, kegiatan produksi lebih maju, perdagangan makin luas dibutuhkan pranata ekonomi yang lebih maju pula.

Pranata ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pranata ekonomi penting dalam mengatur produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Produksi, distribusi, konsumsi merupakan tiga kegiatan pokok dalam ekonomi.

b. Struktur pranata ekonomi

Pranata ekonomi memiliki bidang yang luas. Secara garis besar kita bisa memilah pranata ekonomi dalam tiga sektor berikut.

1. *Sektor agraris*

Sektor agraris meliputi berbagai usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Usaha pertanian meliputi usaha pengelolaan sawah, kebun, dan ladang. Perkembangan perekonomian sektor agraris dapat diklasifikasikan menurut tahap-tahap perkembangannya, mulai dari tradisional, transisi, dan modern. Perkembangan itu bergerak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat.

2. *Sektor industri*

Sektor industri adalah sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, pabrik makanan, pabrik sepatu, pabrik mobil, dan sebagainya. Sektor ini membutuhkan pranata ekonomi yang lebih kompleks. Pranata tersebut antara lain berisi aturan mengenai perekrutan tenaga kerja, tata cara penggajian, tata cara perizinan, dan sebagainya.

3. *Sektor perdagangan atau niaga*

Kegiatan sektor perdagangan adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dalam sektor ini dibuat tata cara bagaimana penjual dan pembeli menjalin hubungan. Pranata-pranata dalam sektor ini antara lain mengatur cara memperoleh keuntungan yang dibenarkan, cara pembayaran, dan sebagainya.

c. Pola-pola politik ekonomi

Dalam sejarah kita bisa menemukan beberapa *ideologi ekonomi*. Ideologi ekonomi muncul dari pertemuan pranata ekonomi dan pranata-pranata sosial lainnya, utamanya pranata politik. Ideologi-ideologi tersebut merupakan dasar bagi terciptanya pelbagai sistem ekonomi yang sekaligus juga memengaruhi perkembangan masyarakat.

Sumber: Majalah Tempo 17-23 Desember 2007

Gambar 6.2.11
Dalam sistem perekonomian kapitalisme, kerja (produksi) digiatkan untuk mengejar laba (keuntungan) sebesar-besarnya.

Dewasa ini ada dua ideologi ekonomi yang pokok, yaitu kapitalisme dan sosialisme.

1. *Kapitalisme*

Kapitalisme adalah satu sistem ekonomi didasarkan pada pemilikan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Prinsip-prinsip dasar masyarakat kapitalis terdiri dari *milik pribadi*, *motif mencari laba*, dan *persaingan bebas*. Dewasa ini terlihat bahwa sistem kapitalisme modern menganut prinsip-prinsip *pemupukan modal*, *penciptaan kekayaan*, dan *ekspansionalisme*.

2. *Sosialisme*

Sosialisme muncul dari dari ketidakpuasan atas penderitaan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial akibat berkembangnya industrialisasi dan kapitalisme pada abad 19. Dari sana muncul gerakan yang bertujuan merombak masyarakat ke arah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi.

Dalam sistem ekonomi sosialis alat produksi dan pengaturan distribusi komoditi dikuasai oleh negara. Pengaturan produksi dan distribusi komoditi di seluruh negara dilaksanakan secara terpusat.

b. Fungsi pranata ekonomi

Apa fungsi pranata ekonomi? Fungsi pokok pranata ekonomi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan pemakaian barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain pranata ekonomi berfungsi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Berikut ini beberpa fungsi pranata ekonomi secara lebih terperinci:

- Memberi pedoman untuk mendapatkan barang dan jasa.
- Memberi pedoman pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.
- Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang dan jasa.
- Memberi pedoman tentang harga dalam jual beli barang.
- Memberi pedoman tentang cara pengupahan.
- Memberi pedoman tentang pengangkatan penggunaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja.

b. Peran Pranata Ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam

Kamu pasti tahu bahwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan menggunakan pukat harimau dilarang. Cara menangkap ikan menggunakan dua alat ini dinilai merusak alam. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan membunuh semua jenis ikan. Padahal nelayan biasanya hanya mengambil ikan-ikan yang besar. Demikian juga menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Selain itu, penggunaan pukat harimau merugikan nelayan-nelayan kecil. Penangkapan ikan dengan pukat harimau hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar. Sementara cara itu akan mengeruk semua kekayaan laut tanpa menyisakan hasil. Bila cara tersebut diperbolehkan, nelayan kecil tidak akan kebagian ikan.

Pada tahun 2004 sempat heboh kasus pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Beberapa warga Buyat mengalami gejala-gejala menderita minamata. Setelah itu, terjadi polemik panjang tentang hal tersebut. Salah satu yang

Sumber: . Tempo 19-25Nov01

Gambar 6.2.12
Kegiatan ekonomi seringkali berhubungan dengan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini diatur dalam pranata ekonomi.

dipersoalkan adalah apakah usaha eklporasi tambang emas di sana sudah memenuhi ketentuan pembuangan limbah yang aman.

Apa yang disebutkan dalam dua paragraf di atas merupakan contoh jelas pentingnya pranata ekonomi mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Memang kegiatan ekonomi sering kali berhubungan dengan sumber daya alam. Pemakaian sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi diatur agar sumber daya alam bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan pemanfaatannya ramah lingkungan sehingga kelestarian alam terjamin, dan supaya pemanfaatan sumber daya alam itu adil.

Bagaimana di negara kita? Apakah pranata ekonomi turut berperan dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam? Aturan pokok kegiatan ekonomi dalam penggunaan sumber daya alam di Indonesia tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 2 dan 3. Ayat 2 menyatakan bahwa *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."* Sementara ayat 3 menegaskan bahwa *"Bumi dan air dan kekakayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

Dari isi pasal 33 ayat 2 dan 3 di atas bisa ditarik kesimpulan kemakmuran rakyat menjadi tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negara kita. Negara diberi wewenang untuk menguasai dan mengelolanya demi kesejahteraaan hidup seluruh rakyat.

D. Pranata pendidikan

Cobalah kamu sebutkan apa manfaat yang kamu peroleh dengan bersekolah! Kamu dapat menyebutkan banyak hal, bukan? Dengan bersekolah kamu bisa membaca, menulis, berhitung,

mempunyai teman, bisa berbahasa Indonesia, dan sebagainya. Pendeknya banyak manfaat yang kita peroleh dengan bersekolah.

Sekolahmu merupakan salah bentuk pranata pendidikan. Pranata pendidian mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat dewasa ini membutuhkan pranata pendidikan. Sudah sangat jarang masyarakat yang melakukan proses pendidikan bagi anggotanya cukup dalam lingkungan kelompoknya sendiri. Kebanyakan masyarakat telah mempercayakan sebagian besar tugas mendidiknya pada lembaga pendidikan.

Ada banyak pranata pendidikan dalam masyarakat kita. Ada yang bersifat formal dan ada juga yang tidak formal. Lembaga pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Di Negara kita pendidikan dasar meliputi pendidikan dasar sembilan tahun di SD atau MI dan SMP atau MTs. SMA/MA dan SMK termasuk pendidikan universitas, akademi, institut, dan sebagainya. Sementara pendidikan nonformal meliputi berbagai kursus keterampilan seperti kursus menjahit, kursus komputer, kursus bahasa asing, dan lain-lain.

a. Fungsi pranata pendidikan

Pranata pendidikan memiliki banyak fungsi, baik manifes (nyata) maupun laten (terselubung). Kita akan melihat pendapat **Horton**, **Hunt**, dan **David Popenoe** mengenai fungsi pranata pendidikan.

1. *Menurut Horton dan Hunt*

Menurut **Horton** dan **Hunt** (1984), fungsi manifes institusi pendidikan antara lain:

- Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi maupun bagi kepentingan masyarakat.
- Melestarikan kebudayaan.
- Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Fungsi manifes (nyata) di atas biasanya tercantum dalam kurikulum sekolah.

Di luar fungsi manifes itu, pranata pendidikan juga memiliki fungsi laten, seperti berikut ini.

- Perpanjangan ketergantungan anak pada orang tua. Dengan bersekolah anak memperpanjang ketergantungan ekonomi pada orang tua. Karena sekolah mereka juga tertunda masuk angkatan kerja.
- Pengurangan pengendalian orang tua. Sekolah menanamkan nilai-nilai baru. Nilai-nilai tersebut kadang bertentangan dengan apa yang diajarkan di rumah. Hal ini memperlemah pengendalian orang tua terhadap anak mereka.
- Penyediaan sarana untuk pembangkangan. Sekolah mempunyai potensi menanamkan nilai yang menjadi dasar bagi pembangkangan terhadap masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah kadang berbeda dengan yang diajarkan orang tua. Sekolah dan orang tua juga sering berbeda paham mengenai pelajaran yang dapat diberikan kepada anak. Misalnya pelajaran mengenai seks dan evolusi.
- Dipertahankannya sistem kelas sosial. Pendidikan formal bisa berfungsi mempertahankan sistem stratifikasi yang ada dengan jalan menyosialisasi anak untuk menerima sistem perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada. Dengan demikian pendidikan berfungsi mempertahankan status seseorang pada status sosial yang ditempati status orang tuanya.

Sumber: kompas 28 maret 2008

Gambar 6.2.13
Pendidikan mempersiapkan para siswa untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, serta membantu melestarikan kebudayaan.

Pranata pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan seseorang menjadi warga masyarakat yang baik. Lembaga pendidikan (sekolah) menjadi tempat terjadinya sosialisasi sekunder yang pokok. Sekolah merupakan lembaga terpenting yang bertanggung jawab menyampaikan ilmu pengetahuan dan tertib kehidupan masyarakat terhadap siswa-siswanya. Pendidikan sekolah selain memerhatikan perkembangan pengetahuan juga memerhatikan perkembangan kepribadian tata tertib, pendidikan agama, budi pekerti, dan sebagainya.

2. *Menurut David Popenoe*

Menurutnya **David Popenoe** ada empat macam fungsi pendidikan sekolah, yaitu fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, memilih dan mengajarkan peranan sosial, menjamin integrasi sosial, dan sumber inovasi sosial.

- Transmisi kebudayaan masyarakat

  Sebagai transmisi kebudayaan masyarakat, sekolah menyampaikan pengetahuan, keterampilan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya.
- Memilih dan mengajarkan peranan sosial.

  Dalam masyarakat yang sudah maju terdapat spesialisasi pekerjaan. Dari sana muncul berbagai peran dan status sosial. Pendidikan sekolah turut menyiapkan anak didiknya untuk menjalani peran yang dituntut dari berbagai spesialisasi dalam masyarakat modern tersebut.
- Menjamin integrasi sosial

  Fungsi pendidikan sekolah untuk menjamin integrasi sosial sangat penting bagi masyarakat plural seperti Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dengan adat-istiadatnya sendiri, bermacam-macam daerah, agama, tradisi, dan lain-lain. Dalam situasi yang demikian sekolah berperan dalam mengajarkan bahasa nasional, sejarah nasional, dan memupuk semangat nasionalisme.
- Sumber inovasi sosial

  Sekolah memberikan dasar-dasar berpikir dan bertindak ilmiah. Dengan dasar-dasar seperti itu para siswa bisa melakukan berbagai pengamatan dan penelitian yang dapat mengungkap hal-hal baru. Dari penemuan-penemuan baru inilah akan tercipta inovasi, baik dalam pengetahuan maupun dalam teknologi.

E. Pranata politik

Di bangku Sekolah Menengah Pertama kamu diperkenalkan pada pelajaran Kewarganegaraan. Dalam pelajaran tersebut kamu mempelajari bagaimana “aturan main” negara kita. Kamu antara lain memelajari berbagai lembaga kekuasaan negara, undang-undang, hukum, sistem politik, hak serta kewajiban sebagai warga negara, dan lain-lain.

a. Pengertian pranata politik

Apa yang kamu pelajari dalam Kewarganegaraan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pranata politik. Apa sebenarnya pranata politik itu? **William Kornblum** mendefinisikan pranata politik sebagai perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.

Pranata politik adalah institusi atau pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini pemerintah suatu negara. Institusi pemerintah merupakan institusi yang berwenang memelihara ketertiban, menjalankan administrasi peradilan, dan melindungi warga masyarakat dari bahaya. Untuk menjalankan pola-pola yang berhubungan dengan institusi demikian itu, diperlukan suatu organisasi yang dinamakan negara.

Negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kekuasaannya terhadap semua anggota masyarakat. Di dalam masyarakat yang tidak berbentuk negara, fungsi ini dijalankan oleh sekelompok orang yang terdiri dari keluarga atau klan. Pada sebagian besar masyarakat, institusi pemerintah merupakan organisasi kekuasaan dari negara yang mempunyai kekuasaan terhadap institusi lain dan kekuasaan itu berada di atas semua anggota masyarakat. Hak untuk menggunakan paksaan dan memperluas kekuasaan pada semua anggota masyarakat merupakan ciri utama yang ada pada negara. Fungsi dasar ini memberikan kepada negara berbagai macam aktivitas. Misalnya, institusi religi mungkin berada sepenuhnya di bawah kekuasaan negara. Kepala negara, mungkin (karena jabatan) merupakan kepala dari masyarakat religi. Dengan kata lain, negara berkuasa penuh terhadap pengangkatan para fungsionaris religi. Adakalanya negara hanya memiliki fungsi tunggal. Misalnya, hanya menjalankan aktivitas dalam bidang ekonomi saja.

Dalam negara modern, kegiatan yang dalam semua aktivitas institusionalnya hanya dilakukan oleh negara secara ekstrem dinamakan *totalitarisme*. Contohnya, Jerman pada zaman Nazi dan Uni Soviet melakukan pengawasan dengan politik partai tunggal. Pelaksanaan pengawasan tidak saja pada aktivitas dasar pemerintah, tetapi juga meliputi aktivitas keagamaan, ekonomi, pariwisata, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kehidupan keluarga, dan sebagainya. Ada pula negara yang mempunyai ciri-ciri penindasan terhadap aktivitas politik di luar satu partai.

b. Struktur pranata politik

Struktur pranata politik ada bermacam-macam, antara lain:

- Dalam sebuah **masyarakat sederhana**, struktur pemerintahan hanya terdiri dari kepala suku yang bersifat turun-temurun dengan keputusan atau ketetapannya ditegakkan oleh masyarakat secara keseluruhan atau oleh sejumlah fungsionaris yang ditunjuk untuk membentuk undang-undang, menegakkannya, menyelesaikan perselisihan, memutuskan perang, dan sebagainya.
- Dalam sebuah negara dengan **monarki absolut**, struktur pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tertinggi

terhadap semua subjek (anggota masyarakat).

- Dalam sebuah negara dengan **monarki konstitusional** pada dasarnya mempunyai fungsionaris sebagai kepala pemerintahan, namun kekuasaan tertinggi ditentukan oleh suatu aturan dasar yang dinamakan Undang-Undang Dasar. Pada sistem pemerintahan ini fungsi legislatif dilaksanakan oleh suatu badan yang para anggotanya terdiri dari para aristokrat atau anggota yang dipilih melalui beberapa proses.
- Dalam negara yang **berbentuk republik**, unsur penting dalam struktur pemerintahannya adalah badan kedaulatan yang para anggotanya dipilih rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- Dalam suatu **negara aristokrasi**, apa pun struktur pemerintahannya, dasar kebijakannya dibuat oleh anggota yang relatif kecil, yaitu kelas elite tertentu.
- Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara terletak di tangan rakyat.
- Dalam negara otokrasi pemerintah dijalankan oleh suatu kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh satu orang yang tidak bertanggung jawab kepada siapa pun dan juga tidak dapat digantikan oleh siapa pun.

Sumber: Majalah Tempo, 2007

Gambar 6.2.14
Struktur pranata politik yang terbuka dan demokratis akan memberi peluang sama bagi setiap warga negara untuk mencapai kekuasaan politik melalui partai politik dan pelaksanaan pemilu yang demokratis.

c. Fungsi pranata politik

Apakah fungsi pranata politik? Fungsi pranata politik adalah sebagai berikut.

- Memelihara ketertiban di dalam kelompok *(internal order)*

  Artinya, pranata politik memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya, baik menggunakan cara persuasif maupun paksaan fisik. Pranata politik bertindak sebagai pemaksa hukum, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram.

  Contoh: kalau ada warga negara yang melanggar hukum, negara memiliki wewenang untuk menghukumnya. Karena itu, negara memiliki lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian sebagai penyelidik, penyidik sampai hakim yang akan memutuskan perkara di pengadilan. Aparat penegak hukum juga yang akan menyelesaikan masalah sengketa antarmasyarakat, seperti perebutan tanah, batas wilayah desa, dan sebagainya.
- Menjaga keamanan di luar *(external security)*

  Artinya, pranata politik dengan mengunakan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain, baik melalui diplomasi maupun dengan perang.

  Contoh: dalam kasus Ambalat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia bersiaga dua puluh empat jam di daerah Ambalat. Akhirnya Malaysia menarik mundur Angkatan Lautnya. Tentara Indonesia akan tetap siap di sana dan mengamankan setiap jengkal wilayah kesatuan RI.
- Mengusahakan kesejahteraan umum *(general welfare)*

  Artinya, pranata politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, energi, dan komunikasi, termasuk distribusinya.

  Tujuan negara kita adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini harus diwujudkan oleh negara melalui berbagai macam cara. Salah satu cara yang selama ini dijalankan negara adalah dengan membangun. Melalui pembangunan diharapkan rakyat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Tentu saja yang diharapkan adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

sumber : Majalah Tren, 2007

sumber : Kompas, 2006

Gambar 6.2.15
Berbagai proyek pembangunan. Melalui proyek pembangunan diharapkan rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

- Mengatur proses politik.

  Artinya, pranata politik mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat (bangsa dan negara). Contohnya, pemilu, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan sebagainya. Sebagai fasilitator atau moderator, negara diharapkan tidak memihak kelompok politik atau partai politik tertentu.

Nah, berbicara mengenai pranata politik sebetulnya termasuk juga pranata politik yang paling sederhana yang dapat kamu jumpai di sekitar kamu. Rumah kamu tentu saja menjadi bagian dari sebuah wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Rumah kamu juga menjadi bagian dari sebuah desa atau kelurahan. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah pranata politik yang paling kecil di masyarakat. Kedua pranata ini menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan membantu warga menjalankan hak-hak politiknya.

Peran yang umumnya dimainkan RT adalah mengorganisasi warga dalam hal mengatur keamanan dan kebersihan tempat tinggal. Karena itu, ketua RT menarik iuran keamanan dan kebersihan dan mengelolanya secara bertanggung jawab demi kebaikan warga masyarakat. Sementara itu, ketua RW umumnya menjalankan peran penghubung antara warga masyarakat dengan kekuasaan yang lebih tinggi, yakni desa atau kelurahan. Dengan demikian, segala hak warga masyarakat diharapkan dapat direalisasikan, baik pada tingkat RT dan RW maupun kelurahan.

RANGKUMAN

1. Aturan atau peraturan sangat dibutuhkan manusia. Peraturan menjadi dasar yang mengatur pola hubungan atau interaksi sosial. Tanpa aturan masyarakat akan kacau dan terganggu. Setiap kelompok sosial memiliki peraturan sendiri-sendiri yang khas. Meskipun demikian, berbagai peraturan yang ada dalam kelompok sosial mencerminkan nilai dan norma masyarakat. Karena itu, peraturan seyogyanya tidak bertentangan dengan nilai dan norma tersebut.
2. Ada beberapa definisi pranata sosial:
   - Menurut **Robert MacIver** dan **C.H. Page** pranata sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.
   - Menurut **Leopold Von Wiese** dan **Becker** pranata sosial adalah jaringan proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya.
   - **Bruce J. Cohen,** pranata sosial adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.
   - Menurut **Koentjaraningrat,** pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
   - Menurut **Soerjono Soekanto** pranata sosial adalah himpunan norma dari segala

tingkatan yang berkisar pada suatu pokok di dalam kehidupan masyarakat.

3. Proses terjadinya suatu pranata sosial dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu: secara tidak terencana dan terjadi dengan sengaja. Pranata sosial yang terjadi secara terencana biasanya muncul sebagai hasil dari perencanaan matang seseorang atau sebuah kelompok sosial. Sementara pranata sosial yang terbentuk secara tidak terencana biasanya muncul atau lahir untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beranekaragam.
4. Jika suatu pranata sosial tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, biasanya pranata tersebut diubah. Pranata sosial yang dianggap baik oleh masyarakat terus dipertahankan meskipun terjadi pergantian generasi dalam masyarakat itu.
5. Pranata sosial berfungsi untuk menjaga suatu masyarakat atau kelompok sosial bisa berjalan secara tertib.
6. Ada lima ciri pranata sosial, yaitu: memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi, usianya lebih panjang daripada usia orang yang membuatnya, memiliki kelengkapan, dan memiliki ideologi.
7. Lima bentuk pranata sosial yang pokok: pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Keluarga batih adalah sistem keluarga yang mewajibkan orang mencari jodoh di kelompok sosialnya sendiri.
2. Fungsi terselubung pranata agama adalah bahwa agama memiliki fungsi menggerakan dan membantu kita untuk hidup.
3. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah antara lain berfungsi untuk memupuk nasionalisme dan menjaga integritas negara.
4. Pranata sosial tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
5. Pranata sosial dapat diartikan sebagai himpunan norma dari segala tingkatan.
6. Setiap individu tidak perlu menginternalisasi pranata sosial karena nilai dan norma akan terbentuk dengan sendirinya dalam diri seseorang.
7. Pranata sosial berperan sebagai penjaga atau penjamin keberlangsungan hidup sebuah kelompok sosial.
8. Pranata sosial tidak memiliki simbol-simbol tertentu.
9. Dari sudut penerimaan masyarakat, pranata sosial dapat dibedakan menjadi pranata umum dan pranata terbatas.
10. Pelamaran, perkawinan, pengasuhan anak merupakan pranata sosial yang berfungsi mengawasi adat-sitiadat atau tata kelakuan.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi dengan jawaban yang benar!

1. Proses pembentukan pranata sosial dari sejumlah norma yang ada disebut ... .
2. Proses terjadinya suatu pranata dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu ... dan ... .
3. Perubahan pranata sosial terjadi dalam ... di antara warga masyarakat.
4. Fungsi pranata sosial yang disadari dan menjadi harapan masyarakat secara keseluruhan disebut fungsi ... .
5. Pranata yang tumbuh dari adat-istiadat masyarakat secara tidak disengaja disebut ... .
6. Pranata-pranata yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu disebut ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Apa definisi pranata sosial menurut Koentjaraningrat?
2. Apa bedanya pranata sosial dan organisasi?
3. Berilah penjelasan mengenai proses terbentuknya pranata sosial!
4. Jelaskan dua alasan mengapa pranata sosial terus bertahan!
5. Apa fungsi pranata sosial di masyarakat?
6. Berilah penjelasan mengenai ciri-ciri pranata sosial!
7. Sebutkan 8 pranata sosial menurut Koentjaraningrat!
8. Jelaskan mengenai macam-macam keluarga!
9. Sebutkan 5 unsur pranata agama!
10. Apa yang dimaksud dengan pranata politik?

11. Apa saja fungsi pranata politik?
12. Jelaskan tipe-tipe pranata sosial menurut J.L.Gillin dan J.P. Gillin dilihat dari sudut perkembangannya!
13. Jelaskan mengenai sistem kekerabatan bilateral dan unilateral!
14. Bagaimana keluarga berperan dalam pembentukan kepribadian?
15. Sebutkan 8 fungsi pranata agama!
16. Apa yang dimaksud dengan pranata ekonomi?
17. Berilah penjelasan mengenai fungsi pranata ekonomi!
18. Jelaskan fungsi manifes pranata pendidikan menurut Horton dan Hunt!
19. Sebutkan dan jelaskan dengan beberapa contoh bahwa keluarga berfungsi melindungi anggota keluarganya!
20. Apakah di rumahmu ada "aturan main" atau peraturan tertentu? Mengapa peraturan tersebut diciptakan? Siapa yang menciptakan?

IV. Studi Kasus Kelompok

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini, diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kelompok berisi tiga orang!

PILKADA JAWA BARAT

Penganggur, atau mereka yang masih mencari pekerjaan, menjadi salah satu fakor pendorong munculnya keinginan perubah-an pada kepemimpinan daerah di Jawa Barat. Hal itu tergambar dari hasil survei pascapencoblosan (*exit poll*) pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan Kompas pada 13 April 2008.

Ternyata sebagian besar kalangan yang tidak bekerja mencoblos pasangan baru Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade). Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana, yang sebelumnya telah menjabat menjadi gubernur Jawa Barat justru diperkirakan mendapat suara lebih kecil.

Dukungan untuk figur baru juga muncul dari kalangan pekerja swasta dan mereka yang saat ini masih berstatus mahasiswa. Kalangan berpendidikan tinggi cenderung memlih figur Hade. Dukungan kepada figur lama muncul dari kalangan pensiunan, pengusaha, dan petani/nelayan.

Pasangan Hade juga mendapat suara lebih banyak dari kelompok etnis lain, seperti Jawa, Betawi, Banten, dan Cina ketimbang kedua kandidat lain.

Pilkada yang diselenggarakan bulan April 2008 ini merupakan pemilihan lang-sung gubernur pertama Jawa Barat. Maksudnya, masyarakat sendirilah yang langsung mencoblos pasangan yang mereka jagokan.

Sebelumnya, pemilihan dilakukan menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Di mana para calon kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat.

Disarikan dari: "Mereka yang Masih Mencari Pekerjaan, Pilih Figur Baru" Kompas, 15 April 2008 *dan* berbagai sumber.

A. Jawablah pertanyaan berikut!

1. Membahas tentang pranata apakah artikel di atas?
2. Bagaimanakah proses terbentuknya pranata di atas? Jelaskan!
3. Apakah fungsi pranata di atas, jika dilihat dari positif-negatif, serta disadari tidaknya pranata tersebut!
4. Cari dan jelaskan ciri-ciri pranata sosial pada artikel di atas!

B. Portofolio

Buatlah sebuah kliping mengenai kedelapan tipe pranata sosial yang dibedakan oleh Koentjaraningrat. Kliping tersebut harus mampu mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Artikel-artikel mengenai kedelapan pranata sosial (masing-masing minimal dua).
2. Penjelasan mengenai masing-masing artikel dan hubungannya dengan masing-masing pranata sosial.
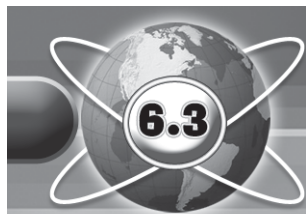
6.3 Upaya Pengendalian Penyimpangan Sosial

Narkoba dalam Saku Jaksa

Seorang jaksa berinisial HR, dikenal sebagai jaksa yangmenangani kasus pabrik ekstasi di Bogor, kini ditahan karena narkoba pula. HR ditangkap di Kuningan, Jakarta Selatan, 25 Agustus lalu. "Dia terjerat kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api," kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Carlo B.Tewu.

Penangkapan HR bukanlah kebetulan, melainkan telah dirajut sejak dua bulan lalu. Sebuah informasi sudah lama masuk ke telinga polisi tentang seorang jaksa yang suka berbisnis narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Beberapa kali polisi menguntitnya, tapi tidak bisa menangkap. "Belum dapat bukti," kata Ajun Komisaris Besar Sugeng Ingat Rikolo, Kasat III Kejahatan Terorganisir Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

Titik terang terkuak setelah muncul informasi yang lebih lengkap tentang keterlibatan HR di balik transaksi sabu-sabu di Restoran Cwie Mie, Jalan Intan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 24 Agustus. Yang dibekuk adalah SS, 29 tahun, saat bertransaksi dengan seorang wanita. Di tangannya disita 32 gram sabu-sabu.

Penangkapan SS rupanya menjadi pintu masuk untuk menangkap si jaksa. SS bernyanyi, menyebut sumber sabu-sabu yang dijualnya. "Dari jaksa", ujarnya kepada pemeriksa. Selanjutnya SS menjadi umpan untuk mengail HR.

Rencana itu berjalan lancar lantaran SS mengaku akan bertransaksi lagi dengan HR pada 25 Agustus. Operasi menjerat si jaksa langsung dipimpin Sugeng. Dia membawa tujuh anak buahnya menuju lokasi transaksi di Jalan Rasuna Club, Road I, Kuningan. Lokasi ini berjarak 400 meter dari Apartemen Taman Rasuna.

Dua polisi berada di dalam mobil Timor silver yang dikendarai SS. "Semula transaksi direncanakan pukul 15.00 siang, tetapi HR membatalkannya dengan alasan dia rapat dulu di kantor." kata Sugeng. Setelah SS membujuk, HR setuju melakukan transaksi pukul 20.00.

HR tepat waktu. Mobil Toyota Kijang kapsul hitam yang dikendarainya muncul. Mobilnya merapat, lalu ia turun menghampiri pintu sedan SS. HR mengenakan pakaian dinas ditutupi jaket kulit warna hitam.

Saat itulah tangan HR dicengkeram dua polisi. "Anda kami tangkap," kata seorang polisi. "Saya jaksa," jawab HR sambil meronta-ronta. Saat digeledah, sabu-sabu seberat 90 gram ditemukan dalam kantong kiri pakaian dinasnya. Di dalam mobilnya didapati 30 butir ekstasi.

HR lalu digiring ke apartemennya. Di kamarnya, polisi menemukan sabu-sabu di saku kanan bawah pakaian dinas upacara jaksa miliknya. Total sabu-sabu yang disita dari HR 217 gram. Dua pucuk senjata jenis FN kaliber 22 dan revolver 38 berikut enam butir peluru ditemukan di dalam tas hitamnya.

Sang jaksa tak berkutik. Barang bukti itu sudah cukup membuat HR mendekam dalam tahanan khusus tersangka narkoba Polda Metro Jaya. ... bukti yang diperoleh polisi di lapangan sudah cukup kuat untuk menjeratnya dengan Undang-Undang Psikotropika. Ancaman hukumannya 5 sampai 10 tahun penjara. Jika terbukti, bersalah tamat pula kariernya di kejaksaan. (**Sumber:** *Tempo*, 11 September 2005)

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Apa pekerjaan HR sehari-harinya?
2. Mengapa HR ditangkap polisi? Kasusnya apa?
3. Menurut kamu tindakan HR dalam kasus ini termasuk perilaku menyimpang atau bukan? Mengapa?
4. Menurut kamu, sudah tepatkah tindakan polisi menangkap HR yang juga seorang penegak hukum?
5. Apakah ada unsur pengendalian sosial dalam kisah di atas? Jelaskan!

Dalam kenyataan sehari-hari kita menjumpai perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat (perilaku menyimpang). Perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar nilai dan norma yang dianut masyarakat. Perbuatan yang melanggar nilai dan norma tersebut termasuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial sudah kita pelajari pada bab sebelumnya ketika kita membahas tentang penyimpangan sosial.

Untuk menjamin bahwa nilai dan norma yang berlaku ditaati diperlukan adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial dilakukan untuk memberi batas pada kelakuan anggota masyarakat.

Melalui proses sosialisasi, seseorang mempelajari perilaku yang dapat diterima dalam berbagai situasi dan belajar untuk membedakan antara pola-pola perilaku yang pantas dan yang tidak pantas. Namun demikian, masih selalu ada perilaku warganya yang menyimpang. Oleh karena itu,

pada setiap masyarakat atau kelompok sosial selalu dikenal adanya pengendalian sosial. Dalam arti ini pengendalian sosial sesungguhnya merupakan kelanjutan proses sosialisasi. Pengendalian ini berhubungan dengan cara-cara dan metode-metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok atau masyarakat.

Peter L. Berger (1978) mendefinisikan pengendalian sosial sebagai *berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.*

Joseph S. Roucek (1984) memberikan definisi yang lebih luas dari definisi Berger di atas. Ia mendefinisikan pengendalian sosial sebagai *suatu istilah kolektif yang menunjuk pada proses, baik terencana maupun tidak terencana di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok.*

Apabila pengendalian sosial dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan. Pengendalian sosial dilakukan secara timbal balik. Artinya, seseorang atau kelompok tertentu memengaruhi perilaku orang-orang atau kelompok lain dan sebaliknya mereka juga memengaruhi perilaku orang atau kelompok tersebut. Kita mengawasi tindakan orang lain di sekitar kita, namun perilaku kita juga tidak lepas dari orang-orang lain di sekitar kita. Tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian sosial adalah tercapainya keteraturan atau keselarasan sosial. Hal ini didukung dengan aturan-aturan sosial yang ada. Patokan-patokan atau kaidah sosial menjadi penuntun orang berperilaku dan menjadi standar bagi seseorang atau kelompok untuk mengadakan pengawasan.

6.3.1 Cakupan Pengendalian Sosial

Berdasarkan siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi pengendalian sosial dibedakan sebagai berikut.

1. Pengawasan dari individu terhadap individu lain. Contoh pengendalian sosial ini terjadi dalam peristiwa berikut ini. Sebagai individu, Widi menegur Herman supaya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dalam peristiwa kecil di atas, Widi telah melakukan pengendalian sosial. Hal serupa juga pasti pernah kamu lakukan ketika teman-temanmu melakukan hal yang tidak semestinya. Misalnya menyontek waktu ujian, menggosip, mencuri uang teman, ingin mengonsumsi narkotika, dan berkelahi. Atau sebaliknya kamu sendiri pernah ditegur oleh orang di sekitarmu, seperti teman, bapak, ibu, dan guru ketika kamu melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan.

Sumber: *Majalah Tempo, 7-13 Feb. 2005*

Gambar 6.3.1
Seorang guru sedang mengawasi para siswa yang sedang mengerjakan soal-soal ujian. Ini contoh pengawasan seorang individu terhadap kelompok.

2. Pengawasan dari individu terhadap kelompok. Pengendalian sosial jenis ini terjadi, misalnya ketika seorang guru sedang mengawasi ujian yang sedang dikerjakan oleh para siswa. Dalam peristiwa itu guru melakukan pengendalian sosial terhadap kelompok.
3. Pengawasan kelompok terhadap kelompok. Pengawasan model ini misalnya terjadi dalam peristiwa berikut ini.
   a. Negara Amerika Serikat memperingatkan Negara Irak untuk tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis.
   b. Dalam acara dengar pendapat dengan Menteri Kehutanan dan staf Departemen Kehutanan, DPR meminta agar pengawasan hutan benar-benar ditingkatkan, sehingga penebangan hutan secara liar tidak terulang kembali.

   Kedua contoh di atas memperlihatkan pengendalian sosial dari kelompok terhadap kelompok lain. Dalam hal ini kelompok bertindak sebagai suatu kesatuan dan bukan menyangkut pribadi-pribadi dari anggota kelompok yang bersangkutan.
4. Pengawasan dari kelompok terhadap individu. Misalnya, sebuah perkumpulan sepak bola terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap salah seorang pemainnya yang menerima uang suap. Tindakan yang diambil ini merupakan pengendalian sosial yang dilakukan kelompok terhadap individu dalam masyarakat atau kelompok tertentu terhadap anggotanya.

6.3.2 Sifat Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial terbagi atas pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial represif.

Sumber: Kompas 30 Nov 2006

Gambar 6.3.2
Seorang polisi memberi petunjuk di mana lajur khusus sepeda motor di jalan raya. Ini contoh pengendalian sosial yang bersifat preventif.

A. Pengendalian sosial bersifat preventif

Pengendalian sosial bersifat preventif adalah usaha yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya, seorang ibu menasihati putranya agar mengendarai motor dengan hati-hati dan menaati peraturan lalu lintas yang berlaku supaya terhindar dari musibah atau kecelakaan. Pengendalian sosial yang bersifat preventif biasanya berupa nasihat, anjuran, dan larangan atau perintah.

B. Pengendalian sosial bersifat represif

Pengendalian sosial bersifat represif adalah usaha yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Tujuannya untuk memulihkan keadaan kepada situasi semula, seperti sebelum pelanggaran itu terjadi. Pengendalian sosial yang bersifat represif biasanya menyertakan hukuman atau sanksi untuk memulihkan pelanggaran sosial yang telah dilakukan.

Misalnya, Pak Anton berutang kepada Tuan Buang dalam jumlah besar. Pak Anton berjanji mengembalikan utang tersebut pada tanggal yang telah mereka sepakati. Pak Anton ternyata ingkar janji. Oleh karena itu, Tuan Buang terpaksa menggugat Pak Anton di pengadilan. Pengadilan memutuskan Pak Anton dihukum untuk mengembalikan uang tersebut ditambah dengan ganti rugi keterlambatan pengembalian utang tersebut. Hal ini dilakukan untuk memulihkan situasi agar kembali pada keadaan semula.

6.3.3 Cara Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan *cara persuasif*. Cara yang kedua adalah dengan *cara koersif*.

A. Cara persuasif

Cara persuasif dilakukan apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing. Orang yang melakukan pelanggaran diberi pengertian, diajak berdialog tentang tindakan yang telah dilakukan, dan diajak untuk meninggalkan tindakan yang menyimpang itu. Cara ini akan berhasil kalau ada keterbukaan dari pelaku pelanggaran sosial.

B. Cara koersif

Cara koersif digunakan apabila pengendalian sosial ditekankan pada kekerasan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik.

Dari kedua cara di atas, cara mana yang lebih baik selalu tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai serta jangka waktu yang dikehendaki.

Apabila pengendalian sosial dilakukan secara terburu-buru, maka cara koersif dapat dilakukan. Misalnya, di beberapa tempat di kota besar seperti Jakarta terdapat larangan berjualan bagi para pedagang kaki lima demi ketertiban kota. Agar ketertiban kota itu dapat terwujud dengan cepat, maka diturunkan petugas untuk mengusir para pedagang kaki lima itu dari tempat-tempat yang telah dilarang untuk berjualan.

Namun, ternyata cara ini tidak efektif. Sering terjadi antara petugas ketertiban dan pedagang kaki lima main kucing-kucingan. Para pedagang kaki lima pura-pura patuh ketika ada petugas ketertiban. Begitu para petugas pergi para pedagang kembali berjualan di tempat yang dilarang. Ketertiban kota yang ingin dicapai dengan adanya larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di tempat-tempat tertentu ternyata tidak terwujud dengan cara represif. Maka, perlu ditempuh cara persuasif dengan mengadakan dialog antara apa-

Sumber: Kompas 12 januari 2006

Gambar 6.3.3
Penggusuran gubuk-gubuk liar di sebuah kawasan adalah salah satu contoh pengendalian sosial dengan cara koersif dengan menggunakan kekuatan.

rat pemerintah dan para pedagang kaki lima. Kedua belah pihak perlu mendengarkan kepentingan masing-masing pihak. Para pedagang diberi pengertian bahwa mereka juga turut bertanggung jawab atas terciptanya ketertiban dan kebersihan kota. Namun, perlu diketahui bahwa cara persuasif juga tidak selamanya baik. Perlu juga diingat bahwa masalah sosial adalah masalah yang kompleks, penyelesaian masalah sosial dengan melarang dilakukannya suatu tindakan tertentu masih menyisakan masalah sosial lainnya. Karena itu, akar masalahnya dan jalan keluarnya perlu dicari terlebih dahulu.

6.3.4 Jenis-jenis Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pengendalian sosial itu tidak selalu terwujud dalam teguran langsung terhadap tindakan seseorang atau kelompok. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis pengendalian sosial untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang, antara lain adalah gosip atau desas-desus, hukuman, pendidikan, dan agama.

A. Agama

Kesucian setiap agama terletak pada ajarannya yang dipandang sakral oleh para pemeluknya. Karena diyakini sebagai panutan hidup, setiap pemeluk agama akan berusaha sedapat mungkin mewujudkan ajaran agamanya tersebut dalam tingkah laku sosial sehari-hari. Pelanggaran terhadap ajaran agama akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri pelanggarnya.

Setiap pemeluk suatu agama yang taat akan menyatakan kebenaran ajaran agamanya masing-masing. Suatu aturan hukum atau norma tertentu yang bersumber pada ajaran agama lazimnya lebih banyak dijadikan pedoman bertindak yang senantiasa dipatuhi.

B. Pendidikan

Pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, formal maupun nonformal merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga. Baik pada masyarakat sederhana maupun pada masyarakat yang sudah kompleks terdapat proses pendidikan dan lembaga pendidikan.

Pendidikan dalam keluarga mengajari anak-anak bagaimana berperilaku yang baik. Pendidikan bertujuan mengarahkan perilaku anak-anak supaya perilaku anak-anak terkendali, dan tidak semua yang menyenangkan, yang diinginkan boleh dilakukan. Demikian juga pendidikan-pendidikan dalam kelompok-kelompok sosial yang lain, mengajarkan perilaku tertentu bagi perserta didiknya. Misalnya saja masyarakat adat. Masyarakat adat menanamkan pola-pola perilaku yang harus dilaksanakan oleh semua anggotanya.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak saja mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Akan tetapi sekolah juga memerhatikan perkembangan watak si anak melalui latihan kebiasaan hidup tertib dan disiplin, pelajaran agama, dan budi pekerti.

Pendidikan dalam masyarakat sederhana dan tradisional, misalnya mampu membentuk pola perilaku di mana perilaku menyimpang jarang sekali terjadi. Pengendalian sosial pada masyarakat tradisional dilakukan dengan sangat ketat, sehingga penyimpangan-penyimpangan jarang terjadi. Pendidikan luar sekolah (informal) yang serba ketat mengacu kepada kepatuhan kepada orang tua. Anak-anak sangat dianjurkan bahkan kadang kala dipaksa untuk menaati orang tua, karena orang tua selalu dianggap benar.

Sumber: *Majalah Tempo, 16 September 2001*

Gambar 6.3.4
Pendidikan merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga.

C. Gosip (desas-desus)

Bentuk pengendalian sosial ada yang berupa desas-desus atau gosip. Gosip adalah berita yang menyebar secara cepat dan tidak berlandaskan pada fakta atau kenyataan. Gosip dapat tersebar melalui media massa atau melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Isi gosip tidak harus benar. Akan tetapi yang penting adalah bahwa gosip dapat membuat orang yang melakukan penyimpangan sadar akan perbuatannya dan kembali kepada perilaku yang normal dalam masyarakat.

Sifat gosip dapat menyebar secara cepat dan menyebabkan setiap orang akan lebih berhati-hati dalam bertingkah laku. Gosip yang menyebar luas tentang suatu penyimpangan akan sangat memalukan pihak-pihak yang melakukan penyimpangan tersebut. Dengan demikian akan muncul rasa jera untuk melakukan penyimpangan. Dengan gosip masyarakat mengharapkan perubahan perilaku orang yang melakukan penyimpangan.

D. Teguran

Teguran dan peringatan diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan sosial. Tujuannya agar pelaku penyimpangan sosial menyadari kesalahannya. Teguran dapat disampaikan dengan cara lisan maupun tulisan. Jika pelaku penyimpangan sosial tidak mengindahkan teguran demi teguran yang disampaikan, ia akan mendapat sanksi disiplin.

Misalnya, Sunu sering membolos sekolah. Satu, dua kali guru wali kelas menegur Sunu agar tidak membolos. Akan tetapi Sunu masih saja sering membolos. Karena sudah terlalu sering membolos, akhirnya Sunu dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah adalah salah satu bentuk sanksi atau hukuman.

E. Sanksi (hukuman)

Untuk melakukan pengendalian sosial, selain menggunakan sarana-sarana yang ada digunakan juga cara lain yaitu dengan menjatuhkan sanksi. Sanksi sebenarnya berarti persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Seandainya terjadi persetujuan, sanksinya dinamakan sanksi positif dan sebaliknya kalau terjadi penolakan dinamakan sanksi negatif. Sanksi positif berisikan imbalan *(reward)* terhadap mereka yang telah mematuhi nilai-nilai maupun kaidah-kaidah, sehingga dapat dijadikan teladan. Misalnya, pemberian tanda jasa kepada mereka yang berjasa pada masyarakat dan negara. Sanksi negatif berisikan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Hukuman tersebut mencakup kegiatan untuk memulihkan keadaan dalam arti yang sempit. Hukuman dalam arti yang sempit mencakup hukuman pidana, hukuman perdata, dan hukuman administratif. Hukuman pidana seyogyanya dicantumkan sebagai usaha terakhir. Hukuman pidana dapat berupa hukuman fisik seperti hukuman kurungan dan denda, juga dapat berupa hukuman idiil seperti pengumuman keputusan pengadilan.

Sumber: *Majalah Tempo, 8-14 Agustus 2005*

Gambar 6.3.5
Polisi menilang pelaku pelanggaran lalu lintas. Tilang adalah salah satu bentuk sanksi terhadap pelanggar aturan berlalu lintas.

Hukuman dalam arti yang luas merupakan alat pengendalian sosial biasa yang dianggap paling ampuh. Hukuman disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas. Biasanya sanksi-sanksi berwujud penderitaan. Hukum dianggap sebagai sarana pengendalian sosial yang formal. Setelah melalui putusan pengadilan, seseorang yang melakukan penyimpangan dimasukkan ke dalam penjara. Memasukkan seseorang ke dalam penjara merupakan cara yang resmi untuk mengembalikan orang tersebut ke jalan yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Di dalam penjara para napi dididik dalam suatu lingkungan yang khusus diciptakan bagi mereka yang termasuk dalam kategori pelaku kejahatan. Di penjara terdapat serangkaian peraturan yang sama sekali lain dari mereka yang tinggal dalam masyarakat biasa. Semua peraturan dibuat agar mereka menjadi orang yang normal kembali. Itulah sebabnya penjara dinamakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Setelah menjalani masa hukuman para narapidana diharapkan dapat berubah. Ketika kembali ke masyarakat mantan napi diharapkan tidak membuat kejahatan lagi.

6.3.5 Lembaga-lembaga yang Berfungsi dalam Pengendalian Sosial

Pranata sosial sangat berperan dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Beberapa pranata sosial yang memegang peranan penting antara lain polisi, pengadilan, adat, dan tokoh masyarakat.

A. Polisi

Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, termasuk juga menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Polisi juga bertugas melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan yang ada. Selaku penyidik suatu perkara, polisi mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sesuai dengan peran polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka polisi memiliki tugas-tugas penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Di samping itu, polisi juga melakukan pembinaan terhadap mereka yang melakukan penyimpangan dan penyuluhan tentang hukum pada masyarakat.

Penangkapan jaksa HR yang terlibat kasus pengedaran narkoba seperti diceritakan di depan adalah salah satu contoh tugas dan kewajiban aparat kepolisian. Tindakan jaksa HR adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial dan termasuk tindak pidana.

Sumber: *Majalah Tempo, 27 Desember 2004*
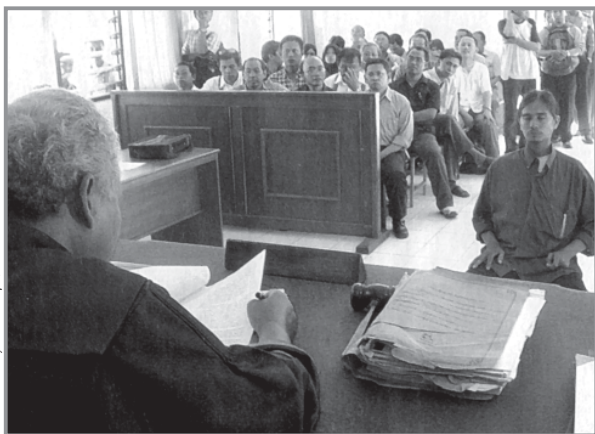
Gambar 6.3.6
Pengadilan merupakan salah satu badan yang dibentuk negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

B. Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu badan yang dibentuk negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil "atas nama Republik Indonesia" atau "atas nama keadilan." Hukum dalam arti yang luas merupakan alat pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh karena disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sarana formal. Apabila terjadi penyelewengan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, si pelaku dapat dihukum dengan hukuman penjara, pembayaran denda, bahkan hukuman mati. Bentuk-bentuk keputusan yang diberlakukan pada si pelanggar akan ditetapkan setelah melalui proses pengadilan.

Ada beberapa pihak yang terkait dalam menegakkan pengadilan, antara lain hakim, jaksa, panitera, polisi, dan advokat. Hakim bertugas menilai, menetapkan, dan menjatuhkan putusan hukum. Jaksa bertugas menuntut orang-orang yang melakukan kejahatan di depan pengadilan. Polisi bertugas menangkap, menyelidik, dan menyidik pelaku kejahatan. Advokat betugas mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.

C. Adat

Adat berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Bentuknya berupa perkataan atau macam-macam perbuatan.

Adat sebenarnya adalah hukum. Unsur pembentuknya adalah pembiasaan dalam kehidupan manusia terus-menerus dan menjadi kelaziman yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Dalam adat terdapat aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakatnya. Di negara kita, aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan disebut hukum adat. Di beberapa daerah di Indonesia aturan adat dan hukum adat masih kuat dan ditaati. Adat merupakan pranata yang berperan dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang. Adat merupakan lembaga yang berisi norma atau nilai perbuatan yang harus dilakukan. Penyimpangan dari perilaku yang digariskan akan mendapat hukuman dari masyarakat berupa cemoohan, pengucilan, dan sebagainya. Adat yang berisi kebiasaan yang baru atau sementara dinamakan *mode* atau *fashion.* Adat yang melembaga dan sudah berjalan lama sekali secara turun-temurun disebut *tradisi.* Adat yang dipakai dalam merayakan hal-hal yang resmi dinamakan *upacara.* Etiket adalah tata cara dalam masyarakat dan sopan-santun dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

Kebiasaan yang di negara Barat disebut *folkways* adalah adat basa basi yang dijalankan dalam masyarakat sehari-hari karena dianggap baik dan menyenangkan. Misalnya, kebiasaan menghormati orang-orang yang lebih tua usianya. Para anggota masyarakat yang melanggar adat akan menanggung sanksi yang keras. Sanksi atas pelanggaran itu kadang diperlakukan secara tidak langsung. Misalnya ketentuan adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami istri yang berlaku umum di daerah Lampung. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi. Perkawinan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia atau cerai mati. Apabila terjadi suatu perceraian, nama yang bersangkutan akan tercemar. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut diperlukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat. Hal seperti itu di daerah Minangkabau dikenal dengan istilah "dibuang sepanjang adat."

D. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya, karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Contoh tokoh masyarakat adalah para pejabat pemerintahan desa, para tetua adat, tokoh agama, dan para pakar yang menguasai suatu bidang.

Tokoh-tokoh masyarakat memberikan nasihat, bimbingan, dan petunjuk kepada anggota kelompoknya. Selain itu, tokoh masyarakat juga mengawasi tingkah laku para anggotanya berdasarkan patokan yang ada dan yang telah dirumuskan ber-

sama. Seandainya terjadi konflik di antara warga masyarakat maka seorang tokoh harus dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan berpedoman pada ketentuan yang tegas yang telah disepakati bersama.

6.3.6 Akibat Tidak Berfungsinya Lembaga Pengendalian Sosial

Lembaga pengendalian sosial mempunyai tugas mengatur anggota masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang. Namun, dalam kenyataan sehari-hari sering kali kita menjumpai lembaga-lembaga pengendali sosial tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Misalnya, polisi yang harusnya menindak tegas pelanggaran lalu lintas menerima uang damai, hakim yang harusnya bertindak adil menerima uang suap, dan sebagainya.

Akibat yang dapat ditimbulkan karena lembaga pengendali sosial tidak berlaku semestinya adalah timbulnya masalah-masalah sosial akibat perilaku menyimpang. Masalah-masalah sosial tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Kerusuhan atau kekacauan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat beragam. Konflik antarkelompok bisa saja terjadi. Lembaga-lembaga pengendali sosial sangat penting perannya dalam mengendalikan warga supaya tidak terjadi konflik antarkelompok.
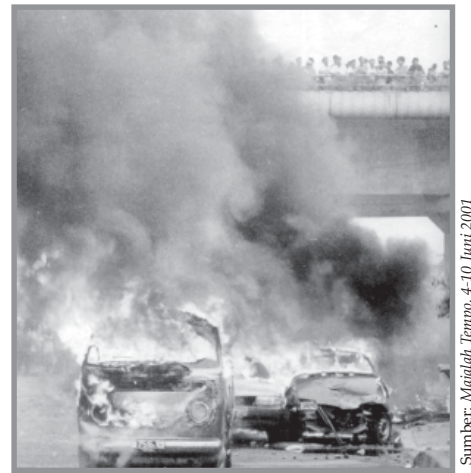
Sumber: *Majalah Tempo, 4-10 Juni 2001*

Gambar 6.3.7
Kerusuhan atau kekacauan yang timbul dalam masyarakat merupakan akibat dari tidak berfungsinya lembaga-lembaga pengendalian sosial.

2. Maraknya perilaku menyimpang khususnya tindak kejahatan. Pelaksanaan pengendalian sosial yang tegas dan tanpa pandang bulu akan memberi aspek jera kepada pelaku kejahatan. Sebaliknya, pengendalian sosial yang lunak, bisa disuap, dan pilih-pilih akan menyuburkan tindak kejahatan. Tingginya tindak kriminalitas salah satunya disebabkan oleh longgarnya kendali atas para pelaku tindak kejahatan. Aparat hukum yang kurang tegas menindak para koruptor, misalnya, membuat korupsi merajalela di Indonesia. Bahkan Indonesia termasuk dalam papan atas daftar negara-negara terkorup di dunia.

RANGKUMAN

1. Untuk menjamin bahwa nilai dan norma yang berlaku ditaati diperlukan adanya *pengendalian sosial*.
2. Definisi pengendalian sosial:
   a. Menurut **Peter L. Berger**: "Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang."
   b. Menurut **Joseph S. Roucek**: "Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang menunjuk pada proses, baik terencana, maupun tidak terencana di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok."
3. Berdasarkan siapa yang mengawasi dan diawasi, jangkauan pengendalian sosial dibedakan menjadi pengawasan dari individu terhadap individu lain, pengawasan dari individu terhadap kelompok, pengawasan kelompok terhadap kelompok, dan pengawasan dari kelompok terhadap individu.
4. Ada dua cara pengendalian sosial, yaitu: cara persuasif dan cara koersif.
5. Jenis-jenis pengendalian sosial, antara lain desas-desus atau gosip, sanksi, pendidikan, dan agama.
6. Lembaga sosial diperlukan untuk meluruskan perilaku yang menyimpang. Lembaga sosial yang penting antara lain polisi, pengadilan, adat, dan tokoh masyarakat.
7. Akibat yang dapat ditimbulkan karena lembaga pengendali sosial tidak berlaku semestinya adalah timbulnya masalah-masalah sosial akibat perilaku menyimpang, antara lain kerusuhan atau kekacauan dalam masyarakat dan maraknya perilaku menyimpang khususnya tindak kejahatan.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Setiap adat memiliki etiketnya masing-masing.
2. Pengadilan adalah salah satu contoh pengendalian sosial yang bersifat represif.
3. Salah satu lembaga yang berfungsi dalam pengendalian sosial adalah tokoh masyarakat.
4. Pendidikan adalah salah satu jenis pengendalian sosial. Karenanya sekolah berhak melakukan tindakan koersif kepada murid dan orang tua.

II. Salin di buku tugasmu dan lengkapilah dengan jawab-an yangtepat!

1. Tokoh yang mendefinisikan pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang adalah ... .
2. Pengendalian sosial dilakukan untuk memberi batas pada ... anggota masyarakat.
3. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial terbagi atas pengendalian sosial ... dan ... .
4. Ada dua cara pengendalian sosial, yaitu cara ... dan ... .
5. Berita yang menyebar secara cepat dan tidak berlandaskan pada fakta dan kenyataan disebut ... .
6. Tujuan dari hukum adalah ... .
7. Seorang bapak melarang istrinya berkumpul dengan ibu-ibu di sekitar rumah mereka dengan alasan bahwa ibu-ibu itu sering membuat cerita fitnah. Larangan ini termasuk dalam cakupan pengendalian sosial, yaitu ... .
8. Pendidikan merupakan sarana pengendalian sosial yang efektif karena pendidikan pada dasarnya juga merupakan pengendalian sosial yang dilakukan dengan sifat ... .
9. Pengadilan merupakan salah satu badan atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk mengurus dan mengadili ... .
10. Adat yang melembaga dan sudah berjalan lama sekali secara turun-temurun disebut ... .

III.Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Apa definisi pengendalian sosial menurut Joseph S. Rouch?
2. Berdasarkan siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi, pengendalian sosial dibedakan menjadi 4. Sebutkan!
3. Jelaskan dua sifat pengendalian sosial!
4. Kapan gosip dapat terjadi?
5. Bagaimana peran agama dalam pengendalian sosial?
6. Jelaskan dua cara pengendalian sosial!
7. Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis-jenis pengendalian sosial untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang!
8. Jelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan adat berikut ini.
   a. mode　　c. tradisi
   b. upacara　　d. etiket
9. Apa yang terjadi kalau lembaga-lembaga pengendali sosial tidak berlaku semestinya?
10. Jelaskan dengan singkat fungsi pranata politik dalam kehidupan!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

SARJANA HUKUM LULUSAN PENJARA

Penjara Cipinang dan Salemba mulai memasukkan kuliah hukum untuk kegiatan narapidana. Diharapkan bisa mencegah munculnya penjahat kambuhan.

Sejak pertengahan Desember 2007, pendidikan strata satu (S-1) telah masuk Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Dimulai saat Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) membuka kelas jauh di penjara terbesar di Tanah air itu. Ide itu sebenarnya untuk memberikan kegiatan kepada narapidana berpendidikan tinggi, yang jumlahnya meningkat sejak digalakkannya pemberantasan korupsi.

Akibatnya kegiatan yang dipersiapkan di penjara, seperti kursus pertukangan atau paket belajar tingkat A, B, dan C, sudah tidak pas untuk mereka. Para narapidana elit itu pun mengalami kejenuhan luar biasa.

Banyak yang serius mengikuti kuliah, seperti Pollycarpus, Eurico Guterres yang duduk anteng Jumat akhir Februari 2008 lalu. "Semua ilmu pengetahuan saya suka," ujar mantan pilot Garuda terpidana pembunuhan pejuang HAM Munir ini.

Layaknya perkuliahan di kampus, peserta juga mengikuti ujian tengah dan akhir semester. Tentu kuliah tidak gratis . Agar bisa mengikuti kuliah, mahasiswa mengeluarkan

Rp 1,75 juta untuk biaya pendaftaran, dan Rp 350 ribu per bulan untuk biaya kuliah.

Meski tujuan awal pembukaan fakultas hukum ini adalah untuk memberikan kegiatan kepada tahanan intelek, pendidikan di penjara ternyata terbukti efektif untuk mencegah mantan narapidana melakukan kejahatan lagi.

Menurut sebuah penelitian di Texas, Amerika Serikat, dari semua eks napi yang diberi pendidikan hingga diploma-3, yang kembali melanggar hanya 13,7 persen. Jumlah ini makin ciut seiring dengan naiknya pendidikan napi. Dari semua mantan napi yang mendapat pendidikan S-1, yang kembali melanggar hanya 5,6 persen, dan tidak ada napi yang kembali melakukan kejahatan setelah mereka mengikuti pendidikan S-2.

Disarikan dari artikel "Sarjana Hukum Lulusan Penjara": Majalah Tempo, 8-9 Maret 2008

A. Menjawab pertanyaan

1. Berikan pendapatmu mengenai artikel di atas!
2. Jenis pengendalian sosial apa sajakah yang diceritakan pada artikel di atas?
3. Apakah sifat pengendalian sosial dari perkuliahan di penjara?
4. Merujuk pada artikel di atas, apakah tujuan yang hendak dicapai oleh pengendalian sosial di atas?
5. Perhatikan paragraf terakhir. Menurutmu, mengapa semakin tingginya pendidikan narapidana dapat mengurangi narapidana yang terjadinya kejahatan kambuhan?

B. Portofolio

Pilihlah salah satu jenis pengendalian sosial di bawah ini, lalu carilah satu kasus (peristiwa) yang berkaitan dengan pengendalian sosial tersebut.

a. Gosip
b. Pendidikan
c. Agama

Buatlah kliping (bersumber dari media cetak, maupun internet) mengenai topik pilihanmu. (contoh topik: **Teguran** Rhoma Irama terhadap goyangan Inul Daratista).

Kliping tersebut harus mampu mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Apakah peristiwa yang diangkat?
2. Apa hubungannya jenis pengendalian sosial yang kamu pilih?
3. Bagaimanakah masalah tersebut diatasi?
4. Apakah kesimpulan yang kamu peroleh?

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Hubungan sosial adalah … .
   a. hubungan timbal balik antarogranisasi hidup yang berbeda spesies
   b. hubungan searah antarorganisasi hidup dalam satu spesies
   c. hubungan timbal balik antarorganisasi hidup dalam satu spesies
   d. hubungan searah antarorganisasi hidup yang berbeda spesies
2. Membersihkan lingkungan RT bersama-sama adalah bentuk … .
   a. kerja sama
   b. mediasi
   c. koersi
   d. kontravensi
3. Rio dan Linda berkongsi mendirikan perusahaan bersama. Kerja sama itu dinamakan … .
   a. koalisi
   b. *Joint Venture*
   c. koersi
   d. kooptasi
4. Polisi yang menembak kaki penjahat ketika kabur adalah bentuk tindakan ... .
   a. kompromi
   b. koalisi
   c. koersi
   d. konsiliasi
5. Yang dimaksud dengan arbitrase adalah ... .
   a. masing-masing pihak yang bertikai mengurangi tuntutannya agar tercapai penyelesaian
   b. penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan
   c. akomodasi tanpa persetujuan yang berbentuk formal
   d. suatu cara untuk menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga
6. Di bawah ini yang merupakan contoh dari toleransi adalah … .
   a. kombinasi dua organisasi untuk mencapai keuntungan bersama
   b. Butet dan Katiyem saling menghormati kebiasaan dan adat suku masing-masing
   c. buruh demonstrasi di jalanan menuntut kelayakan upah
   d. Roni dan Rona capek bertengkar, lalu saling menjauhi
7. Yang dimaksud dengan akomodasi sebagai suatu proses adalah … .
   a. keseimbangan dalam interaksi antar orang perorangan dan kelompok manusia
   b. usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan
   c. bentuk akomodasi dengan adanya paksaan
   d. kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan sama
8. “Indonesian Idol”, “Idola Cilik” maupun “Kontes Dangdut Indonesia” adalah contoh acara televisi yang mengandalkan … .
   a. kompetisi
   b. kontravensi
   c. konsiliasi
   d. koalisi
9. Pada tahun 1970-an hingga akhir 1980-an, Amerika Serikat dan Rusia terlibat Perang Dingin. Karena kekuatan keduanya sama, terjadilah keseimbangan. Keadaan di atas disebut ... .
   a. toleransi
   b. stalemate
   c. arbitrase
   d. kompromi
10. Di bawah ini yang termasuk bentuk ajudikasi adalah ... .
    a. tawuran antarpelajar
    b. bergotong royong menanam padi
    c. penuntutan koruptor ke pengadilan
    d. persaingan mendapatkan rangking satu
11. Ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia bernegosiasi, negara Swedia menengahi negosiasi tersebut. Peran Swedia adalah sebagai ... .
    a. mediator
    b. konsiliator
    c. kopromotor
    d. kompetitor
12. Di bawah ini, hubungan sosial yang bersifat disosiatif adalah ... .
    a. kompromi
    b. kompetisi
    c. mediasi
    d. *stalemate*
13. Pranata sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh ... .
    a. Bruce J. Cohen
    b. Robert MacIver dan C.H. Page
    c. Leopold Wiesel dan Becker
    d. Koentjaraningrat dan Mely G. Tan
14. Di bawah ini yang merupakan pranata sosial adalah ... .
    a. majelis taklim
    b. pendidikan
    c. rumah sakit
    d. partai
15. Pranata sosial untuk menghormati orang yang lebih tua di Indonesia adalah pranata sosial yang terbentuk ... .
    a. secara terencana
    b. sudah ditetapkan
    c. tidak terencana
    d. sesuai hukum
16. Contoh pranata sosial yang sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat adalah ... .
    a. bersalaman dengan tangan kanan
    b. perempuan tidak memiliki hak suara
    c. siswa tidak boleh terlambat tiba di sekolah
    d. lebih disarankan pernikahan monogami

17. Contoh pranata sosial yang masih dipertahankan di Indonesia adalah ... .
    a. perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
    b. kewajiban sunat bagi anak laki-laki di budaya dan agama tertentu
    c. banyak anak, banyak rezeki
    d. menjadi pegawai negeri lebih mulia daripada menjadi pedagang
18. Fungsi pranata sosial adalah ... .
    a. mengikat anggota masyarakat
    b. menjaga masyarakat agar berjalan tertib
    c. mendukung penyimpangan sosial
    d. mencapai harapan perorangan
19. Di terminal X, para preman membentuk paguyuban, yang bertugas menariki 'uang sewa' dari para sopir angkutan umum. Hal ini merupakan contoh pranata sosial ... .
    a. manifes c. fungsional
    b. laten d. disfungsional
20. Agar dianggap sukses oleh keluarganya, ia berutang banyak pada bank dan tidak mampu melunasinya. Contoh di atas adalah fungsi pranata sosial ... .
    a. fungsional manifes
    b. fungsional laten
    c. disfungsional laten
    d. disfungsional manifes
21. Yang dimaksud dengan fungsi pranata sosial disfungsional manifes adalah ... .
    a. pranata yang disadari dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat
    b. pranata sosial yang tidak disadari namun mendukung keberlangsung hidup masyarakat
    c. pranata yang disadari tetapi tidak mendukung keberlangsungan hidup masyarakat
    d. pranata sosial yang tidak disadari dan tidak mendukung keberlangsungan hidup masyarakat
22. Simbol pranata sosial pada umat agama nasrani adalah … .
    a. swastika c. ketupat
    b. salib d. pohon cemara
23. Menurut sudut penyebarannya, pranata sosial agama dikategorikan dalam ... *institutions.*
    a. *restricted* c. *general*
    b. *regulative* d. *subsidiary*
24. Pengobatan tradisional jamu adalah pranata yang bertujuan untuk mengurus kesehatan. Jika dilihat dari penyebarannya yang tidak luas, pranata tersebut dikategorikan dalam ... *institutions.*
    a. *restricted* c. *general*
    b. *regulative* d. *subsidiary*
25. Seorang anak akan mementingkan pendapat orang tuanya ketimbang pendapat pasangannya. Berdasarkan ikatan yang dipentingkan, keluarga ini termasuk keluarga ... .
    a. batih c. konjungnal
    b. konsanguinal d. prokreasi
26. Seorang pria dari kasta sudra menikahi perempuan dari kasta yang sama adalah bentuk perkawinan ... .
    a. heterogami c. homogami
    b. eleutherogami d. monogami
27. Manusia yang baru lahir masih bersih seperti kertas kosong. Menjadi apa dia kelak ditentukan oleh pengalaman hidupnya. Hal ini dikemukakan oleh John Locke dan disebut sebagai teori ... .
    a. tabung kosong c. tabula hati
    b. tabula rasa d. tabung rasa
28. Di bawah ini yang termasuk disfungsi agama adalah ... .
    a. saling menghormati teman yang berbeda agama
    b. konflik antaragama
    c. cinta kasih dan perdamaian
    d. mempersatukan sesama pemeluk agama
29. Pola politik ekonomi yang menekankan tentang arah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi adalah konsep ideologi ... .
    a. kapitalisme c. sosialisme
    b. demokrasi d. neo-liberalisme
30. Menurut David Popenoe, salah satu fungsi pendidikan sekolah adalah transmisi kebudayaan masyarakat. Contoh yang menunjukkan hal itu adalah ... .
    a. adanya pelajaran teknik dan komputer
    b. adanya pelajaran keterampilan
    c. pelajaran muatan lokal budaya lokal
    d. pemupukan semangat nasionalisme
31. Pengendalian sosial yang menggunakan kekerasan disebut ... .
    a. koersi b. persuasi
    b. represi d. provokasi
32. Negara yang rajanya memiliki kekuasaan tertinggi dinamakan negara berstruktur ... .
    a. republik c. otokrasi
    b. monarki absolut d. aristokrasi
33. Di China, pejabat korupsi dapat diancam hukuman mati. Hal ini merupakan jenis pengendalian sosial ... .
    a. agama c. gosip
    b. pendidikan d. sanksi
34. Pranata politik adalah seperangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Hal ini merupakan definisi pranata sosial yang dikemukakan oleh ... .

a. David Popenoe
b. Leopold von Wiese
c. William Kornblum
d. Soerjono Soekanto

35. Memberikan kesegaran jiwa dan ketenangan adalah ... dari agama.
 a. unsur c. simbol
 b. fungsi d. pengertian

II. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan yang kamu mengerti tentang kerja sama dalam bentuk koalisi? Berikan contoh!
2. Apakah yang dimaksud dengan persaingan itu? Berikan contoh!
3. Mengapa persaingan atau kompetisi dapat terjadi?
4. Menurut pendapatmu, apakah konflik memiliki dampak positif? Jelaskan!
5 Apakah perbedaan antara konsiliasi dan toleransi? Jelaskan!
6. Apakah perbedaan antara arbitrase dan mediasi? Jelaskan dengan contoh!
7. Apakah yang dimaksud dengan institusionalisasi?
8. Jelaskan yang dimaksud dengan pembentukan pranata sosial secar a tidak sengaja!
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keluarga batih!
10. Apakah keluargamu (di rumah) terdiri dari keluarga inti atau keluarga luas! Kalau terdiri dari keluarga luas, berapa keluarga yang tinggal di rumahmu? Jelaskan!
11. Uraikan apa peran dan fungsi agamamu bagi kehidupanmu!
12. Sebutkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolahmu!
13. Uraikan menurut pendapatmu sendiri, apa itu politik!
14. Sebukan peran sederhana dari pranata politik bagi kehidupan manusia!
15. Sebutkan beberapa partai politik di Indonesia yang kamu ketahui!
16. Apakah yang dimaksud dengan gosip! Berikan contoh!
17. Jelaskan pengendalian sosial yang bertugas untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang!
18. Sebutkan lembaga-lembaga yang berfungsi dalam pengendalian sosial! Berikan contoh!

Bab 7 Kegiatan Perekonomian Indonesia
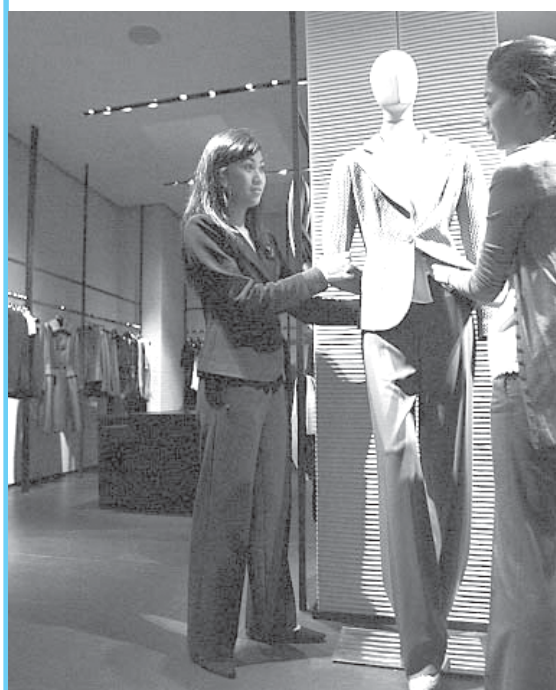
Sumber: *Harian Kompas 9 April 2008*

Sumber: *www.tempointeraktif.com*

Sumber: *Kompas Sumbagsel 1 April 2008*

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan ekonomi, terkadang tidak semua tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Pemerintah pun harus berupaya untuk menanggulanginya, misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya, sekaligus memperbesar kesempatan kerja.

Dengan menggunakan sistem demokrasi ekonomi, negara kita terus berupaya untuk mempertinggi kualitas hidup masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, tiap negara memiliki sistem. Sistem tersebut juga mengatur kehidupan para pelaku ekonomi, seperti pihak swasta, asing, para konsumen maupun pemerintahan itu sendiri.

Meninggikan kualitas hidup masyarakat misalnya ditunjukkan dengan pemerataan penghasilan yang diupayakan melalui adanya pajak. Pajak sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, dan memiliki beberapa fungsi yang berbeda.

Terakhir, akan dibahas mengenai mekanisme pasar, misalnya hukum permintaan, penawaran, serta proses terbentuknya harga.

Peta Konsep

Kegiatan Perekonomian Indonesia
Tenaga Kerja dalam Kegiatan Ekonomi
Pengertian kesempatan kerja
Pengertian tenaga kerja dan pengangguran
Pengangguran
Cara-cara Memperluas Kesempatan Kerja
Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku-pelaku Ekonomi
Sistem ekonomi
Sistem ekonomi Indonesia
Pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia
Sektor usaha informal
Pajak dalam perekonomian Indonesia
Pajak dan pungutan resmi lainnya
Fungsi pajak
Jenis pajak
Tata cara, asas, dan sistem pemungutan pajak
Pajak negara
Pajak daerah dan retribusi daerah
Permintaan, Penawaran dan Terbentuknya Harga Pasar
Permintaan
Penawaran
Harga
Variabel perubahan permintaan

7.1 Tenaga Kerja dalam Kegiatan Ekonomi

Kursus Sebagai Solusi Atasi Masalah Pengangguran

Bekasi - Pengangguran adalah penyebab kemiskinan, sedangkan kemiskinan adalah penyebab masalah sosial dan hukum. Kedua masalah tersebut menjadi beban masyarakat dan pemerintah termasuk pemerintah daaerah (pemda). Kursus dan pelatihan adalah salah satu solusi yang realistik untuk membantu warga mendapatkan pekerjaan. Kursus dapat dijadikan sebagai solusi mengatasi masalah pengangguran.

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad mengatakan, upaya untuk memromosikan kursus dan pelatihan kepada masyarakat perlu terus dilakukan. "Dengan adanya pameran sangat bagus untuk mensosialisasikan dan memublikasikan agar masyarakat semakin tahu bahwa ini adalah solusi bagi kehidupan mereka," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Kursus dan Pelatihan di Mega Bekasi Hypermall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (3/07/2008).

... .

Hamid menyebutkan, saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 13.000 lembaga kursus dan pelatihan, tetapi hanya sedikit dari masyarakat yang mengetahui keberadaan lembaga-lembaga ini. Sementara, lanjut dia, dari sebanyak 111 juta orang angkatan kerja di Indonesia sekitar 10 juta orang atau 10 persennya adalah pengangguran. "Mereka adalah penganggur-penganggur terbuka yang harus mencari kehidupan di Indonesia ini," katanya.

Sumber : *www.depdiknas.go.id*

Diskusikan pertanyaan berikut berdasarkan artikel di atas!

1. Apa inti dari artikel tersebut?
2. Apa dampak pengangguran bagi masyarakat Indonesia?
3. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran menurut tokoh-tokoh di atas?
4. Apakah langkah-langkah tersebut sudah tepat untuk menyelesaikan masalah pengangguran?
5. Jelaskan pendapat kalian tentang langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia!

7.1.1 Pengertian Kesempatan Kerja

Ekonomi menyangkut kebutuhan manusia dan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan itu. Keinginan dan kebutuhan manusia, seperti kita ketahui, tidak terbatas sedangkan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia bersifat terbatas. Ilmu ekonomi berusaha menerangkan bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas tersebut dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang bersifat terbatas.

Ekonomi sumber daya manusia adalah salah satu cabang ilmu ekonomi. **Ekonomi sumber daya manusia** membahas dan menguraikan prinsip-prinsip pendayagunaan tenaga dan kemampuan manusia dalam mengolah sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Indonesia yang jumlah penduduknya termasuk nomor lima terbesar di dunia, sebenarnya memiliki modal besar sekali untuk dapat mengolah sumber daya yang ada. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi seharusnya tidak menjadi masalah apabila dapat dimanfaatkan sebagai daya dukung utama ekonomi guna memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan manusia itu sendiri adalah penyediaan kesempatan kerja yang luas.

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan jumlah penduduk yang dapat diserap dalam permintaan tenaga kerja atau titik keseimbangan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk menyerap angkatan kerja yang ada.

Di Indonesia masalah kesempatan kerja dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.* Dalam pasal tersebut pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja agar dapat hidup layak. Akan tetapi, tanggung jawab demikian itu harus ditunjang oleh kemauan masyarakat sendiri untuk bersama-sama pemerintah menjalankan setiap

kebijakan memperluas lapangan pekerjaan. Misalnya membuka usaha-usaha mandiri dan sektor informal yang memenuhi tertib hukum dan aturan pemerintah, menjadi wirausaha yang memiliki dedikasi yang tinggi pada moral kerja dan usaha meningkatkan kesadaran berbisnis.

7.1.2 Pengertian Tenaga Kerja dan Pengangguran

A. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja (beruurantara 15-55 tahun).

Para **bukan angkatan kerja** adalah orang yang bersekolah serta orang yang mengurus rumah tangga. Walaupun mereka tidak bekerja tetapi dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Jadi, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur, sehingga tiap-tiap negara memberikan batasan yang berbeda-beda. Di Indonesia yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Pada umur tersebut tenaga kerja seringkali disebut usia kerja/usia produktif. Dengan demikian, penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 50 tahun dikelompokkan sebagai bukan tenaga kerja.

Untuk lebih jelasnya perhatikan ***bagan 7.1.1*** mengenai penduduk dan tenaga kerja.

B. Pengertian angkatan kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sudah bekerja atau berusaha untuk mencari kerja. Maka angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sudah menghasilkan barang atau jasa, dan sebagian lain yang tergolong siap bekerja, serta sedang berusaha mencari pekerjaan.

C. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Selain tingkat pengangguran, dalam dunia ketenagakerjaan sering pula digunakan indikator lain yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah

Bagan 7.1.1
Penduduk dan Tenaga Kerja

Tabel 7.1.1
Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka

Periode	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Baru	Jumlah Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Jumlah Orang Yang Bekerja	Tambahan Lapangan Kerja	Pengangguran Terbuka	(Persen)
1996	88.190.000	3.960.000	7,82	83.900.000	3.790.000	4.290.000	4,86
1999	94.850.000	2.110.000	0,79	88.820.000	1.140.000	6.030.000	6,36
2000	95.650.000	940.000	4,92	89.840.000	1.000.000	5.810.000	6,07
2001	98.810.000	3.160.000	3,44	90.810.000	970.000	8000.000	8,10
2002	100.780.000	1.970.000	3,66	91.650.000	840.000	9.130.000	9,06
2003	102.880.000	2.100.000	3,99	92.750.000	1.100.000	10.130.000	9,85
2004	104.980.000	2.100.000	4,49	94.150.000	1.400.000	10.830.000	10,32
2005	107.080.000	2.100.000	5,03	95.890.000	1.750.000	11.190.000	10,45

Sumber : Bappenas
Keterangan:
Untuk tahun 1996, 1999, 2000, 2001 dan 2002 menggunakan angka Sakerna-BPS. Untuk tahun 2000 tanpa Provinsi Maluku. Untuk tahun 2001 dan 2002 menggunakan definisi pengangguran terbuka yang disempurnakan dan termasuk Provinsi Maluku. Untuk tahun 2003-2005 menggunakan angka proyeksi Bappenas.

Tabel 7.1.2
Penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan pekerrjaan utamanya
Februari 2005-Februari 2007
Juta

Pekerjaan	2005	2006		2007
	Februari	Februari	Agustus	Februari
Penduduk berusia 15 tahun keatas	155,5	159,26	160,81	162,35
Tenaga kerja	105,80	106,28	106,39	108,13
- Bekerja	95,95	195,18	95,48	97,58
- Menganggur	10,85	11,10	10,93	10,55
Bukan tenaga kerja	49,75	52,98	54,42	54,22
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,00	66,74	66,16	66,60
Pengangguran terbuka (%)	10,30	10,40	10,28	9,75

Diskusi Ekonomi
M. Chatib Basri (MCB) Arianto A. Patunru (AAP)

angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja (penduduk usia kerja).

Untuk menghitung TPAK digunakan formula berikut ini.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Tinggi rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti umur, jenis kelamin, dan pendidikan.

- Dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut pada umumnya mereka masih sekolah dan merasa belum punya kewajban untuk mencari nafkah.
- Dari sisi jenis kelamin, biasanya TPAK wanita lebih rendah dibandingkan dengan TPAK pria. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, yaitu yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah adalah pria.
- Dari sisi pendidikan, pada umumnya penduduk yang berpendidikan rendah mempunyai TPAK lebih tinggi dari kelompok lain. Hal ini karena penduduk yang berpendidikan rendah tidak memilih-milih jenis pekerjaan yang akan dimasukinya.

Angka TPAK juga dapat dijadikan indikator tingkat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Tabel 7.1.3
Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Menurut Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

Status Pekerjaan Utama	Perkotaan		Pedesaan	
	Februari 2007	Agustus 2007	Februari 2007	Agustus 2007
Berusaha sendiri	49.789	40.580	122.404	131.925
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	29.448	18.449	239.366	237.175
Berusaha dibantu buruh tetap	6.255	7.128	17.282	19.360
Buruh/Karyawan	57.520	76.054	84.948	99.777
Pekerja bebas di pertanian	1.284	787	12.693	10.067
Pekerja bebas non pertanian	8.126	1.916	16.223	9.915
Pekerja tak dibayar	22.291	14.252	255.531	227.216
Total	**174.713**	**159.166**	**748.447**	**735.435**

Sumber: *Tempo*

7.1.3 Pengangguran

A. Pengertian pengangguran

Salah satu masalah yang dihadapi baik negara berkembang maupun negara maju, berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah *pengangguran*.

Sulit sekali mendefinisikan pengangguran, sebagaimana halnya menentukan batasan umum tenaga kerja. Namun, pada prinsipnya, penganggur dan setengah penganggur dapat dibedakan menjadi empat kelompok berikut.

a. *Penganggur* yaitu orang yang termasuk angkatan kerja, tetapi tidak atau belum mendapatkan pekerjaan.
b. Orang di luar angkatan kerja, tetapi ingin atau memerlukan pekerjaan.
c. Orang yang bekerja kurang dari waktu yang diinginkan karena alasan di luar kekuasaannya. Jika seseorang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, ia termasuk golongan setengah penganggur.
d. Orang yang bekerja kurang dari apa yang dapat dikerjakan dengan keterampilan dan pendidikan yang dimilikinya. Pengangguran semacam ini sering disebut pengangguran terdidik.

Menurut sensus penduduk tahun 1971, yang dikelompokkan sebagai penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Termasuk dalam kelompok penganggur ini adalah mereka yang pernah bekerja atau sekarang dibebastugaskan, serta mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Dengan demikian, bila dilihat dari kemauan orang untuk bekerja, penganggur dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, penganggur terpaksa atau mereka yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan walaupun mereka berusaha terus mencari pekerjaan dan bersedia menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah dari yang semestinya. *Kedua*, penganggur sukarela atau mereka yang memilih lebih baik menganggur daripada menerima pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
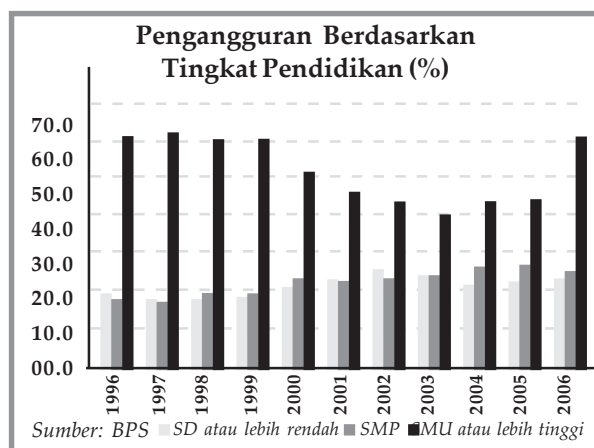
Grafik 7.1.1
Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan (%)

Gambar 7.1.1
Buruh tembakau di desa Juwiran, Klaten, Jawa Tengah. Umumnya mereka hanya diupah Rp 10.000 per hari. Sebuah gambaran dilematik yang dialami oleh buruh Indonesia yaitu gaji kecil dan beban kerja yang berat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu negara biasanya adalah angka tingkat pengangguran, yaitu persentase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja.

B. Bentuk pengangguran

Menurut sebab-sebab terjadinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi pengangguran friksional, struktural, musiman, dan konjunktural.

a. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional biasanya bersifat sementara, karena tenaga kerja yang bersangkutan belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau keahliannya. Pengangguran ini terjadi sebagai akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain.

Dalam pengangguran ini tidak ada penanggulangan secara khusus, karena jalan keluar untuk mengurangi pengangguran ini adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja berbagai macam bidang usaha.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran ini terjadi akibat perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Misalnya, kawasan yang tadinya agraris menjadi kawasan industri. Contoh yang lain penggunaan traktor dalam sektor pertanian bagi sejumlah negara sedang berkembang akan menimbulkan banyak pengangguran di kalangan buruh tani. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan ketidaksiapan tenaga kerja ke bidang lain. Biasanya perubahan komposisi perekonomian membawa perubahan teknologi, maka pengangguran ini juga dinamakan pengangguran teknologi.

c. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman ini terjadi karena pergantian musim. Sebab pekerja hanya bekerja pada musim tanam dan musim panen saja. Pengangguran musiman biasa dirasakan para petani di Pulau Jawa, maka cara mengatasi yang paling efektif yaitu dengan mengadakan proyek padat karya.

d. Pengangguran konjunktural (pengangguran siklis)

Pengangguran konjunktural terjadi karena adanya gelombang kehidupan ekonomi (konjunktur). Gelombang ekonomi *(konjunktur)* adalah terjadinya resesi atau kemunduran kegiatan ekonomi di skala nasional. Di masa krisis ekonomi banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan akhirnya mengambil kebijaksanaan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap karyawannya. Pada masa ini perusahaan mengalami suatu dilema. Di satu sisi perusahaan ingin mempertahankan karyawan dan mengharap karyawan mau menerima pengurangan upah. Akan tetapi di sisi lain karyawan, menuntut upah yang naik. Peristiwa ini membuat banyak perusahaan menutup usahanya atau mengadakan relokasi (pemindahan lokasi perusahaan) di negara-negara yang upah karyawannya bisa ditekan. Akibatnya angka pengangguran semakin tinggi.

Penyebab utama pengangguran konjunktural adalah turunnya permintaan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya over produksi yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Pada masa ini pemerintah diharapkan ambil bagian secara aktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan penyediaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan meninjau kembali aturan-aturan yang mempermudah pemasaran barang keluar negeri dan menarik investor dari negara lain.

Jenis pengangguran juga dapat dilihat dari sudut pandang jam kerja, tingkat produktivitas kerja, dan pendapatan, sehingga pihak yang mengalami pengangguran ini disebut orang setengah menganggur . Setengah menganggur atau semi pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- *Setengah menganggur kentara*

  Setengah menganggur kentara, yaitu orang yang bekerja kurang dari jumlah jam tertentu seminggu. Biasanya, kriteria yang dipakai adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

- *Setengah menganggur tidak kentara*

  Pengangguran ini juga sering disebut pengangguran terselubung . Orang yang dikelompokkan dalam pengangguran ini adalah mereka yang pada dasarnya bekerja tetapi tidak memiliki produktivitas kerja. Misalnya, sepuluh orang mengerjakan satu pekerjaan yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh lima orang saja. Hal ini berarti lima orang yang lainnya bisa dikelompokkan ke dalam pengangguran tidak kentara.

Pengangguran merupakan masalah yang rumit dipecahkan terutama oleh negara yang berkembang seperti di Indonesia. Hal ini karena kesempatan kerja yang ada tidak mampu menampung laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Jika pengangguran tidak ditangani serius oleh semua pihak, maka akan berdampak cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dampak-dampak dari pengangguran antara lain, sebagai berikut.

- Terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

- Hilangnya mata pencaharian yang mengakibatkan keterampilan maupun kreativitas masyarakat menjadi berkurang karena tidak adanya tempat untuk menampungnya.
- Terjadinya ketidakstabilan sosial atau kerawanan sosial dengan munculnya segala tindakan kriminal.
- Beban psikologis seseorang.

  Dengan menganggur mereka merasa keberadaannya kurang dihargai. Maka bisa menimbulkan ketidakstabilan emosi orang tersebut.

Melihat keadaan tersebut di atas, maka pengangguran perlu diatasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus berperan secara aktif. Cara mengatasi pengangguran antara lain, antara lain sebagai berikut.

- Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya.
- Proyek transmigrasi untuk pemerataan tenaga kerja.
- Peninjauan kembali aturan-aturan yang ada atau dikenal dengan istilah *deregulasi* dan *debirokratisasi* yang bisa menarik investor asing dan bisa meningkatkan ekspor barang.
- Meningkatkan sektor informal dari perekonomian masyarakat.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan.

Sumber: Kompas 26 juli 2007

Gambar 7.1.2
Jumlah tenaga kerja yang ada dan yang diminta tidak seimbang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat.

7.1.4 Cara-cara Memperluas Kesempatan Kerja

Di atas sudah disebutkan bahwa pengangguran merupakan masalah yang harus segera diatasi. Apabila tidak dapat segera diatasi, akan dapat menganggu perekonomian nasional. Akan tetapi masalah yang pokok adalah bagaimana angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan?

Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam usaha produksi yang ada;
- kurangnya tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Dengan kata lain, masalah yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut umumnya terjadi karena penawaran tenaga kerja umumnya lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, terjadilah pengangguran karena tidak semua tenaga kerja dapat diserap ke dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Untuk mencapai keadaan yang seimbang antara kebutuhan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, harus disediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menampung angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

Adapun cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja antara lain sebagai berikut.

1. ***Meningkatkan usaha-usaha yang dapat mendorong tingkat produksi dan menjamin kestabilan harga.***

   Misalnya, dengan kebijakan seperti memberikan kredit dengan bunga ringan bagi para pengusaha kecil. Contoh lain yaitu memilih teknologi padat karya lebih banyak ketimbang teknologi padat modal agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu meningkatkan mutu pendidikan bagi para tenaga kerja atau calon tenaga kerja dan lain-lain.

2. ***Meningkatkan usaha-usaha yang bersifat sektoral dan regional.***

   Misalnya usaha pertanian baik yang berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian; usaha membangun industri khususnya industri kecil, menengah, dan kerajinan rakyat; serta pendirian pusat-pusat pelatihan keterampilan bagi pekerja kecil dan sektor informal di seluruh pelosok tanah air.

3. ***Meningkatkan usaha-usaha yang bersifat khusus.***

   Misalnya memberikan bantuan pembangunan untuk proyek-proyek pekerjaan umum seperti pembuatan bendungan, saluran air minum, jalan raya, proyek reboisasi, dan sebagainya.

4. ***Peningkatan kualitas tenaga kerja.***

   Melalui globalisasi perekonomian dan perdagangan bebas dunia, maka setiap negara berusaha berbenah diri agar mampu bersaing dengan negara lain. Akibatnya barang dan jasa

yang mampu masuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri yakni barang dan jasa yang berkualitas. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, tenaga kerja dituntut untuk lebih produktif. Jika suatu negara belum mampu menyediakan tenaga-tenaga yang handal, maka seharusnya melakukan usaha peningkatan mutu tenaga kerja. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain sebagai berikut.

- Peningkatan gizi makanan dan kesehatan.
- Meningkatkan pendidikan. Pendidikan di Indonesia bisa ditempuh dengan dua jalur (sistem ganda) yaitu:
  1) jalur pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi;
  2) jalur pendidikan informal melalui pelatihan-pelatihan maupun kursus-kursus atau dapat juga dilakukan melalui balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh Depnaker.
- Kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Cara ini dikenal dengan istilah pendidikan sistem ganda, maka siswa diberi kesempatan magang kerja (latihan kerja) di lapangan yang riil yaitu perusahaan-perusahaan yang nantinya di harapkan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai.
- Peningkatan kualitas mental dan spiritual Peningkatan beribadah pada agama yang dianut dan budi pekerti yang luhur akan sangat memengaruhi peningkatan mutu tenaga kerja. Karena dengan beribadah pada agama yang dianut maupun bersikap baik dengan sesama akan menciptakan: menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai waktu, disiplin, dan bertanggung jawab.

Sumber: Kompas 08 April 2008

Gambar 7.1.3
Pelatihan menjahit di Balai Pelatihan Kerja Ungaran, Jawa Tengah. Diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja terampil.

5. Sistem upah tenaga kerja

Menurut **David Ricardo** upah adalah harga tenaga kerja, namun banyak yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Hal ini karena upah yang diterima oleh tenaga kerja mempunyai unsur ekonomi dan kemanusiaan yaitu kecuali besarnya nilai nominal, tenaga kerja juga membutuhkan penghargaan, penghormatan, maupun pengakuan akan keberadaannya (eksistensi).

Dengan demikian upah bukan hanya sekadar harga tenaga kerja tetapi juga menyangkut penghargaan kepada pekerja sebagai manusia. Oleh karena itu di dalam pemberian upah hendaknya perusahaan atau pihak yang mempekerjakan tenaga kerja memperhatikan syarat berikut.

- Pekerja tahu dan setuju cara perhitungannya.
- Dalam pembayarannya selalu tepat waktu.
- Mencerminkan keadilan dan kewajaran pada setiap pekerja.
- Jumlahnya bisa mencukupi kebutuhan hidup minimum dengan keluarganya.

Ada tiga sistem pembayaran upah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah satuan, dan sistem upah borongan.

- Sistem upah menurut waktu.

  Besar kecilnya upah yang diterima pekerja berdasarkan satuan waktu tertentu, banyak sedikitnya jam kerja, atau ada pula berdasarkan waktu harian.

  Dengan sistem ini pekerja tahu persis upah yang akan diterima. Akan tetapi upah ini ada kelemahannya yaitu tidak berdasarkan prestasi kerja sehingga pekerja tidak memiliki rangsangan untuk berprestasi.
- Sistem upah satuan.

  Besarnya upah ditentukan oleh prestasi kerja dan biasanya sistem ini digunakan jika hasil produksinya bisa diukur atau dihitung.

  Karena upah ditentukan oleh unit produksi yang dihasilkan, maka pekerja akan giat supaya mendapatkan upah yang besar. Oleh karena itu pimpinan harus memperhatikan cara mereka bekerja supaya kualitas tetap terjaga.
- Sistem upah borongan.
  Upah ini ditentukan oleh penyelesaian satu unit pekerjaan. Misalnya, upah penyelesaian pembangunan rumah. Biasanya pekerjaan ini diselesaikan oleh sekelompok orang sehingga prestasi perorangan sulit diukur.

RANGKUMAN

1. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan jumlah penduduk yang dapat diserap dalam permintaan lapangan kerja.
2. Tenaga kerja adalah penduduk yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
3. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif.
4. Menurut sensus penduduk tahun 1971, yang dikelompokkan sebagai penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau yang bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan.
5. Semakin besar jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja secara keseluruhan semakin besar. Akibatnya, jumlah orang yang mencari pekerjaan juga semakin besar. Sebagai konsekuensinya, perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan yang baru.
6. Macam-macam pengangguran:
   a. pengangguran friksional
   b. pengangguran struktural
   c. pengangguran konjunktural (siklis)
   d. pengangguran musiman
7. Macam-macam istilah setengah pengangguran:
   a. setengah pengangguran kentara
   b. setengah pengangguran tidak kentara
8. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak lancar akan mengakibatkan jumlah orang yang tidak bekerja semakin banyak.
9. Cara untuk mengatasi pengangguran adalah dengan memperluas pembangunan ekonomi yang mampu menyerap kebutuhan tenaga kerja.
10. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK):

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Tenaga kerja}} \times 100\%$$

11. Angka ketergantungan:

$$\text{Angka ketergantungan} = \frac{\text{Bukan tenaga kerja}}{\text{Tenaga kerja}} \times 100\%$$

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan.
2. Setengah menganggur yang tidak kentara adalah mereka yang bekerja tapi tidak memiliki produktivitas kerja.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi dengan Jawaban yang tepat!

1. Kesempatan kerja adalah ... .
2. Yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja adalah ... .
3. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan ... .
4. Selama proses menunggu panggilan kerja untuk diseleksi sampai diterima, seorang pelamar dikelompokkan sebagai penganggur ... .
5. Pengangguran tidak kentara sering juga disebut ... .
6. Pengangguran stuktural adalah ... .
7. Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya TPAK adalah..., ..., dan....
8. Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah dengan menerapkan pendidikan sistem ganda. Yang dimaksud dengan pendidikan sistem ganda adalah ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Siapa yang digolongkan sebagai tenaga kerja?
2. Sebutkan dan jelaskan mereka yang dikelompokkan sebagai bukan tenaga kerja!
3. Jelaskan perbedaan antara pengangguran dan setengah pengangguran!
4. Sumber daya manusia atau tenaga kerja mengandung unsur kuantitas dan kualitas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja itu!
5. Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jelaskan!
6. Masalah besar yang dihadapi Indonesia dewasa ini adalah pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik usia muda dan se-

tengah pengangguran di kalangan tenaga kerja tidak terdidik terutama di desa-desa. Jelaskan mengapa terjadi demikian!

7. Bagaimanakah dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat?

IV. Studi Kasus

A. Baca dan perhatikan contoh kasus di bawah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!
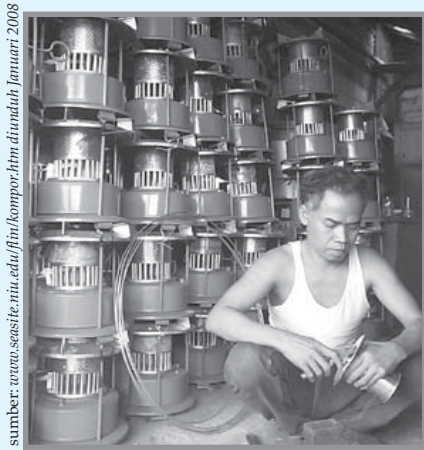
sumber: www.seasite.niu.edu/flin/kompor.htm diunduh Januari 2008

Akibat kebijakan pemerintah Jakarta untuk mengganti bahan bakar minyak tanah dengan gas, ratusan perajin kompor minyak tanah kehilangan pekerjaan.

1. Berdasarkan sebabnya, pengangguran apakah yang dialami para perajin kompor? Jelaskan!
2. Apakah menurutmu, pengaruh keadaan di atas terhadap:
   a. pertumbuhan ekonomi;
   b. kestabilan sosial;
   c. beban psikologis.

   Jelaskan!

B. Bacalah baik-baik artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

PERBEDAAN UPAH BURUH

Di pelosok Jawa Barat, buruh tani perempuan dibayar sepertiga lebih renah dibandingkan buruh tani laki-laki. Padahal beban kerja mereka sama.

Hal ini dikatakan Dewi Amalia, koordinator lapangan demonstrasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jawa Barat. FPR menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis, Maret 2008 lalu.

FPR Jabar menilai perlakuan ini bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 100, Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Malah, bentuk diskriminasi terdapat pada peraturan perundangan seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. FPR menuntut Pemerintah Provinsi Jabar mengusulkan perubahan peraturan perundangan kepada pemerintah pusat agar lebih melindungi dan menyetarakan perempuan.

Jenis diskriminasi

Diskriminasi upah merupakan pembedaan upah buruh pada pekerjaan, kualifikasi, jam kerja, kinerja, serta kondisi lain yang semuanya sama. Jadi, pembedaan upah dilakukan semata-mata karena pertimbangan jenis kelamin.

Sementara itu, diskriminasi pekerjaan tidak mengenal pembedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan sama, tetapi membatasi akses perempuan pada pekerjaan tertentu. Lebih spesifik lagi, perempuan hanya diberi akses untuk pekerjaan "pinggiran" yang upahnya lebih rendah.

Sumber: *"Perempuan Masih didiskriminasi" Kompas: Sabtu, 08 Mar 2008* dan *"Diskriminasi upah Perempuan" Kompas: Sabtu, 19 Mei 2007.*

1. Ceritakan pendapatmu mengenai artikel di atas!
2. Jelaskan tentang sistem pengupahan di atas merujuk pada pendapat **David Ricardo**!
3. Apakah menurutmu pengaruh keadaan di atas terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan?
4. Apakah keadaan di atas mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia?

V. Tugas Akhir

1. Pada sub bab ini kalian sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk pengangguran. Coba kalian perhatikan orang-orang di sekitar kalian.
   a. Adakah diantara mereka yang termasuk sebagai pengangguran? Kelompokan berdasarkan bentuknya!
   b. Apa faktor yang menyebabkan mereka menganggur?
   c. Apa saranmu untuk mengatasi masalah tersebut!
2. Coba kamu cari informasi tentang tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi tempat kamu tinggal!

7.2 Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku-pelaku Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi peristiwa-peristiwa ekonomi yang terus berkembang selaras dengan pola pikir dan peradaban manusia yang semakin meningkat, tuntutan manusia pun terus berkembang dan semakin kompleks. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan saja, tetapi juga kebutuhan lain yang telah disesuaikan dengan perkembangan peradabannya. Keadaan tersebut akan memengaruhi hubungan antarmanusia.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa jalannya kehidupan perekonomian perlu diatur agar tercipta kehidupan ekonomi yang selaras dan serasi. Dalam mengatur kehidupan ekonomi, bidang-bidang lain di luar ekonomi akan ikut terlibat. Atau dengan kata lain, bidang ekonomi memengaruhi bidang-bidang lain.

Yang bertanggung jawab mengatur kehidupan ekonomi adalah pemerintah dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem ekonomi bisa disebut sebagai tata cara pemerintah untuk menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi mencakup subsistem yang berupa lembaga ekonomi, sosial budaya, politik, dan ide yang saling memengaruhi. Jadi, pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang ekonomi perlu menyusun organisasi perekonomian atau sistem ekonomi. Penyusunan sistem ekonomi didasarkan pada sistem pemerintahan yang dianut dan ideologi yang mendasari suatu negara. Sistem ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu akan kita pelajari pada subbab ini. Akan tetapi sebelumnya diskusikan dulu pertanyaan-pertanyaan berikut dengan temanmu.

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu? Apa sajakah sistem ekonomi yang ada di dunia ini? Apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap sistem ekonomi tersebut?
2. Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia?
3. Siapa sajakah pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia?
4. Bagaimana peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia?

Presentasikan hasil diskusime di depan kelas.

7.2.1. Sistem ekonomi *(economic system)*

Upaya setiap masyarakat untuk mengatasi masalah ekonomi dan memenuhi kebutuhannya dapat kita lihat dari cara mengorganisasi kegiatan ekonominya. **Sistem ekonomi** adalah keseluruhan unsur-unsur kegiatan ekonomi yang membentuk jaringan-jaringan atau lembaga-lembagayang sangat erat hubungannya satu sama lain sebagai alat, cara atau jalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.

Dengan kata lain, sistem ekonomi mengatur kehidupan ekonomi suatu negara. Kehidupan ekonomi itu menyangkut penentuan macam dan jumlah produksi tiap tahun, cara mendistribusikan pendapatan nasional pada rakyat, dan cara pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Tak luput pula, perihal pembagian tanggung jawab, pembagian kerja dan kerja sama antara pemerintah dan rakyat (swasta) serta cara dan luasnya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi.

Di dunia dewasa ini terdapat berbagai macam tata atau sistem ekonomi. Setiap negara mempunyai sistem sendiri-sendiri untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakatnya. Sistem ekonomi di Inggris berbeda dengan yang dipakai di Rusia ataupun Jepang. Sistem ekonomi di Indonesia berbeda pula dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Mengapa? Sebab sistem ekonomi suatu negara merupakan hasil dari perkembangan sejarah dan ideologi yang dianut oleh negara itu sendiri.

Walaupun sistem ekonomi yang dianut suatu negara berbeda dengan sistem ekonomi negara lain, namun pada dasarnya tujuannya sama. Beberapa tujuan sistem ekonomi adalah sebagai berikut.

- Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- Mengembangkan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat.
- Menciptakan koordinasi yang efektif dan efisien terhadap produksi, konsumsi, dan investasi.
- Menciptakan kesamaan hak dan pembagian pendapatan yang merata.
- Mengupayakan adanya keseimbangan yang wajar antara barang atau jasa yang dihasilkan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan perorangan.
- Mengupayakan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap sejumlah nilai yang melekat pada diri manusia, yaitu hak-hak asasi, kebebasan, solidaritas, hak milik, dan lain-lain.

Pada dasarnya kita dapat mengelompokkan sistem-sistem ekonomi itu menjadi empat saja, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar (liberal), sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran.

A. Sistem ekonomi pasar (liberal/ kapitalisme)

Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh interaksi di antara pembeli dan penjual di pasar. Dengan demikian, sistem ekonomi pasar memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkannya.

Dalam sistem ekonomi pasar, produksi dan harga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran pasar, bebas tanpa campur tangan pemerintah. Dalam teori klasik **Adam Smith**, dikatakan bahwa perekonomian diatur oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan atau tersembunyi *(The invisible hands).*

Ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut.

- Setiap orang bebas memiliki alat produksi atau modal.
- Kegiatan ekonomi di seluruh sektor dilakukan oleh masyarakat (swasta).
- Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung di seluruh kegiatan ekonomi, kecuali urusan antarnegara (ekspor impor).
- Modal memegang peranan penting di segala bidang ekonomi.
- Setiap orang diberi kebebasan untuk menggunakan barang dan jasa.
- Kegiatan ekonomi ditujukan untuk mendapatkan laba.
- Terdapat persaingan bebas antarpengusaha.
- Pertanggungjawaban perekonomian dilakukan secara perseorangan.
- Kehidupan ekonomi diatur dengan sistem harga.

Akibat dari pemakaian sistem ini, dari satu sisi perekonomian masyarakat tampak berkembang pesat. Golongan menengah ke atas memperoleh keuntungan ekonomi sangat besar. Namun, sebaliknya, golongan ekonomi lemah terutama kaum buruh kebanyakan hidup sengsara.

Dengan demikian sistem ekonomi pasar memiliki sisi baik dan buruk, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Kebaikan sistem ekonomi pasar:

- masyarakat bebas mengembangkan kreativitas sehingga penghasilan mereka meningkat pesat;
- masyarakat bebas memilih pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai dan cocok dengan kemampuan dan kepandaian yang dimiliki, sehingga kemungkinan untuk berhasil lebih besar;
- masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh penghasilan;
- kemajuan ekonomi negara berkembang pesat.

Keburukan sistem ekonomi pasar antara lain:

- karena masyarakat bebas bersaing, maka segala cara untuk memperoleh penghasilan dihalalkan termasuk merugikan orang lain;
- masyarakat yang mempunyai modal besar dengan mudah mengalahkan masyarakat yang mempunyai modal kecil;
- pemerataan pendapatan bagi masyarakat sulit dicapai;
- kepentingan perorangan lebih diutamakan.

B. Sistem ekonomi terpusat (komando)

Sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi perencanaan terpusat atau disebut juga sistem ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah mengambil semua kegiatan ekonomi mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sistem ekonomi komando didasarkan pada ajaran Karl Marx (1818-1883) dalam bukunya *Das Kapital* (1867) dan *Manifesto Komunis* (1848). Menurut ajaran ini sistem ekonomi yang direncanakan secara terpusat oleh pemerintah akan mampu menjalankan fungsi-fungsi produksi dengan lebih efisien dibandingkan yang dilakukan di negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi komando alat-alat produksi seluruhnya dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Kegiatan produksi di badan perencana ekonomi yang memberi tugas pada unit-unit produksi untuk mencapai sasaran produksi tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Misalnya untuk lima tahun.

Adapun ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sebagai berikut.

- Semua sumber ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat.
- Semua kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama dan semua perusahaan adalah perusahaan negara.
- Harga-harga ditetapkan oleh pemerintah dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
- Apa dan berapa jumlah yang diproduksi ditentukan oleh pemerintah pusat dan diusahakan oleh negara.

- Rakyat adalah karyawan dan diberi imbalan sesuai dengan kebutuhannya

Negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando, yaitu terutama negara-negara komunis. Kebaikan sistem ekonomi komando/terpusat antara lain sebagai berikut.

- Pemerataan pendapatan lebih mudah dicapai, penghasilan diperoleh sesuai kebutuhan, dan kesenjangan sosial bisa dihindari.
- Masyarakat yang mempunyai modal tidak boleh seenaknya memonopoli suatu bidang usaha, karena sudah ditentukan oleh negara.
- Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh penghasilan.

Keburukan sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut.

- Kebebasan perorangan tidak diakui.
- Masyarakat tidak berinisiatif dan hanya menunggu komando dari pusat.
- Kemungkinan pejabat negara melakukan korupsi sangat besar karena kekuasaan yang diberikan negara melalui jabatannya.
- Kreativitas masyarakat dalam pekerjaannya terhambat.
- Semangat bekerja masyarakat lemah.

C. Sistem ekonomi campuran

Dalam realitasnya, tidak ada sistem ekonomi murni yang digunakan oleh pelaku ekonomi apakah itu sistem ekonomi tradisional murni, sistem ekonomi pasar (liberal) murni atau sistem ekonomi terpimpin murni. Kebanyakan masyarakat atau negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran banyak digunakan oleh negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Dalam sistem ini antara sektor pemerintah dan swasta sama-sama dominan dan diakui. Maka bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar (liberal) dan sistem ekonomi terpusat.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut.

- Pemerintah bertanggung jawab atas kepentingan umum.
- Pemerintah bertugas mengatur, mengawasi, menjaga, dan memajukan perekonomian negara.
- Pemerintah mendorong prakarsa pihak swasta.
- Masyarakat mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sejauh tidak merugikan kepentingan umum.
- Produsen bersaing meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Dalam sistem ekonomi ini, untuk memecahkan masalah dasar ekonomi (barang apa yang akan dihasilkan, dan sebagainya) ditangani bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Mekanisme pasar tetap memegang peranan penting dalam menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Masyarakat bebas memutuskan barang apa yang akan diproduksi dan bagaimana cara yang paling efisien untuk memproduksinya.

Dengan demikian peranan pemerintah menurut sistem ekonomi ini tetap diutamakan. Tujuannya adalah agar kepentingan umum dapat lebih diprioritaskan dalam setiap perkembangan ekonomi. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam tiga bentuk seperti berikut.

- Menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar dijalankan dalam norma-norma yang wajar.
- Secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, di Indonesia kegiatan ekonomi pemerintah ini cukup luas, terbukti dari adanya perusahaan-perusahaan negara.
- Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter, seperti memungut pajak dan iuran-iuran wajib, menentukan kebijakan perbankan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar perekonomian dapat berkembang pesat tanpa diganggu oleh masalah inflasi.

Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi bertujuan antara lain sebagai berikut.

- Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu dapat terwujud dan penindasan dapat dihindarkan.
- Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
- Menyediakan fasilitas (barang dan jasa bersama) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan yang dapat memengaruhi pasar, agar perusahaan tersebut tidak menjalankan praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
- Mengawasi akibat samping (eksternalitas) kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat, agar dapat dihindari atau dikurangi sehingga menjadi seminimal mungkin.

7.2.2 Sistem Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara yang merdeka, yang tidak terikat oleh negara lain mana pun. Dalam mengatur perekonomiannya Indonesia memiliki

cara tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain mana pun. Sistem kehidupan ekonomi Indonesia ditentukan dalam UUD 1945 dan GBHN. Sistem ekonomi Indonesia yang paling tepat adalah demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 yang bunyinya sebagai berikut.

- **Ayat 1:** *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

  Kemakmuran masyarakat merupakan tujuan utama, bukan kemakmuran golongan atau perorangan. Maka koperasi dibentuk, karena usaha koperasi dianggap paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- **Ayat 2:** *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

  Pemerintah ikut campur tangan dalam mencapai dan mewujudkan kemakmuran masyarakat, dengan cara menghindari monopoli ekonomi. Oleh karena itu pemerintah menguasai cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- **Ayat 3:** *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

  Sumber-sumber utama kemakmuran masyarakat adalah bumi, air, dan kekayaan alam. Ketiganya dikuasai dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem demokrasi ekonomi menuntut masyarakat berperan aktif dalam setiap pembangunan ekonomi. Untuk itu badan-badan usaha milik swasta harus dimungkinkan untuk berkembang. Pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan kepada badan usaha itu agar tercipta iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besar sistem demokrasi ekonomi yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945 memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
- Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar pemeliharaannya menjadi tanggung jawab negara.

Dalam sistem demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut.

- *E*ksploitasi bangsa Indonesia oleh bangsa lain.
- Dominasi ekonomi oleh negara yang mematikan potensi dan daya kreasi sektor-sektor ekonomi di luar sektor negara (*Etatisme*).
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok *(monopoli)*.

Usaha-usaha pemerintah dalam rangka demokrasi ekonomi mempunyai tujuan sebagai berikut.

- Mencapai kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.
- Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
- Menciptakan stabilitas perekonomian.

7.2.3 Pelaku Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Pada bab empat, kita sudah mempelajari mengenai keempat pelaku ekonomi, yakni rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Bagaimanakah kiprah keempat pelaku ekonomi itu di Indonesia? Keempatnya bekerjasama dan saling melengkai sehingga tercipta kegiatan terus menerus.

A. Pemerintah

Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memegang peranan yang besar dalam kegiatan ekonomi. Peranan tersebut adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.

a Pemerintah Sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi mengandung pengertian pemerintah adalah lembaga nonswasta yang terlibat langsung dalam percaturan ekonomi negara. Keterlibatan pemerintah tampak pada aktivitas **produksi, distribusi,** dan **konsumsi**.

1. *Kegiatan pemerintah dalam bidang produksi*

Untuk melakukan kegiatan produksi pemerintah mendirikan perusahaan negara yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut.

- Sebagian atau seluruh kepemilikan dimiliki negara.
- Berbadan hukum dan tunduk pada segala hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bertujuan membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.
- Dikoordinasikan pengelolaannya oleh seorang menteri negara BUMN.

Tujuan didirikannya BUMN adalah sebagai berikut.

- Melayani kebutuhan pokok masyarakat umum seperti listrik, air minum, pos dan telekomunikasi, dan lain-lain.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Membuka lapangan kerja.
- Mengisi kas negara.

Contoh BUMN adalah PT Pertamina, PT Perhutani, PN Balai Pustaka, PD Pasar Jaya, BRI, PLN, PT Telkom, PAM, PT KAI, PT Pos Indonesia, dan lain-lain.

sumber:kompas 23 nov 07

Gambar 7.2.1
Sarana transportasi kereta api yang dikelola oleh salah satu BUMN yaitu PT KAI.

2. *Kegiatan pemerintah dalam bidang konsumsi*

Untuk dapat menjalankan kegiatannya, pemerintah harus mengkonsumsi barang dan jasa. Besarnya konsumsi pemerintah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber penerimaan pemerintah. Namun tidak jarang besarnya anggaran konsumsi lebih besar daripada sumber penerimaannya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dialami negara seperti adanya bencana alam, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, dan sebagainya.

Secara umum tujuan konsumsi yang dilakukan negara adalah sebagai beirkut.

- Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sehari-hari.
- Untuk memelihara harta kekayaan negara seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, perabot, dan lain-lain.
- Untuk membiayai kegiatan perjalanan aparatur pemerintah.
- Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan misalnya pendidikan, seminar, rapat dan pertemuan-pertemuan lain
- Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain.

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tujuan konsumsi yang kurang lebih sama.

3 *Kegiatan pemerintah dalam bidang distribusi*

Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi yang paling penting adalah untuk mengatur kegiatan perekonomian dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat umum.

Dalam kegiatan distribusi, pemerintah harus bersikap netral. Artinya, pemerintah tidak boleh hanya menjaga kepentingan produsen atau konsumen, tetapi yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat umum.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dari kegiatan distribusinya adalah sebagai berikut.

- Mencapai pemerataan penyebaran barang/jasa ke seluruh wilayah Indonesia.
- Menjaga persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.
- Menjaga stabilitas harga.
- Mencegah adanya spekulasi penumpukan barang oleh pihak swasta.

Salah satu contoh kegiatan pemerintah di bidang distribusi adalah dengan mendirikan Bulog (Badan Urusan Logistik).

b. Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi adalah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan. Berbagai macam kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan perekonomian antara lain, sebagai berikut.

Sumber : Maj. Tempo, Feb 2008

Gambar 7.2.2
Inspeksi sembako yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pasar tradisional di Tangerang, Banten.

1. ***Kebijakan produksi***

   Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri, baik kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya, kebijakan proteksionisme, yaitu memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan pelarangan impor barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Contoh lainnya adalah pemberian subsidi untuk industri-industri tertentu.

2. ***Kebijakan fiskal***

   Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan pajak.

3 ***Kebijakan moneter***

   Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah dengan cara mengatur peredaran mata uang. Contoh kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.
   - *Kebijakan uang ketat (tight money policy)* yang bertujuan menurunkan tingkat inflasi.
   - *Kebijakan devaluasi,* yaitu menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing. Hal ini bertujuan untuk mendorong ekspor.
   - *Kebijakan revaluasi,* yaitu menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing.

Sumber: Kompas Sumbagsel 1 April 2008

Gambar 7.2.3
Para buruh tengah membongkar pupuk impor dari Cina. Pengimporan barang harus diatur agar tidak berdampak negatif pada perekonomian dalam negeri.

4. ***Kebijakan ekspor***

   Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor barang/jasa dengan menurunkan atau menghapuskan pajak ekspor.

5. ***Kebijakan impor***

   Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi impor barang atau larangan terhadap impor suatu barang/jasa.

B. Koperasi

Koperasi merupakan wujud nyata pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."* Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.

Koperasi merupakan alat ekonomi yang dapat menolak individualisme, liberalisme/kapitalisme, dan menangkis ekonomi komunis. Koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang sesuai dengan konsep kesatuan, persatuan, gotong royong, dan kekeluargaan. Koperasi adalah pranata ekonomi Indonesia yang sangat profesional. Alasan-alasannya sebagai berikut.

- Koperasi merupakan kesatuan yang kuat, yang dilandasi semangat kekeluargaan, persamaan derajat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal itu tercermin dalam rapat anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
- Semua aktivitas koperasi didasarkan atas kesadaran sukarela.
- Koperasi bertujuan menyejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, sehingga kegiatannya tidak mencari untung semata-mata.

C. Masyarakat

Masyarakat dapat bertindak sebagai rumah tangga konsumsi, dan sebagai rumah tangga produksi. Masyarakat yang bertindak sebagai rumah tangga konsumsi menyediakan faktor-faktor produksi. Selain itu, di Indonesia, masyarakat mendukung kelancaran ekonomi dengan menyediakan faktor produksi modal, dan faktor produksi lahan/alam. Pendapatan yang mereka peroleh kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sebagai rumah tangga produksi, masyarakat yang memiliki badan usaha dinamakan sektor swasta. Kegiatan ekonomi di sektor swasta menyebar ke berbagai bidang usaha, mulai dari usaha kecil sampai dengan usaha perdagangan antarnegara (ekspor impor). Usaha-usaha yang dikelola

swasta hampir semuanya memiliki sifat *profit making*. Artinya, usaha swasta umumnya berorientasi men-cari laba. Oleh sebab itu, prinsip ekonomi sangat dipegang teguh dalam bertindak.

Sumber : *Kompas 7 April 2008*

Gambar 7.2.4
Pameran furnitur menampilkan berbagai karya pengusaha swasta.

Dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia saat ini, pihak swasta boleh memiliki modal hingga 49 % dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menunjukkan peranan swasta yang sangat penting dalam perekonomian negara kita.

Pihak swasta yang ingin mendirikan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut.

- Memiliki tempat kedudukan yang jelas.
- Usaha dijalankan secara terus-menerus.
- Usaha dijalankan secara legal.
- Bertujuan mendapatkan laba.
- Mendapat izin dari pemerintah.

Perusahaan yang dikelola swasta dapat berbentuk usaha perorangan atau usaha bersama. Usaha demikian ini pada umumnya bernilai positif karena menyerap tenaga kerja dan ikut ambil bagian dalam pembangunan nasional.

Pemerintah memberi keleluasaan kepada pihak swasta dalam kegiatan ekonomi sejauh tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, Pancasila, dan UUD 1945. Kebijakan untuk menyertakan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi ini ditempuh pemerintah karena alasan-alasan berikut.

- Pemerintah belum mampu menggali semua potensi sumber-sumber daya alam.
- Pemerintah ingin menggali dan mengembangkan daya kreasi dan partisipasi pihak swasta untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

D. Masyarakat Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara, Indonesia melakukan hubungan ekonomi dengan berbagai negara dan pihak swasta di dunia.

Hal ini dilakukan karena kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki negara lain, dan sebaliknya kita kekurangan hal-hal yang dimiliki negara lain. Misalnya tenaga kerja. Indonesia yang memiliki tenaga kerja berlebih mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.

Contoh lain adalah kegiatan ekspor impor yang dilakukan berbagai badan antarnegara. Indonesia misalnya mengekspor mebel ke luar negeri, dan mengimpor kedelai dari Amerika Serikat.
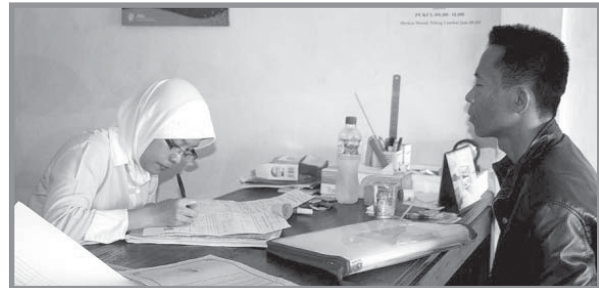
Sumber : *Kompas Jateng 8 April 2008*

Gambar 7.2.5
Seorang pemuda dari Brebes tengah mendaftar untuk diberangkatkan menjadi TKI.

7.2.4 Sektor Usaha Informal

Kegiatan ekonomi dewasa ini berkembang dengan sangat pesat. Usaha yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak hanya berskala besar tetapi juga berskala kecil. Yang tidak kalah penting adalah usaha-usaha yang kelihatan *sepele* tetapi perlu penanganan secara khusus. Misalnya, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Mereka semua termasuk tenaga kerja yang bekerja di sektor informal.

Ciri-ciri perekonomian di sektor informal adalah:

1. Lapangan usaha dan hasil produksinya kecil, sehingga belum membutuhkan modal yang besar.
2. Administrasinya sederhana. Pengolahan sektor informal pada umumnya belum melibatkan laporan-laporan keuangan dan catatan transaksi yang sistematis. Kegiatan ini umumnya masih melibatkan sistem pembukuan sederhana.
3. Peralatan yang digunakan masih sederhana.
4. Kebanyakan usaha informal tidak memiliki izin usaha resmi. Karena kegiatan usahanya sering kali tidak pasti, belum ada undang-undang yang mengatur tentang keberadaan sektor informal, khususnya menyangkut soal izin usahanya.
5. Tidak membayar pajak pada pemerintah, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang keberadaan sektor informal.
6. Barang dan jasa yang dihasilkan biasanya berharga cukup murah, sehingga terjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Sumber : Harian Kompas 3 April 2008

Gambar 7.2.6
Pedagang minyak yang mencoba bertahan di ibukota dengan menjadi penjaja gas elpiji keliling.

- *Pedagang keliling,* yaitu orang yang menawarkan barang dagangannya dengan berjalan kaki atau naik kendaraan berkeliling keluar masuk kampung atau kompleks perumahan.
- *Pedagang kaki lima,* yaitu orang yang menawarkan barang dagangannya kepada para konsumen dengan cara meletakkan atau menggelar barang dagangannya di tepi jalan raya (trotoar).
- *Pedagang asongan,* yaitu orang yang menawarkan barang dagangannya ke sana ke mari kepada konsumen, umumnya di perempatan jalan, stasiun, terminal, dan sebagainya.
- *Tukang mendring/kredit keliling,* yaitu orang yang menjual barang dagangannya dengan cara kredit kepada para konsumen yang tinggal di kampung-kampung dan kompleks perumahan.

Para pedagang tersebut sering disebut pedagang sektor informal karena usaha mereka pada umumnya tidak terdaftar secara formal, bersifat musiman, dan berpindah-pindah. Usaha demikian ini biasanya diciptakan dan dikelola oleh mereka yang termasuk golongan ekonomi lemah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh sebab itu, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur dan menertibkan keberadaan sektor informal ini, selain juga harus membimbing, membina, dan meningkatkan usaha mereka.

Dalam masyarakat negara berkembang, keberadaan usaha di sektor informal sangat diperlukan sebagai sarana menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat di tingkat menengah ke bawah. Akan tetapi bila kurang ditertibkan, usaha demikian ini bisa menimbulkan masalah nasional. Misalnya, kemacetan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan lain-lain.

RANGKUMAN

1. Macam-macam sistem ekonomi:
   a. sistem ekonomi tradisional;
   b. sistem ekonomi pasar bebas (liberal);
   c. sistem ekonomi komando;
   d. sistem ekonomi campuran.
2. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi yang berdasarkan UUD 1945 dan GBHN.
3. Ada tiga pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia yaitu pemerintah, koperasi, dan swasta.
4. Dalam sistem ekonomi Indonesia pemerintah bertindak sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi.
5. Sebagai pelaku ekonomi pemerintah terlibat dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah bertindak melalui kebijakan-kebijakannya.
6. Masyarakat Indonesia dan Masyarakat internasional juga meramaikan kehidupan perekonomian Indonesia. Sebagian bertindak sebagai rumah tangga produksi (RTP), sementara sebagian lain sebagai rumah tangga konsumsi (RTK).
7. Pelaku ekonomi yang lain adalah sektor usaha informal yang dikelola oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, dan bersifat musiman, serta berpindah-pindah.
8. Sektor usaha informal tersebut terdiri dari pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan tukang kredit keliling.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Penurunan permintaan masyarakat untuk membenarkan sol sepatu membuat belasan tukang sepatu sol keliling menganggur. Hal ini disebut pengangguran konjunktural.
2. Menganggur dapat membuat emosi orang tidak stabil.
3. Di negara kita propinsi yang tingkat pengangguranya tertinggi adalah Jawa Barat.
4. Tenaga kerja di Indonesia sebagian besar bekerja di sektor informal.

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi jawaban di bawah ini!

1. Pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia berpedoman pada ... .
2. Sistem ekonomi yang cocok di Indonesia adalah sistem ... .
3. Realisasi pemerintah atas pasal 33 UUD 1945 ayat 2 adalah ... .
4. Realisasi pemerintah atas pasal 33 UUD 1945 ayat 1 adalah ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Mengapa Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi?
2. Sebutkan ciri-ciri badan usaha milik negara!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peran masyarakat Indonesia sebagai RTK!
4. Sebutkan ciri-ciri sistem ekonomi komando!
5. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (UUD 1945 pasal 33 ayat 2). Jelaskan pernyataan tersebut!
6. Mengapa pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi?

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini!

PENGGUSURAN PANCING PENGANGGURAN

Setelah Pasar Bunga Barito di Jakarta Selatan digusur, giliran pasar keramik dan kerajinan rotan di Jalan Ahmad Yani, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, akan dibersihkan.

Selain pasar keramik, pasar buku di Kwitang juga akan ditertibkan. "Kami diberi waktu 3 x 24 jam untuk pindah atau nanti dibongkar paksa," kata Marsudi (42), salah satu pedagang di Rawasari, Senin (21/1).

Di Pasar Rawasari terdapat lebih kurang 130 kios, terdiri atas 80 kios keramik dan 50 kios kerajinan rotan. Menurut pemilik kios lainnya, Harun (34), para pedagang selama ini berusaha tak membuat lingkungan di kawasan tersebut terlihat kumuh. Mereka, bahkan, telah memundurkan letak kios-nya menjauh dari jalan sesuai perintah pemerintah. Iuran kebersihan dan keamanan juga rutin dibayar oleh para pedagang. "Kami bingung, kenapa tetap harus digusur," kata Harun yang mewarisi kios dari orang tuanya lebih dari lima tahun lalu.

"Mereka menggunakan ruang terbuka hijau untuk usaha. Itu melanggar aturan. Penertiban harus dilakukan," kata Camat Cempaka Putih Syamsudin. Kios para pedagang bukan satu-satunya sasaran. Akan tetapi, rumah-rumah liar di belakang pasar keramik juga akan ditertibkan.

Kegelisahan pedagang Pasar Keramik Rawasari turut dirasakan oleh pedagang di Pasar Buku Kwitang yang berada di antara sudut Jalan Senen Raya dan Jalan Kwitang. Sedikitnya 50 pedagang buku yang telah membuka usaha sejak bertahun-tahun silam dalam waktu dekat akan digusur.

Barito

Sementara itu ribuan orang kehilangan mata pencaharian semenjak pasar bunga Barito yang digusur awal tahun 2008. Usaha bunga rangkai dan ikan hias merupakan jenis usaha yang melibatkan beragam jenis bahan baku pendukung.

Setiap jenisnya melibatkan pemasok tersendiri yang didominasi usaha kecil tradisional atau rumahan. Tenaga kerja yang terserap sejak hilir (penanam bunga, peternak ikan, buruh perangkai dan lain sebagainya) hingga hulu (penjual, kuli, kurir dsb.) diperkirakan berjumlah 1.200 orang.

Dicuplik dari: *"Pasar Rawasari akan Digusur" dan "Ratusan Pelaku Usaha di Hilir Menderita karena Kehilangan Sumber Nafkah" Kompas,* 22 Januari 2008.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan atrikel di atas!

1. Apakah kamu setuju dengan tindakan pemerintah pada artikel di atas? Jelaskan!
2. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi pemerintah Jakarta?
3. Sebutkan pelaku-pelaku ekonomi yang terdapat pada artikel di atas!
4. Jelaskan fungsi pelaku-pelaku ekonomi tersebut!
5. Sebutkan rantai perekonomian yang terdapat di Pasar Keramik!
6. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari peristiwa penggusuran di atas!
7. Apakah menurutmu yang akan terjadi pada tenaga kerja yang kehilangan mata pencahariannya di atas?
8. Apakah menurutmu pengaruh kejadian di atas terhadap angkatan kerja di wilayah tersebut?
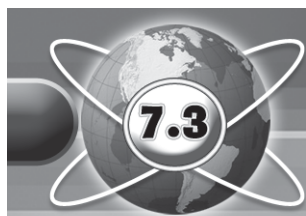
7.3 Pajak dalam Perekonomian Nasional

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan

JAKARTA, SABTU-Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh, yang terdiri atas wakil dari sepuluh fraksi di DPR dan pemerintah, akhirnya menyepakati peningkatan Panghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,84 juta per tahun.

Ini ditetapkan karena DPR dan pemerintah ingin memberikan insentif yang maksimal pada wajib pajak berpenghasilan rendah agar mampu mengembangkan usahanya. Anggota Panitia Kerja RUU PPh Dradjad H Wibowo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (12/7).

PTKP merupakan batas penghasilan yang diperbolehkan untuk dibebani PPh oleh pemerintah. Jadi dengan keputusan baru ini , semua orang yang memiliki penghasilan maksimal sebesar Rp 15,84 juta per tahun tidak akan ditagih PPh. Namun, jika wajib pajak memperoleh penghasilan Rp 20 juta per tahun, maka petugas pajak akan mengenakan PPh atas selisihnya, yakni Rp 4,16 juta (Rp 20 juta-Rp 15,84 juta).

Dalam kesepakatan Panitia Kerja RUU PPh itu ditetapkan juga peningkatan PTKP tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin dari Rp 1,2 juta per tahun menjadi Rp 1,32 juta per tahun. PTKP tambahan itu adalah PTKP yang diperhitungkan untuk istri dan anak (maksimal yang ditanggung tiga orang), yakni masing-masing menjadi Rp 1,32 juta per tahun.

"Jika yang bekerja dan mendapatkan penghasilannya adalah istri, maka PTKP (utamanya) diperhitungkan untuk istri, dan PTKP tambahannya diperhitungkan untuk suami," ujar Dradjad.

Dengan adanya aturan baru tersebut, maka aturan tentang PTKP lama, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 tahun 2005 dinyatakan tidak akan berlaku lagi. Ketentuan ini akan berlaku setelah RUU PPh disahkan sebagai UU. (OIN)

Sumber: Kompas.com Sabtu 12 Juli 2008

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan artikel di atas!

1. Mengapa pemerintah menaikan batas penghasilan tidak kena pajak?
2. Berapa batas penghasilan tidak kena pajak sebelumnya?
3. Apakah kebijakan pemerintah tersebut akan menguntungkan atau merugikan konsumen?

Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas!

7.3.1 Pajak dan Pungutan Resmi Lainnya

Pada zaman dahulu, ketika negara umumnya masih berbentuk kerajaan, penduduk memberikan upeti kepada raja. Upeti itu biasanya berupa hasil pertanian, hasil kerajinan, dan hasil-hasil lainnya. Penduduk yang tidak mempunyai penghasilan, mempersembahkan upeti berbentuk tenaga kerja untuk kepentingan umum. Uang belum dikenal luas pada waktu itu.

Dengan demikian, upeti merupakan sumber pendapatan kerajaan. Upeti digunakan raja untuk membiayai kegiatan kerajaan dan pembangunan. Rakyat yang memberi upeti dapat menikmati pelayanan kerajaan seperti keamanan, penggunaaan fasilitas umum, dan sebagainya. Pelayanan dan hasil pembangunan seperti jalan raya, tempat hiburan, tempat pertemuan, dan lain-lain semuanya dibiayai dengan upeti.

Dengan demikian, *upeti* adalah pendapatan negara yang dikelola negara dan sebagian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan negara (kerajaan). Pengertian upeti demikian mirip dengan pengertian pajak yang kita kenal saat ini.

A. Pengertian pajak

Pajak mempunyai beberapa definisi atau arti sebagai berikut.

- Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro**

  Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat *(public savings)* yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi umum *(public investment)*. *Pajak* adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tanpa mendapat jasa timbal *(tegen prestatie)* yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

- Menurut **Dr. Soeparman Soemahamidjaja**

  Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- Menurut **Prof. S.I. Djajadiningrat**

  Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Akan tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan pihak swasta tidak berhak memungut pajak.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara. Jadi, kontra prestasi dari negara atas pembayaran pajak tetap ada namun sifatnya umum dan bukan secara individu.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus akan dipergunakan untuk investasi umum (*public investment*). Jadi, tujuan utama pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- Pemungutan pajak disebabkan oleh adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- Pajak dibuat berdasarkan undang-undang. Artinya, pemungutan dapat dipaksakan. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.

Dari definisi dan ciri-ciri pajak di atas dapat kita simpulkan bahwa *pajak* adalah pungutan wajib dari negara atau pemerintah kepada rakyatnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang atau norma-norma hukum yang berlaku tanpa balas jasa secara langsung kepada wajib pajak.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan pada pajak adalah sebagai berikut.

- *Subjek pajak,* yaitu orang dan atau badan yang wajib membayar pajak kepada negara atau disebut juga wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu.
- *Dasar pajak atau objek pajak,* yaitu hal yang dikenakan pajak, yaitu peristiwa, keadaan, dan perbuatan hasil tertentu. Misalnya, penghasilan.
- *Tarif pajak,* yaitu ketentuan besar pajak yang harus dibayar berdasarkan objek pajak.

Selain pajak, jenis pungutan lain adalah retribusi. *Retribusi* adalah iuran rakyat kepada pemerintah dengan mendapatkan jasa balik dari pemerintah yang secara langsung dapat difungsikan atau dirasakan. Misalnya retribusi parkir, retribusi pasar, uang sekolah, retribusi terminal bus umum, dan bea masuk halaman terminal (peron).

Retribusi tidak diatur dalam undang-undang. Dasar hukum retribusi adalah peraturan yang merupakan perwujudan dari kebijakan menteri, gubernur, bupati/walikota.

7.3.2 Fungsi Pajak

Menurut fungsinya pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu fungsi budgetair, fungsi pengaturan, dan fungsi sosial.

A. Fungsi budgeter

Dalam fungsi budgetair pajak merupakan alat untuk menghimpun uang ke kas negara. Tujuannya untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

B. Fungsi pengaturan (regulasi)

Dalam fungsi pengaturan (regulerend) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan perekonomian (kegiatan produksi, distribusi, perdagangan, ekspor/impor, perlindungan produk dalam negeri, harga, dan sebagainya). Misalnya:

- Pajak yang tinggi dikenakan pada produk minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk dalam negeri di pasaran dunia.

c. Fungsi sosial

Keadilan sosial dapat ditempuh dengan menetapkan kebijakan pajak yang berbeda antara yang kaya dan yang miskin. Misalnya, golongan yang berpenghasilan tinggi dibebani pajak penghasilan yang tinggi, sedangkan yang berpenghasilan rendah dibebani pajak yang ringan atau dibebaskan dari beban pajak.

7.3.3 Jenis Pajak

Ada bermacam-macam jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ditentukan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut adalah skema jenis pajak.

Bagan 7.3.1
Jenis-jenis Pajak
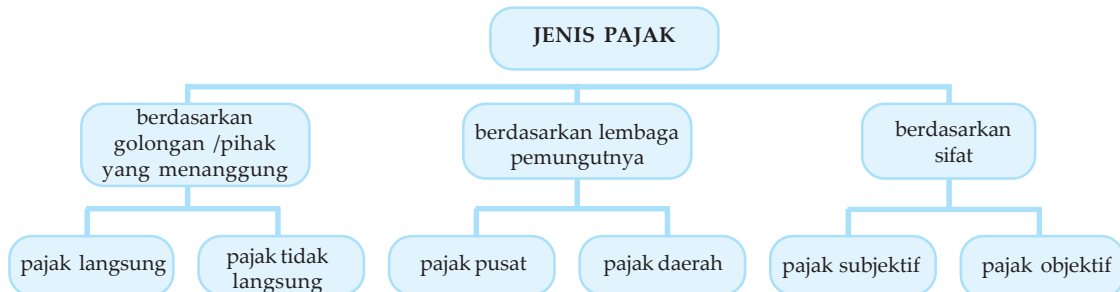
A. Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung,

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

sumber: *Kompas, 8 Maret 2008*

Gambar 7.3.1
Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Surat Pemberitahuan (SP) Pajak Penghasilan (PPh) OP di Pusat Ditjen Pajak.

b. Pajak tidak langsung,

Yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pajak yang dipungut dari pihak tertentu tetapi kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, cukai tembakau dibayar oleh pabrik rokok kepada pemerintah, tetapi beban pajaknya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Pajak tidak langsung antara lain, Pajak Penjualan, Bea Impor dan Cukai, Pajak Radio, Bea Balik Nama, Pajak Tontonan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif (bersifat perorangan)

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Pemungutan pajak ini dalam pelaksanaannya memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subjeknya). Status subjek (yang memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya, pajak penghasilan untuk orang pribadi yang belum berkeluarga berbeda dengan pajak penghasilan untuk orang yang sudah berkeluarga.

b. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak (tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak). Setelah melihat objek baru dicari subjek (orang atau badan hukum yang bersangkutan) misalnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kantor-kantor inspeksi pajak di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan bagian dari jajaran Departemen Keuangan. Berikut ini pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

- ☑ Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai dan Bea Lelang.
- ☑ Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu: Bea masuk, Pajak Ekspor (Bea Keluar), dan Pajak Pertambahan Nilai (Impor).
- ☑ Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Moneter, yaitu Pajak atas Minyak Bumi.

b. Pajak daerah

Yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Hasilnya digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Pajak Daerah terdiri atas:

- ☑ Pajak Daerah Tingkat I (provinsi). Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah (Pulasi), dan Pajak Izin Penangkapan Ikan (di wilayahnya).
- ☑ Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten). Misalnya, Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum, Pajak Reklame, Pajak Anjing, Pajak atas Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak Radio, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Potong Hewan.

  Pemerintah Daerah, selain memungut berbagai macam pajak juga melakukan pungutan dan retribusi. Misalnya, bea jalan/jembatan, bea pangkalan, bea penambangan, uang sempadan/izin bangunan, uang pengujian kendaraan bermotor, uang atas penguburan, retribusi jembatan timbang; retribusi stasiun bus, retribusi tempat rekreasi, retribusi pasar, retribusi pesanggrahan, retribusi pelelangan, dan lain-lain.

7.3.4 Tata Cara, Asas, dan Sistem Pemungutan Pajak

A. Stelsel pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

a. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah bahwa pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini dibanding stelsel yang lain adalah bahwa pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan menurut keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

d. Asas keadilan

Pajak yang dibebankan hendaknya dibagi kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. Misalnya, dengan menerapkan tarif pajak pro-

gresif, yaitu tinggi pendapatan seseorang atau badan usaha semakin tinggi persentase tarif pajak yang dikenakan.

e. Asas pemerataan

Pajak yang dibebankan hendaknya dibagi secara merata kepada segenap lapisan atau golongan masyarakat.

f. Asas manfaat

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak hendaknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh *(benefit principle)*. Misalnya, pajak kendaraan bermotor lebih besar daripada pajak sepeda. Pajak untuk mobil lebih besar daripada pajak sepeda motor. Hal ini disebut juga tarif *pajak progresif.*

g. Asas kemampuan

Pajak yang dibebankan harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak . Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah penghasilan yang diterima seseorang.

h. Asas yuridis

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus mempunyai kepastian hukum (subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, cara pembayaran, sanksi yang dikenakan).

i. Asas efisien/ekonomis

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak hendaknya tidak memberatkan atau menghambat perkembangan usaha perekonomian.

j. Asas sederhana

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak hendaknya jangan terlalu banyak ragam atau jenisnya agar mudah dimengerti oleh wajib pajak.

C. Sistem pemungutan pajak

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self-assessment system

Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut.

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With holding system

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan fiskus maupun wajib pajak.

D. Tarif Pajak

Tarif pajak yang digunakan dalam sistem penghitungan pajak dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Tarif progresif

Dalam sistem penghitungan pajak ini, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dengan kata lain, jumlah pajak sangat dipengaruhi oleh jumlah penghasilan.

Contoh: Pasal 17 UU PPh 2000, badan usaha dalam negeri dan berlaku mulai 1 Januari 2001.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
◆ sampai dengan Rp 25.000.000,00	10%
◆ di atas Rp 25.000.000,0 sampai dengan Rp 50.000.000,00	15%
◆ di atas Rp 50.000.000,00	30%

Perhatikan tabel berikut ini.

DPP*	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
Rp 1.000.000,00	4 %	Rp 40.000,00
Rp 2.000.000,00	5 %	Rp 100.000,00
Rp 3.000.000,00	6 %	Rp 180.000,00
Rp 4.000.000,00	7 %	Rp 280.000,00

Ket. *DPP = Dasar Pengenaan Pajak

b. Tarif proporsional atau sebanding

Dalam sistem penghitungan pajak ini, diberlakukan tarif yang sama terhadap semua tingkat penghasilan. Dengan kata lain, tarif disebut sebanding atau proporsional, karena tarif yang dikenakan berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Perhatikan tabel berikut ini.

DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
Rp 1.000.000,00	10 %	Rp 100.000,00
Rp 2.000.000,00	10 %	Rp 200.000,00
Rp 3.000.000,00	10 %	Rp 300.000,00
Rp 4.000.000,00	10 %	Rp 400.000,00

c. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan untuk memungut pajak semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Contoh:

DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
Rp 1.000.000,00	9 %	Rp 70.000,00
Rp 2.000.000,00	8 %	Rp 146.000,00
Rp 3.000.000,00	7 %	Rp 225.000,00
Rp 4.000.000,00	6 %	Rp 304.000,00

d. Tarif tetap

Tarif pajak berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Dengan demikian besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000,-.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia diatur dengan UU Perpajakan No. 17 tahun 2000, yang merupakan perubahan atas UU No. 9 tahun 1994.

7.3.5 Pajak Negara (Pusat)

A. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Perseroan 1925, Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944, dan Undang-Undang PBDR 1970. Peraturan ini menyebutkan beberapa hal sebagai berikut.

a. Subjek pajak

Subjek pajak terdiri dari:

- orang pribadi;
- warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun; dan bentuk badan usaha lainnya;
- bentuk usaha tetap.

b. Yang tidak termasuk subjek pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut peraturan itu adalah:

- badan perwakilan negara asing dan pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing;
- organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional.

c. Objek pajak

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut.

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorarium, beasiswa, hadiah, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, dan lainnya.
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- Uang tembusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

d. Yang tidak termasuk objek pajak

Yang tidak termasuk objek pajak atau Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut.

- Penghasilan yang meliputi:
  a) bantuan atau sumbangan;
  b) harta hibahan yang diterima oleh:
     - ☑ keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;

☑ badan keagamaan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- Warisan.
- Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dan BUMN serta BUMD, dari modal pada badan yang didirikan di Indonesia.
- Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang bersifat *tidak tetap* dan *tidak terkait* dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/d ke bawah, dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah *tidak dipotong* PPh pasal 21 (PP No. 45 tahun 1994).

e. Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 17, bahwa tarif Pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut.

- Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 %
di atas Rp 25.000.000,00 - Rp 50.000.000,00	10 %
di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00	15 %
di atas Rp 100.000.000,00 - Rp 200.000.000,00	25 %
di atas Rp 200.000.000,00	35 %

Contoh: perhitungan Pajak Terutang untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut.

Indra pegawai PT. Bintang Samudera mempunyai penghasilan kena pajak dalam setahun sebesar Rp 450.000.000,00. Hitunglah besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak terutang!

Jawab:

5 % × Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10 % Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15 % Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
25 % Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00
35 % Rp 250.000.000,00 = Rp 87.500.000,00 +
Pajak penghasilan terutang = **Rp 123.750.000,00**

- Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00	15 %
di atas Rp 100.000.000,00	30 %

Contoh: perhitungan pajak terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut.

PT Merpati Jaya mempunyai penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp 450.000.000,00. Hitunglah jumlah pajak terutang.

Jawab:

10 % Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
15 % Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
30% Rp350.000.000,00 = Rp 105.000.000,00 +
Pajak penghasilan terutang = **Rp 117.500.000,00**

B. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan pemotongan PPh adalah sebagai berikut.

- Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran.

☑ Biaya jabatan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.

Catatan:

Biaya jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

☑ Iuran yang terikat pada gaji seperti dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan penyelenggara Taspen yang dibayar oleh pegawai. Biaya pensiun yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu) sebulan.

- Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut.

1. Besar PTKP:	setahun	sebulan
a. untuk pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

☑ Dalam hal *karyawati kawin*, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

☑ Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

☑ Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

☑ Tarif pajak yang diterapkan adalah tarif berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP. 545/PJ/2000 tertanggal 29 Desember 2000 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2001 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).

Baik biaya jabatan dan biaya pensiun maupun
Baik biaya jabatan dan biaya pensiun maupun
PTKP tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999.

Contoh penghitungan PTKP adalah sebagai berikut.

- Edward bekerja pada perusahaan PT Bima dengan memperoleh gaji sebulan Rp 950.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 40.000,00. Edward sudah beristri, tetapi belum mempunyai anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan Edward = Rp 950.000,00

Pengurangan:

1) Biaya jabatan

5 % x Rp 950.000,00 = Rp 47.500,00

2) Iuran pensiun = Rp 40.000,00 +

= Rp 87.500,00 -

Penghasilan netto sebulan = Rp 862.500,00

Penghasilan netto setahun =

12 x Rp 862.500,00 = Rp 10.350.000,00

3) PTKP setahun

Untuk WP sendiri = Rp 2.880.000,00

Untuk WP kawin = Rp 1.440.000,00 +

= Rp 4.320.000,00 -

Penghasilan kena pajak setahun = Rp 6.030.000,00

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 6.030.000,00

= Rp 301.500,00

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 301.500,00 : 12

= Rp 25.125,00

- Wisnu (kawin, belum punya anak) pegawai pada perusahaan PT Kirana memperoleh gaji sebulan Rp 950.000,00. PT Kirana mengikuti (memasukkan karyawannya) program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, dan premi Asuransi Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp 20.000,00 dan Rp 5000,00 sebulan. PT Kirana menanggung iuran THT tiap-tiap bulan sebesar Rp 40.000,00 sedangkan Pak Wisnu membayar iuran THT sebesar Rp 7.500,00 setiap bulan. Di samping itu PT Kirana juga masuk program pensiun untuk pegawainya. PT Kirana membayar iuran pensiun untuk Wisnu ke dana pensiun sebesar Rp 30.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan Wisnu = Rp 950.000,00

Premi asuransi kecelakaan kerja = Rp 20.000,00

Premi asuransi kematian = Rp 5.000,00 +

Penghasilan bruto = Rp 975.000,00

Pengurangan:

1) biaya jabatan

5% x Rp 975.000,00 = Rp 48.750,00

2) iuran pensiun = Rp 30.000,00

3) iuran THT = Rp 7.500,00 +

= Rp 86.250,00 -

Penghasilan netto sebulan = Rp 888.750,00

Penghasilan netto setahun

= 12 x Rp 888.750,00 = Rp 10.665.000,00

4) PTKP setahun

Untuk WP sendiri = Rp 2.880.000,00

Tambahan WP kawin = Rp 1.440.000,00 +

= Rp 4.320.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 6.345.000,00

PPh Pasal 21 setahun

= 5% x Rp 6.345.000,00 = Rp 317.250,00

PPh Pasal 21 sebulan

= Rp 317.250,00 : 12 **= Rp 26.437,50**

- Riyadi seorang pegawai PT Sejahtera yang setiap bulannya memperoleh gaji sebesar Rp 2.500.000,00. Premi asuransi Rp 50.000,00. dan tunjangan lain-lain Rp 1.500.000,00. Riyadi sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak dan ia membayar Tunjangan Hari Tua Rp 7.500,00.

  Berikut adalah perhitungan PTKP Riyadi.

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan Riyadi = Rp 2.500.000,00

Tunjangan lain-lain = Rp 1.500.000,00

Premi asuransi = Rp 50.000,00 +

Penghasilan bruto **= Rp 4.050.000,00**

Pengurangan :

Biaya jabatan

= 5% x Rp 4.050.000 = Rp 202.500,00

Diperkenankan maksimum = Rp 108.000,00

Biaya pensiun

= 5% x Rp 4.050.000 = Rp 202.500,00

Diperkenankan maksimum = Rp 36.000,00

Iuran Tunjangan Hari Tua (THT) = Rp 7.500,00 +

= Rp 151.500,00 –

Penghasilan netto sebulan **= Rp 3.898.500,00**

Penghasilan netto setahun

= 12 x Rp 3.898.500 = Rp 46.782.000,00

PTKP setahun:

Untuk Wajib Pajak = Rp 2.880.000,00

Istri = Rp 1.440.000,00

Anak = 3 x Rp1.440.000 = Rp 4.320.000,00 +

= Rp 8.640.000,00 –

Penghasilan kena pajak setahun **= Rp 38.142.000,00**

PPh Pasal 21 setahun :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 13.142.000,00 = Rp 1.314.200,00 +

PPh Pasal 21 setahun **= Rp 2.564.200,00**

PPh Pasal 21 sebulan

= RP 2.564.200,00 : 12 **= Rp 213.683,33**

C. Pajak pertambahan nilai (PPN)

PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000. Undang-undang ini efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 serta merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

Ketentuan tarif PPN adalah sebagai berikut.

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas barang ekspor barang kena pajak adalah 0%.
- Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak tersebut (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terdapat dua cara atau metode, yaitu:

Tarif x pertambahan nilai

- Metode langsung *(direct substraction method)*
- Metode tidak langsung *(indirect substraction method/tax invoice method)*

Pajak keluaran-pajak masukan

Dalam buku ini kita hanya membahas cara menghitung PPN dengan menggunakan metode tidak langsung. Contohnya sebagai berikut.

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut.

- Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan sebesar Rp 100.000.000,00. Pajak masukan yang dibayar melalui pabrikan tersebut sebesar 10% Rp 100.000.000,00 = Rp 10.000.000,00.
- Penjualan hasil produksi Rp 60.000.000,00. Pajak keluaran yang harus dipungut 10% Rp 60.000.000,00 = Rp 6.000.000,00.
- PPN yang dibayarkan lebih dalam masa pajak yang bersangkutan Rp 10.000.000,00-Rp 6.000.000,00 = Rp 4.000.000,00.
- Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak terutang masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).
- Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP.

Contoh:

Selama bulan takwim, terjadi kegiatan usaha sebagai berikut.

Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan seharga Rp 80.000.000,00. Pajak masukan yang dibayar melalui pabrikan tersebut adalah 10% Rp 80.000.000,00 = Rp 8.000.000,00

Penjualan hasil produksi Rp 180.000.000,00. Pajak keluaran yang harus dipungut sebesar 10% Rp 180.000.000,00 = Rp 18.000.000,00.

PPN yang masih harus dibayarkan ke Kas Negara adalah sebagai berikut.

Rp 18.000.000,00 - Rp 8.000.000,00 =

Rp 10.000.000,00.

D. Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun1994)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pengganti Pajak Kekayaan dan Iuran Pembangunan Daerah. Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan:

- Ordonasi Pajak Rumah Tangga tahun 1908;
- Ordonasi *Verponding* Indonesia tahun 1923;
- Ordonasi Pajak Kekayaan tahun 1923;
- Ordonasi *Verponding* tahun 1928;
- Ordonasi Pajak Jalan tahun 1942;
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l;
- Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

Pajak Bumi dan Bangunan ditujukan untuk:

- mengisi kas negara;
- mengendalikan hak penguasaan atas bumi dan bangunan;
- menghilangkan pajak ganda;
- menyesuaikan pajak atas harta tidak bergerak di semua daerah.

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut

- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Misalnya, jalan tol, ko-

lam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, dan pipa minyak.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak dengan ciri-ciri sebagai berikut.

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan.
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional.
- Ladang penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan ataspembukuan timbal balik.
- Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

c. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut.

- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala.
- Dasar penghitungan pajak: NJOP, yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%.

d. Tarif PBB

Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5%. Untuk merangsang perekonomian seperti sekarang ini, terutama agar tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tanpa mengabaikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJKP = AV (Assessment Value) × NJOP
= 20% × NJOP

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya pajak = Tarif Pajak × NJKP
= 0,5% × 20% (NJOP-NJOPTKP)

Contoh:

Tuan Untung tinggal di Jakarta Utara dan memiliki sebidang tanah seluas 500 meter persegi. Di atas tanah itu terdapat sebuah bangunan seluas 120 m^2. NJOP untuk bumi adalah Rp 500.000/m^2, sedangkan NJOP untuk bangunan adalah Rp 400.000/m^2. Berapakah besar PBB yang harus dibayar Tuan Untung?

Jawab:

NJOP untuk bumi		
= 500 x Rp 500.000,00	= Rp	250.000.000,00
NJOP untuk bangunan		
= 120 x Rp 400.000,00	= Rp	48.000.000,00
Jumlah NJOP untuk bumi dan bangunan	= Rp	298.000.000,00 +
Bangunan tidak kena pajak (BTKP)	= Rp	8.000.000,00 -
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	= Rp	290.000.000,00
NJKP = 20% x Rp 290.000.000,00	= Rp	58.000.000,00
Besar PBB yang terutang		
= 0,5% x Rp 58.000.000,00	= Rp	290.000,00

***) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak (BTKP)** ditetapkan sebesar **Rp 8.000.000,00**

E. Bea Materai (Undang-Undang Nomor 13 Tahun1985)

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 yang berlaku sekarang PP Nomor 24 Tahun 2000. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan pajak Bea Materai diuraikan sebagai berikut.

a. Bea Materai dikenakan atas dokumen

Menurut Undang-undang Bea Materai, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak yang berkepentingan.

b. Bea Materai

Bea materai dapat dilunasi dengan menggunakan benda materai. *Benda materai* adalah materai stempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Setiap dokumen terutang satu materai, dan untuk dokumen yang dibuat rangkap dan ditandatangani, selain lembar pertama yang diberi materai, maka lembar rangkap yang ditandatangani harus diberi materai dengan

tarif yang sama dengan lembar pertama atau dokumen aslinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazim dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.

c Objek dan Bea Materai

Objek bea materai adalah dokumen. Tarif bea materai ada dua macam, yaitu Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00. Tarif bea materai Rp 6.000,00 dikenakan atas dokumen-dokumen berikut.

- Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan):
  - ☑ dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian;
  - ☑ mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan;
  - ☑ bersifat perdata.
- Akta Notaris termasuk salinannya.
- Akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkapnya.
- Surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah.
- Surat-surat berharga: wesel dan promes yang nominalnya lebih dari satu juta rupiah.
- Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari satu juta rupiah.
- Dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk bukti pengadilan.

dok. ilustrasi bagian produksi

Gambar 7.3.2
Contoh materi tempel Rp 6.000,00

Tarif bea materai Rp 3.000,00 dikenakan atas dokumen-dokumen berikut.

- Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00.
- Surat-surat berharga misalnya, wesel dan promes yang nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00.
- Efek dengan nama dan dalam atau bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00.
- Cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapa pun.

Yang tidak dikenakan bea materai adalah dokumen-dokumen berikut.

- Dokumen yang berupa:
  - ☑ surat penyimpanan barang;
  - ☑ konosemen;
  - ☑ surat angkutan penumpang dan barang;
  - ☑ bukti pengiriman dan penerimaan barang.
- Segala bentuk ijazah.
- Tanda terima gaji, uang tunggu, uang tunjangan, dan pembayaran.
- Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas Pemda, dan bank.
- Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
- Kuitansi untuk semua jenis pajak.
- Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.
- Kupon atau tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan bentuk apapun.

7.3.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

A Pajak daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pmerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

a. Jenis pajak dan objek pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

- Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - ☑ pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  - ☑ bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  - ☑ pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - ☑ pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
  - ☑ pajak hotel;

- ☑ pajak restoran;
- ☑ pajak hiburan;
- ☑ pajak reklame;
- ☑ pajak penerangan jalan;
- ☑ pajak pengambilan bahan galian golongan C;
- ☑ pajak parkir;
- ☑ pajak lain-lain.

b. Tarif Pajak

Tarif-tarif pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar berikut ini.

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5% (lima persen).
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10% (sepuluh persen).
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% (lima persen).
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
- Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen).
- Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 s/d 11 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber: *Kompas 6 Januari 2008*

Gambar 7.3.3
Pelayanan STNK door to door diterapkan di Jakarta untuk mempermudah pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak.

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

a. Objek retribusi daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari:

- Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah. Tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh jasa umum: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pasar, pengujian kendaraan bermotor, dan sebagainya.
- Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Contoh jasa usaha antara lain: pasar grosir atau pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat penginapan atau villa, tempat khusus parkir, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, dan sebagainya.
- Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan. Tujuannya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek retribusi daerah

Subjek retribusi daerah sebagai berikut.

- Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

RANGKUMAN

1. Pajak adalah pungutan wajib dari negara atau pemerintah kepada rakyatnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang atau norma-norma hukum yang berlaku tanpa balas jasa secara langsung kepada wajib pajak.
2. Fungsi pajak:
   a. *fungsi budgetair,* yaitu pajak sebagai alat untuk menghimpun uang ke kas negara;
   b. *fungsi regulerend,* yaitu pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan perekonomian;
   c. *fungsi sosial,* yaitu dengan menetapkan kebijakan yang berbeda antara yang kaya dan yang miskin.
3. Jenis-jenis pajak:
   - Menurut golongannya:
     - ☑ pajak langsung;
     - ☑ pajak tidak langsung.
   - Menurut sifatnya:
     - ☑ pajak subjektif;
     - ☑ pajak objektif.
   - Menurut lembaga pemungutnya:
     - ☑ pajak pusat;
     - ☑ pajak daerah.
4. *Retribusi* adalah iuran rakyat kepada pemerintah dengan mendapatkan jasa balik dari pemerintah yang secara langsung dapat difungsikan atau dirasakan.
5. Retribusi ada yang berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH

1. Pajak yang kamu bayarkan saat menonton bioskop dapat dikategorikan sebagai pajak daerah.
2. Salah satu fungsi pajak adalah untuk mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

II. Salin di buku tugasmu dan lengkapilah dengan jawaban yang tepat!

1. Pajak yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, berakhir dan berkala disebut ... .
2. Semakin besar jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, semakin besar persentase pajaknya disebut sistem penghitungan pajak dengan tarif ... .
3. Pendapatan Kena Pajak Pak Ali tahun 2005 adalah sebesar Rp 80.000.000,00. Besar pajak yang terutang yang harus dibayar Pak Ali adalah ... .
4. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Pendapat ini dikemukakan oleh ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi pajak!
3. Pak Dermawan adalah seorang karyawan PT Multi Mulia yang mempunyai penghasilan kena pajak sebulan sebesar Rp 75.000,00. Berapakah PPh yang harus dibayar selama setahun?
4. Pak Agung seorang karyawan PT Ventura dalam setahun memperoleh gaji sebesar Rp 15.000.000,00. Ia menikah dan mempunyai dua orang anak. Berapakah PPh yang harus dibayar selama setahun?
5. Pak Doel seorang yang kaya. Ia memiliki tanah dan rumah di beberapa tempat berikut ini.
   a. di Kelurahan Pulo Gadung, sebuah rumah seharga Rp 15.000.000,00 di atas tanah seharga Rp 10.000.000,00.
   b. di Kelurahan Pondok Bambu, sebidang tanah kosong seharga Rp 12.500.000,00.
   c. di Kelurahan Duren Sawit, sebuah rumah seharga Rp 12.500.000,00 di atas tanah seharga Rp 9.000.000,00.

   Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar Pak Doel jika diketahui NJOPTKP = Rp 8.000.000,00; NJKP = 20%; dan PBB yang terutang = 0,5%!

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

Sebanyak 2,68 juta pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tidak membayar pajak. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara semakin rendah. Itu karena pemanfaatan pajak yang tidak terfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah. "Faktanya, kesenjangan ekonomi kian melebar, kemiskinan justru meningkat seiring kenaikan pendapatan pajak," kata Pengamat kebijakan publik Econit Hendri Saparini.

(Diambil dari "2,68 juta pemilik NPWP tidak Bayar Pajak" Kompas, 27 September 2007)

A. Menjawab Pertanyaan

1. Apa pendapatmu mengenai artikel di atas?
2. Apakah menurutmu, yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi ketidakpercayaan masyarakat?
3. Menurutmu, faktor apa sajakah yang membuat orang tidak membayar pajak? Jelaskan!

B. Portofolio

Kumpulkanlah segala macam retribusi dan pajak (bisa difotokopi jika perul) yang kamu dan keluargamu pernah bayarkan (misal retribusi rekreasi, bus, tol dan lain sebagainya). Lalu jelaskanlah jenis pajak apa yang kamu bayarkan berdasarkan:

a. jenis pajak menurut pihak yang memungut.
b. golongan pajak yang sudah dibayarkan.
c. menurut sifatnya.

7.4 Permintaan, Penawaran, dan Terbentuknya Harga Pasar

Menjelang Tahun Ajaran Baru, Kenaikan Harga Menanti

Muhammad Fahmi Aulia (blog)

Menjelang masuk tahun ajaran baru 2008/2009, ternyata harga perlengkapan untuk sekolah, seperti seragam sekolah, buku, sepatu, serta lainnya sudah mengalami kenaikan. Sebagai contoh, harga satu stel seragam SD Rp35 ribu, seragam SMP Rp50 ribu, sementara untuk seragam SMA Rp55 ribu.

Seorang penjual pakaian sekolah dari SD sampai SMA mengatakan kenaikan harga hanya naik sekitar 5 sampai 10 persen. Sementara untuk seragam Pramuka, lebih tinggi lagi kenaikannya, lebih mahal Rp 5000.

Untuk topi dan dasi, harganya Rp 5000 per pasang, sedangkan topi Pramuka dengan dasinya lebih mahal Rp 1000.

Harga sepatu tidak jauh berbeda, alias mengalami kenaikan juga. Harga termurah yang bisa didapat untuk sepasang sepatu layak pakai sekolah hingga nomor 30 (ukuran untuk anak SD) sekitar Rp 32 ribu (naik Rp 5 ribu dari harga sebelumnya). Sementara untuk nomor 30-37 (ukuran anak SMP) sekitar Rp 35 ribu. Sedangkan dari nomor 37-40 (ukuran SMA) kira-kira Rp 38 ribu. Untuk sepatu yang lebih mahal, tentu harganya lebih tinggi lagi, bisa ratusan ribu.

Belum lagi kenaikan harga buku pelajaran. Ugh, nampaknya para orang tua yang mempunyai anak yang bersekolah mesti merogoh kocek lebih dalam, belum lagi rencana kenaikan BBM.

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan temanmu.

1. Jelaskan inti artikel diatas!
2. Mengapa menjelang tahun ajaran baru perlengkapan untuk sekolah mengalami kenaikan?
3. Apakah kamu juga harus membeli perlengkapan sekolah dengan harga yang mahal juga?

7.4.1 Permintaan

Tahukah kamu mengapa perlengkapan sekolah pada saat menjelang tahun ajaran baru menjadi lebih mahal? Kenaikan tersebut disebabkan permintaan barang-barang tersebut meningkat, sedangkan jumlah barang yang tersedia relatif tetap. Meningkatnya jumlah permintaan itu, mengakibatkan para penjual menaikkan harga barang dan jasa.

Kenaikan harga barang, menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta, kenaikan tarif angkutan lebaran, dan lain-lain itu merupakan peristiwa atau gejala-gejala ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala ekonomi tersebut kemudian diselidiki oleh para ahli ekonomi secara cermat, sehingga tersusun *hukum ekonomi*.

Hukum ekonomi ialah ketentuan-ketentuan yang disimpulkan dari hubungan antara gejala ekonomi yang satu dengan gejala ekonomi yang lainnya. Hubungan antara peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala ekonomi yang terjadi dalam masyarakat itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan kausal dan hubungan fungsional.

1. Hubungan kausal (sebab akibat)

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat ialah hubungan antara dua gejala ekonomi. Gejala ekonomi yang satu menjadi sebab timbulnya gejala ekonomi yang lain dan tidak berlaku sebaliknya. Perhatikanlah dua contoh mengenai kenaikan harga BBM dan kenaikan gaji pegawai negeri berikut.

- Harga BBM naik (gejala 1). Naiknya harga BBM akan mengakibatkan naiknya harga barang-barang yang lain (gejala 2).

- Pemerintah menaikkan gaji pegawai (gejala 1). Sesudah atau bahkan sebelum gaji naik ternyata harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi naik (gejala 2).

2. ***Hubungan fungsional (saling memengaruhi atau timbal balik)***

Hubungan fungsional ialah hubungan yang memperlihatkan pengaruh timbal balik antara gejala ekonomi yang satu dengan gejala ekonomi yang lain. Perhatikan contoh berikut.

- Jika harga suatu barang naik *(gejala 1)*, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun *(gejala 2)*. Dengan demikian gejala 1 menjadi sebab terjadinya gejala 2. Akan tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Gejala 2 dapat menjadi sebab terjadinya gejala 1, yaitu turunnya permintaan barang akan mengakibatkan harga barang tersebut turun. Jadi, harga suatu barang akan memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen.
- Bila harga suatu barang turun (gejala 1), penawaran terhadap barang tersebut akan berkurang (gejala 2). Sebaliknya, penawaran barang tersebut akan meningkat apabila harganya pun meningkat. Jadi, harga suatu barang akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.

A. Pengertian permintaan

Permintaan ialah jumlah unit barang yang akan dibeli di pasar tertentu pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintan antara lain sebagai berikut.

- Harga barang itu sendiri.
- Harga barang-barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut.
- Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.

sumber: www.hinamagazine.om

Gambar 7.4.1
Harga daging sapi di pasar pada umumnya meningkat pada hari Idul Adha. Hal ini disebabkan karena permintaan daging sapi meningkat.

- Cita rasa atau selera masyarakat.
- Jumlah penduduk.
- Tradisi atau kebiasaan.
- Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.

Dampak faktor-faktor tersebut terhadap permintaan sangat sulit dianalisis secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan akan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Dengan demikian, dalam teori permintaan yang terutama dianalisa adalah hubungan antara permintaan suatu barang dan harga barang tersebut dengan mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan *(ceteris paribus)*.

Sumber: *Majalah Tempo 3-9 maret08*

Gambar 7.4.2
Kelangkaan barang akan menaikkan harga barang bersangkutan. Demikian yang dialami warga Palu, saat terjadi kelangkaan BBM 2007 lalu.

Permintaan dan harga saling berkaitan erat. Hal ini disebabkan karena adanya dua alasan berikut. *Pertama*, kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang yang mengalami kenaikan harga. Apabila harga turun, orang cenderung akan mengurangi pembelian terhadap barang lain dan menambah pembelian barang yang mengalami penurunan harga. *Kedua*, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama pembelian untuk barang-barang yang mengalami kenaikan harga.

B. Jenis-jenis permintaan

Permintaan akan suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu berdasarkan subjek atau jumlah konsumennya, berdasarkan daya beli konsumen, dan berdasarkan sumber pendapatan. Berikut akan dijelaskan satu per satu.

a. Permintaan berdasarkan subjeknya

Permintaan berdasarkan subjeknya ialah permintaan ditinjau dari jumlah konsumen. Permin-

taan ini dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif atau pasar.

1. ***Permintaan individu***

Permintaan individu ialah permintaan yang berasal dari konsumen secara perorangan. Sifat permintaan ini tergantung pada tingkat kemajuan atau kemakmuran hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat kemakmuran hidup seseorang, maka tingkat permintaan akan barang-barang pemenuh kebutuhan pun semakin meningkat.

2. ***Permintaan kolektif atau pasar***

Permintaan kolektif atau pasar ialah permintaan dari seluruh konsumen yang berada di dalam suatu wilayah tertentu. Permintaan ini dapat dijadikan alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu, permintaan ini sering kali dijadikan bahan penyelidikan ahli ekonomi. Contoh jika tingkat permintaan pasar negara A lebih besar daripada permintaan pasar negara B, dapat dikatakan bahwa negara A lebih makmur daripada negara B.

Untuk memperjelas pemahamanmu mengenai permintaan individu dan permintaan kolektif atau pasar, simaklah tabel dan uraiannya berikut ini.

Tabel 7.4.1
Tabel permintaan beras per kilogram

Konsumen	Jumlah Beras Diminta (Kg)
A	150
B	200
C	220
Total	570

Keterangan:

Tabel di atas menggambarkan tingkat permintaan individu akan beras per kilogram. Jumlah individu pada tabel tersebut ada 3 orang, yaitu A, B, dan C. Besarnya permintaan masing-masing individu dapat dilihat pada tabel tersebut. Konsumen A membutuhkan beras 150 kilogram, konsumen B membutuhkan beras 200 kilogram, dan konsumen C membutuhkan beras sebesar 220 kilogram. Pada tabel tersebut, dapat pula dilihat permintaan kolektif atau pasarnya. Besarnya permintaan kolektif atau pasar pada tabel tersebut merupakan penjumlahan besarnya permintaan masing-masing individu, yaitu 570 kilogram.

b. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen

Permintaan berdasarkan daya beli konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial dan permintaan absolut.

- *Permintaan efektif* ialah permintaan yang disertai daya beli. Permintaan akan efektif jika pembeli butuh, mau, mampu dan membayar harga,
- *Permintaan potensial* ialah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar atau berdaya beli, tapi belum melaksanakan pembelian.
- *Permintaan absolut* ialah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai daya beli.

c. Permintaan berdasarkan sumber pendapatan

Permintaan berdasarkan sumber pendapatannya dibedakan menjadi empat, yaitu permintaan konsumen, permintaan pengusaha, permintaan pemerintah, dan permintaan luar negeri.

1. ***Permintaan konsumen***

Permintaan konsumen ialah keinginan konsumen terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya permintaan akan alat-alat tulis, permintaan akan buah-buahan, permintaan akan beras, permintaan akan pakaian jadi, dan lain-lain.

2. ***Permintaan pengusaha***

Permintaan pengusaha ialah keinginan para pengusaha akan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi yang dilakukan oleh pengusaha.

3. ***Permintaan pemerintah***

Setiap tahun pemerintah membuat anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang. Karena kegiatan pembangunan tersebut memerlukan bahan dan peralatan, maka akan menimbulkan permintaan pemerintah terhadap barang dan jasa untuk pelaksanaan pembangunan dan untuk tercapainya kemakmuran rakyat. Misalnya permintaan pemerintah akan semen untuk pembangunan jalan raya, permintaan pemerintah akan besi dan baja untuk pembangunan jembatan, permintaan pemerintah akan batu bata, pasir, kayu untuk pembangunan sekolah-sekolah, dan tempat-tempat ibadah.

4. ***Permintaan luar negeri***

Permintaan luar negeri ialah permintaan yang berasal dari konsumen, pengusaha, atau pemerintah luar negeri terhadap barang produksi dalam negeri. Misalnya permintaan orang-orang Malaysia akan produk-produk kecantikan dari Mustika Ratu, permintaan orang-orang Jepang akan udang galah, permintaan pemerintah Saudi Arabia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), permintaan negara-negara di Amerika akan barang-barang kerajinan buatan Indonesia, dan lain-lain.

C. Hukum permintaan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang memengaruhi jumlah barang yang diminta adalah harga barang itu sendiri, maka dapat dikatakan antara harga dengan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan yang erat. Untuk melihat bagaimana hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta perlu dibuat asumsi bahwa faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan tidak berubah atau harus *ceteris paribus*.

Antara harga dengan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan negatif, artinya apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dan sebaliknya apabila harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hubungan seperti ini, dalam ilmu ekonomi disebut sebagai hukum permintaan.

Untuk memperjelas pemahamanmu mengenai hukum permintaan, simaklah gambar ilustrasi dan keterangannya berikut.
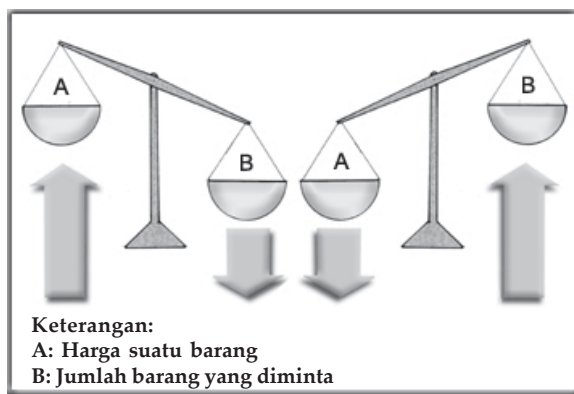
Gambar 7.4.3
Ilustrasi hukum permintaan

Pada gambar tersebut, terlihat bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta menurun. Namun, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta tersebut menjadi naik.

D. Kurva permintaan

Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik. Grafik tersebut kita kenal dengan nama "kurva permintaan". Bagaimana bentuk kurva permintaan itu? Supaya kamu mendapat gambaran lebih jelas, perhatikanlah tabel dan kurva permintaan di samping.

Tabel 7.4.2
Permintaan gula pasir pada berbagai tingkat harga

Kondisi	Tingkat Harga	Jumlah yang Diminta
A	Rp 4.000,00	400 kg
B	Rp 5.000,00	250 kg
C	Rp 6.000,00	150 kg
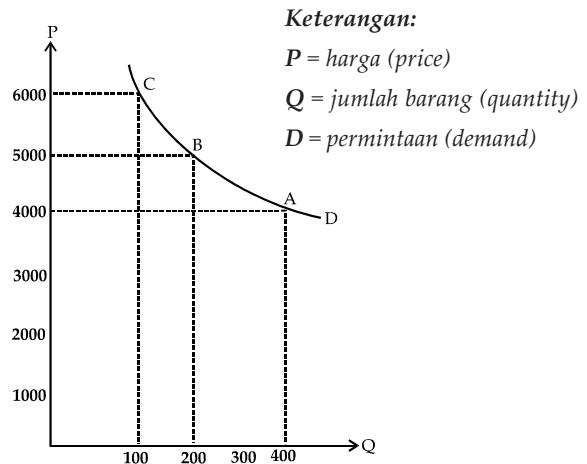
Grafik 7.4.1
Kurva permintaan gula pasir

Penjelasan:

- Pada kondisi A, pada saat harga gula Rp 4.000,00 per kilogram, jumlah gula yang diminta ialah sebanyak 400 kilogram.
- Pada kondisi B, saat harga gula Rp 5.000,00 per kilogramnya, jumlah gula yang diminta berkurang menjadi 250 kilogram.
- Pada kondisi C, saat harga gula Rp 6.000,00 per kilogramnya, maka gula yang diminta menjadi turun menjadi 150 kilogram.

Hubungan atau keterkaitan antara harga dengan jumlah gula yang diminta pada **tabel 7.4.2** dapat kita gambarkan dengan **grafik 7.4.1**. Berdasarkan **grafik 7.4.1**, kita dapat melihat bahwa kurva permintaan bergerak naik dari A ke C. Kurva permintaan di atas berbentuk naik miring ke kiri atas. Jika ada yang bertanya, apakah bentuknya harus demikian, maka jawabannya ialah "ya". Bentuk yang condong ke kiri atas itu menyatakan adanya hubungan yang berlawanan arah antara harga dengan jumlah yang diminta. Artinya, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat.

E. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan merupakan tingkat kepekaan permintaan akan suatu barang dibandingkan dengan naik turunnya harga barang tersebut.

Untuk mengukur besarnya koefisien elastisitas permintaan harga dapat digunakan rumus berikut.

$$Ed = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} \quad \text{atau} \quad \frac{Q_1 - Q}{P_1 - P} \times \frac{P}{Q}$$

di mana:
E_d = elastisitas permintaan harga
Q = jumlah barang yang diminta sebelum harga berubah
Q_1 = jumlah barang yang diminta setelah harga berubah
P = harga barang sebelum berubah
P_1 = harga barang setelah berubah

F. Jenis-jenis Elastisitas Permintaan Harga

a. Permintaan Elastis

Permintaan elastis terjadi pada barang-barang yang apabila mengalami perubahan harga sedikit saja akan mengalami perubahan permintaan yang sangat besar.
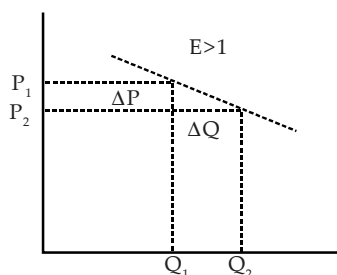
Grafik 7.4.2
Kurva Permintaan Elastis

b. Permintaan inelastis

Permintaan inelastis terjadi pada barang-barang yang meskipun mengalami perubahan harga yang besar tetapi hanya mengalami sedikit perubahan permintaan.
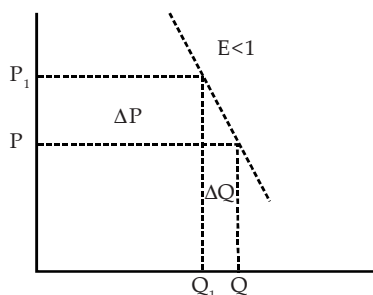
Grafik 7.4.3
Kurva Permintaan Inelastis

c. Permintaan Elastis Uniter

Permintaan bersifat elastis uniter apabila besarnya perubahan harga proporsional dengan besarnya perubahan permintaan.
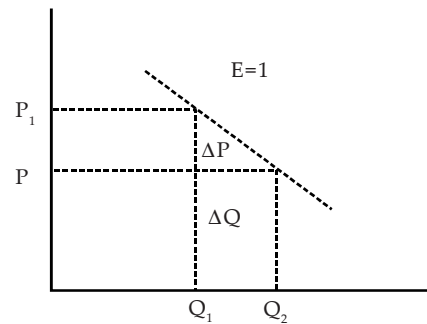
Grafik 7.4.4
Kurva Permintaan Elastis Uniter

d. Permintaan Elastis Sempurna

Permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastis sempurna apabila terjadi perubahan permintaan pada tingkat harga yang sama.
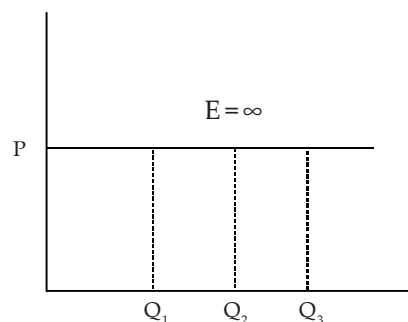
Grafik 7.4.5
Kurva Permintaan Elastis Sempurna

e. Permintaan Inelastis Sempurna

Permintaan ini memiliki koefisien elastisitas sama dengan nol, artinya pada tingkat harga berapa pun jumlah barang yang diminta adalah sama atau tetap.
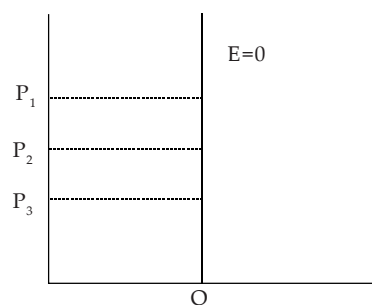
Grafik 7.4.6
Kurva Permintaan Inelastis Sempurna

7.4.2 Penawaran

A. Pengertian penawaran

Penawaran ialah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi jumlah barang yang dijual oleh produsen. Faktor-faktor tesebut, antara lain sebagai berikut.

- Harga barang itu sendiri.
- Harga barang-barang lain.
- Ongkos produksi.
- Tujuan perusahaan.
- Teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

Bagaimana faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada penawaran? Kita akan mengalami kesulitan untuk membicarakan sekaligus bagaimana penawaran akan dipengaruhi oleh perubahan berbagai faktor tersebut. Oleh sebab itu, kita harus membuat analisis satu per satu yang mempengaruhi penawaran tersebut. Dengan mengandaikan bahwa faktor-faktor lain tetap atau tidak berubah *(ceteris paribus)*, terlebih dahulu akan dianalisis pengaruh perubahan harga terhadap penawaran barang oleh penjual.

B. Macam-macam penawaran

Ditinjau dari pihak yang menawarkan barang, penawaran dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

- Penawaran perorangan (individual)

  Penawaran perorangan ialah penawaran barang atau jasa yang akan dijual oleh seorang produsen.
- Penawaran pasar (kolektif)

  Penawaran pasar atau kolektif ialah penawaran barang atau jasa yang akan dijual oleh produsen-produsen di pasar.

C. Hukum penawaran

Sama seperti permintaan, di dalam penawaran, harga barang atau jasa memengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam kondisi normal, apabila harga barang atau jasa naik maka penawaran barang atau jasa tersebut akan naik. Demikian juga sebaliknya apabila harga suatu barang atau jasa turun maka penawaran barang atau jasa tersebut juga akan turun. Namun, untuk jenis barang tertentu, dalam jangka pendek tidak berlaku. Misalnya, harga minyak goreng naik, seharusnya jumlah minyak goreng yang ditawarkan atau dijual akan bertambah. Tetapi karena bahan baku minyak goreng yaitu kelapa sawit tidak dapat ditambah dalam jangka pendek, maka dengan sendirinya penawaran minyak goreng tidak bertambah.

Hubungan antara jumlah barang dengan tingkat harga dapat disebut sebagai *hukum penawaran*. Hukum penawaran bunyinya sebagai berikut.

"apabila harga suatu barang atau jasa naik maka penawaran pun naik, namun jika harga barang atau jasa turun, tingkat penawaran pun menjadi berkurang".

D. Kurva penawaran

Hubungan antara tingkat harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dapat digambarkan dengan sebuah kurva yang biasa disebut sebagai *kurva penawaran.*

Perhatikan tabel dan kurvanya berikut ini.

Tabel 7.4.3
Daftar penawaran bolpoin selama bulan Januari 2003

Kondisi	Tingkat Harga/unit	Penawaran/unit
A	Rp 500,00	10
B	Rp 1.000,00	15
C	Rp 1.500,00	20
D	Rp 2.000,00	25
E	Rp 2.500,00	30

Tabel 7.4.3 di atas menunjukkan hubungan yang erat antara harga per unit bolpoin dengan jumlah bolpoin yang ditawarkan. Diasumsikan bahwa tabel tersebut dibuat oleh satu orang produsen yang membuat bolpoin. Produsen lain yang memproduksi barang yang sama, tentu saja mempunyai daftar penawaran yang berbeda. Dari tabel di atas dapat dibuat kurva sebagai berikut.
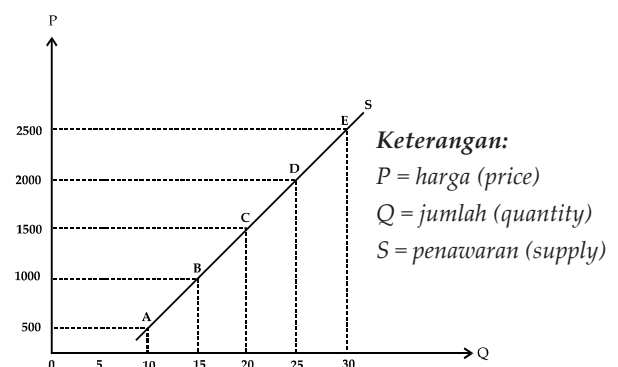
Grafik 7.4.7
Kurva penawaran bolpoin

Pada grafik di atas kita melihat bahwa kurva penawaran mempunyai *slove* positif. Artinya, jika harga naik maka penawaran akan barang dan jasa pun akan ikut naik. Dan jika harga turun, maka penawaran barang dan jasa pun akan ikut turun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kurva penawaran ialah kurva yang menggambarkan atau memperlihatkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga.

E. Elastisitas penawaran

Sebagaimana halnya dengan permintaan, prinsip yang sama juga berlaku pada penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga, atau perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga barang yang dimaksud. Untuk mengetahui tingkat kepekaan tersebut kita dapat menentukannya melalui koefisien elastisitas penawaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$E_s = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{Q_1 - Q}{P_1 - P} \times \frac{P}{Q}$$

di mana:
E_s = koefisien elastisitas penawaran
Q_1 = jumlah barang yang ditawarkan setelah harga berubah
Q = jumlah barang yang ditawarkan sebelum harga berubah
P_1 = tingkat harga setelah berubah
P = tingkat harga sebelum berubah

Jenis-jenis Elastisitas Penawaran adalah sebagai berikut.

a. Penawaran Elastis

Suatu penawaran dikatakan elastis apabila terjadi perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada perubahan harga.
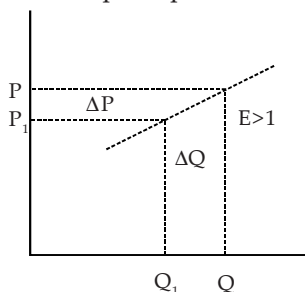
Grafik 7.4.8
Kurva Penawaran Elastis

b. Penawaran inelastis

Penawaran dikatakan inelastis apabila terjadi perubahan harga yang akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berubah dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan perubahan harga.
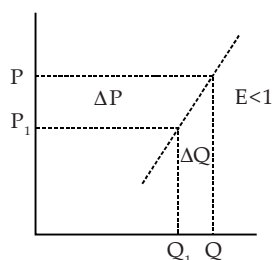
Grafik 7.4.9
Kurva Penawaran Inelastiss

c. Penawaran Elastis Uniter

Penawaran dikatakan bersifat elastis uniter apabila besarnya perubahan harga proporsional dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan.
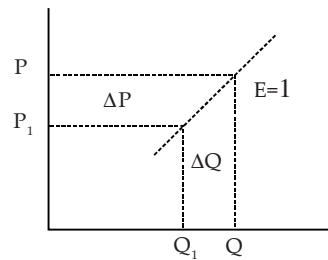
Grafik 7.4.10
Kurva Penawaran Elastis Uniter

d. Penawaran Elastis Sempurna

Penawaran dikatakan elastis sempurna apabila terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga yang tetap.
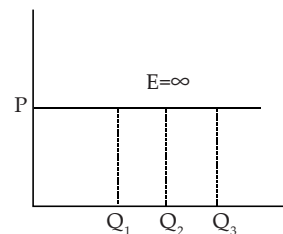
Grafik 7.4.11
Kurva Penawaran Elastis Sempurna

e. Penawaran Inelastis Sempurna

Penawaran dikatakan inelastis sempurna apabila terjadi perubahan harga sementara jumlah barang yang ditawarkan tetap.
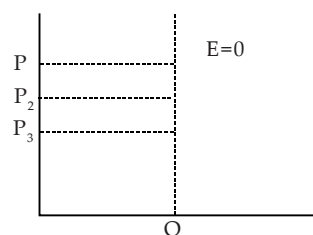
Grafik 7.4.12
Kurva Penawaran Inelastis Sempurna

7.4.3 Harga

A. Pengertian harga

Pada pembahasan mengenai permintaan dan penawaran telah dijelaskan bahwa harga ialah salah satu faktor yang memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran, dengan asumsi faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan dan penawaran seperti pendapatan, harga barang lain, biaya produksi, dan selera tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*).

Apabila seseorang ingin mendapatkan suatu barang, maka ia harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Jumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh barang tersebut disebut harga.

Gambar 7.4.1
Nilai barang-barang di swalayan tersebut dinyatakan dalam bentuk uang

Permintaan yang datang dari konsumen menginginkan barang atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya. Sedangkan penawaran yang datang dari produsen atau penjual menghendaki barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga yang setinggi-tingginya. Tinggi rendahnya harga suatu barang atau jasa tergantung dari nilai yang dimiliki barang atau jasa itu sendiri. Sedangkan nilai barang atau jasa tergantung dari kegunaan atau manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harga ialah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang atau nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

B. Penggolongan harga

Berdasarkan proses terbentuknya, harga dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu: harga pasar, harga minimum, harga maksimum, dan harga patokan setempat.

a. Harga pasar atau harga keseimbangan

Harga pasar atau harga keseimbangan ialah harga yang disepakati antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli.

b. Harga minimum

Harga minimum ialah harga terendah yang ditentukan oleh pemerintah terhadap suatu barang. Tujuan ditetapkannya harga minimum ialah untuk melindungi produsen agar tidak merugi.

Misalnya, pemerintah menetapkan harga minimum untuk 1 kilogram padi Rp 2.000,00. Dengan penetapan harga minimum itu hendaknya produsen menjual padi di atas harga Rp 2.000,00 per kg.

c. Harga maksimum

Harga maksimum ialah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang. Tujuan penetapan harga maksimum ialah untuk melindungi konsumen.

d. Harga patokan setempat

Harga patokan setempat ialah harga yang diberlakukan terhadap suatu barang untuk wilayah atau daerah tertentu.

Selain penggolongan harga di atas masih ada beberapa macam harga, antara lain: harga subjektif, harga objektif, harga pokok, dan harga jual.

- Harga subjektif

  Baik penjual atau pembeli mempunyai harga subjektif, yaitu: taksiran terhadap barang yang akan dibeli atau dijual.
- Harga objektif (harga pasar)

  Harga objektif adalah harga yang disetujui oleh kedua pihak, yaitu: penjual dan pembeli. Maka harga objektif atau harga pasar biasanya terbentuk melalui proses tawar menawar.
- Harga pokok

  Harga pokok adalah nilai pengorbanan atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Misalnya, untuk membuat sebuah roti membutuhkan tepung, mentega, gula, telur, bahan bakar, dan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Semuanya itu termasuk dalam harga pokok. Harga pokok keseluruhan dibagi jumlah hasil roti, akan menghasilkan harga pokok satuan.
- Harga jual

  Harga jual adalah perhitungan harga pokok ditambah laba yang diharapkan perusahaan. Misalnya harga pokok sebuah roti Rp 1.500,00, sedangkan perusahaan mengharapkan laba Rp 300,00 per buah, maka harga jual roti = Rp 1.500,00 + Rp 300,00 = Rp 1.800,00 per buah.

C. Harga keseimbangan

Harga pasar ialah titik keseimbangan antara permintaan dengan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Proses pembentukan harga yang demikian disebut *mekanisme pasar.*

Dengan menggunakan peralatan statistik, proses terbentuknya harga keseimbangan dapat digambarkan pada tabel dan grafik di halaman berikut.

Tabel 7.4.4
Permintaan dan penawaran susu di Jakarta tanggal 25 Juli 2002

No	Harga/Kg	Permintaan/Kg	Penawaran/Kg
1	Rp 70.000,00	16	80
2	Rp 60.000,00	20	70
3	Rp 50.000,00	30	55
4	Rp 40.000,00	40	40
5	Rp 30.000,00	55	20
6	Rp 20.000,00	80	5

Berdasarkan data dalam tabel di atas, kita dapat menggambar grafik. Perhatikan grafik keseimbangan antara penawaran dan permintaan susu di Jakarta berikut ini!
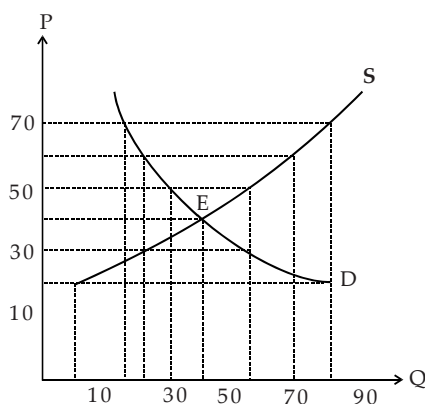
Grafik 7.4.13
Grafik keseimbangan antara penawaran dengan permintaan susu di Jakarta

Keterangan:
P = harga (price)
Q = jumlah (quantity)
D = permintaan (demand)
S = penawaran (supply)

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada saat harga susu Rp 70.000,00 per kilogram, jumlah yang diminta sebesar 16 kilogram dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen sebesar 80 kilogram. Harga keseimbangan pada grafik tersebut terlihat saat harga susu Rp 40.000,00 per kilogramnya. Pada harga keseimbangan tersebut jumlah susu yang diminta sama dengan jumlah susu yang ditawarkan, yaitu 40 kilogram.

D. Hubungan antara harga, permintaan,dan penawaran

Hubungan antara harga dengan permintaan disebut fungsi permintaan yang dapat dijelaskan secara matematik seperti berikut ini.

$$Q = f(P)$$

Q = jumlah permintaan

P = harga barang

Karena harga dengan permintaan berhubungan terbalik, maka:

$$\frac{dQ}{dP} < 0$$

d = perubahan baik pada Q maupun pada P.

Rumus umum untuk fungsi permintaan adalah:

$$Qd = a - b\,P$$

Sedangkan rumus umum untuk fungsi penawaran adalah:

$$Qs = -a + b\,P$$

Harga keseimbangan akan terjadi pada saat:

$$Qd = Qs$$

Contoh:

Qd = 70 - P

Qs = -20 + 2P

Tentukan harga, permintaan, dan penawaran pada titik perpotongan harga keseimbangan!

Jawab:

Pada titik keseimbangan harga Qd = Qs, maka persamaaannya adalah sebagai berikut.

70 - P = -20 + 2 P

90 = 3p

P = 30 (harga) dan Q = 40 (permintaan = penawaran)

7.4.4 Variabel Perubahan Permintaan

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran akan menyebabkan perubahan kurva permintaan atau penawaran, yaitu berubahnya hubungan antara harga dan permintaan atau penawaran, dengan syarat *ceteris paribus* tidak dipenuhi. **Contoh:**

a. Perubahan permintaan akibat naiknya pendapatan masyarakat.

P
D_1
D
P_1
P
D_1
D
O
Q
Q_1
Q
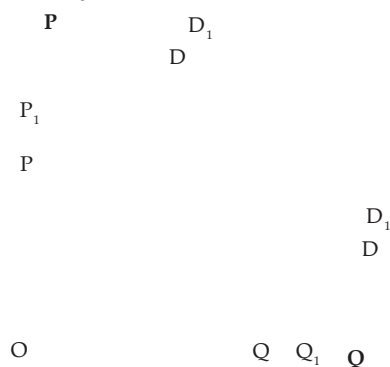
Grafik 7.4.14
Pergeseran permintaan akibat kenaikan permintaan

Sebelum pendapatan naik, konsumen mampu membeli barang pada tingkat harga OP untuk permintaan sebanyak OQ. Setelah pendapatan naik, konsumen bersedia membayar sebesar OP_1, untuk jumlah permintaan yang sama. Sedangkan pada harga yang sama (OP), konsumen mampu membeli barang lebih banyak, yaitu OQ_1. Akibatnya, kita melihat adanya pergeseran kurva permintaan ke kanan, yaitu dari DD menjadi D_1D_1.

b. Perubahan permintaan akibat perubahan selera konsumen.
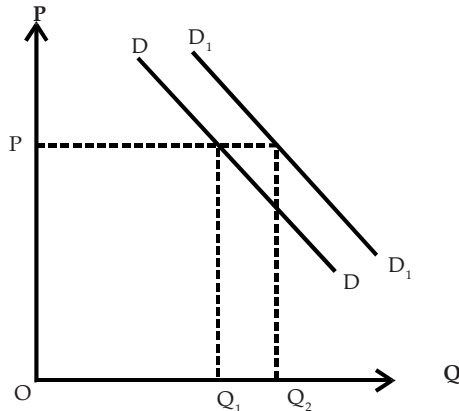
Grafik 7.4.15
Pergeseran permintaan akibat perubahan selera

Pada tingkat harga OP, permintaan konsumen adalah sebanyak OQ. Setelah terjadi perubahan selera, yaitu menurunnya selera konsumen terhadap barang, jumlah permintaan konsumen pun berkurang menjadi OQ_1, merskipun harga tetap sama (OP). Akibatnya, kurva DD bergeser ke kiri menjadi D_1D_1.

Sama halnya dengan perubahan permintaan, perubahan penawaran juga mengakibatkan bergesernya kurva penawaran. Berkurangnya penawaran akan menggeser kurva ke kiri dari SS ke S_1S_1.

Hal itu diakibatkan antara lain oleh berubahnya salah satu faktor yang memengaruhi penawaran. Misalnya, kemarau panjang mengakibatkan jumlah penawaran akan beras berkurang.

Bertambahnya penawaran menggeser kurva ke kanan, dari SS menjadi S_2S_2. Misalnya, perubahan penggunaan teknologi menyebabkan jumlah penawaran meningkat pada tingkat harga yang sama.

RANGKUMAN

1. Hukum ekonomi ialah ketentuan-ketentuan yang disimpulkan dari hubungan antara gejala ekonomi yang satu dengan gejala ekonomi yang lainnya.
2. Hubungan antara peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala ekonomi yang terjadi dalam masyarakat itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan kausal dan hubungan fungsional.
3. Permintaan ialah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada tingkat harga tertentu, waktu tertentu, dan tempat tertentu.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan adalah: (a) harga barang itu sendiri, (b) harga barang lain, (c) tingkat penda-patan, (d) selera konsumen, (e) jumlah penduduk, (f) tradisi atau kebiasaan, dan (g) perkiraan harga di masa yang akan datang.
5. Jenis permintaan adalah sebagai berikut.
   - Permintaan berdasarkan subjeknya: (a) Permintaan individu; (b) Permintaan kolektif atau pasar.
   - Permintaan berdasarkan daya beli konsumen: (a) Permintaan efektif; (b) permintaan potensial.
   - Permintaan yang berhubungan dengan pendapatan:(a)Permintaan konsumen (langsung); (b)Permintaan pengusaha (derivasi); (c) Permintaan pemerintah; (d) Permintaan pasar luar negeri.
6. Bunyi hukum permintaan: *"apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut akan berkurang dan sebaliknya apabila harga barang atau jasa turun, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut akan bertambah"*.
7. *Penawaran* ialah jumlah barang atau jasa yang tersedia pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu.
8. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran adalah (a) harga barang itu; (b) fluktuasi harga di pasar; (c) biaya produksi; (d) tingkat teknologi; (e) tujuan perusahaan.
9. Hukum penawaran berbunyi: *"apabila harga suatu barang atau jasa naik maka penawaran pun naik, namun jika harga barang atau jasa turun, tingkat penawaran pun menjadi berkurang"*.
10. Penawaran ditinjau dari pihak yang menawarkan barang dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) penawaran perorangan (individual) dan (b) penawaran pasar (kolektif).
11. Harga ialah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang.
12. Harga pasar ialah titik keseimbangan antara permintaan dengan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Sedangkan proses pembentukan harga disebut mekanisme pasar.

UJI KOMPETENSI DASAR

I. Jawablah "B" jika pernyataan BENAR dan "S" jika pernyataan SALAH!

1. Permintaan suatu barang dipengaruhi antara lain oleh harga barang, jumlah penduduk dan cita rasa masyarakat.
2. Permintaan inelastis adalah perubahan harga yang besar meski hanya mengalami perubahan permintaan yang sedikit.
3. Permintaan masyarakat indonesia di berbagai suku bangsa sama.

II. Lengkapilah dengan jawaban yang tepat!

1. Naiknya tarif angkutan akibat kenaikan harga bensin merupakan salah satu hubungan antar peristiwa ekonomi yang bersifat ... .
2. Jumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu disebut ... .
3. Permintaan yang didukung dengan kemampuan atau daya beli disebut ... .
4. Salah satu faktor yang memengaruhi permintaan ialah ... .
5. Jika harga barang naik, permintaan akan barang tersebut cenderung ... .
6. Jumlah barang yang ditawarkan penjual akan meningkat jika ... .
7. Garis yang menghubungkan titik-titik potong antara jumlah barang yang dibeli pada berbagai tingkat harga, disebut ... .
8. Harga pasar ditentukan oleh ... .
9. Apabila permintaan berkurang, sedangkan penawaran bertambah, maka harga pasar akan ... .
10. Peningkatan jumlah barang yang diminta akan menggeser kurva permintaan ke ... .

III. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan permintaan, penawaran, dan harga?
2. Mengapa menjelang hari raya permintaan akan barang-barang kebutuhan pokok meningkat? Jelaskan!
3. Apa yang dimaksud dengan *ceteris paribus*?
4. Saat menjelang tahun ajaran baru, terjadi kenaikan harga perlengkapan sekolah. Mengapa hal itu terjadi?
5. Sebutkan juga peristiwa-peristiwa yang biasanya akan menaikan harga barang!
6. Jelaskan bagaimana terjadinya harga pasar!
7. Bagaimanakah peranan harga dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa?

IV. Studi Kasus

Bacalah baik-baik artikel di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan!

HARGA PENGARUHI PEMBELIAN

Harga minyak goreng meningkat pesat. Untuk menormalkan harga minyak, pemerintah menyalurkan minyak goreng bersubsidi yang dihargai lebih murah dibandingkan harga normal.

Harga minyak goreng per kilogram bersubsidi dihargai pemerintah Rp 8.000 di Tegal, Jawa Tengah. Sementara harga minyak goreng di pasaran bisa mencapai Rp 12.500 hingga Rp 13.750 per kilogram di beberapa pasar pada April 2008 lalu.

Berbagai bahan pangan juga tinggi, sehingga para ibu rumah tangga dan pedagang kecil memilih mengurangi pembelian bahan pangan. "Sekarang ini ibu-ibu paling banter beli sayur asem, sayur sup, sama sayur hijau lain. Lauknya *engga* macam-macam, paling tempe, tahu, ikan asin. Jarang yang mau beli telur, apalagi ayam," ujar Ninih, pedagang bahan pangan.

Sumber: "Makanan makin mahal" dan *"Pasar Murah Mulai digelar di kota Tegal" Kompas, 23 April 2008.*

A. Menjawab Pertanyaan

1. Mengapa pemerintah menyalurkan minyak goreng bersubsidi?
2. Berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, apakah harga minyak goreng akan mengalami perubahan dengan upaya pemerintah tersebut?
3. Berapakah harga minimum minyak goreng dan harga keseimbangan minyak goreng pada artikel di atas? Jelaskan!
4. Berdasarkan daya beli konsumen, jelaskan permintaan ibu rumah tangga terhadap sayur-sayuran, tempe dan ikan asin!
5. Berdasarkan daya beli konsumen, jelaskan permintaan ibu rumah tangga terhadap telur dan ayam!

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pengertian kesempatan kerja adalah ... .
   a. jumlah penduduk yang sudah bekerja, sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan
   b. jumlah penduduk angkatan kerja yang dapat diserap oleh permintaan tenaga kerja
   c. jumlah penduduk yang dapat memproduksi barang dan jasa
   d. penduduk yang terlibat atau berusaha terlilbat dalam kegiatan produksi
2. Yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja adalah ... .
   a. angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja
   b. angkatan kerja dikurangi bukan angkatan kerja
   c. penduduk yang bekerja ditambah penduduk yang mencari kerja
   d. penduduk yang bekerja penuh ditambah penduduk yang menganggur
3. Pengisian lowongan pekerjaan akan memerlukan proses seleksi yang berarti membutuhkan waktu. Selama proses menunggu panggilah hingga diterima, seorang pelamar dikelompokkan sebagai penganggur ... .
   a. friksional
   b. struktural
   c. siklis
   d. musiman
4. Pengangguran tidak kentara sering juga disebut ... .
   a. *visible underemployement*
   b. *invisible underemployement*
   c. *disguised unemployement*
   d. *labor force*
5. Hubungan antara jumlah penduduk dengan angkatan kerja adalah ... .
   a. semakin banyak penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin banyak jumlah angkatan kerja
   b. jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga sebanding dengan jumlah angkatan kerja
   c. semakin banyak penduduk yang bersekolah dan mengurus angkatan kerja, semakin sedikit jumlah angkatan kerja
   d. semakin sedikit penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin sedikit jumlah angkatan kerja
6. Di bawah ini yang merupakan contoh peran pemerintah sebagai regulator adalah ... .
   a. sebagai pemilik saham BUMN
   b. sebagai pemerata barang dan jasa
   c. sebagai pembuat kebijakan ekspor impor
   d. sebagai pembiaya kegiatan negara
7. Kebijakan yang mengatur mengenai pajak disebut kebijakan ... .
   a. produksi
   b. fiskal
   c. ekspor
   d. moneter
8. Dominasi ekonoi oleh negara yang mematikan potensi dan daya kreasi sektor ekonomi lain di luar negara disebut ... .
   a. free fight liberalism
   b. monopoli swasta
   c. etatisme
   d. demokrasi
9. Semakin besar jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, semakin besar presentase pajaknya disebut sistem penghitungan pajak dengan sistem tarif ... .
   a. tetap
   b. progresif
   c. regresif
   d. proporsional
10. Pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Pendapat ini dikemukakan oleh ... .
    a. Prof. Sumitro Djoyohadikusumo
    b. Prof. Dr. Rachmad Soemitro
    c. Dr. Soeparman Soemahamidjaja
    d. Prof. S.I Djajadingrat
11. Ditinjau dari sifatnya, pajak dibedakan menjadi ... .
    a. pajak langsung dan tidak langsung
    b. pajak objektif, dan pajak subjektif
    c. pajak daerah dan pajak pusat
    d. pajak individual dan pajak kolektif
12. Pajak yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, berakhir dan berkala disebut ... .
    a. pajak negara
    b. pajak tidak langsung
    c. pajak daerah
    d. pajak langsung
13. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya disebut fungsi ... .
    a. pengaturan
    b. statuter
    c. *budgetair*
    d. *regulerend*
14. Permintaan dari pembeli yang disertai dengan kemampuan membayar harganya, tapi belum

melakukan transaksi disebut permintaan... .
a. absolut
c. efektif
b. potensial
d. kolektif

15. “Apabila harga suatu barang atau jasa maka penawaran pun naik, namun jika harga barang atau jasa turun, tingkat penawaran pun menjadi berkurang.” Hukum di atas adalah hukum ... .
a. permintaan
c. elastisitas
b. penawaran
d. hukum pasar

16. Arah penyusuran kurva penawaran yang *slope*-nya positif (akibat kenaikan harga) adalah.. .
a. menyusur dari kanan atas ke kiri atas
b. menyusur dari kiri bawah ke kanan atas
c. menyusur kanan bawah ke kiri atas
d. menyusur dari kanan bawah ke kiri bawah

17. Jika permintaan bertambah sedangkan penawaran tetap, harga barang cenderung akan ... .
a. turun
c. tetap
b. naik
d. tidak menentu

18. Menjelang Lebaran, umumnya harga-harga barang cenderung mengalami kenaikan. Hal it terjadi sebagai akibat dari ... .
a. perubahan selera masyarakat
b. perubahan pendapatan masyarakat
c. bertambahnya permintaan tanpa diikuti bertambahnya jumlah penawaran
d. kebijakan pedagang untuk menaikkan penawaran

19. Bentuk permintaan yang corak permintaannya kurang peka terhadap perubahan harga adalah ... .
a. buku komik
b. kebutuhan tersier
c. kebutuhan sekunder
d. kebutuhan tertier

20. Menjelang Lebaran, umumnya harga-harga barang cenderung mengalami kenaikan. Hal it terjadi sebagai akibat dari ... .
a. perubahan selera masyarakat
b. perubahan pendapatan masyarakat
c. bertambahnya permintaan tanpa diikuti bertambahnya jumlah penawaran
d. kebijakan pedagang untuk menaikkan penawaran

21. Bentuk permintaan yang corak permintaannya kurang peka terhadap perubahan harga adalah ... .
a. buku komik
b. kebutuhan tersier
c. kebutuhan sekunder
d. kebutuhan tertier

22. Iuran rakyat kepada pemerintah dengan mendapatkan jasa balik dari pemerintah yang secara langsung dapat difungsikan atau dirasakan disebut ... .
a. bea
b. cukai
c. subjek pajak
d. retribusi

23. Yang dimaksud sebagai biaya jabatan dalam penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap adalah ... .
a. biaya yang dibebankan kepada pegawai jika mendapatkan pangkat minimal direktur
b. biaya yang dikurangkan dari penghasilan orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memadang memiliki jabatan maupun tidak
c. biaya yangdibebankan kepada orang yang memiliki gaji lebih dari Rp 10.000.000,00
d. iuran yang terikat pada gaji seperti dana pensiun

24. Menurut lembaga yang memungut, pajak dibedakan menjadi ... .
a. pajak negara dan pajak daerah
b. pajak langsung dan pajak tidak langsung
c. pajak subjektif dan pajak objektif
d. pajak *budgetair* dan *regulerend*

25. Yang dimaksud permintaan inelastis adalah ... .
a. jika terjadi sedikit perubahan harga barang, akan terjadi perubahan permintaan yang sangat besar
b. walau terjadi perubahan harga yang sangat besar, perubahan permintaan hanya sedikit
c. jika perubahan harga proporsional dengan besarnya perubahan permintaan
d. jika terjadi perubahan permintaan pada tingkat harga yang sama

26. Perhatikan grafik di bawah ini!
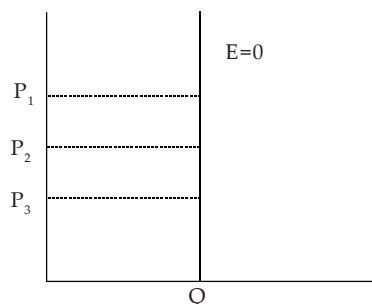
Grafik di atas menunjukkan kurva permintaan yang bersifat ... .
a. inelastis sempura
b. elastis uniter
c. elastis sempurna
d. inelastis

27. Perhatikan grafik di bawah ini!
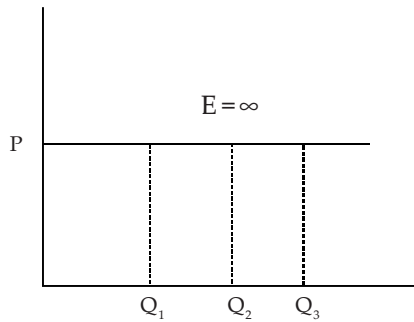
Pernyataan yang benar mengenai grafik di atas ini adalah ... .

a. permintaan meningkat jika terjadi penurunan harga
b. permintaan menurun drastis walau perubahan harga hanya sedikit
c. berapapun harga barang, jumlah permintaan adalah tetap
d. perubahan permintaan

II. Jawablah dengan singkat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pengangguran tidak kentara! Berikan contoh!
2. Apa yang harus dilakukan pemerintah, jika sumber daya manusia kurang dari segi kualitas? Jelaskan!
3. Apakah hubungan antara kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja? Jelaskan!
4. Apa yang terjadi jika angkatan kerja semakin besar, tapi perekonomian tidak berkembang? Jelaskan!
5. Apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional? Jelaskan dan beri contoh!
6. Jelaskan yang kamu ketahui mengenai teori klasik Adam Smith!
7. Jelaskan yang kamu ketahui tentang sistem ekonomi tradisional!
8. Apakah fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia dipelihara oleh pemerintah? Berilah pendapatmu dan sertakan contoh!
9. Jelaskan kegiatan pemerintah dalam bidang distribusi!
10. Apa yang dimaksud dengan sektor usaha informal?
11. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan pajak!
12. Jelaskan fungsi sosial dari pajak!
13. Apakah perbedaan antara pajak daerah dan pajak pusat? Jelaskan!
14. Sebutkan yang dimaksud dengan "*self assesment system*"? Jelaskan!
15. Handoyo adalah seorang karyawan di PT Maju Genting yang memiliki gaji Rp 30.000.000 per tahun. Ia masih bujang dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah PPh yang harus ia bayar dalam setahun?
16. Apa yang dimaksud dengan hubungan fungsional dalam hubungan ekonomi? Jelaskan dan berikan contoh!
17. Apakah perbedaan antara permintaan kolektif dan permintaan individu?
18. Gambarkan kurva penawaran inelastis! Jelaskan!
19. Apakah yang dimaksud dengan '*ceteris paribus*'?
20. Jelaskan hubungan antara harga, permintaan dan penawaran!

GLOSARIUM

absolut : tidak terbatas; mutlak

aerosol : alat penyemprot (anti serangga, minyak wangi, dan sebagainya)

amandemen : usul perubahan UU yang dibicarakan dalam DPR

anomie : istilah dalam sosiologi untuk menggambarkan keadaan sosial di mana nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat saling bertentangan satu sama lain

objek pajak : hal yang dikenakan pajak, yaitu peristiwa, keadaan, perbuatan hasil tertentu. Disebut juga dasar pajak

degradasi : penurunan (terdegradasi = terkurangi)

diversifikasi : penganekaragaman; membuat keanekaragaman

d.p.l : di atas permukaan laut

eksodus : perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negara) oleh penduduk secara besar-besaran

ekosistem : komunitas organik terdiri atas tumbuhan, hewan serta habitatnya

Evakuasi : pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah berbaha-ya. Misalnya bahaya perang, atau bencana alam. Jika dipandang sudah aman, penduduk dapat kembali ke tempat asalnya. Evakuasi dapat besifat nasional atau internasional.

ex officio : berperan/terlibat secara tak langsung

fungsi manifes : fungsi pranata sosial yang disadari dan menjadi harapan masyarakat secara keseluruhan

fungsi laten : fungsi pranata sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama keseluruhan masyarakat

habitat : tempat kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi ter-tentu pada permukaan bumi

iming-iming : sesuatu untuk membujuk/memikat hati *(bahasa Jawa)*

incest taboo : larangan hubungan perkawinan dengan anggota keluarga yang sangat dekat

institusionalisasi : proses pembentukan pranata sosial dari sejumlah norma yang ada

intensifikasi : meningkatkan kegiatan menjadi lebih hebat (misal intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi)

internalisasi : proses penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam diri atau batin seseorang

kelangkaan : keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan barang kebutuhan

keluarga batih : disebut juga *nuclear family*, yaitu satuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak

keluarga luas : satuan keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga batih

komunitas : kelompok organisme yang hidup dan berinteraksi di dalam daerah ter-tentu

labelling : tindakan memberi julukan, cap kepada orang

labil : tidak mantap (tidak kokoh) cenderung berubah

mode/fashion : adat yang berisi kebiasaan yang batu atau sementara

nglaju (bhs Jawa) : pulang pergi ke suatu tempat dalam satu hari *(commutter, Ing.)*

nomaden : hidup secara berpindah-pindah

norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masya-rakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendali tingkah laku

penawaran : jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu

permintaan : jumlah unit barang yang akan dibeli di pasar tertentu pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu

politik harga : keputusan mengenai pengaturan harga barang-barang yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Politik harga ini biasanya dilakukan oleh pemerintah

reklamasi pantai : penimbunan pantai untuk dijadikan daratan untuk dimanfaatkan

senyawa freon : senyawa organik sintetis yang mudah diubah dari uap ke cairan dan sebaliknya, digunakan dalam kulkas, AC, dan aerosol

sinar ultraviolet : sinar dari radiasi elektromagnetik matahari yang tidak tampak oleh mata

strategis : baik letaknya (berhubungan dengan tempat)

subjek pajak : orang atau lembaga yang wajib membayar pajak kepada negara atau disebut wajib pajak

terumbu : dangkalan di laut (tidak terlalu luas) terjadi dari gundukan batuan, dimanfaatkan sebagai habitat tumbuhan dan hewan laut.

tradisi : adat yang melembaga dan sudah berjalan lama sekali secara turun-temurun

Daftar Pustaka

Asean Secretariat. 2007. *Asean Statistical Pocket Book 2006*. www.aseansec.org

-. 1994. *Ilmu Pengetahuan Populer (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Widyadara.

-. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia.*Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). 2001. *Atlas Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Berutu, J, *et al*. 1988. *Geografi Program Inti.* Medan: Monora.

Bouliere, F. 1985. *Alam dan Margasatwa*. Pustaka Alam Life. Jakarta: Tira Pustaka.

Chalfant, H. Paul dan Emely LaBeff. 1988. *Understanding People and Social Life: Introduction to Sociologi*. USA: St. Paul.

Daldjoeni, N. 1997. *Pengantar Geografi untuk Mahasiswa dan Guru Sekolah*. Bandung: Penerbit PT Alumni.

Departemen P dan K. 1985. *Batuan dan Mineral*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT Widyadara.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan OBOR Indonesia.

________. 1995. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pembangunan.

Gilarso, T. 1985. *Dunia Ekonomi Kita.* Yogyakarta: Kanisius.

________, 1986. *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar I.* Yogyakarta: Kanisius.

________, 1992. *Dunia Ekonomi Kita 3A, Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.

________, 1992. *Dunia Ekonomi Kita 2B, Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.

Grolier International. 1992. *Oxford Ensiklopedi Pelajar.* Jakarta: Oxford University Press/ Widyadara.

Haviland, William A. 1999. *Antropologi Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.

Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

_______, *1993. Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Ischak. *Berbagai Jenis Peta dan Kegunaannya*. Yogyakarta: Liberty.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Katili, JA. -. *Pengantar Geologi Umum (jilid 1 dan 2)*. Bandung: BPG.

Lawang, Robert M.Z. 1996. *Sosiologi 1. Pengantar. Diktat Kuliah STISIP Widuri*. Jakarta: STISIP Widuri.

Legge, J.D. 1972. *Soekarno, A Political Biography*. Harmondsworth.

Luth, Nursal dan Daniel Fernandes. 2000. *Sosiologi 1. Untuk Siswa SMU Kelas 2*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.

_______, 2000. *Sosiologi 2. Untuk Siswa SMU Kelas 3*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.

Luth, Nursal. 1992. *Kamus Sosiologi dan Antropologi*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.

Mansyurdin S.H. 1991. *Sosiologi (Suatu Pengenalan Awal)*. Medan: Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.

Masselman, George. 1963. *The Cradel of Colonialism*. New Haven & London: Yale University Press.

Maynard, Christopher. 1985. *Planet Bumi.* Jakarta: Widyadara.

Moedjanto, G., MA., Drs., *Indonesia Abad ke-20, Jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.

Nagazumi Akira. 1972. *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of Budi Utomo, 1908 - 1918*. Tokyo: Institute of Developing Economic.

Partadiredja, Ace. 1981. *Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Poesponegoro, Marwati Djoenoed dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia V dan VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Poloma, Margareth M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Prikandito, A. 1980. *Kartografi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Pringgodigdo, A.K. 1949. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Pusat Kurikulum-Balitbang Depdiknas. 2003. *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta.

Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern* (terjemahan dari *A History of Modern Indonesia* oleh Drs. Dharmono Hardjowidjono), cet. ke-5. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sandi, I Made. 1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Jurusan FMIPA Universitas Indonesia: Puri Margasari.

Sekretariat Negara. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945 -1949*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Sills, David L. (*editor*). 1972. *International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol 15*. New York: The Macmillan Company & the Free Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi. Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarsono, Roelijan. 1978. *Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suharsono, Sagir. 1985. *Ekonomi Indonesia Menghadapi Pelita IV*. Bandung: Armico.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

------------------. 2006. *Pengantar Ekonmi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

------------------. 2006. *Pengantar Ekonmi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sumaatmadja, N. 1988. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Supardi, I. 1984. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.

Susanto, Astrid S. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Penerbit Binacipta.

Veeger, Karel J. dkk. 1992. *Pengantar Sosiologi. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK).

Tieh, Philip. 2000. *Geography Essentials*. Singapore: Pearson Education Asia Pte Ltd.

Tim Geografi SMU. 2000. *Geografi untuk SMU Kelas 1*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.

Tjasyono, Bayong. 1986. *Iklim dan Lingkungan*. Bandung: Cendikia Jaya Utama.

Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang No.9/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No.10/1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Undang-undang No.12/1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Undang-undang No.12/1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Winardi. 1979. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.

Yamin, Muhammad, Prof. 1956. *Lukisan Sedjarah*. Jakarta: Djambatan.

http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/magnitude.html.

http://mapping.usgs.gov/mac/isb/pubs/booklets/topo/topo.html.

http://www.runet.edu/-geog-web/gejobs.html.

http://www.wikipedia.co.id

Indeks Nama

Indeks Subjek